



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**NOMOR 3 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**

**(R P J M D)**

**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**TAHUN 2017-2022**

**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**TAHUN 2018**



GOVERNOR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
- b. bahwa untuk menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017-2022.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang

selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

## BAB II

### KEDUDUKAN RPJMD

#### Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
- (2) RPJMD Tahun 2017-2022, disusun berdasarkan visi, misi dan program pembangunan Kepala Daerah.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
  - a. PD dalam menyusun Renstra-PD;
  - b. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;
  - c. penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

### BAB III

#### DOKUMEN RPJMD

##### Pasal 3

- (1) Dokumen RPJMD Tahun 2017-2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - BAB I : Pendahuluan;
  - BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
  - BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
  - BAB IV : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah;
  - BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
  - BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
  - BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
  - BAB VIII: Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - BAB IX : Penutup.

### BAB IV

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD

##### Pasal 4

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD mencakup pelaksanaan RPJMD dan Renstra PD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Bappeda.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 10 April 2018

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 10 April 2018

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Ttd.

GATOT SAPTADI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: ( 3,97/2018 )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 3 TAHUN 2018  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017-2022

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 5 Ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 263 Ayat (3) dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD Tahun 2017 – 2022 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun setelah pelantikan Gubernur, yang dimaksudkan untuk memberikan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah

Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2017 – 2022 yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis, dan berkesinambungan.

Ruang lingkup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah meliputi kedudukan RPJMD, dokumen RPJMD, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dengan melibatkan masyarakat. Prinsip Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan dengan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

RPJMD Tahun 2017–2022 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah serta kebijakan dan strategi pembangunan daerah tahun 2018-2022;
- b. sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) antara tahun 2018 sampai tahun 2022;
- c. sebagai tolak ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah DIY antara tahun 2018 sampai tahun 2022;
- d. sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat daerah (PD) dalam penyusunan rencana strategis tahun 2017 sampai tahun 2022, termasuk dalam menentukan program-program prioritas;
- e. sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh Perangkat Daerah Pemerintah daerah DIY dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
- f. menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembanguna daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan;

- g. sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Daerah DIY dalam mengimplementasikan kebijakan, program, dan kegiatan operasional tahunan; dan
- h. sebagai instrumen untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bersama para pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan daerah yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan semangat keistimewaan di dalamnya.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 3



LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 3 TAHUN 2018  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN 2017-2022



# Daftar Isi

<b>Daftar Isi .....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
I.1 Latar Belakang.....	I-1
I.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	I-2
I.3 Hubungan Antar Dokumen .....	I-4
I.4 Maksud dan Tujuan.....	I-6
I.5 Sistematika Dokumen RPJMD .....	I-7
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .....</b>	<b>II-1</b>
II.1 Aspek Geografi dan Demografi .....	II-2
II.1.1Aspek Geografi.....	II-3
II.1.2Aspek Demografi.....	II-29
II.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	II-31
II.2.1Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .....	II-32
II.2.2Fokus Kesejahteraan Sosial.....	II-42
II.2.3Fokus Seni Budaya dan Olahraga.....	II-52
II.3 Aspek Pelayanan Umum .....	II-60
II.3.1Fokus Layanan Urusan Wajib .....	II-61
II.3.2Fokus Layanan Urusan Pilihan .....	II-155
II.3.3Fokus Layanan Urusan Penunjang .....	II-174
II.3.4Fokus Layanan urusan Keistimewaan .....	II-185
II.4 Aspek Daya Saing .....	II-188
II.4.1Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita .....	II-189
II.4.2Nilai Tukar Petani (NTP) .....	II-190
II.4.3Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Per Kapita .....	II-191

II.4.4 Rasio Ekspor-Impor terhadap PDRB .....	II-192
II.4.5 Angka Kriminalitas .....	II-193
II.4.6 Tingkat Ketergantungan/Rasio Ketergantungan .....	II-194
<b>BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH .....</b>	<b>III-1</b>
III.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu .....	III-1
III.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD .....	III-1
III.1.2 Neraca Daerah .....	III-24
III.1.3 Kinerja Pelaksanaan Urusan Keistimewaan .....	III-32
III.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu .....	III-32
III.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran .....	III-32
III.2.2 Analisis Pembiayaan Daerah .....	III-33
III.2.3 Kinerja BUMD di DIY .....	III-34
III.3 Kerangka Pendanaan .....	III-47
III.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja .....	III-47
III.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan .....	III-71
<b>BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH .....</b>	<b>IV-1</b>
IV.1 Telaah RTRW .....	IV-1
IV.1.1 Telaah Terhadap Rencana Struktur Ruang .....	IV-1
IV.1.2 Telaah Terhadap Rencana Pola Ruang .....	IV-3
IV.1.3 Telaah Terhadap Struktur Ruang .....	IV-14
IV.1.4 Telaah Terhadap Pola Ruang .....	IV-16
IV.1.5 Tata Ruang dan RZWP3K .....	IV-17
IV.1.6 Kawasan Konservasi .....	IV-21
IV.2 Telaah RPJPD .....	IV-68
IV.3 Telaah RPJMN 2005-2025 .....	IV-72
IV.4 Telaah RPJMD Daerah Lain .....	IV-74
IV.4.1 RPJMD Jawa Tengah 2013-2018 .....	IV-74
IV.5 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	IV-76
IV.5.1 Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan DIY dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) .....	IV-78

IV.5.2 Kebijakan Internasional Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim.....	IV-80
IV.6 Permasalahan Pembangunan .....	IV-82
IV.6.1 Permasalahan Pokok.....	IV-82
IV.6.2 Permasalahan Per Urusan .....	IV-86
IV.7 Analisis Isu Strategis .....	IV-111
IV.7.1 Tingginya Angka Kemiskinan .....	IV-111
IV.7.2 Tingginya Ketimpangan Wilayah .....	IV-112
IV.7.3 Pencemaran, Kerusakan Alam, dan Resiko Bencana Alam.....	IV-114
IV.7.4 Belum Optimalnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tingginya Alih Fungsi Lahan Pertanian.....	IV-116
IV.7.5 Penyediaan Infrastruktur Dasar di Kawasan Pesisir Selatan Belum Optimal .....	IV-117
IV.7.6 Pengembangan Pendidikan Karakter dan Pendidikan Vokasi .....	IV-119
IV.7.7 Pelestarian Budaya Baik Benda Maupun Tak Benda .....	IV-120
IV.7.8 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan ( <i>Good Governance</i> ) .....	IV-120
IV.7.9 Pertumbuhan Ekonomi yang Belum Inklusif .....	IV-121
<b>BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN.....</b>	<b>V-1</b>
V.1 Visi .....	V-1
V.2 Misi.....	V-12
V.3 Tujuan dan Sasaran .....	V-14
V.4 Keselerasan RPJMD 2017-2022 dengan RPJMN 2015-2019 .....	V-16
<b>BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH .....</b>	<b>VI-1</b>
VI.1 Strategi .....	VI-1
VI.1.1 Capaian Sasaran Pembangunan Pemda DIY 2012-2017 .....	VI-1
VI.1.2 Kondisi Daerah, Capaian Pembangunan, dan Isu-Isu Strategis Pembangunan Nasional .....	VI-2
VI.1.3 Analisis SWOT .....	VI-6
VI.1.4 Rumusan Strategi.....	VI-17
VI.2 Arah Kebijakan .....	VI-19
VI.3 Tahapan Indikasi Tema Tahunan RPJMD 2017-2022 .....	VI-25

VI.4	Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan .....	VI-26
VI.4.1	Proyeksi Nilai PDRB Kabupaten dan Kota se-DIY .....	VI-26
VI.4.2	Proyeksi Nilai IPM Kabupaten dan Kota Se-DIY .....	VI-28
VI.4.3	Proyeksi Tingkat Kemiskinan Kabupaten dan Kota Se-DIY.....	VI-29
VI.5	Arah Kebijakan Pembangunan Keistimewaan.....	VI-30
VI.6	Program Pembangunan Daerah .....	VI-38
VI.7	Program - Program Strategis DIY.....	VI-48
<b>BAB VII</b>	<b>KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>VII-1</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH .....</b>	<b>VIII-1</b>
<b>BAB IX</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>IX-1</b>
IX.1	Pedoman Transisi .....	IX-1
IX.2	Kaidah Pelaksanaan .....	IX-2

## Daftar Tabel

Tabel II-1	Pembagian Wilayah DIY Menurut Kabupaten/Kota.....	II-4
Tabel II-2	Jumlah Desa/ Kelurahan Menurut Topografi Wilayah.....	II-5
Tabel II-3	Potensi Ketersediaan Air (dalam Juta m <sup>3</sup> ).....	II-11
Tabel II-4	Debit Rerata Sungai di DIY.....	II-11
Tabel II-5	Penggunaan Lahan di DIY.....	II-13
Tabel II-6	Luasan Lahan Kawasan Lindung di DIY.....	II-15
Tabel II-7	Tingkat Ancaman Bencana di Wilayah DIY.....	II-22
Tabel II-8	Potensi Luas Banjir di Wilayah DIY .....	II-23
Tabel II-9	Potensi Luas Banjir Bandang di Wilayah DIY .....	II-24
Tabel II-10	Potensi Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Wilayah DIY.....	II-24
Tabel II-11	Potensi Kekeringan di Wilayah DIY .....	II-25
Tabel II-12	Potensi Letusan Gunungapi di Wilayah DIY .....	II-25
Tabel II-13	Potensi Dampak Cuaca Ekstrim di Wilayah DIY.....	II-26
Tabel II-14	Potensi Tanah Longsor di Wilayah DIY .....	II-26
Tabel II-15	Potensi Wilayah Terdampak Gempa Bumi di DIY .....	II-27
Tabel II-16	Potensi Wilayah Terdampak Tsunami di DIY.....	II-27
Tabel II-17	Potensi Bahaya Epidemi dan Wabah Penyakit di DIY .....	II-28
Tabel II-18	Potensi Wilayah Terdampak Kegagalan Teknologi di DIY .....	II-28
Tabel II-19	Potensi Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah DIY .....	II-28
Tabel II-20	Catatan Data Bencana di DIY Tahun 1885-2016 .....	II-29
Tabel II-21	Presentase Penduduk Menurut Kelompok Umur di DIY Tahun 1971-2016.....	II-30
Tabel II-22	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2010-2015.....	II-30
Tabel II-23	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2010-2015.....	II-31
Tabel II-24	PDRB DIY ADHB menurut Lapangan Usaha,2012-2016 (Juta Rupiah) .....	II-33

Tabel II-25	Nilai PDRB ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha, 2012-2016 (Juta Rupiah).....	II-34
Tabel II-26	Presentase Distribusi PDRB DIY ADHB menurut Lapangan Usaha, 2011-2015.....	II-35
Tabel II-27	Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHB, 2012-2016.....	II-36
Tabel II-28	Nilai PDRB ADHK 2010 menurut Penggunaan, 2012-2016 (Juta Rupiah).....	II-36
Tabel II-29	Perkembangan Inflasi Bulanan Kota Yogyakarta Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2010-2016 .....	II-37
Tabel II-30	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin 2012-2017.....	II-39
Tabel II-31	Jumlah Kejahatan yang terselesaikan .....	II-42
Tabel II-32	IPM DIY Menurut Komponen Tahun 2014-2016 .....	II-43
Tabel II-33	IPM Kabupaten/kota di DIY Tahun 2014-2016.....	II-43
Tabel II-34	Jumlah Organisasi Kesenian dan Budaya di DIY, Tahun 2016 .....	II-54
Tabel II-35	Rasio Grup kesenian dan gedung kesenian di DIY, Tahun 2012-2016 .....	II-55
Tabel II-36	Rasio Grup kesenian dan gedung kesenian di DIY, Tahun 2012-2016 .....	II-55
Tabel II-37	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya di DIY, Tahun 2012-2016 ..	II-55
Tabel II-38	Klasifikasi Kelompok Seni, Tahun 2016.....	II-56
Tabel II-39	Perkembangan Sistem Nilai Budaya di DIY, 2012-2016.....	II-57
Tabel II-40	Perkembangan Organisasi dan Pelaku Seni di DIY Tahun 2012-2016 .....	II-58
Tabel II-41	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya di DIY dan Kabupaten/ Kota Tahun 2017.....	II-59
Tabel II-42	Rasio Klub Olahraga dan Gedung Olahraga di DIY, Tahun 2012-2016	II-59
Tabel II-43	Data Pendidikan PAUD D.I.Yogyakarta .....	II-64
Tabel II-44	Perkembangan Jumlah Posyandu di DIY, Tahun 2013-2016 .....	II-68
Tabel II-45	Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk Tahun 2009-2015.....	II-68
Tabel II-46	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk DIY.....	II-69
Tabel II-47	Jumlah Rumah Sakit, Tempat Tidur, dan BOR Berdasarkan Kabupaten/Kota di DIY .....	II-69
Tabel II-48	Jumlah dan Rasio Dokter Umum, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi per 100.000 Penduduk DIY Tahun 2011-2015.....	II-70

Tabel II-49	Jumlah dan Rasio Perawat, Bidan, Tenaga Farmasi, dan Tenaga Gizi Per 100.000 Penduduk di DIY, 2013-2015.....	II-71
Tabel II-50	Ibu Hamil Resiko Tinggi di DIY menurut Kabupaten/Kota, 2009-2011.....	II-72
Tabel II-51	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan menurut Kabupaten/Kota di DIY .....	II-72
Tabel II-52	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) menurut Kabupaten/Kota di DIY .....	II-73
Tabel II-53	Daerah Irigasi di DIY .....	II-77
Tabel II-54	Cakupan Pelayanan Air Minum Kabupaten Kota di DIY, Tahun 2016.....	II-79
Tabel II-55	Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik di DIY, Tahun 2016 ....	II-79
Tabel II-56	Cakupan Layanan Tempat Pengelolaan Akhir Sampah di DIY, Tahun 2016.....	II-79
Tabel II-57	Kondisi Jalan Provinsi, Tahun 2016 .....	II-80
Tabel II-58	Daftar Ruas Jalan Provinsi, Tahun 2016 .....	II-80
Tabel II-59	Data Rumah Tidak Layak Huni di DIY, Tahun 2016.....	II-84
Tabel II-60	Penanganan Kawasan Kumuh Berdasarkan Kewenangan .....	II-86
Tabel II-61	Jumlah Linmas dan Rasio Linmas per Desa/kelurahan di DIY Tahun 2014.....	II-88
Tabel II-62	Jumlah Jaga Warga menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2015-2016 ..	II-89
Tabel II-63	Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di DIY .....	II-90
Tabel II-64	Jenis dan Jumlah PSKS di DIY 2012-2016 .....	II-91
Tabel II-65	Nama Balai/ Panti Sosial dan Daya Tampungnya, Tahun 2012-2016.....	II-92
Tabel II-66	Perkembangan Penduduk Usia Kerja di DIY (dalam ribu orang), Tahun 2013-2017 .....	II-93
Tabel II-67	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat PendidikanTahun 2011-2014..	II-95
Tabel II-68	Tingkat Penangguran Terbuka di DIY Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Tahun 2014-2015.....	II-100
Tabel II-69	Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun 2013-2015 .....	II-100
Tabel II-70	Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun 2013-2015 .....	II-101

Tabel II-71	Capaian IDG DIY Tahun 2010-2015.....	II-102
Tabel II-72	Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Kelompok Umur dan Lokasi.....	II-102
Tabel II-73	Status Mutu Air Sungai DIY dengan Metode Storet .....	II-112
Tabel II-74	Hasil Perhitungan Nilai Indeks Standar Pencemaran Udara (SPU) Gabungan Parameter DIY, Tahun 2015 .....	II-114
Tabel II-75	Angka Penduduk DIY Yang Telah Melakukan Perekaman KTP Elektronik.....	II-116
Tabel II-76	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak di DIY.....	II-117
Tabel II-77	Jumlah LPMD dan LPMK Menurut Kabupaten/Kota di DIY .....	II-117
Tabel II-78	Jumlah Posyandu Aktif DIY Tahun 2014-2016 .....	II-118
Tabel II-79	Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Tahun 2014-2016.....	II-119
Tabel II-80	Jumlah Desa/kelurahan di DIY .....	II-119
Tabel II-81	Jumlah Partisipasi Keswadayaan Masyarakat Tahun 2016 .....	II-119
Tabel II-82	Proyeksi Parameter Kependudukan Tahun 2010-2035.....	II-121
Tabel II-83	Rasio Akseptor KB Tahun 2010-2025.....	II-123
Tabel II-84	Pernikahan Dini Tahun 2015-2016 .....	II-123
Tabel II-85	Sarana Pelayanan Keluarga Berencana di DIY Tahun 2010 – 2015 ..	II-125
Tabel II-86	Petugas Pelayanan Keluarga Berencana di DIY Tahun 2010 – 2014.	II-126
Tabel II-87	Jumlah KK menurut Tahapan Keluarga Sejahtera di DIY Tahun 2010-2014 .....	II-126
Tabel II-88	Lembaga Bina Keluarga Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2013-2014.....	II-127
Tabel II-89	Data Kendaraan Angkutan AKDP DIY .....	II-130
Tabel II-90	Jumlah Angkutan Taksi .....	II-131
Tabel II-91	Jumlah Angkutan Perkotaan.....	II-132
Tabel II-92	Jumlah Penumpang Perkotaan Terangkut Tahun 2008-2016 ....	II-132
Tabel II-93	Sengketa Informasi .....	II-135
Tabel II-94	Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2012-2016 .....	II-136
Tabel II-95	Perkembangan Jumlah UKM Tahun 2012-2016 .....	II-137
Tabel II-96	Perkembangan Investasi di DIY.....	II-138
Tabel II-97	Jumlah Kelembagaan Pemuda dan Olah Raga dan Sarana Olah Raga di DIY.....	II-140

Tabel II-98	Perkembangan Aset-Aset Kebudayaan di DIY Tahun 2010-2016 ....	II-142
Tabel II-99	Jumlah Peninggalan Sejarah Kepurbakalaan, 2012-2016 .....	II-143
Tabel II-100	Penanganan Cagar Budaya.....	II-143
Tabel II-101	Jenis Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Tahun 2012-2016 ....	II-145
Tabel II-102	Persebaran Benda, Bangunan, dan Situs Cagar Budaya Tahun 2016.....	II-145
Tabel II-103	Penanganan Cagar Budaya Tahun 2012-2016 .....	II-146
Tabel II-104	Daftar Kawasan Cagar Budaya di DIY .....	II-146
Tabel II-105	Daftar Museum Anggota Bahramus DIY .....	II-147
Tabel II-106	Daftar Museum Baru di DIY.....	II-148
Tabel II-107	Perkembangan Sistem Nilai Budaya di DIY tahun 2012-2016....	II-148
Tabel II-108	Desa dan Kelurahan Budaya di DIY Berdasarkan SK No 262/Kep/2016 .....	II-149
Tabel II-109	Jumlah Perpustakaan Desa Tiap-Tiap Kabupaten Kota Hingga Tahun 2016.....	II-151
Tabel II-110	Jumlah Pustakawan DIY Tahun 2017.....	II-152
Tabel II-111	Jumlah Pengunjung ke Perpustakaan Tahun 2011-2016 .....	II-152
Tabel II-112	Jumlah Koleksi Buku di Perpustakaan .....	II-152
Tabel II-113	Data Kearsipan DIY Hingga Tahun 2016 .....	II-154
Tabel II-114	Data Pengelolaan Arsip Statis Hingga Tahun 2016 .....	II-154
Tabel II-115	Data Alih Media Hingga Tahun 2016.....	II-155
Tabel II-116	Data Arsip Inaktif Hingga Tahun 2016.....	II-155
Tabel II-117	Perkembangan Lama Tinggal Wisatawan dan Jumlah Wisatawan di DIY, Tahun 2012-2016 .....	II-156
Tabel II-118	Luas Lahan Sawah Beririgasi dan Non Irigasi di DIY .....	II-159
Tabel II-119	Produksi Tanaman Pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2016 (Ton).....	II-159
Tabel II-120	Populasi Ternak DIY Tahun 2012-2016 .....	II-160
Tabel II-121	Luas Hutan di DIY Berdasarkan Kewilayahan Tahun 2016 .....	II-161
Tabel II-122	Produksi Daun dan Minyak Kayu Putih di DIY , Tahun 2012-2016....	II-161
Tabel II-123	Perkembangan Luas Komoditas Perkebunan Strategis di DIY, Tahun 2012-2016 .....	II-162
Tabel II-124	Data Jenis Energi Baru Terbarukan .....	II-165

Tabel II-125	Perkembangan Ekspor di DIY, Tahun 2012-2016 .....	II-167
Tabel II-126	Perkembangan Jumlah SIUP Berdasarkan Golongan Usaha di DIY, Tahun 2012-2016.....	II-167
Tabel II-127	Perkembangan Jumlah Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di DIY per Kabupaten Kota, Tahun 2012-2016 .....	II-168
Tabel II-128	Perkembangan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di DIY Berdasarkan Bentuk Perusahaan, Tahun 2012-2016 .....	II-168
Tabel II-129	Perkembangan Toko Modern dan Pasar Tradisional, Tahun 2012-2016 .....	II-168
Tabel II-130	Perkembangan IKM di DIY, Tahun 2012-2016.....	II-169
Tabel II-131	Jumlah Animo Masyarakat dan Pendaftar Transmigrasi di DIY Tahun 2012-2016.....	II-170
Tabel II-132	Realisasi Pelaksanaan Transmigrasi Menurut Daerah Asal di DIY, Tahun 2011-2016.....	II-171
Tabel II-133	Perkembangan dan Distribusi Transmigran Asal DIY Menurut Provinsi Tujuan, Tahun 2013-2016 .....	II-171
Tabel II-134	Data kesenjangan antara eksisting dengan kebutuhan pegawai Tahun 2017 .....	II-176
Tabel II-135	Perkembangan Jumlah PNSD Tahun 2012-2017 .....	II-178
Tabel II-136	Data Pejabat Pensiun 2017 s/d 2020.....	II-178
Tabel II-137	Kinerja Capaian Fisik dan Keuangan Per Urusan 2013-2017 .....	II-185
Tabel II-138	Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan menurut Golongan Pengeluaran di DIY, 2014-2015 .....	II-190
Tabel II-139	Pengeluaran Per kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas di DIY.....	II-192
Tabel II-140	Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan menurut kelompok Bukan Makan di DIY, 2010-2015.....	II-192
Tabel II-141	Jumlah Tindak Kejahatan menurut Jenis Kasus di DIY, 2008-2014... II-193	
Tabel II-142	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah .....	II-195
Tabel III-1	Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2016.....	III-3
Tabel III-2	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah DIY tahun 2012 – 2016 .....	III-6
Tabel III-3	Dana Perimbangan DIY 2012-2016 (dalam jutaan rupiah) .....	III-9
Tabel III-4	Perubahan Postur Transfer ke Daerah dan Dana Desa .....	III-9
Tabel III-5	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah DIY 2012-2016 (dalam jutaan rupiah) .....	III-12

Tabel III-6	Perkembangan Rasio Keuangan Pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 – 2015 .....	III-15
Tabel III-7	Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2016 .....	III-17
Tabel III-8	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Total Belanja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 .....	III-18
Tabel III-9	Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2012-2016 .....	III-19
Tabel III-10	Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2012-2016 Daerah Istimewa Yogyakarta .....	III-21
Tabel III-11	Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Neraca Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2012-2016 .....	III-27
Tabel III-12	Alokasi Besaran Anggaran Keistimewaan per Urusan Tahun 2013-2017 .....	III-32
Tabel III-13	Perkembangan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2013-2017 .....	III-32
Tabel III-14	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun Anggaran 2014-2016 .....	III-33
Tabel III-15	Rencana Rincian Pemenuhan Modal Disetor Pemda DIY pada PT Bank BPD DIY .....	III-36
Tabel III-16	Peningkatan Kontribusi PT Bank BPD DIY terhadap PAD .....	III-36
Tabel III-17	Perhitungan Asumsi/Rencana Kontribusi (deviden PT AMI terhadap PAD 2018-2023 .....	III-37
Tabel III-18	Asumsi/Rencana Deviden yang Akan Disetor sebagai PAD .....	III-38
Tabel III-19	Proyeksi Deviden dari Tahun 2018-2023 .....	III-38
Tabel III-20	Penyertaan Modal BUMD DIY .....	III-40
Tabel III-21	Defisit Riil Anggaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2012-2016 .....	III-41
Tabel III-22	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2012-2016 .....	III-42
Tabel III-23	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2011-2015 .....	III-43
Tabel III-24	Pengeluaran Periodik, Wajib, dan Mengikat Serta Prioritas Utama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2011 – 2015 .....	III-45
Tabel III-25	Sisa Lebih Riil Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2015 .....	III-46
Tabel III-26	Asumsi APBD .....	III-49
Tabel III-27	Pertumbuhan PBB-KB 2013-2016 .....	III-53
Tabel III-28	Proyeksi PBB-KB 2012-2022 .....	III-55

Tabel III-29	Proyeksi BBN-KB 2012-2022 .....	III-56
Tabel III-30	Proyeksi PKB 2012-2022 .....	III-56
Tabel III-31	Proyeksi Pajak Air Permukaan 2012-2022 .....	III-57
Tabel III-32	Proyeksi Pajak Rokok 2014-2022 .....	III-57
Tabel III-33	Proyeksi Total Retribusi 2010-2022 (dalam jutaan rupiah) .....	III-59
Tabel III-34	Jenis-Jenis Retribusi .....	III-59
Tabel III-35	Proyeksi Retribusi Jasa Umum 2012-2022 .....	III-60
Tabel III-36	Proyeksi Retribusi Jasa Usaha 2012-2022 .....	III-61
Tabel III-37	Proyeksi Retribusi Perijinan Tertentu 2012 - 2022 .....	III-61
Tabel III-38	Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018-2022 Daerah Istimewa Yogyakarta .....	III-66
Tabel III-39	Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupiah) .....	III-71
Tabel III-40	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta .....	III-72
Tabel III-41	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan .....	III-72
Tabel IV-1	Hasil Telaah Struktur Ruang terhadap Perda 2 tahun 2010 tentang RTRW DIY .....	IV-5
Tabel IV-2	Hasil Telaah Pola Ruang terhadap RTRW DIY .....	IV-8
Tabel IV-3	Kontribusi PDRB Kawasan Pantai Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Provinsi (%) .....	IV-18
Tabel IV-4	Hasil Telaah Struktur Ruang Draft Raperda Review RTRW DIY ...	IV-25
Tabel IV-5	Hasil Telaah Pola Ruang Draft Raperda Review RTRW DIY .....	IV-38
Tabel IV-6	Sasaran RPJMN 2015-2019 untuk DIY Tahun 2017-2019 .....	IV-74
Tabel IV-7	Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah RPJMD Jawa Tengah 2013-2018 yang berimplikasi pada DIY .....	IV-75
Tabel IV-8	Ketekaitan Isu-isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan DIY dengan TPB .....	IV-79
Tabel IV-9	Sasaran-sasaran yang diamanatkan dalam kebijakan Energi Nasional Tahun 2015-2050 .....	IV-105
Tabel IV-10	Perkembangan Indeks Gini per Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2014- 2016 .....	IV-113
Tabel IV-11	Persentase Penduduk Miskin per Kabupaten/Kota di DIY (per Maret) .....	IV-114
Tabel IV-12	Nilai PDRB Per Kapita menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku, 2012 - 2016 (rupiah) .....	IV-114
Tabel V-1	Penekanan 5 Tahun RPJPD DIY dan RPJMD DIY .....	V-2

Tabel V-2	Perumusan Visi.....	V-6
Tabel V-3	Penjelasan Visi.....	V-10
Tabel V-4	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....	V-15
Tabel V-5	Penyelarasan Visi-Misi-Tujuan RPJMN dan RPJMD DIY .....	V-18
Tabel V-6	Penyelarasan Sasaran RPJMD DIY dan RPJMN.....	V-20
Tabel VI-1	Analisis SWOT Misi 1 .....	VI-9
Tabel VI-2	Analisis SWOT Misi 2 .....	VI-15
Tabel VI-3	Perumusan Strategi.....	VI-17
Tabel VI-4	Perumusan Arah Kebijakan Daerah .....	VI-20
Tabel VI-5	Indikasi Tema Tahunan RPJMD 2017-2022 .....	VI-25
Tabel VI-6	Proyeksi PDRB Kabupaten Kulon Progo (juta rupiah) .....	VI-26
Tabel VI-7	Proyeksi PDRB Kabupaten Bantul (juta rupiah) .....	VI-27
Tabel VI-8	Proyeksi PDRB Kabupaten Gunungkidul (juta rupiah) .....	VI-27
Tabel VI-9	Proyeksi PDRB Kabupaten Sleman (juta rupiah) .....	VI-28
Tabel VI-10	Proyeksi PDRB Kota Yogyakarta (juta rupiah) .....	VI-28
Tabel VI-11	Proyeksi IPM Kabupaten dan Kota se-DIY.....	VI-28
Tabel VI-12	Tingkat Kemiskinan Kabupaten dan Kota se-DIY (dalam persen).....	VI-29
Tabel VI-13	Tabel Rincian Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten 2013 - 2017.....	VI-34
Tabel VI-14	Arah Pemanfaatan Ruang Keistimewaan DIY.....	VI-36
Tabel VI-15	Tabel Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif.....	VI-39
Tabel VI-16	Daftar Proyek-Proyek Besar Pembangunan Sarana Prasarana ...	VI-48
Tabel VII-1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018-2022 Daerah Istimewa Yogyakarta .....	VII-1
Tabel VII-2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Daerah Istimewa Yogyakarta .....	VII-3
Tabel VIII-1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Istimewa Yogyakarta.....	VIII-2
Tabel VIII-2	Penetapan Indikator Kinerja Kunci Daerah Istimewa Yogyakarta. ....	VIII-2

# Daftar Gambar

Gambar I.1	Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lain .....	I-5
Gambar II.1	Peta Administrasi DIY.....	II-3
Gambar II.2	Persentase Luas Wilayah DIY menurut Kabupaten/Kota .....	II-4
Gambar II.3	Peta Satuan Fisiografis DIY .....	II-6
Gambar II.4	Peta Geologi DIY .....	II-9
Gambar II.5	Persentase Luas Wilayah DIY menurut Jenis Tanah .....	II-10
Gambar II.6	Peta Aliran Sungai DIY.....	II-10
Gambar II.7	Peta Tutupan Lahan di DIY.....	II-14
Gambar II.8	Grafik Penggunaan Lahan di DIY.....	II-14
Gambar II.9	Peta Rencana Pola Ruang di DIY .....	II-16
Gambar II.10	Peta Rencana Kawasan Strategis di DIY.....	II-20
Gambar II.11	Peta Kawasan Rawan Bencana DIY .....	II-21
Gambar II.12	Jumlah Penduduk DIY menurut Sensus Penduduk Tahun 1971-2010 dan Proyeksi Penduduk Tahun 2011-2016 .....	II-30
Gambar II.13	Laju Pertumbuhan Ekonomi DIY, 2011-2016.....	II-32
Gambar II.14	Perkembangan Inflasi Tahunan DIY & Nasional, 2011-2016 .....	II-37
Gambar II.15	Rasio Gini DIY, 2011-2016.....	II-38
Gambar II.16	Indeks Williamson DIY Tahun 2012-2016 .....	II-38
Gambar II.17	Garis Kemiskinan DIY, 2010-2017 .....	II-39
Gambar II.18	Persentase Kemiskinan DIY menurut Perkotaan dan Pedesaan, 2010-2017 .....	II-40
Gambar II.19	Jumlah Penduduk Miskin DIY, 2010-2017 .....	II-41
Gambar II.20	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan, 2013-2017.....	II-42
Gambar II.21	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah DIY dan Kabupaten Kota se DIY Tahun 2014-2016.....	II-44
Gambar II.22	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah DIY, Tahun 2010-2016 .	II-45
Gambar II.23	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten Kota, Tahun 2014-2016.....	II-46

Gambar II.24	Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) DIY, Tahun 2010-2016.....	II-47
Gambar II.25	Perkembangan Jumlah Kematian Ibu di DIY Tahun 2011-2016 ...	II-48
Gambar II.26	Penyebab Kematian Ibu di DIY, Tahun 2016 .....	II-48
Gambar II.27	Perbandingan Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup Antar Provinsi 2012 .....	II-49
Gambar II.28	Perkembangan Jumlah Kematian Bayidi DIY, Tahun 2011-2016 ..	II-50
Gambar II.29	Perbandingan Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup Antar Provinsi 2012 .....	II-51
Gambar II.30	Perkembangan Jumlah Kematian Balita di DIY, Tahun 2012-2016 ..	II-51
Gambar II.31	Prevelansi Balita Kekurangan Gizi di DIY, tahun 2012-2016 .....	II-52
Gambar II.32	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar DIY di Semua Jenjang Pendidikan Tahun 2012-2016 .....	II-62
Gambar II.33	Perkembangan Angka Partisipasi Murni DIY di Semua Jenjang Pendidikan Tahun 2012-2016 .....	II-63
Gambar II.34	Capaian APK Per Jenjang Pendidikan Per Kabupaten Kota di DIY Tahun 2015.....	II-64
Gambar II.35	Situasi Gizi Buruk di DIY Tahun 2009-2011 .....	II-73
Gambar II.36	Kecenderungan Prevalensi Beberapa Penyakit Tidak Menular Berdasarkan Riskesda Tahun 2013.....	II-75
Gambar II.37	Kasus HIV AIDS berdasarkan Kabupaten Kota di DIY Tahun 2015	II-76
Gambar II.38	Grafik Perkembangan IDI DIY, 2009-2016.....	II-90
Gambar II.39	Penduduk Usia Kerja DIY Menurut Jenis Kelamin dan Kegiatan, Bulan Februari 2017 .....	II-94
Gambar II.40	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di DIY Tahun 2010-2017	II-95
Gambar II.41	Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Pulau Jawa, Tahun 2016.....	II-96
Gambar II.42	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di DIY Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2014-2016 .....	II-97
Gambar II.43	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di DIY Menurut Kelompok Umur, Tahun 2011-2015 .....	II-98
Gambar II.44	Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY dan Nasional, Tahun 2012-2017 (%) .....	II-99
Gambar II.45	Capaian IPM dan IPG DIY Tahun 2010 – 2015.....	II-101
Gambar II.46	Produksi Padi, Jagung, dan Ubi Kayu (dalam ton), Tahun 2012-2016.....	II-104

Gambar II.47	Ketersediaan Pangan Per Kapita.....	II-105
Gambar II.48	Jumlah Ketersediaan Energi di DIY Tahun 2012-2016 .....	II-105
Gambar II.49	Ketersediaan Protein di DIY Tahun 2012-2016.....	II-106
Gambar II.50	Produksi Telur Unggas Tahun 2012-2016 (dalam ton) .....	II-107
Gambar II.51	Produksi Daging Unggas Tahun 2012-2016 (dalam ton) .....	II-107
Gambar II.52	Jumlah Desa Rawan Pangan Tahun 2012-2016.....	II-108
Gambar II.53	Perkembangan Konsumsi Energi Penduduk di DIY (Kkal/Kapita/Hari) Tahun 2012-2016.....	II-109
Gambar II.54	Perkembangan Konsumsi Protein Penduduk di DIY (Kkal/Kapita/Hari) Tahun 2012-2016.....	II-109
Gambar II.55	Skor Pola Pangan Harapan di DIY Tahun 2012-2016 .....	II-110
Gambar II.56	Perkembangan TFR di DIY Berdasarkan SDKI .....	II-121
Gambar II.57	Perubahan Komposisi Penduduk Menurut Umur Serta Angka Ketergantungan (DR), 2010-2035 .....	II-122
Gambar II.58	Jumlah kasus perceraian DIY Tahun 2012-2015 .....	II-124
Gambar II.59	Perkembangan Unmet Need KB di DIY Menurut Kabupaten Kota Tahun 2014-2015.....	II-125
Gambar II.60	Kawasan Perkotaan dan Bentuk Interaksi dengan Kota-Kota Di Sekitarnya .....	II-129
Gambar II.61	Jumlah Koperasi Per Jenis Usaha DIY Tahun 2016 .....	II-137
Gambar II.62	Persentase Realisasi Investasi Tahun 2016 per Kabupaten Kota.....	II-139
Gambar II.63	Perkembangan Jumlah Wisatawan di DIY, Tahun 2012-2016 ....	II-156
Gambar II.64	Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan DTW di DIY, Tahun 2012-2016.....	II-157
Gambar II.65	Sebaran Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara di ODTW di Kabupaten/Kota Tahun 2016 .....	II-157
Gambar II.66	Perkembangan Luas Lahan Sawah di DIY .....	II-158
Gambar II.67	Proporsi Produksi Holtikultura di DIY Tahun 2016 .....	II-160
Gambar II.68	Proporsi Produksi Perkebunan di DIY Tahun 2016 .....	II-163
Gambar II.69	Perkembangan IKM Industri Kreatif di DIY, Tahun 2012-2016.....	II-169
Gambar II.70	Tingkat Ketersediaan Ikan di DIY (Kg/Kapita/Tahun), Tahun 2012- 2016 .....	II-172
Gambar II.71	Konsumsi Ikan di DIY (Kg/Kapita/Tahun), tahun 2012-2016 .....	II-173
Gambar II.72	Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya DIY (Ton), Tahun 2012- 2016 .....	II-174
Gambar II.73	Pengeluaran Riil per Kapita DIY, 2010-2016 (ribu rupiah).....	II-189

Gambar II.74	Pengeluaran Riil per Kapita menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2010-2016 (ribu rupiah) .....	II-190
Gambar II.75	Nilai Tukar Petani DIY, 2007-2016.....	II-191
Gambar II.76	Nilai Tukar Petani DIY Per Subsektor, 2015-2016 .....	II-191
Gambar II.77	Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDRB ADHB DIY,2012-2016 .	II-193
Gambar II.78	Rasio Ketergantungan Penduduk Usia Non Produktif Terhadap Penduduk Usia Produktif, Tahun 2010-2015 .....	II-195
Gambar III.1	Proporsi Pendapatan Daerah Tahun 2012-2016.....	III-4
Gambar III.2	Proporsi Pendapatan Asli Daerah DIY Tahun 2012-2016.....	III-7
Gambar III.3	PBB-KB (Rp) dan Volume Penjualan (liter) untuk Enam Jenis Bahan Bakar.....	III-53
Gambar III.4	Perkembangan Proporsi PBB-KB (%).....	III-54
Gambar III.5	Target dan Realisasi Penerimaan PBB-KB .....	III-55
Gambar III.6	PKB, BBN-KB, BN-I, dan PU.....	III-56
Gambar III.7	Proporsi Jenis Retribusi (%).....	III-58
Gambar IV.1	Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi DI Yogyakarta.....	IV-1
Gambar IV.2	Penelaahan Terhadap Draft Raperda Review RTRW DIY 2009-2029.....	IV-13
Gambar IV.3	Indeks Williamson DIY .....	IV-83
Gambar IV.4	Gini Rasio DIY .....	IV-84



# **BAB I      PENDAHULUAN**

## **I.1      Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah yang merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, pada bagian penjelasan Pasal 42 ayat (1) mengamanatkan bahwa dalam rangka penyediaan pendanaan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Pemerintah Daerah DIY wajib menyampaikan rencana kebutuhan yang dituangkan dalam rencana program dan kegiatan tahunan dan 5 (lima) tahunan. Amanat ini selanjutnya dipertegas kembali di dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian, sebagai perwujudan dari dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan, RPJMD DIY diamanatkan untuk memuat arah kebijakan serta program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan keistimewaan.

Gubernur dan Wakil Gubernur DIY telah dilantik pada tanggal 10 Oktober 2017, sehingga sesuai dengan perundangan yang berlaku perlu disusun dokumen RPJMD untuk periode 2017-2022. Sebagai satu kesatuan perencanaan daerah yang utuh, RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 merupakan irisan sebagai salah satu tahapan untuk mewujudkan tujuan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu mewujudkan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera. Sebagai bagian dari RPJPD DIY irisan tahap 3 dan 4, RPJMD DIY Tahun 2017-2022 tentu juga merupakan rangkaian kesinambungan dari pelaksanaan RPJMD DIY Tahun 2012-2017, sehingga tidak bisa lepas dari capaian-capaian yang telah dihasilkan dari perencanaan periode sebelumnya.

Atas dasar hal tersebut, di dalam perencanaan jangka menengah Tahun 2017-2022 perlu dirumuskan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran pembangunan jangka menengah

yang mampu mewujudkan cita-cita pembangunan jangka panjang Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama dengan mewujudkan program/kegiatan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentu juga tidak bisa dilepaskan dari tujuan keistimewaan sebagaimana tertuang di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 yang salah satunya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui semangat keistimewaan *hamemayu hayuning bawana, sangkan paraning dumadi* dan *manunggaling kawula gusti*.

Penyusunan RPJMD DIY 2017-2022 ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan mengintegrasikan substansi Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Skenario pembangunan daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah ditindaklanjuti dengan menyusun tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah menggunakan asas-asas pembangunan berkelanjutan serta diperkuat dengan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Dokumen ini juga sudah memasukkan kebijakan umum pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari fokus pembangunan daerah.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, RPJMD akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Bagi penyelenggara pemerintah daerah, RPJMD tersebut selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

## **I.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2017- 2022 sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

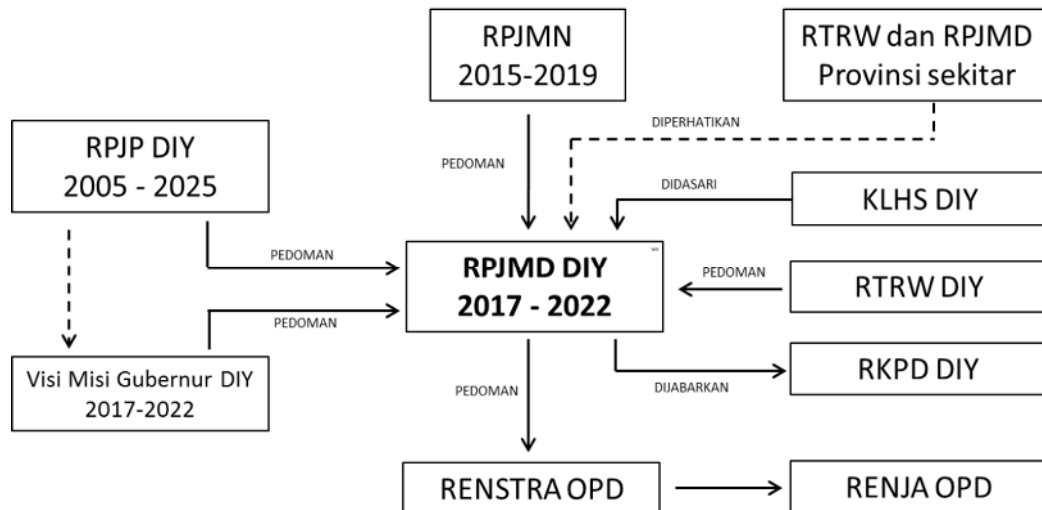
- (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (9) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- (11) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- (12) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- (13) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133) ;
- (14) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

- (15) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- (16) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- (17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- (18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994) ;
- (19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- (20) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 3);
- (21) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2).

### **I.3 Hubungan Antar Dokumen**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan hirarki perencanaan pembangunan daerah didalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, sehingga RPJMD DIY sebagai

bagian dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, harus terintegrasi dan mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.



**Gambar I.1 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lain**

RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 sebagai terjemahan dari visi dan misi Gubernur DIY periode 2017-2022, dalam penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional Tahun 2015-2019, dimana Visi Pembangunan Nasional Republik Indonesia pada periode tahun 2015-2019 adalah ***Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong***.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan tahapan ketiga dalam perencanaan pembangunan jangka panjang Negara Kesatuan Republik Indonesia 2005-2025, dengan penekanan prioritas pada pembangunan manusia, kemandirian ekonomi dan pemerataan dalam dimensi kewilayahan. RPJMD DIY 2017-2022 berpedoman pada RPJMN 2015-2019 dimana penekanan pada RPJMD DIY 2017-2022 adalah pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas hidup dan kehidupan manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta serta penguatan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbasis pada sumber daya lokal dan didukung oleh harmonisasi bermasyarakat dan tata kelola pemerintahan yang baik. Penekanan pada RPJMD DIY 2017-2022 ini telah selaras dengan visi RPJMN untuk memberdayakan sumberdaya manusia yang bertujuan mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan dalam hal menciptakan pembangunan ekonomi yang berlandaskan pemberdayaan sumber daya manusia ke arah Kesejahteraan Rakyat.

Selain pada RPJMN 2015-2019, RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 juga berpedoman pada RPJP Daerah Istimewa Yogyakarta 2005-2025. RPJP Daerah

Istimewa Yogyakarta menjabarkan kehendak masyarakat DIY yang dijadikan pedoman dasar bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan selama 20 tahun. RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya dijabarkan dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Keterkaitan terhadap RPJMD DIY 2017-2022 terhadap RPJMD daerah lain, untuk diperhatikan, dilakukan pada Provinsi Jawa Tengah yang merupakan wilayah yang paling berdekatan dengan DIY. Visi RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 adalah ***“Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”***. Berdasarkan pada visi tersebut dapat di tarik beberapa *keyword* utama, yaitu masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan, penanggulangan kemiskinan, serta perekonomian yang berdikari yang didukung oleh, pemerintahan yang bersih dan profesional (*good governance*).

Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 -2022 juga mempedomani dokumen RTRW DIY dan mengarah pada terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemanfaatan ruang, baik kebijakan struktur tata ruang maupun kebijakan pola tataruang. Selain itu, dokumen RPJMD DIY 2017-2022 didasari pada KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) DIY untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **I.4 Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan RPJMD DIY Periode 2017-2022 adalah menjabarkan visi misi Gubernur DIY dan Wakil Gubernur DIY sebagaimana yang telah di hantarkan pada Pidato Gubernur DIY didepan Sidang Paripurna Istimewa DPRD DIY pada tanggal 2 Agustus 2017, yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan visi pembangunan DIY tahun 2017-2022. Selain itu, RPJMD DIY tahun 2017-2022 dimaksudkan dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang untuk mencapai sasaran Pembangunan Daerah.

Adapun tujuan dari penyusunan penyusunan RPJMD DIY Tahun 2017-2022, sebagai berikut :

- (1) Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah serta kebijakan dan strategi pembangunan daerah tahun 2018-2022;
- (2) Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) antara tahun 2018 sampai tahun 2022;

- (3) Sebagai tolak ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah DIY antara tahun 2018 sampai tahun 2022;
- (4) Sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan rencana strategis antara tahun 2017 sampai tahun 2022, termasuk dalam menentukan program-program prioritas;
- (5) Sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Daerah DIY dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
- (6) Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan;
- (7) Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Daerah DIY dalam mengimplementasikan kebijakan, program, dan kegiatan operasional tahunan; dan
- (8) Sebagai instrumen untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian.

## **I.5 Sistematika Dokumen RPJMD**

Sistematika penulisan dalam dokumen RPJMD DIY Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
	I.1. Latar Belakang
	I.2. Dasar Hukum Penyusunan
	I.3. Hubungan Antar Dokumen
	I.4. Maksud dan Tujuan
	I.5. Sistematika Penulisan
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b>
	II.1. Aspek Geografi dan Demografi
	II.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
	II.3. Aspek Pelayanan Umum
	II.4. Aspek Daya Saing
<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN KEUANGAN DAERAH</b>
	III.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
	III.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
	III.3. Kerangka Pendanaan
<b>BAB IV</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH</b>
	IV.1. Telaah RTRW
	IV.2. Telaah RPJPD
	IV.3. Telaah RPJMN 2005-2025

	IV.4. Telaah RPJMD Daerah Lain
	IV.5. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	IV.6. Permasalahan Pembangunan
	IV.7. Analisis Isu Strategis
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
	V.1. Visi
	V.2. Misi
	V.3. Tujuan dan Sasaran
	V.4. Keselarasan RPJMD 2017-2022 dengan RPJMN 2015-2019
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
	VI.1. Strategi
	VI.2. Arah Kebijakan
	VI.3. Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan
	VI.4. Arah Kebijakan Pembangunan Keistimewaan
	VI.5. Program Pembangunan Daerah
	VI.6. Program-Program Strategik DIY
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB IX	PENUTUP
	IX.1. Pedoman Transisi
	IX.2. Kaidah Pelaksanaan

## **BAB II     GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII memutuskan untuk menjadi bagian dari NKRI dimana pilihan dan keputusan tersebut membawa konsekuensi peleburan masyarakat Yogyakarta yang homogen kedalam masyarakat Indonesia yang heterogen dan menjadikan masyarakat Yogyakarta menjadi bagian kecil dari masyarakat Indonesia. Daerah Kasultanan Ngayogyakarta bergabung menjadi satu kesatuan dengan NKRI dan dinyatakan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI.

Eksistensi DIY sebagai bagian yang tak terpisahkan dari NKRI secara formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan DIY. Undang-Undang ini juga merupakan pengakuan kewenangan untuk menangani berbagai urusan dalam menjalankan pemerintahan serta urusan yang bersifat khusus. Undang-undang ini telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819). Undang-undang tersebut menyatakan bahwa DIY merupakan daerah setingkat provinsi dan meliputi bekas Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman.

Berdasarkan Amandemen Kedua UUD 1945, eksistensi DIY sebagai daerah istimewa diakui sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (1) dan (2), yaitu: 1). Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang; 2). Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pada tahun 2012, DIY masukisejarah pemerintahan yang baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Undang-Undang tersebut adalah bentuk pengakuan sekaligus penghormatan negara, atas satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa. Selain berlaku sebagai instrumen yuridis, undang-undang tersebut juga menjadi pembeda Pemda DIY dengan pemerintah daerah yang lain.

Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin ke-bhinnekatunggal-ika-an, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Pengaturan tersebut berlandaskan asas pengakuan hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, ke-bhinnekatunggalika-an, efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional, dan

pendayagunaan kearifan lokal. Oleh karena itu, dengan memperhatikan aspek historis, sosiologis, dan yuridis, substansi Keistimewaan DIY diletakkan pada tingkatan pemerintahan provinsi.

Kewenangan istimewa meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan keistimewaan didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat. Dengan demikian, Pemerintahan Daerah DIY mempunyai kewenangan yang meliputi kewenangan istimewa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dan kewenangan berdasarkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (sekarang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014).

## **II.1 Aspek Geografi dan Demografi**

Karakteristik DIY ditinjau dari aspek geografi dan demografi merupakan informasi dasar untuk mengidentifikasi potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia untuk memetakan pengembangan wilayah dalam menunjang kemajuan pembangunan daerah.

Secara geografis, wilayah DIY memiliki beberapa karakteristik. *Pertama*, secara umum kondisi tanah DIY tergolong subur sehingga dimungkinkan untuk ditanami berbagai tanaman pertanian. Namun, masing-masing kabupaten/kota memiliki potensi alam yang berbeda karena wilayah DIY memiliki bentang alam yang terdiri dari pegunungan/perbukitan, dataran rendah, dan pesisir. Wilayah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan sebagian Kabupaten Bantul terletak pada satuan fisiografi Gunung Merapi sehingga wilayah-wilayah tersebut sangat subur dan potensial untuk budidaya pertanian, khususnya tanaman semusim. Kabupaten Kulon Progo dan Bantul yang terletak pada dataran rendah di wilayah pesisir juga potensial untuk kegiatan budidaya pertanian semusim. Sementara itu, Kabupaten Gunungkidul dan wilayah timur Kabupaten Bantul yang terletak pada jalur Pegunungan Seribu dan didominasi oleh perbukitan batu kapur dan karst kurang potensial untuk pertanian tanaman semusim. Lebih lanjut, Kabupaten Kulon Progo bagian utara yang berupa perbukitan, potensial untuk pengembangan perkebunan. *Kedua*, kondisi alam DIY menjadi sumber potensial untuk pengembangan pariwisata. Namun, kondisi alam tersebut juga menjadikan DIY berpotensi menjadi wilayah rawan bencana. *Ketiga*, wilayah pesisir DIY yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia memiliki potensi sumberdaya laut. *Keempat*, beberapa sungai yang melintas di DIY berpotensi untuk mendukung pengembangan wilayah sebagai sumber ketersediaan air untuk kebutuhan domestik, perkotaan, industri, dan pertanian. *Kelima*, perkembangan penggunaan lahan di DIY menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran penggunaan lahan dari pertanian ke bukan pertanian.

Aspek geografi DIY tersebut memberikan gambaran bahwa kondisi alam DIY mendukung untuk: 1). Pengembangan sektor pertanian baik tanaman pangan maupun perkebunan sehingga kemandirian dalam ketersediaan pangan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat terjamin; 2). Pengembangan sektor kelautan karena berbatasan langsung dengan Samudra Hindia; dan 3). Pengembangan pariwisata alam sebagai daya tarik daerah yang dapat menarik investor dan menjadi sumber pendapatan daerah. Lebih lanjut, hal yang penting untuk diantisipasi agar pemanfaatan keunggulan aspek geografi dapat

optimal adalah dengan memperhatikan kelemahan-kelemahan yang ada. Salah satunya adalah antisipasi terhadap potensi bencana. Selain itu, pengaturan dan management pengelolaan sumberdaya alam perlu ditegaskan agar keunggulan dan peluang yang dimiliki tidak hilang, seperti penegasan aturan alih fungsi lahan dan management pengelolaan sektor-sektor unggulan dari aspek geografi, seperti pertanian, kelautan, dan pariwisata.

Sementara itu, ditinjau dari aspek demografi, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. *Pertama*, jumlah penduduk DIY mengalami peningkatan baik penduduk usia produktif maupun tidak produktif. Meningkatnya jumlah penduduk usia produktif perlu disikapi dengan membuat kebijakan yang tepat terkait upaya untuk menyiapkan kualitas angkatan kerja, menciptakan lapangan kerja, serta menyiapkan dukungan sarana dan prasarana. *Kedua*, perlu antisipasi kebutuhan layanan yang memadai untuk penduduk usia lanjut. *Ketiga*, meskipun angka IPM DIY tergolong tinggi tetapi masih perlu diperhatikan bahwa beberapa wilayah di DIY capaian angka IPM nya masih rendah, yaitu Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo.

Penjelasan rinci terkait aspek geografi dan demografi DIY akan diuraikan pada subbab-subbab berikut.

## II.1.1 Aspek Geografi

### 1. Letak, Luas, dan Batas Wilayah

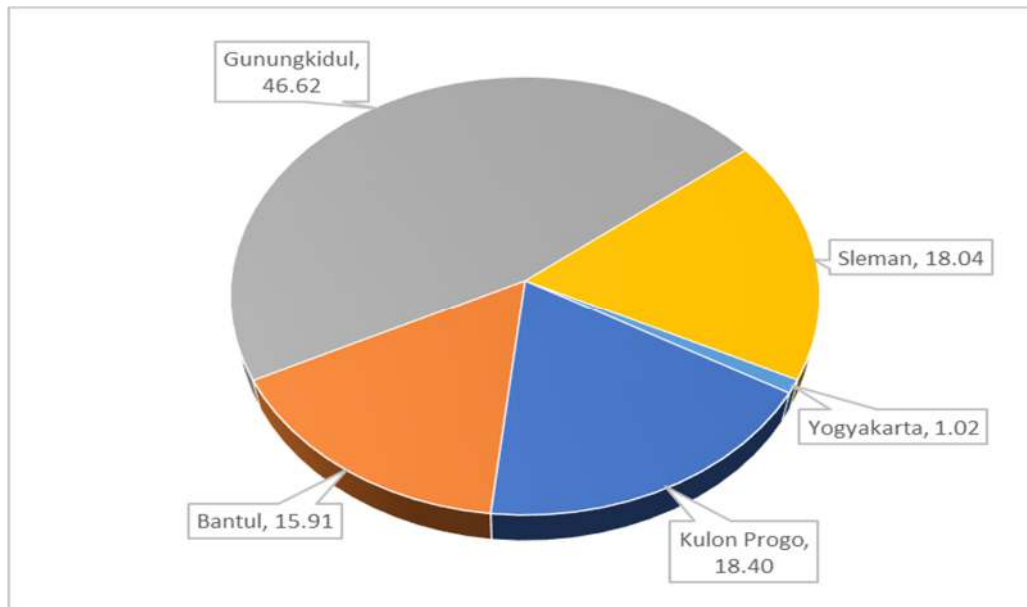
Secara astronomis, DIY terletak diantara  $7^{\circ}33'-8^{\circ}12'$  Lintang Selatan dan  $110^{\circ}00'-110^{\circ}50'$  Bujur Timursedangkan secara geografis, DIY berada di bagian tengah Pulau Jawa sebelah Selatan dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan sebelah selatan dengan Samudra Hindia.



Sumber: Bappeda DIY, RTRW Provinsi DIY Tahun 2009-2029

**Gambar II.1 Peta Administrasi DIY**

Luas wilayah DIY adalah 3.185,80 km<sup>2</sup> atau 0,17% dari total luas Indonesia (1.860.359,67 km<sup>2</sup>) dan merupakan provinsi dengan luas terkecil setelah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Apabila ditinjau menurut kabupaten dan kota, wilayah di DIY yang terluas adalah Kabupaten Gunungkidul, yaitu meliputi 46,63% dari luas DIY sedangkan wilayah terkecil adalah Kota Yogyakarta, yaitu sebesar 1,02%.



Sumber: BPS, Statistik Daerah DIY 2017

**Gambar II.2 Persentase Luas Wilayah DIY menurut Kabupaten/Kota**

Secara Administratif, DIY terbagi menjadi empat kabupaten dan satu kota dengan 78 kecamatan dan terdapat 438 desa/kelurahan.

**Tabel II-1 Pembagian Wilayah DIY Menurut Kabupaten/Kota**

Kabupaten/Kota	Ibukota	Kecamatan	Kelurahan/Desa
Kulon Progo	Wates	12	88
Bantul	Bantul	17	75
Gunungkidul	Wonosari	18	144
Sleman	Sleman	17	86
Kota Yogyakarta	Yogyakarta	14	45
DIY	Yogyakarta	78	438

Sumber: BPS, DIY dalam Angka 2016

## 2. Topografi

Topografi merupakan bentuk permukaan suatu lahan yang dikelompokkan berdasarkan perbedaan ketinggian (amplitude) dari permukaan bumi (bidang datar) suatu bentuk bentang lahan (*landform*). Adapun peta topografi DIY diuraikan sebagai berikut:

### a. Kemiringan Lahan

Menurut data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY, kemiringan lahan di DIY dikelompokkan menjadi empat bagian, yaitu lahan dengan kemiringan 0-2% seluas 1.223,47 km<sup>2</sup>, lahan dengan kemiringan 3-15% seluas 767,46 km<sup>2</sup>, lahan dengan

kemiringan 16-40% seluas 806,17 km<sup>2</sup>, dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% seluas 388,21 km<sup>2</sup>.

b. Ketinggian Lahan

Sebagian besar dari luas wilayah DIY, yaitu sebesar 65,65% wilayah terletak pada ketinggian antara 100-499 m dpl, 28,84% wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 m dpl, 5,04% wilayah dengan ketinggian antara 500-999 m dpl, dan 0,47% wilayah dengan ketinggian di atas 1000 m dpl.

Wilayah DIY memiliki bentang alam yang terdiri dari kawasan pesisir, lereng/punggung bukit dan dataran. Jumlah desa/kelurahan di DIY menurut topografi wilayah disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel II-2 Jumlah Desa/ Kelurahan Menurut Topografi Wilayah**

Kabupaten/Kota	Pesisir	Bukan Pesisir			Jumlah
		Lembah/Daerah Aliran Sungai	Lereng/Punggung Bukit	Dataran	
Kulon Progo	10	-	22	66	88
Bantul	5	-	13	62	75
Gunungkidul	18	-	55	87	144
Sleman	-	-	15	71	86
Yogyakarta	-	-	-	45	45
DIY	33	0	105	331	438

Sumber : BPS, DIY Dalam Angka 2016

DIY terdiri dari berbagai ekosistem yang kompleks antara lain gunung api, karst, dataran aluvial, dan samudra Hindia yang kesemuanya memiliki potensi sumberdaya alam. Dengan penampang topografis yang dimiliki, wilayah DIY terbagi menjadi beberapa satuan fisiografis sebagai berikut:

- Satuan Pegunungan Selatan, seluas  $\pm 1.656,25$  km<sup>2</sup>, ketinggian 150– 700 m, terletak di Kabupaten Gunungkidul, yang merupakan wilayah perbukitan batu gamping (*limestone*) yang kritis, tandus, dan selalu kekurangan air. Pada bagian tengah berupa dataran Wonosari basin. Wilayah ini merupakan bentang alam solusional dengan bahan batuan induk batu gamping, yang mempunyai karakteristik lapisan tanah dangkal dan vegetasi penutup yang relatif jarang;
- Satuan Gunung Berapi Merapi, seluas  $\pm 582,81$  km<sup>2</sup>, ketinggian 80– 2.911m, terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial Gunung Merapi, meliputi daerah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan sebagian Kabupaten Bantul, serta termasuk bentang alam vulkanik. Daerah kerucut dan lereng Gunung Merapi merupakan hutan lindung dan sebagai kawasan resapan air;
- Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo seluas  $\pm 215,62$  km<sup>2</sup>, ketinggian 0–80 m, merupakan bentang alam fluvial yang didominasi oleh dataran Alluvial. Membentang di bagian selatan DIY mulai Kabupaten Kulon Progo sampai Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu. Daerah ini merupakan wilayah yang subur. Bentang alam lain yang belum digunakan adalah bentang alam marine dan aeolin yang merupakan satuan wilayah pantai yang terbentang dari Kabupaten Kulon

Progo sampai Bantul. Khusus Pantai Parangtritis, terkenal dengan laboratorium alamnya berupa gumuk pasir;

Pegunungan Kulon Progo dan Dataran Rendah Selatan seluas  $\pm 706,25 \text{ km}^2$ , ketinggian 0–572 m, terletak di Kabupaten Kulon Progo. Bagian utara merupakan lahan struktural denudasional dengan topografi berbukit yang mempunyai kendala lereng yang curam dan potensi air tanah yang kecil.



Sumber: Bappeda DIY 2014

**Gambar II.3** Peta Satuan Fisiografis DIY

### 3. Klimatologi

Kondisi iklim sangat berpengaruh pada suatu daerah, baik pada potensi sumberdaya alam maupun dalam potensi kebencanaan alam. DIY terletak pada wilayah yang dipengaruhi oleh tiga jenis iklim, yaitu iklim musim, iklim tropika, dan iklim laut. Iklim musim sangat dipengaruhi oleh angin musiman yang berubah-ubah setiap periode tertentu. Biasanya satu periode perubahan angin adalah 6 bulan. Iklim musim terdiri dari 2 jenis, yaitu angin musim barat daya (Muson Barat) dan angin musim timur laut (Muson Timur). Angin muson barat bertiup sekitar bulan Oktober hingga April yang basah sehingga menyebabkan hujan. Angin muson timur bertiup sekitar bulan April hingga bulan Oktober yang sifatnya kering yang mengakibatkan wilayah mengalami musim kering/kemarau.

Sebagai daerah yang berada pada iklim tropis, kondisi iklim di DIY juga dipengaruhi oleh iklim tropis yang bersifat panas sehingga menyebabkan curah hujan tinggi. Di samping itu, karena letaknya yang sangat dekat dengan Samudera Indonesia, terjadi banyak penguapan air laut menjadi udara lembab dan mengakibatkan curah hujan tinggi.

Parameter iklim, seperti curah hujan, suhu udara, kelembaban udara dan arah angin, sangat berpengaruh pada potensi pengembangan sumberdaya alam, baik dilihat sebagai potensi cadangan alamiah maupun potensi alam berkesinambungan. Pada tahun 2015, DIY tercatat memiliki: a). rata-rata suhu udara minimum  $20^{\circ}\text{C}$  dan maksimum  $33,3^{\circ}\text{C}$ ; b). rata-rata curah hujan perbulan maksimum 628 mm dengan rata-rata hari hujan per bulan maksimum 24

kali; c). kelembaban udara minimum 48% dan maksimum 97%; d). tekanan udara antara 991,6 mb – 1018,5 mb; e). arah angin terbanyak adalah Angin Selatan dengan kecepatan angin rata-rata 0,1 – 5,4m/s (*Sumber: BPS, DIY Dalam Angka 2016*).

#### 4. Geologi

Informasi geologi DIY diperoleh dari Peta Geologi DIY skala 1:100.000 tahun 1977. Formasi DIY terdiri dari Aluvium (Qa), Formasi Gunungapi Merapi (Qvm), Endapan Vulkanik Merapi Muda (Qmi), Endapan Vulkanik Merapi Tua (Qmo), Formasi Kepek (Tmpk), Formasi Wonosari - Punung (Tmwl), Formasi Sentolo (Tmps), Formasi Oyo (Tmo), Formasi Wuni (Tmw), Formasi Sambipitu (Tmss), Formasi Semilir (Tms), Formasi Nglanggran (Tmng), Formasi Kebo-Butak (Tomk), dan Formasi Mandalika (Towm).

Daerah ini mempunyai struktur geologi lipatan dan patahan. Lipatan terdiri dari antiklin dan sinklin terdapat pada Formasi Semilir (Tms), Formasi Oya (Tmo), Formasi Wonosari-Punung (Tmwl) dan Formasi Kepek (Tmpk). Patahan berupa sesar turun dengan pola *antithetic fault block*, terdapat antara lain pada terban Bantul.

##### a. Aluvium (Qa)

Aluvium berumur Holosen dijumpai antara lain di Ponjong, sebelah timur Wonosari dan Nglabu sebelah barat laut Bantul, tersusun dari bahan endapan lempung, lumpur, lanau, pasir, kerikil, kerakal, dan berangkal. Wilayah ini mempunyai topografi datar-hampir datar, sehingga merupakan lahan yang baik untuk permukiman dan pertanian.

##### b. Formasi Gunungapi Merapi (Qvm)

Formasi ini tersusun dari breksi vulkan, lava, dan tuf sebagai hasil endapan lahar Gunung Merapi yang masih aktif sampai kini. Aktivitas Gunungapi diperkirakan mulai Plestosen Akhir, terdapat di sekitar daerah Kaliurang.

##### c. Formasi Endapan Vulkanik Tua (Qmo)

Keadaan formasi ini berpenyebaran relatif sempit yaitu di sebelah selatan G. Merapi yakni G. Plawangan dan G. Dengkeng. Endapan Vulkanik Tua (Qmo) tersusun dari breksi aglomerat dan leleran lava serta andesit dan basal mengandung olivin yang tidak dijumpai pada endapan lebih muda.

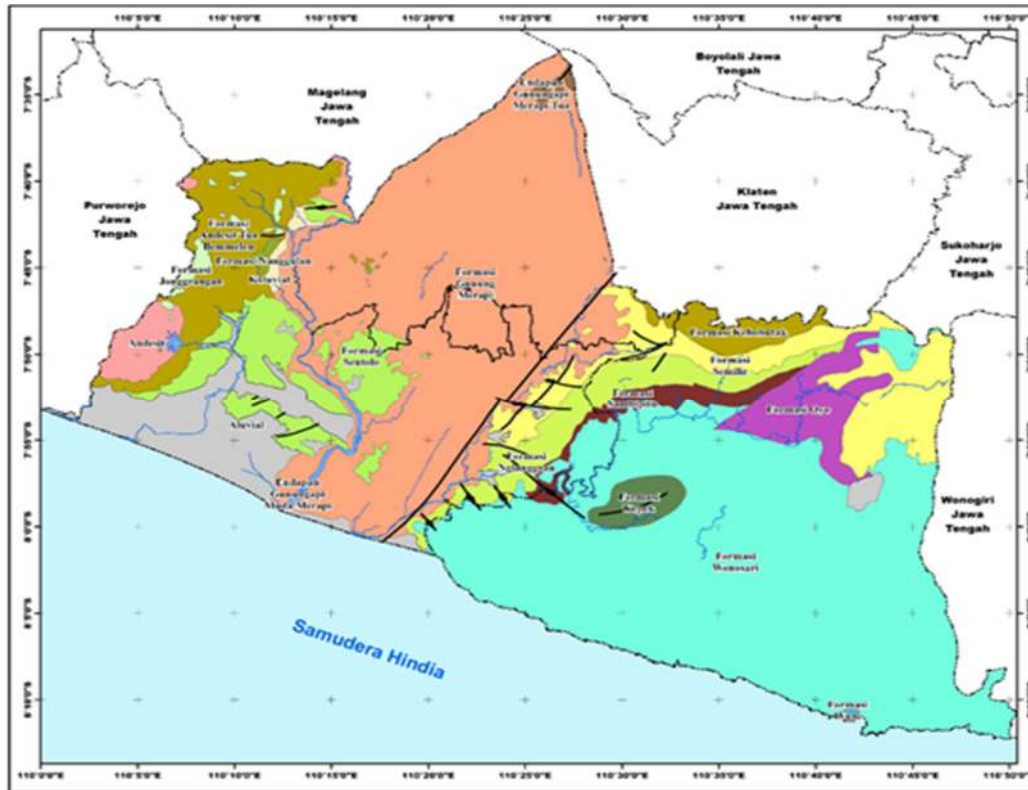
##### d. Formasi Kepek (Tmpk)

Formasi Kepek berumur Miosen Akhir sampai Pliosen dan terendapkan dalam lingkungan neritik, tersusun dari napal dan batu gamping berlapis baik. Formasi ini dijumpai di sekitar cekungan Karangmojo dan Sawahan.

##### e. Formasi Wonosari-Punung (Tmwl)

Formasi Wonosari-Punung berumur Miosen Tengah sampai Pliosen, berpenyebaran sangat luas dari Wonosari ke arah selatan. Formasi ini tersusun dari batu gamping konglomeratan, batu pasir, tufa, dan batu lanau. Di bagian selatan dijumpai batugamping terumbu koral dengan inti terumbu yang masih membentuk ratusan bukit-bukit kecil membentuk fisiografi "Kerucut Karst" yang terkenal dengan nama Pegunungan Seribu. Karakteristik yang tersusun dari batugamping menyebabkan cadangan air tersimpan dalam tanah yang cukup dalam. Sesuatu hal yang sangat sulit untuk menemukan air permukaan di daerah karst karena memang kondisi batuan yang berupa karbonat yang memiliki karakteristik mudah meloloskan air.

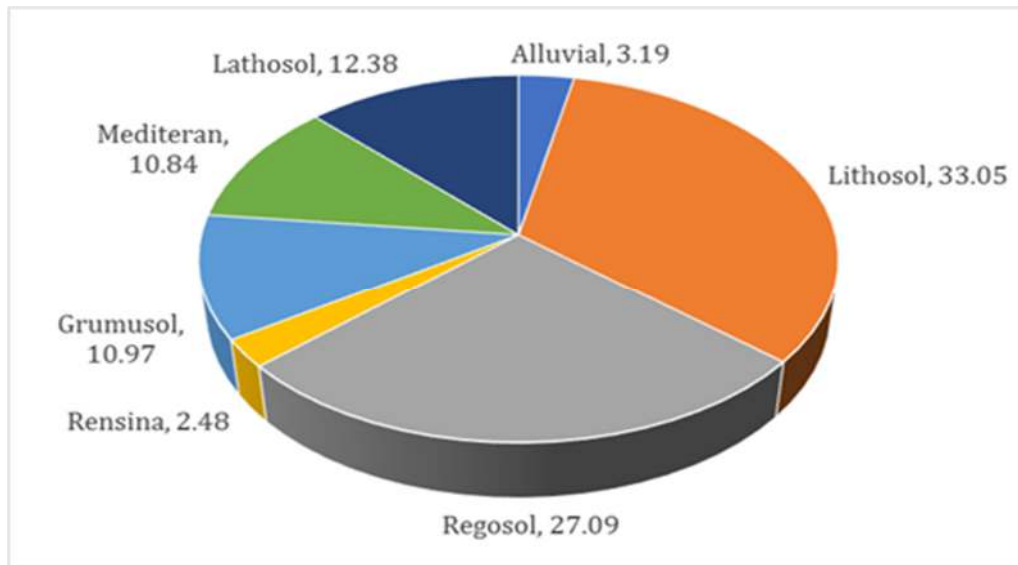
- f. Formasi Sentolo (Tmps)  
Formasi Sentolo berumur Awal Miosen sampai Pliosen. Formasi ini dijumpai di bagian barat laut Bantul (Babadan, Ngasem, Kalilugu dan Banjarharjo), barat (Ngalahan, Gotakan dan sebelah barat daya (Krembungan dan Glagahan). Formasi ini tersusun dari batu gamping dan batu pasir napalan.
- g. Formasi Oyo (Tmo)  
Formasi Oyo berumur Miosen Tengah sampai Miosen Akhir, berpenyebaran menghampar sepanjang aliran Sungai Oyo, sekitar Karangmojo, Dusun Sambeng, dan Nglipar. Batuan penyusun Formasi ini terdiri dari napal tufaan, tuf andesitan, dan batu gamping konglomeratan.
- h. Formasi Sambipitu (Tmss)  
Formasi Sambipitu berumur akhir Miosen Bawah sampai Miosen Tengah, berpenyebaran di Maladan dan Kedungwanglu. Formasi ini tersusun dari batu pasir dan batu lempung.
- i. Formasi Semilir (Tms)  
Formasi Semilir berumur Miosen Awal sampai awal Miosen Tengah, berpenyebaran di sekitar Wonosari, Imogiri, Sambeng, Ngawen, Karangmojo, Semin. Formasi ini tersusun dari tuf, breksi batupung dasitan, batu pasir tufaan, dan serpih perselingan antara breksi tuf, breksi batupung, tufa dasit, tufa andesit, serta batu lempung tufaan.
- j. Formasi Kebo Butak (Tomk)  
Formasi Kebo Butak (Tomk) berumur Oligosen Akhir sampai Miosen Awal, berpenyebaran di wilayah pegunungan bagian utara Nglipar di Pegunungan Mintorogo, Gunung Jogotamu, dan Gunung Butak. Formasi ini tersusun dari batu pasir berlapis baik, batulanau, batulempung, serpih, tuf, dan aglomerat, sedangkan di bagian atas berupa perselingan batupasir dan batu lempung andesit di bagian atasnya.  
Wilayah ini mempunyai lereng curam-hingga sangat curam sehingga proses erosi dan longsor sering terjadi dan perlu tindakan konservasi tanah. Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa formasi ini di bagian atasnya merupakan perselingan yang tidak beraturan antara batuan sedimen berlapis (batu pasir dan batu lanau) dengan bahan sedimen fasies vulkan berumur lebih muda. Ketidakteraturan susunan formasi tersebut terjadi karena proses pelipatan dan patahan sesudah formasi-formasi tersebut terbentuk.
- k. Formasi Andesit Tua (Bemmelen)  
Formasi ini diendapkan secara tidak selaras di atas Formasi Nanggulan. Litologinya berupa breksi vulkanik dengan fragmen andesit, lapilli tuf, tuf, lapili breksi, sisipan aliran lava andesit, aglomerat, serta batupasir vulkanik yang tersingkap di daerah Kulon Progo. Formasi ini tersingkap baik di bagian tengah, utara, dan barat daya daerah Kulon Progo yang membentuk morfologi pegunungan bergelombang sedang hingga terjal. Ketebalan formasi ini kira-kira mencapai 600 m. Berdasarkan fosil Foraminifera planktonik yang dijumpai dalam napal dapat ditentukan umur Formasi Andesit Tua yaitu Oligosen Atas.



Sumber: Bappeda DIY 2017

#### Gambar II.4 Peta Geologi DIY

Secara umum kondisi tanah di DIY tergolong cukup subur sehingga memungkinkan untuk ditanami berbagai tanaman pertanian. Hal ini disebabkan karena letak DIY yang berada di dataran lereng Gunung Api Merapi yang mengandung tanah regosol seluas 863,06 km<sup>2</sup> (27,09%). Tanah regosol adalah tanah berbutir kasar dan berasal dari material gunung api dan merupakan tanah aluvial yang baru diendapkan. Sementara jenis tanah lain di DIY berupa tanah aluvial seluas 101,74 km<sup>2</sup> (3,19%), lithosol 1.052,93 km<sup>2</sup> (33,05%), resina 78,83 km<sup>2</sup> (2,48%), grumusol 349,95 km<sup>2</sup> (10,97%), mediteran 345,40 km<sup>2</sup> (10,84%), dan lathosol 394,49 km<sup>2</sup> (12,38%).

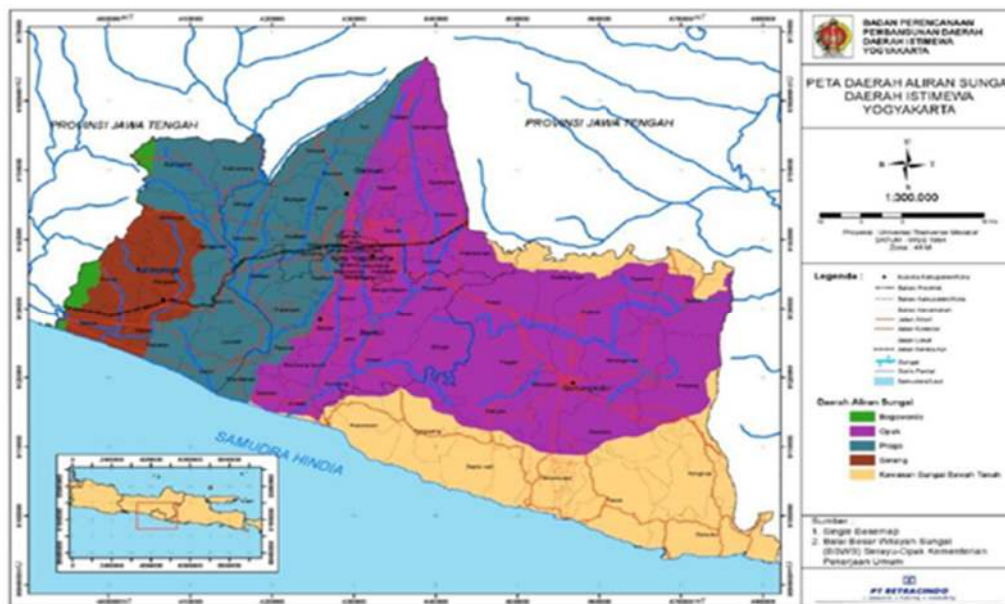


Sumber: BPS, DIY Dalam Angka 2016

**Gambar II.5 Persentase Luas Wilayah DIY menurut Jenis Tanah**

## 5. Hidrologi

DIY terbagi menjadi 4 Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Opak-Oyo, DAS Progo, DAS Serang dan sedikit DAS Bogowonto. Hanya DAS Serang yang seluruh wilayahnya berada di DIY sedangkan DAS lainnya sebagian wilayahnya terutama bagian hulunya berada di Provinsi Jawa Tengah. Peta pembagian DAS ini dapat dilihat pada Gambar Peta Aliran Sungai dibawah ini:



Sumber: Bappeda DIY, Roadmap pengelolaan dan Pengendalian LH, 2014

**Gambar II.6 Peta Aliran Sungai DIY**

DAS tersebut yang bagian hilirnya langsung berakhir di Samudra Indonesia melalui wilayah Kabupaten Bantul, Kulon Progo atau Gunungkidul adalah:

- DAS Progo melintasi wilayah Kabupaten Wonosobo (Jawa Tengah), Kabupaten Temanggung (Jawa Tengah), Kabupaten dan Kota Magelang (Jawa Tengah), Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo dan Bantul.
- DAS Opak-Oyo melintasi wilayah Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah), Kabupaten Sukoharjo (Jawa Tengah), Kabupaten Klaten (Jawa Tengah), Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.
- DAS Serang berada di Kabupaten Kulon Progo dimana Sungai Serang berfungsi untuk menyediakan air untuk Bendung Pengasih dan Pekikjamal, yang mempunyai areal pelayanan masing-masing 2.757 ha dan 1.006 ha.

Kondisi cadangan air tanah di wilayah DIY, dapat dilihat dari kondisi *aquifer* yang ada di wilayah tersebut. Pada prinsipnya, *aquifer* di wilayah DIY dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) *aquifer*, yaitu:

- *Mayor aquifer*; dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan besar, dan jumlah air diperkirakan dapat mencukupi banyak tujuan (irigasi dan air baku). Termasuk daerah *mayor aquifer* adalah: Formasi Merapi Muda, Yogyakarta dan Sleman.
- *Minor aquifer*; dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan cukup, dan dapat melayani kebutuhan air irigasi sangat terbatas dan air minum. Termasuk daerah *minor aquifer* : Formasi Wates, Gumuk pasir.
- *Poor aquifer*; dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan kecil, dan hanya dapat memenuhi kebutuhan air minum. Termasuk daerah *poor aquifer* adalah Formasi Jonggrangan dan Sentolo, Formasi Sambipitu dan Oyo, dan Andesite tua.
- *Non aquifer*; dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan sangat kecil, dan praktis tidak ada air tanah. Termasuk daerah *non aquifer* adalah: Formasi Kepek, Formasi Kebo, Butak, Semilir, dan Nglanggran, serta Formasi Nanggulan.

**Tabel II-3 Potensi Ketersediaan Air (dalam Juta m<sup>3</sup>)**

DAS	DAS Serang	DAS Progo	DAS Opak	DAS Oyo	DTA Karst
Volume Air Permukaan	311,59	3.964,59	610,48	1.455,37	1.478,18
Volume Air Tanah	51,12	458,12	432,01	2.224,41	1.013,73
Potensi Sumberdaya Air	362,70	4.422,71	1.042,49	3.679,78	2.491,91

Sumber: Bappeda DIY

Beberapa sungai yang melintas di wilayah DIY memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pengembangan wilayah antara lain karena memiliki potensi ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan domestik, perkotaan, industri maupun untuk irigasi pertanian. Secara kuantitas masing-masing sungai tersebut mempunyai debit berikut ini.

**Tabel II-4 Debit Rerata Sungai di DIY**

Sungai	Debit Rerata Bulanan (m <sup>3</sup> /det)					
	2012		2013		2014	
	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks
Sungai Progo (Duwet)	0,37	292,49	1,26	148,45	0,03	120,83
Sungai Bedog (Guwosari)	1,82	33,75	2,66	12,71	1,75	10,36
Sungai Code (Kaloran)	0,79	13,32	1,09	3,71	0,99	2,76
Sungai Winongo (Padokan)	0,07	11,96	0,21	5,01	0,26	4,59
Sungai Gadjahwong (Papringan)	0,17	11,71	0,43	2,67	0,26	2,48
Sungai Opak (Pulo)	0,002	3,93	0,02	0,89	0,05	0,74

Sumber: Dinas PUP ESDM 2014

Untuk sungai bawah tanah, debit rerata untuk sungai bawah tanah (SBT) Bribin sebesar 0,95 m<sup>3</sup>/det, SBT Ngobaran 0,70 m<sup>3</sup>/det, SBT Seropan 0,80 m<sup>3</sup>/det, dan SBT Baron debit rerata 0,10 m<sup>3</sup>/det.

Cekungan air tanah Yogyakarta-Sleman terletak pada lereng selatan Gunung Merapi yang dibatasi oleh Sungai Progo di sebelah barat dan Sungai Opak di sebelah timur dan di sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Indonesia. Cekungan ini merupakan cekungan air tanah (CAT) yang sangat penting untuk menyediakan kebutuhan air DIY dan memiliki luas kurang lebih 1200 km<sup>2</sup>, meliputi tiga wilayah kabupaten/kota di DIY yakni: Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul.

Perhitungan volume resapan air tanah yang dilakukan melalui rumusan kesetimbangan air dan pengukuran fluktuasi muka airtanah mendapatkan bahwa volume imbuhan air di cekungan ini mencapai 443 juta m<sup>3</sup> /tahun. Perhitungan volume air dalam akuifer mendapatkan bahwa 3,5 milyar m<sup>3</sup> air terkandung dalam akuifer. Hal ini menunjukkan bahwa, pada musim kemarau yang panjang eksploitasi terhadap air tanah dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air.

Total ketersediaan air di DIY adalah 11.999.000,58m<sup>3</sup>/tahun dan pemanfaatannya untuk keperluan domestik, industri, dan pertanian sebanyak 1.672.000,98 m<sup>3</sup>/tahun (*Neraca Sumber Daya Alam Daerah DIY; 2012*).

Dalam rangka keperluan aktivitas pertanian, pemenuhan kebutuhan air irigasi juga dilaksanakan dengan memanfaatkan air tanah dalam atau sumur bor atau dikenal dengan jaringan irigasi air tanah (JIAT). Di DIY tercatat pada 95 jaringan irigasi air tanah, Kabupaten Gunungkidul 51 buah dan Kabupaten Sleman 44 buah (*Dinas PUP PSDM, 2012*).

## 6. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan diartikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas manusia pada bidang lahan tertentu, misalnya permukiman, persawahan, dan perkebunan. Penggunaan lahan juga dapat dikatakan sebagai pemanfaatan lahan dan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam penyelenggaraan kehidupannya. Pengertian penggunaan lahan biasanya digunakan untuk mengacu pemanfaatan lahan masa kini (*present or current land use*).

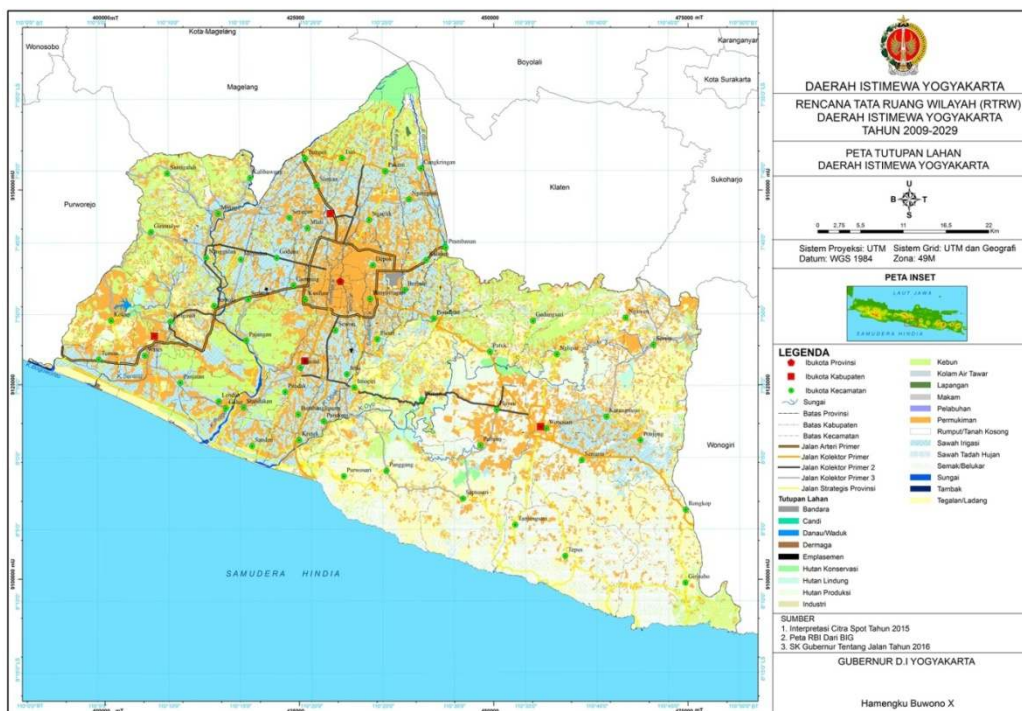
Berdasarkan data tutupan lahan tahun 2015 yang terdapat pada kajian peninjauan Perda DIY No 2 Tahun 2010 tentang RTRW DIY, penggunaan lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta didominasi permukiman, semak/belukar, pertanian, perkebunan dan hutan.

Dominasi penggunaan lahan terbesar yaitu permukiman seluas 86,634.80 Ha atau sebesar 27.321%, diikuti semak/belukar seluas 63,227.04 Ha atau sebesar 19.939%. Pertanian yang didominasi sawah irigasi dan tegalan/ladang yaitu 17.547% atau sekitar 55,640.93 Ha untuk sawah irigasi dan 13.497% atau seluas 42,797.81 Ha untuk tegalan/ladang, sedangkan sawah tadah hujan hanya sekitar 0.940% atau 2,980.58 Ha. Perkebunan di wilayah DIY masih cukup luas yaitu sebesar 14.535% atau 46,089.80 Ha. Hutan yang terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi hanya sekitar 4.668% atau seluas 14,803.56 Ha. Penggunaan lahan lainnya selebihnya terdiri dari bandara, candi, danau/waduk, dermaga, emplasemen, industry, kolam, lapangan, makam, pelabuhan, tanah kosong, sungai dan tambak, seperti tabel berikut:

**Tabel II-5      Penggunaan Lahan di DIY**

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
Bandara	295.08	0.093%
Candi	32.61	0.010%
Danau/Waduk	253.91	0.080%
Dermaga	57.22	0.018%
Emplasemen	138.76	0.044%
Hutan Konservasi	3,295.11	1.039%
Hutan Lindung	2,201.22	0.694%
Hutan Produksi	9,307.23	2.935%
Industri	35.82	0.011%
Kebun	46,089.80	14.535%
Kolam Air Tawar	39.61	0.012%
Lapangan	1.63	0.001%
Lapangan Olah Raga	111.49	0.035%
Makam	41.74	0.013%
Pelabuhan	2.81	0.001%
Permukiman	86,634.80	27.321%
Rumput/Tanah Kosong	1,193.52	0.376%
Sawah Irigasi	55,640.93	17.547%
Sawah Tadah Hujan	2,980.58	0.940%
Semak/Belukar	63,227.04	19.939%
Sungai	2,609.94	0.823%
Tambak	107.23	0.034%
Tegalan/Ladang	42,797.81	13.497%

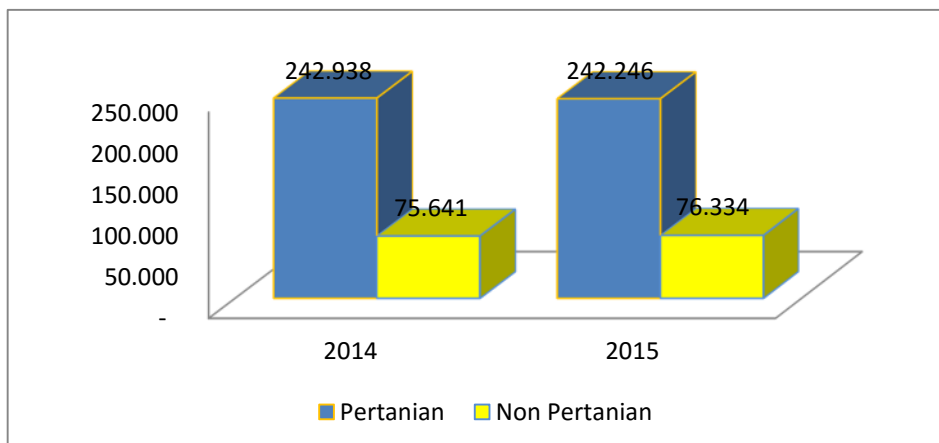
Sumber: Peninjauan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang RTRW DIY (2015)



Sumber: Peninjauan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang RTRW DIY (2015)

**Gambar II.7 Peta Tutupan Lahan di DIY**

Berdasarkan data BPS, luasan lahan pertanian menurun dari angka 242.938 Ha pada tahun 2014 menjadi 242.246 Ha pada tahun 2015 atau menurun 692 Ha dalam kurun waktu 1 tahun. Sedangkan lahan bukan pertanian (jalan, permukiman, perkantoran, dll) meningkat dari 75.641 Ha pada tahun 2014 menjadi 76.334 Ha pada tahun 2015 atau mengalami peningkatan sebesar 0.22%. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke lahan bukan pertanian seluas 692 Ha atau 0,22 % selama 1 tahun.



Sumber: BPS, DIY dalam Angka 2016

**Gambar II.8 Grafik Penggunaan Lahan di DIY**

## 7. Peruntukan Lahan

Peruntukan lahan adalah tingkat kecocokan dari sebidang lahan untuk suatu kegiatan atau penggunaan tertentu yang lebih spesifik dari kemampuan lahan. Peruntukan lahan Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Perda DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY secara umum terdiri atas Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.

Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan, dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Adapun lahan di DIY yang ditetapkan peruntukannya sebagai kawasan lindung terdiri dari :

- a. kawasan lindung bawahan
- b. kawasan lindung setempat
- c. kawasan suaka alam
- d. kawasan suaka margasatwa
- e. kawasan rawan bencana alam.

Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan, dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Lahan di DIY dengan peruntukan sebagai kawasan Budidaya sebagai berikut :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan pertambangan;
- d. kawasan peruntukan industri;
- e. kawasan peruntukan pariwisata;
- f. kawasan peruntukan permukiman;
- g. kawasan pendidikan tinggi;
- h. kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- i. kawasan militer dan kepolisian.

Luasan lahan untuk masing-masing peruntukan lahan tersaji dalam tabel berikut:

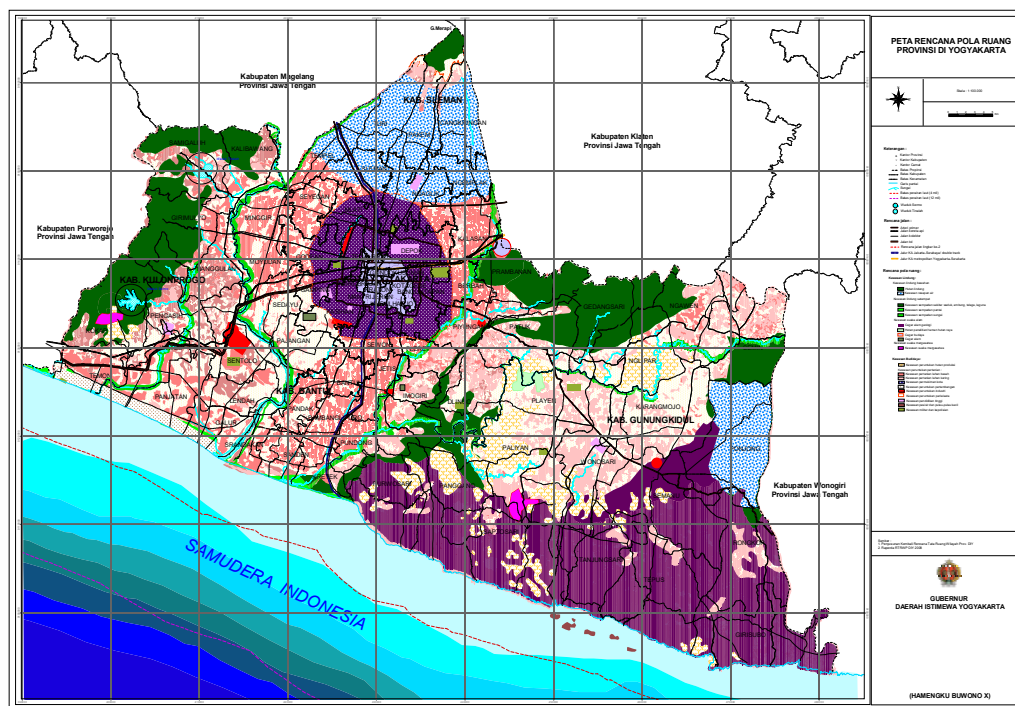
**Tabel II-6 Luasan Lahan Kawasan Lindung di DIY**

<b>Kawasan Lindung</b>	<b>Luas (Ha)</b>
Hutan Lindung	40,211.92
Kawasan Resapan Air	27,880.26
Sempadan Pantai	1,431.46
Sempadan Sungai	9,590.24
Sekitar danau/waduk	405.67
Cagar Budaya	3,622.19
Cagar alam	41.92
Cagar alam Geologi	61,688.56
Kawasan Suaka Margasatwa	640.09
Kawasan Budidaya	Luas (Ha)
Peruntukan Hutan Produksi	15,512.58
Kawasan Pertanian Lahan Basah	31,705.45

Kawasan Lindung	Luas (Ha)
Kawasan Pertanian Lahan Kering	47,566.79
Persawahan (Tadah hujan)	243.31
Kawasan Peruntukan Pertambangan	1,638.09
Kawasan Peruntukan Industri	1,193.39
Permukiman Desa	55,233.25
Permukiman Kota	17,067.36
Kampung	10,195.71
Kawasan Pendidikan Tinggi	992.86
Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	313.51
Kawasan Militer dan Kepolisian	829.29

Sumber: Analisis GIS Peta Pola Ruang RTRW DIY 2009-2029

Gambaran secara umum peruntukan lahan di DIY tersaji dalam Peta Pola Ruang berikut:



Sumber: Perda DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang RTRW DIY 2009 – 2029

## Gambar II.9 Peta Rencana Pola Ruang di DIY

Seiring dengan dinamika yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, sejak tahun 2015 telah dilakukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap Perda DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang RTRW DIY 2009 – 2029. Peninjauan kembali RTRW DIY mengakibatkan adanya perubahan peruntukan lahan, baik pada kawasan lindung maupun kawasan budidaya. Sampai akhir TA 2017, peninjauan kembali RTRW DIY tersebut masih dalam proses.

## 8. Potensi Sumberdaya Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir DIY yang meliputi wilayah Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul memiliki berbagai potensi yang dapat dimanfaatkan. Potensi tersebut antara lain:

### a) Perikanan tangkap laut

Kondisi perikanan tangkap di selatan Jawa mempunyai nilai potensi lestari sebesar 320.000 ton/tahun. Sumberdaya perikanan yang potensial di DIY meliputi berbagai jenis ikan pelagis besar dan kecil, ikan demersal, serta ikan karang. Jenis ikan pelagis kecil yang potensial meliputi ikan layang dan ikan kembung. Sementara untuk ikan jenis pelagis besar, diantaranya madidihang dan cakalang. Selain itu, untuk jenis ikan demersal yang nilai produksinya besar adalah ikan layur dan ikan manyung. Di sisi lain, untuk jenis ikan karang yang potensinya besar diantaranya ikan ekor kuning/pisang-pisang dan ikan kerapu karang. Beberapa jenis lain yang nilai produksinya tinggi dan potensial untuk dimanfaatkan adalah udang jerbung, kepiting, cumi-cumi dan gurita.

Potensi sumberdaya perikanan laut yang besar tersebut masih belum sebanding dengan tingkat pemanfaatannya. Hingga saat ini tingkat pemanfaatannya masih sekitar 2%. Hal ini berarti terjadi *underfishing* karena pemanfaatannya masih jauh berada di bawah potensi. Oleh karena itu, potensi sumberdaya perikanan di selatan DIY masih terbuka luas untuk dimanfaatkan.

Sementara, bila dilihat lebih luas, DIY berada dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 573 yang mencakup 8 provinsi yang meliputi selatan Jawa hingga Nusa Tenggara dengan total potensi 491.700 ribu ton/tahun. Dengan sifat laut yang *open access*, maka peningkatan kapasitas nelayan DIY diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya ikan yang lebih luas pula.

### b) Ekosistem terumbu karang

Terdapat 7 lokasi yang memiliki ekosistem terumbu karang di DIY yang semuanya terdapat di perairan Kabupaten Gunungkidul. Ekosistem terumbu karang tersebut terdapat di Pantai Ngrehen, Pantai Gesing, Pantai Ngandong, Pantai Baron, Pantai Drini, Pantai Nglambor, dan Pantai Wediombo. Tutupan karang keras hidup di semua lokasi, namun hanya di Pantai Wediombo yang kondisinya tutupannya relatif lebih baik.

### c) Ekosistem Mangrove

Hutan mangrove merupakan komunitas tumbuhan yang khas berada di daerah tropis sepanjang pantai yang terlindung atau berada di muara sungai, sering disebut sebagai hutan bakau, hutan payau, atau hutan pasang surut dan merupakan suatu ekosistem antara darat dan laut. di dalam hutan mangrove, perairan dan tanah di bawahnya merupakan habitat berbagai satwa dan biota perairan. luas hutan mangrove di DIY pada tahun 2012 seluas 61 ha.

Mangrove di DIY tersebar di beberapa lokasi yang dapat dijumpai dengan membentuk suatu ekosistem maupun dalam kelompok-kelompok (spot) yang kecil. Berdasarkan hasil pengamatan dan identifikasi di lokasi pendataan, ditemukan 12 spesies mangrove teridentifikasi di kawasan pesisir Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Bantul, yang terdiri dari 6 komponen mangrove mayor (*Avicennia marina*, *Avicennia alba*,

Rhizophora stylosa, Rhizophora mucronata, Sonneratia caseolaris dan Nypa fruticans) dan 6 komponen mangrove asosiasi (Acanthus ilicifolius, Hibiscus tiliaceus, Ipomoea pes-caprae, Pandanus tectorius, Sesuvium portulacastrum dan Terminalia catappa)

d) Ekosistem Gumuk Pasir

Di pesisir Parangtritis terbentuk gumuk pasir aeolian tipe barkhan yang jarang dijumpai di wilayah iklim tropika basah. Gumuk pasir di Parangtritis bahkan merupakan satu-satunya daerah tropis yang terbentuk barkhan. Gumuk pasir terbentuk dari pasir yang terbawa ke laut oleh Kali Opak dari material vulkanik hasil letusan Gunungapi Merapi.

Ekosistem gumuk pasir dijadikan sebagai habitat oleh berbagai hewan dan tumbuhan. Tumbuhan dapat hidup pada wilayah gumuk pasir karena gumuk pasir menyimpan cadangan air lensa yang cukup banyak. Tumbuhan yang tumbuh secara alami di kawasan gumuk pasir antara lain adalah rumput katang-katang, kaktus, bunga tapak dara, siwalan, rumput alang-alang, pandan, dan leresede. Lebatnya tumbuhan pada bagian barat gumuk pasir menjadikan gumuk pasir ditempati oleh berbagai hewan khususnya burung.

Berbagai macam aktivitas kebudayaan juga dapat ditemukan di kawasan gumuk pasir dan sekitarnya. Keterdapat situs budaya yang ada di kawasan ini menjadikan salah satu magnet kegiatan budaya di kawasan ini. Berdasarkan hasil identifikasi lapangan, terdapat 15 situs alam dan budaya yang terdapat di sekitar kawasan gumuk pasir Kecamatan Kretek. Hal ini membuktikan bahwa gumuk pasir selain memiliki keunikan alam juga memiliki peranan yang penting dalam kegiatan budaya.

e) Pariwisata

Destinasi wisata yang banyak terdapat di pesisir dan pulau-pulau kecil DIY sebagian besar didominasi oleh wisata pantai. Terdapat 70 wisata pantai di DIY yang terdiri dari 60 pantai di Kabupaten Gunungkidul, 6 pantai di Kabupaten Bantul, dan 4 Pantai Kabupaten Kulonprogo yang sering dikunjungi wisatawan nusantara atau wisatawan mancanegara. Dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata DIY Tahun 2012-2025 ditetapkan perwilayahan pembangunan destinasi wisata pesisir, yaitu Kawasan Glagah-Trisik dan sekitarnya; Kawasan Parangtritis-Depok dan sekitarnya; Kawasan Baron-Sundak dan sekitarnya; serta Kawasan Siung-Wediombo-Sadeng dan sekitarnya.

f) Energi Baru Terbarukan

Beberapa potensi energi alternatif yang dapat dikembangkan di wilayah pesisir DIY antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), serta Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB). Potensi tenaga air di DIY yang dapat dimanfaatkan untuk PLTMH mencapai 763,6 Kw. Potensi intensitas radiasi matahari mencapai 4,5 kWh/m<sup>2</sup> dengan potensi radiasi maksimum terjadi pada jam 10.00-14.30 hampir diseluruh wilayah untuk pengembangan PLTS. Kapasitas potensi PLTB di sepanjang pantai Yogyakarta mencapai 10 MW dengan kecepatan angin sebesar 2,5 – 4 m/s, sedangkan di Sundak, Srandakan, Baron dan Pantai Samas kapasitas potensi PLTB mencapai 10 hingga 100 MW dengan kecepatan angin sebesar 4-5 m/s. Selain itu, energi

gelombang laut juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber energi alternatif, terutama di kecamatan Saptosari.

## **9. Potensi Pengembangan Wilayah**

Potensi pengembangan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY, berada pada kawasan budidaya dan kawasan strategis provinsi. Berdasarkan kajian peninjauan Perda DIY No 2 Tahun 2010 tentang RTRW DIY, potensi pengembangan wilayah sesuai dengan rencana pola ruang kawasan budidaya terdiri dari : kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan peruntukan budidaya lainnya. Sedangkan potensi pengembangan wilayah sesuai dengan kawasan strategis provinsi terdiri atas: kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.

Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya terdiri atas kawasan strategis kasultanan dan kawasan strategis kadipaten. Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan ekonomi terdiri atas Kawasan Perkotaan Yogyakarta, Kawasan Temon-Prambanan, Kawasan Tempel-Parangtritis, dan Kawasan Pantai Selatan DIY. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas Kawasan Bentang Alam Karst dan Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi terdiri atas Kawasan Pantai Selatan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Bayu dan Gelombang Laut di Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul.



Bencana alam akibat angin topan berpotensi terjadi di wilayah pantai selatan Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan daerah-daerah Kabupaten Sleman bagian utara, serta wilayah perkotaan Yogyakarta.

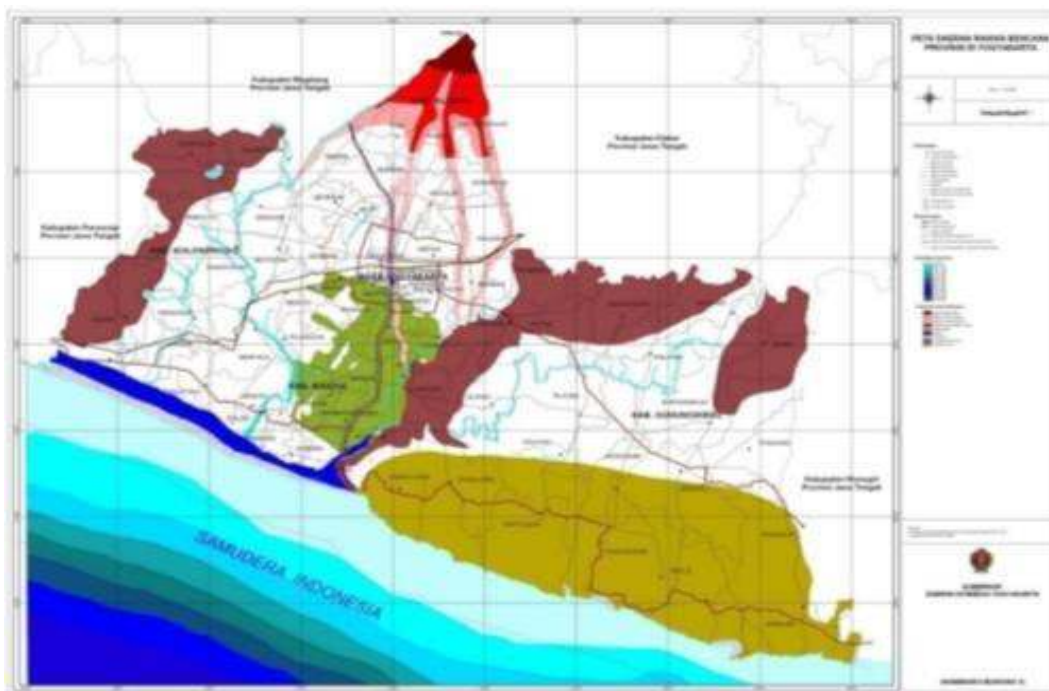
6) Kawasan rawan gempa bumi di kabupaten/kota.

Gempa bumi tektonik berpotensi terjadi karena wilayah DIY berdekatan dengan kawasan tumbukan lempeng (*subduction zone*) di dasar Samudra Indonesia yang berada di sebelah selatan DIY. Disamping itu, secara geologi di wilayah DIY terdapat beberapa patahan yang diduga aktif. Wilayah dataran rendah yang tersusun oleh sedimen lepas, terutama hasil endapan sungai, merupakan wilayah yang rentan mengalami guncangan akibat gempa bumi.

7) Kawasan rawan tsunami di sepanjang pantai di Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul (khususnya pada pantai dengan elevasi (ketinggian) kurang dari 30 m dari permukaan air laut).

8) Kawasan rawan abrasi di semua daerah pantai di Kabupaten Gunungkidul, Bantul, dan Kulon Progo baik pantai tebing maupun pantai pasir.

Potensi bencana yang disebabkan oleh faktor manusia/sosial di DIY antara lain konflik antar kelompok masyarakat dan terorisme. Sementara itu, potensi bencana yang disebabkan oleh faktor non-alam antara lain, gagal teknologi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri dan pencemaran lingkungan. Namun demikian frekuensi dan kerawanan bencana yang disebabkan oleh faktor manusia/sosial dan non alam, selama ini masih relatif kecil.



Sumber: Bappeda DIY, RTRW DIY Tahun 2009-2029

**Gambar II.11 Peta Kawasan Rawan Bencana DIY**

Pada rancangan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana DIY 2018 – 2022 dijelaskan tentang potensi ancaman bencana yang menyajikan rincian indeks bahaya dengan luas daerah terpapar (hektar) untuk bencana yang berpotensi di wilayah DIY sebagai berikut:

**Tabel II-7 Tingkat Ancaman Bencana di Wilayah DIY**

No	Jenis Ancaman Bencana	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas Risiko
1	Banjir	158.551	Tinggi
2	Banjir Bandang	3.059	Tinggi
3	Cuaca Ekstrem	287.466	Sedang
4	Epidemi Dan Wabah Penyakit	20.317	Rendah
5	Gelombang Ekstrem Dan Abrasi	2.476	Sedang
6	Gempa bumi	313.315	Tinggi
7	Kebakaran Hutan Dan Lahan	12.757	Tinggi
8	Kegagalan Teknologi	1.901	Tinggi
9	Kekeringan	313.315	Tinggi
10	Letusan Gunungapi Merapi	7.755	Tinggi
11	Tanah Longsor	44.458	Tinggi
12	Tsunami	7.522	Tinggi

sumber: Draft RPB DIY 2018-2022

Tabel di atas memperlihatkan bahwa indeks bahaya seluruh potensi di DIY berada pada kelas rendah, sedang, hingga tinggi. Adapun bencana dengan kelas bahaya rendah yaitu epidemi dan wabah penyakit, bencana yang memiliki kelas bahaya sedang yaitu cuaca ekstrem dan gelombang ekstrem dan abrasi. Sedangkan bencana yang memiliki kelas bahaya tinggi yaitu banjir bandang, gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, kegagalan teknologi, letusan gunungapi, kebakaran hutan dan lahan dan tsunami. Penentuan indeks tersebut diperoleh berdasarkan luas terpapar bahaya yang paling besar, selain itu juga mengacu pada peta bahaya untuk tiap potensi bencana yang mengancam di wilayah DIY.

Potensi bencana yang disebabkan oleh faktor manusia/sosial di DIY antara lain konflik antar kelompok masyarakat dan terorisme. Sementara itu, potensi bencana yang disebabkan oleh faktor non-alam antara lain, gagal teknologi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri dan pencemaran lingkungan. Namun demikian frekuensi dan kerawanan bencana yang disebabkan oleh faktor manusia/sosial dan non alam, selama ini masih relatif kecil.

Risiko bencana harus tetap menjadi perhatian dalam pembangunan wilayah. Wilayah rawan bencana telah diidentifikasi. Kawasan rawan bencana gunung berapi di lereng Gunung Merapi, Kabupaten Sleman. Kawasan yang terdampak mencakup hampir seluruh wilayah DIY terutama Kabupaten Sleman bagian utara dan wilayah-wilayah sekitar sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Kawasan rawan bencana tanah longsor di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul. Gerakan tanah/batuan dan erosi berpotensi terjadi pada kawasan lereng pegunungan di Kulon Progo yang mencakup wilayah Kulon Progo bagian utara dan barat serta pada lereng pegunungan selatan (Baturagung) yang mengancam wilayah Gunungkidul bagian utara dan Kabupaten Bantul bagian timur.

Kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo. Banjir terutama berpotensi mengancam daerah pantai selatan Kabupaten Bantul dan Kulon Progo. Kawasan rawan bencana kekeringan di Kabupaten Gunungkidul, Bantul, Sleman dan Kulon Progo. Bahaya kekeringan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Gunungkidul bagian selatan khususnya pada wilayah dengan bentang alam karst. Kawasan rawan bencana angin topan berpotensi terjadi di wilayah pantai selatan Kabupaten Kulon Progo, Bantul dan daerah-daerah di Kabupaten Sleman bagian utara serta wilayah perkotaan Yogyakarta.

Kawasan rawan gempa bumi tektonik berpotensi terjadi karena wilayah DIY berdekatan dengan zona subduksi (kawasan tumbukan antar lempeng) di dasar samudera Indonesia yang berada di sisi selatan DIY. Di samping itu, secara geologi, di wilayah DIY terdapat beberapa sesar yang diduga aktif. Wilayah dataran rendah yang tersusun oleh sedimen lepas, terutama hasil endapan sungai merupakan wilayah yang rentan mengalami guncangan akibat gempabumi. Kawasan rawan bencana tsunami di sepanjang pantai Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul khususnya pada pantai dengan elevasi kurang dari 30 meter dari permukaan air laut.

Jenis ancaman bencana berdasarkan indeks bahaya dan peta bahaya untuk seluruh bencana yang berpotensi di DIY

a. Banjir

Parameter yang dilihat untuk menghitung indeks bahaya banjir adalah sebagai berikut :

1. Daerah rawan banjir (divalidasi dengan atau kejadian).
2. Kemiringan lereng.
3. Jarak dari sungai.
4. Curah hujan.

Berdasarkan parameter tersebut maka diperoleh hasil kajian bahaya banjir perkabupaten/kota untuk wilayah DIY seperti tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel II-8 Potensi Luas Banjir di Wilayah DIY**

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas Risiko
1	Kulon Progo	28.600	Sedang
2	Bantul	35.051	Sedang
3	Gunungkidul	42.808	Sedang
4	Sleman	48.842	Sedang
5	Yogyakarta	3.250	Tinggi
DIY		<b>158.551</b>	<b>Tinggi</b>

sumber: Draft RPB DIY 2018-2022

Tabel di atas memperlihatkan luas terdampak, kelas bahaya banjir di wilayah DIY. Hasil pengkajian bahaya yang dilakukan memperlihatkan seluruh kabupaten/kota yang terpapar

bahaya banjir. Berdasarkan pengkajian tersebut, diketahui total luas bahaya banjir di wilayah DIY adalah 158.551 hektar dengan kelas bahaya tinggi.

b. Banjir Bandang

Parameter yang dilihat untuk menghitung indeks bahaya banjir bandang adalah sungai utama, elevasi/topografi dan potensi longsor di hulu sungai (kelas tinggi).

Berdasarkan parameter tersebut maka diperoleh hasil kajian bahaya banjir bandang untuk wilayah DIY seperti tersaji pada di bawah ini

**Tabel II-9 Potensi Luas Banjir Bandang di Wilayah DIY**

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas Risiko
1	Kulon Progo	415	Tinggi
2	Bantul	2.007	Tinggi
3	Gunungkidul	637	Tinggi
DIY		3.059	Tinggi

sumber: Draft RPB DIY 2018-2022

Berdasarkan pengkajian tersebut, diketahui total luas bahaya banjir bandang adalah 3.059 hektar dengan kelas bahaya tinggi tersebar di 3 kabupaten, yakni Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul.

c. Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Parameter yang dipergunakan untuk menghitung indeks bahaya gelombang ekstrim dan abrasi adalah sebagai berikut:

- Tinggi Gelombang
- Arus (*Current*)
- Tutupan Vegetasi
- Bentuk Garis Pantai
- Tipologi Pantai

Berdasarkan parameter tersebut maka diperoleh hasil kajian bahaya gelombang ekstrim dan abrasi untuk wilayah DIY seperti tersaji pada tabel di berikut ini.

**Tabel II-10 Potensi Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Wilayah DIY**

No	Kabupaten/Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas Risiko
1	Kulon Progo	542	Sedang
2	Bantul	353	Sedang
3	Gunungkidul	1.581	Sedang
DIY		<b>2.476</b>	Sedang

sumber: Draft RPB DIY 2018-2022

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa di wilayah DIY untuk bahaya gelombang ekstrim dan abrasi berada pada kelas risiko sedang. Hal tersebut diperoleh berdasarkan luas terpapar bahaya terdampak yang paling besar/luas, total luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi seluas 2.476 hektar.

d. Kekeringan

Parameter yang digunakan untuk menghitung indeks bahaya kekeringan adalah kekeringan meteorologi (indeks presipitasi terstandarisasi).

Berdasarkan parameter tersebut maka diperoleh hasil kajian bahaya kekeringan untuk wilayah DIY seperti tersaji pada tabel di berikut ini.

**Tabel II-11 Potensi Kekeringan di Wilayah DIY**

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas Risiko
1	Kulon Progo	58.628	Sedang
2	Bantul	50.813	Sedang
3	Gunungkidul	143.142	Tinggi
4	Sleman	57.482	Sedang
5	Yogyakarta	3.250	Sedang
DIY		<b>313.315</b>	<b>Tinggi</b>

sumber: Draft RPB DIY 2018-2022

Dari tabel diatas, terlihat bahwa di wilayah DIY untuk bahaya kekeringan berada pada kelas tinggi. Hal tersebut diperoleh berdasarkan luas terpapar bahaya terdampak yang paling besar/luas, dengan total luas wilayah berpotensi bahaya kekeringan adalah 313.315 hektar.

e. Letusan Gunung Api

Parameter yang digunakan untuk menghitung indeks bahaya letusan gunung api adalah zona aliran dan zona jatuhan.

Pengkajian bahaya letusan gunungapi dilakukan terhadap Gunung Merapi di Kabupaten Sleman, DIY. Berdasarkan parameter tersebut maka diperoleh hasil kajian bahaya letusan Gunung Merapi Sleman seperti tersaji pada tabel berikut ini.

**Tabel II-12 Potensi Letusan Gunungapi di Wilayah DIY**

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas Risiko
1	Sleman	7.755	Tinggi
DIY		<b>7.755</b>	<b>Tinggi</b>

sumber: Draft RPB DIY 2018-2022

Tabel di atas memperlihatkan luas terdampak, kelas bahaya letusan Gunung Merapi di Kabupaten Sleman, DIY. Hasil pengkajian bahaya yang dilakukan memperlihatkan satu kabupaten/kota yang terpapar bahaya letusan Gunung Api Sleman. Berdasarkan pengkajian

tersebut, diketahui total luas bahaya letusan Gunung Merapi Kabupaten Sleman di DIY adalah 7.755 hektar dengan kelas bahaya tinggi.

f. Cuaca Ekstrim

Parameter yang dipakai untuk menghitung indeks bahaya cuaca ekstrim adalah keterbukaan lahan, kemiringan lereng, dan curah hujan tahunan.

Berdasarkan parameter tersebut maka diperoleh hasil kajian bahaya cuaca ekstrim untuk wilayah DIY seperti terlihat pada tabel di bawah ini

**Tabel II-13 Potensi Dampak Cuaca Ekstrim di Wilayah DIY**

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas Risiko
1	Kulon Progo	58.627	sedang
2	Bantul	49.047	sedang
3	Gunungkidul	122.088	sedang
4	Sleman	54.454	sedang
5	Yogyakarta	3.250	sedang
DIY		<b>287.466</b>	<b>sedang</b>

sumber: Draft RPB DIY 2018-2022

g. Tanah longsor

Parameter yang digunakan untuk menghitung indeks bahaya tanah longsor adalah zona kerentanan gerakan tanah (PVMBG) dan kemiringan lereng. Berdasarkan parameter tersebut maka diperoleh hasil kajian bahaya tanah longsor untuk wilayah DIY seperti terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel II-14 Potensi Tanah Longsor di Wilayah DIY**

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas Risiko
1	Kulon Progo	17.215	Tinggi
2	Bantul	6.449	Tinggi
3	Gunungkidul	17.127	Tinggi
4	Sleman	3.667	Tinggi
DIY		<b>44.458</b>	<b>Tinggi</b>

sumber: Draft RPB DIY 2018-2022

h. Gempa bumi

Parameter yang dipakai untuk menghitung indeks bahaya gempabumi adalah klasifikasi topografi, intensitas guncangan di batuan dasar dan intensitas guncangan di permukaan. Berdasarkan parameter tersebut maka diperoleh hasil kajian bahaya gempa bumi untuk wilayah DIY seperti terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel II-15 Potensi Wilayah Terdampak Gempa Bumi di DIY**

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas Risiko
1	Kulon Progo	58.627	Sedang
2	Bantul	49.047	Tinggi
3	Gunungkidul	122.088	Sedang
4	Sleman	54.454	Tinggi
5	Yogyakarta	3.250	Tinggi
DIY		<b>287.466</b>	<b>Tinggi</b>

sumber: Draft RPB DIY 2018-2022

i. Tsunami

Parameter yang digunakan untuk menghitung indeks bahaya tsunami adalah ketinggian maksimum tsunami, kemiringan lereng dan kekasaran permukaan. Berdasarkan parameter tersebut maka diperoleh gambaran bahaya tsunami untuk wilayah DIY seperti terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel II-16 Potensi Wilayah Terdampak Tsunami di DIY**

No	Kabupaten/Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas Risiko
1	Kulon Progo	4.262	Tinggi
2	Bantul	2.591	Tinggi
3	Gunungkidul	669	Tinggi
DIY		<b>7.522</b>	<b>Tinggi</b>

sumber: Draft RPB DIY 2018-2022

Tabel di atas menyajikan informasi bahwa luas terdampak dan kelas bahaya tsunami di wilayah DIY. Hasil pengkajian bahaya yang dilakukan memperlihatkan tiga kabupaten/kota yang terpapar bahaya tsunami yakni Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan pengkajian tersebut, total luas wilayah yang berpotensi terpapar bahaya tsunami di DIY adalah 7.522 hektar dengan kelas bahaya tinggi.

j. Epidemio dan wabah penyakit

Parameter yang digunakan untuk menghitung indeks bahaya epidemio dan wabah penyakit adalah sebagai berikut :

1. Kepadatan penduduk penderita malaria
2. Kepadatan penduduk penderita demam berdarah
3. Kepadatan penduduk penderita HIV/AIDS
4. Kepadatan penduduk penderita campak
5. Kepadatan penduduk

Berdasarkan parameter tersebut maka diperoleh hasil kajian bahaya epidemio dan wabah penyakit untuk wilayah DIY seperti terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel II-17 Potensi Bahaya Epidemi dan Wabah Penyakit di DIY**

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas Risiko
1	Kulon Progo	3.549	Rendah
2	Bantul	3.597	Rendah
3	Gunungkidul	9.471	Rendah
4	Sleman	3.673	Rendah
5	Yogyakarta	27	Rendah
DIY		287.466	<b>Rendah</b>

sumber: Draft RPB DIY 2018-2022

k. Kegagalan Teknologi

Parameter yang dipakai untuk menghitung indeks bahaya kegagalan teknologi adalah kapasitas industri dan jenis industri manufaktur (logam) dan kimia. Berdasarkan parameter tersebut maka diperoleh hasil kajian bahaya kegagalan teknologi untuk wilayah DIY seperti terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel II-18 Potensi Wilayah Terdampak Kegagalan Teknologi di DIY**

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas Risiko
1	Kulon Progo	513	Tinggi
2	Bantul	437	Tinggi
3	Sleman	758	Tinggi
4	Yogyakarta	193	Tinggi
DIY		<b>1.901</b>	<b>Tinggi</b>

sumber: Draft RPB DIY 2018-2022

l. Kebakaran Hutan dan Lahan

Parameter yang dipergunakan untuk menghitung indeks bahaya kebakaran hutan dan lahan adalah jenis hutan dan lahan, iklim dan jenis tanah. Berdasarkan parameter tersebut maka diperoleh hasil kajian bahaya kebakaran hutan dan lahan untuk wilayah DIY seperti terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel II-19 Potensi Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah DIY**

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas Risiko
1	Kulon Progo	53	Tinggi
2	Bantul	436	Sedang
3	Gunungkidul	10.784	Sedang
4	Sleman	1.484	Sedang
DIY		<b>12.757</b>	<b>Tinggi</b>

sumber: Draft RPB DIY 2018-2022

Potret kejadian bencana yang pernah terjadi di DIY dalam rentang waktu antara tahun 1885-2016 dapat dilihat pada Data dan Informasi Bencana Indonesia seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II-20 Catatan Data Bencana di DIY Tahun 1885-2016**

Kejadian	Jumlah Kejadian	Meninggal	Luka-Luka	Hilang	Menderita	Mengungsi	Rumah Rusak Berat	Rumah Rusak Ringan
Banjir	34	2	5	-	3.090	869	139	-
Epidemi & Wabah Penyakit	1	16	-	-	-	-	-	-
Gelombang Pasang / Abrasi	1	-	-	-	-	-	-	29
Gempa Bumi	10	4.923	22.406	-	-	1.403.617	95.903	107.048
Tsunami	1	3	3	-	-	-	-	-
Kegagalan Teknologi	2	75	119	-	-	-	-	-
Kekeringan	34	-	-	-	-	-	-	-
Letusan Gunung Api	7	4.249	186	-	-	10.759	2	-
Cuaca Ekstrem	24	16	83	-	-	790	226	1.417
Tanah Longsor	12	32	5	-	-	589	47	500
<b>TOTAL</b>	<b>127</b>	<b>9.316</b>	<b>22.807</b>	<b>-</b>	<b>3.090</b>	<b>1.416.624</b>	<b>96.317</b>	<b>108.994</b>

Sumber : Data & Informasi Bencana Indonesia 1885-2016

## II.1.2 Aspek Demografi

### Perkembangan Penduduk

Pertumbuhan penduduk DIY secara umum dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Kebijakan pemerintah dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk berorientasi pada penurunan tingkat kelahiran dan kematian serta meningkatkan mobilitas penduduk. Upaya untuk menurunkan tingkat kelahiran antara lain dengan mendorong kegiatan, seperti penundaan usia perkawinan, penggunaan alat kontrasepsi, dan kampanye program KB. Sementara upaya menurunkan kematian dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Hasil Sensus Penduduk yang dilakukan oleh BPS, selama kurun waktu 1971 hingga 2010, jumlah penduduk DIY terus mengalami peningkatan. Pada tahun 1971, jumlah penduduk DIY yaitu sebanyak 2.489.360 orang kemudian meningkat sebesar 38,89% menjadi 3.457.491 orang pada tahun 2010. Menurut proyeksi BPS selama kurun waktu 2011-2016, jumlah penduduk DIY mengalami peningkatan menjadi 3.509.997 jiwa pada tahun 2011 dan terus meningkat menjadi 3.720.912 jiwa pada tahun 2016. Pertumbuhan penduduk pada tahun 2016 terhadap tahun 2010 mencapai 1,18%, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya, yang mencapai 1,13%.



Sumber: BPS, DIY dalam Angka 2016

**Gambar II.12 Jumlah Penduduk DIY menurut Sensus Penduduk Tahun 1971-2010 dan Proyeksi Penduduk Tahun 2011-2016**

Komposisi kelompok umur penduduk DIY selama kurun waktu 1971-2010 didominasi oleh penduduk usia dewasa/produktif. Penduduk kelompok umur 0-14 tahun selama kurun waktu tersebut cenderung mengalami penurunan. Sejak tahun 1990, struktur umur penduduk DIY dikatakan sebagai “penduduk usia tua” karena penduduk umur 0-14 tahun kurang dari 30% dan penduduk usia 65 tahun ke atas mengalami kenaikan. Semakin meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut mengindikasikan tingginya usia harapan hidup penduduk DIY.

**Tabel II-21 Presentase Penduduk Menurut Kelompok Umur di DIY Tahun 1971-2016**

Kelompok Umur	1971	1980	1990	2000	2010	2015	2016
0 – 14	40,90	35,06	28,28	22,38	21,96	21,84	21,77
15 – 64	54,82	59,14	64,46	69,10	68,53	68,94	68,96
65 +	4,38	5,80	7,26	8,53	9,51	9,22	9,27
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, DIY Dalam Angka 2016

Pada tahun 2015, Kabupaten Sleman merupakan daerah yang banyak dihuni oleh penduduk DIY yaitu sebanyak 1.167.481 jiwa atau sebesar 31,73% dari total jumlah penduduk DIY. Sedangkan Kabupaten Kulon Progo merupakan daerah yang memiliki penduduk yang paling sedikit dibandingkan dengan daerah lain yaitu sebesar 412.198 jiwa atau 11,20% dari total penduduk DIY.

**Tabel II-22 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2010-2015**

Kab/Kota	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sleman	1.093.110	1.107.304	1.114.833	1.147.037	1.163.970	1.167.481
Bantul	911.503	921.263	927.958	955.015	968.932	971.511

Gunungkidul	675.382	677.998	684.740	693.523	698.825	715.282
Kulon Progo	388.869	390.207	393.221	401.450	405.222	412.198
Kota Yogyakarta	388.627	390.553	394.012	397.828	400.467	412.704
DIY	3.457.491	3.487.325	3.514.764	3.594.853	3.637.416	3.679.176

Sumber: BPS, DIY Dalam Angka 2016

Aspek demografi lain yang perlu dipertimbangkan adalah kepadatan penduduk. Kota Yogyakarta memiliki kepadatan penduduk tertinggi di DIY dibandingkan daerah lain yaitu sebesar 2.031 jiwa/km<sup>2</sup> karena luas wilayahnya yang sempit. Sementara itu Kabupaten Gunungkidul merupakan wilayah dengan kepadatan terendah dengan tingkat kepadatan sebesar 483 jiwa/km<sup>2</sup>.

**Tabel II-23 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2010-2015**

Kab/Kota	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Sleman	1.942	1.964	1.986	2.008	2.031
Bantul	1.819	1.844	1.869	1.893	1.917
Gunungkidul	461	466	471	477	482
Kulon Progo	672	680	688	695	703
Kota Yogyakarta	12.077	12.234	12.390	12.544	12.699
DIY	1.102	1.115	1.128	1.142	1.155

Sumber: BPS, DIY Dalam Angka 2016

## II.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, beberapa aspek pembangunan yang penting diperhatikan adalah aspek ekonomi dan sosial budaya. Pada aspek ekonomi, beberapa indikator yang umum digunakan untuk menganalisis keberhasilan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan wilayah. Terdapat beberapa catatan kondisi makro DIY yang ditunjukkan oleh indikator-indikator tersebut selama kurun waktu lima tahun terakhir.

*Pertama*, pertumbuhan ekonomi DIY selama 2011-2016 berfluktuasi. Selama kurun waktu tersebut, capaian pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah 5,47% tahun 2013 sementara terendah adalah 4,95% tahun 2015. Lebih lanjut, dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa, pertumbuhan ekonomi DIY relatif rendah.

*Kedua*, ketimpangan pendapatan yang dihitung dengan Indeks Gini menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Indeks Gini tahun 2011 cenderung sama dengan tahun 2016, yaitu 0,42 dan angka tersebut lebih besar dibandingkan Indeks Gini Nasional. Sementara itu, ketimpangan wilayah yang diindikasikan oleh Indeks Williamson menunjukkan trend yang menurun.

*Ketiga*, tingkat kemiskinan DIY cenderung mengalami penurunan dari tahun 2012 sebesar 16,05% turun menjadi 13,02% tahun 2017. Namun, capaian tahun 2017 tersebut masih lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan nasional.

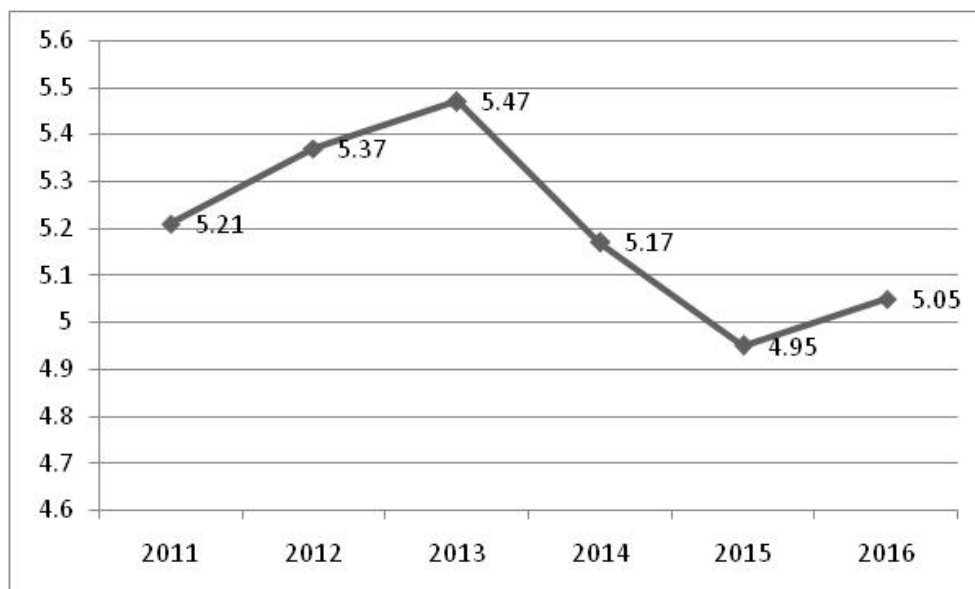
Sementara itu, kesejahteraan masyarakat DIY dilihat dari aspek sosial dan aspek seni dan budaya tercatat beberapa capaian. *Pertama*, beberapa capaian indikator pendidikan, seperti Angka Harapan Lama Sekolah (AHLs) dan angka rata-rata lama sekolah menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antar wilayah di DIY. Capaian indikator Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta berada di atas rata-rata capaian DIY sedangkan Kabupaten Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo masih relatif rendah. *Kedua*, capaian indikator kesehatan, seperti Angka Kematian Ibu (AKI) masih perlu mendapat perhatian karena pada tahun 2016 terjadi peningkatan. Sementara itu, jumlah kematian bayi dan jumlah kematian balita meskipun memiliki kecenderungan menurun tetapi jumlahnya masih besar.

Penjelasan terinci aspek kesejahteraan masyarakat akan diuraikan dalam subbab-subbab berikut ini.

## II.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

### 1. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi DIY selama 2011-2016 cenderung memiliki tren yang menurun. Pertumbuhan ekonomi DIY pada tahun 2011 adalah sebesar 5,21% meningkat menjadi 5,47% pada tahun 2013 kemudian mengalami penurunan dua tahun berturut-turut menjadi 4,95% pada tahun 2015. Namun, tahun 2016 meningkat menjadi 5,05%, lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu 5,02%.



Sumber: BPS, Statistik Daerah DIY 2017& Berita Resmi Statistik (BRS) 2017

**Gambar II.13 Laju Pertumbuhan Ekonomi DIY, 2011-2016**

Pertumbuhan ekonomi DIY jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa relatif masih rendah, salah satunya karena wilayah DIY relatif kecil sehingga sumber daya alam yang dimiliki terbatas dan skala pengembangan industri pengolahan tidak sebesar provinsi lain di Jawa. Perekonomian DIY lebih mengandalkan sektor tersier terkait dengan aktivitas ekonomi wilayah lain seperti kunjungan wisata serta pelaku ekonomi dari luar DIY.

**Tabel II-24 PDRB DIY ADHB menurut Lapangan Usaha, 2012-2016 (Juta Rupiah)**

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.640.411,7	9.449.019,7	9.769.112	10.793.840	11.456.173
Pertambangan dan Penggalian	467.147,5	495.039,5	537.599	573.133	593.156
Industri Pengolahan	10.242.467,7	11.563.733,8	12.614.921	13.303.468	14.547.753
Pengadaan Listrik dan Gas	90.992,0	86.515,1	89.669	118.012	141.794
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	83.130,3	89.645,3	102.670	109.697	114.765
Konstruksi	7.350.632,3	8.060.750,5	8.722.682	9.499.917	10.286.734
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.413.318,6	6.938.421,0	7.681.035	8.342.646	9.332.038
Transportasi dan Pergudangan	4.256.792,3	4.783.126,5	5.313.233	5.765.069	6.253.137
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.203.277,9	8.284.060,7	9.323.242	10.383.391	11.255.100
Informasi dan Komunikasi	7.331.839,4	7.572.218,9	7.897.507	8.244.242	8.957.494
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.696.113,0	3.170.932,7	3.602.561	4.028.358	4.342.146
Real Estate	5.429.459,0	5.815.245,1	6.497.271	7.116.820	7.808.289
Jasa Perusahaan	836.060,2	855.439,4	956.391	1.048.359	1.115.194
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.931.303,6	6.702.818,7	7.492.246	8.379.232	9.217.108
Jasa Pendidikan	6.364.491,8	6.816.002,1	7.600.855	8.598.744	9.088.421
Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial	1.928.468,3	2.094.674,4	2.276.361	2.553.551	2.764.049
Jasa Lainnya	1.981.955,1	2.147.020,2	2.351.975	2.589.171	2.824.990
<b>PDRB</b>	<b>77.247.860,7</b>	<b>84.924.663,6</b>	<b>92.829.330</b>	<b>101.447.650</b>	<b>110.098.341</b>

Sumber: BPS DIY, DIY Dalam Angka 2016 & BRS 2017

Kinerja perekonomian DIY kurun waktu 2012-2016 menunjukkan peningkatan yang diindikasikan dengan meningkatnya nilai nominal Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp77,247 triliun, pada tahun 2016 mencapai Rp110,098 triliun, terjadi peningkatan sebesar Rp32,850 juta (42,53%) selama lima tahun.

Demikian halnya dengan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 selama kurun waktu 2012-2016 juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 nilai PDRB riil tercatat sebesar Rp71,702 triliun kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp87,687 triliun sehingga selama periode tersebut secara riil PDRB DIY naik sebesar Rp15,98 trilyun (22,29%).

**Tabel II-25 Nilai PDRB ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha, 2012-2016 (Juta Rupiah)**

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.640.411,7	9.449.019,7	9.769.112	10.793.840	11.456.173
Pertambangan dan Penggalian	467.147,5	495.039,5	537.599	573.133	593.156
Industri Pengolahan	10.242.467,7	11.563.733,8	12.614.921	13.303.468	14.547.753
Pengadaan Listrik dan Gas	90.992,0	86.515,1	89.669	118.012	141.794
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	83.130,3	89.645,3	102.670	109.697	114.765
Konstruksi	7.350.632,3	8.060.750,5	8.722.682	9.499.917	10.286.734
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.413.318,6	6.938.421,0	7.681.035	8.342.646	9.332.038
Transportasi dan Pergudangan	4.256.792,3	4.783.126,5	5.313.233	5.765.069	6.253.137
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.203.277,9	8.284.060,7	9.323.242	10.383.391	11.255.100
Informasi dan Komunikasi	7.331.839,4	7.572.218,9	7.897.507	8.244.242	8.957.494
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.696.113,0	3.170.932,7	3.602.561	4.028.358	4.342.146
Real Estate	5.429.459,0	5.815.245,1	6.497.271	7.116.820	7.808.289
Jasa Perusahaan	836.060,2	855.439,4	956.391	1.048.359	1.115.194
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.931.303,6	6.702.818,7	7.492.246	8.379.232	9.217.108
Jasa Pendidikan	6.364.491,8	6.816.002,1	7.600.855	8.598.744	9.088.421
Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial	1.928.468,3	2.094.674,4	2.276.361	2.553.551	2.764.049
Jasa Lainnya	1.981.955,1	2.147.020,2	2.351.975	2.589.171	2.824.990
<b>PDRB</b>	<b>77.247.860,7</b>	<b>84.924.663,6</b>	<b>92.829.330</b>	<b>101.447.650</b>	<b>110.098.341</b>

Sumber: BPS DIY, DIY Dalam Angka 2016 & BRS 2017

Tabel di bawah merupakan distribusi sektor ekonomi pada pembentukan PDRB DIY. Selama periode 2012-2016, struktur perekonomian di DIY didominasi oleh sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang masing-masing menyumbang pada PDRB diatas 10%.

Selama kurun waktu tersebut, sektor pertanian mengalami fluktuasi akibat dari tidak stabilnya harga biaya produksi pertanian (saprota) serta menurunnya luas lahan pertanian (konversi). Pada tahun 2012, sektor ini mengalami kenaikan dengan menyumbang pada PDRB sebesar 11,19%, kemudian menurun hingga tahun 2014 sebelum kembali meningkat menjadi 10,64% pada tahun 2015, namun menurun lagi menjadi 10,41% pada tahun 2016.

Sementara itu, kontribusi sektor industri pengolahan kurun waktu 2012-2016 cenderung mengalami penurunan dari 13,26% pada tahun 2012 menjadi 13,21% pada tahun 2016. Hal itu disebabkan melemahnya produksi beberapa jenis industri IMK yang mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan output produksi secara keseluruhan. Meskipun demikian, sektor ini masih berperan sebagai penyumbang terbesar pada PDRB DIY periode 2012-2016.

**Tabel II-26 Presentase Distribusi PDRB DIY ADHB menurut Lapangan Usaha, 2011-2015**

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,19	11,13	10,52	10,64	10,41
Pertambangan dan Penggalian	0,60	0,58	0,58	0,56	0,54
Industri Pengolahan	13,26	13,62	13,59	13,11	13,21
Pengadaan Listrik dan Gas	0,12	0,10	0,10	0,12	0,13
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10
Konstruksi	9,52	9,49	9,40	9,36	9,34
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,30	8,17	8,27	8,22	8,48
Transportasi dan Pergudangan	5,51	5,63	5,72	5,68	5,68
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,32	9,75	10,04	10,24	10,22
Informasi dan Komunikasi	9,49	8,92	8,51	8,13	8,14
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,49	3,73	3,88	3,97	3,94
Real Estate	7,03	6,85	7,00	7,02	7,09
Jasa Perusahaan	1,08	1,01	1,03	1,03	1,01
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,68	7,89	8,07	8,26	8,37
Jasa Pendidikan	8,24	8,03	8,19	8,48	8,25
Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial	2,50	2,47	2,45	2,52	2,51
Jasa Lainnya	2,57	2,53	2,53	2,55	2,57
<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Keterangan: \*) Angka Sementara

\*\*) Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS DIY, DIY Dalam Angka 2016 & BRS 2017

PDRB per kapita diperoleh dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu daerah (PDRB) dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk berpengaruh terhadap nilai PDRB per kapita. Di sisi lain besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Nilai PDRB per kapita ADHB kurun waktu lima tahun mengalami peningkatan. Selama periode 2012-2016, PDRB per kapita tumbuh rata-rata sebesar 8,01%. Nilai PDRB per kapita tahun 2012 tercatat sebesar Rp21,74 juta, kemudian meningkat mencapai Rp29,59 juta di tahun 2016.

**Tabel II-27      Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHB, 2012-2016**

<b>Uraian</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
PDRB ADHB (juta rupiah)	77.247.861	84.924.543	92.842.484	101.447.650	110.098.341
Penduduk pertengahan tahun (orang)	3.552.462	3.594.854	3.637.173	3.679.239	3.720.921
PDRB per kapita ADHB (juta rupiah)	21,744	23,623	25,526	27,573	29,589
Pertumbuhan PDRB ADHB (%)	6,94	8,64	8,06	8,02	7,31

Sumber: BPS DIY, DIY Dalam Angka 2016 & BRS 2017

Nilai PDRB DIY menurut penggunaan kurun waktu 2012-2016 berturut-turut didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga, investasi fisik atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan pengeluaran konsumsi pemerintah.

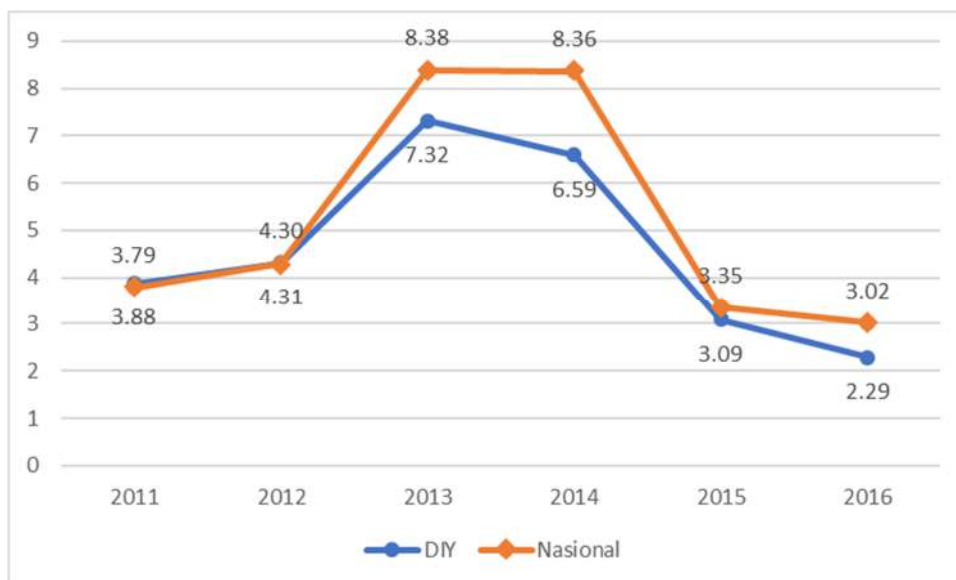
**Tabel II-28      Nilai PDRB ADHK 2010 menurut Penggunaan, 2012-2016 (Juta Rupiah)**

<b>JenisPenggunaan</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Konsumsi Rumah Tangga	43.559.244	45.670.009	47.991.757	50.193.386	52.614.164
Konsumsi LNPRT	1.897.631	2.095.397	2.317.123	2.384.374	2.357.344
Konsumsi Pemerintah	10.909.808	11.553.432	12.056.063	12.719.134	12.987.746
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	19.207.890	20.190.810	21.358.622	22.286.615	23.616.948
Perubahan Inventori	804.880	832.540	930.599	974.645	1.045.164
Ekspor Luar Negeri	3.517.883	3.541.640	4.278.248	4.416.252	4.400.889
Impor Luar Negeri	1.901.846	2.241.626	3.228.540	3.728.749	4.492.511
Net Ekspor Antar Daerah	(6.293.041)	(6.014.753)	(6.171.595)	-5.771.216	-4.841.817
<b>PDRB</b>	<b>71.702.449</b>	<b>75.627.450</b>	<b>79.532.277</b>	<b>87.687.927</b>	<b>87.687.927</b>

Sumber: BPS DIY, DIY Dalam Angka 2016 & BRS 2017

## 2.      Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang menunjukkan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa. Dengan demikian tingginya inflasi memberikan dampak pada daya beli masyarakat atas barang dan jasa terutama barang kebutuhan pokok yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Perhitungan laju inflasi DIY diwakili oleh inflasi Kota Yogyakarta sebagai pusat kegiatan perdagangan barang dan jasa.



Sumber: BPS, Statistik Daerah DIY 2017

**Gambar II.14 Perkembangan Inflasi Tahunan DIY & Nasional, 2011-2016**

Jika melihat pola inflasi tahunan DIY selama tahun 2011-2016 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dan sejak 2012 lebih rendah dibandingkan inflasi nasional.

Jika dilihat dari kelompok pengeluaran, terdapat empat kelompok yang mengalami perbaikan yang ditunjukkan dengan menurunnya angka inflasi dibandingkan tahun sebelumnya. Keempat kelompok tersebut adalah kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau, kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar, kelompok Sandang, serta kelompok Kesehatan. Inflasi kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar bahkan mempunyai angka inflasi terendah dalam 7 tahun terakhir.

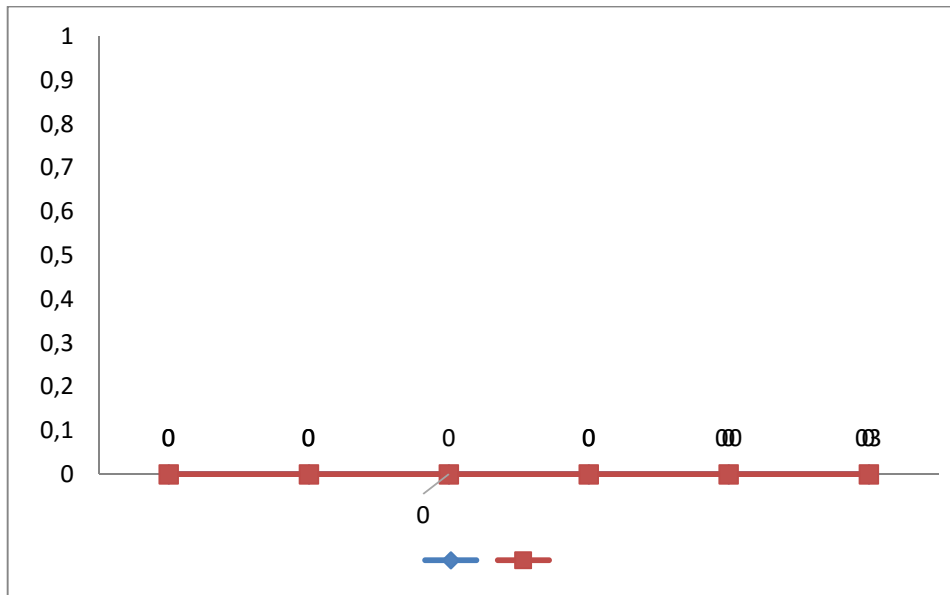
**Tabel II-29 Perkembangan Inflasi Bulanan Kota Yogyakarta Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2010-2016**

No	Kelompok Pengeluaran	Tahun						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Bahan Makanan	18,86	1,82	8,10	12,31	7,70	4,64	4,77
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	5,47	7,07	6,90	8,15	2,95	5,04	3,84
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	5,49	3,01	2,99	5,18	8,92	4,41	1,64
4	Sandang	5,41	9,40	3,56	0	3,61	5,87	3,04
5	Kesehatan	1,97	5,64	1,93	3,08	5,49	4,21	4,17
6	Pendidikan, Rekreasi & Olah Raga	4,25	1,73	1,43	3,17	2,37	1,36	2,40
7	Transportasi & Komunikasi	5,57	2,40	1,30	10,45	9,36	-2,51	-2,06
	Inflasi Kota Yogyakarta	7,38	3,88	4,31	7,32	6,59	3,09	2,29

Sumber: BPS DIY, 2017

### 3. Indeks Gini dan Pemerataan Pendapatan

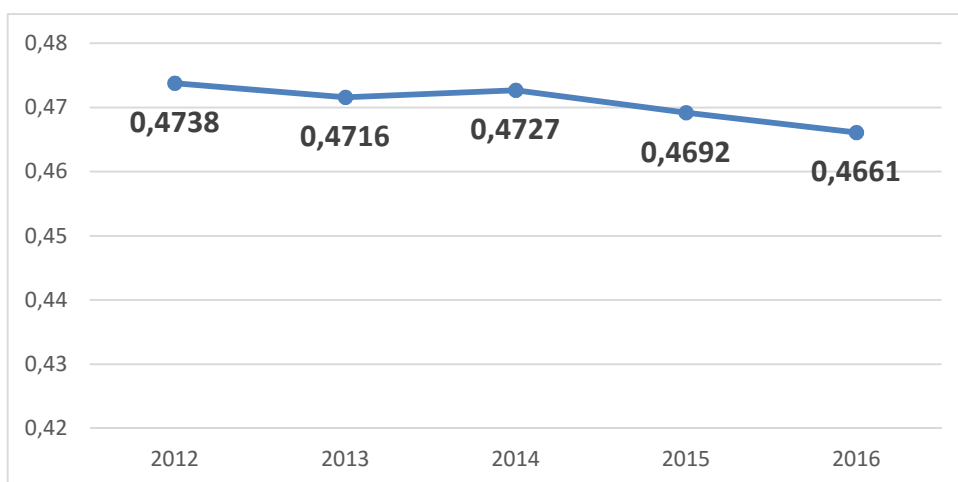
Perkembangan rasio gini DIY tahun 2016 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya yaitu 0,42. Kinerja tersebut berbeda dengan kondisi nasional yang mengalami perbaikan. Oleh karenanya masih diperlukan kebijakan lebih lanjut untuk meningkatkan pendapatan masyarakat golongan bawah untuk mengurangi kesenjangan dengan pendapatan masyarakat golongan atas.



Sumber: BPS DIY, 2017

**Gambar II.15 Rasio Gini DIY, 2011-2016**

Ketimpangan antar wilayah yang diindikasikan oleh Indeks Williamson pada periode 2012-2016 menunjukkan kecenderungan yang meningkat, yaitu dari 0,4738 pada tahun 2012 menjadi 0,4661 pada tahun 2016. Perlu adanya kebijakan afirmatif untuk mendorong program pembangunan untuk daerah-daerah tertinggal.

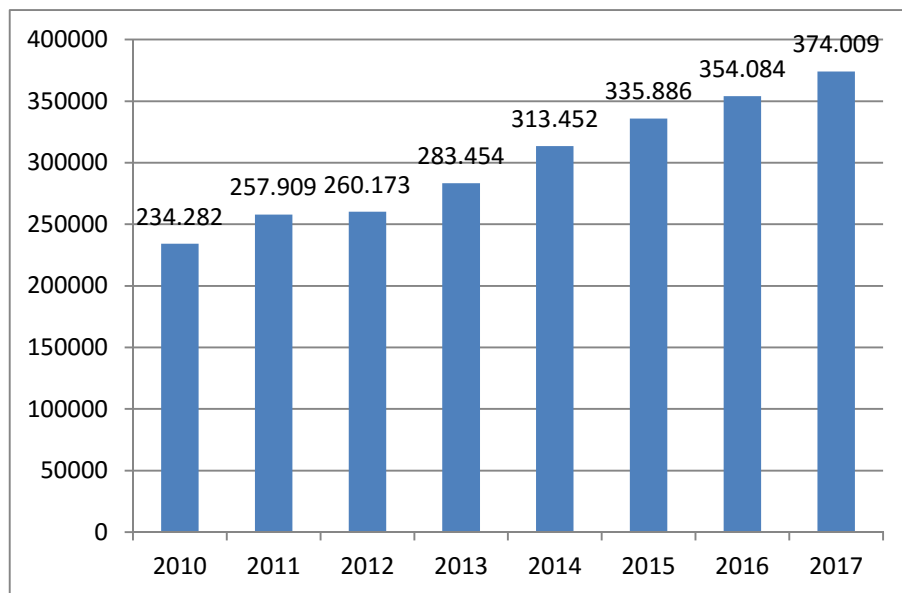


Sumber: BPS DIY, Tahun 2017

**Gambar II.16 Indeks Williamson DIY Tahun 2012-2016**

#### 4. Kemiskinan

Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan kebutuhan pokok bukan makanan. Dalam kurun waktu 2010-2017, terdapat peningkatan garis kemiskinan. Kenaikan tersebut disebabkan karena peningkatan harga-harga. Pada 2010, garis kemiskinan di DIY sebesar Rp234.282 per kapita per bulan dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi Rp374.009 per kapita per bulan.



Sumber: BPS DIY, BRS 2010-2017

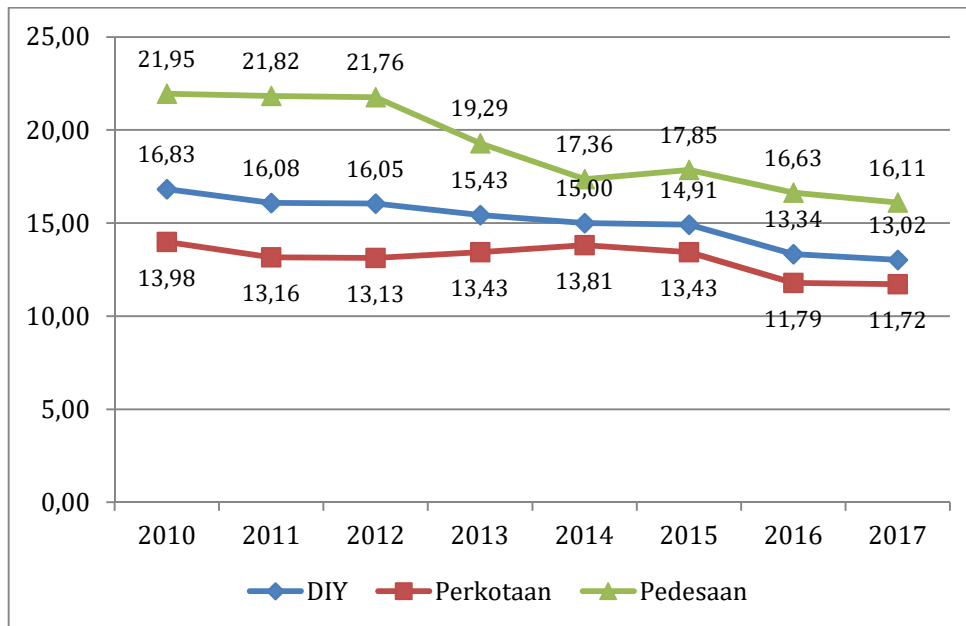
**Gambar II.17** Garis Kemiskinan DIY, 2010-2017

Jumlah penduduk miskin DIY mencapai 488,5 ribu orang pada 2017. Angka tersebut mengalami penurunan sejumlah 6,4 ribu orang dari tahun sebelumnya yang sebanyak 494,9 ribu orang. Tingkat kemiskinan DIY mengalami penurunan sejak 2012, yaitu 16,05% menjadi 12,36% pada tahun 2017. Namun, angka tersebut masih berada di atas tingkat kemiskinan nasional.

**Tabel II-30** Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin 2012-2017

Tahun	Penduduk Miskin	
	Jumlah (ribu orang)	%
2012	565,3	16,05
2013	550,2	15,43
2014	544,9	15,00
2015	550,2	14,91
2016	494,9	13,34
2017	488,5	13,02

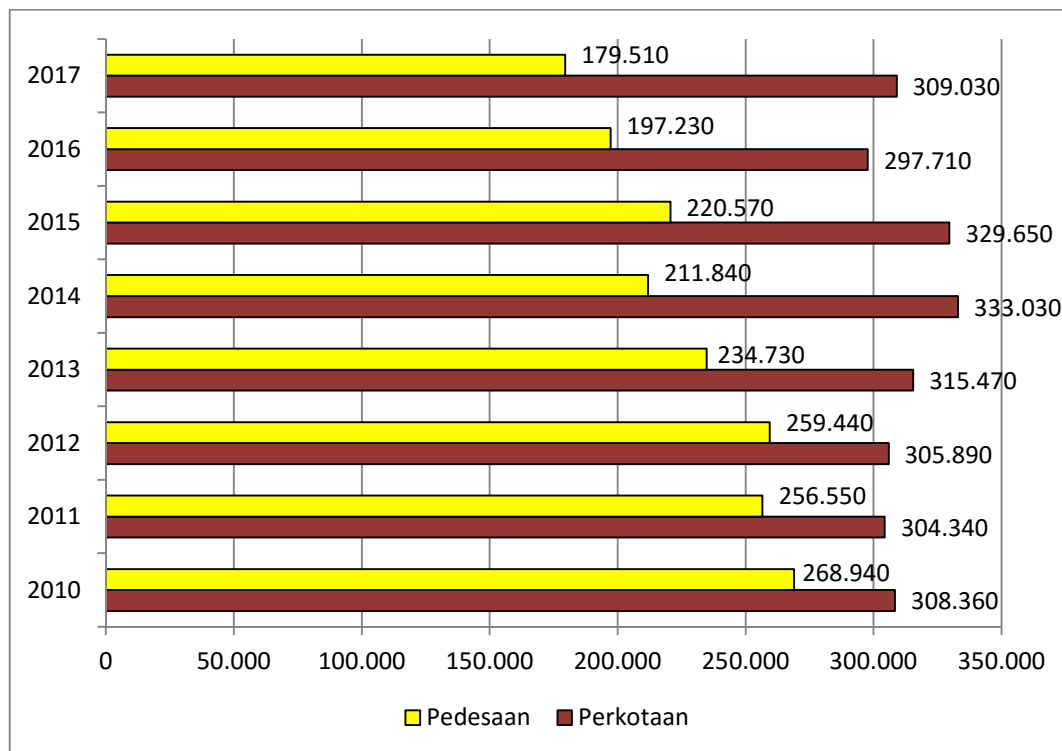
Sumber: BPS DIY, Statistik DIY 2017



Sumber: BPS DIY, BRS 2010-2017

**Gambar II.18 Persentase Kemiskinan DIY menurut Perkotaan dan Pedesaan, 2010-2017**

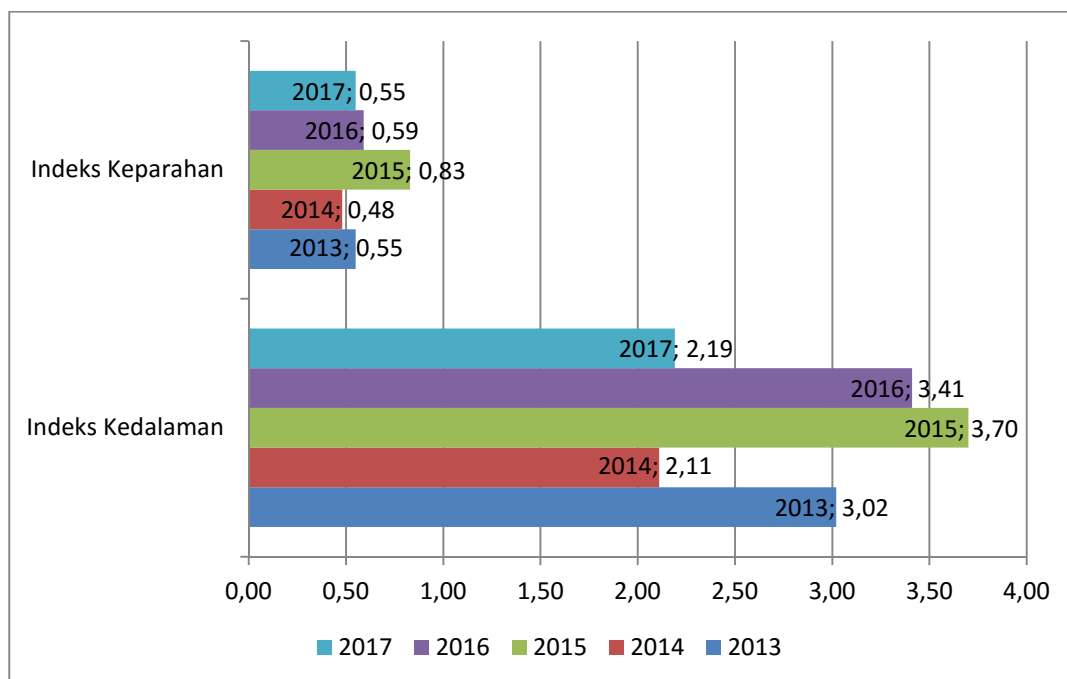
Jumlah penduduk miskin di perkotaan lebih tinggi dibandingkan pedesaan. Hal ini merupakan konsekuensi dari perubahan pola tempat tinggal penduduk yang mulai lebih banyak di kawasan perkotaan. Pada 2017 jumlah penduduk miskin di kawasan perkotaan sebesar 309,03 ribu orang, sementara itu jumlah penduduk miskin di kawasan pedesaan sebanyak 179,51 ribu orang. Namun secara persentase, tingkat kemiskinan pedesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan.



Sumber: BPS DIY, BRS 2010-2017

**Gambar II.19 Jumlah Penduduk Miskin DIY, 2010-2017**

Kemiskinan dilihat dari indeks kedalaman dan keparahan disajikan pada gambar di bawah. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks Kedalaman kemiskinan DIY tahun 2017 turun menjadi 2,19 dari 3,41 pada tahun 2016. Sementara itu, Indeks Keparahana Kemiskinan (*Proverty Severity*) merupakan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, dimana semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks kedalaman tahun 2017 juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.



Sumber: BPS DIY, BRS 2010-2017

**Gambar II.20 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan, 2013-2017**

## 5. Jumlah Kejahatan yang Terselesaikan

Jumlah kejahatan yang terselesaikan adalah penanganan kejahatan oleh aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan). Angka kejahatan yang diselesaikan merupakan jumlah kejahatan yang diselesaikan selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk. Jumlah kejahatan yang terselesaikan di DIY dapat diinformasikan sebagai berikut:

**Tabel II-31 Jumlah Kejahatan yang Terselesaikan**

Tahun	Jumlah Kejahatan	Terselesaikan	Presentase Kasus Kejahatan Terselesaikan
2013	6513	2780	43
2014	6288	3063	49
2015	7195	3500	48,64

Sumber: BPS, DIY Dalam Angka, 2016

Jumlah kejahatan di DIY dari tahun 2013 sampai dengan 2015 cenderung meningkat, tetapi jumlah kejahatan yang terselesaikan dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan.

## II.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial DIY terkait dengan peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sangat berkaitan dengan akses penduduk dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, dan pendapatan.

Angka IPM merupakan salah satu indikator untuk melihat kualitas penduduk DIY yang diukur dengan angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Angka harapan hidup DIY cukup tinggi, hal ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat DIY semakin baik. Pendapatan per kapita tahun 2016 menunjukkan capaian yang relatif tinggi, yakni sebesar Rp23,56 juta per kapita. Kenaikan capaian Angka Melek Huruf di DIY dipengaruhi oleh pertambahan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dengan kemampuan baca dan tulis yang baik. Sedangkan semakin tinggi RLS di suatu daerah menggambarkan kualitas modal manusia yang semakin membaik, sehingga diharapkan akan berdampak pada peningkatan produktivitas perekonomian daerah tersebut.

**Tabel II-32 IPM DIY Menurut Komponen Tahun 2014-2016**

Tahun	Angka Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (%)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran Riil Per Kapita (ribu rupiah)	IPM
2014	74,5	14,85	8,84	12.294	76,81
2015	74,68	15,03	9	12.684	77,59
2016	74,71	15,23	9,12	13.229	78,38

Sumber: BPS, DIY Dalam Angka 2016 & Statistik Daerah DIY 2017

Tabel diatas menunjukan bahwa angka IPM DIY pada tahun 2014 adalah 76,81 kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 78,38. Sementara itu, jika ditinjau menurut kabupaten/kota, peringkat IPM Kota Yogyakarta selalu menempati posisi pertama atau nilainya terbesar jika dibandingkan dengan empat kabupaten lainnya di DIY.

**Tabel II-33 IPM Kabupaten/kota di DIY Tahun 2014-2016**

Kab/Kota	IPM		
	2014	2015	2016
Sleman	80,73	81,20	82,15
Bantul	77,11	77,99	78,42
Gunungkidul	67,03	67,41	67,82
Kulon Progo	70,68	71,52	72,38
Kota Yogyakarta	83,78	84,56	85,32
DIY	76,81	77,59	78,38

Sumber: BPS, DIY Dalam Angka 2016 & Statistik Daerah DIY 2017

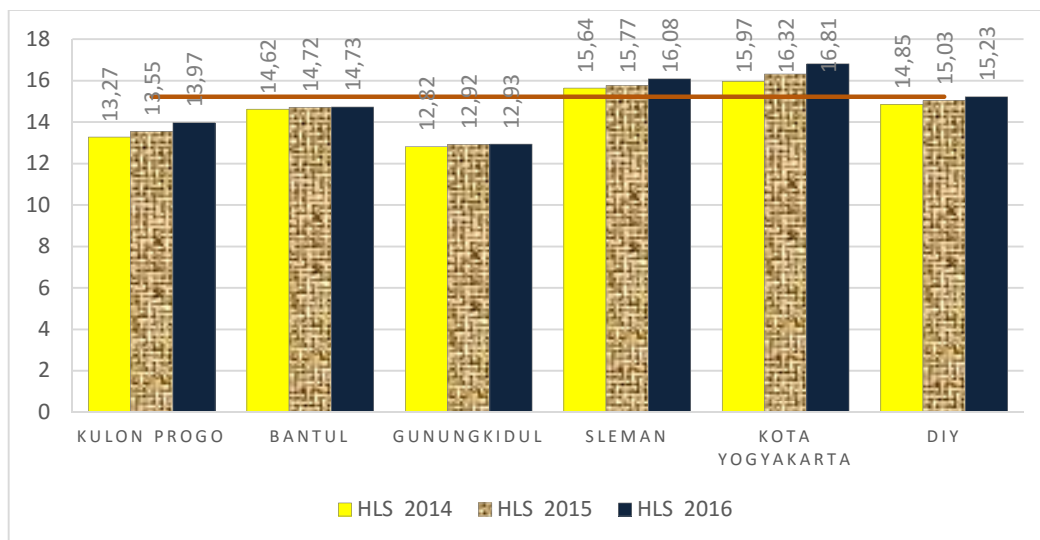
Dalam hal pembangunan pendidikan, keberhasilan pembangunan pendidikan ditunjukkan dengan ketersediaan layanan pendidikan, keterjangkauan layanan pendidikan, kualitas mutu pendidikan yang memadai, terwujudnya kesetaraan dalam pendidikan, dan jaminan kepastian mendapatkan layanan pendidikan.

Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan pendidikan diantaranya: Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah. Sementara itu, keberhasilan pembangunan kesehatan dinilai dari capaian indikator yang meliputi: Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), dan Status Gizi Bayi/Balita.

## 1. Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)

Mulai tahun 2014, BPS melakukan penyempurnaan beberapa indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) termasuk metodologi penghitungannya. Sebagai salah satu komponen penyusunan IPM, Angka Melek Huruf dianggap tidak relevan lagi dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Hal ini dikarenakan angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik.

Indikator baru yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pembangunan pendidikan adalah Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS). AHLS ini digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Diasumsikan bahwa peluang anak akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Capaian AHLS DIY tahun 2016 adalah sebesar 15,23 tahun, meningkat 0,20 poin dari 15,03 pada tahun 2015. Untuk kabupaten/kota, capaian tertinggi Kota Yogyakarta sebesar 16,81 tahun dan capaian terendah Kabupaten Gunungkidul sebesar 12,93 tahun.



Sumber: BPS, DIY Dalam Angka 2016

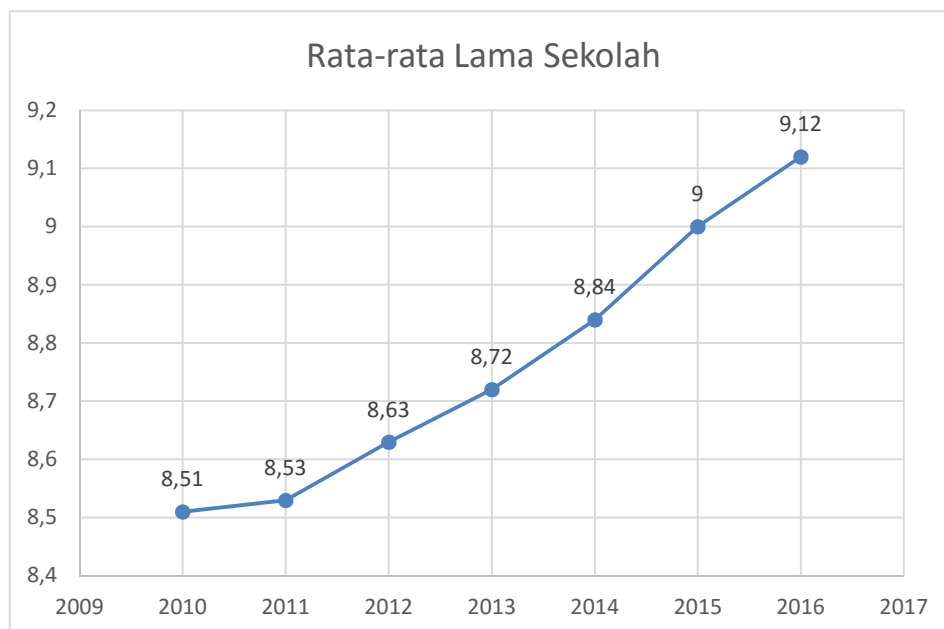
**Gambar II.21 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah DIY dan Kabupaten Kota se DIY Tahun 2014-2016**

Dari gambar tersebut terlihat bahwa AHLS di Sleman dan Kota Yogyakarta berada di atas AHLS DIY sedangkan AHLS Kulon Progo, Bantul dan Gunungkidul berada di bawah AHLS DIY, ini menunjukkan bahwa masih terjadi ketimpangan AHLS di kabupaten kota di DIY. Dari data bisa disimpulkan bahwa AHLS Gunungkidul selain capaiannya terendah di antara kabupaten kota di DIY, meskipun ada peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun tetapi peningkatannya kurang signifikan.

## 2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. Capaian angka rata-rata lama sekolah mencerminkan bentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas SDM. Angka rata-rata lama sekolah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: tingkat kemiskinan, aksesibilitas layanan pendidikan, beban ketergantungan keluarga, permasalahan sosial lainnya, dan faktor dari internal peserta didik sendiri.

Untuk meningkatkan Angka Rata-rata Lama Sekolah diperlukan komitmen dan upaya bersama untuk mewujudkan target tersebut utamanya dalam hal keterjangkauan dan pemerataan akses, serta kesetaraan dan jaminan layanan pendidikan. Selama 2010-2016 terjadi tren peningkatan capaian Rata-Rata Lama Sekolah DIY yaitu dari 8,51 di tahun 2010 menjadi 9,12 di tahun 2016. Berikut adalah perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah DIY tahun 2010-2016.



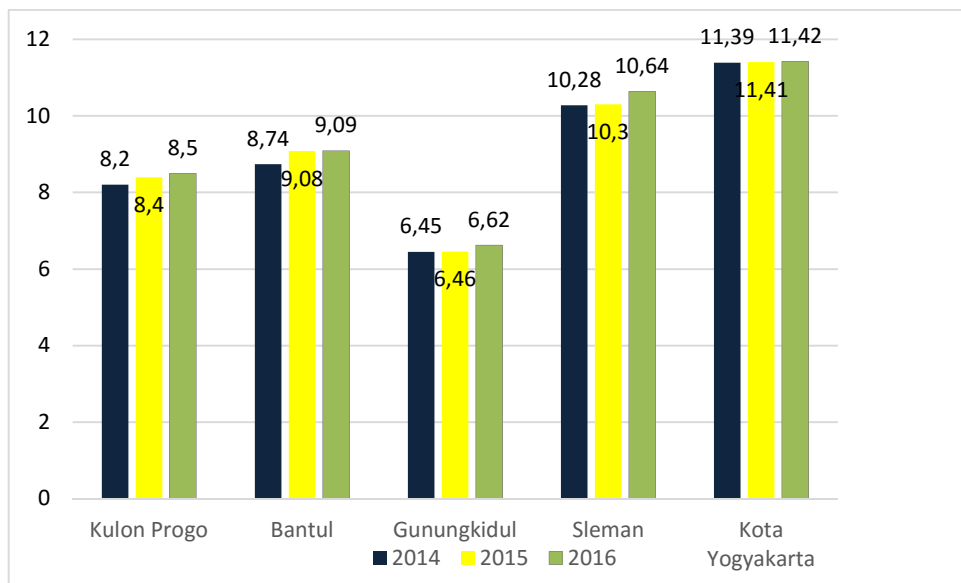
Sumber: BPS, DIY Dalam Angka 2016

### Gambar II.22 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah DIY, Tahun 2010-2016

Dilihat data per kabupaten/kota, capaian rata-rata lama sekolah tahun 2015 tertinggi adalah Kota Yogyakarta sebesar 11,41 tahun sedangkan capaian terendah adalah Kabupaten Gunungkidul sebesar 6,46 tahun, dengan kata lain terdapat ketimpangan yang mencolok antara Kota Yogyakarta yang rata-rata penduduknya menyelesaikan jenjang pendidikan menengah dengan Kabupaten Gunungkidul yang rata-rata penduduknya menyelesaikan pendidikan hanya di tingkat dasar.

Adanya disparitas yang cukup tinggi antar kabupaten/kota di DIY merupakan tantangan bagi Pemda DIY dalam peningkatan dan pemerataan kualitas dan akses pendidikan.

Capaian rata-rata lama sekolah DIY tahun 2014-2016 menurut kabupaten/kota di DIY dilihat dalam gambar berikut.



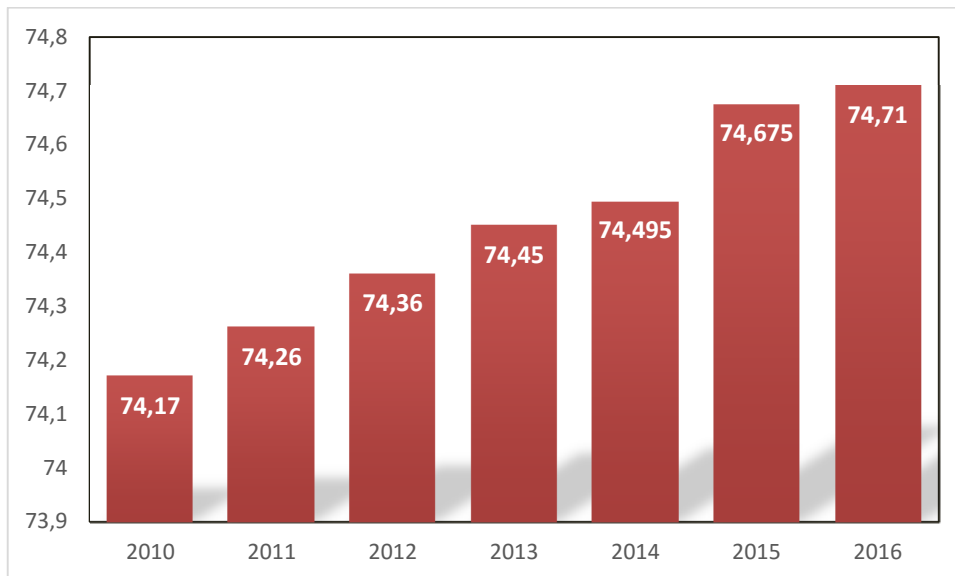
Sumber: BPS, DIY Dalam Angka 2016

**Gambar II.23 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten Kota, Tahun 2014-2016**

### 3. Angka Harapan Hidup (AHH)

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Menurut Statistik Indonesia, angka harapan hidup pada saat lahir (*life expectancy at birth*) ialah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. *World Health Organization* (WHO) menyebutkan bahwa angka harapan hidup saat lahir mencerminkan tingkat kematian keseluruhan populasi. Angka harapan hidup saat lahir merangkum pola mortalitas yang berlaku di semua kelompok umur pada tahun tertentu (anak dan remaja, dewasa, dan orang tua).

Perkembangan AHH di DIY dalam kurun waktu 2010-2016 menunjukkan peningkatan. Dari 74,17 di tahun 2010 meningkat menjadi 74,71 di tahun 2016.



Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta No. 27/05/34/Th. XIX, 5 Mei 2017, Diolah

#### **Gambar II.24 Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) DIY, Tahun 2010-2016**

AHH dipengaruhi dari beberapa faktor seperti kesehatan, ekonomi, budaya, dan pendidikan masyarakat. Peran sektor kesehatan dalam pencapaian indikator AHH melalui peningkatan kesehatan ibu dan anak, peningkatan gizi masyarakat, penurunan angka kesakitan, dan pelayanan kesehatan. Peningkatan AHH yang terjadi di DIY dipengaruhi oleh banyak faktor. Kesehatan menjadi salah satu faktor yang memiliki peran penting dalam peningkatan tersebut. Peran pengaruh kesehatan dalam meningkatkan usia harapan hidup ditunjukkan dari semakin menurunnya angka kematian, perbaikan sistem pelayanan kesehatan, dan perbaikan gizi di masyarakat.

Dari capaian peningkatan AHH DIY diprediksi akan berpengaruh meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia. Sehingga diperlukan intervensi pembangunan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan hidup penduduk lanjut usia.

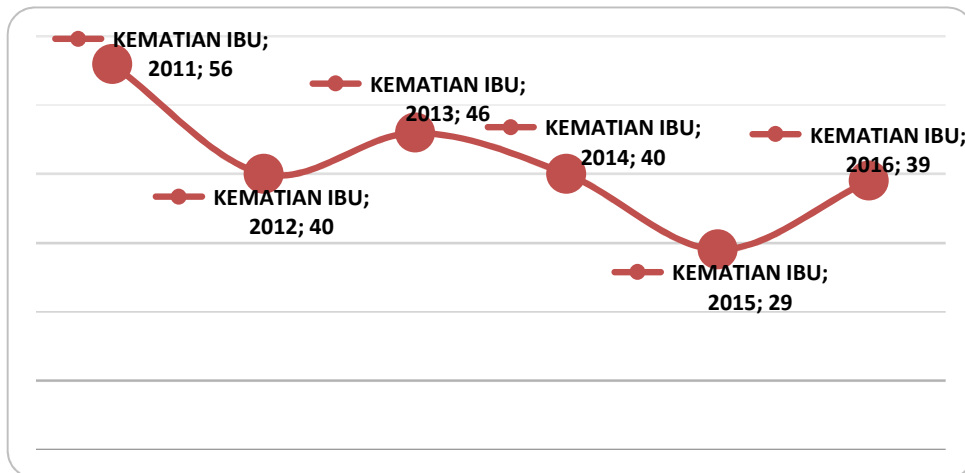
#### **4. Angka Kematian Ibu (AKI)**

Kematian ibu atau *maternal* adalah kematian wanita yang terjadi pada saat kehamilan, atau dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan. Kematian ibu disebabkan oleh apapun yang berhubungan dengan kehamilan, atau yang diperberat oleh kehamilan tersebut atau penanganannya. Kematian ibu bukan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan.

Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator yang mendapatkan perhatian global. AKI menjadi indikator dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) juga masih fokus dalam upaya penurunan AKI. Komitmen global menyepakati dalam SDGs untuk mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030.

Berdasarkan Survei Demografi dan Kependudukan (SDKI) Tahun 2012, AKI di Indonesia masih tinggi yaitu sebesar 390 per 100.000 kelahiran hidup. Di DIY sendiri perkembangan AKI dimonitor dengan kejadian jumlah kasus kematian ibu. Perkembangan jumlah kasus kematian

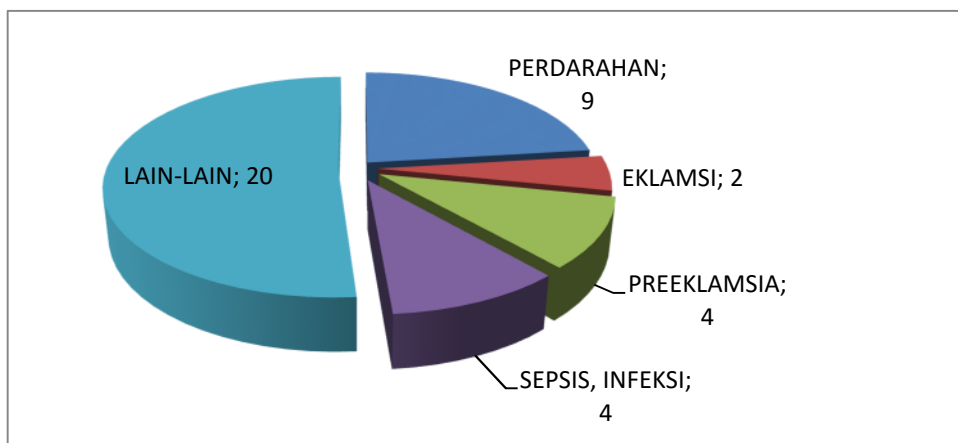
ibu di DIY dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 meskipun fluktuatif tetapi cenderung mengalami penurunan dengan kisaran 29 – 56 kasus kematian ibu. Tahun 2013 kasus kematian ibu sebanyak 46 kasus, menurun di tahun 2014 menjadi sebanyak 40 kasus dan kembali menurun di tahun 2015 menjadi 29 kasus. Namun pada tahun 2016 terjadi kenaikan jumlah kematian ibu sebanyak 39 kasus.



Sumber: Dinas Kesehatan DIY

**Gambar II.25 Perkembangan Jumlah Kematian Ibu di DIY Tahun 2011-2016**

Pada tahun 2016, penyebab kematian ibu yang paling banyak ditemukan di DIY adalah faktor yang masuk kategori lain-lain, yaitu karena masalah jantung (8), Emboli (1), syok (3), Tb (1), HIV (1), Pneumoni (1), DBD (1), MODS (1), Anemia hemolitik autoimun (1), Hiperemesis gravidarum (1), belum diketahui (1).



Sumber: Dinas Kesehatan DIY

**Gambar II.26 Penyebab Kematian Ibu di DIY, Tahun 2016**

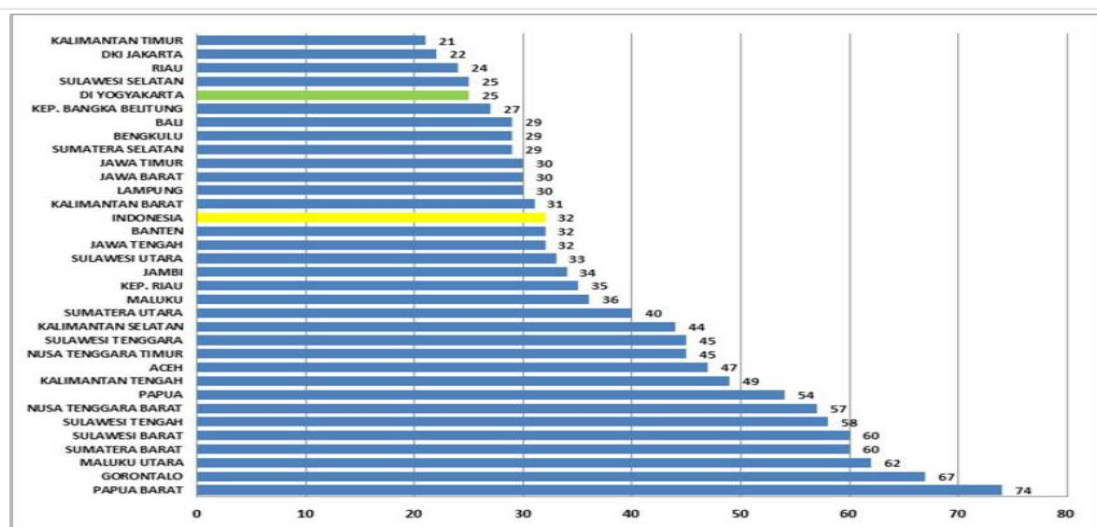
Tanggungjawab bersama untuk menjamin semua ibu memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas mulai dari saat hamil, persalinan sampai dengan perawatan pasca perkawinan serta akses dan informasi terhadap penggunaan alat

kontrasepsi. Intervensi mulai dilakukan pada saat remaja melalui edukasi tentang kesehatan reproduksi dalam penurunan AKI.

## 5. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Target *Sustainable Development Goals (SDGs)* pada tahun 2030 mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup).

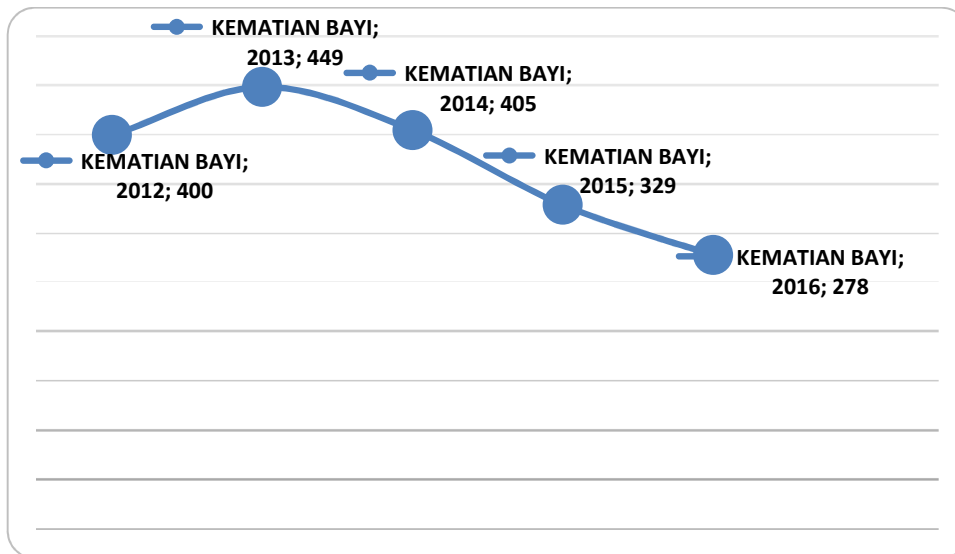
Berdasarkan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, AKB di DIY adalah 25 per 1000 kelahiran hidup, berada di bawah rata-rata nasional.



Sumber: Dinas Kesehatan DIY

**Gambar II.27 Perbandingan Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup Antar Provinsi 2012**

Perkembangan AKB di DIY dimonitor dengan kejadian jumlah kasus kematian Bayi. Dari data kurun waktu 2011-2016 diperoleh informasi perkembangan Jumlah kematian Bayi di DIY sebagai berikut.



Sumber: Dinas Kesehatan DIY

**Gambar II.28 Perkembangan Jumlah Kematian Bayidi DIY, Tahun 2011-2016**

Dari data tersebut terlihat bahwa kasus kematian bayi mengalami trend penurunan. Di tahun 2013 AKB mengalami kenaikan 49 kasus dari tahun 2012. Setelah tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 AKB di DIY terus mengalami penurunan.

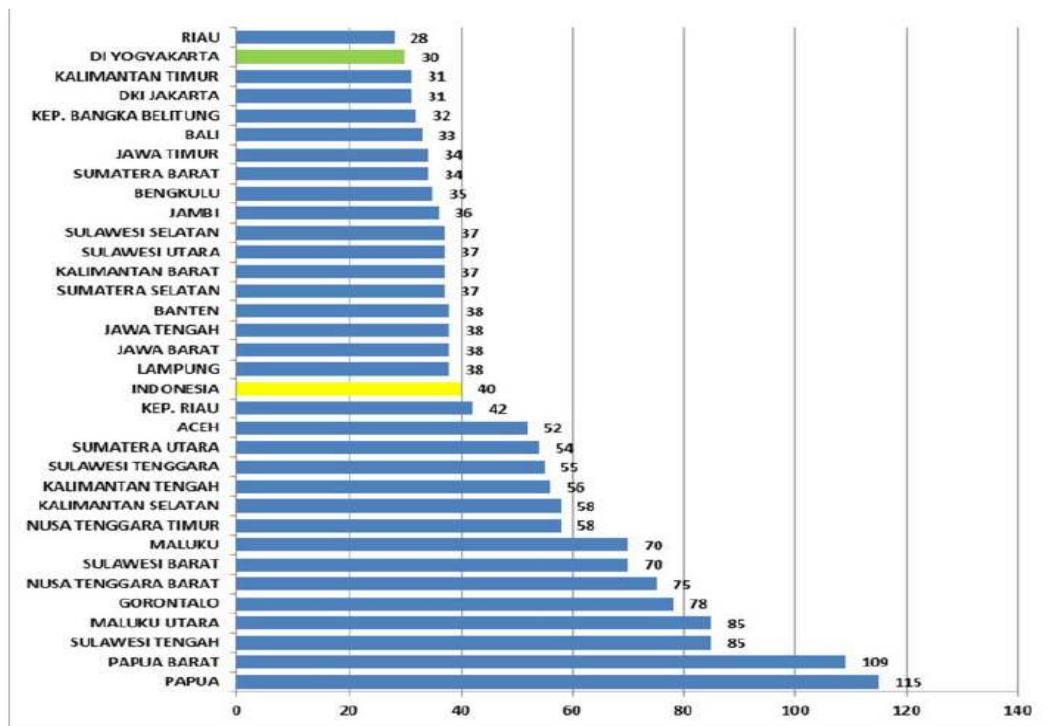
Penyebab umum kematian bayi di DIY adalah berat bayi lahir rendah (BBLR) dan sepsis. Penyebab lain kematian bayi di DIY antara lain asfiksi pada saat lahir karena lama di jalan kelahiran, letak melintang, serta panggul sempit. Kebijakan kesehatan bayi difokuskan pada intervensi layanan kesehatan meliputi peningkatan pelayanan neonatal dan ibu, peningkatan cakupan imunisasi, peningkatan upaya perubahan perilaku, dan penanganan permasalahan gizi bayi.

## 6. Angka Kematian Balita (AKBA)

Perkembangan usia anak balita merupakan landasan yang membentuk masa depan kesehatan, kebahagiaan, pertumbuhan, perkembangan, dan hasil pembelajaran anak di sekolah, keluarga, masyarakat dan kehidupan secara umum.

Salah satu indikator yang menggambarkan keberhasilan pembangunan kesehatan balita adalah Angka Kematian Balita (AKBA). AKBA adalah jumlah kematian anak berusia 0 sampai menjelang tepat 5 tahun (4 tahun, 11 bulan, 29 hari) selama satu tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi).

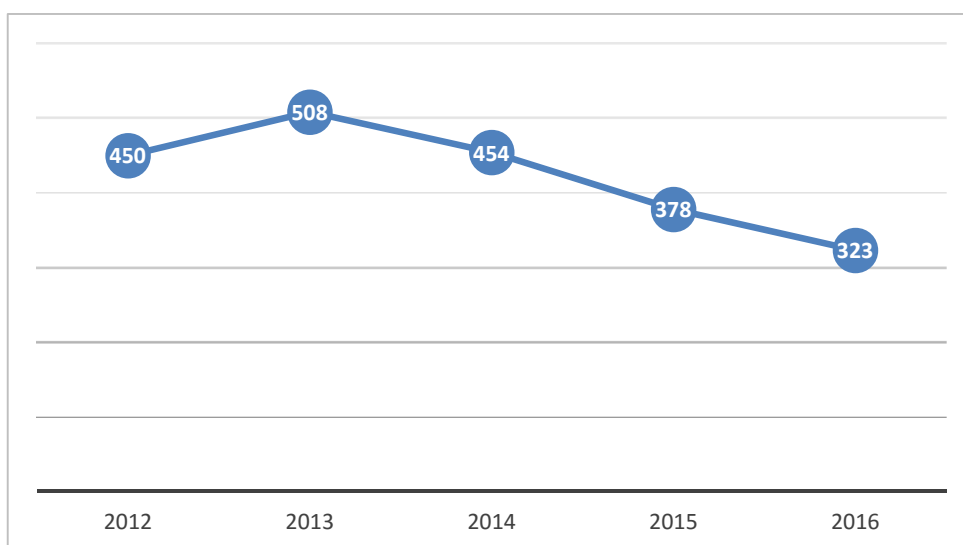
Target SDGs global untuk indikator Angka Kematian Balita (AKBA) adalah menurunkan Angka Kematian Balita 25 per 1.000. Hasil SDKI 2012 menunjukkan bahwa AKBA DIY sebesar 30 per 1.000 kelahiran hidup yang berarti telah memenuhi target pemerintah.



Sumber: SDKI 2012

**Gambar II.29 Perbandingan Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup Antar Provinsi 2012**

Dilihat dari jumlah kasus kematian balita di DIY, Kasus kematian Balita di DIY juga fluktuatif dari tahun 2012-2016, tetapi pada kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami penurunan yaitu 508 pada tahun 2014, turun menjadi 454 pada tahun 2015 dan turun lagi menjadi 378 pada tahun 2016.



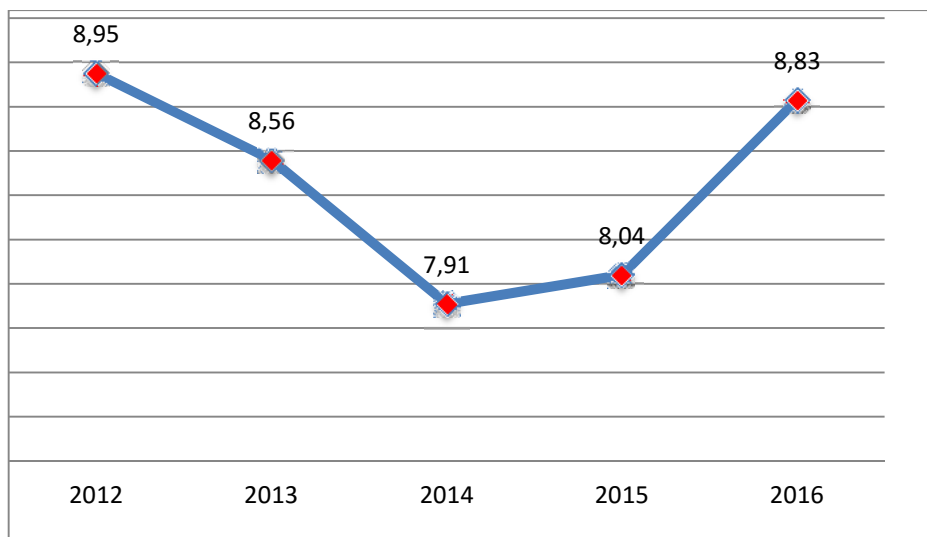
Sumber : Dinas Kesehatan DIY

**Gambar II.30 Perkembangan Jumlah Kematian Balita di DIY, Tahun 2012-2016**

## 7. Prevalensi Balita Kekurangan Energi Protein (KEP)

Status gizi merupakan salah satu faktor yang menentukan sumber daya manusia dan kualitas hidup. Kondisi status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Prevalensi balita kekurangan energi protein (KEP) yang biasa disebut balita kurang gizi sejak tahun 2012 sampai tahun 2014 mengalami penurunan, akan tetapi prevalensi KEP mengalami sedikit peningkatan dari 7,91% dari tahun 2014 menjadi 8,04% pada tahun 2015. Di tahun 2016 peningkatan KEP meningkat cukup signifikan yaitu pada angka 8,83. Angka prevalensi selama tiga tahun terakhir berkisar pada angka 8 yang menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan dalam rangka penurunan prevalensi KEP Balita di DIY belum tercapai secara maksimal.



Sumber : Dinas Kesehatan DIY

**Gambar II.31 Prevelansi Balita Kekurangan Gizi di DIY, tahun 2012-2016**

Intervensi permasalahan gizi pada balita difokuskan untuk peningkatan pemberian ASI eksklusif, pemberian makanan tambahan, pemantauan tumbuh kembang anak, dan intervensi gizi mikro.

### II.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

#### 1. Budaya

Yogyakarta Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja pada tahun 2018-2022, tidak lepas dari Renaisans Yogyakarta yang dirumuskan lima tahun yang lalu, terutama dari aspek kebudayaan, yakni diukur dari tiga kualitas: kualitas sumber budaya, kualitas pengalaman perilaku budaya dan kualitas kesejahteraan hidup. Undang-Undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

menggariskan bahwa Kewenangan kebudayaan DIY diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY.

Fokus pembangunan kebudayaan mengacu kepada Perdas No 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan Dan Pengembangan Kebudayaan, yang mana kebudayaan di sini dipahami sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya melalui proses belajar yang mengakar di masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Objek Kebudayaan meliputi: nilai-nilai budaya; pengetahuan dan teknologi; bahasa; adat istiadat; tradisi luhur; benda; dan seni. Pengaturan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan dilaksanakan berdasarkan prinsip: keterbukaan terhadap budaya lain; kemampuan mengolah budaya; kesadaran dialogis; kepribadian kuat; kesinambungan; dan kesatuan budaya mandiri.

Yogyakarta memiliki Kebudayaan khas yang sarat dengan nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur tersebut telah dijadikan landasan filosofis oleh Sultan Hamengku Buwono I ketika beliau mulai membangun Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai pemerintahan, masyarakat, dan wilayah yang mandiri. Nilai-nilai adiluhung seperti Hamemayu Hayuning Bawana, Mangasah Mingising Budi, Memasuh Malaning Bumi, Golong Gilig, serta sifat-sifat satriya yang berpegang pada etos Sawiji, Greget, Sengguh, Ora Mingkuh telah terwujud dalam kehidupan masyarakat maupun penataan ruang wilayah yang kini dikenal sebagai DIY. Nilai-nilai luhur yang juga dipercayai sebagai kearifan lokal (local wisdom) selain memiliki cakupan keberlakuan di DIY, juga dapat disejajarkan sebagai nilai-nilai budaya nasional atau bangsa.

Nilai-nilai yang terkandung di dalam sistem tata nilai budaya DIY yang berada dalam religio-spriritual; tata nilai moral; tata nilai kemasyarakatan; tata nilai adat dan tradisi; tata nilai pendidikan dan pengetahuan; tata nilai teknologi; tata nilai penataan ruang dan arsitektur; tata nilai mata pencaharian; tata nilai kesenian; tata nilai bahasa; tata nilai benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya; tata nilai kepemimpinan dan pemerintahan; tata nilai kejuangan dan kebangsaan; dan tata nilai semangat keyogyakartaan. Norma-norma yang mengatur tata laku masyarakat DIY yaitu norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, norma adat.

Budaya bahasa terkandung dalam tradisi dan ekspresi lisan antara lain : sejarah lisan, dongeng, rapalan, parikan, geguritan dan cerita rakyat. Karya bahasa yang sudah dituliskan dalam bentuk manuskrip antara lain serat, prasasti, babad, naskah, dan kitab. Masyarakat juga memiliki ritual tersendiri untuk menghadapi proses seleksi sosial dan alam dengan upacara daur hidup (upacara kelahiran, perkawinan, dan kematian), keselarasan alam

(merti kali, labuhan), dan upacara penghormatan leluhur (Nyadran, Ruwahan, Suran dan lain-lain).

Kekayaan peninggalan pengetahuan dan teknologi leluhur masyarakat DIY sangat beragam, misalnya pranata mangsa, arsitektural dan tata lingkungannya, permainan rakyat dan kelengkapannya, olahraga jemparingan, berkuda, pawukon, senjata, alat musik tradisional, tata busana, tata boga, pengobatan tradisional, alat transportasi, sistem bertani, dan lainnya.

Dalam perkembangan kesenian Yogyakarta sangat dipengaruhi oleh dinamika kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Perkembangan tersebut akhirnya merubah peran dan fungsi dari jenis-jenis seni, seperti seni sakral menjadi *profane* atau yang semula hanya dapat dinikmati oleh kalangan terbatas akhirnya menjadi seni komunal yang dapat dinikmati masyarakat luas. Terdapat juga jenis seni yang mulai menghilang dalam masyarakat karena komunitas pendukungnya mulai sedikit dan kesempatan untuk tampil tidak pernah ada. Perkembangan kesenian di Yogyakarta tidak lepas dari keberadaan Taman Budaya, galeri, *artshop* dan komunitas pelaku/pekerja seni/seniman yang tersebar di beberapa wilayah, juga oleh keberadaan institusi pendidikan yang bergerak di bidang seni seperti SMSR, SMKI, SMM dan ISI, UNY, sanggar, padepokan, yayasan seni, dan lain-lain.

**Tabel II-34 Jumlah Organisasi Kesenian dan Budaya di DIY, Tahun 2016**

No	Organisasi Budaya	Yogyakarta	Bantul	Gunungkidul	Kulon Progo	Sleman	DIY
1	Organisasi Seni Rupa	5	5	1	2	4	17
2	Organisasi Sinematografi	19	6	-	-	17	42
3	Organisasi Seni Pertunjukkan	445	990	1154	1360	1594	5543
4	Lembaga Budaya	39	25	1	-	115	180
5	Lembaga Pendidikan Budaya	12	14	4	11	8	49
6	Prasarana Budaya	18	48	11	6	24	107
7	Organisasi Kepercayaan	21	27	14	25	33	120
8	Organisasi Persewaan dan Penjualan Film	21	-	-	-	17	38
9	Organisasi Perusahaan/Produksi Film	17	1	-	-	2	20
10	Galeri Seni Rupa	11	6	-	1	11	29

No	Organisasi Budaya	Yogyakarta	Bantul	Gunungkidul	Kulon Progo	Sleman	DIY
11	Kerajinan Property Budaya	21	88	87	15	33	244
12	Perusahaan Bioskop	2				1	3
	<b>DIY</b>	<b>631</b>	<b>1210</b>	<b>1272</b>	<b>1420</b>	<b>1859</b>	<b>6392</b>

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY

Perkembangan seni grup kesenian di DIY mengalami peningkatan dari tahun-ketahun. Perkembangan grup kesenian dan gedung kesenian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel II-35 Rasio Grup kesenian dan gedung kesenian di DIY, Tahun 2012-2016**

Capaian Pembangunan	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.	15,42	15,42	15,42	15,42	17,37
Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.	0,27	0,30	0,33	0,41	0,91

Sumber : Dinas Kebudayaan DIY

Perkembangan seni dan budaya menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel II-36 Rasio Grup kesenian dan gedung kesenian di DIY, Tahun 2012-2016**

Kab/Kota	Rasio Grup kesenian per 10.000 penduduk	Rasio Gedung kesenian per 10.000 penduduk
Kabupaten Bantul	12,45	0,89
Kabupaten Sleman	15,92	1,26
Kabupaten Gunungkidul	17,78	0,22
Kabupaten Kulon Progo	34,39	0,41
Kota Yogyakarta	15,28	1,67
DIY	17,37	0,91

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY

Organisasi seni budaya tumbuh meramaikan event-event seni budaya baik yang bertaraf lokal, nasional maupun internasional semakin banyak diselenggarakan baik oleh swasta, masyarakat maupun pemerintah. Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah (IKPMD) se DIY juga dilibatkan dalam berbagai festival kesenian. Data penyelenggaraan festival seni dan budaya menunjukkan peningkatan kuantitas pada tahun 2012 sebanyak 980 menjadi 1.350 pada tahun 2016. Hal ini mengisyaratkan adanya pemberlanjutan dari pelestarian seni dan budaya.

**Tabel II-37 Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya di DIY, Tahun 2012-2016**

Jenis Data	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	980	1.025	1.200	1.275	1.350
Prasarana Budaya	107	107	107	107	107
Lembaga Budaya	105	82	82	98	180

Jenis Data	2012	2013	2014	2015	2016
Institusi Pendidikan di Bidang Kebudayaan	31	31	43	49	49

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY

Kehidupan kesenian di DIY berkembang pesat karena bermunculannya SDM yang sangat inovatif dan kreatif menciptakan karya seni baik yang diadaptasi dari seni tradisi maupun kontemporer sehingga membangkitkan kembali kelompok seni yang sudah lama tidak aktif dan bermunculan kelompok seni yang baru, walaupun secara kuantitatif menunjukkan penurunan. Kesenian bagi masyarakat Yogyakarta memiliki fungsi mediasi, simbol, pendidikan, dan hiburan. Potensi kesenian Yogyakarta sangat beragam, meliputi seni pertunjukan, seni kriya, seni rupa, seni audio visual, dari yang klasik sampai kontemporer.

Sampai saat ini ada 17 kelompok seni yang mengembangkan seni rupa, 5543 aktif di seni pertunjukan, dan 42 kelompok bergerak di sinematografi. Galeri seni yang didirikan ada 29 buah. Organisasi budaya berkategori maju adalah organisasi budaya yang memiliki kelengkapan administrasi, peralatan dalam kondisi baik, kegiatan latihan yang dilakukan secara terjadwal, pementasan pada tingkat nasional dan internasional serta mendapatkan penghargaan tingkat provinsi, nasional, dan internasional. Indikator persentase organisasi budaya berkategori maju sebesar 1,41% atau 90 organisasi budaya dibandingkan organisasi budaya yang terdata sejumlah 6.392.

Seni yang juga berkembang pesat saat ini di DIY adalah dunia film. Banyak film yang telah diproduksi di DIY baik nasional maupun internasional, seperti film Sang Pencerah, film Turis Romantis, Surga yang Tak Dirindukan, *Java Heat*, *The Philosophers* yang mengambil lokasi di kawasan-kawasan cagar budaya. Pada tahun 2015 DIY telah memproduksi berbagai karya budaya film unggul.

Grup-grup kesenian diklasifikasikan dalam tiga tahapan perkembangan, yaitu: tumbuh, berkembang, dan maju. SDM industri kreatif nasional diwarnai oleh tokoh seniman dan budayawan kreatif dari DIY. Berikut pengklasifikasian kelompok seni:

**Tabel II-38 Klasifikasi Kelompok Seni, Tahun 2016**

No	Kab/Kota	Jumlah	Jenis Kesenian	Kriteria		
				Tumbuh	Berkembang	Maju
1	Kota Yogyakarta	631	45	422	200	9
2	Kabupaten Sleman	1859	52	1166	667	26
3	Kabupaten Bantul	1210	52	928	265	17
4	Kabupaten Gunungkidul	1272	51	1001	253	18
5	Kabupaten Kulon Progo	1420	46	1283	117	20
<b>DIY</b>		<b>6392</b>		<b>4800</b>	<b>1502</b>	<b>90</b>

Sumber : Dinas Kebudayaan

DIY sampai saat ini masih memiliki 475 jenis upacara adat yang tersebar di kabupaten kota. Upacara tradisi yang menandai daur hidup manusia di tiap kabupaten dan kota ada 35 jenisnya, kesemuanya masih dilaksanakan di 5 kabupaten/kota, misalnya upacara adat pernikahan, kelahiran, selamat. Sebagian kecil kegiatan adat dan tradisi yang ada sudah teragendakan, namun sebagian besar sifatnya incidental dan tidak teragendakan secara tetap, antara lain berupa *mitoni*, *tetakan*, *pitung dinanan*, *slametan*, *nyatus*, *nyewu* dan lain-lain.

Beberapa desa, kelompok organisasi budaya, keluarga memiliki jenis upacara adat yang sama di desa lain, antara lain *merti dusun*, *ruwatan*, *labuhan*, *bersih desa*, *sedekah bumi* dan sebagainya.

Organisasi kepercayaan yang hidup ada 120 organisasi yang tersebar di Kabupaten Bantul sebanyak 27, Kabupaten Kulon Progo sebanyak 25, Kabupaten Gunungkidul sebanyak 14, Kabupaten Sleman sebanyak 33, dan Kota Yogyakarta sebanyak 21. Setiap kabupaten dan kota memiliki 35 jenis pakaian adat. Adat rias dan busana pengantin yang diwujudkan dalam bentuk sanggar rias ada 405 sanggar yang melestarikan upacara pengantin gaya Yogyakarta lengkap dengan busana dan aksesorisnya. Untuk melestarikan upacara adat istiadat, tradisi, makanan tradisional dan permainan tradisional telah dilakukan pembinaan-pembinaan dan fasilitasi festival. Dengan festival upacara adat masyarakat dapat menemukan dan mengenali kembali upacara-upacara adat, tradisi, makanan tradisional dan permainan tradisional yang sudah langka dalam masyarakat. Permainan tradisional yang dapat ditemukan ada sekitar 58 macam yang menyebar di seluruh kabupaten/kota.

Pengembangan budaya di DIY juga dilakukan dengan pembentukan dan pengembangan desa budaya. DIY masih memiliki 56 desa budaya. Desa budaya berkategori maju adalah desa budaya yang melakukan aktivitas budaya yang mengekspresikan tujuh unsur kebudayaan yang universal, mengaktualisasikan kekayaan potensi secara maksimal serta mengkonservasi kekayaan budaya yang dimiliki. Capaian realisasi indikator persentase desa budaya berkategori maju tahun 2016 sebesar 39,3% dari 56 desa budaya. Peraturan Gubernur No. 36 Tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan Budaya mengatur perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan desa-desa budaya dan kampung budaya di DIY.

**Tabel II-39 Perkembangan Sistem Nilai Budaya di DIY, 2012-2016**

Jenis Data	2012	2013	2014	2015	2016
Upacara Adat	447	447	459	473	475
Upacara Tradisi	35	35	35	35	35
Organisasi Penghayat Kepercayaan	90	90	94	115	119
Makanan Tradisional	137	137	137	181	180
Jenis Permainan Tradisional	34	34	34	34	58
Jenis Pakaian	15	15	35	35	35
Sanggar Rias	405	405	405	405	405
Cerita Rakyat	33	33	33	33	33

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY

Untuk melestarikan upacara adat istiadat, tradisi, makanan tradisional dan permainan tradisional telah dilakukan pembinaan-pembinaan dan fasilitasi festival. Dengan festival upacara adat masyarakat dapat menemukan dan mengenali kembali upacara-upacara adat, tradisi, makanan tradisional dan permainan tradisional yang sudah langka dalam masyarakat. Organisasi penghayat kepercayaan yang masih berkembang ada sekitar 119 kelompok. Mereka juga melakukan ritual budaya sendiri.

Seni yang juga berkembang pesat saat ini di DIY adalah dunia film. Banyak film yang telah diproduksi di DIY baik nasional maupun internasional, seperti film Sang Pencerah, film Turis Romantis, Surga yang Tak dirindukan, Java Heat, The Philosophers yang mengambil lokasi

di kawasan-kawasan cagar budaya. Pada tahun 2015 DIY telah memproduksi karya budaya film unggul yaitu antara lain : Amarta (Gadis dan Air), Bawang Kembar, Ilalang ingin Hilang Waktu Siang, Jaranan, Kirana, Kitorang Basudara, Natalan, Neng Kene Aku Ngenteni Kowe, Pulang Tanpa Alamat, Sasi Takon. Pada tahun 2016 Film yang diproduksi Dinas Kebudayaan terdiri dari Film Dokumenter (Jamu (Saking Wingking Mengajeng), Jogja kembali, Sosrokusuman), dan Film Fiksi (Happy Family, Kleang Kabur Kanginan, Ruah).

Kelompok pembuat film di Yogyakarta beragam dari segi umur, organisasi, bentuk organisasi, maupun ukuran organisasi. Dari segi umur, hampir semua kelompok pembuat film didirikan pasca reformasi. Komunitas film sangat mempengaruhi perkembangan perfilman di DIY. Beberapa contoh komunitas yang menyelenggarakan program pelatihan kine klub yang berbasis kampus seperti di UGM, ISI Yogyakarta, APMD, UAJY, UIN, dan UMY. Komunitas apresiasi dan kajian film yang tidak berbasis kampus antara lain : De Javu, Ki noki, Montase, Rumah Sinema, Forum Film Dokumenter. Komunitas film yang sudah berorientasi pada produksi misalnya Limaenam Films, Studio Kasat Mata dan Fourcolours Films.

DIY diuntungkan dengan keberadaan 129 perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa lebih dari 200 ribu orang. Keberadaan perguruan tinggi seperti universitas, akademi dan berbagai sekolah vokasi tersebut memungkinkan perjumpaan orang-orang yang berminat pada produksi film dan mendukung kemunculan kelompok-kelompok film yang berorientasi pada seni, selain untuk mencari pendapatan. Film bagi kelompok pembuat film di DIY bukan saja soal ekonomi, tetapi juga soal ungkapan seni budaya. Hasil produksi film di Yogyakarta tidak melayani pasar bioskop sebagaimana industri perfilman nasional yang banyak berbasis di Jakarta.

Film produksi Yogyakarta lebih banyak melayani berbagai kebutuhan dari rumah produksi luar negeri, perusahaan iklan, instansi pemerintah, festival film, hingga lembaga swadaya masyarakat internasional. Pemda DIY mestinya mengintervensi melalui aspek distribusi dan pameran yang masih jarang mendapat perhatian banyak pihak. Produktivitas kelompok pembuat film di DIY harus dipertemukan dengan pasar sebagai cara mempertemukan film dan penontonnya. Kelompok pembuat film di DIY membutuhkan perluasan pasar dari aspek distribusi maupun pameran yang perlu disediakan bersama oleh para pihak baik swasta maupun Pemda.

**Tabel II-40      Perkembangan Organisasi dan Pelaku Seni di DIY Tahun 2012-2016**

Jenis Data	2012	2013	2014	2015	2016
Organisasi Sinematografi	14	42	42	42	42
Organisasi Seni Pertunjukan	4.269	5.226	5.252	5440	5543
Organisasi Seni Rupa	25	16	17	17	17
Galeri seni rupa	29	29	29	29	29
Perusahaan Film	10	20	20	20	20
Kerajinan Property Budaya	178	246	241	244	244
Perusahaan Bioskop	4	2	3	3	3
Perusahaan Persewaan dan Penjualan Film	37	38	38	38	38
Tokoh Seniman Budayawan	486	486	487	489	496
Penghargaan seniman Budayawan	260	275	290	295	351

Sumber: [www.jogjabudaya.com](http://www.jogjabudaya.com) (Dinas Kebudayaan)

Para ahli sejarah membagi fase-fase perjalanan peradaban di DIY dalam periode prasejarah, Matarm Kuno, Mataram Islam, Kolonial, Pasca Kemerdekaan (Kontemporer). Setiap fase peradaban meninggalkan simbol-simbol eksistensi dan kejayaan masing-masing. Karakter yang mewarnai peninggalan itu beragam, ada candi Syiwa, candi Budha, Kraton, Kuil, Indish, joglo, klentheng, dan sebagainya. Kehidupan manusia-manusia purba pernah terjadi di pegunungan selatan Yogyakarta meninggalkan karya yang berupa bebatuan, gua-gua. Peninggalan-peninggalan tersebut dapat berupa bangunan, situs, benda, kawasan maupun struktur yang secara yuridis bernama Cagar budaya yang sangat bernilai bagi kemajuan kebudayaan itu sendiri, ilmu pengetahuan, sosial ekonomi dan bahkan politik.

**Tabel II-41 Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya di DIY dan Kabupaten/ Kota Tahun 2017**

No	Kab/Kota (Th 2017)	Cagar Budaya					Warisan Budaya					Jumlah
		Benda	Struktur	Bangunan	Situs	Kawasan	Benda	Struktur	Bangunan	Situs	Kawasan	
1	Yogyakarta	-	3	159	6	2	-	-	346	1	3	520
2	Sleman	-	-	18	-	-	14	17	247	164	2	462
3	Kulon Progo	-	1	19	4	-	48	1	10	5	-	88
4	Bantul	20	5	8	12	1	24	10	42	111	2	235
5	Gunungkidul	-	1	1	2	-	3564	6	34	146	1	3755
6	DIY	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
<b>JUMLAH</b>		<b>20</b>	<b>10</b>	<b>205</b>	<b>24</b>	<b>5</b>	<b>3650</b>	<b>34</b>	<b>679</b>	<b>427</b>	<b>8</b>	<b>5062</b>

Sumber : Dinas Kebudayaan, 2017

## 2. Olahraga

Olahraga sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang kuat. Disamping itu olahraga sebagai sarana menguatkan karakter dan kepemimpinan pemuda adalah dengan meningkatkan prestasi olahraga. Dalam bidang olahraga, pembinaan dilakukan dengan cara mengidentifikasi ketersediaan potensi dan bakat bidang olahraga baik bagi pelajar maupun pemuda. Selanjutnya, akan dilakukan pembibitan melalui proses seleksi dan pembinaan melalui kompetisi-kompetisi tingkat DIY. Bibit-bibit berprestasi terus dibina agar dapat meningkatkan prestasi sampai ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Pembinaan olahraga tentu perlu didukung dengan kesiapan tenaga pelatih, sarana dan prasarana, serta teknologi.

Perkembangan jumlah seni, budaya, dan olahraga di DIY dari tahun-ketahun mengalami peningkatan.

**Tabel II-42 Rasio Klub Olahraga dan Gedung Olahraga di DIY, Tahun 2012-2016**

Capaian Pembangunan	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.	0,019	0,019	0,019	0,48	0,48
Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.	0,0008	0,0008	0,0008	0,91	0,91

Sumber: Disdikpora DIY

Sarana dan prasarana kegiatan pemuda dan olahraga yang sangat potensial untuk pengembangan olahraga ke depan antara lain adalah Mandala Krida, Youth Center,

Amongrogo, Pondok Pemuda Ambarbinangun, GOR Sorowajan, dan Graha Bakti Wanayasa. Sarana olahraga berjumlah 285 buah. Jumlah club olahraga pada tahun 2016 terdapat 178 buah.

### **II.3 Aspek Pelayanan Umum**

Di era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang aparatur pemerintah hendaknya memberikan pelayanan optimal yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan yaitu masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintahan apabila merujuk pada Undang-undang 23 tahun 2014 dikategorikan dalam dua hal, urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintah yang tidak terkait pelayanan dasar. Untuk memastikan penyelenggaraan Pelayanan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara berjalan optimal maka diatur melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Untuk melihat sejauh mana capaian penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah bisa dilihat pada indikator kinerja dari masing-masing sektor. Di bidang pelayanan pendidikan meskipun capaian DIY di atas rata-rata nasional, tetapi perlu upaya mengurangi kesenjangan antar daerah.

Dalam bidang kesehatan masih diperlukan akselerasi pemenuhan akses dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan pengendalian penyakit, meningkatkan gizi masyarakat dan mengedepankan upaya promotif dan preventif. Di samping itu kondisi lingkungan juga akan berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat. Penyediaan air minum sebagai kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi di DIY belum mencapai 100%. Masih perlu percepatan dalam penyediaan air minum agar seluruh warga di DIY mendapatkan air minum. Pelayanan dalam bidang perumahan rakyat agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 65.578 unit (tahun 2016) menunjukkan bahwa pelayanan peningkatan mutu RTLH masih menjadi agenda prioritas. Kondisi lingkungan yang terkait dengan kesehatan masyarakat juga perlu mendapatkan perhatian, seperti pencemaran sungai dan kualitas air tanah yang tidak memenuhi baku mutu karena tercemar bakteri.

Pemenuhan hak kependudukan Kepemilikan dokumen administrasi kependudukan yang lain, kepemilikan akta (terutama akta kelahiran, akta kematian, dan akta perkawinan) oleh penduduk, masih rendah. Berdasarkan data SIAK (sistem informasi administrasi kependudukan) tahun 2016, cakupan kepemilikan akta kelahiran anak di DIY sebesar 80,97%. Perhatian terhadap pelayanan terhadap anak juga harus dioptimalkan mengingat masih terjadinya kekerasan terhadap anak, anak terlantar, perkawinan di bawah umur.

Pemenuhan layanan Keluarga berencana dalam perspektif pengendalian penduduk diperlukan agar penduduk tumbuh seimbang dengan target Total Fertility Rate (TFR) sebesar 2,1 sehingga *dependency ratio* kecil sehingga banyak penduduk produktif yang bekerja yang kemudian mendorong pada peningkatan ekonomi. Di sisi lain perlu juga memperbaiki pelayanan terhadap lansia karena diproyeksikan semakin besar jumlahnya.

Isu kesetaraan gender juga perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan program kegiatan, karena isu gender masih cukup mengemuka seperti seperti aktivitas perempuan dalam ekonomi masih tertinggal dengan laki-laki, demikian halnya dengan posisi perempuan dalam lembaga politik yang masih kecil dibanding laki-laki. Di sektor domestik perempuan masih memikul beban ganda, yaitu mengurus kebutuhan domestik dan masih harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di samping itu kekerasan dalam rumah tangga dimana lebih banyak perempuan sebagai korban.

### **II.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib**

#### **II.3.1.1 Layanan Urusan Wajib Dasar**

##### **II.3.1.1.1 Urusan Pendidikan**

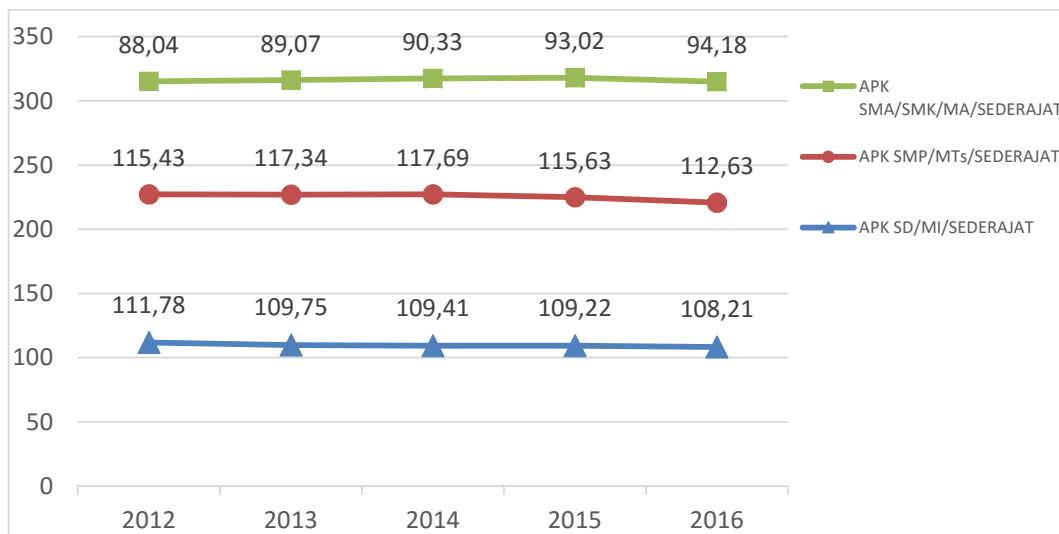
Filosofi yang mendasari pemerintah DIY dalam melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia terangkum dalam “Hamemayu Hayuning Bawana”. Filosofi itu merupakan basis untuk mewujudkan cita-cita luhur tentang tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta yang berkelanjutan berbasiskan nilai budaya. Salah satu hal utama yg perlu di prioritaskan untuk mewujudkan hal tersebut, yaitu melalui pendidikan.

Pendidikan menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat DIY yang berkualitas, berdaya saing, sejahtera dan berkarakter sesuai nilai-nilai dasar budaya yang telah berkembang di masyarakat. Melalui modal dasar kebudayaan dan pendidikan ini pembangunan sumber daya manusia yang diarahkan pada tercapainya peradaban baru unggul yang menghasilkan ‘manusia yang utama’ (jalmâ kang utâmâ), yang berasaskan ‘rasa ke-Tuhan-an, rasa kemanusiaan dan rasa keadilan’. Basis pembangunan tersebut merupakan pengembangan dari konsep semangat renaissance di DIY.

#### **1. Angka Partisipasi Kasar**

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA sederajat dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun (7-12 untuk SD sederajat, 13-15 untuk SLTP sederajat dan 16-18 untuk SLTA sederajat), berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Capaian APK DIY tahun 2010 hingga 2016 dapat dilihat dari gambar berikut:



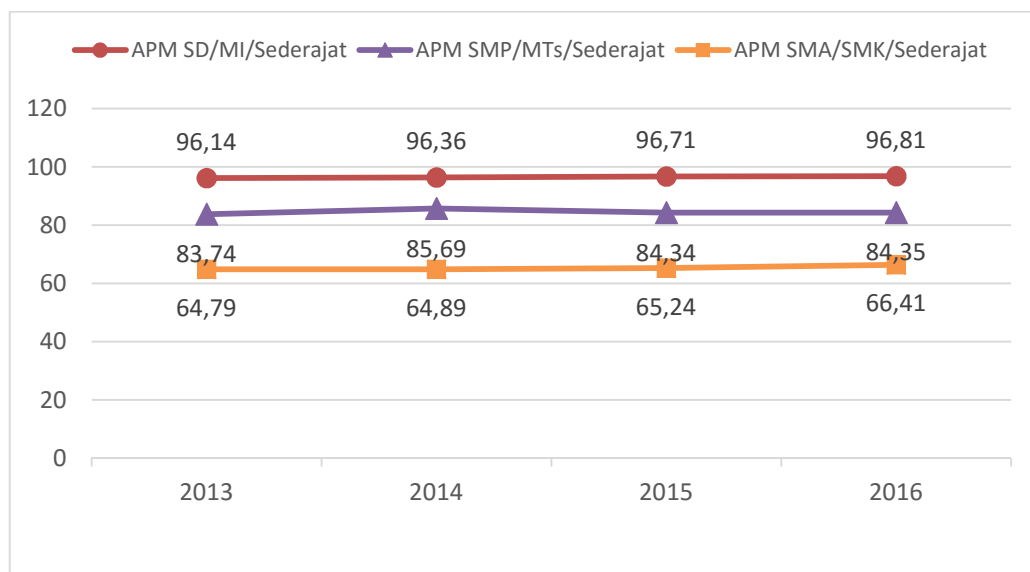
Sumber: BAPPEDA DIY

**Gambar II.32 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar DIY di Semua Jenjang Pendidikan Tahun 2012-2016**

Dari periode 2012-2016, capaian APK SD/ sederajat menunjukkan capaian di atas 100%. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa terdapat anak yang sekolah di SD umurnya di luar 7-12 tahun, dan diduga masih kurang dari 7 tahun. Hal yang sama terjadi pada capaian APK SLTP DIY/ sederajat juga di atas 100%, karena banyak kita jumpai anak-anak yang usianya belum genap 7 tahun sudah sekolah SD dan imbasnya saat masuk SMP usianya kurang dari 13 tahun, kondisi demikian yang menyebabkan APK SD dan SMP di atas 100%. Sementara APK SLTA cenderung lebih rendah, hal ini diduga banyak anak tamatan SLTP yang tidak melanjutkan ke jenjang SLTA. Tetapi melihat trend peningkatan APK jenjang SLTA dan sederajat menuju angka 100% menunjukkan semakin banyaknya anak usia sekolah untuk menyelesaikan pendidikan jenjang SLTA/ sederajat.

## 2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Partisipasi sekolah di suatu wilayah juga bisa dilihat dari capaian APM di wilayah tersebut. APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut.

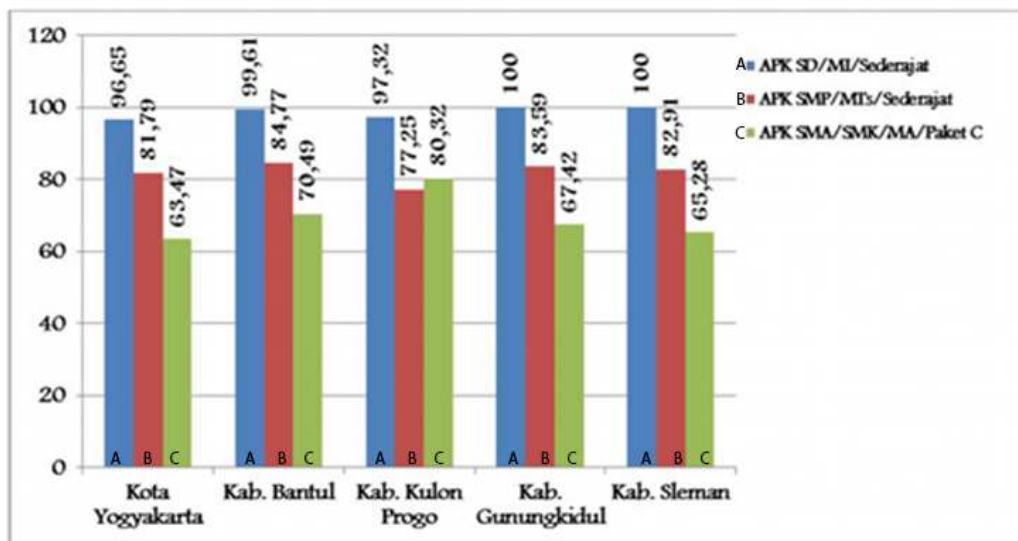


Sumber: BPS DIY, 2016

**Gambar II.33 Perkembangan Angka Partisipasi Murni DIY di Semua Jenjang Pendidikan Tahun 2012-2016**

Perkembangan APM menurut jenjang pendidikan dalam beberapa tahun terakhir terlihat meningkat, level APM terlihat semakin menurun seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Hal ini karena adanya kasus terlambat sekolah untuk jenjang SD dan tinggal kelas untuk jenjang SMP dan SMA. Capaian APM DIY Tahun 2016 untuk semua jenjang pendidikan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 2015. Capaian APM tingkat SD Tahun 2016 sebesar 96,81% naik dari periode sebelumnya 2015 sebesar 96,71%. Sedangkan untuk tingkat SMP, capaian APM tahun 2016 sebesar 84,35%, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 2015 sebesar 84,34%. Capaian APM tingkat SMA juga mengalami peningkatan dari tahun 2016 yaitu 66,41% meningkat menjadi 65,24% di tahun 2015.

Dilihat capaian APM per kabupaten/kota, capaian APM jenjang SD tertinggi di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul yaitu sebesar 100% sedangkan yang terendah Kota Yogyakarta sebesar 96,65%. Capaian APM SD Kota Yogyakarta lebih rendah dikarenakan peserta didik baru di Kota Yogyakarta yang masuk SD dengan usia belum mencapai 7 tahun. Hal ini juga berpengaruh pada capaian APM jenjang SMP dan SMA yang relatif lebih rendah daripada kabupaten lainnya.



Sumber: BPS DIY, 2016

**Gambar II.34** Capaian APK Per Jenjang Pendidikan Per Kabupaten Kota di DIY Tahun 2015

**Tabel II-43** Data Pendidikan PAUD D.I.Yogyakarta

No	Komponen Data Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>A. DATA PENDUDUK</b>							
1	Anak Usia 0-6 Tahun	285.035	300.271	380.225	307.603	273.425	349.082
	Laki-laki	143.801	151.237	193.402	154.648	137.661	178.387
	Perempuan	141.234	149.034	186.823	152.954	135.764	170.695
2	Anak Usia 4-6 Tahun	126.428	134.493	168.359	163.628	155.884	152.703
	Laki-laki	64.300	66.517	86.654	83.212	79.488	78.454
	Perempuan	62.128	67.976	81.705	80.415	76.396	74.249
<b>B. DATA LAYANAN PENDIDIKAN</b>							
1	Sekolah / Lembaga Pendidikan PAUD Non Formal	5.908	4.989	4.477	4.665	4.249	3.342
	Kelompok Bermain	1.112	1.225	1.386	1.428	1.503	1.548
	Tempat Penitipan Anak	169	196	178	194	206	236
	Satuan PAUD Sejenis	4.627	3.568	2.913	3.043	2.540	1.558
2	Peserta Didik	88.885	97.523	103.291	109.418	112.233	102.337
	Kelompok Bermain	38.804	43.508	44.594	45.745	48.482	46.440
	Tempat Penitipan Anak	5.190	5.770	5.385	5.593	7.322	7.689
	Satuan PAUD Sejenis	44.891	48.245	53.312	58.080	56.429	48.208

No	Komponen Data Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
3	Sekolah / Lembaga Pendidikan PAUD	2.194	2.209	2.224	2.276	2.274	2.312
	TK	2.055	2.073	2.068	2.113	2.105	2.141
	RA	139	136	156	163	169	171
4	Peserta Didik	82.631	84.981	88.411	95.170	97.276	98.404
	TK (Semua Siswa)	77.948	80.241	82.500	88.198	89.809	91.150
	Laki-laki	39.984	41.033	42.313	45.446	46.151	46.724
	Perempuan	37.964	39.208	40.187	42.752	43.658	44.426
	TK Usia 4-6 tahun	76.251	78.815	81.084	86.783	88.579	89.461
	Laki-laki	39.143	40.346	41.620	44.733	45.538	45.970
	Perempuan	37.108	38.469	39.464	42.050	43.041	43.491
	RA (Semua Siswa)	4.683	4.740	5.911	6.972	7.467	7.254
	Laki-laki	2.408	2.428	3.027	3.634	3.796	3.635
	Perempuan	2.275	2.312	2.884	3.338	3.671	3.619
	RA Usia 4-6 tahun	4.420	4.537	5.659	6.791	7.254	6.954
	Laki-laki	2.263	2.319	2.894	3.546	3.692	3.481
	Perempuan	2.157	2.218	2.765	3.245	3.562	3.473
		-	-	-	-	-	-
5	PENDIDIK PAUD NON FORMAL	16.806	16.349	15.615	15.323	16.042	15.742
	Kelompok Bermain	4.694	5.005	4.992	5.015	5.709	5.456
	Tempat Penitipan Anak	870	1.083	981	999	1.067	1.352
	Satuan PAUD Sejenis	11.242	10.261	9.642	9.309	9.266	8.934
		-	-	-	-	-	-
6	GURU TK & RA	7.571	7.784	7.673	7.848	7.759	7.583
	PNS	2.408	2.417	2.290	2.248	2.153	2.196
	Non PNS	5.163	5.367	5.383	5.600	5.606	5.387
		-	-	-	-	-	-
8	KUALIFIKASI PENDIDIK PAUD NON FORMAL						
		12.155	12.345	12.598	12.285	13.290	15.742

No	Komponen Data Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	< S1	4.775	4.680	4.624	4.300	4.638	8.126
	S1	7.300	7.577	7.881	7.882	8.527	7.547
	> S1	80	88	93	103	125	69
9	KUALIFIKASI PENDIDIK TK & RA	7.571	7.784	7.673	7.848	7.759	7.583
	< S1	5.609	5.308	4.638	3.345	2.581	2.094
	S1	1.952	2.463	3.017	4.482	5.157	5.449
	> S1	10	13	18	21	21	40
10	SERTIFIKASI PENDIDIK TK & RA	1.668	1.772	1.810	7.848	7.759	7.583
	Sudah	175	50	128	1.625	3.099	3.544
	Belum	1.493	1.722	1.682	6.223	4.660	4.039
		-	-	-	-	-	-
11	HASIL AKREDITASI TK & RA	2.194	2.209	2.224	2.276	2.274	2.312
	A	731	734	769	800	757	734
	B	1.089	1.103	1.136	1.180	1.182	1.194
	C	130	129	129	149	149	151
	Belum Terakreditasi	244	243	190	147	186	233
		-	-	-	-	-	-
12	HASIL AKREDITASI PAUD NON FORMAL	1.064	1.184	1.394	1.460	1.558	3.342
	Terakreditasi	38	70	138	185	254	458
	Belum Terakreditasi	1.026	1.114	1.256	1.275	1.304	2.884
		-	-	-	-	-	-
13	KONDISI RUANG KELAS TK & RA (Unit)	4.199	4.203	4.436	4.713	5.081	5.793
	Baik	3.726	3.767	3.954	4.192	4.558	4.402
	Rusak Ringan	75	61	64	455	439	1.318
	Rusak Berat	398	375	418	66	84	73
14	KETERSEDIAAN ALAT PERAGA DAN BERMAIN TK & RA (Unit)	859	859	859	4.266	4.217	3.304
	ADA (LENGKAP)	-	-	-	698	646	492
	ADA (TIDAK LENGKAP)	859	859	859	3.519	3.525	2.786

No	Komponen Data Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TIDAK ADA	-	-	-	49	46	26
							-
<b>C. DATA INDIKATOR PENDIDIKAN</b>							
1	Angka Partisipasi Pendidikan						-
	Angka Partisipasi Kasar (APK) TK & RA	65,36	63,19	52,51	58,16	62,40	64,44
2	KONDISI RUANG KELAS TK & RA (%)						
	Baik	88,74	89,63	89,13	88,95	89,71	75,99
	Rusak Ringan	1,79	1,45	1,44	9,65	8,64	22,75
	Rusak Berat	9,48	8,92	9,42	1,40	1,65	1,26
3	KETERSEDIAAN ALAT PERAGA DAN BERMAIN TK & RA (%)						
	ADA (LENGKAP)	0	0	0	16,36	15,32	14,89
	ADA (TIDAK LENGKAP)	100	100	100	82,49	83,59	84,32
	TIDAK ADA	0	0	0	1,15	1,09	0,79
4	PEMENUHAN KUALIFIKASI PENDIDIK PAUD NON FORMAL (%)	60,72	62,09	63,30	65,00	65,10	48,38
5	PEMENUHAN KUALIFIKASI PENDIDIK TK & RA (%)	25,91	31,81	39,55	57,38	66,74	72,39
6	PEMENUHAN SERTIFIKASI PENDIDIK TK & RA (%)	2,31	0,64	1,67	20,71	39,94	46,74

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY 2018

#### II.3.1.1.2 Urusan Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

##### 1. Rasio Posyandu Persatuan Balita

Keberadaan posyandu di masyarakat merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Keberadaan posyandu diharapkan dapat memacu tingkat kesehatan khususnya kesehatan ibu dan anak serta perbaikan gizi.

Penguatan partisipasi masyarakat di lini bawah melalui posyandu sangat berperan dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA) dengan sasaran pelayanan KIA, imunisasi, pemeliharaan gizi masyarakat, dan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan. Data jumlah Posyandu di DIY pada tahun 2016 sebanyak 4.742 posyandu yang masih aktif dari total 5.717 posyandu yang ada.

**Tabel II-44      Perkembangan Jumlah Posyandu di DIY, Tahun 2013-2016**

Kab/Kota	2013			2014			2015			2016		
	Total	Aktif	Proporsi	Total	Aktif	Proporsi	Total	Aktif	Proporsi	Total	Aktif	Proporsi
Kota Yogyakarta	624	450	72,12	62	450	72,00	62	450	72,00	625	615	98,40
Kab Bantul	1.13	747	65,99	1.13	747	65,99	1.13	747	65,99	1.13	747	65,70
Kab Kulon Progo	961	862	89,70	96	866	90,11	96	863	89,90	960	830	86,46
Kab Gunung	1.46	1.30	88,87	1.46	1.30	89,15	1.46	1.26	86,08	1.46	1.25	85,75
Kab Sleman	1.51	1.23	81,11	1.51	1.28	84,53	1.52	1.29	85,07	1.52	1.29	84,55
DIY	5.70	4.59	80,56	5.70	4.65	81,60	5.70	4.61	80,92	5.71	4.74	82,95

Sumber : Dinas Kesehatan DIY

## 2.      Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per 1.000 Penduduk

Puskesmas adalah unit fungsional pelayanan kesehatan terdepan sebagai unit pelaksana teknis dinas kesehatan kota atau kabupaten yang melaksanakan upaya penyuluhan, pencegahan dan penanganan kasus-kasus penyakit di wilayah kerjanya, secara terpadu dan terkoordinasi.

Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di DIY tahun 2014 sebanyak 442 unit dengan rasio sebesar 0,122. Hal ini dapat diartikan bahwa 1 unit Puskesmas dan Puskesmas Pembantu melayani 8.228 penduduk.

**Tabel II-45      Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk Tahun 2009-2015**

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Penduduk	3.426.637	3.457.491	3.487.325	3.514.762	3.594.854	3.637.116	3.679.179
Jumlah Puskesmas	120	121	121	121	121	121	121
Jumlah Puskesmas Pembantu	321	321	321	320	320	321	319
Jumlah Puskesmas dan Jumlah Puskesmas Pembantu	441	442	442	441	441	442	440
Rasio Puskesmas dan Jumlah Puskesmas Pembantu per 1.000 penduduk	0,129	0,128	0,127	0,125	0,123	0,122	0,125

Sumber: BPS DIY

Dibandingkan dengan standar nasional, jumlah puskesmas yang harus tersedia dalam suatu wilayah berdasarkan SNI 03-1733-2004 yaitu setiap 120.000 penduduk harus terdapat minimal satu puskesmas. Jumlah penduduk DIY tahun 2015 sebanyak 3.627.962 jiwa maka kebutuhan puskesmas minimal yang harus dipenuhi sebanyak 30 unit, sedangkan total

puskesmas di DIY tahun 121 unit yang tersebar merata pada setiap kabupaten/kota. Pada tahun 2022 diproyeksikan jumlah penduduk DIY adalah 3.958.400 jiwa, maka kebutuhan puskesmas yang harus tersedia adalah hanya 33 unit. Oleh karena itu, pemerintah DIY dirasa belum perlu untuk menambah jumlah puskesmas karena jumlah saat ini sudah lebih dari cukup untuk melayani semua penduduk.

Sedangkan standar nasional untuk penyediaan puskesmas pembantu (Pustu), jumlah yang harus ada di suatu wilayah berdasarkan SNI 03-1733-2004, yaitu setiap 30.000 penduduk minimal harus terdapat satu puskesmas pembantu. Total penduduk DIY tahun 2015 sebanyak 3.627.962 jiwa sehingga kebutuhan pustu minimal sebanyak 121 unit. Namun demikian jumlah pustu yang ada di DIY sampai tahun 2015 sebanyak 319 unit yang berarti bahwa DIY saat ini hingga tahun 2022 mendatang (3.958.400 penduduk<sup>1</sup>) telah memenuhi standar pelayanan kesehatan terutama dalam penyediaan puskesmas maupun puskesmas pembantu.

### 3. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Berdasarkan jenis dan pengelolaannya, rumah sakit dibagi dalam kategori Rumah Sakit Umum (Pusat, Daerah, Swasta) dan Rumah Sakit Khusus. Terdapat penambahan jumlah rumah sakit di DIY dari tahun 2011 sampai dengan 2013 yaitu sebanyak 66 rumah sakit pada tahun 2011, menjadi 71 rumah sakit pada tahun 2013. Dengan jumlah penduduk DIY sebanyak 3.627.821 jiwa, rasio rumah sakit per satuan penduduk di DIY tahun 2013 adalah sebesar 0,0195. Dengan kata lain, 1 rumah sakit di DIY melayani 50.635 jiwa.

**Tabel II-46 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk DIY**

Kab/Kota	Jumlah RS	Jenis Rumah Sakit		Klasifikasi RS				
		Umum	Khusus	A	B	C	D	Belum Penetapan
Kota Yogyakarta	19	10	9	0	4	3	5	7
Kabupaten Bantul	14	10	4	0	2	3	4	5
Kabupaten Kulon Progo	8	8	0	0	1	0	1	6
Kabupaten Gunungkidul	5	5	0	0	0	2	0	3
Kabupaten Sleman	27	20	7	2	3	5	9	8
<b>Jumlah</b>	<b>73</b>	<b>53</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>29</b>

Sumber: Dinas Kesehatan

Salah satu indikator pelayanan rumah sakit adalah *Bed Occupancy Ratio* (BOR). BOR berfungsi untuk mengetahui seberapa jauh RS digunakan oleh masyarakat dan seberapa jauh masyarakat menggunakan pelayanan rawat inap. Pelayanan rumah sakit dikatakan efisien apabila angka BOR antara 75%-85%. Berdasarkan data sistem informasi rumah sakit Kementerian Kesehatan RI, BOR rumah sakit di DIY menunjukkan angka BOR masih tergolong rendah yaitu 58,28 % dari semua kelas tempat tidur, dengan tempat tidur sebanyak 5.364 TT (berdasarkan laporan 46 rumah sakit dari total 73 rumah sakit di DIY).

**Tabel II-47 Jumlah Rumah Sakit, Tempat Tidur, dan BOR Berdasarkan Kabupaten/Kota di DIY**

<sup>1</sup> Jumlah minimal Puskesmas yang harus tersedia di DIY tahun 2022 adalah 132 unit (3.958.400 penduduk dibagi dengan 30.000).

Kab/Kota	Jumlah RS	RS Lapor BOR	TT RS Lapor BOR	BOR Kab/Kota
Kota Yogyakarta	19	14	1.811	56,69
Bantul	14	6	525	64,10
Kulon Progo	8	5	388	50,32
Gunungkidul	5	4	295	66,50
Sleman	27	17	2.345	58,48
<b>Jumlah</b>	<b>73</b>	<b>46</b>	<b>5364</b>	<b>58,28</b>

Sumber : SIM RS, Dirjen BUK, Kementerian Kesehatan RI, 2014

Berdasarkan standar nasional tentang kebutuhan jumlah Rumah Sakit yang diatur dalam Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001, bahwa setiap 240.000 penduduk harus tersedia satu unit Rumah Sakit. Jika melihat jumlah penduduk DIY saat ini maka jumlah kebutuhan Rumah Sakit yang ada adalah sebanyak 15 unit<sup>2</sup>. Sedangkan jumlah rumah sakit yang ada pada tahun 2015 adalah 74 unit, jumlah tersebut lebih dari cukup untuk melayani penduduk DIY.

#### 4. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Salah satu faktor peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat adalah ketersediaan tenaga kesehatan yang dalam hal ini adalah dokter. Kecukupan tenaga kesehatan dengan masyarakat yang dilayani baik secara kuantitas maupun kualitas akan memberikan tingkat kepuasan yang semakin tinggi.

Pada tahun 2015, jumlah dokter umum yang ada di DIY sebanyak 1.224 orang dengan rasio dokter umum per 100.000 penduduk di tahun 2015 sebesar 33,26. Dengan kata lain 1 orang dokter umum di DIY melayani 3.346 penduduk. Sedangkan untuk ketersediaan tenaga dokter spesialis di DIY tahun 2014 adalah sebanyak 1.216 orang. Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk di DIY tahun 2013 adalah sebesar 33,43. Hal ini berarti 1 orang dokter spesialis di DIY melayani 2.991 penduduk. Jumlah dokter gigi DIY tahun 2014 sebanyak 354 orang. Rasio dokter gigi DIY per 100.000 penduduk sebesar 9,96 atau dapat diartikan bahwa 1 orang dokter gigi di DIY melayani 10.040 penduduk. Terdapat penurunan mencolok terhadap data tahun 2014 dengan data tahun sebelumnya. Penurunan tersebut dikarenakan data tahun 2014 yang tersedia hanya berasal dari data dokter di pelayanan kesehatan negeri dan belum mencakup pelayanan kesehatan swasta.

**Tabel II-48 Jumlah dan Rasio Dokter Umum, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi per 100.000 Penduduk DIY Tahun 2011-2015**

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Penduduk	3.487.325	3.514.762	3.594.854	3.637.116	3.679.179
Dokter Umum	1.011	997	1.354	1.087	1.224
Rasio Dokter Umum per 100.000 Penduduk	28,99	28,37	37,66	29,89	33,26
Dokter Spesialis	820	825	1.262	1.216	1.081
Rasio Spesialis Umum per 100.000 Penduduk	23,51	23,47	35,11	33,43	29,38
Dokter Gigi	428	432	453	354	482

<sup>2</sup> Dihitung dari Jumlah penduduk dibagi dengan standar yang ditetapkan (3.627.962 jiwa /240.000).

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio Gigi Umum per 100.000 Penduduk	12,08	12,36	12,85	9,96	13,10

Sumber: BPS DIY

Pada tahun 2015, jumlah tenaga medis di DIY adalah sebanyak 2.787 orang yang terdiri dari 1.224 dokter umum, 482 dokter gigi, 1.081 dokter spesialis. Kebutuhan tenaga medis di DIY idealnya adalah 3.628 orang<sup>3</sup>. Dengan kata lain, saat ini DIY dinilai masih kekurangan tenaga medis yang cukup signifikan.

Aspek yang tidak kalah penting dan mendasar dalam pembangunan sektor kesehatan ini adalah peningkatan mutu dan akses layanan kesehatan bagi warga yang meliputi ibu, anak, remaja, penduduk usia produktif, dan lanjut usia. Meskipun pemenuhan akses dan layanan kesehatan relatif baik, namun pemerintah DIY perlu mengoptimalkan agar mendapatkan tataran kualitasnya yang prima. Sehingga pertumbuhan penduduk yang ditandai dengan transisi demografi dapat berjalan secara maksimal.

## 5. Rasio Tenaga Kesehatan Per Satuan Penduduk

Rasio perawat di DIY tahun 2015 sebesar 154,59 per 100.000 penduduk, angka ini di atas angka standar nasional yang sebesar 117 per 100.000 penduduk. Sedangkan rasio bidan di DIY tahun 2015 sebesar 60,12 per 100.000 penduduk, angka ini masih di bawah standar nasional yang sebesar 100 per 100.000 penduduk. Tabel berikut menyajikan jumlah perawat, bidan, tenaga kefarmasian, dan tenaga gizi di DIY tahun 2013–2015.

**Tabel II-49 Jumlah dan Rasio Perawat, Bidan, Tenaga Farmasi, dan Tenaga Gizi Per 100.000 Penduduk di DIY, 2013-2015**

Tenaga Kesehatan	2013		2014		2015	
	Jumlah	Rasio per 100.000 penduduk	Jumlah	Rasio per 100.000 penduduk	Jumlah	Rasio per 100.000 penduduk
Perawat	5.688	158,22	5.688	156,38	5.688	154,59
Bidan	2.212	61,53	2.212	60,81	2.212	60,12
Tenaga Farmasi	1.914	53,24	1.043	28,67	1.784	48,48
Tenaga Gizi	1.068	29,70	441	12,12	430	11,68

Sumber: Dinas Kesehatan DIY

## 6. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Data cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dari tahun 2009 sampai dengan 2011 menunjukkan tren penurunan, dari 91,32% di tahun 2009 menurun menjadi 70,44% di tahun 2011. Akan tetapi hal tersebut tidak menggambarkan sepenuhnya kondisi penanganan komplikasi kebidanan di populasi karena denominator yang digunakan adalah angka proyeksi ibu hamil resiko tinggi. Setiap komplikasi yang terjadi akan diberikan penanganan secara definitif sesuai standar. Penurunan cakupan penanganan komplikasi bisa disebabkan karena

<sup>3</sup> Dihitung dari rasio jumlah penduduk terhadap standar pelayanan (1 orang tenaga medis melayani 1000 penduduk).

jumlah kasus komplikasi yang terjadi mengalami penurunan karena deteksi terhadap bumil risti yang baik dan pemantauan serta penanganan yang baik terhadap bumil risti sehingga tidak terjadi komplikasi.

**Tabel II-50 Ibu Hamil Resiko Tinggi di DIY menurut Kabupaten/Kota, 2009-2011**

Kabupaten/ Kota	2009			2010			2011		
	Bumil Risti/ Komplikasi	Bumil Risti/ Komplikasi Ditangani	Cakupan Bumil Risti/ Komplikasi Yang Ditangani(%)	BumilRisti/ Komplikasi	BumilRisti/ Komplikasi Ditangani	Cakupan Bumil Risti/ Komplikasi Yang Ditangani(%)	Bumil Risti/ Komplikasi	Bumil Risti/ Komplikasi Ditangani	Cakupan Bumil Risti/ Komplikasi Yang Ditangani(%)
Kota Yogyakarta	593	525	88,53	1.020	712	69,79	1.070	897	83,85
Kab.Bantul	5.997	5.997	100,00	1.332	2.454	91,72	2.956	2.391	80,88
Kab. Kulon Progo	1.428	1.428	100,00	2.675	1.231	92,40	1.348	1.238	91,83
Kab.Gunungkidul	2.371	1.441	60,78	1.871	1.645	87,91	1.942	1.323	68,11
Kab. Sleman	1.115	1.115	100,00	2.600	1.330	51,15	2.644	1.167	44,14
Jumlah DIY	11.504	10.506	91,32	9.498	7.372	77,61	9.960	7.016	70,44

Sumber : Profil Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan DIY

## 7. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

Menurut laporan Riskesdas 2010, cakupan pertolongan oleh tenaga kesehatan di DIY mencapai 98,6% jauh di atas rata-rata nasional yang mencapai 82,2%. Secara nasional, cakupan pertolongan oleh tenaga kesehatan berada pada posisi tertinggi.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan mengalami peningkatan dari tahun 2009-2011. Pada tahun 2009, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebesar 92,52% meningkat pada tahun 2011 menjadi 99,73%. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua persalinan di DIY ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Tabel berikut menunjukkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 :

**Tabel II-51 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan menurut Kabupaten/Kota di DIY**

Kabupaten/Kota	2009			2010			2011		
	Jumlah Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin Ditolong Tenaga Kesehatan	Cakupan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Berkompetensi Kebidanan	Jumlah Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin Ditolong Tenaga Kesehatan	Cakupan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Berkompetensi Kebidanan	Jumlah Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin Ditolong Tenaga Kesehatan	Cakupan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Berkompetensi Kebidanan
Kota Yogyakarta	5.199	4.859	93,46	4.578	4.577	99,98	4.787	4.787	100,00
Kab.Bantul	13.211	12.474	94,42	12.262	12.212	99,59	13.512	13.495	99,87
Kab. Kulon Progo	6.043	5.981	98,97	5.756	5.723	99,43	5.711	5.688	99,60
Kab. Gunungkidul	9.939	8.928	89,83	9.049	8.982	99,26	8.733	8.700	99,62
Kab. Sleman	13.207	11.799	89,34	12.412	11.544	93,01	12.225	12.177	99,61
Jumlah DIY	47.599	44.041	92,53	44.057	43.038	97,69	44.968	44.847	99,73

Sumber : Profil Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan DIY

## 8. Cakupan Desa/ Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

UCI (*Universal Child Immunization*) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), Ibu hamil, Wanita Usia Subur (WUS) dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis Polio, 4 dosis Hepatitis B, 1 dosis Campak. Ibu hamil dan WUS meliputi 2 dosis TT. Anak sekolah tingkat dasar meliputi 1 dosis DT, 1 dosis campak, dan 2 dosis TT.

Data menunjukkan peningkatan cakupan desa/kelurahan UCI DIY mencapai angka 100. Hal ini berarti tujuan UCI sudah tercapai sempurna di DIY. Tabel berikut menggambarkan cakupan desa/kelurahan UCI.

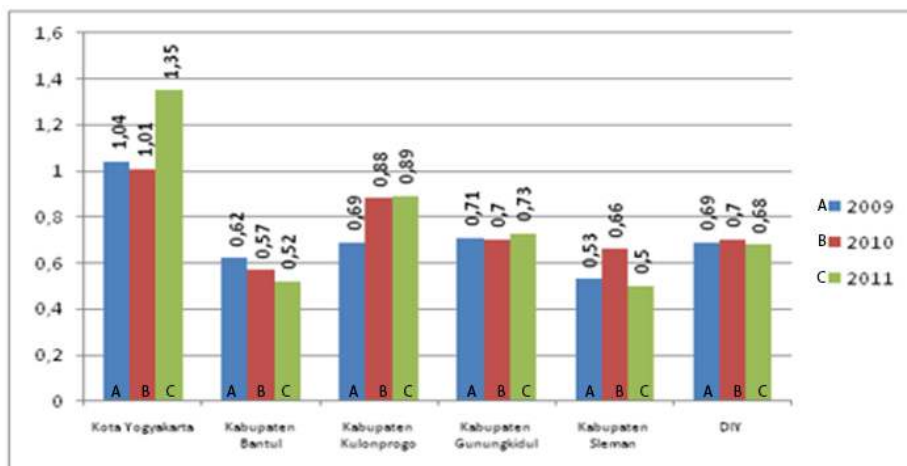
**Tabel II-52 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) menurut Kabupaten/Kota di DIY**

Kabupaten/Kota	2009			2010			2011		
	Jumlah Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan UCI	Persentase Desa/Kelurahan UCI	Jumlah Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan UCI	Persentase Desa/Kelurahan UCI	Jumlah Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan UCI	Persentase Desa/Kelurahan UCI
Kota Yogyakarta	45	45	100,00	45	45	100,00	45	45	100,00
Kab.Bantul	75	75	100,00	75	75	100,00	75	75	100,00
Kab. KulonProgo	88	86	97,73	88	88	100,00	88	88	100,00
Kab. Gunungkidul	144	142	98,61	144	144	100,00	144	144	100,00
Kab. Sleman	86	86	100,00	86	86	100,00	86	86	100,00

Sumber : Dinas Kesehatan DIY

## 9. Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan

Walaupun angka capaian gizi di DIY sudah jauh melampaui target nasional, tetapi penderita gizi buruk masih terdapat di DIY. Pada tahun 2011, prevalensi balita gizi buruk di DIY adalah 0,68%. Dari 5 kabupaten dan kota di DIY, prevalensi gizi buruk di 4 kabupaten sudah sesuai harapan, yaitu <1% tetapi di Kota Yogyakarta angka prevalensi gizi buruk masih 1,35%. Situasi gizi di DIY dari tahun 2009-2011 dapat dilihat dari gambar berikut ini.

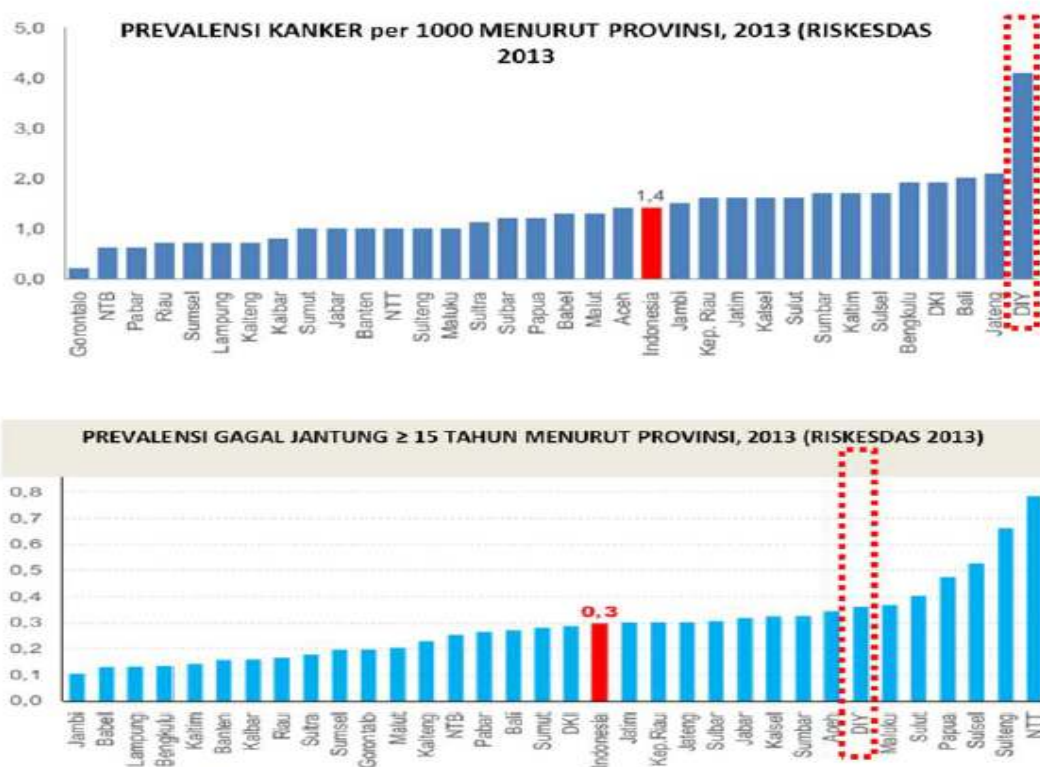
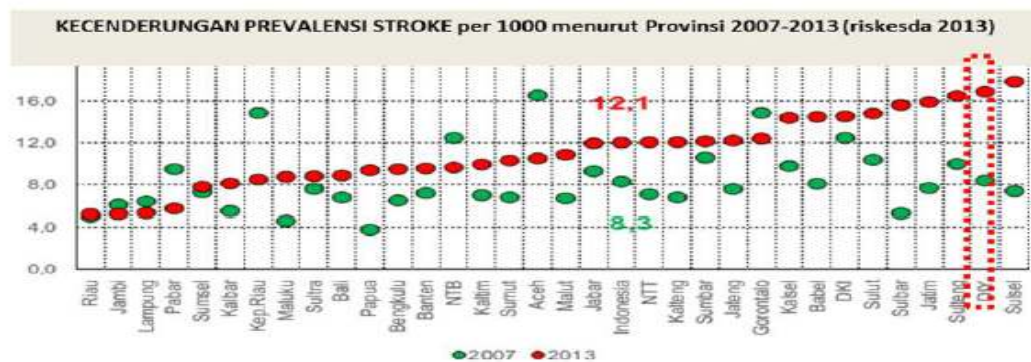
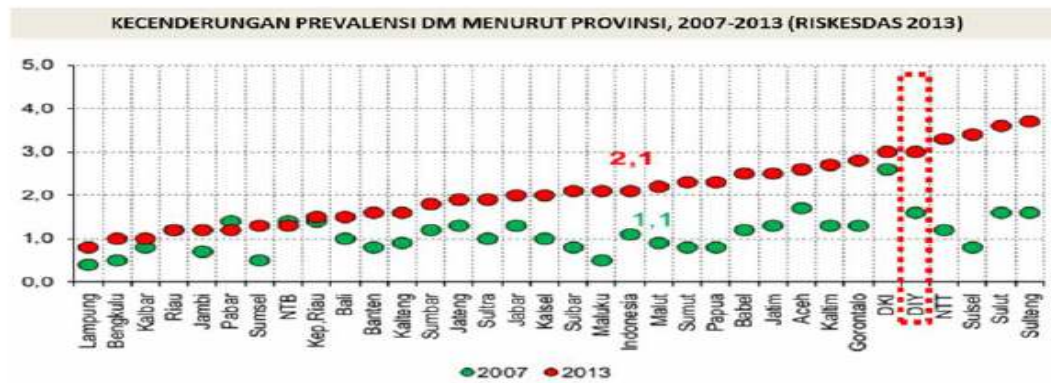


**Gambar II.35 Situasi Gizi Buruk di DIY Tahun 2009-2011**

Dari segi pelayanan, cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan mencapai 100%, artinya sebanyak 387 balita yang mengalami gizi buruk (dengan indikator BB/TB), semuanya mendapatkan perawatan. Upaya Pemerintah DIY dalam penanganan balita gizi buruk diantaranya dengan pemberian makanan tambahan, penyediaan rumah pemulihan gizi dan peran kader gizi di posyandu dalam deteksi dini balita gizi buruk.

#### **10. Pola Penyakit**

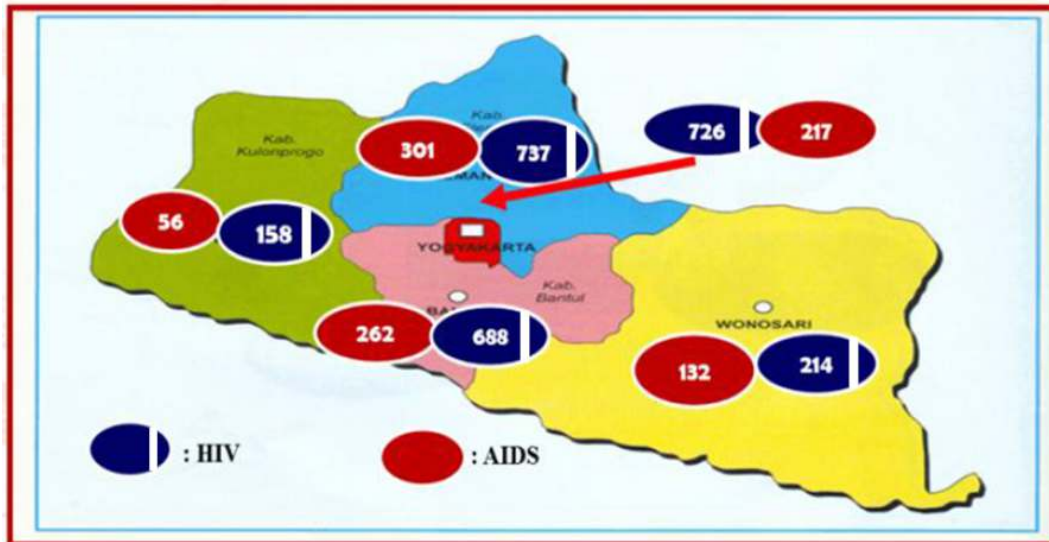
Prevalensi penyakit tidak menular (PTM) seperti: hipertensi, stroke, diabetes dan kanker melebihi angka nasional. Gangguan kesehatan jiwa sebagai bagian dari penyakit tidak menular di DIY menunjukkan angka yang cukup tinggi dibanding nasional. Menurut Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 prevalensi gangguan jiwa di DIY sebesar 2,7 permil. Angka ini, lebih tinggi dari prevalensi rata-rata nasional sebesar 1,7 permil. Artinya 3 orang dari setiap 1.000 orang penduduk DIY mengalami gangguan jiwa berat. Kulon Progo menempati kasus teratas dengan prevalensi 4,67, disusul Bantul 4,0, Kota Yogyakarta 2,14, Gunungkidul 2,05 dan Sleman sebesar 1,52. Sedangkan prevalensi penduduk DIY yang didiagnosis Tuberkulosis (TB) paru berdasarkan Riskesdas tahun 2013, sebesar 0,3% (nasional 0,4%). Angka ini sedikit lebih baik dibandingkan hasil Riskesdas 2007 sebesar 0,36%. Meskipun demikian perlu diwaspadai adanya kenaikan jumlah penderita TB kebal obat (Multi Drug Resistance/MDR dan Extensively Drug Resistance/XDR). Prevalensi penyakit saluran pernafasan lainnya yaitu asma dan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) di DIY berdasarkan Riskesdas 2013 merupakan 3 besar tertinggi setelah Provinsi Sulawesi Tengah dan NTT. Tercatat untuk asma sebesar 6,9% (nasional 4,5%) dan untuk PPOK 3,1% (nasional 3,7%). Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan kesehatan paru dan pernafasan khususnya TB dan asma di wilayah DIY harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Penyakit menular masih menjadi fokus perhatian dalam pencegahan dan pengendalian penyakit, beberapa penyakit menular yang masih perlu mendapat perhatian adalah diare, pneumonia balita, DBD, TB paru. Kecenderungan meningkatnya penyakit menular dan tidak menular banyak dipengaruhi oleh faktor perilaku dan lingkungan yang kurang sehat antara lain pola makan yang belum memenuhi gizi seimbang, kurangnya aktivitas fisik, dan menurunnya kualitas kesehatan lingkungan, sedangkan tingginya angka gangguan jiwa dipengaruhi oleh kerapuhan kesehatan mental sehingga kurang siap menghadapi perubahan yang sangat cepat di masyarakat.



Sumber : Riskesda 2013

Gambar II.36 Kecenderungan Prevalensi Beberapa Penyakit Tidak Menular Berdasarkan Riskesda Tahun 2013

Beberapa penyakit menular juga membutuhkan perhatian di DIY diantaranya : HIV AIDS, Tuberkolosis (TB), DBD, malaria, dan penyakit yang bersumber dari binatang lainnya (anthrax, flu burung, pes, leptospirosis). Kasus HIV DIY sampai dengan tahun 2015 sebanyak 3.078 kasus dengan 1.239 kasus telah memasuki fase AIDS.



Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2016

**Gambar II.37 Kasus HIV AIDS berdasarkan Kabupaten Kota di DIY Tahun 2015**

Sedangkan untuk DBD, tahun 2015 terjadi peningkatan kasus dari tahun 2014 sebesar 1.995 kasus meningkat di tahun 2015 menjadi 3.420 kasus. Penyakit menular lainnya yang menjadi perhatian di DIY adalah TB dan Malaria. Masih terdapat kabupaten di DIY yang belum mendapatkan status eliminasi malaria yaitu Kabupaten Kulon Progo. Angka penemuan TB di DIY juga masih belum memenuhi target.

#### **II.3.1.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah terkait Pelayanan Dasar yang terdiri dari pelayanan di Sub Urusan Sumber Daya Air, Sub Urusan Jalan, Sub Urusan Keciaptakarya, serta Sub Urusan Jasa Konstruksi.

##### **1. Sub Urusan Sumber Daya Air**

Sistem jaringan irigasi merupakan salah satu infrastruktur pendukung untuk mencapai ketahanan pangan dengan fungsi melayani ketersediaan air pada daerah irigasi. Pengelolaan jaringan irigasi di DIY dilakukan oleh pemerintah DIY, pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak dan pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangan masing-masing. Pembagian kewenangan dalam layanan penyediaan irigasi didasarkan pada luasan daerah irigasi dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi.

Luas daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemda DIY sebesar 13.987 Ha yang terbagi menjadi satuan Daerah Irigasi (DI) sejumlah 41 DI yang merupakan DI permukaan. DI kewenangan Pemda DIY terdiri dari daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota sejumlah 35 DI

dengan luas 4.909 Ha dan daerah irigasi utuh di Kabupaten sejumlah 6 DI dengan luas 9.078 Ha. Rincian pengelolaan daerah irigasi di DIY termuat di dalam tabel berikut.

**Tabel II-53 Daerah Irigasi di DIY**

No	Kewenangan	DI Permukaan	DI AirTanah	DI Pompa	Jumlah DI	Luas(Ha)
1.	BBWSO	3	-	-	3	12.460
2.	DIY	41	-	-	41	13.987
3.	Bantul	100	18	-	118	9.368
4.	Gunungkidul	182	55	-	237	7.722
5.	Sleman	853	-	75	928	25.814
6.	Kulon Progo	90	-	3	93	1.583
7.	Kota	10	-	-	10	49
		1.279	73	78	1.430	70.983

Sumber : Permen PI dan PR Nomor 14/PRT/M/2015

Dalam memenuhi kebutuhan suplai air baku, baik untuk irigasi maupun rumah tangga, komersial, dan industri, perencanaan suplai air baku mempertimbangkan arah pengembangan wilayah dan program prioritas pembangunan. Kebutuhan air untuk Domestik (Rumah tangga) mengalami peningkatan sebesar 72% (dari 5,152 m<sup>3</sup>/dt menjadi 8,88 m<sup>3</sup>/dt) selama kurun waktu dari tahun 2015-2035. Hal ini terjadi karena pertumbuhan populasi penduduk, juga adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang memicu peningkatan standar kuantitas dan kualitas pemakaian air bersih per kapita. Adanya rencana pengembangan kawasan industri di beberapa lokasi di DIY, diprediksikan adanya peningkatan permintaan air untuk kegiatan ini. Demikian juga dengan perkembangan wilayah perkotaan dengan berbagai prasarannya akan menyebabkan peningkatan permintaan air untuk sektor komersial.

Dalam rangka penyediaan air baku, Pemda DIY telah membangun embung-embung sebagai penampung air dan mempertahankan rerata air tanah. Pembangunan embung telah dimulai pada tahun 2005, dan sampai dengan tahun 2016 sudah ada 21 embung yang dibangun.

Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR telah melakukan penyediaan air baku dengan pemanfaatan air Sungai Progo sebagai sumber Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kartamantul. Pada tahap pertama telah dibangun intake yang menyediakan air baku sebesar 400 liter/detik dan dimanfaatkan untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) subsistem Bantar yang melayani Kota Yogyakarta, sebagian Kabupaten Sleman, dan sebagian Kabupaten Bantul. Pengembangan tahap kedua SPAM Regional Kartamantul dilakukan dengan membangun intake dengan kapasitas sebesar 300 liter/detik yang direncanakan akan melayani sub sistem Kebonagung.

Mulai tahun 2016 Pemerintah Pusat telah membangun Bendung Kamijoro dengan skema *Multi Years Contract* dan diharapkan dapat terselesaikan pada tahun 2018 sebagai sumber air baku dengan kapasitas 500 liter/detik. Pemanfaatan air baku tersebut direncanakan utamanya untuk melayani SPAM KAPET KulonProgo.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk perkotaan yang pesat dan diikuti dengan bertambahnya luasan lahan terbangun akan berkonsekuensi berkurangnya luasan lahan terbuka yang seharusnya jadi resapan/tempat parkir air (*Retarding Pond*). Akibat dari

fenomena tersebut terjadi genangan khususnya pada daerah perkotaan. Mengacu pada dokumen Masterplan Penanganan Drainase Kawasan Perkotaan Yogyakarta teridentifikasi sebanyak 51 titik genangan. Penanganan hingga tahun 2015 telah mencapai 30 titik genangan yang dilakukan melalui perencanaan dan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.

## **2. Sub Urusan Keciaptakaryaan**

Pembangunan Keciaptakaryaan ditujukan untuk mewujudkan peningkatan akses penduduk terhadap air minum dan sanitasi yang layak, serta mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh di Indonesia pada tahun 2019. Selain itu dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur juga diharapkan mampu menunjang pencapaian target SDGs seperti pengurangan jumlah rumah tangga tanpa akses terhadap air minum dan sanitasi dasar.

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur permukiman juga telah menjadi amanat NAWACITA Pemerintah 2015-2019 yaitu Nawacita Ke-3 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, dan; Nawacita ke-5 Meningkatkan kualitas hidup manusia. Sedangkan target yang ingin dicapai terkait pembangunan infrastruktur permukiman 2015-2019 yang juga disebut sebagai “Gerakan Nasional 100-0-100” adalah sebagai berikut: (1) Tercapainya akses air minum yang aman menjadi 100%; (2) Tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0%; (3) Meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) menjadi 100%.

Penyediaan air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah. Ketersediaan air minum merupakan salah satu penentu peningkatan kesejahteraan masyarakat, diharapkan dengan ketersediaan air minum dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mendorong peningkatan produktivitas masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana air minum menjadi salah satu kunci dalam pengembangan ekonomi wilayah.

Penyediaan air minum dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan persentase penduduk berakses air minum. Pencapaian indikator persentase penduduk berakses air minum dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk berakses air minum dengan total penduduk DIY.

Sampai dengan tahun 2016, persentase penduduk terlayani air minum perpipaan mencapai 35,79%. Lebih dari separuh penduduk DIY masih menggantungkan akses air minum dari sumber air tanah (non perpipaan). Pemda DIY telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan baik cakupan penduduk berakses air minum maupun meningkatkan persentase penggunaan air minum perpipaan. Melalui SPAM Regional, SPAM IKK dan SPAM Perdesaan dengan penekanan pada keberfungsian (kapasitasproduksi, SR/HU, jumlah jiwa terlayani serta distribusi air mengalir).

Data cakupan pelayanan air minum per kabupaten/kota di DIY disajikan dalam tabel sebagai berikut ini.

**Tabel II-54 Cakupan Pelayanan Air Minum Kabupaten Kota di DIY, Tahun 2016**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (2016)	Terlayani Perpipaan		NonPerpipaan	
		(jiwa)	(jiwa)	(%)	(jiwa)	(%)
1	Yogyakarta	417.945	178.347	42,67	176.309	42,18
2	Sleman	1.180.674	341.426	28,92	820.356	69,48
3	Bantul	984.335	280.345	28,48	561.754	57,07
4	Kulon Progo	416.815	181.658	43,58	219.109	52,57
5	Gunungkidul	723.079	350.449	48,47	292.802	40,49
		<b>3.722.847</b>	<b>1.332.226</b>	<b>35,79</b>	<b>2.070.330</b>	<b>55,61</b>

Sumber: BPS dan Bappeda Kab/Kota, 2016

Seiring dengan pertumbuhan penduduk khususnya di daerah perkotaan maka pengelolaan air limbah domestik menjadi hal yang penting. Penanganan air limbah domestik dimaksudkan agar tidak mencemari sumber air dan lingkungan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesehatan masyarakat terutama dari penyakit yang disebabkan oleh air limbah. Pengelolaan limbah cair domestik di DIY dapat dibagi menurut teknologi pengelolaan yang dilakukan yaitu teknologi *off site system* dan *on site system* berupa individual atau komunal.

Data cakupan pelayanan air limbah domestik DIY disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel II-55 Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik di DIY, Tahun 2016**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk 2016	Sistem Terpusat		Sistem Komunal		Sistem Setempat		Terlayani Sanitasi Layak	
		(jiwa)	(jiwa)	(%)	(jiwa)	(%)	(jiwa)	(%)	(jiwa)	(%)
1	Yogyakarta	417.945	66.349	15,88%	14.785	3,54%	331.608	79,34%	412.743	98,76%
2	Sleman	1.180.674	8.484	0,72%	52.883	4,48%	1.052.513	89,15%	1.113.880	94,34%
3	Bantul	984.335	10.817	1,10%	44.693	4,54%	764.131	77,63%	819.641	83,27%
4	Kulon Progo	416.815	-	0,00%	12.831	3,08%	331.398	79,51%	344.229	82,59%
5	Gunungkidul	723.079	-	0,00%	18.434	2,55%	553.889	76,60%	572.324	79,15%
	<b>DIY</b>	<b>3.722.847</b>	<b>85.651</b>	<b>2,30%</b>	<b>143.626</b>	<b>3,86%</b>	<b>3.033.540</b>	<b>81,48%</b>	<b>3.262.817</b>	<b>87,64%</b>

Sumber: Bappeda DIY, 2016

Pelayanan persampahan DIY terdiri dari pelayanan melalui TPST 3R dan pelayanan pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan menuju TPA. Terdapat 3 TPA di wilayah DIY yaitu TPA Piyungan melayani Kawasan Perkotaan Yogyakarta (Kartamantul : Yogyakarta, Sleman dan Bantul), TPA *Sanitary Landfill* Kulon Progo dan TPA *Sanitary Landfill* Gunungkidul. Cakupan pelayanan persampahan perkotaan DIY dijelaskan melalui tabel berikut ini.

**Tabel II-56 Cakupan Layanan Tempat Pengelolaan Akhir Sampah di DIY, Tahun 2016**

No	Kabupaten/Kota	Terlayani TPA	
		(jiwa)	(%)
1	Yogyakarta	333.257	82,02%
2	Sleman	299.405	25,94%
3	Bantul	72.630	7,60%

No	Kabupaten/Kota	Terlayani TPA	
		(jiwa)	(%)
4	Kulon Progo	68.919	16,94%
5	Gunungkidul	49.763	7,04%
		<b>823.974</b>	<b>22,70%</b>

Sumber: Bappeda, 2016

### 3. Sub Urusan Jalan

Dalam rangka mendukung konektivitas antar wilayah yang berdampak kepada pengembangan pertumbuhan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan memegang peranan penting. Di DIY telah terbangun 247,91 km jalan Nasional yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan menurut Statusnya. Jaringan Jalan Provinsi sepanjang 619,34 Km dan jembatan sejumlah 225 buah sepanjang 4.557 m dengan 74,20% dalam kondisi mantap (kondisi baik dan sedang). Rincian data Kondisi Jalan Provinsi hingga akhir tahun 2016 berdasarkan hasil inspeksi jalan dan jembatan terhadap seluruh ruas jalan dan jembatan disajikan pada tabel berikut.

**Tabel II-57 Kondisi Jalan Provinsi, Tahun 2016**

Kondisi Jalan	Panjang Jalan		Kondisi Jalan	Panjang Jalan	
	Km	%		Km	%
Mantap	459,57	74,20	Baik	243,92	39,38
			Sedang	215,65	34,82
Tidak Mantap	159,78	25,80	Rusak Ringan	151,48	24,46
			Rusak Berat	8,3	1,34
<b>Jumlah</b>	<b>619,34</b>	<b>100</b>		<b>619,34</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS dan Bappeda Kab/Kota, 2016

Pada tahun 2016 dilakukan penyesuaian status jalan Provinsi dan telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur DIY Nomor 118/KEP/2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi. Terjadi perubahan panjang total ruas jalan provinsi menjadi sepanjang 760,45 Km yang disebabkan karena ada ruas-ruas jalan yang beralih status dari jalan Kabupaten menjadi jalan Provinsi dan ada pula ruas jalan provinsi yang menjadi jalan nasional. Berikut disajikan daftar ruas jalan Provinsi tahun 2016.

**Tabel II-58 Daftar Ruas Jalan Provinsi, Tahun 2016**

No	Lokasi Ruas Jalan Provinsi	Panjang Ruas (Km)
1	Kota Yogyakarta	-
2	Kabupaten Bantul	162,150
3	Kabupaten Kulon Progo	175,140
4	Kabupaten Gunungkidul	306,840
5	Kabupaten Sleman	116,320
	Total Panjang Ruas Jalan	760,450

Sumber: Keputusan Gubernur DIY Nomor 118/KEP/2016

Sesuai dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 118/KEP/2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi telah dilakukan penilaian terhadap kondisi jalan/jembatan tersebut dan pada tahun 2017 persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap sebesar 72,91%.

Dalam rangka mendukung aksesibilitas di wilayah DIY maka perlu mengembangkan fungsi jalan dan mempertahankan jalan status provinsi dalam kondisi mantap. Pengembangan jaringan jalan yang dikembangkan antara lain Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), Pengembangan Jalur Selokan Mataram, Jogjakarta Outer Ringroad (JORR), Prambanan – Gading, serta rintisan Bedah Menoreh. Pengembangan fungsi jalan dapat meningkatkan aksesibilitas baik dari aspek kewilayahan maupun aspek sektoral.

#### **4. Sub Urusan Jasa Konstruksi**

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi memiliki ketugasan untuk penyelenggaraan tenaga ahli konstruksi dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi. Pemda DIY telah melakukan pembinaan jasa konstruksi yang terdiri dari pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi dalam rangka melakukan tanggung jawab dalam bidang jasa konstruksi.

Sampai dengan tahun 2015 telah disosialisasikan 6 peraturan dari target sebanyak 7 peraturan. Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi secara akumulatif telah mencapai sebanyak 3.515 orang tenaga kerja konstruksi dari target 4000 orang. Sedangkan terhadap Standar Pelayanan Minimal Bidang Jasa Konstruksi telah tercapai sebanyak 4 layanan dari target 7 layanan yang harus dipenuhi. Pemda DIY telah menyusun sistem informasi jasa konstruksi dan dilakukan update tiap tahun untuk menyediakan informasi yang diperlukan oleh penyedia jasa konstruksi maupun masyarakat secara umum.

#### **5. Sub Urusan Penataan Ruang**

Dalam kerangka pengembangan wilayah dengan memperhatikan potensi konflik keruangan maka kebijakan penataan ruang sangat diperlukan. Pengembangan wilayah sendiri ditujukan untuk menyeraskan dan mensinkronisasikan berbagai kegiatan pembangunan sektor dan wilayah. Permasalahan umum dalam pengembangan wilayah yang masih ditemukan antara lain:

- 1) kesenjangan dalam dan antar wilayah
- 2) keterbatasan akses ke kawasan terpencil atau tertinggal
- 3) sistem pembangunan yang masih sentralistik dan sektoral
- 4) lemahnya keterpaduan program yang berbeda sumber pendanaannya
- 5) belum efektifnya pemanfaatan rencana tata ruang sebagai alat keterpaduan pembangunan wilayah
- 6) pengelolaan pembangunan di daerah belum optimal dalam menunjang upaya pengembangan wilayah
- 7) terakumulasinya modal di kawasan perkotaan.

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang. Penyelenggaraan penataan ruang di Daerah

Istimewa Yogyakarta mengacu pada Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi DIY Tahun 2009 – 2029. Seiring dengan dinamika yang terjadi di DIY, diantaranya :

- 1) Terjadi Perubahan/penyempurnaan peraturan atau rujukan sistem penataan ruang yang berlaku mengikat bagi Pemerintah Daerah DIY dan belum pernah digunakan dalam penyusunan rencana tata ruang sebelumnya. Salah satunya yaitu amanat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, dimana salah satu keistimewaan DIY yang ditetapkan adalah urusan Tata Ruang sebagai dasar dalam pengaturan pengelolaan pemanfaatan ruang pada kawasan Kasultanan dan Kadipaten.
- 2) Terjadi perubahan kebijakan pemerintah/sektor untuk pembangunanskala besar atau kegiatan penting sehingga tidak dapat ditampung oleh pola dan struktur ruang RTRW Provinsi DIY Tahun 2009 – 2029 yang ada. Perubahan tersebut akan mengganggu rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang sehingga mungkin dapat menurunkan efisiensi pembangunan dan atau kerusakan lingkungan. Beberapa kebijakan tersebut antara lain penentuan kawasan cagar alam geologi oleh Kementerian ESDM, pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JLS), dan rencana pembangunan bandara baru NYIA di Kulon Progo.
- 3) Terjadi bencana alam yang cukup besar sehingga mengubah struktur dan pola pemanfaatan ruang yang ada, dan memerlukan relokasi kegiatan budaya maupun lindung yang ada untuk kepentingan pembangunan pasca bencana tersebut. Salah satu bencana alam yang berpengaruh terhadap struktur dan pola ruang yaitu erupsi gunung merapi pada tahun 2010 yang berakibat pada penetapan kawasan rawan bencana.

Maka dirasa perlu untuk melakukan peninjauan kembali (PK) terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DIY Tahun 2009 – 2029.

Fokus Program Perencanaan Tata Ruang setelah Peninjauan Kembali RTRW Provinsi DIY Tahun 2009 – 2029 yaitu pada perubahan struktur ruang, perubahan pola ruang dan simpul kegiatan utama. Program Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk mendorong implementasi pengembangan kawasan, seperti rencana pembangunan fasilitas pada kawasan strategis provinsi maupun pada kawasan-kawasan yang sesuai dengan kebijakan keistimewaan akan dilakukan revitalisasi dalam rangka memperkuat karakter wilayah (kawasan cagar budaya dan kawasan pendukungnya). Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang mendorong/koordinasi hingga tingkat kabupaten/kota untuk melegalkan perangkat pengendalian seperti Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) dan mekanisme perizinan pemanfaatan ruang daerah, insentif dan disinsentif serta inovasi implementasi pengendalian pemanfaatan ruang.

Sampai dengan akhir TA 2017, peninjauan kembali terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DIY Tahun 2009 – 2029 masih dalam proses.

#### **II.3.1.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Kebijakan pembangunan nasional sektor perumahan yang diamanatkan melalui Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat menyatakan bahwa Pemerintah memberikan

pelayanan dalam bidang perumahan rakyat agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

Dalam upaya mewujudkan target tersebut di atas, pemerintah dan pemerintah daerah melakukan intervensi berupa :

1. Penyediaan perumahan dengan prioritas untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pengembangan sistem pembiayaan perumahan bagi MBR;
2. Pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH);
3. Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) permukiman;
4. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh.

Berdasarkan basis data perumahan dan kawasan permukiman DIY tahun 2017, di DIY terdapat 1.028.037 unit rumah tapak, 77 rumah susun, dan 13 apartemen. Berdasarkan analisis terhadap status kepemilikan tempat tinggal maka terdapat backlog kepemilikan sebanyak 252.753 unit. Angka ini merupakan gabungan jumlah dari rumah dengan status kontrak, bebas sewa, bertempat tinggal pada rumah dinas, dan lainnya. Sedangkan backlog penghunian sebesar 88.568 unit yang didapatkan dari jumlah status bebas sewa.

Sampai dengan tahun 2016 sudah dilakukan verifikasi Rumah Tidak Layak Huni dengan hasil sebagaimana berikut:

**Tabel II-59 Data Rumah Tidak Layak Huni di DIY, Tahun 2016**

Kabupaten / Kota	No	Kecamatan	Jumlah KK/RT	Jumlah RTLH		Sumber Data
				Versi BDT (unit)	Verifikasi Pemda (unit)	
Kabupaten Gunungkidul	1	Wonosari	24.635	129	2.002	1. Pendataan BKKBN Tahun 2015; 2. TNP2K; 3. SK Bupati Gunungkidul No. 133/KPTS/2016 tentang Lokasi RTLH Tahun 2016
	2	Nglipar	8.389	162	1.708	
	3	Playen	16.359	503	3.062	
	4	Patuk	10.062	107	896	
	5	Paliyan	9.383	236	1.410	
	6	Panggang	8.574	57	530	
	7	Tepus	12.028	431	1.170	
	8	Semanu	17.623	91	1.005	
	9	Karangmojo	16.816	113	1.956	
	10	Ponjong	17.411	126	1.871	
	11	Rongkop	9.763	82	1.359	
	12	Semin	16.027	190	1.709	
	13	Ngawen	10.794	300	1.614	
	14	Gedangsari	12.211	529	2.219	
	15	Saptosari	12.147	328	1.108	
	16	Girisubo	7.921	105	1.264	
	17	Tanjungsari	8.806	221	602	
	18	Purwosari	6.067	29	355	
		<b>Jumlah</b>	<b>225.016</b>	<b>3.739</b>	<b>25.840</b>	
Kabupaten Sleman	1	Gamping	19.340	109	340	1. Pendataan BKKBN Tahun 2015; 2. TNP2K; 3. Hasil verifikasi Pemda Sleman 2016
	2	Godean	16.617	113	778	
	3	Moyudan	9.630	122	617	
	4	Minggir	9.533	94	1.570	
	5	Seyegan	14.292	237	1.004	
	6	Mlati	22.879	140	1.088	
	7	Depok	25.810	42	684	
	8	Berbah	10.818	51	514	
	9	Prambanan	14.392	169	528	
	10	Kalasan	13.198	64	1.015	
	11	Ngemplak	12.221	55	218	
	12	Ngaglik	18.253	55	1.783	
	13	Sleman	16.077	279	1.821	
	14	Tempel	15.778	229	2.449	
	15	Turi	10.621	140	996	
	16	Pakem	10.983	38	669	
	17	Cangkringan	9.678	89	273	
		<b>Jumlah</b>	<b>250.120</b>	<b>2.026</b>	<b>16.347</b>	
Kabupaten Kulon Progo	1	Temon	8.370	44	468	1. Pendataan BKKBN Tahun 2015;
	2	Wates	13.408	36	656	

Kabupaten / Kota	No	Kecamatan	Jumlah KK/RT	JumlahRTLH		Sumber Data
				Versi BDT (unit)	Verifikasi Pemda (unit)	
	3	Panjatan	10.192	135	879	2. TNP2K; 3. Hasil pendataan Bappeda Kabupaten Kulon Progo 2016
	4	Galur	9.378	103	501	
	5	Lendah	12.121	191	1.162	
	6	Sentolo	14.193	442	1.923	
	7	Pengasih	14.814	185	1.741	
	8	Kokap	10.418	309	2.748	
	9	Girimulyo	7.530	229	1.468	
	10	Nanggulan	9.051	115	848	
	11	Samigaluh	8.392	157	1.513	
	12	Kalibawang	9.098	112	984	
		<b>Jumlah</b>	<b>126.965</b>	<b>2.058</b>	<b>14.891</b>	
Kabupaten Bantul	1	Srandakan	9.310	46	222	1. Pendataan BKKBN Tahun 2015; 2. TNP2K; 3. Hasil Rekapitulasi laporan kegiatan DED RTLH paket I dan II tahun 2016
	2	Sanden	10.315	113	233	
	3	Kretek	9.697	26	81	
	4	Pundong	11.007	65	146	
	5	Bambanglipuro	12.842	73	122	
	6	Pandak	15.859	144	230	
	7	Pajangan	9.918	369	578	
	8	Bantul	18.284	84	83	
	9	Jetis	16.964	81	277	
	10	Imogiri	19.376	305	1.484	
	11	Dlingo	12.200	117	717	
	12	Banguntapan	31.470	142	213	
	13	Pleret	14.366	156	254	
	14	Piyungan	15.838	218	354	
	15	Sewon	28.818	134	151	
	16	Kasihan	28.580	202	261	
	17	Sedayu	14.807	88	297	
		<b>Jumlah</b>	<b>279.651</b>	<b>2.363</b>	<b>5.703</b>	
Kota Yogyakarta	1	Tegalrejo	7.624	42	438	1. Pendataan BKKBN Tahun 2015; 2. TNP2K; 3. Hasil verifikasi Pemda Kota Yogyakarta 2016
	2	Jetis	5.775	32	184	
	3	Gondokusuman	8.290	34	97	
	4	Danurejan	4.683	15	302	
	5	Gedongtengen	4.107	109	34	
	6	Ngampilan	3.929	38	62	
	7	Wirobrajan	6.039	34	128	
	8	Manrijeron	8.285	33	167	
	9	Kraton	4.839	11	199	
	10	Gondomanan	3.040	17	18	
	11	Pakualaman	2.233	21	136	
	12	Mergangsan	7.049	31	580	
	13	Umbulharjo	13.762	54	237	
	14	Kotagede	8.335	71	215	
		<b>Jumlah</b>	<b>87.990</b>	<b>542</b>	<b>2.797</b>	
		<b>Total DIY</b>	<b>969.742</b>	<b>10.728</b>	<b>65.578</b>	

Sumber: Dinas PUP ESDM DIY, 2017

Penanganan kumuh sesuai dengan “Gerakan Nasional 100-0-100” yaitu tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0%, dilakukan melalui identifikasi dan penetapan SK Bupati/Walikota. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, penanganan kawasan kumuh dibagi menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintah

Daerah berdasarkan luasan kawasan kumuh. Pembagian kewenangan penanganan kawasan kumuh di DIY adalah sebagai berikut:

**Tabel II-60 Penanganan Kawasan Kumuh Berdasarkan Kewenangan**

No.	Kewenangan	Luasan (Ha)	Keterangan
1	Kewenangan Pusat	730,67	Luasan > 15 ha
2	Kewenangan Provinsi	96,89	Luasan 10 – 15 ha
3	Kewenangan Kab/Kota	165,90	Luasan < 10 ha
	Total	993,46	

Sumber: Dinas PUP ESDM, 2016

#### **II.3.1.1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

Kondisi ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan yang kondusif merupakan modal penting yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan. Ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan yang kondusif akan memberikan kenyamanan dan kepastian dalam berinvestasi dan berusaha. Adanya kesadaran masyarakat untuk menjaga kamtibmas di lingkungan wilayahnya dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat memberikan dorongan untuk memprioritaskan kepentingan bersama, sehingga kestabilan keamanan di masyarakat dapat diwujudkan.

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat menggunakan indikator negatif, misalnya angka kriminalitas (crime total). Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang mengindikasikan bahwa masyarakat merasa semakin tidak tentram dan tidak aman. Sejalan dengan itu upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa tentram dan aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan di DIY. Terciptanya dan terpenuhinya rasa tentram dan aman pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas termasuk aktifitas ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas DIY yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan DIY dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera dan bermartabat. Mewujudkan ketentraman, ketertiban, dan keamanan adalah tanggung jawab semua lapisan masyarakat yang didukung dengan sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah yang disertai dengan kesadaran masyarakat untuk ikut menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Dengan terbitnya Perda No. 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Penanganan Gangguan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan dalam rangka memelihara dan menciptakan kondisi tertib yang meliputi: Tertib Jalan, Tertib Sungai, Tertib Kawasan Pantai, Tertib Kelautan, Tertib Lingkungan, Tertib Sumber Daya Mineral, Tertib Kehutanan, Tertib Perizinan, Tertib Pendidikan, dan Tertib Tata Ruang. Pemda DIY mempunyai harapan besar supaya upaya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lebih ditingkatkan dan diintensifkan lagi. Beberapa langkah dan kebijakan diambil oleh Satpol PP DIY sebagai instansi yang mengampu tugas penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan

perlindungan masyarakat. Dalam rangka deteksi dini dan cegah dini Satpol PP DIY akan mengintensifkan dan meningkatkan kegiatan operasi penegakan perda dan patroli Tibum yang dilakukan baik pada siang hari maupun malam hari untuk menjamin terlaksananya sepuluh tertib tersebut. Terkait dengan adanya Perdais, Pemda DIY melalui Satpol PP DIY akan berupaya untuk lebih menggalakkan pelaksanaan penegakan Perdais yang selama ini belum banyak dilakukan.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dibentuklah Kader Penegak Perda dan Perkada yang salah satu tugasnya adalah membantu pemerintah dalam menciptakan budaya sadar Perda dan Perkada di masyarakat. Selanjutnya masih dalam semangat untuk merangsang keterlibatan masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, Pemda DIY akan melakukan penguatan dan revitalisasi fungsi Satlinmas.

Beberapa upaya untuk meningkatkan ketentraman, keteritban, dan keamanan di DIY, dilakukan upaya-upaya strategis melalui Koordinasi Kemitraan yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), serta Bina Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Selain itu, Pemda DIY juga melakukan program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat meliputi kegiatan pengawasan dan koordinasi keberadaan orang asing, organisasi masyarakat asing, asing; pendataan dan identifikasi, verifikasi dan inventarisasi orsospol dan ormas di DIY, koordinasi penyelenggaraan P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika), penyelenggaraan Cipta Kondusif Daerah, pengembangan budaya sadar hukum di masyarakat, serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Upaya di atas sangat penting mengingat sistem dan institusi sosial yang lahir dan diselenggarakan oleh masyarakat merupakan basis utama dalam menjaga ketahanan masyarakat sehingga mampu menghadirkan ketentraman, ketertiban, dan pada akhirnya melahirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu pranata-pranata sosial yang telah ada maupun yang nantinya akan dibentuk dalam masyarakat agar dapat berjalan harmonis dan bersinergi antara yang satu dengan lainnya menjadi penting untuk diatur melalui Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2015 tentang Jaga Warga.

Upaya menciptakan keamanan dan kenyamanan telah dilakukan oleh berbagai pihak namun masih diperlukan keterpaduan, sinergitas serta peran serta aktif dari masyarakat yang lebih tahu dan memahami kondisi situasi disekelilingnya dengan menggunakan kearifan lokal, dengan kembali memunculkan budaya adiluhung yang sudah ada dan memang ada, dan sekarang sudah mulai luntur apalagi dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat ternyata dampaknya sangat besar, baik itu dampak negatif ataupun positif.

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 5 Ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa tujuan keistimewaan DIY adalah untuk “mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat” serta mewujudkan visi dan misi Arah Renaisans Keterlindungan Warga DIY, maka dilakukan berbagai upaya antisipatif guna menanggulangi dan menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang berpotensi menciptakan tindak kriminal, pelanggaran norma sosial dan permasalahan terkait kondisi kesejahteraan di masyarakat. Selain itu juga dilakukan upaya untuk menghilangkan rasa ketakutan guna menciptakan rasa aman dan tenteram pada diri

setiap anggota masyarakat secara keseluruhan, baik tergabung dalam kelompok mayoritas atau minoritas kesukuan, agama, afiliasi politik dan status kelas ekonominya.

Gambaran kondisi ketentraman, ketertiban, dan keamanan di DIY direfleksikan dari data tentang sarana keamanan, angka kriminalitas, serta upaya dan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman, ketertiban, dan keamanan lingkungan.

**Tabel II-61 Jumlah Linmas dan Rasio Linmas per Desa/kelurahan di DIY Tahun 2014**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Linmas	Rasio Linmas
1	Kulon Progo	5.856	1:67
2	Bantul	6.429	1:86
3	Gunungkidul	4.411	1:31
4	Sleman	6.579	1:77
5	Yogyakarta	2.889	1:64
	<b>DIY</b>	<b>26.164</b>	<b>1:60</b>

sumber: BPS DIY, 2016

Beberapa upaya dilakukan warga untuk menjaga keamanan, diantaranya dengan membangun poskamling, membentuk regu keamanan lingkungan, memeriksa setiap warga dari luar desa, dan menambah jumlah anggota linmas. Menurut hasil Podes 2014, desa/kelurahan yang menjaga keamanan warga dengan cara membangun poskamling 83,33%, membentuk regu keamanan lingkungan 70,78%, pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan 75,11%, menambah jumlah anggota hansip/linmas 44,52%, dan menggunakan cara-cara lainnya sebanyak 85,62%.

Upaya dalam mewujudkan keamanan, ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat tersebut perlu juga mendorong partisipasi seluruh komponen masyarakat untuk terlibat aktif menjaga ketertiban dan ketenteraman serta berbasiskan kearifan lokal masyarakat DIY. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Gubernur DIY telah membuat suatu aturan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2015 tentang Jaga Warga.

Jaga Warga merupakan suatu upaya menjaga keamanan, ketenteraman, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat serta menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat. Jaga Warga berupaya mengoptimalkan pranata sosial yang sudah ada di masyarakat, yaitu lembaga sosial-kemasyarakatan berbasis nilai-nilai luhur masyarakat, seperti kelompok Siskamling, kelompok pengajian, kelompok pemuda, kelompok pedagang/pengusaha, kelompok pengelola pariwisata, kelompok petani/nelayan, kelompok peduli bencana dan lain sebagainya.

Jaga Warga berperan sebagai mitra pemerintah dalam rangka mewujudkan keterlindungan warga masyarakat, yang bekerjasama dengan Kepala Dusun/Lingkungan/Rukun Warga (RW), Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Perangkat Desa/Kelurahan dan Kepolisian Sektor. Jaga Warga berupaya melibatkan secara aktif seluruh komponen warga masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah atau potensi sosial yang ada dan berupaya secara mandiri mencari solusi penyelesaiannya.

Keberadaan Jaga Warga juga mendukung peran TNI/Polri dalam upaya pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses

pembangunan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman. Keberadaan Jaga Warga juga diharapkan mampu menjadi mata dan telinga serta menjadi sumber informasi dalam rangka deteksi dini dan cegah dini akan berbagai potensi konflik, pelanggaran norma sosial dan tindak kriminal di masyarakat.

Di satu sisi, baik Polri maupun TNI pada dasarnya telah memiliki konsep tertentu dalam upaya menjaga stabilitas sosial dan keterlindungan warga seperti kebijakan dan strategi Polmas (Pemolisian Masyarakat) di dalam penyelenggaraan tugas Polri serta keberadaan Bintara Pembina Masyarakat (Babinsa) yang dibentuk oleh TNI dimana keduanya merupakan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat. Diharapkan TNI/Polri bisa bekerjasama, membangun sinergi serta menjalin kemitraan dengan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan fungsi keterlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan Jaga Warga tersebut.

Seratus Tiga Belas (113) Jaga Warga telah terbentuk di Kabupaten/ Kota dari 25 yang ditargetkan sampai tahun 2016, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel II-62 Jumlah Jaga Warga menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2015-2016**

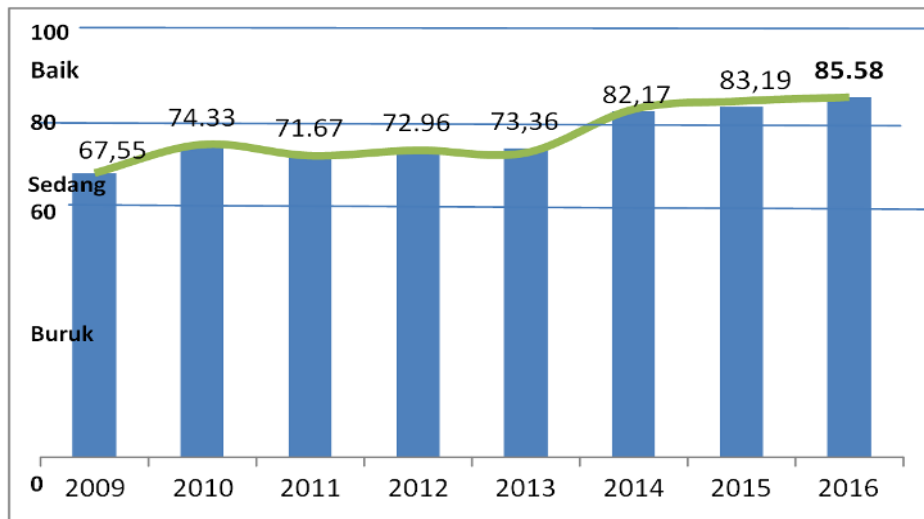
Kabupaten/ Kota	Jumlah Jaga Warga		Total
	Tahun 2015	Tahun 2016	
Yogyakarta	6	8	14
Sleman	5	17	22
Kulon Progo	6	33	39
Bantul	3	2	5
Gunungkidul	3	30	33
	<b>23</b>	<b>90</b>	<b>113</b>

Sumber: Kesbanglinmas, 2016

Melalui Jaga Warga permasalahan-permasalahan yang diperkirakan muncul di lingkungan dapat diketahui sejak dini dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan, musyawarah mufakat sebagaimana tercantum di dalam Pancasila serta meminimalisir penyelesaian melalui jalur hukum (kecuali memang diperlukan).

Kondisi ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat juga akan mempengaruhi kehidupan dan penghayatan demokrasi di DIY. Tingkat kualitas penghayatan demokrasi di DIY diukur dengan IDI (Indeks Demokrasi Indonesia). IDI adalah indikator komposit yang dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi. Tingkat perkembangannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak- Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga- Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

IDI DIY tahun 2016 mencapai angka 85,58 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI DIY tahun 2015 yang sebesar 83,19. Capaian kinerja demokrasi DIY tetap berada pada kategori “baik”. Capaian IDI DIY dari tahun 2009 hingga 2016 mengalami fluktuasi. Pada awal mula dihitung tahun 2009, capaian IDI hanya sebesar 67,55. Kemudian naik pada 2010 menjadi sebesar 74,33 selanjutnya berfluktuasi dan pada tahun 2014 naik cukup signifikan menjadi sebesar 82,17 lalu terus meningkat hingga 2016 mencapai sebesar 85,58.



sumber: BPS DIY, 2017

**Gambar II.38 Grafik Perkembangan IDI DIY, 2009-2016**

#### II.3.1.1.6 Urusan Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut Undang-undang No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial mengamankan pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial yang dilakukan bersama oleh pemerintah dan masyarakat.

Pembangunan kesejahteraan sosial ditempuh dengan cara mengembangkan kemampuan dan profesionalitas lembaga-lembaga kesejahteraan sosial dan tenaga kesejahteraan sosial yang dikenal dengan istilah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial. Selain itu, perlu menggali dan mendayagunakan potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial untuk mendukung penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan advokasi dan sinergi.

#### 1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

**Tabel II-63 Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di DIY**

No	Jenis PMKS	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Anak Balita Terlantar	2.569	2.443	2.273	1.978	1.826
2	Anak Terlantar	28.165	26.149	23.396	20.089	14.450
3	Anak Berhadapan dengan Hukum	302	119	321	98	184
4	Anak Jalanan	497	212	220	219	327
5	Anak dengan Kedisabilitas	3.910	3.858	4.116	3.708	3.095
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	919	796	653	411	18
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan khusus	275	73	68	41	18
8	Lanjut Usia Terlantar	37.199	36.728	38.448	33.752	46.242

No	Jenis PMKS	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
9	Penyandang Disabilitas	29.543	28.196	26.947	25.050	26.177
10	Tuna Susila	166	158	144	47	385
11	Gelandangan	161	129	112	82	171
12	Pengemis	199	221	199	170	150
13	Pemulung	116	126	171	256	450
14	Kelompok Minoritas	733	216	1.541	1.541	1.541
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	3.658	4.168	4.495	4.744	209
16	Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA)	1.408	1.797	2.045	3.491	2.834
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	1.627	1.471	1.323	1.451	468
18	Korban Trafficking	9	5	2	2	1
19	Korban Tindak Kekerasan	4.325	4.070	3.514	3.153	735
20	Pekerja Migran Bermasalah	760	292	598	939	329
21	Korban Bencana Alam	3.749	1.655	1.658	71 Keluarga	1.050 keluarga
22	Korban Bencana Sosial	16	158	157	376 Keluarga	115 Keluarga
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	12.337	12.086	13.166	12.689	12.840
24	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	3.356	4.401	3.318	3.212	4.932
25	Keluarga Fakir Miskin	288.391(PPL S2011)	288.391(PP LS2011)	288.391(PP LS2011)	367.540(PBD T2015)	367.540(PBD T2015)

Sumber: Dinas Sosial DIY, Tahun 2017 dan PBDT 2015

Data PMKS di DIY dari tahun ke tahun secara jumlah terbesar adalah Anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, perempuan rawan sosial ekonomi dan fakir miskin. Pemberian jaminan sosial rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial perlu diprioritaskan untuk kelompok tersebut tanpa mengesampingkan intervensi untuk PMKS lainnya.

## 2. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

**Tabel II-64 Jenis dan Jumlah PSKS di DIY 2012-2016**

No	Jenis PSKS	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pekerja Sosial Profesional/Pekerja sosial fungsional	41	37	37	35	35
2	Tenaga kesejahteraan Sosial Masyarakat / PSM	4.494	4.572	4.534	4.534	4.767
3	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	504	505	505	837	1.034
4	LKS /Orsos	351	354	395	403	370
5	Karang Taruna Desa/Kel	438	438	438	438	438
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	12	15	15	14	12
7	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat	71	87	124	138	163

No	Jenis PSKS	2012	2013	2014	2015	2016
8	Penyuluh Sosial	7	7	5	5	5
9	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK),	78	78	78	78	78
10	Dunia usaha Yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)	54	45	26	42	42

Sumber: Dinas Sosial DIY, 2017

Keberadaan PSKS penting sebagai mitra pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kesejahteraan sosial terhadap PMKS. Pembinaan terhadap PSKS penting terutama untuk mengantisipasi kejadian kebencanaan dan kerawanan sosial.

### 3. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Dalam hal penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap PMKS melalui panti, Pemda DIY mempunyai UPT yang berada di bawah Dinas Sosial DIY yang bertugas melaksanakan pelayanan perlindungan, rehabilitasi sosial/ rehabilitasi medis yang terdiri dari: (a) Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD); (b) Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW); (c) Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL); (d) Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR); government Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak (BRSPA); (f) Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW).

**Tabel II-65 Nama Balai/ Panti Sosial dan Daya Tampungnya, Tahun 2012-2016**

No	Nama Balai /Panti	DayaTampung				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	BRPTD	185	185	185	185	185
2	BRSBKL					
	a. Gepeng	50	50	50	50	50
	b. Ekspsikotik	50	50	50	100	100
4	BPRSW	50	50	50	50	60
5	BPSTW	214	214	214	214	214
6	BRSPA	140	140	140	140	120
7	BPRSR	75	75	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial DIY 2016, diolah

#### II.3.1.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar

##### II.3.1.2.1 Urusan Ketenagakerjaan

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan nasional memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan SDM yang berkualitas, khususnya pada aspek *human capital* dalam pembangunan baik daerah maupun nasional. Pembangunan ketenagakerjaan juga menjadi salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Keberhasilan pembangunan di bidang ketenagakerjaan ini akan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan perekonomian suatu daerah karena tenaga kerja menjadi salah satu faktor produksi yang memiliki peran sentral dalam menggerakkan aktivitas perekonomian.

#### 1. Penduduk Usia Kerja (PUK)

Konsep ketenagakerjaan menurut ILO (*International Labor Organization*) membagi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) berdasarkan aktivitas utamanya menjadi dua kelompok yaitu kelompok angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Dilihat dari komponennya, angkatan kerja dapat dibagi menjadi 2, yaitu angkatan kerja yang bekerja dan angkatan kerja yang tidak bekerja (penganggur terbuka).

Pertumbuhan angkatan kerja memiliki arah yang sama dengan pertumbuhan penduduk, tetapi pertumbuhan penciptaan kesempatan kerja baru lebih lambat. Hal ini menyebabkan tidak semua angkatan kerja mampu terserap oleh pasar tenaga kerja karena ketidakseimbangan antara *supply* dan *demand* tenaga kerja sehingga terjadilah pengangguran.

Jumlah penduduk usia kerja (PUK) atau penduduk berumur 15 tahun ke atas di DIY selama periode 2013–2017, cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Sakernas, PUK DIY pada tahun 2013 adalah sebesar 2,813 juta orang dan pada akhir tahun (Agustus 2017) diperkirakan mencapai 2,960 juta orang.

Data Sakernas pada tahun 2013-2017 menunjukkan bahwa penduduk usia kerja yang tergolong angkatan kerja mempunyai proporsi mencapai lebih dari 70% setiap tahunnya dimana dari jumlah angkatan kerja ini lebih dari 90% merupakan angkatan kerja yang bekerja sehingga menghasilkan penganggur terbuka yang jumlahnya relatif kecil. Sedangkan kelompok penduduk bukan usia kerja memberikan proporsi berkisar 30% dari penduduk usia kerja. Hal ini mengindikasikan cukup banyak penduduk usia kerja yang memilih untuk tidak bekerja. Kelompok ini didominasi oleh kelompok yang memilih untuk mengalokasikan sebagian besar waktunya demi mengurus rumah tangganya (umumnya ibu rumah tangga) dan bersekolah. Sebagian besar anggota kelompok bukan angkatan kerja ini memang cenderung tidak menghasilkan pendapatan nominal dan mungkin dianggap sebagai kelompok yang tidak produktif. Meskipun demikian, mereka melakukan aktivitas investasi pendidikan bagi keluarganya (dengan menjadi ibu rumah tangga) dan bagi dirinya sendiri (dengan menjadi siswa sekolah formal pada jenjang SD hingga Universitas).

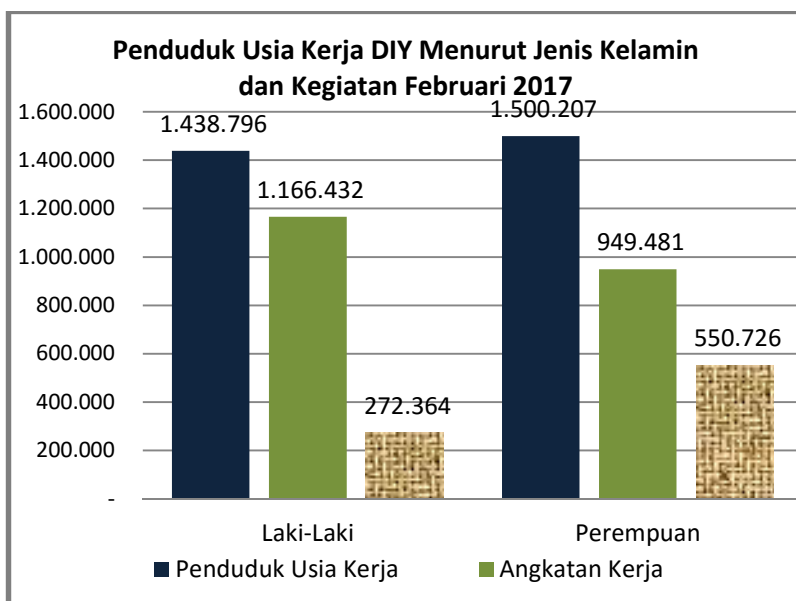
**Tabel II-66      Perkembangan Penduduk Usia Kerja di DIY (dalam ribu orang), Tahun 2013-2017**

Jenis Kegiatan	2013 Agustus	2014 Agustus	2015 Agustus	2016 Agustus	2017 Agustus
<b>Angkatan Kerja</b>	<b>1.949,243</b>	<b>2.023,461</b>	<b>2.882,98</b>	<b>2.099,44</b>	<b>2.117,19</b>
- Bekerja	1.886,071	1.956,043	1.891,22	2.042,40	2.005,19
- Penganggur	63,172	67,418	80,25	57,04	64,02
<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	<b>863,845</b>	<b>824,293</b>	<b>911,517</b>	<b>807,436</b>	<b>843,017</b>
- Sekolah	201,760	270,545	297,972	264,858	266,870
- Rumah Tangga	479,109	439,522	475,397	400,382	472,108
- Lainnya	182,976	114,226	138.148	142,196	104,039
<b>Penduduk Usia Kerja</b>	<b>2.813,088</b>	<b>2.847,754</b>	<b>2.882,980</b>	<b>2.904,301</b>	<b>2.960,204</b>
<b>TPAK (Persen)</b>	<b>69,29</b>	<b>71,05</b>	<b>68,38</b>	<b>71,96</b>	<b>71,52</b>
<b>TPT (Persen)</b>	<b>3,24</b>	<b>3,33</b>	<b>4,07</b>	<b>2,72</b>	<b>3,02</b>

Sumber: BPS, Statistik DIY 2017

Pengamatan terhadap sejumlah data Penduduk Usia Kerja di DIY menurut jenis kelamin untuk 5 tahun terakhir pengamatan dapat dilihat berdasarkan pada data hasil Survey Angkatan Kerja (Sakernas) Februari 2017.

Jumlah penduduk usia kerja (PUK) atau penduduk 15 tahun keatas di DIY pada Agustus 2017 diperkirakan mencapai 2,939 juta orang. Ditinjau dari aspek gender, jumlah penduduk usia kerja laki-laki tercatat sebanyak 1,438 juta (48,96%) lebih rendah dari PUK perempuan yaitu 1,500 juta atau 51,04% dari keseluruhan penduduk usia kerja. Berdasarkan wilayah domisilinya, sebagian besar PUK tinggal di daerah perkotaan. PUK di daerah perkotaan berjumlah sekitar 2.104,721 ribu orang atau sekitar 71,61%, sedangkan sisanya sebesar 834,282 ribu orang atau 28,39% tinggal di daerah perdesaan.



Sumber: BPS, Statistik Ketenagakerjaan DIY 2015-2016, Februari 2016 diolah

**Gambar II.39 Penduduk Usia Kerja DIY Menurut Jenis Kelamin dan Kegiatan, Bulan Februari 2017**

Kondisi ketenagakerjaan DIY masih menunjukkan daya saing yang relatif rendah. Rendahnya daya saing tenaga kerja DIY ini terlihat dari rendahnya tingkat pendidikan penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja menurut tingkat pendidikan pada tahun 2011-2014 di DIY sebagian besar masih didominasi oleh penduduk yang berpendidikan maksimum sekolah dasar. Pada tahun 2011 PUK berpendidikan maksimum sekolah dasar jumlahnya mencapai jumlah ini berhasil ditekan menjadi 955.525 orang, proporsinya menjadi sebesar 34,37%. Tahun 2013 dan 2014 menunjukkan penurunan yang cukup berarti menjadi 925.972 orang (32,92%) dan 908.976 orang (31,92%). Penurunan proporsi PUK yang berpendidikan maksimum SD ini mendorong peningkatan proporsi PUK yang berpendidikan di atasnya (SMTP s.d Universitas). Dengan masih besarnya proporsi PUK yang berpendidikan maksimum SD ini menunjukkan tingkat kualitas penduduk usia kerja di DIY masih relatif rendah.

**Tabel II-67 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2011-2014**

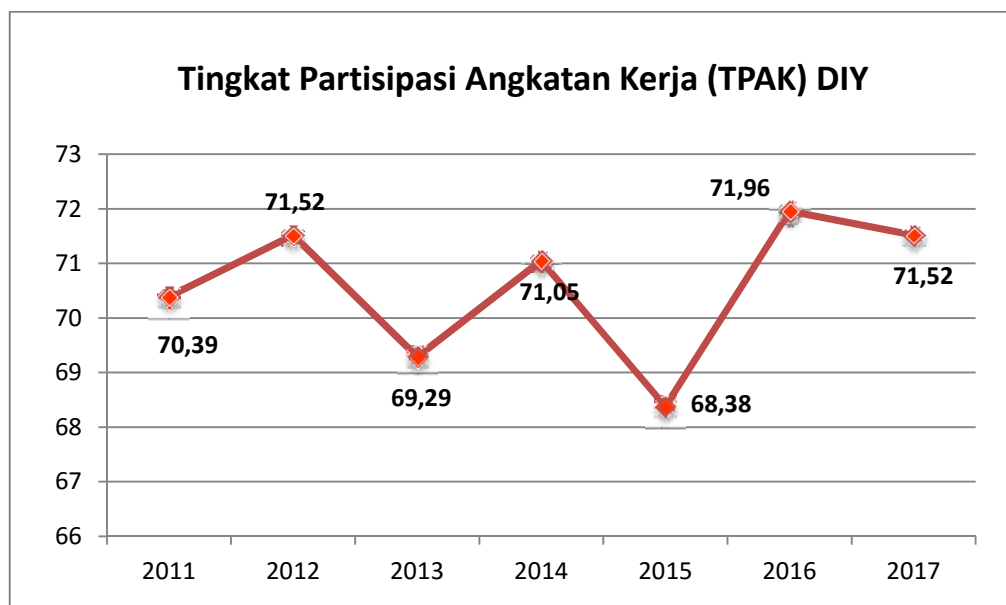
Tingkat Pendidikan	2011	2012	2013	2014
1. Maksimum SD	973.041	955.525	925.972	908.976
2. SMTP	563.558	589.905	608.439	598.082
3. SMTA Umum	486.108	491.780	492.343	509.957
4. SMTA Kejuruan	424.001	429.446	453.681	455.525
5. Diploma	98.470	102.986	102.057	110.780
6. Universitas	202.288	210.817	230.596	264.434
Jumlah	2.747.466	2.780.459	2.813.088	2.847.754

Sumber : BPS, Sakernas Tahun 2011-2014 (Agustus)

## 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

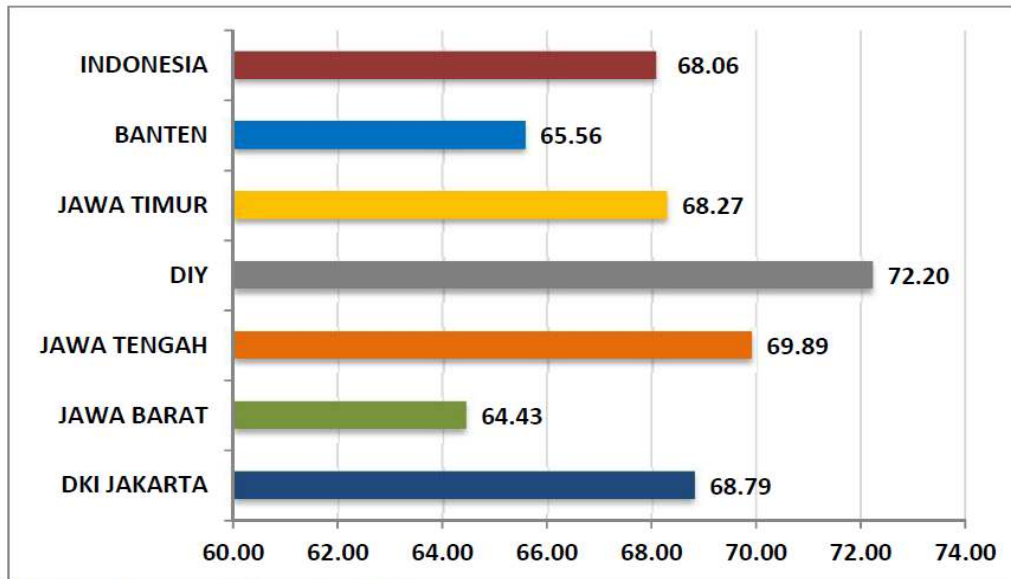
TPAK merupakan persentase antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK berguna untuk melihat potensi penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari persediaan tenaga kerja (*labor supply*) untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang berpotensi memproduksi barang dan jasa.

TPAK DIY pada periode 2011 hingga 2017 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2011, TPAK DIY adalah sebesar 70,39%, kemudian terus mengalami kenaikan hingga tahun 2012 mencapai angka 71,52% dan kemudian mengalami fluktuasi hingga pada tahun 2017 (Agustus) mencapai angka sebesar 71,52%. Angka TPAK sebesar 71,52% mengandung arti bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) 72 orang adalah angkatan kerja. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan angka sebelumnya (tahun 2016) yaitu 71,52%.



Sumber: BPS, Sakernas Tahun Februari 2012 – Februari 2017 dan Berita Resmi Statistik November 2017

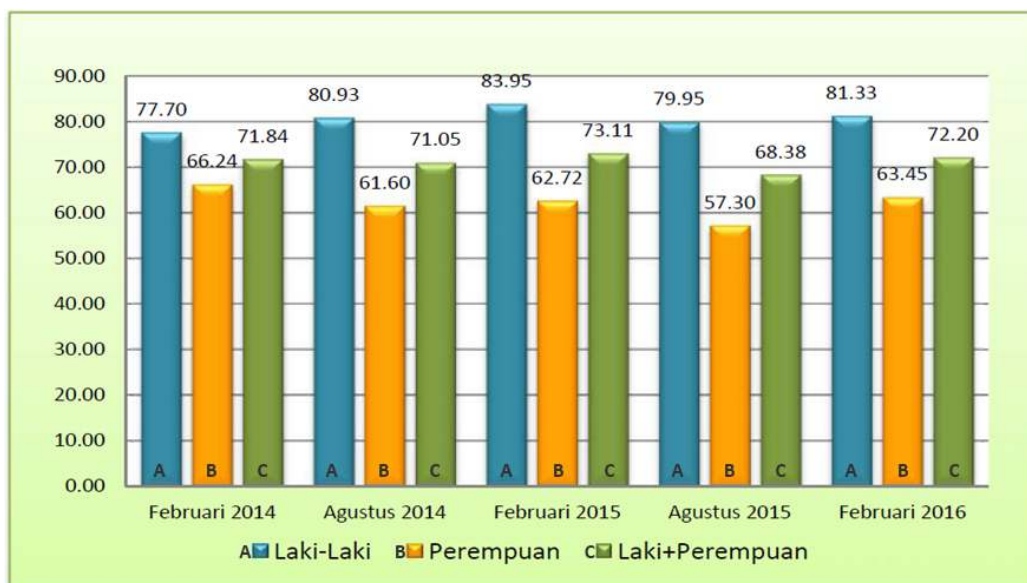
**Gambar II.40 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di DIY Tahun 2010-2017**



Sumber: Sakernas, BPS.go.id, diolah

**Gambar II.41 Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Pulau Jawa, Tahun 2016**

Jika dibandingkan dengan 5 provinsi lain di pulau Jawa dan Nasional, TPAK DIY pada Februari 2016 berada pada posisi tertinggi dengan nilai sebesar 72,20. Sementara bila TPAK dibedakan menurut jenis kelamin terdapat kecenderungan TPAK laki-laki lebih tinggi daripada TPAK perempuan. Pola perkembangan TPAK menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa TPAK laki-laki lebih dominan (berfluktuasi pada kisaran 77-82%) dibandingkan TPAK perempuan (berada pada kisaran 57-67%). Fenomena menunjukkan keterlibatan penduduk laki-laki dalam aktivitas perekonomian lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar aktivitas mengurus rumah tangga di DIY dilakukan oleh perempuan dan adanya pandangan bahwa kewajiban mencari nafkah adalah tanggungjawab laki-laki. TPAK laki-laki pada Agustus 2015 mencapai sekitar 79,95%, sementara TPAK perempuan sebesar 57,30%. Pola ini menunjukkan bahwa laki-laki masih menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga.

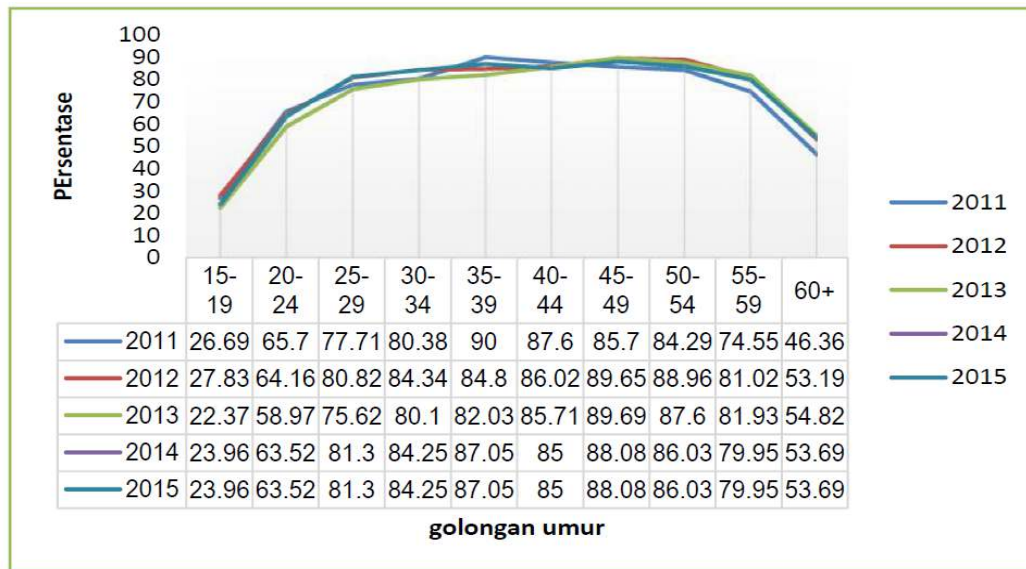


Sumber: BRS November 2015, BPS Provinsi DIY

**Gambar II.42 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di DIY Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2014-2016**

TPAK menurut wilayah menunjukkan kecenderungan TPAK di perdesaan selalu lebih tinggi dari daerah perkotaan. TPAK perdesaan berfluktuasi antara 73-82%, sementara TPAK perkotaan berada pada kisaran 62-72%. Hal ini berkaitan dengan adanya kecenderungan penduduk perkotaan yang lebih memilih menyelesaikan pendidikan sampai jenjang yang setinggi-tingginya sebelum memasuki pasar tenaga kerja serta lebih selektif memilih pekerjaan yang sesuai. Hal ini berbeda dengan penduduk perdesaan yang memiliki lama sekolah yang lebih singkat dan kemudian masuk pasar kerja untuk membantu ekonomi keluarga.

Pola TPAK DIY menurut kelompok umur menyerupai kurva “U terbalik”, yaitu rendah pada usia 15-19 dan 60 tahun ke atas serta tinggi pada kelompok 25-54 tahun. TPAK yang rendah pada kelompok usia 15-19 tahun mencerminkan tingginya penduduk pada kelompok ini yang melakukan kegiatan utama bersekolah, sehingga mereka tidak tergolong dalam kelompok angkatan kerja. Sedangkan pada usia produktif 30-49 tahun TPAK berada pada posisi tinggi karena kegiatan utama pada usia ini adalah bekerja. TPAK kelompok umur 50-59 tahun masih relatif tinggi karena pada umumnya masih produktif untuk bekerja.

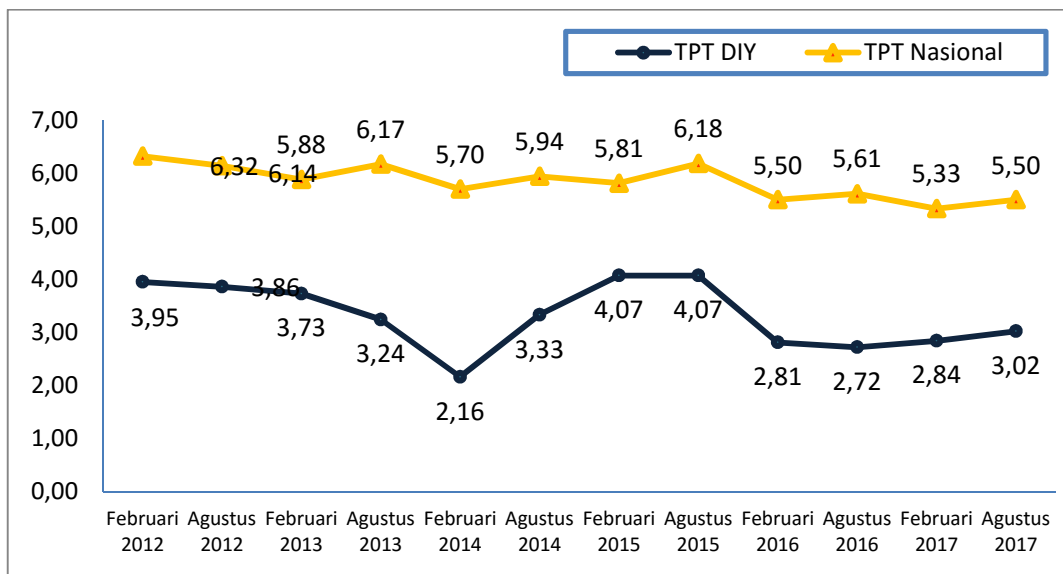


Sumber: BPS, Sakernas Tahun 2011- 2016

**Gambar II.43 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di DIY Menurut Kelompok Umur, Tahun 2011-2015**

### 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka adalah penduduk usia produktif yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. TPT bisa digunakan untuk memantau serta mengevaluasi perkembangan angka pengangguran karena merepresentasikan bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Perkembangan angka pengangguran terbuka di DIY pada Februari tahun 2012 hingga Februari 2014 menunjukkan trend, namun kemudian mengalami peningkatan pada Agustus 2014 menjadi 3,33% dan mencapai 4,07% pada Agustus 2015. Pada tahun 2016 TPT mengalami penurunan cukup drastis yaitu menjadi 2,72 % dan cenderung meningkat pada periode berikutnya hingga mencapai 3,02 pada Agustus 2017. Angka TPT DIY ini selalu lebih rendah dibandingkan TPT nasional dimana pada Agustus 2017 mencapai 5,50% turun 0,11 point dibandingkan Agustus 2016.



Sumber :BRS November 2017, BPS Provinsi DIY

**Gambar II.44 Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY dan Nasional, Tahun 2012-2017 (%)**

Pengangguran atau ketiadaan pekerjaan serta standar upah yang rendah merupakan salah satu akar dari kemiskinan. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir, cenderung mengalami tren penurunan, angka pengangguran terbuka di DIY masih dinilai cukup tinggi. Hal ini menunjukkan, bahwa potensi wilayah yang tersedia di Yogyakarta ternyata belum semua mampu memberi peluang kerja bagi penduduk usia kerjanya. Apabila dilihat menurut jenis kelamin, TPT laki-laki lebih rendah dari TPT perempuan. Pada Februari 2015, TPT masing-masing sebesar 3,72% untuk laki-laki dan 2,65% untuk perempuan. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka secara keseluruhan mencapai 4,54%. Selama periode 2011 – 2015, perkembangan TPT menurut wilayah perkotaan dan perdesaan di DIY menunjukkan pola yang hampir sama, namun terdapat kecenderungan TPT di perkotaan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan. Hasil Sakernas DIY menunjukkan bahwa pada tahun 2010 TPT perkotaan menunjukkan angka 6,97% dan terus mengalami penurunan menjadi 4,00% pada bulan Agustus 2014 dan meningkat 0,55 poin pada Agustus 2015 menjadi sebesar 4,55%. Namun demikian, walaupun tingkat pengangguran di perkotaan cenderung menurun tetapi angkanya masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat pengangguran di perdesaan. TPT di daerah perdesaan pada tahun 2010 adalah sebesar 4,01%, tahun 2014 turun menjadi 2,17% dan kembali meningkat menjadi 3,02% pada Agustus 2015. Pada tahun 2016 TPT daerah perkotaan tercatat lebih besar daripada perdesaan. Pada Februari 2016 TPT perkotaan dan perdesaan tercatat masing-masing sebesar 3,54 dan 1,32%. Supply tenaga kerja yang lebih tinggi di perkotaan, baik dari daerah perkotaan sendiri maupun kaum urban, turut berperan menentukan tingkat penyerapan tenaga kerja. Akibatnya, pengangguran di perkotaan cenderung lebih kentara dibandingkan di perdesaan.

Tingginya TPT Perkotaan dibandingkan di perdesaan disebabkan antara lain karena beragamnya lapangan pekerjaan di perkotaan yang biasanya sebagai pusat perekonomian, sehingga angkatan kerja baru cenderung mencari pekerjaan dengan pindah atau mondok di perkotaan. Dengan demikian pengangguran menjadi lebih nampak di daerah perkotaan.

Sementara itu, penduduk daerah perdesaan biasanya tidak terlalu selektif dalam memilih lapangan pekerjaan, sehingga mereka akan melakukan kegiatan apa saja walaupun hanya sebagai pekerja keluarga dan pekerja bebas pertanian.

Berdasarkan kelompok umur, Tingkat Pengangguran Terbuka sangat menonjol pada kelompok usia muda, antara 15-24 tahun. TPT usia muda pada Februari 2015 sekitar 10-22%, atau lebih dari 4 kali lipat TPT semua umur (DIY). Pada kelompok umur 15-19 tahun, TPT perempuan lebih rendah daripada tingkat pengangguran terbuka laki-laki, sedangkan pada kelompok umur 25-29 tahun dan 40-49 tahun TPT perempuan lebih tinggi dari TPT laki-laki.

**Tabel II-68 Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Tahun 2014-2015**

Gol. Umur	Februari 2014			Agustus 2014			Februari 2015		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
15-19	18,65	10,04	14,07	27,14	13,27	21,59	19,41	15,08	21,59
20-24	10,96	13,00	11,994	9,34	11,22	10,19	20,98	11,86	10,19
25-29	6,24	0,00	3,30	8,30	5,07	6,91	7,82	7,95	6,91
30-34	2,55	0,00	1,45	1,80	2,56	2,11	3,53	1,16	2,11
45-49	2,91	0,00	1,49	2,74	0,50	1,75	0,00	0,68	1,75
50+	0,00	0,00	0,00	1,28	0,47	0,90	1,06	0,00	0,55
DIY	2,67	1,60	2,16	3,88	2,65	3,33	5,23	2,59	4,07

Sumber: Sakernas DIY 2014-2015

Jika dilihat dari status pendidikan terakhir yang ditempuh, sebagian besar pengangguran terbuka di DIY merupakan pengangguran terdidik karena didominasi oleh lulusan D1-3/S1-3. Pada Februari 2015 angka TPT lulusan D1-3/S1-3 adalah sebesar 7,02%, diikuti TPT SLTA sebesar 6,21%, dan TPT SLTP sebesar 5,47%.

**Tabel II-69 Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun 2013-2015**

Tingkat Pendidikan	Februari 2013			Agustus 2013			Februari 2014			Agustus 2014			Februari 2015		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
≤ SD	0,00	0,00	0,00	1,13	0,25	0,62	1,64	0,00	0,63	0,95	0,00	0,39	1,60	0,00	0,74
SD	4,80	1,44	3,21	1,09	0,16	0,64	2,09	0,00	1,05	2,16	0,55	1,38	0,00	0,00	0,00
SLTP	0,00	1,35	0,53	3,00	2,23	2,68	1,37	0,00	0,85	2,73	1,50	2,26	7,13	2,63	5,47
SLTA	2,40	5,20	3,41	5,81	5,86	5,83	4,16	2,15	3,29	6,10	4,89	5,65	7,93	3,55	6,21
D1-3/S1-3	19,57	22,87	21,31	4,52	7,87	6,21	2,27	9,35	6,21	3,73	5,29	4,48	6,62	7,41	7,02
DIY	3,22	4,37	3,73	3,59	2,81	3,24	2,67	1,60	2,16	3,88	2,65	3,33	5,23	2,59	4,07

Sumber: Sakernas DIY 2014-2015

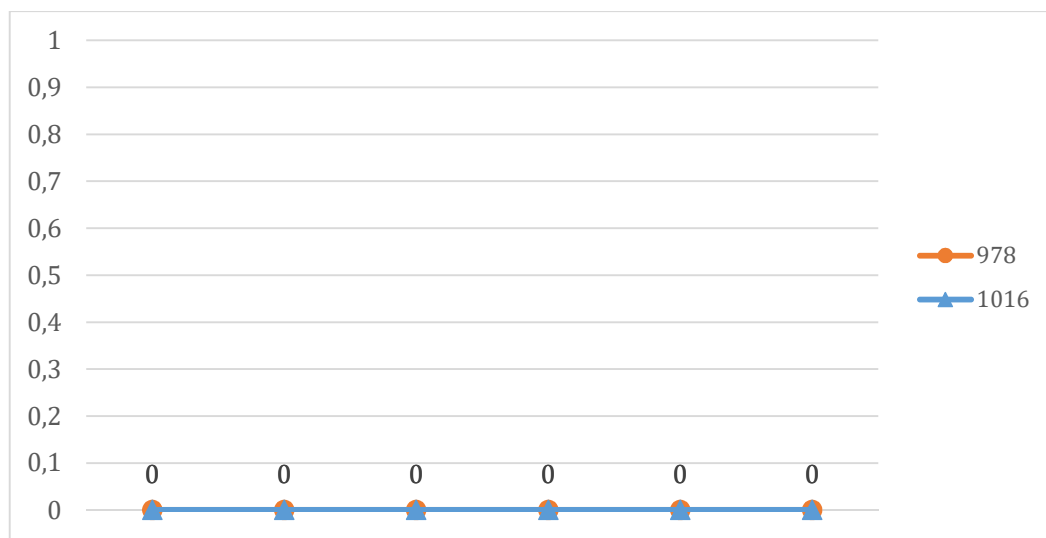
### II.3.1.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dilakukan dengan tujuan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam semua aspek kehidupan, dan meningkatkan peran perempuan sebagai pengambil keputusan. Sementara, perlindungan anak meliputi seluruh kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Beberapa indikator yang dapat menggambarkan pencapaian pembangunan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah, Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, Rasio Pekerja Anak, dan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

### 1. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhitungkan perbedaan pencapaian antara perempuan dan laki-laki. Indeks ini memperhitungkan indikator-indikator yang sama dengan IPM, yang meliputi angka harapan hidup laki-laki dan perempuan, rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan, angka melek huruf laki-laki dan perempuan, dan sumbangan perempuan dalam pendapatan.



Sumber : BPS, Kementerian PP&PA diolah

**Gambar II.45** Capaian IPM dan IPG DIY Tahun 2010 – 2015

IPG di DIY selama kurun waktu 2010-2015 terus mengalami kenaikan. Peningkatan ini berarti bahwa kapabilitas dasar perempuan yang terangkum dalam dimensi kesehatan, pendidikan maupun hidup layak selama kurun waktu tersebut mengalami perbaikan seiring dengan pelaksanaan program-program pembangunan. Meskipun demikian, pada kurun waktu tersebut juga terindikasi adanya kesenjangan yang cukup besar antara IPM dengan IPG di DIY. Grafik di atas menggambarkan bagaimana IPG selalu menunjukkan posisi yang lebih rendah dari angka IPM pada kurun waktu 2010-2013, namun pada tahun 2014-2015 posisi IPG lebih tinggi dari IPM.

**Tabel II-70** Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun 2013-2015

Kabupaten/ Kota	2012			2013			2014			2015		
	IPG	IPM	RASIO	IPG	IPM	RASIO	IPG	IPM	RASIO	IPG	IPM	RASIO
DIY	74,11	76,75	96,56	74,75	77,37	96,61	94,15	76,81	122,57	94,31	77,59	121,54
Yogyakarta	78,71	80,24	98,09	79,04	80,51	98,17	98,48	83,78	117,54	99,27	84,56	117,39
Bantul	72,69	75,58	96,18	73,35	76,01	96,50	94,33	77,11	122,33	94,41	77,99	121,05
Kulon Progo	68,41	75,33	90,81	69,42	75,95	91,40	94,23	70,68	133,31	94,65	71,52	132,34
Gunungkidul	66,62	71,11	93,69	67,29	71,64	93,92	81,76	67,03	121,97	82,27	67,41	122,04
Sleman	75,76	79,31	95,52	76,45	79,97	95,60	95,50	80,73	118,29	96,09	81,20	118,33

Sumber: BPS. Kementerian PP PA diolah

## 2. Indeks Pemberdayaan Gender

Hal yang penting dari pemberdayaan gender adalah tercapainya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur indeks ini meliputi partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Peranan perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan politik di DIY yang diukur melalui IDG pada kurun waktu 2010-2015 memperlihatkan perkembangan yang fluktuatif. Capaian IDG DIY mengalami penurunan yang cukup drastis pada tahun 2012, namun kembali menguat pada tahun 2013 dan kembali menurun di tahun 2014. Pada tahun 2015 IDG DIY mengalami peningkatan pada angka 68,75. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masih diperlukan upaya serius untuk meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan politik di DIY.

**Tabel II-71 Capaian IDG DIY Tahun 2010-2015**

Provinsi	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
DIY	77,70	77,84	75,57	76,36	66,90	68,75
Kulon Progo	61,18	61,15	59,23	59,26	63,68	67,26
Bantul	67,85	68,46	68,52	68,88	61,18	61,77
Gunungkidul	59,36	62,22	64,58	66,01	68,27	64,48
Sleman	70,74	70,52	69,66	72,30	79,37	77,61
Kota	69,85	70,00	70,70	71,75	79,44	79,33

Sumber : Kementerian PP & PA. diolah

## 3. Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tidak Kekerasan

Hal yang dinilai paling mengakibatkan ketidakseimbangan hubungan antar gender adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kasus kekerasan di DIY jika dilihat dari tempat kejadian dan lokasi lembaga layanan diperoleh data kenaikan tahun 2016 dibanding tahun sebelumnya. Kekerasan dalam rumah tangga masih merupakan kejadian kekerasan tertinggi dibanding lingkungan kerja/sekolah atau tempat lainnya.

**Tabel II-72 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Kelompok Umur dan Lokasi**

No	Jenis Kelamin	Tahun 2015	Tahun 2016
----	---------------	------------	------------

	Lokasi Lembaga		Kelompok Umur				Kelompok Umur			
			0-17 Tahun	18- 25 Tahun	25 Tahun Ke Atas	Total	0-17 Tahun	18- 25 Tahun	25 Tahun Ke Atas	Total
1.	Kulon Progo	Laki-Laki	7	0	2	9	23	2	4	29
		Perempuan	19	5	20	44	22	19	64	105
2.	Bantul	Laki-Laki	6	1	1	8	35	1	1	37
		Perempuan	41	12	37	90	35	11	48	94
3.	Gunungkidul	Laki-Laki	7	1	0	8	2	1	3	6
		Perempuan	9	2	18	29	67	11	34	112
4.	Sleman	Laki-Laki	34	1	24	59	34	4	14	52
		Perempuan	106	66	215	387	60	46	126	232
5.	Yogyakarta	Laki-Laki	18	4	11	33	24	5	7	36
		Perempuan	58	130	364	552	46	119	332	497
6	Provinsi	Laki-Laki	33	2	17	52	65	1	15	81
		Perempuan	66	39	121	226	71	68	89	228
Jumlah		Laki-Laki	105	9	55	169	183	14	44	241
		Perempuan	299	254	775	1328	301	274	693	1268
		Total	404	263	830	1497	484	288	737	1509

Sumber data: Sekertariat Forum Perlindungan Korban Kekerasan DIY

No.	Lokasi Lembaga	Jenis Kelamin	Tempat Kejadian					
			2015			2016		
			Rumah Tangga	Tempat Kerja	Lainnya	Rumah Tangga	Tempat Kerja	Lainnya
1.	Kulon Progo	Laki-Laki	2	0	7	7	3	19
		Perempuan	30	2	12	74	3	28
2.	Bantul	Laki-Laki	3	0	5	9	13	15
		Perempuan	52	1	37	70	7	17
3.	Gunungkidul	Laki-Laki	3	0	5	5	0	1
		Perempuan	23	0	6	60	12	40
4.	Sleman	Laki-Laki	43	1	15	33	8	11
		Perempuan	268	4	115	157	21	54
5.	Yogyakarta	Laki-Laki	20	0	13	10	14	12
		Perempuan	406	8	138	379	18	100
6.	Provinsi	Laki-Laki	37	0	15	44	6	31
		Perempuan	164	4	58	111	14	103
Jumlah		Laki-Laki	108	1	60	108	44	89
		Perempuan	943	19	366	851	75	342
		Total	1051	20	426	959	119	431

Sumber : BPPM 2017

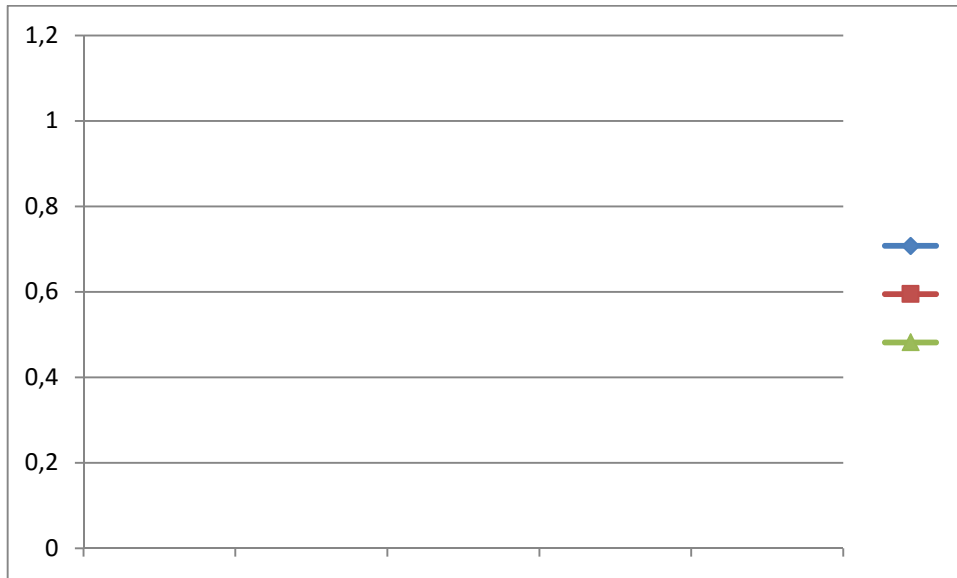
### II.3.1.2.3 Urusan Pangan

Ketahanan pangan dilihat dari tiga aspek yaitu ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan. Dari ketiga aspek ketahanan pangan tersebut sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan ditetapkan empat jenis pelayanan dasar yaitu ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, panganekaragaman dan keamanan pangan, serta penanganan kerawanan pangan.

#### 1. Ketersediaan Pangan

Ditinjau dari perkembangan ketersediaan pangan, DIY mengalami tren peningkatan produksi pangan nabati pada komoditas utama yaitu padi dan ubi kayu. Peningkatan produksi padi pada kurun waktu 2012-2016 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 secara keseluruhan jumlah produksi padi mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 62.434 ton, dilihat dari produksi pertanian sawah dan ladang, pertanian sawah mengalami penurunan sebesar 34.525 ton dan ladang mengalami penurunan sebesar 27.909 ton bila

dibandingkan dengan tahun 2015, hal ini karena curah hujan yang tinggi dan banjir di beberapa daerah pada tahun 2016. Sementara produksi ubi kayu mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2016 karena peningkatan produktivitas. Produksi jagung selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, tahun 2015 dan 2016 lebih rendah dibandingkan tahun 2014, ini diakibatkan musim kemarau basah yang mengganggu produksi dan penyusutan lahan pertanian.

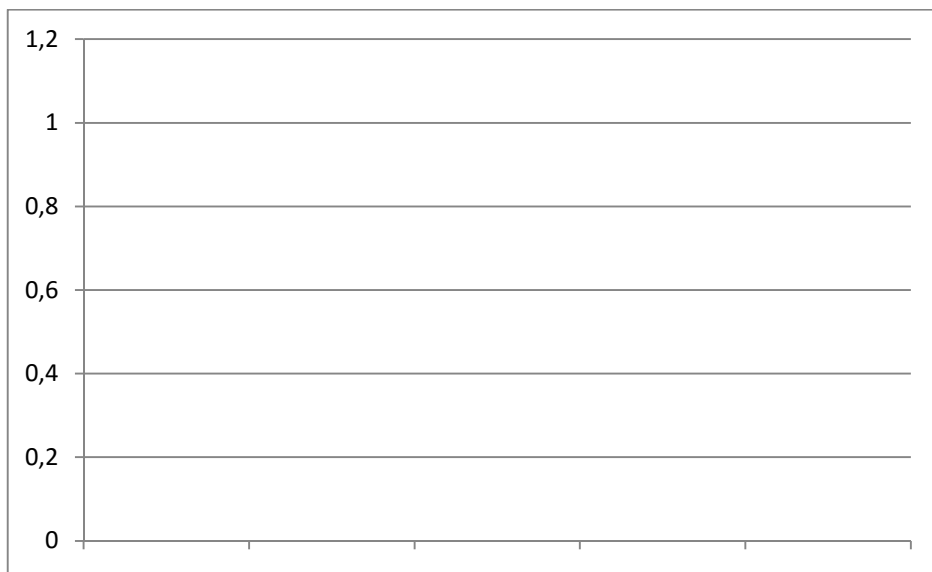


Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2017

#### Gambar II.46 Produksi Padi, Jagung, dan Ubi Kayu (dalam ton), Tahun 2012-2016

Kemampuan produksi DIY dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan sudah cukup mencukupi. Beberapa komoditas yang sudah dapat terpenuhi dari produksi lokal yaitu beras (surplus 480.569 ton), jagung (surplus 308.024 ton), kacang tanah (surplus 75.072 ton), ubi kayu (surplus 1.098.212 ton), buah-buahan (surplus 160.633 ton), serta telur (surplus 302 ton). Namun demikian ketersediaan pangan dari masing-masing komoditas tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan konsumsi terhadap komoditas tersebut tiap bulan. Ketersediaan pangan kadang kala dalam kondisi surplus bila dibandingkan dengan kebutuhan untuk konsumsi, namun di bulan-bulan tertentu dapat berada dalam kondisi defisit.

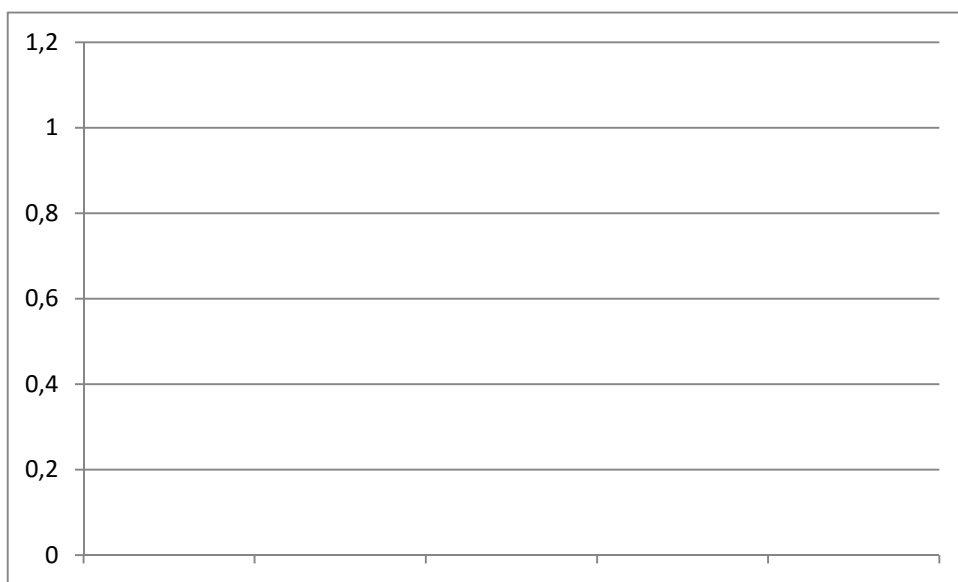
Ketersediaan pangan perkapita DIY mengalami kecenderungan menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 2,32% dalam periode 2012 hingga 2016. Penurunan ketersediaan pangan perkapita ini disebabkan peningkatan jumlah penduduk, sementara produksi bahan pangan sempat mengalami penurunan akibat perubahan iklim serta gangguan OPT.



Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2017

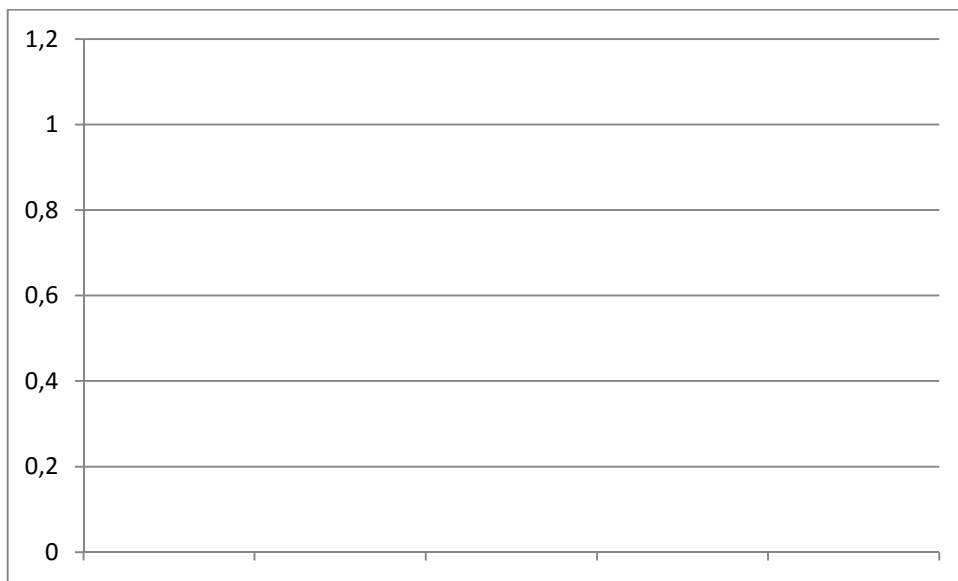
**Gambar II.47 Ketersediaan Pangan Per Kapita**

Berdasarkan persyaratan yang ditetapkan FAO, bahwa ketersediaan pangan dalam energi minimal 2400 Kkal/kapita/hari dan protein sebesar 63 gram/kapita/hari, maka posisi DIY jauh melebihi standar tersebut. Ketersediaan pangan dalam ukuran energi DIY tahun 2016 sebesar 3.727 Kkal/kapita/hari, sedangkan untuk protein ketersediannya sebesar 101,47 gram/kapita/hari. Hal ini berarti ketersediaan bahan pangan DIY sudah mencukupi untuk kebutuhan konsumsi masyarakat DIY.



Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2017

**Gambar II.48 Jumlah Ketersediaan Energi di DIY Tahun 2012-2016**



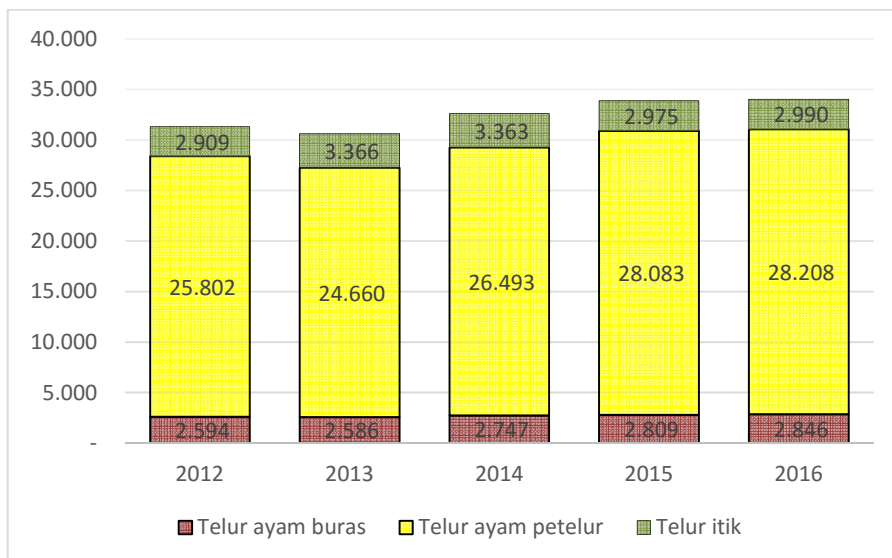
Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2017

#### **Gambar II.49 Ketersediaan Protein di DIY Tahun 2012-2016**

Berdasarkan Neraca Bahan Makanan yang ketersediaan kelompok padi-padian tahun 2016 sebesar 1.755 kal/kap/hari lebih rendah dibanding tahun 2015 (1.844 kal/kap/hari). Hal ini dikarenakan adanya penurunan luas panen di Bantul karena peregesaran tanam. Produktivitas menurun 12,42% karena pengaruh perubahan iklim yang menyebabkan pada bulan Januari-Februari terjadi hujan lebat sehingga mengganggu proses pembungaan dan penyerbukan.

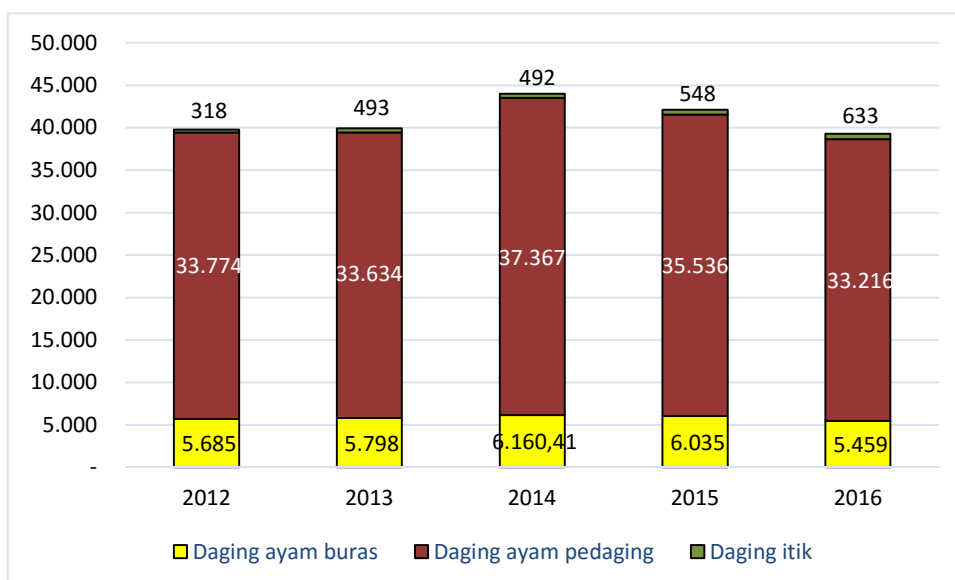
Ketersediaan energi kelompok daging tahun 2016 sebesar 232kkal/kap/hari lebih rendah dibanding tahun 2015 (319 kkal/kap/hari), dikarenakan berkurangnya impor daging itik. Selain itu juga karena produksi daging ayam buras menurun akibat merebaknya penyakit AI (Avian Influenza). Apabila dilihat dari produksi daging sapi, daging domba, serta daging kambing pada tahun 2016 meningkat bila dibandingkan tahun 2015. Hal ini dikarenakan populasi sapi yang akan disembelih meningkat akibat dari program SIWAB (Sapi Indukan Wajib Bunting) melalui program Inseminasi Buatan dan Kawin Alami

Ketersediaan energi kelompok telur pada tahun 2016 sebesar 39 kkal/kap/hari, lebih rendah dibanding tahun 2015. Hal ini dikarenakan produksi telur itik yang menurun pada tahun 2016 yang disebabkan banyak itik yang sudah tidak produktif dan dilakukan pemotongan sehingga menurunkan produksi telur itik namun meningkatkan produksi daging itik.



Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2017

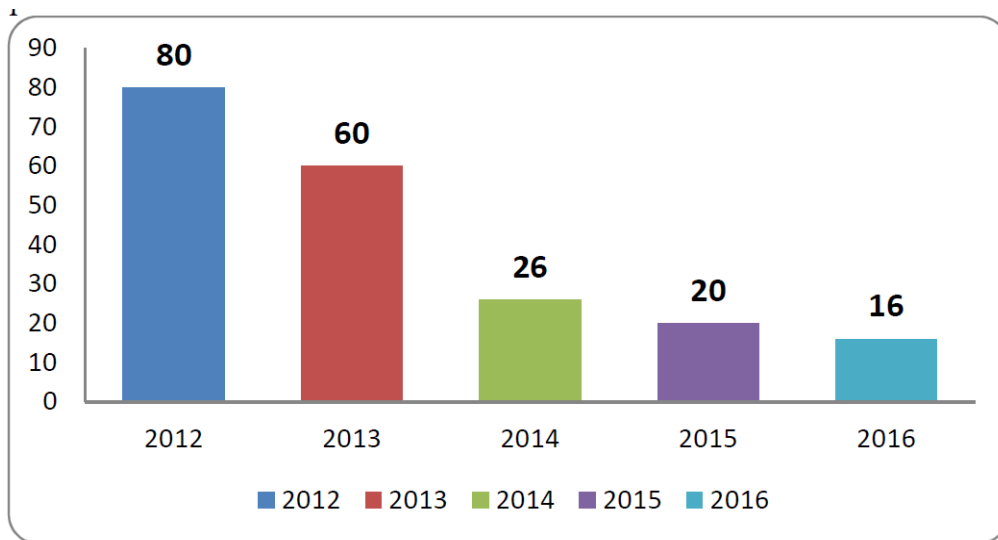
**Gambar II.50 Produksi Telur Unggas Tahun 2012-2016 (dalam ton)**



Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2017

**Gambar II.51 Produksi Daging Unggas Tahun 2012-2016 (dalam ton)**

Jumlah desa rawan pangan di DIY menurun dari 103 desa pada 2010 menjadi 26 desa pada tahun 2014 dan menjadi 20 desa pada tahun 2015. Pada 2016 DIY masih memiliki 16 desa rawan pangan. Desa rawan pangan tersebut tersebar di Kabupaten Bantul 3 desa, Kabupaten Kulon Progo 6 desa, dan Kabupaten Gunungkidul 7 desa, hal ini dinilai dari tiga indikator yaitu aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan, serta aspek pemanfaatan pangan. Berbagai intervensi kegiatan yang telah dilakukan untuk menurunkan jumlah desa rawan pangan, yaitu peningkatan produksi pertanian dan peternakan, pemeliharaan kesehatan, serta penggiatan usaha ekonomi produktif di desa tersebut.



Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2017

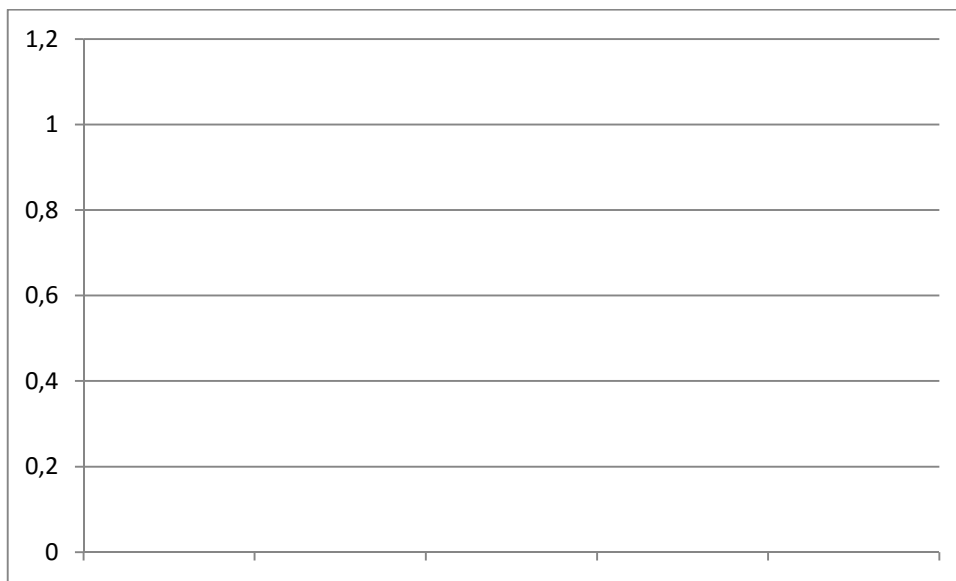
**Gambar II.52 Jumlah Desa Rawan Pangan Tahun 2012-2016**

## 2. Distribusi Pangan

Telah dilakukan upaya pengendalian harga bahan pangan strategis dan dilaksanakan fasilitasi stabilisasi harga bahan pangan dan peningkatan ketersediaan pangan setempat melalui pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, Lembaga Akses Pangan Masyarakat dan pelaksanaan operasi pasar. Saat ini, sudah difasilitasi sebanyak 104 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dari target 392 Gapoktan untuk stabilisasi harga komoditas gabah/beras, jagung, kedelai dan ubi kayu/gaplek, 31 Gapoktan dari target 94 Gapoktan untuk mendukung ketersediaan bahan pangan di tingkat rumah tangga.

## 3. Konsumsi dan Pengawasan Pangan

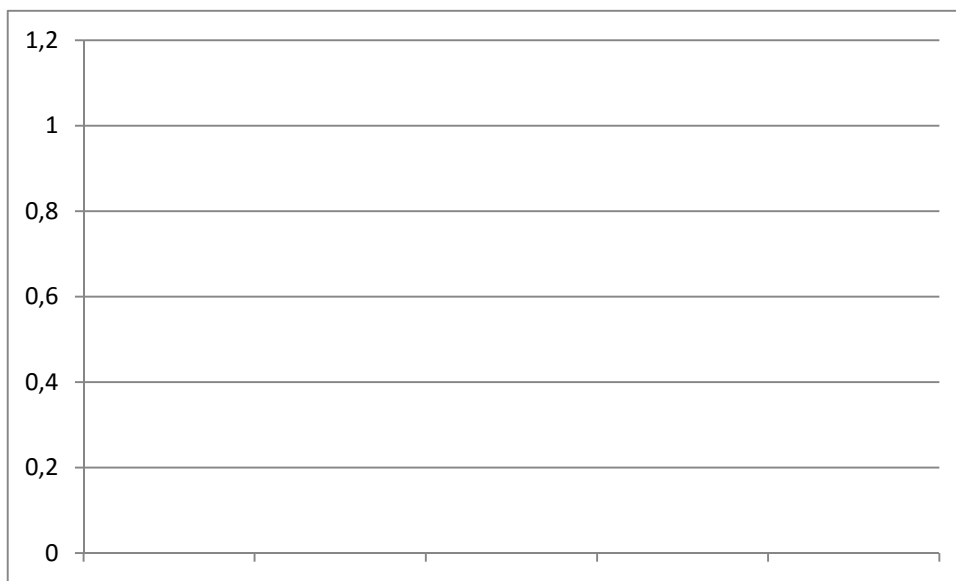
Jumlah konsumsi energi penduduk DIY cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 konsumsi energi penduduk DIY sebesar 2.299,5 Kkal/kapita/hari, sudah berada di atas Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.150 Kkal/kapita/hari.



Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2017

**Gambar II.53 Perkembangan Konsumsi Energi Penduduk di DIY (Kkal/Kapita/Hari) Tahun 2012-2016**

Sedangkan konsumsi protein penduduk DIY pada tahun 2016 mencapai 68 gram/kapita/hari. Konsumsi protein tersebut sudah berada di atas angka kecukupan protein yang dianjurkan 57 gr/kapita/hari.



Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2017

**Gambar II.54 Perkembangan Konsumsi Protein Penduduk di DIY (Kkal/Kapita/Hari) Tahun 2012-2016**

Tingkat dan kualitas konsumsi pangan tercermin dari skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH DIY pada tahun 2016 adalah 88,5, lebih baik dari skor nasional 85,2. Meskipun kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kualitas konsumsi pangan semakin

meningkat, namun masih terdapat asupan gizi dari beberapa kelompok bahan makanan di bawah rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII.



Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2017

**Gambar II.55 Skor Pola Pangan Harapan di DIY Tahun 2012-2016**

Tingkat asupan konsumsi pangan masyarakat DIY masih didominasi konsumsi pangan kelompok padi-padian terutama beras. Di sisi lain konsumsi pangan lainnya kurang dari yang dianjurkan. Tingkat konsumsi kelompok bahan pangan yang masih perlu ditingkatkan diantaranya komoditi umbi, sayu dan buah, minyak dan lemak, serta kacang-kacangan. Hal ini merupakan tantangan yang harus menjadi fokus penanganan secara sistematis dan berkesinambungan dalam upaya percepatan penganeekaragaman pangan di DIY.

Kondisi keamanan pangan sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat di seluruh lapisan. Berbagai permasalahan keamanan pangan merupakan akibat dari banyaknya produk pangan yang tidak memenuhi syarat (TMS) dari tahun ke tahun yang mengandung bahan berbahaya, cemaran mikroba melebihi batas, serta menggunakan bahan tambahan pangan melebihi batas yang diijinkan. Oleh karena itu, upaya pengawasan keamanan pangan terus dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Berbagai upaya tersebut diantaranya adalah pengawasan di pasar dan sekolah serta pembinaan produsen pangan dalam rangka sertifikasi keamanan pangan.

#### **II.3.1.2.4 Urusan Pertanahan**

Sebagai daerah otonom, Pemerintah Daerah DIY melaksanakan urusan wajib pertanahan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya. Selain kedudukan sebagai daerah otonom, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemda DIY juga berkedudukan sebagai daerah istimewa dimana Urusan Pertanahan menjadi salah satu urusan yang diamanahkan sebagai urusan keistimewaan.

Sebagai daerah bekas Swapraja, urusan pertanahan di DIY memang bersifat khusus. Pada masa Swapraja, Kasultanan Nyagogyakarta Hadiningrat (selanjutnya disebut Kasultanan) dan Kadipaten Pakualaman (selanjutnya disebut Kadipaten) memberikan hak pemanfaatan tanah kepada masyarakat dan Kelurahan (penyebutan Desa pada waktu itu) dengan sejumlah hak pemanfaatan adat, seperti magersari, ngindhung, hanganggo turun-temurun, dan hanggadhu (atau anggadhu) melalui serat kekancingan.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta mengatur tentang 5 (lima) kewenangan istimewa bagi DIY, salah satunya kewenangan istimewa bidang pertanahan. Kewenangan istimewa adalah kewenangan tambahan tertentu bagi DIY di samping wewenang yang sudah ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Pemerintah Daerah DIY mengundangkan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) DIY Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal 45 Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2013 mengatur tentang kewenangan umum Pemerintah Daerah DIY dalam urusan pertanahan, diantaranya izin lokasi, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian sengketa tanah garapan, dan perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota. Kemudian Pasal 50 Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2013 mengatur tentang kewenangan khusus Pemerintah Daerah DIY dalam pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten, yang dilakukan dengan :

1. Memfasilitasi penatausahaan, pemeliharaan, pelestarian, pelepasan, dan pengawasan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten; dan
2. Memfasilitasi pembentukan regulasi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.

Urusan pertanahan dalam UU No 13/2012 dan Perdais DIY No 1/2013 ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Seluruh bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten pada dasarnya dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang ada dalam peraturan perundangan. Dalam Pasal 3 Perdais DIY No. 1/2017 tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten ditujukan untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan/atau untuk kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud dengan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten terdiri dari penatausahaan, pemeliharaan dokumen, dan pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan pemanfaatan berupa perlindungan, penggunaan dan pelepasan tanah kasultanan dan tanah kadipaten.

Secara umum permasalahan sektor pertanahan di DIY, tidak dapat dilepaskan dari persoalan perkembangan wilayah sebagaimana terjadi di wilayah-wilayah lain dan adanya keistimewaan urusan pertanahan. Berkenaan dengan hal tersebut permasalahan sektor pertanahan di DIY berdasarkan UU Pemerintahan Daerah, objeknya dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, yakni: (1) permasalahan pertanahan secara umum berhubungan dengan masyarakat; dan (2) permasalahan pertanahan terkait dengan tanah kasultanan dan tanah kadipaten.

Permasalahan yang bersifat umum dan terkait dengan masyarakat luas diantaranya:

1. tingginya alih fungsi penggunaan tanah pertanian ke non pertanian;

2. tingginya fragmentasi tanah-tanah pertanian;
3. tidak ter kendalinya harga tanah;
4. belum semua bidang-bidang tanah mempunyai alas hak;
5. belum optimalnya sistem informasi pertanahan berbasis bidang-bidang tanah; dan
6. masih terjadinya sengketa dan konflik pertanahan.

Permasalahan yang terkait dengan tanah kasultanan dan tanah kadipaten diantaranya:

1. belum semua bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten mempunyai alas hak
2. Pemeliharaan dokumen tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang belum optimal
3. Pengawasan yang belum optimal terhadap pemanfaatan bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten
4. Pelindungan terhadap tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang belum optimal
5. penggunaan bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang belum sesuai dengan peraturan perundangan
6. pelepasan tanah kasultanan dan tanah kadipaten (termasuk tanah desa) yang menuai sengketa dan konflik

#### II.3.1.2.5 Urusan Lingkungan Hidup

##### Kondisi Kualitas Air

##### 1. Kualitas Air Sungai

Kualitas air sungai di DIY dilihat dari data Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) DIY. Pemantauan kualitas air sungai meliputi parameter fisik (suhu, TDS, TSS, dan DHL), Parameter kimia (pH, Oksigen terlarut (DO), BOD, COD, Klorin bebas, Sulfida (H<sub>2</sub>S), Fluorida, Fosfat (PO<sub>4</sub>), Nitrat (NO<sub>3</sub>-N), Nitrit, Kadmium (Cd), Krom (Cr+6), Timbal (Pb), Tembaga (Cu), Boron, Sianida (CN), Minyak dan Lemak, Seng (Zn), Fenol, Amoniak, Permanganat dan Deterjen), serta parameter biologi (Bakteri Koli Tinja dan Total Coli) sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, serta Peraturan Gubernur DIY Nomor 20 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air di DIY.

Pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 10 Sungai yaitu Sungai Winongo, Sungai Code, Sungai Gajahwong, Sungai Bedog, Sungai Tambakbayan, Sungai Oyo, Sungai Kuning, Sungai Konteng, Sungai Belik dan Sungai Bulus dalam tiga periode, yaitu bulan Februari, Juni, dan September. Dari hasil pemantauan tersebut, diperoleh data kualitas air sungai yang kemudian dianalisa dengan Metode Indeks Pencemaran dan Metode Storet.

**Tabel II-73 Status Mutu Air Sungai DIY dengan Metode Storet**

No.	Nama Sungai	Nilai Baku Storet	Status Kualitas Air Sungai (2013)	Status Kualitas Air Sungai (2014)	Status Kualitas Air Sungai (2015)	Keterangan
1	Winongo	≤-31	-96 hingga-120	-75 hingga-106	-73 hingga-110	Cemar Berat (naik)
2	Code	≤-31	-86 hingga-112	-89 hingga-120	-94 hingga-118	Cemar Berat Turun)

No.	Nama Sungai	Nilai Baku Storet	Status Kualitas Air Sungai (2013)	Status Kualitas Air Sungai (2014)	Status Kualitas Air Sungai (2015)	Keterangan
3	Gajahwong	≤-31	-74 hingga-120	-78 hingga-108	-88 hingga-102	Cemar Berat (turun)
4	Bedog	≤-31	-84 hingga-108	-94 hingga-111	-90 hingga-143	Cemar Berat (naik)
5	Belik	≤-31	-100 hingga-126	-104 hingga-120	-120 hingga-149	Cemar Berat (naik)
6	Konteng	≤-31	-86 hingga-106	-94 hingga-116	-90 hingga-114	Cemar Berat (turun)
7	Kuning	≤-31	-83 hingga-90	-85 hingga -102	-95 hingga -101	Cemar Berat (turun)
8	Oyo	≤-31	-92 hingga-98	-92 hingga-111	-118 hingga-132	Cemar Berat (naik)
9	Tambakbayan	≤-31	-98 hingga-106	-84 hingga-107	-84 hingga-105	Cemar Berat (turun)
10	Bulus	≤-31	-70 hingga-76	- 93 hingga -98	-100 hingga-116	Cemar Berat (naik)

Sumber : SLHD DIY Tahun 2013, 2014 & 2015

Dari hasil pemantauan 10 sungai di DIY tahun 2015, terdapat 5 sungai yang mengalami peningkatan kualitas dan 5 sungai yang mengalami penurunan kualitas. Hal-hal yang mempengaruhi penurunan kualitas air sungai antara lain:

- Pembuangan limbah padat dan limbah cair ke sungai baik yang berasal dari rumah tangga maupun peternakan dan UMKM.
- Degradasi fungsi lahan pada daerah resapan air akibat adanya penurunan kerapatan vegetasi dan menyebabkan air hujan kurang efektif terserap tanah sehingga berpotensi menurunkan debit air sungai. Berkurangnya debit air sungai mengakibatkan konsentrasi zat pencemar meningkat meskipun volume zat pencemar relatif tetap.
- Penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang tidak ramah lingkungan pada sektor pertanian masih banyak.
- Konversi lahan pertanian, perkebunan dan hutan menjadi daerah permukiman, kawasan perdagangan dan pusat produksi barang atau jasa mengakibatkan peningkatan volume limbah dan sampah yang masuk ke sungai.

Parameter yang dominan terdeteksi melebihi baku mutu antara lain timbal, tembaga, zink, sulfida, fenol , klorin bebas, bakteri total koli dan bakteri koli tinja. Adapun nilai parameter bakteri koli tinja dan bakteri total koli masih melebihi baku mutu disinyalir berasal dari limbah domestik dan kotoran ternak.

## 2. Kualitas Air Tanah

Pada tahun 2015 dilakukan pemeriksaan kualitas air tanah sebanyak 68 sampel air sumur. Pengujian dilakukan dalam dua tahap yaitu bulan April dan bulan Juni dengan masing masing periode sebanyak 34 sampel.

Dari 68 sampel air sumur, beberapa parameter tidak memenuhi baku mutu, yaitu kekeruhan, Mangan, timbal, nitrat, TDS, DHL dan total coliform. Untuk parameter kekeruhan,

hanya ada 1 sampel yang tidak memenuhi baku mutu (1,47%) yaitu sumur di SMAN 1 Temon, Kulon Progo. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan penyebab tingginya angka kekeruhan pada air sumur. Tingginya angka kekeruhan antara lain disebabkan zat koloid, partikel zat padat, zat organik, dan mikro organisme dalam air.

Untuk unsur mangan, dari 68 sampel yang diuji terdapat 5 sampel (7,35%) dengan kandungan mangan yang melebihi baku mutu. Berdasarkan keterangan PDAM Tirta Marta kandungan mangan di DIY cukup tinggi karena secara alami cukup tinggi, dapat juga disebabkan adanya limbah domestik dan pelarutan mineral.

Sebagian besar sampel air sumur tidak memenuhi baku mutu untuk parameter mikrobiologi, yaitu total coliform, sebanyak 22 sampel (38,24%). Keberadaan bakteri koli menunjukkan adanya kontaminasi mikroorganisme yang bersifat patogenik bagi kesehatan. Bakteri koli dapat digolongkan menjadi bakteri koli tinja dan non tinja. Contoh bakteri koli tinja adalah *Escherecia coli* yang berasal dari kotoran hewan dan manusia.

Tingginya jumlah bakteri koli termasuk koli tinja dalam sampel air sumur dikhawatirkan membawa dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat pengguna sumber air tersebut. Salah satu penyakit yang disebabkan *Escherecia coli* adalah diare.

## Kondisi Kualitas Udara

### 1. Kualitas Udara Ambien

Pemantauan kualitas udara ambien menggunakan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang dilaksanakan di 25 lokasi yang tersebar di wilayah DIY pada tahun 2015, khususnya di tempat-tempat yang padat lalu lintas dan juga di wilayah permukiman serta wilayah sekitar industri. Pemantauan kualitas udara dilaksanakan 2 periode di tiap-tiap lokasi, dengan parameter-parameter yang dipantau adalah parameter kimia berupa CO, O3, PM.10, SO2 dan NO2. Hasil pemantauan tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel II-74 Hasil Perhitungan Nilai Indeks Standar Pencemaran Udara (SPU) Gabungan Parameter DIY, Tahun 2015**

No	Lokasi	NILAI ISPU Parameter ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )			
		CO	O3	PM.10	SO2
1	Depan Kantor Kec. Jetis, Jl. P. Diponegoro Yk	7	8	39	43
2	Depan Ruko Janti, Jl. Laksda Adisutjipto Yk.	11	7	53	41
3	Jl. Magelang KM 4,6, TVRI, Sinduadi, Mlati, Sleman.	8	8	48	43
4	Depan Pizza Hut, Jl. Jend. Sudirman Yk.	7	6	46	46
5	Depan Mirota, Jl. Godean Yk.	8	5	45	44
6	Depan Hotel Shapir, Jl. Solo Yk.	11	8	156	42
7	Depan Kampus STTL, Jl. Gedongkuning Yk.	9	6	63	42
8	Depan Mirota Kampus, Jl. C Simanjuntrak Yk.	7	8	48	44
9	Depan Pasar Sepeda, Jl. Menteri Supeno Yk.	13	6	49	43
10	Depan Kantor Merapi Golf, Jl. Kaliurang Km6,4 Yk.	7	6	46	41
11	Depan GKBI Medari, Jl. Magelang Yk	9	8	44	42
12	Simpang empat Denggung, Beran, Jl. Magelang	12	7	50	42
13	Simpang empat Ngeplang, Sentolo, Kulon Progo	9	6	48	43
14	Simpang tiga Toyan Wates, Kulon Progo	8	8	44	41

No	Lokasi	NILAI ISPU Parameter ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )			
		CO	O3	PM.10	SO2
15	Simpang Tiga Teteg KA, Kulon Progo	9	5	43	42
16	Simpang tiga Terminal Wates, Kulon Progo	13	10	61	42
17	Simpang empat Wojo, Jl.Imogiri Barat, Bantul	19	7	61	43
18	Simpang empat Druwo, Jl.Parangtritis, Yk	15	7	48	44
19	Perempatan Gose, Jl. Bantul, Yogyakarta.	14	7	44	43
20	Depan Kampus UPN Veteran Ring Road Utara	10	8	54	41
21	Depan Kecamatan Pathuk, Wonosari, GK	12	5	52	44
22	Perempatan Gading, Wonosari, Gunungkidul	5	243	30	42
23	Simpang Empat, Siyono, Wonosari, GK	11	5	48	42
24	Terminal Wonosari, Gunungkidul	10	5	55	42
25	Perempatan RSUD Wonosari, Gunungkidul	12	4	43	45
<b>Jumlah ISPU</b>		<b>258</b>	<b>402</b>	<b>1319</b>	<b>1069</b>
<b>Hasil Akhir ISPU</b>		<b>10</b>	<b>16</b>	<b>53</b>	<b>43</b>
<b>Total Akhir ISPU</b>		<b>122</b>			
<b>Kualitas udara</b>		<b>30.5 =BAIK</b>			
<b>Parameter dominan</b>		<b>PM.10</b>			

Berdasarkan tabel tersebut ISPU di atas, maka dapat disimpulkan informasi bahwa pada 25 lokasi pemantauan, nilai ISPU DIY sebesar 30.5 (Sehat/Baik) dengan Parameter Dominan PM<sub>10</sub>. Dominasi parameter PM<sub>10</sub> ini kemungkinan besar disebabkan karena efek dari sisa-sisa debu material vulkanik, kemacetan lalu lintas dan pembangunan hotel-hotel di Kawasan Perkotaan Yogyakarta.

### Kondisi Hutan dan Lahan

Upaya yang dilakukan di dalam kawasan hutan adalah dengan penanaman pada kawasan hutan yang bertumbuhan kurang, kawasan hutan dengan kriteria kritis dan pada tanah kosong atau kawasan hutan yang tidak terdapat tanaman. Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka menurunkan luas lahan kritis di luar kawasan hutan adalah meningkatkan usaha penanaman hutan rakyat serta peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan.

Tantangan terbesar dalam upaya rehabilitasi lahan kritis di DIY adalah banyaknya lahan marginal atau lahan dengan tingkat kesuburan yang rendah berupa *karst* dengan lapisan tanah (solum) yang dangkal. Selain itu kondisi lapisan tanah yang dangkal dan berada pada kelerengan rawan terhadap kerusakan berupa longsor lahan dan tergerus erosi. Untuk mencegah kerusakan lahan akibat bencana atau erosi dapat diupayakan tindakan teknis pengelolaan lahan berupa pembuatan teras atau penanaman sejajar kontur untuk menghindari hilangnya tanah karena aliran air terutama air hujan.

Persentase kerusakan hutan pada tahun 2015 tercatat sebesar 0,10% (70,46 Ha) dari total luas kawasan hutan. Pada tahun 2014 kerusakan hutan sebesar 0,08% (84,86 Ha). Kerusakan hutan ini disebabkan kebakaran hutan dan pembalakan liar. Upaya perlindungan untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan untuk menjamin keberlangsungan fungsi hutan baik dari sisi ekonomi, ekologi maupun sosial. Upaya yang dilaksanakan meliputi kegiatan perlindungan hutan dari gangguan kemanan hutan maupun upaya minimalisasi kerusakan hutan dari bencana terutama kebakaran, kegiatan rehabilitasi dan peningkatan peran masyarakat dalam upaya menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati.

Besarnya kerusakan hutan yang diakibatkan karena adanya lahan kritis mengharuskan adanya tindakan rehabilitasi lahan kritis di dalam kawasan hutan yang dapat dilakukan dengan pengkayaan tanaman pada daerah hutan bertumbuhan kurang, penanaman tanaman pada tanah kosong.

Tantangan utama dalam menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati terutama sumberdaya hutan adalah tingginya kebutuhan lahan oleh masyarakat sekitar hutan yang memunculkan penyerobotan lahan hutan atau penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan lain serta kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan yang relatif rendah sehingga memunculkan gangguan hutan terutama pencurian kayu, yang harus dilakukan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar hutan akan arti penting kelestarian hutan berkaitan dengan kelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan.

#### **II.3.1.2.6 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil**

Data administrasi kependudukan menjadi rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan di sektor lain seperti bidang politik, sosial dan ekonomi. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanganan kependudukan di DIY adalah Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang merupakan kesatuan dari beberapa kegiatan administrasi kependudukan sebelumnya yaitu Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Secara terpadu implementasi sistem administrasi kependudukan dimulai dari pembangunan, updating dan pemeliharaan, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan, pemberian bimbingan dan supervisi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, koordinasi data kependudukan orang asing berupa Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), pengelolaan dan penyelesaian data kependudukan berskala Provinsi dan koordinasi pengawasan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Tahun 2016, jumlah penduduk wajib memiliki KTP sebanyak 2.717.385 orang dari total jumlah penduduk sebanyak 3.587.758 orang. Sementara itu jumlah penduduk wajib KTP yang telah melakukan perekaman sebanyak 2.640.612 orang atau dengan kata lain persentase angka perekaman KTP el- sebesar 97,17 %.

**Tabel II-75 Angka Penduduk DIY Yang Telah Melakukan Perekaman KTP Elektronik**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Jumlah Wajib KTP</b>	<b>Jumlah Wajib KTP Telah Perekaman</b>	<b>Angka Perekaman</b>
2013	3.561.448	2.543.894	2.426.195	95,37%
2014	3.551.679	2.598.163	2.464.342	94,85%
2015	3.595.256	2.785.718	2.569.245	92,23%
2016	3.587.758	2.717.385	2.640.612	97,17%

*Sumber : Biro Tata Pemerintahan, Setda DIY*

Kepemilikan akta (terutama akta kelahiran, akta kematian, dan akta perkawinan) oleh penduduk, terutama pada keluarga miskin, masih rendah. Berdasarkan data SIAK tahun 2016,

cakupan kepemilikan akta kelahiran anak sebesar 80,97%, bisa diartikan bahwa dari jumlah anak total di DIY (penduduk berusia di bawah 18 tahun) sebesar 929.150 orang, ada sekitar 752.356 anak yang sudah memiliki akta kelahiran. Penyebabnya antara lain ketiadaan biaya pengurusan akta, rendahnya pemahaman warga dan kurangnya sosialisasi oleh pemerintah.

**Tabel II-76 Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak di DIY**

Tahun	Jumlah Anak	Jumlah Anak Memiliki Akta Kelahiran	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak
2014	882.512	373.828	42,36%
2015	915.948	634.769	69,30%
2016	929.150	752.356	80,97%

Sumber : Biro Tata Pemerintahan, Setda DIY

Di bidang penerbitan akta kematian, jumlah pembuatan akta kematian pada semester I 2015 sebanyak 16.445 dokumen. Penerbitan akta kematian pada semester I 2014 sebanyak 10.652 dokumen. Kenaikan disebabkan semakin banyak instansi yang mensyaratkan akta kelahiran untuk pengurusan pelayanan publik seperti waris tanah dan Taspen.

#### **II.3.1.2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Pendekatan pemberdayaan memandang masyarakat sebagai sumber daya manusia yang harus dikembangkan potensinya dan diberikan kontrol terhadap berbagai sumber daya untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan. Dalam pemberdayaan masyarakat, setiap warga turut berperan aktif dalam upaya peningkatan kapasitas yang akan berujung pada peningkatan taraf hidup masyarakat.

Upaya meningkatkan pemberdayaan fokus pada aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas pengembangan lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pemantapan nilai-nilai sosial dasar bagi masyarakat, pengembangan usaha ekonomi produktif, serta pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna.

Bentuk partisipasi masyarakat diwujudkan melalui lembaga pemberdayaan masyarakat baik di bidang pemerintahan, ekonomi, maupun kesejahteraan keluarga, antara lain:

#### **1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat**

LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat di bidang pemerintahan. Permasalahan mengenai LPM adalah bagaimana peran LPM sebagai salah satu lembaga sosial yang terdapat di Desa dalam proses pembangunan desa. Seluruh desa/kelurahan di DIY telah membentuk LPM dan di setiap kabupaten/kota dan tingkat provinsi juga telah terbentuk asosiasi LPMD/LPMK.

**Tabel II-77 Jumlah LPMD dan LPMK Menurut Kabupaten/Kota di DIY**

No.	Kab/Kota	Jumlah LPMD/LPMK		Asosiasi LPMD/LPMK	Jumlah
		LPMD	LPMK		

1	Kota Yogyakarta	-	45	1	46
2	Kab. Bantul	75	-	1	76
3	Kab. Kulon Progo	88	-	1	89
4	Kab. Gunungkidul	144	-	1	145
5	Kab. Sleman	86	-	1	87
6	DIY	-	-	1	1
7	Total	393	45	6	444

Sumber: BPPM DIY, 2015

## 2. Posyandu Aktif

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Penyelenggaraan Posyandu berkonsep demokrasi, dimana pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh, dari, dan bersama masyarakat. Keberadaan posyandu memiliki nilai strategis dalam pembangunan kualitas manusia sejak dini karena di dalam posyandu diberikan layanan dan informasi kesehatan ibu dan anak-anak sejak usia dini.

**Tabel II-78 Jumlah Posyandu Aktif DIY Tahun 2014-2016**

Kab/Kota	2014			2015			2016		
	Total	Aktif	Proporsi	Total	Aktif	Proporsi	Total	Aktif	Proporsi
Kota Yogyakarta	625	450	72,00	625	450	72,00	625	615	98,4
Bantul	1132	747	65,99	1132	747	65,99	1137	747	65,70
Kulon Progo	961	866	90,11	960	863	89,90	960	830	86,46
Gunungkidul	1465	1306	89,15	1465	1261	86,08	1467	1258	85,75
Sleman	1519	1284	84,53	1520	1293	85,07	1528	1292	84,55
DIY	5702	4653	81,60	5702	4614	80,92	5717	4742	82,94

Jumlah Posyandu yang aktif semakin meningkat dari 4.593 tahun 2013, menjadi 4.653 tahun 2014, selanjutnya menjadi 4.614 tahun 2015, dan menjadi 4.742 tahun 2016. Kota Yogyakarta adalah wilayah yang paling berhasil mendorong Posyandu untuk menjalankan perannya secara aktif sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, yang ditunjukkan dengan data bahwa 98,4% posyandu secara aktif memberikan pelayanan kesehatan. Kabupaten Bantul dinilai perlu lebih meningkatkan komitmennya dalam mendorong peran aktif posyandu karena sejak tahun 2013 kabupaten ini adalah yang paling rendah presentase posyandu aktifnya dan bahkan mengalami penurunan pada tahun 2016.

## 3. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

BUM Desa adalah sistem kegiatan perekonomian masyarakat dalam skala mikro yang ada di desa. BUMDesa dikelola oleh masyarakat bersama pemerintah desa setempat yang pengelolaannya terpisahkan dari kegiatan pemerintahan desa.

Lembaga perekonomian desa seperti UED-SP, Pasar Desa, Badan Kredit Desa yang sudah terbentuk didorong untuk menjadi unit usaha dari BUMDesa. BumDesa pada dasarnya merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga ekonomi desa dan merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi. Pada Tahun 2016, ditargetkan 38,26 % desa di DIY telah membentuk BUMDesa, terealisasi 152 BUMDesa di seluruh DIY atau dengan kata lain 38, 78 % dari jumlah total desa di DIY telah memiliki BUMDesa.

**Tabel II-79 Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Tahun 2014-2016**

No	Kabupaten	Jumlah Desa	Tahun		
			2014	2015	2016
1	Bantul	75	13	17	20
2	Kulon Progo	87	87	87	87
3	Gunungkidul	144	28	30	38
4	Sleman	86	2	5	7
<b>Jumlah</b>		<b>392</b>	<b>130</b>	<b>139</b>	<b>152</b>

Sumber : BPPM DIY, 2016

#### 4. Profil Desa dan Kelurahan

Profil desa dan kelurahan bertujuan untuk menjadi penyelenggara pusat data desa dan kelurahan di seluruh Indonesia yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pengguna Profil desa dan kelurahan yang diregistrasi mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat nasional, sehingga dimasa kini dan yang akan datang sistem ini bisa berfungsi sebagai sarana untuk menggali data dan informasi yang akurat dan terkini mengenai desa dan kelurahan.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas desa, DIY mendorong setiap desa agar dapat menyusun profil desa yang sesuai standar. Upaya yang dilakukan melalui pelatihan *entry* profil desa, pembentukan Tim Pokja Profil Desa/Kelurahan, serta diadakannya Profil Desa sebagai syarat utama dalam penilaian Lomba Desa sehingga semua desa termotivasi untuk menyusun profil yang memenuhi standar.

**Tabel II-80 Jumlah Desa/kelurahan di DIY**

No	Kab/Kota	Desa/Kel	Desa Yang Telah Mempunyai Profil Tahun					%
			2012	2013	2014	2015	2016	
1	Kabupaten Kulon Progo	88	7	17	41	84	88	100,00
2	Kabupaten Bantul	75	9	61	74	75	75	100,00
3	Kabupaten Gunungkidul	144	18	49	73	133	144	100,00
4	Kabupaten Sleman	86	35	49	66	86	86	100,00
5	Kota Yogyakarta	45	16	40	45	45	45	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>438</b>	<b>85</b>	<b>216</b>	<b>299</b>	<b>423</b>	<b>438</b>	100,00

#### 5. Partisipasi Keswadayaan Masyarakat

Kemandirian masyarakat dapat dicapai melalui asas gotong royong, keswadayaan dan partisipasi. Data tentang keswadayaan masyarakat sebagai berikut :

**Tabel II-81 Jumlah Partisipasi Keswadayaan Masyarakat Tahun 2016**

No	Prov/Kab/Kota	Sumber Dana		
		DIY	Kab/Kota	Swadaya Masyarakat
1	Pemda DIY	875.000.000	-	-
2	Kota Yogyakarta		383.513.950	49.054.185
3	Kab. Bantul		486.975.400	2.480.454.000
4	Kab. Gunungkidul		295.242.900	32.922.362.166
5	Kab. Kulon Progo		338.625.000	557.830.000
6	Kab. Sleman		366.548.000	68.300.000
<b>Jumlah</b>		<b>875.000.000</b>	<b>1.870.905.250</b>	<b>36.078.000.351</b>
<b>Total</b>			<b>2.745.905.250</b>	<b>36.078.000.351</b>
<b>Total Pem +Masy</b>			<b>38.823.905.601</b>	

No	Prov/Kab/Kota	Sumber Dana		
		DIY	Kab/Kota	Swadaya Masyarakat
	% swadaya masyarakat			92.93

Sumber : BPPM DIY

Dari data tersebut tingkat partisipasi masyarakat desa sangat tinggi mencapai 92,93%.

#### II.3.1.2.8 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan agar pembangunan Indonesia direncanakan dan dilaksanakan dengan prinsip “Kependudukan sebagai Titik Sentral Kegiatan Pembangunan” dan diupayakan mencapai kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang. Lebih lanjut, Undang-Undang ini pun mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

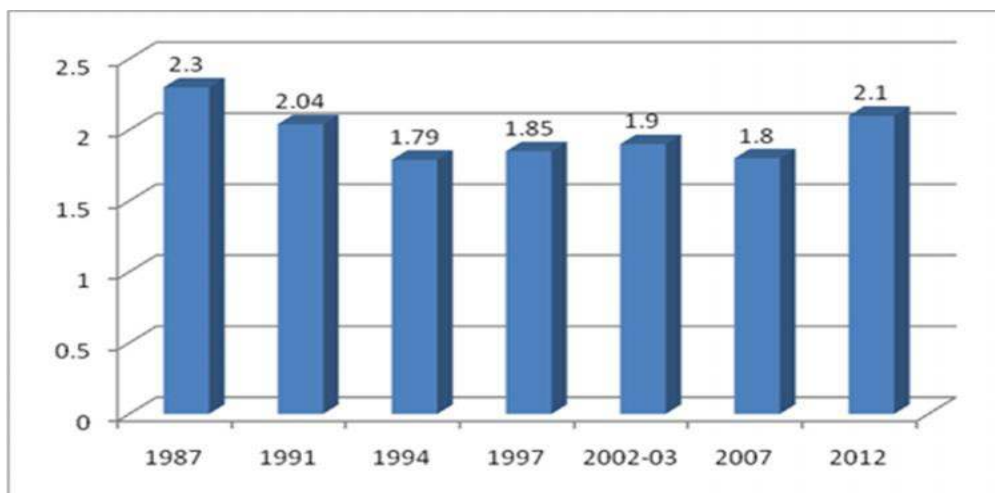
Perubahan struktur penduduk ditandai dengan penurunan jumlah penduduk usia anak-anak (<15 tahun) dan disertai dengan peningkatan penduduk usia kerja (15-64 tahun) akan menciptakan jendela peluang (*windows of opportunity*) bagi pemerintah untuk investasi sumber daya dalam rangka mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya hal ini akan menyebabkan produktivitas yang tinggi dan pendapatan yang tinggi pula. Penjelasan ini membawa implikasi bahwa jendela kesempatan tersebut harus dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah untuk melakukan investasi modal manusia sekaligus melakukan akselerasi penciptaan kesempatan kerja yang produktif bagi penduduk usia kerja. Namun, jendela kesempatan ini pun dapat membawa DIY pada kondisi demographic trap yang akan menghasilkan persoalan serius jika tidak dimanfaatkan, karena tingginya jumlah penduduk produktif yang tidak mempunyai pekerjaan.

Pengkajian mengenai pengendalian penduduk di DIY perlu memperhatikan beberapa indikator utama yang dapat menggambarkan kondisi pembangunan dalam bidang ini terkait bonus demografi, yaitu angka fertilitas dan perubahan komposisi penduduk yang menyebabkan perubahan angka ketergantungan penduduk. Sementara itu, pembahasan mengenai keluarga berencana perlu meliputi beberapa pencapaian utama dan isu strategis dalam pembangunan bidang ini, yakni akseptor KB, Pernikahan Dini, Perceraian dan unmet need.

#### 1. Angka Fertilitas atau *Total Fertility Rate*

Hasil Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), setelah mengalami penurunan secara terus menerus sejak tahun 1987 hingga tahun 1994, *Total Fertility Rate* (TFR) DIY kembali mengalami kenaikan perlahan mulai tahun 1997 hingga tahun 2012. Peningkatan inilah yang disinyalir menjadi penyebab utama terjadinya peningkatan pertumbuhan penduduk di DIY. Namun, peningkatan ini masih dalam taraf yang positif. Angka TFR 2,1 sebagaimana ditunjukkan pada tahun 2012 sesuai dengan misi Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang 2015 yang ditandai dengan TFR 2,1 dan *Net Reproduction Rate* (NRR) sebesar 1.

TFR yang ada saat ini perlu dipertahankan, untuk itu berbagai upaya yang dilakukan antara lain dengan pengaturan migrasi penduduk. Penduduk tumbuh seimbang bila TFR mencapai 2,0.



Sumber : SPI, 1986; SDKI 1991, 1994, 1997, 2002/2003, dan 2012

**Gambar II.56 Perkembangan TFR di DIY Berdasarkan SDKI**

## 2. Perubahan Komposisi Penduduk

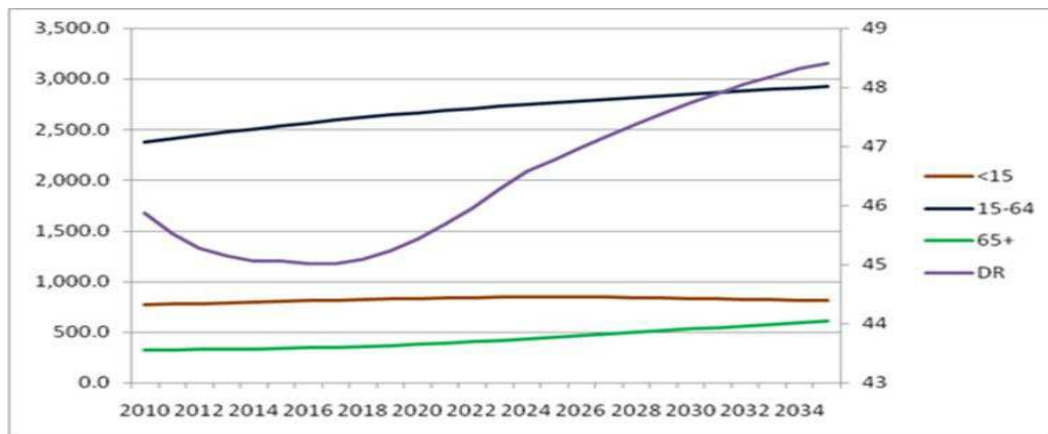
Berdasarkan data BPS proyeksi penduduk periode 2010-2035, khususnya dalam hal komposisi *umur* penduduk, penduduk usia muda (<15 tahun) atau penduduk yang belum produktif akan semakin menurun jumlahnya dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 jumlahnya tercatat sekitar 22,1% dari total keseluruhan penduduk dan diproyeksikan mengalami penurunan yang signifikan hingga mencapai 18,6% pada tahun 2035. Jumlah penduduk muda yang semakin rendah ini merupakan akibat dari angka kelahiran DIY yang relatif rendah. Sementara itu, proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang pada 2010 tercatat sekitar 68,6% akan menurun perlahan pada kisaran 67,4 di tahun 2035 mendatang. Penurunan yang cukup pelan namun pasti pada kelompok umur ini akan memberikan dampak terhadap beban ketergantungan yang semakin meningkat di tahun-tahun mendatang. Selain masalah tersebut, terdapat pula peningkatan jumlah penduduk usia lanjut (65 ke atas) yang juga meningkatkan beban ketergantungan.

**Tabel II-82 Proyeksi Parameter Kependudukan Tahun 2010-2035**

Parameter	2010	2015	2020	2025	2030	2035
<b>Penduduk</b>						
Laki-laki	1710,9	1818,8	1921,6	2013,2	2090,7	2153,8
Perempuan	1756,6	1860,4	1960,7	2051,4	2129,5	2194,7
Total	3467,5	3679,2	3882,3	4064,6	4220,2	4348,5
<b>Komposisi Umur</b>						
0-14	22,1	21,8	21,5	20,9	19,8	18,6
15-64	68,6	69,0	68,7	68,1	67,7	67,4
65+	9,3	9,2	9,8	11,0	12,5	14,0
<i>Dependency Ratio</i>	45,8	44,9	45,6	46,8	47,7	48,4

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010 – 2035, BPS

*Dependency Ratio* (DR) di DIY sudah menurun dan mencapai angka terendah pada tahun 2015. Gambar di bawah memperlihatkan bahwa kenaikan angka ketergantungan yang tajam akan terjadi kurang lebih pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2035. Peningkatan angka ketergantungan disebabkan peningkatan penduduk lanjut usia yang sangat tajam disertai melambatnya peningkatan jumlah penduduk usia produktif.



**Gambar II.57 Perubahan Komposisi Penduduk Menurut Umur Serta Angka Ketergantungan (DR), 2010-2035**

Grafik di atas memperlihatkan dinamika angka ketergantungan DI DIY. Angka ini mengalami penurunan secara konsisten sampai dengan tahun 2017 dan diperkirakan akan mulai meningkat pada tahun 2018 sebagai pertanda bahwa fase pertama bonus demografi telah tercapai. Artinya, DIY akan menghadapi permasalahan yang saling komplementer. Di satu sisi, persoalan yang muncul pada fase pertama berkaitan dengan ketidakseimbangan pasar kerja yang mengakibatkan belum semua usia produktif bekerja secara layak. Di sisi lain, permasalahan pada tahap kedua terkait dengan semakin membesarnya jumlah lansia.

### 3. Akseptor KB

Berdasarkan proyeksi penduduk periode 2010-2035 yang disusun BPS, jumlah penduduk DIY pada tahun 2010 tercatat sebesar 3,467 juta jiwa dan diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya sehingga tahun 2035 diperkirakan jumlah penduduk DIY akan mencapai 4,348 juta jiwa. Jumlah ini cukup besar terlebih dengan mengingat bahwa luas wilayah DIY hanya sekitar 0,16% dari luas wilayah Indonesia secara keseluruhan. Kepadatan penduduk diperkirakan akan mencapai 1.365 jiwa per km<sup>2</sup> atau meningkat 26% dibandingkan dengan kepadatan penduduk tahun 2010. Melihat tingkat kepadatan penduduk tersebut, sudah sepatutnya Pemda DIY mengencangkan berbagai upaya yang dapat menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satunya adalah dengan melakukan penjarangan akseptor KB.

Dalam Kamus Kependudukan & Keluarga Berencana dijelaskan bahwa akseptor merupakan Peserta KB, yaitu pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi. Sementara, rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode

satu tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama di suatu wilayah. Besarnya angka rasio akseptor memproyeksikan seberapa besar upaya pengendalian jumlah penduduk di sebuah wilayah. Rasio akseptor KB DIY sejak tahun 2010 hingga 2015 tercatat fluktuatif namun tetap berada pada kisaran 78-80.

**Tabel II-83 Rasio Akseptor KB Tahun 2010-2025**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Peserta KB	430.231	432.989	438.788	441.981	441.858	431.418
Jumlah Pasangan Usia Subur	544.057	549.894	552.422	553.395	552.008	543.115
Rasio	79,08	78,74	79,43	79,87	80,05	79,43

Sumber : BKKBN Perwakilan DIY, 2016, diolah

#### 4. Pernikahan Dini

Pemda DIY berusaha meningkatkan kapasitas bagi pengelola Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R), melakukan inisiasi dalam pembentukan PIK R dan melakukan Kampanye Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di 78 kecamatan pada tahun 2017.

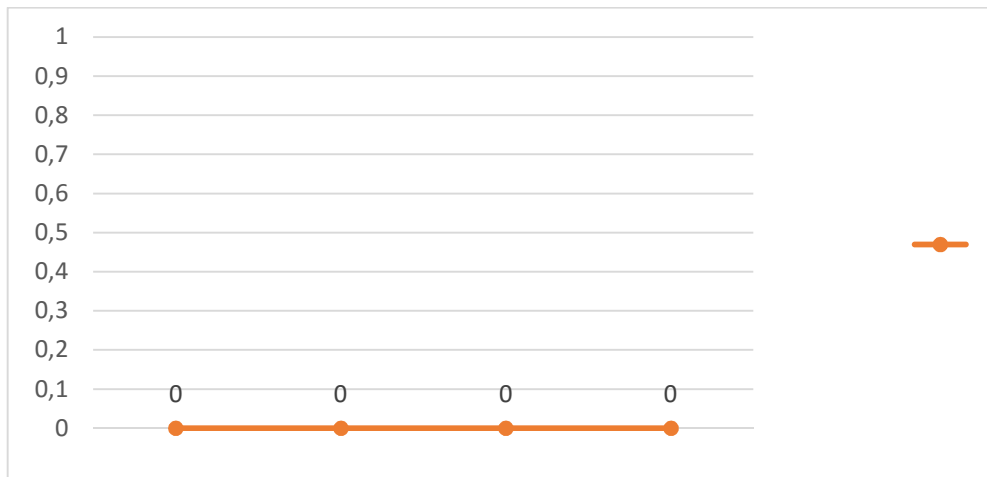
**Tabel II-84 Pernikahan Dini Tahun 2015-2016**

No	Kabupaten/Kota	Tahun			
		2015		2016	
		P	L	P	L
1.	Yogyakarta	31	15	17	19
2.	Bantul	8	37	31	81
3.	Kulon Progo	11	23	17	24
4.	Gunungkidul	51	72	16	56
5.	Sleman	36	83	24	75
	<b>Jumlah</b>	<b>137</b>	<b>230</b>	<b>105</b>	<b>255</b>

Sumber: Kemenag, 2016

#### 5. Perceraian

Berdasarkan struktur penduduk yang ada di Provinsi DIY angka pernikahan yang telah tercatat menunjukkan grafik yang naik turun. Hal ini dapat dilihat dari data pernikahan tahun 2012 sebanyak 26.543 pernikahan, Tahun 2013 sebanyak 25.920 pernikahan dan tahun 2014 sebanyak 24.161 pernikahan. Namun, jumlah kasus perceraian menunjukkan kenaikan.



**Gambar II.58 Jumlah kasus perceraian DIY Tahun 2012-2015**

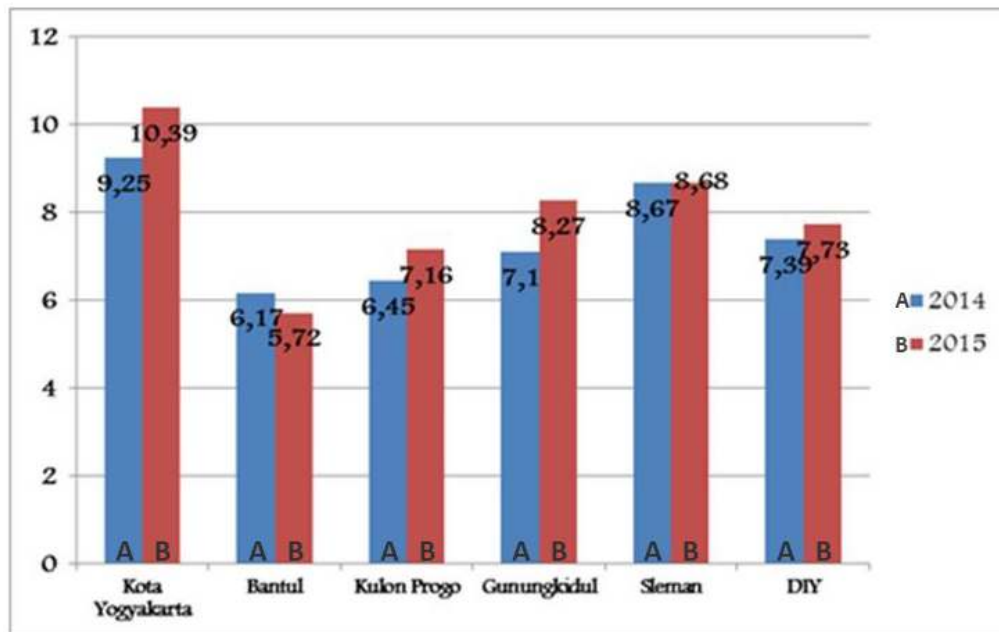
Solusi yang dilaksanakan secara terus menerus adalah dengan menguatkan fungsi keluarga, menyiapkan remaja yang siap menikah, penguatan lembaga konseling keluarga.

#### **6. *Unmet Need***

*Unmet need* adalah perempuan berstatus menikah yang kebutuhan pelayanan Kbnya tidak terpenuhi. Hasil SDKI 2012 menunjukkan bahwa 11% perempuan berstatus menikah di Indonesia mempunyai kebutuhan pelayanan KB yang tidak terpenuhi. Di antara mereka, 4% sesungguhnya ingin menunda kelahiran berikutnya untuk jangka waktu 2 tahun atau lebih, dan 7% sebenarnya tidak ingin mempunyai anak lagi. Beberapa alasan yang menyebabkan tidak melakukan KB, yang antara lain meliputi kekhawatiran terhadap kegagalan kontrasepsi dan kesulitan dalam mengakses pelayanan kontrasepsi.

Secara keseluruhan, *unmet need* DIY tahun 2015 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan hasil SDKI 2012. Berdasarkan hasil SDKI 2012, DIY memiliki *unmet need* di atas rata-rata nasional yaitu 11,5%. Kemudian pada tahun 2015 *unmet need* DIY tercatat 7,73%. Capaian *Unmet Need* DIY yang semakin turun menandakan semakin tingginya kesadaran wanita usia subur untuk menggunakan kontrasepsi dan semakin mudahnya akses terhadap pelayanan kontrasepsi.

Dengan demikian, masih dibutuhkan upaya ekstra keras untuk mencapainya, terlebih karena *unmet need* ini berkorelasi dengan Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD) yang pada level tertentu dapat mendorong peningkatan angka kematian ibu khususnya yang disebabkan oleh praktik aborsi yang tidak aman.



Sumber: BKKBN, 2016

**Gambar II.59 Perkembangan Unmet Need KB di DIY Menurut Kabupaten Kota Tahun 2014-2015**

## 7. Sarana Pelayanan Keluarga Berencana

Pelayanan KB yang berkualitas ditandai dengan tingkat komplikasi, ketidakberlangsungan dan kegagalan yang rendah atau berada dalam batas toleransi. Keberadaan sarana dan prasarana ini dibutuhkan khususnya untuk memberikan akses yang memadai kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan KB. Dalam pelaksanaannya, upaya memperluas jangkauan pelayanan dan mendekatkan tempat pelayanan medis KB kepada akseptor dilaksanakan di Rumah Sakit. Sedangkan, pelayanan non medis dilaksanakan melalui Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub-PPKBD.

**Tabel II-85 Sarana Pelayanan Keluarga Berencana di DIY Tahun 2010 – 2015**

Tahun	Klinik KB				
	PKBRS	Pemerintah	Swasta	PPKBD	Sub PPKBD
2010	45	162	88	5.277	27.378
2011	47	162	96	5.258	5.299
2012	54	165	124	438	5.296
2013	47	165	149	438	5.302
2014	45	166	174	438	5.316
2015	44	146	173	438	5.339

Sumber : BPS 2015

Keterangan :

a. PKBRS : Program KB Rumah Sakit

b. PPKBD : Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa

c. Sub PPKBD : Sub Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (tingkat dukuh/dusun)

Secara umum kecenderungan pelayanan KB di DIY yang dilakukan Klinik KB mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hanya pelayanan PKBRS yang mengalami penurunan pada tahun 2013-2016.

#### 8. Petugas Pelayanan Keluarga Berencana

Faktor lain yang juga menentukan keberhasilan pelayanan KB adalah petugas pelayanan KB. Pemerintah menargetkan tersedianya 100 bidan per 100.000 penduduk dan 40 dokter umum per 100.000 penduduk.

**Tabel II-86 Petugas Pelayanan Keluarga Berencana di DIY Tahun 2010 – 2014**

Tahun	Petugas			Jumlah
	Dokter	Bidan	PKB	
2010	545	1.197	273	2.015
2011	151	651	261	1.063
2012	152	680	257	1.089
2013	142	680	246	1.068
2014	145	667	245	1.057
2015	130	645	256	1.031

Sumber : BPS 2015

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah dokter dan Petugas KB jumlahnya fluktuatif dari tahun ke tahun. Sedangkan bidan mengalami penurunan tajam dari tahun 2010 sebesar 1.197 menjadi 651 pada tahun 2011, meskipun kemudian sedikit meningkat pada 2012 namun kembali menurun pada tahun 2013-2015. Pada tahun 2013 Pusdatin menemukan bahwa rasio tenaga dokter di DIY merupakan terbaik kedua nasional, yakni sebanyak 35,5 dokter umum per 100.000 penduduk.

#### 9. Tahapan Keluarga Sejahtera

Keberhasilan gerakan Keluarga Berencana (KB) kemudian berkembang menjadi program Keluarga Sejahtera. Kesejahteraan keluarga tidak hanya menyangkut kemakmuran, melainkan juga menyangkut ketentraman spiritual dan keharmonisan keluarga.

Pendataan Keluarga yang dilakukan oleh BKKBN membagi keluarga Indonesia ke dalam lima tahapan keluarga, yaitu Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III, dan Keluarga Sejahtera III Plus. Yang termasuk dalam tahapan Keluarga Pra Sejahtera selaku tahapan paling dasar Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya (*basic needs*), seperti kebutuhan akan pengajaran agama, sandang, pangan, papan, dan kesehatan. Sementara, yang termasuk dalam tahapan Keluarga Sejahtera III yang merupakan tahapan paling tinggi adalah keluarga yang dapat memenuhi 21-23 indikator pengembangan keluarga.

**Tabel II-87 Jumlah KK menurut Tahapan Keluarga Sejahtera di DIY Tahun 2010-2014**

No.	Tahapan Keluarga Sejahtera	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
		Jumlah KK	Jumlah KK	Jumlah KK	Jumlah KK	Jumlah KK
1.	PraS	187.277	225.823	225.823	222.299	267.571
2.	KSI	208.367	200.008	200.008	197.046	176.002

No.	Tahapan Keluarga Sejahtera	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
		Jumlah KK	Jumlah KK	Jumlah KK	Jumlah KK	Jumlah KK
3.	KSII	198.237	146.038	146.038	150.670	158.482
4.	KSIII	281.909	302.792	54.575	325.318	324.657
5.	KS III Plus	53.665	54.575	54.575	55.541	53.708
	Jumlah KK	929.455	929.455	929.236	950.875	980.420

Sumber : BKKBN DIY, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Keluarga Pra Sejahtera terus mengalami kenaikan, sedangkan Keluarga Sejahtera I cenderung mengalami penurunan. Namun kondisi ini juga diimbangi dengan meningkatnya jumlah Keluarga Sejahtera III.

#### 10. Program Bina Keluarga

Pemerintah mencanangkan program Bina Keluarga, yang terdiri tiga kategori, yakni: Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL).

Dalam program ini, keluarga difasilitasi untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran yang diperlukan dalam rangka membina tumbuh kembang balita, mendidik anak remaja yang benar, serta upaya-upaya mengembalikan peran keluarga dalam perawatan orang tua.

**Tabel II-88 Lembaga Bina Keluarga Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2013-2014**

Kabupaten/Kota	BKB				BKR				BKL			
	2013		2014		2013		2014		2013		2014	
Tahun	Jml BKB	Jml BKB P *)	Jml BKB	Jml BKB P *)	Jml BKR	Jml BKR P *)	Jml BKR	Jml BKR P *)	Jml BKL	Jml BKL P *)	Jml BKL	Jml BKL P *)
Kota Yogyakarta	240	48	244	38	75	46	73	16	98	29	101	60
Bantul	310	65	310	55	81	27	82	23	103	26	103	29
Kulon Progo	391	35	403	73	126	26	128	22	95	25	101	29
Gunungkidul	470	62	472	86	84	22	85	22	128	57	126	27
Sleman	219	69	230	69	255	61	155	44	210	52	210	62
Jumlah	1.630	279	1.659	321	621	182	523	127	634	159	641	207

Sumber Data : BPPM DIY diolah

Pada tahun 2014 BKB dan BKL di DIY mengalami pertumbuhan yang signifikan. Jumlah BKR tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 55 unit. Mengingat kompleksnya persoalan terkait penduduk usia remaja, penurunan jumlah BKR ini semestinya tidak terjadi. Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak ke masa dewasa. Upaya penguatan instansi pelaksana BKR dinilai perlu dilakukan mengingat dalam program ini diselenggarakan berbagai kegiatan pemberdayaan yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan orang tua sehingga dapat lebih terampil dan bijaksana dalam pengasuhan remaja.

##### II.3.1.2.9 Urusan Perhubungan

Sektor perhubungan berperan dalam mendukung mobilitas pergerakan orang dan/atau barang baik dalam wilayah maupun antar wilayah. Pergerakan orang dan/atau barang tersebut merupakan wujud dari interaksi antar masyarakat, baik selaku pribadi maupun kelompok/golongan. Untuk mendukung mobilitas orang/barang harus difasilitasi dengan adanya ketersediaan layanan angkutan umum yang memadai baik untuk orang

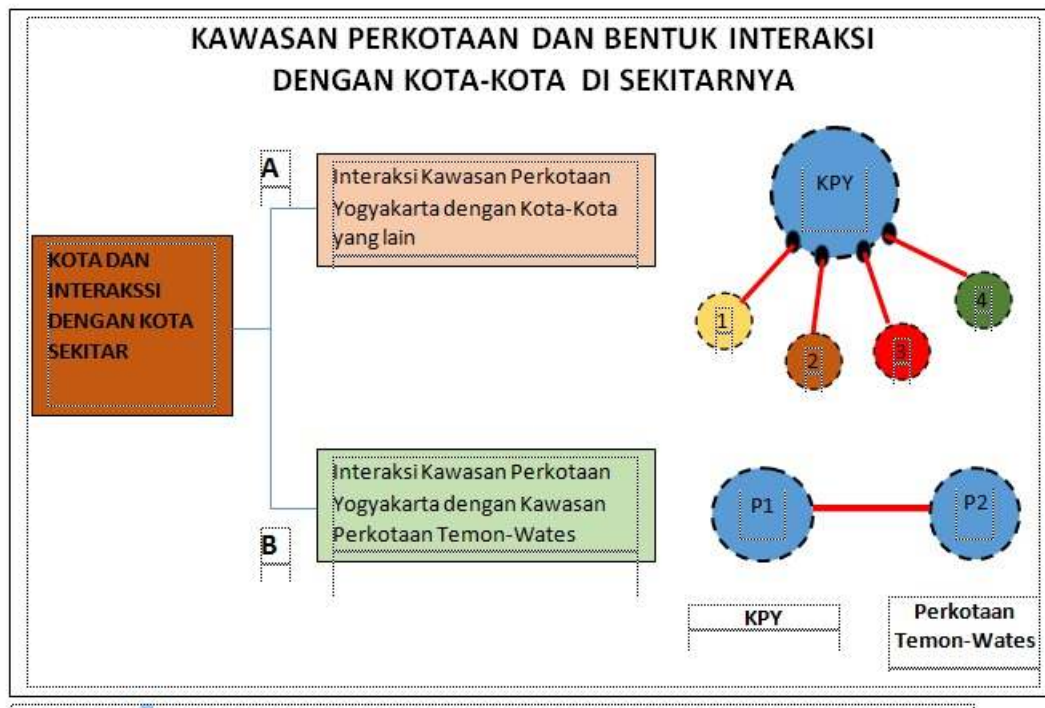
dan/atau barang. Hal ini dikarenakan ketersediaan prasarana jalan sebagai jaringan aksesibilitas antar wilayah di DIY, sudah sangat mencukupi.

Dalam konteks pembangunan di wilayah DI Yogyakarta, transportasi direncanakan tidak hanya sekedar mendukung pembangunan di DI Yogyakarta tetapi harus mampu menjadi bagian dari arah pembangunan di DI Yogyakarta, yang mengedepankan sektor wisata, pendidikan dan budaya. Artinya transportasi harus menjadi bagian dari pendidikan, wisata dan budaya.

Tujuan pembangunan urusan perhubungan tersebut memiliki 4 (empat) indikator besar yakni:

- a. Penyediaan Pelayanan Angkutan Umum;
- b. Penerapan manajemen lalu lintas perkotaan pada kawasan prioritas;
- c. Keselamatan Transportasi;
- d. Pengembangan dan Pengelolaan Simpul Transportasi dan Perparkiran.

Keempat indikator sasaran tersebut, mencerminkan hal besar yang menjadi fokus utama dalam penataan transportasi di Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni sistem transportasi di Perkotaan Yogyakarta yang ter-integrasi. Penataan sistem transportasi di Perkotaan Yogyakarta, dilandasi pada kondisi lalu lintas di Perkotaan Yogyakarta yang semakin didominasi oleh penggunaan kendaraan pribadi. Kemacetan lalu lintas sebagai akibat dari adanya mobilitas orang maupun barang masih menjadi persoalan utama bagi penataan dan pengaturan transportasi di Perkotaan Yogyakarta. Tingginya penggunaan kendaraan bermotor pribadi di jalan mengindikasikan bahwa penggunaan angkutan umum masih belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu, alternatif angkutan umum yang ada, masih sangat terbatas baik jumlah maupun jenis layanannya, sehingga menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi dengan pertimbangan waktu perjalanan yang lebih efektif dan efisien.



**Gambar II.60 Kawasan Perkotaan dan Bentuk Interaksi dengan Kota-Kota Di Sekitarnya**

Memperhatikan gambar di atas, dan rencana pembangunan kedepan, hubungan perkotaan di Daerah Istimewa Yogyakarta direncanakan dengan pengembangan interaksi kawasan perkotaan dengan kota-kota lain (model A), yaitu: 1) Perkotaan Yogyakarta sebagai pusatnya dan perkotaan Kulonprogo, Bantul, Sleman dan Gunung Kidul sebagai kota satelitnya. Atau 2) tidak menutup kemungkinan ada dua kutub yang masa kuat yaitu Perkotaan Yogyakarta dan Kawasan Perkotaan Temon-Wates sebagai kawasan pendukung Bandara Baru.

Transportasi perkotaan dikembangkan bukan berdasarkan moda tetapi sistem jaringan layanan transportasi secara menyeluruh, artinya pengembangan angkutan umum massal tidak hanya fokus pada moda utamanya saja tetapi juga dengan layanan feeder. Pada interaksi Kawasan Perkotaan Yogyakarta dengan kota-kota lain maupun dengan kawasan perkotaan Temon-Wates, pengembangan angkutan feeder salah satunya adalah dengan perkuatan perencanaan penyelenggaraan AKDP sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemda DIY. Dalam integrasi angkutan umum secara menyeluruh maka peran pemerintah Kabupaten untuk dapat menyelenggarakan angkutan pedesaan harus secara simultan dilakukan agar kinerja angkutan AKDP dapat berjalan optimal.

Jumlah kendaraan bermotor terdaftar di DIY pada tahun 2015 tercatat sebanyak 2.196.620 unit, naik 4,8% dari tahun 2014 yang berjumlah 2.096.005 unit dengan pembagian sebagai berikut : mobil penumpang (9,41%), mobil barang (2,78%), bus (0,53%), sepeda motor (87,25%) dan kendaraan khusus (0,03%).

Pengembangan angkutan umum di perkotaan DIY dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi perjalanan orang menggunakan angkutan pribadi yang pada akhirnya bertujuan untuk mengurangi kemacetan jalan. Trans Jogja adalah layanan angkutan umum yang

mengusung konsep “*Buy The Service*” diharapkan menjadi solusi transportasi umum masal di perkotaan DIY dengan telah dioperasikannya 128 armada dan 17 jalur pada tahun 2017.

Keberadaan layanan Trans Jogja dengan *konsep buy the service*-nya, tidak serta merta mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Tingginya angka kepemilikan kendaraan bermotor dan tidak adanya kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor di jalan, menyebabkan masyarakat masih leluasa untuk menggunakan kendaraan pribadi dalam melakukan aktifitas dan mobilitas mereka. Dengan kata lain, penyediaan sarana angkutan umum yang baik, tidak akan pernah berhasil jika tidak didukung oleh adanya pengaturan dan penataan manajemen rekayasa lalu lintas yang ber-sinergi pada layanan angkutan umum, termasuk didalamnya adalah mengurangi pergerakan kendaraan bermotor pribadi di jalan.

Pelayanan sistem transportasi multimoda telah dilakukan melalui pembangunan *park and ride* di wilayah DIY sebagai prasaranan perpindahan moda bagi pengguna Trans Jogja yang terintegrasi dengan moda transportasi lainnya. Sampai dengan saat ini telah dilaksanakan pembangunan *park and ride* di Gamping, Dongkelan, dan Prambanan. Sedangkan untuk kebutuhan lahan parker khususnya dalam rangka mendukung pariwisata telah dibangun 4 (empat) tempat khusus parkir yaitu

- 1) tempat khusus parkir Abu Bakar Ali;
- 2) tempat khusus parkir Ngabean
- 3) tempat khusus parkir Senopati
- 4) tempat khusus parkir XT Square

Untuk mempermudah pergerakan angkutan Trans Jogja dan mengatur pergerakan lalu lintas di persimpangan, pada tahun 2011 telah dikembangkan pengaturan lampu lalu lintas di persimpangan dengan konsep ATCS (*area traffic control systems*) dimana dalam konsep ATCS, beberapa persimpangan diatur dalam satu sistem dan saling berkoordinasi. Sampai dengan tahun 2016 telah terpasang 60 unit ATCS atau 53% dari 114 simpang yang direncanakan. Sistem pengaturan simpang dengan konsep ATCS ini, didukung dengan sinyal *buspriority*, sehingga memudahkan beberapa angkutan umum yang lewat untuk mendapatkan waktu hijau di persimpangan. Sampai saat ini terdapat 3 (tiga) simpang ATCS di Perkotaan Yogyakarta yang didukung sinyal *bus priority*. Integrasi sistem pengaturan lampu lalu lintas ini, dikendalikan dan dipantau sepenuhnya di Dinas Perhubungan DIY.

Sarana transportasi pada jalan raya di DIY dikelompokkan menjadi Angkutan umum perkotaan, AKDP dan Pedesaan. Angkutan perkotaan terdiri dari angkutan bus dengan sistem *Buy The Service* (Trans Jogja) dan angkutan perkotaan reguler. Pada tahun 2017 angkutan Umum Perkotaan dengan sistem *Buy The Service* akan melayani 17 jalur dan 128 armada. Penambahan armada terus dilakukan untuk menuju pelayanan ideal 167 armada.

**Tabel II-89 Data Kendaraan Angkutan AKDP DIY**

No	Nama Perusahaan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	KOP. ABADI	105	105	105	94	94	94
2	KOP. ABADI UNIT IMOIRI (MAHARDIKA)	21	14	14	13	13	-
3	PO. MAJU LANCAR	6	6	6	4	4	-
4	PO. PRATAMA	-	5	5	5	5	-
5	PO. BIROWO	10	10	10	5	5	5

No	Nama Perusahaan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
6	PO. JANGKAR BUMI	11	11	11	5	5	5
7	PO. TIRTO MULYO	-	9	9	9	)*	-
8	PO. JAYA SEHATI	5	5	5	5	5	5
9	PO. KUKUH	18	18	18	)*	)*	-
10	PO. KUKUH PLS	4	4	4	3	3	3
11	KOP. MENOREH	18	10	10	16	16	16
12	PO. MLIWIS	18	10	10	8	8	8
13	NIKKO PUTERA	55	49	49	49	49	49
14	KOP. PEMUDA KAB. SLEMAN	69	33	33	15	15	15
15	KOP. PEMUDA UNIT PRAMBANAN	-	-	-	50	50	33
16	KOP. PEMUDA Unit KALIURANG	85	67	67	47	47	47
17	KOP. MANUNGGAL	-	10	10	7	14	14
18	PT. PRAYOGO MUGI HARTONO	19	19	19	11	11	-
19	KOP. PRIMKOVERI	42	35	35	30	30	30
20	PO. PULUNG SARI	3	3	3	3	3	-
21	PO. RAWIT MULYO	18	17	17	13	13	13
22	KOP. RUKUN AGAWE SANTOSA (RAS)	26	12	12	2	2	2
23	PO. SARI MULYO	2	2	2	1	1	1
24	KOP. SARI MANUNGGAL	38	38	38	35	35	35
25	KOPERASI MANUNGGAL	-	7	7	7	)*	-
26	PO. SISWANTORO	4	4	4	5	5	5
27	PO. SUMBER REJEKI	6	6	6	6	6	6
28	PO. SUMBER MAKMUR	5	6	6	6	)*	-
29	PO. WOLU MULYO	4	4	4	3	)*	-
30	KOP. YOSAWA	89	89	89	78	78	78
31	KOP. ABADI UNIT KOPATEK	29	29	29	-	-	-
32	KOP. ABADI UNIT RIAS	41	41	41	-	-	-
33	KOP. ABADI UNIT PPKS	19	19	19	-	-	-
34	KOP. ABADI PASA	15	15	15	-	-	-
35	KOP. PRASOJO MARGO REJEKI	-	-	-	-	-	2
36	KOP. SAPTA MANUNGGAL	-	-	-	-	-	13
37	PT. PRATAMA BARU INDAH	-	-	-	-	-	5
<b>JUMLAH KENDARAAN</b>		<b>785</b>	<b>712</b>	<b>712</b>	<b>535</b>	<b>517</b>	<b>484</b>

Sumber : Dinas Perhubungan DIY

**Tabel II-90 Jumlah Angkutan Taksi**

No	Nama Perusahaan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	PT. MULIA ADI SARANA				25	25	25
2	PT. CENTRIS RAYA TAKSI	83	83	83	90	90	90
3	PT. WASTU MULYA CANDRA				25	25	25
4	PT. SEWU TRANS SEJAHTERA				25	25	25
5	KOP SETIA KAWAN	50	50	50	60	60	60
6	PT. RESTU INTAN ARMADA	25	25	25	35	35	35
7	KOP PRIMKOPPOLDA DIY	25	25	25	32	32	32
8	PT. INDRA KELANA	50	50	50	59	59	59
9	CV.AFDA				10	10	10
10	KOP. SADEWA	50	50	50	57	57	57
11	KOP. TAMBAYO	25	25	25	33	33	33
12	KOP. PRIMKOPAU II	85	85	85	90	90	90
13	PRIMKOP KARTIKA B-1/PAMUNGKAS	25	25	25	33	33	33
14	PT.PANCA SARANA ARMADA BARU	25	25	25	33	33	33
15	KOP. SERBA USAHA PATAGA	50	50	50	59	59	59
16	KOP. PANDAWA	50	50	50	57	57	57

No	Nama Perusahaan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
17	PT. ARGASURYA ALAMPERKASA	50	50	50	55	55	55
18	PT. JARI ALAM SUPATRA	87	87	87	95	95	95
19	PT. CITRA CANDRA PANCA	25	25	25	37	37	37
20	KOP. PUSKOVERI	69	69	69	82	82	82
21	KOP. KOKASINDO	25	25	25	33	33	33
<b>JUMLAH</b>		<b>799</b>	<b>799</b>	<b>799</b>	<b>1025</b>	<b>1025</b>	<b>1025</b>

Sumber : Dinas Perhubungan DIY

**Tabel II-91 Jumlah Angkutan Perkotaan**

No	Nama Perusahaan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	KOPATA	48	48	48	48	59	59
2	PUSKOPKAR	72	72	72	72	56	56
3	KOBUTRI	79	79	79	79	27	27
4	ASPADA	69	69	69	69	40	40
5	PERUM DAMRI	13	13	13	13	5	5
6	PT.JOGJA TUGU TRANS	54	54	54	54	74	74
<b>JUMLAH</b>		<b>335</b>	<b>335</b>	<b>335</b>	<b>335</b>	<b>261</b>	<b>261</b>

Sumber : Dinas Perhubungan DIY

**Tabel II-92 Jumlah Penumpang Perkotaan Terangkut Tahun 2008-2016**

No.	Tahun	Penumpang Terangkut		
		Trans Jogja		Reguler
		penumpang/hari	penumpang/tahun	penumpang/hari
1.	2008	5.172	3.785.964	
2.	2009	7.007	5.114.809	
3.	2010	7.993	5.834.976	
4.	2011	8.239	6.014.334	
5.	2012	8.720	6.382.802	
6.	2013	8.365	6.106.162	
7.	2014	8.913	6.506.290	
8.	2015	9.335	6.468.678	274
9.	2016	8.824	6.409.205	444

Sumber : Dinas Perhubungan DIY, Tahun 2017

Angkutan reguler di DIY terus mengalami penurunan jumlah penumpang dikarenakan kondisi armada yang sudah tidak ideal, baik dari segi sarana angkutan maupun mutu layanan sedangkan untuk angkutan pedesaan sampai dengan saat ini belum ada layanan yang menjangkau.

Terkait dengan transportasi berbasis jalan rel di DIY, saat ini DIY memiliki 5 stasiun dan 1 bengkel kereta api yaitu : Stasiun Tugu dan Stasiun Lempuyangan sebagai stasiun angkutan penumpang, Stasiun Maguwo sebagai pendukung terminal angkutan udara di Bandara Adisutjipto, Stasiun Sedayu sebagai terminal bongkar muat dan pergudangan, Stasiun Rewulu sebagai terminal khusus bahan bakar minyak, dan Balai Yasa Pengok sebagai bengkel kereta api.

Jalur eksisting kereta api di DIY meliputi koridor Timur – Barat sebagai bagian dari jalur perkeretaapian Selatan Jawa. Perencanaan dan pengembangan perkeretaapian di DIY meliputi pengembangan di jalur Timur – Barat dan Utara – Selatan, meliputi penetapan trase, kebutuhan lahan, dan penetapan lokasi stasiun dengan pengembangan jaringan kereta api penumpang di DIY pada jalur:

- 1) Bandara Kulon Progo – Kedundang – Yogyakarta – Brambanan
- 2) Bandara Kulon Progo – Parangtritis
- 3) Borobudur – Yogyakarta – Palbapang – Samas

#### **II.3.1.2.10 Urusan Komunikasi dan Informatika**

Informasi mempunyai peranan yang sangat penting bagi sebuah organisasi. Pemda DIY memiliki saluran informasi yang resmi melalui portal <http://jogjapro.go.id>. OPD DIY juga mempunyai berbagai saluran informasi melalui website instansi. Pemda DIY menggunakan berbagai aplikasi dan sistem informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan untuk menghasilkan informasi yang lebih cepat dan akurat dalam pelayanan publik maupun keperluan internal.

Pada tahun 2015, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menjalin kerjasama dengan Pemda DIY untuk menjadi Pilot Project pengembangan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) untuk Pemerintah Daerah di Indonesia.

SMKI merupakan suatu sistem manajemen dalam merancang, menerapkan, dan memelihara suatu rangkaian terpadu proses dan sistem untuk secara efektif mengelola keamanan informasi. Tujuan dari Sistem Manajemen Keamanan Informasi ini ada 3 macam, yaitu: (1) menjaga Kerahasiaan Informasi, (2) menjaga Integritas Informasi, dan (3) menjaga ketersediaan informasi. Secara tidak langsung, SMKI menjamin keberlangsungan informasi dari suatu organisasi. SMKI memiliki berbagai standar, dan salah satu standar yang populer dan digunakan secara internasional adalah ISO/IEC 27001:2013 *Information Security Management System*.

Dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi di Pemda DIY juga didesain pengembangan ekosistem kultural DIY berbasis digital berupa pengembangan sistem informasi berbasis multimedia terpadu yang berfungsi sebagai alat bantu untuk penyebaran informasi budaya, pariwisata, dan pendidikan pada khususnya, dan berbagai informasi pemerintah daerah pada umumnya kepada masyarakat. Sasaran yang akan diraih melalui pengembangan ekosistem kultural berbasis digital tersebut adalah memberdayakan dan mendorong pemerintah daerah, swasta dan seluruh lapisan masyarakat dalam menumbuhkan sinergi budaya, pariwisata dan pendidikan untuk mensukseskan perwujudan visi jangka panjang DIY sebagai pusat unggulan pendidikan, pariwisata, dan budaya se-Asia Tenggara.

Sistem tersebut akan menjadi infrastruktur para pemangku kepentingan budaya, pariwisata dan pendidikan daerah untuk melakukan kolaborasi, inventarisasi, pengolahan, hingga penyebaran/distribusi informasi dalam bentuk multimedia. Informasi tersebut untuk selanjutnya akan sangat berguna untuk kepentingan sosialisasi dan promosi, dapat disebarluaskan secara digital melalui berbagai *platform*, seperti videotron, kios interaktif, web, aplikasi ponsel, dan sebagainya sehingga jangkauan penyebaran informasi berpotensi menjadi lebih luas, lebih cepat dan lebih efektif.

Sampai dengan tahun 2016, Pemda DIY juga berupaya memanfaatkan teknologi informasi untuk membangun interaksi pemda dan masyarakat serta merespon berbagai masukan dari masyarakat melalui lini media sosial. Untuk memberikan layanan informasi terpadu tentang DIY, Pemda DIY telah membangun aplikasi 'Jogja Istimewa' yang bisa diakses melalui telepon pintar (*smart phone*). Beberapa ruang publik di Pusat Kota juga sudah dilengkapi dengan layanan wifi untuk akses internet warga serta kamera pengawas (CCTV) yang terintegrasi di layanan aplikasi 'Jogja Istimewa'.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai akselerator pembangunan akan bisa terwujud apabila infrastruktur TIK sebagai tempat berjalannya lalu lintas data, tersedia dengan baik. Saat ini ada lebih dari 2.700 komputer yang terhubung dengan Jaringan Pemda DIY di 119 titik/lokasi dari 147 titik yang rencana terkoneksi. Adapun jalur koneksi di 119 titik tersebut terdiri dari:

- a. 76 titik menggunakan jalur Fiber Optik (FO)
- b. 41 titik menggunakan jalur Wireless, termasuk 12 BTS
- c. 1 titik dengan koneksi kabel coaxial (Perpustakaan Malioboro)
- d. 1 titik menggunakan VPN (Kaperda Jakarta)

Sesuai rencana awal, pemasangan jaringan Fiber Optik hanya dilaksanakan pada instansi yang berada di dalam kota. Sampai pada tahun 2016 sudah terpasang sejumlah 76 titik dari target terpasang 73 titik. Untuk tahun mendatang diharapkan masih akan dapat membangun Fiber Optik di Kantor Samsat Sleman dan Balai Respira Bantul. Adapun pertimbangannya adalah kedua instansi tersebut nantinya akan dijadikan sebagai BTS jaringan wireless untuk instansi sekitar. BTS Respira bantul untuk mengampu jaringan wireless sampai Samsat Kulon Progo dan BTS Samsat Sleman untuk mengampu jaringan wireless di Panti Sosial Bina Remaja dan beberapa instansi di Kulon Progo dan Cangkingan Sleman.

Jaringan Fiber Optik sampai dengan tahun 2016 sudah terbangun sepanjang 63,1 km dengan rincian tahun 2013 sepanjang 12 km, tahun 2014 sepanjang 33,8 km, tahun 2015 sepanjang 16,3 km dan terakhir pada tahun 2016 dibangun sepanjang 1 km. Sedangkan untuk bandwidth internet, Pemda DIY pada tahun 2016 menggunakan dari 2 sumber ISP yaitu Sarana Insan Muda Selaras (JMN) dengan besaran bandwidth 190 Mbps dan dari Media Sara Data (G-Media) dengan besaran bandwidth 230 Mbps, total bandwidth yang tersedia sebesar 320 Mbps.

Adapun untuk alokasi bandwidth ke tiap instansi disesuaikan dengan kondisi perangkat komputer yang ada. Sementara itu untuk memberikan fasilitasi pelayanan publik tingkat desa/kelurahan berbasis teknologi informasi, maka tahun 2018 Pemda DIY mendesain pembangunan infrastruktur TI di Desa/Kelurahan dan fasilitasi hosting untuk wifi dalam pelayanan internet. Desain itu juga untuk mengintegrasikan informasi pemanfaatan APBDes dan Dana Desa serta Sistem Administrasi Kependudukan di tingkat Desa/Kelurahan untuk mendukung desain dan respon kebijakan di Pemerintah Daerah DIY.

Untuk pengelolaan dan pemanfaatan informasi, dilaksanakan beberapa program untuk meningkatkan pemberdayaan komunikasi dan layanan publik melalui diseminasi informasi diantaranya melakukan pendampingan terhadap 70 Lembaga Komunikasi Sosial (LKS) dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Untuk menunjang proses pengembangan

dan integrasi telah dibangun database dan sistem informasi yang memuat data LKS dan KIM di seluruh wilayah DIY. Pemberdayaan dan penguatan peran sumber daya informasi dan komunikasi diarahkan kepada komunitas masyarakat yang berbasis budaya dengan melakukan pembinaan terhadap 5 kelompok Seni Pertunjukan Rakyat. Darisisi pengelolaan informasi di pemerintah daerah, dilaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan fungsi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) diantaranya pembinaan 42 PPID pembantu, pengembangan aplikasi pelayanan informasi dan penyusunan SOP integrasi kehumasan SKPD se pemda DIY. Peningkatan proses pengelolaan informasi publik telah mengantarkan pemda DIY memperoleh peringkat ke-9 untuk pemeringkatan informasi publik dan Dinas Kominfo DIY sebagai SKPD terbaik se-pemda DIY untuk keterbukaan informasi publik.

### 1. Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik

Pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan indikator persentase penyelesaian sengketa informasi publik yang terfasilitasi dapat dilihat dari hasil Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017 dimana tindak lanjut yang dilakukan adalah penanganan beberapa sengketa informasi yang masuk. Dari periode Januari 2017 sampai dengan Juni 2017 tercatat ada 4 sengketa informasi yang ditangani dengan mayoritas obyek sengketa berupa pertanahan. Dari 4 sengketa informasi tersebut hasilnya adalah 2 (dua) putusan sela, 1 (satu) putusan dan 1 (satu) kesepakatan damai.

**Tabel II-93 Sengketa Informasi**

No	Termohon	No. Registrasi	Obyek	Keterangan
1	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DIY	001/I/KIDDIY-PS/2017	Pertanahan	Putusan Sela
2	Kepala Kantor Pertanahan Bantul	002/II/KIDDIY-PS/2017	Pertanahan	Putusan Sela
3	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DIY	003/IV/KIDDIY-PS/2017	Pertanahan	Putusan
4	Kepala Kantor Pertanahan Bantul	004/V/KIDDIY-PS/2017	Pertanahan	Kesepakatan Damai
5	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo	005/VIII/KIDDIY-PS/2017	Pertanahan	Putusan
6	Kepala Wisma dan Asrama Bukit Barisan di Yogyakarta	006/IX/KIDDIY-PS/2017	Anggaran	Putusan Sela
6	Kepala Desa Trironggo, Bantul, Bantul, Yogyakarta	007/X/KIDDIY-PS/2017	Pertanahan	Kesepakatan Damai

Sementara itu dari periode Juli 2017 sampai dengan Desember 2017 tercatat terdapat 3 sengketa informasi yang ditangani dimana hasilnya adalah dari 3 permohonan yang diajukan 1 (satu) menghasilkan putusan, 1 (satu) putusan sela dan 1 (satu) kesepakatan damai.

Selain itu Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menempati peringkat 9 nasional Keterbukaan Informasi Publik kategori Pemerintah Provinsi tahun 2017. Pemeringkatan yang dilakukan Komisi Informasi Pusat setelah melakukan monitoring dan evaluasi Badan Publik dalam berbagai kategori.

## 2. Sub Urusan Aplikasi Informatika

Sebagaimana tindak lanjut dari Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan subdomain untuk halaman daring informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjamin kedaulatan informasi di Pemerintah Daerah DIY dilaksanakan melalui pemanfaatan domain resmi website pemerintah daerah dimana masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang ada telah menggunakan domain resmi *jogjapro.go.id* dan juga penggunaan aplikasi-aplikasi berbasis web yang bisa diakses publik lainnya. Sampai dengan akhir tahun 2017 ada sekitar 130 domain web pemerintah daerah dan aplikasi daerah yang sudah menggunakannya.

### II.3.1.2.11 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

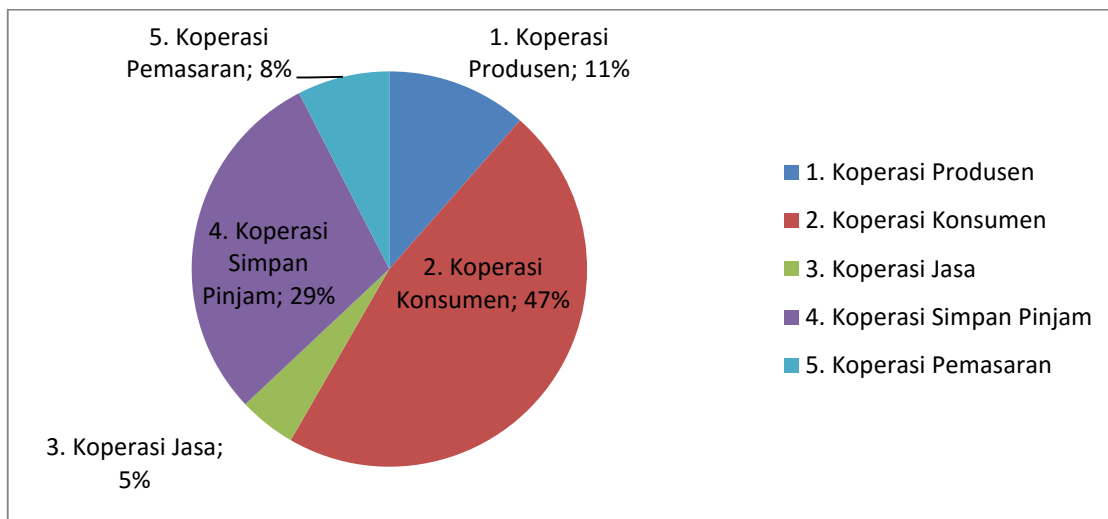
Selama tahun 2012-2016, jumlah koperasi di DIY mengalami pertumbuhan yang positif. Tercatat jumlah koperasi aktif pada tahun 2016 meningkat sebesar 58 unit (2,45%) dibanding tahun sebelumnya dengan jumlah koperasi aktif sebesar 2.369 unit. Jumlah koperasi aktif di DIY mencapai rasio 89% dari total koperasi di DIY. Jumlah koperasi pasif di DIY juga mengalami penurunan dari semula 316 unit pada tahun 2015 menjadi 311 unit pada tahun 2016, turun sebesar 1,58%. Perkembangan koperasi berdasarkan volume usaha dalam kurun waktu lima tahun terakhir juga mengalami pertumbuhan. Tercatat pada tahun 2016 pertumbuhan volume usaha koperasi mengalami pertumbuhan sebesar 874.253 Juta (24,29%).

**Tabel II-94      Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2012-2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Koperasi Aktif	2.090	2.176	2.269	2.369	2.427
Koperasi Tidak aktif	427	499	341	316	311
Koperasi Beku	-	58	-	-	-
Modal Sendiri (RpJuta)	1.015.396	1.440.948	594.124	1.318.800	1.135.942
Modal Luar (RpJuta)	572.156	572.159	830.210	2.320.866	1.835.173
Volume Usaha (RpJuta)	2.304.127	2.320.617	2.586.506	3.599.547	4.473.800

Sumber: Dataku Bappeda DIY, Tahun 2017

Dilihat dari klasifikasi koperasi berdasarkan jenis usaha, maka koperasi konsumen dimana anggotanya berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya merupakan jenis koperasi yang dominan di DIY. Di sisi lain, koperasi produsen yang merupakan koperasi penghasil barang/jasa justru hanya berkontribusi sejumlah 12,46% terhadap total jumlah koperasi DIY.



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2017 (diolah)

**Gambar II.61 Jumlah Koperasi Per Jenis Usaha DIY Tahun 2016**

Jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) di DIY tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 8.572 unit usaha (3,73%) dari semula 230.047 unit usaha pada tahun 2015 menjadi 238.619 unit usaha pada tahun 2016. Dilihat dari aspek jenis usaha, mayoritas Usaha Kecil Menengah (UKM) berasal dari sektor perdagangan dengan jumlah 68.054 unit usaha atau sebesar 28,52% dari total UKM di DIY, diikuti oleh sektor Industri Pertanian (27,18%), sektor Industri non Pertanian (22,60%). Persentase Jumlah UKM terkecil dimiliki oleh sektor aneka usaha sebesar 21,7%.

**Tabel II-95 Perkembangan Jumlah UKM Tahun 2012-2016**

No	Jenis Usaha	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Aneka Usaha	43.976	44.452	47.808	49.923	51.780
2	Perdagangan	58.363	58.601	63.026	65.610	68.054
3	Industri Pertanian	55.496	55.767	59.977	62.519	64.857
4	Industri Non Pertanian	46.160	46.390	49.892	51.995	53.928
	Jumlah	203.995	205.210	220.703	230.047	238.619

Sumber: Dataku Bappeda DIY, Tahun 2017

Koperasi dan UKM diharapkan menjadi penggerak perekonomian utama di DIY, mengingat mayoritas perekonomian di DIY didominasi oleh sektor koperasi dan UKM. Penumbuhan dan pengembangan koperasi perlu didorong pada sektor riil karena dapat mendukung upaya perluasan kesempatan kerja dan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk lokal. Sementara untuk sektor UKM diperlukan pendampingan, fasilitasi jejaring kemitraan dengan harapan dapat memperluas akses pemasaran dan meningkatkan kapasitas pelaku UKM.

Untuk meningkatkan skala usaha koperasi dan UKM, berbagai skema pembiayaan telah digulirkan baik oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Dana bergulir yang dikelola oleh sektor koperasi mencapai Rp 8.400.000.000. Sementara itu, dana bergulir yang disalurkan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) mencapai sejumlah Rp

50.000.000.000 dengan jumlah penerima sebanyak 48 koperasi. Untuk UMKM, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diterima oleh UMKM binaan sektor Koperasi dan UMKM mencapai Rp 10.211.400.000 dengan jumlah penerima 1.020 unit usaha. Meskipun penyaluran kredit sudah intensif dilakukan, namun realisasi tersebut masih dinilai rendah. Penyebab utama kesulitan pelaku usaha terutama UMKM dalam mengakses pembiayaan adalah pengelolaan usaha yang belum memenuhi kelayakan perbankan (*bankable*).

#### II.3.1.2.12 Urusan Penanaman Modal

Pertumbuhan ekonomi sebagai indikator kinerja perekonomian daerah didorong oleh pertumbuhan investasi. Dengan demikian, Pemerintah Daerah senantiasa mengupayakan iklim yang kondusif untuk investasi baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) yang berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja. Kegiatan investasi, terutama PMDN, diharapkan dapat mengutamakan penyerapan tenaga kerja lokal.

Kegiatan penanaman modal adalah tumbuhnya pusat-pusat kegiatan ekonomi baru. Secara tidak langsung, kawasan di sekitar lokasi kegiatan investasi diharapkan dapat ikut menikmati dampak adanya kegiatan ekonomi tersebut. Sementara itu, kegiatan PMA juga memiliki peran strategis dalam membawa teknologi baru ke DIY. Kegiatan PMA yang sering diikuti kehadiran tenaga kerja asing, mesin atau metode kerja modern diharapkan dapat memberikan pengetahuan teknologi industri baru di DIY.

Investasi DIY diutamakan untuk industri berbasis keunggulan lokal seperti pariwisata dan industri kreatif. Kegiatan investasi di DIY diupayakan untuk jenis kegiatan industri yang ramah lingkungan. Dengan demikian, investasi yang tumbuh di DIY diharapkan tetap sesuai dengan daya dukung lingkungan serta karakteristik masyarakatnya. Perkembangan investasi di DIY dalam kurun lima terakhir menunjukkan pertumbuhan yang positif baik PMA maupun PMDN. Tahun 2016 secara kumulatif total investasi tumbuh sebesar 7,61%. Total investasi di DIY sampai dengan tahun 2016 adalah Rp 12.077.661.664.802,- yang terdiri dari PMDN Rp.4.522.819.693.467,- dan PMA Rp. 7.554.841.971.335,-. Adapun jumlah Perusahaan yang merealisasikan investasi di DIY sejumlah 314 perusahaan, yang terdiri dari 164 PMA dan 150 PMDN dengan serapan tenaga kerja sebanyak 48.176 TKI dan 200 TKA.

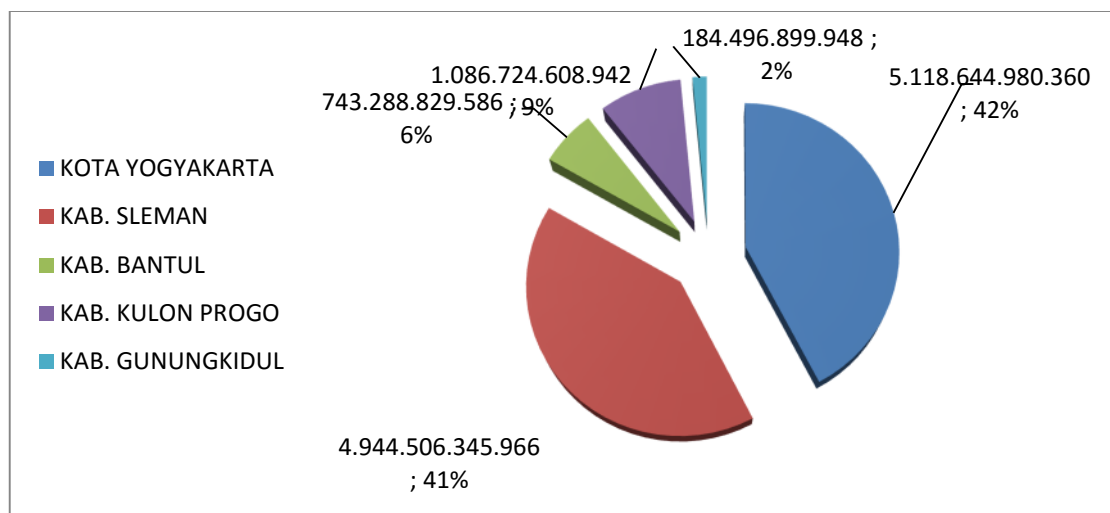
**Tabel II-96      Perkembangan Investasi di DIY**

Tahun	Investasi PMDN (Rp000)	Investasi PMA (Rp000)	Total Investasi (Rp000)	Growth (Rp000)	Investation Growth (%)
s.d2012	2.805.944.605	4.250.121.535	7.056.066.141	632.488.121	9,85
s.d2013	2.864.654.491	5.203.115.642	8.067.770.134	1.011.703.992	14,34
s.d2014	3.568.546.291	5.955.853.842	9.524.400.134	1.456.630.000	18,05
s.d2015	3.951.662.458	7.271.740.783	11.223.403.242	1.699.003.107	17,83
s.d2016	4.522.819.693	7.554.841.971	12.077.661.664	854.258.422	7,61

Sumber: Dataku Bappeda DIY, tahun 2017

Secara keseluruhan investasi di DIY pada tahun 2016 mengalami peningkatan, namun demikian masih terdapat ketimpangan penyebaran investasi tersebut. Investasi di DIY masih terkonsentrasi di Kota Yogyakarta (42%) dan Kabupaten Sleman (41%). Konsentrasi investasi

di kedua wilayah ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi keduanya yang berada di atas rata-rata provinsi. Jika investasi yang merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi masih terkonsentrasi di kedua wilayah ini, maka ketimpangan antar wilayah akan semakin melebar. Dengan demikian, permasalahan penyebaran investasi ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya dengan strategi penumbuhan pusat kegiatan ekonomi di wilayah Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul diharapkan dengan mempertimbangkan potensi ekonomi lokal.



Sumber: Dataku Bappeda DIY, Tahun 2017

**Gambar II.62 Persentase Realisasi Investasi Tahun 2016 per Kabupaten Kota**

#### II.3.1.2.13 Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan

Tujuan dari pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga adalah mewujudkan kondisi yang ideal bagi pemuda dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan potensi, bakat, dan minatnya melalui berbagai upaya untuk meningkatkan prestasi, meningkatkan peran aktif pemuda dalam masyarakat dan pembangunan, penguatan organisasi pemuda dalam pembinaan / pemberdayaan pemuda, pengembangan jiwa kewirausahaan dan kemandirian pemuda sehingga terbentuk sikap positif pemuda dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Guna mencapai tujuan pembinaan pemuda dan olahraga dapat tercapai di DIY, maka diperlukan sebuah sistem perencanaan pembangunan yang terstruktur dan terukur dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Mengacu pada UU Nomor 40 tahun 2009, perencanaan pembangunan kepemudaan dimaknai sebagai rencana pelayanan kepemudaan yang berfungsi untuk melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pembangunan kepemudaan di DIY tidak terlepas dari pedoman yang diatur dalam UU kepemudaan. Mengacu pada kebijakan tersebut, pembangunan kepemudaan DIY diarahkan pada pembangunan softskill dan hardskill pemuda. Pengembangan pemuda yang bersifat *character building* yang meliputi menumbuhkan kepemimpinan, patriotisme, dinamika,

semangat profesionalitas, dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat merupakan pengembangan softskill. Sedangkan pengembangan hardskill pemuda dilakukan dengan melakukan peningkatan kapasitas pemuda melalui pemberian pelatihan kewirausahaan dan ketrampilan bagi pemuda.

Olahraga adalah alat untuk melaksanakan tiga tujuan revolusi Indonesia, yaitu: Negara Kesatuan RI yang kuat, masyarakat adil dan makmur, dan tata dunia baru. Dengan kata lain, olahraga adalah alat untuk melaksanakan ampera (amanat penderitaan rakyat). Olahraga akan menjadi lokomotif ekonomi baru. Banyak atlet nasional maupun internasional yang lahir dari DIY, yaitu antara lain Yayuk Basuki (atlet legendaris bidang tenis), Rita Subowo (atlet legendaris basket), Winarsih, Ivana Ardella Irmanto (Wushu), Felicia Alverina Monindra (Wushu) dan lain-lain.

Sarana dan prasarana kegiatan pemuda dan olahraga yang sangat potensial untuk pengembangan olahraga ke depan antara lain adalah Mandala Krida, Youth Center, Amongrogo, Pondok Pemuda Ambarbinangun, GOR Sorowajan, dan Graha Bakti Wanayasa. Sarana olahraga berjumlah 285 buah. Jumlah club olahraga pada tahun 2016 terdapat 178 buah.

PON Remaja mempertandingkan 15 cabang olahraga yang meliputi atletik, bola basket, bola voli pantai, bulutangkis, judo, panahan, pencak silat, renang, senam (artistik dan ritmik), sepakbola, tenis lapangan, tenis meja, loncat indah, anggar, dan menembak. Sebagai hasil dari PON Remaja I, DIY meraih peringkat 9 dengan total perolehan medali sebanyak 14 medali yang terdiri dari 3 medali emas, 6 medali perak, dan 5 medali perunggu.

**Tabel II-97 Jumlah Kelembagaan Pemuda dan Olah Raga dan Sarana Olah Raga di DIY**

Uraian	Tahun					Satuan
	2012	2013	2014	2015	2016	
Organisasi Kepemudaan	35	37	39	40	40	Buah
Jumlah Karang Taruna	440	440	440	440	440	Buah
Jumlah Organisasi Olahraga	50	50	50	50	50	Buah
<b>Sarana Olahraga</b>						
1) Standar Internasional	0	0	0	0	0	Unit
2) Standar Nasional	3	3	3	3	3	Unit

Sumber : Disdikpora DIY, 2016

#### II.3.1.2.14 Urusan Statistik

Ketersediaan data dan informasi yang andal dan terpercaya adalah salah satu kunci keberhasilan sebuah perencanaan. Data dan informasi yang berkualitas menjadi sumber informasi tentang kondisi berbagai hal yang dapat diketahui oleh pihak-pihak terkait dalam memahami permasalahan dan tantangan. Hal itu memberikan andil penting dalam merancang kebijakan maupun dalam melakukan pemantauan dan evaluasi agar sasaran untuk memperbaiki keadaan maupun mengatasi masalah yang ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Pengumpulan sampai dengan penyediaan data dan informasi itu merupakan aspek penting dalam pembangunan pada urusan Statistik.

Jenis statistik terdiri dari statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Penyelenggaraan statistik dasar dilakukan oleh BPS sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997. Sementara itu, statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi

pemerintah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya baik secara mandiri maupun bersama dengan BPS.

Bappeda DIY merupakan instansi Pemda DIY yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistic. Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, khususnya jenis statistik sektoral, Bappeda melakukan koordinasi dengan BPS, instansi vertikal lain dan SKPD provinsi/kabupaten/kota di DIY. Penyelenggaraan kegiatan statistik ini dituangkan dalam program Pengembangan Statistik Daerah serta Pengelolaan Data dan Statistik Daerah yang dilaksanakan secara teknis oleh Balai Statistik Daerah yang merupakan Unit Pelayanan Teknis (UPT) dari Bappeda DIY.

#### **II.3.1.2.15 Urusan Persandian**

Pelaksanaan Sistem Sandi Negara (Sisdina) pada tahun 2012 sudah tergelar Jaring Komunikasi Sandi (JKS) antar pemerintah provinsi se Indonesia dan Pemerintah, sedangkan Sisdina di lingkungan Pemerintah DIY tergelar antara Unit Teknis Persandian (UTP) dengan UTP di kabupaten/kota se-DIY serta UTP Jajaran persandian Muspida yang meliputi :

1. Jajaran Pemerintah Daerah Provinsi se Indonesia
2. Jajaran Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota se-DIY;
3. Jajaran TNI meliputi TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU, dan AAU;
4. Jajaran POLDA;
5. Jajaran Kejaksaan Tinggi.

Untuk mewadahi personil sandi di DIY dan Jawa Tengah, telah dibentuk Forum Komunikasi Sandi (Forkomsanda Jateng DIY), khusus Forkomsanda DIY secara rutin melaksanakan pertemuan setiap 3 bulan sekali untuk membahas segala permasalahan persandian yang ada, sedangkan untuk tempat pelaksanaan dilaksanakan secara bergiliran. Namun disayangkan, pelaksanaan operasional persandian pada Pemerintah DIY sebagai sarana pengamanan informasi belum dimanfaatkan secara optimal di lingkungan Pemerintah DIY.

#### **II.3.1.2.16 Urusan Kebudayaan**

Kemajuan peradaban sangat terkait dengan aset kebudayaan yang dimiliki masyarakat dan bagaimana upaya untuk memelihara dan mengembangkannya. DIY telah menunjukkan upaya tersebut dengan komitmen untuk menjadikan kebudayaan sebagai payung dan arus utama dalam pembangunan di segala bidang.

Gambaran umum kondisi eksisting sumber daya kebudayaan DIY yang tersebar di seluruh kabupaten/kota menunjukkan perpaduan harmonis alam yang terbentang dari Gunung Merapi hingga Pantai Selatan dengan budaya masyarakat DIY yang berasal dari multikultural yang terbentuk dalam perjalanan lintas sejarah sejak zaman Prasejarah, Mataram Klasik, Mataram Islam, Kolonialisme, Kontemporer.

**Tabel II-98      Perkembangan Aset-Aset Kebudayaan di DIY Tahun 2010-2016**

Aspek	Satuan	Capaian						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah kunjungan museum	Orang	575.000	623.500	1.375.000	1.636.000	1.636.000	1.840.000	2.000.000
Jumlah Organisasi Budaya berkategori maju	Organisasi	36	38	40	54	61	87	90
Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Buah	214	220	536	1.015	1.011	1.014	1.165
Jumlah Gelar Seni Budaya	Kali	790	920	980	1.025	1.200	1.275	1.350
Jumlah Desa Budaya berkategori Maju	Desa	6	8	12	12	14	17	22
Jumlah Dokumen seni Budaya dan karya seni yang dilestarikan	Dokumen	91	104	120	120	120	120	120
Jumlah sumber sejarah yang dikelola	Sumber sejarah	300	500	700	700	700	700	700
Jumlah Gedung Seni Budaya	Gedung	94	94	96	107	107	107	107
Peristiwa Sejarah	kali	94	94	94	95	103	130	130
Pelaku Sejarah	orang	n/a	16	16	22	22	21	21
Ceritera Rakyat	buah	n/a	n/a	n/a	33	33	33	33
Naskah Kuno	buah	n/a	n/a	n/a	509	509	509	509
Upacara Adat	buah	358	358	447	459	459	473	475
Upacara Tradisi	buah	34	34	34	35	35	35	35
Organisasi Kepercayaan	buah	90	90	90	94	94	115	119
Motif Batik	buah	n/a	n/a	n/a	185	185	185	185
Motif Lurik	buah	n/a	n/a	n/a	64	64	64	64
Kerajinan Property Budaya	buah	178	178	178	246	241	244	244

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY

Dilihat dari zamannya, sumber sejarah dibedakan dalam sumber sejarah kuno, sumber sejarah masa Kerajaan Islam, sumber sejarah zaman Kolonial, dan sumber sejarah kontemporer (sekarang). Sumber sejarah yang dikelola sampai tahun 2014 sebanyak 700 macam yang tersimpan di beberapa tempat antara lain di Keraton, Puro Pakualaman, museum-museum, Perpustakaan Daerah DIY, Perpustakaan Biro Hukum. DIY yang menyandang julukan sebagai kota perjuangan, kota budaya, kota pendidikan menyimpan banyak sumber sejarah dalam berbagai jenisnya, yaitu sumber sejarah artefak (kebendaan seperti arsip, rekaman-rekaman, prasasti, foto, gua, candi, monumen, koin, dan lain-lain), sumber sejarah tertulis (babad, kitab, serat, naskah-naskah, surat resmi pemerintahan, peraturan-peraturan dari zaman klasik hingga kontemporer, majalah, koran, dan lain-lain), sumber sejarah lisan (kisah yang diemban para tokoh-tokoh sejarah yang hidup pada zamannya), dan sumber sejarah sosial kemasyarakatan (berupa *folklore*, dongeng, karya sastra, legenda, cerita rakyat, dan lain-lain). Sumber sejarah tersebut akan menjadi bukti kebenaran sejarah, dan apabila dirangkai akan menjadi mozaik sejarah peradaban di DIY.

Museum sebagai mozaik sejarah peradaban masyarakat menyebar di sebagian besar di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo masih memerlukan perhatian khusus untuk pendirian museum yang representatif bagi daerah. Menurut catatan, di DIY telah berkembang sekitar 42 museum atau sekitar 15% dari museum di Indonesia baik yang sudah dikenal masyarakat maupun belum

pernah dikenal. Museum Negeri Sonobudoyo merupakan salah satu museum tertua dan terbanyak koleksinya di Indonesia.

Museum Sonobudoyo merupakan museum yang memiliki koleksi terlengkap kedua di tingkat nasional setelah Museum Nasional, terdiri dari koleksi geologi, biologi, etnografi, arkeologi, historika, numismatika, filologika, keramologika, senirupa, teknologi. Saat ini benda koleksi Museum Negeri Sonobudoyo sebanyak 43.235 buah, sudah diinventarisir sejumlah 11.031 buah (25,51%), belum diinventarisir sejumlah 32.204 buah (74,48%). Koleksi yang dipamerkan pada ruang Pameran tetap di Museum Negeri Sonobudoyo unit I sebanyak 1.184 buah. Koleksi yang dipamerkan pada ruang Pameran tetap di Museum Negeri Sonobudoyo Unit II sebanyak 810 buah.

Dari sekian banyak museum tersebut, baru 36 museum yang masuk Barahmus, dan baru 40% yang memiliki standar pelayanan yang baik. Dua museum yang diproyeksikan sebagai museum internasional adalah Museum Ullen Sentalu dan Museum Sonobudoyo. Museum merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan pemahaman dan penanaman nilai-nilai budaya luhur kepada masyarakat.

Kerjasama kebudayaan yang telah diwujudkan sebagai media diplomasi budaya antara lain adalah: pembangunan dan peresmian rumah joglo di Slovenia, pemberian seperangkat gamelan yang diberi nama “Jali Roso” untuk National Concert Hall Dublin, misi kebudayaan ke Denizli International Festival di Turki, dan misi-misi kebudayaan di beberapa negara lain yang sudah memiliki perjanjian kerjasama antara lain Canberra, Suriname, Nanning (China), dan Tokyo.

**Tabel II-99 Jumlah Peninggalan Sejarah Kepurbakalaan, 2012-2016**

Jenis Data	2012	2013	2014	2015	2016
Cagar Budaya yang ditetapkan	517	517	588	588	588
Bangunan Cagar Budaya	520	947	877	881	1042
Benda Cagar Budaya	747	762	763	764	807
Kawasan Cagar Budaya	16	16	16	16	17
Situs	95	176	184	184	339
Monumen Sejarah Perjuangan	44	52	65	70	70
Museum	42	42	43	47	47
Pelaku sejarah	16	22	22	21	21
Peristiwa Sejarah	94	95	95	130	130
Naskah Kuno	n/a	509	509	509	509

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2016

**Tabel II-100 Penanganan Cagar Budaya**

Aspek	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah benda, bangunan, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	225	230	412	422	432
Total benda, bangunan, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki	1.410	1.446	1.824	1845	2205

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2016

Kemunculan bangunan baru di dalam Kawasan Cagar Budaya mempunyai segi yang bersifat positif maupun negatif. Bersifat positif karena merupakan fasilitas pelengkap yang

penting bagi perekonomian dan pariwisata, bersifat negatif jika kemunculannya tidak terkendali.

Perpaduan yang harmonis antara representasi masa klasik, masa sekarang, dan masa lalu akan menghasilkan Renaisans Yogyakarta. Renaisans Yogyakarta menuju masyarakat yang berperadaban baru dengan mengandalkan kekuatan kebudayaan perlahan-lahan menemukan titik simpulnya dengan kesadaran dan kemauan bersama untuk mempertahankan tanda-tanda kejayaan Yogyakarta di masa lalu sebagai bahan pembelajaran kepada generasi penerus dan masyarakat dunia tentang mozaik peradaban Yogyakarta yang menyemesta. Semangat *golong gilig* dan *manunggaling kawula lan gusti* telah mendasari pelaksanaan amanah-amanah yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta. Proses cipta, rasa. Karsa dan karya yang dihasilkan oleh para leluhur yang pernah mengenyam hidup di Yogyakarta berpadu dengan kreativitas dan inovasi antar generasi memperkaya dan menambah keragaman budaya di Yogyakarta.

Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyusun Cetak Biru Pembangunan Kebudayaan yang dapat menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan kebudayaan. Kepeloporan DIY dalam penyusunan kebijakan DIY dapat dibuktikan dengan keberhasilannya menerjemahkan Revolusi Mental dalam Nawacita ke dalam kebijakan pembangunan segala bidang di DIY yang berpayunhukum pada kebudayaan. Pasca dilaksanakannya UU Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta telah meningkatkan proses pembangunan kebudayaan di DIY. Hingga saat ini telah banyak perkembangan yang dihasilkan oleh DIY.

Berdasarkan hasil inventarisasi potensi seni budaya yang telah dilakukan pada tahun 2012 – 2016 terlihat bahwa jumlah potensi seni budaya di wilayah DI Yogyakarta terus mengalami perubahan maupun mengalami penambahan seiring dengan aktivitas di bidang seni budaya yang dilakukan oleh masyarakat.

Kabupaten Bantul memiliki keunggulan potensi kesejarahan, kepurbakalaan, dan tokoh seniman dan budayawan yang relatif banyak dengan oleh adanya institusi pendidikan di bidang seni

Jejak-jejak sejarah semenjak zaman prasejarah hingga kontemporer masih dapat dilihat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kehidupan manusia-manusia purba pernah terjadi di pegunungan selatan Yogyakarta. Tidak semua masyarakat yang pernah berdiam di DIY meninggalkan sisa-sisa warisan hasil perjuangan hidup pada masanya yang masih dapat dilihat pada saat ini. Simbol-simbol eksistensi dan kejayaan tersebut belum tentu bertebaran pada satu kesatuan geografis tertentu, namun dapat diklasifikasikan ke dalam situs, struktur, benda, bangunan maupun kawasan yang dalam bahasa UU No 11 Tahun 2010 disebut sebagai cagar budaya. Cagar budaya sangat bernilai bagi kemajuan kebudayaan itu sendiri, ilmu pengetahuan, sosial ekonomi dan bahkan politik.

Runtutan masa dari prasejarah, Hindu, Budha, Islam, Cina, masa kolonialisme Belanda dan Inggris hingga kemerdekaan meninggalkan cagar budaya yang beragam dengan karakteristik cagar budaya masing-masing. Saat ini tersedia sarana kebutuhan sehari-hari manusia yang ditinggalkan para leluhur. Contohnya : istana, masjid, gereja, candi, vihara, pabrik, perguruan tinggi, taman pendidikan.

Kepeloporan DIY dalam penyusunan kebijakan pelestarian cagar budaya dapat dilihat dari telah dijabarkannya UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ke dalam Peraturan

Daerah dan Peraturan Gubernur. Upaya pelestarian cagar budaya di DIY diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya yang dijabarkan ke dalam Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya, Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Budaya Daerah, Pergub DIY No. 55 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cagar Budaya, Pergub DIY No. 56 Tahun 2014 tentang Penghargaan Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya. Pelestarian kawasan cagar budaya ini juga diperkuat oleh UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta, Perda No 1 Tahun 2013.

Undang-Undang No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mensyaratkan adanya Tim Ahli Cagar Budaya yang melakukan pengkajian sebelum menetapkan suatu satuan geografis tertentu untuk menjadi cagar budaya. Tim Ahli Cagar Budaya sudah terbentuk di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Cagar budaya di DIY yang berupa bangunan cagar budaya, benda cagar budaya, kawasan cagar budaya, situs, tanpa struktur budaya dapat diindikasikan berjumlah 2.205 buah. Masih dimungkinkan penemuan-penemuan kembali cagar budaya, namun ancaman terhadap keberadaan cagar budaya tersebut tentu juga besar.

Berbagai peristiwa sejarah pun baik yang sifatnya nasional maupun kedaerahan telah terjadi di DIY. Setiap catatan peristiwa bersejarah tertuang dalam naskah-naskah baik yang berbahasa Jawa Kuno maupun bahasa Belanda tersimpan di berbagai perpustakaan di DIY seperti Perpustakaan Keraton, Puro Pakualaman, Museum Sonobudoyo, Perpustakaan Daerah, Kantor Arsip, dan lainnya. Saksi-saksi sejarah atas berbagai tema kesejarahan belum semuanya terekam cerita-ceritanya.

**Tabel II-101 Jenis Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Tahun 2012-2016**

Jenis Data	2012	2013	2014	2015	2016
Cagar Budaya yang ditetapkan	517	517	588	588	588
Bangunan Cagar Budaya	520	947	877	881	1042
Benda Cagar Budaya	747	762	763	764	807
Kawasan Cagar Budaya	16	16	16	16	17
Situs	95	176	184	184	339
Monumen Sejarah Perjuangan	44	52	65	70	70
Museum	42	42	43	47	47
Pelaku sejarah	16	22	22	21	21
Peristiwa Sejarah	94	95	95	130	130
Naskah Kuno	n/a	509	509	509	509

Sumber: [www.jogjabudaya.com](http://www.jogjabudaya.com) (Dinas Kebudayaan), Barahmus

**Tabel II-102 Persebaran Benda, Bangunan, dan Situs Cagar Budaya Tahun 2016**

No	Kabupaten/Kota	Bangunan Cagar Budaya	Benda Cagar Budaya	Situs	Kawasan Cagar Budaya	Total
1	Kota Yogyakarta	674	50	9	10	743
2	Kabupaten Bantul	108	275	65	3	451
3	Kabupaten Gunungkidul	99	93	127	1	320
4	Kabupaten KulonProgo	53	84	49	0	186
5	Kabupaten Sleman	108	290	89	3	490
	Belum diidentifikasi		15			
	DIY	1042	807	339	17	2205

Sumber: [www.jogjabudaya.com](http://www.jogjabudaya.com) (Dinas Kebudayaan), 2017

**Tabel II-103 Penanganan Cagar Budaya Tahun 2012-2016**

Aspek	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah benda, bangunan, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	536	1015	1011	1014	1165
Total benda, bangunan, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki	1.410	1.446	1.824	1845	2205

Sumber: [www.jogjabudaya.com](http://www.jogjabudaya.com) (Dinas Kebudayaan)

Satuan geografis potensial kawasan cagar budaya di DIY terdapat sekitar 21-an kawasan, namun belum semuanya diintervensi secara intensif. Pada tahun 2011 Pemda DIY melalui SK Gubernur No 186/Kep/2011 menetapkan Kawasan Cagar Budaya yang masuk kewenangan provinsi yaitu antara lain : Kraton, Puro Pakualaman, Malioboro, Imogiri, Kotagede, Kotabaru yang mewakili masa peradaban klasik Islam, tradisional Jawa, kolonialisme, Pecinan.

**Tabel II-104 Daftar Kawasan Cagar Budaya di DIY**

No	Kawasan Cagar Budaya	Kabupaten/Kota	SK Penetapan
1	Kawasan Kraton	Yogyakarta	SK Kadis. No. 188/38.A
2	Kawasan Malioboro	Yogyakarta	SK Kadis. No. 188/38.A
3	Kawasan Pakualaman	Yogyakarta	SK Kadis. No. 188/38.A
4	Kawasan Kotagede	Yogyakarta dan Bantul	SK Kadis. No. 188/38.A
5	Kawasan Kotabaru	Yogyakarta	SK Kadis. No. 188/38.A
6	Kawasan Imogiri	Bantul	SK Kadis. No. 188/38.A
7	Kawasan Parangtritis	Bantul	SK Kadis. No. 188/38.A
8	Kawasan Pleret	Bantul	SK Kadis. No. 188/38.A
9	Kawasan Jetis	Yogyakarta	SK Kadis. No. 188/38.A
10	Kawasan Pengok	Yogyakarta	SK Kadis. No. 188/38.A
11	Kawasan Baciro	Yogyakarta	SK Kadis. No. 188/38.A
12	Kawasan Prambanan	Sleman	SK Kadis. No. 188/38.A
13	Kawasan Ratu Boko	Sleman	SK Kadis. No. 188/38.A
14	Kawasan Sokoliman	Gunungkidul	SK Kadis. No. 188/38.A
15	Kawasan Ambarbinangun	Yogyakarta	
16	Kawasan Bintaran	Yogyakarta	
17	Kawasan Ambarketawang	Sleman	

Sumber: [www.jogjabudaya.com](http://www.jogjabudaya.com); Dinas Kebudayaan DIY

Museum sebagai kekuatan keistimewaan, sebagai nafas keistimewaan, menguatkan keistimewaan, dan jati diri bangsa. DIY berkontribusi pada perkembangan permuseuman nasional, 14 % museum di Indonesia berada di Yogyakarta. Museum Negeri Sonobudoyo merupakan museum tertua kedua setelah Museum Radya Pustaka Surakarta dan terbanyak koleksinya kedua setelah museum nasional. Museum Negeri Sonobudoyo direncanakan menjadi museum internasional. Revitalisasi museum negeri Sonobudoyo dilakukan secara multiyears. Museum di DIY cenderung bertambah walaupun banyak menemui permasalahan dalam aspek kelembagaan pengelola dan SDM. Sampai tahun 2016 tercatat ada 47 museum dan 3 semi museum yang tersebar sebagian besar di wilayah Sleman (16 museum), Kota Yogyakarta (19 museum) dan Bantul (10 museum), Kabupaten Gunungkidul (1 museum) dan

Kulon Progo (1 museum).masih jarang ditemukan museum. Asosiasi yang beranggotakan museum-museum di DIY disebut BARAHMUS, sebagai paguyuban museum tertua di Indonesia. Saat ini sejumlah 33 museum telah menjadi anggota BARAHMUS.

**Tabel II-105 Daftar Museum Anggota Bahramus DIY**

No	Nama Museum	Lokasi	Jenis	Status	Kategori
1	Bebadan Museum Karaton Ngayogyakarta	Kota	Khusus	Bebadan	Budaya
2	Museum Negeri Pemda DIY Sonobudoyo	Kota	Umum	Negeri	Budaya
3	Bebadan Museum Pura Pakualaman	Kota	Khusus	Bebadan	Budaya
4	Museum Batik Yogyakarta	Kota	Khusus	Swasta	Budaya
5	Museum Affandi	Sleman	Khusus	Swasta	Budaya
6	Museum Ullen Sentalu	Sleman	Khusus	Swasta	Budaya
7	Museum Wayang Kekayon Yogyakarta	Bantul	Khusus	Swasta	Budaya
8	Museum Tani Jawa Indonesia	Bantul	Khusus	Swasta	Pendidikan
9	Tembi Rumah Budaya	Bantul	Khusus	Swasta	Budaya
10	Museum Pendidikan & Mainan Kolong Tangga	Kota	Khusus	Swasta	Pendidikan
11	Museum Bahari	Kota	Khusus	Swasta	Pendidikan
12	Museum Biologi	Kota	Khusus	Negeri	Pendidikan
13	Museum Dewantara Kirti Griya	Kota	Khusus	Swasta	Perjuangan
14	Museum KRKB Gembira Loka	Kota	Khusus	Swasta	Pendidikan
15	Museum Dr Yap	Kota	Khusus	Swasta	Pendidikan
16	Museum Peta	Sleman	Khusus	Negeri	Pendidikan
17	Museum Pendidikan Indonesia UNY	Sleman	Khusus	Negeri	Pendidikan
18	Museum Geoteknologi Mineral UPN Veteran Yogyakarta	Sleman	Khusus	Negeri	Pendidikan
19	Museum Gunung Merapi	Sleman	Khusus	Negeri	Pendidikan
20	Museum Gumuk Pasir /Lab Geospasial	Bantul	Khusus	Negeri	Pendidikan
21	Museum Wanagama	Gunungkidul	Khusus	Negeri	Pendidikan
22	Museum Benteng Vredeburg	Kota	Khusus	Negeri	Perjuangan
23	Museum Sasmitaloka Pangsar Sudirman	Kota	Khusus	Negeri	Perjuangan
24	Museum Pusat TNI AD Dharma Wiratama	Kota	Khusus	Negeri	Perjuangan
25	Museum Monumen Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia	Sleman	Khusus	Swasta	Perjuangan
26	Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala	Sleman	Khusus	Negeri	Perjuangan
27	Museum Perjuangan	Kota	Khusus	Negeri	Perjuangan
28	Museum Sandi	Kota	Khusus	Negeri	Perjuangan
29	Museum Monumen Pahlawan Pancasila Kentungan	Sleman	Khusus	Negeri	Perjuangan
30	Museum Monumen Yogya Kembali	Sleman	Khusus	Swasta	Perjuangan
31	Museum Monumen Pangeran Diponegoro Sasana Wiratama	Kota	Khusus	Negeri	Perjuangan
33	Museum Sejarah Purbakala Pleret	Bantul	Khusus	Negeri	Budaya

Sumber : Barahmus,2015

**Tabel II-106 Daftar Museum Baru di DIY**

No	Nama Museum	Lokasi
1	Museum Rumah Garuda	Bantul
2	Museum Memorial HM Soeharto	Bantul
3	Museum Taman Wisata Candi Prambanan	Sleman
4	Museum Gempa Prof DR Sarwidi	Sleman
5	Museum Ull Candi Kimpulan	Sleman
6	Museum Paleoantropologi UGM	Sleman
7	Museum Sumber Karahayon	Bantul
8	Museum Batik Ciptowening Imogiri	Bantul
9	Museum Kulon Progo	Kulon Progo
10	Museum Istana Negara Gedung Agung	Kota
11	Museum Tino Sidin	Bantul
12	Museum MMTC	Sleman
13	Museum Taman Pintar Yogyakarta	Kota
14	Museum Gedung BI	Kota

Sumber: Barahmus, 2015

Perjuangan pengembangan museum masih memerlukan strategi yang tepat karena diindikasikan berbagai persoalan yang mengurangi daya tarik dan daya saing museum sebagai tempat tujuan kunjungan yang favorit bagi semua lapisan masyarakat, yaitu sebagai berikut: citra Museum yang masih rendah, museum masih dianggap sekedar memelihara barang tidak terpakai atau sekedar menjadi gudang penyimpanan, museum disejajarkan obyek wisata alam atau wisata lainnya, banyak museum kekurangan anggaran operasional, belum adanya standar pelayanan, kurangnya informasi keberadaan museum, belum terpadunya aspek pembelajaran museum dengan kurikulum di sekolah, belum adanya kebijakan terpadu antar instansi terkait, perlu adanya Grand Disain Permuseuman DIY yang melibatkan seluruh stakeholder.

Nilai-nilai ketradisional telah mendarah daging dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan di DIY. Masyarakat DIY masih mempertahankan 475 upacara adat, 35 tradisi, 58 permainan tradisional, 180 makanan tradisional, walaupun dilaksanakan tidak secara merata.

Penghargaan atas upaya pelestarian adat istiadat dilakukan salah satunya dengan Festival baik terhadap komunitas atau kelompok pemerhati upacara adat, karena banyak nilai keluhuran dalam upacara adat tersebut yang ditinggalkan.

**Tabel II-107 Perkembangan Sistem Nilai Budaya di DIY tahun 2012-2016**

Jenis Data	2012	2013	2014	2015	2016
Upacara Adat	447	447	459	473	475
Upacara Tradisi	35	35	35	35	35
Jenis Permainan Tradisional	34	34	34	34	58
Cerita rakyat	33	33	33	33	33

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY ([www.jogjabudaya.com](http://www.jogjabudaya.com))

DIY terus meningkatkan potensi dan eksistensi desa budaya sebagai sarana untuk memperkuat nilai budaya yang telah melekat pada masyarakat setempat. Desa budaya tidaklah sama dengan desa wisata karena desa wisata lebih menonjolkan pada peningkatan nilai jual sebuah desa daripada pelestarian nilai-nilai di dalamnya. Dari target 438

desa/kelurahan di 78 kecamatan dapat mencapai 50 % yang menjadi desa budaya. Pengelolaan desa budaya yang sudah eksis dan rintisan-rintisan desa budaya dilakukan secara bersama-sama oleh pemangku kepentingan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Kemajuan terbesar dalam pelestarian budaya berbasis desa dan kelurahan dengan diperbaruinya SK 325/Kpts/1995 yang menyebutkan 32 desa budaya sebagai benteng ketahanan budaya menjadi SK 262/Kep/2016 yang menyebutkan 56 desa dan kelurahan budaya setelah dinilai oleh tim akreditasi untuk menilai kelayakan sebuah desa ditetapkan sebagai Desa Budaya sesuai dengan Peraturan Gubernur No 36 tahun 2014 tentang Desa/kelurahan Budaya. Desa Budaya diharapkan dapat menjadi wahana bagi upaya pembinaan, pengembangan, dan pelestarian segala potensi budaya yang ada di desa.

Desa budaya yang sudah berpredikat maju pada tahun 2016 ada 22 desa budaya yang lainnya masih dalam tahap tumbuh dan berkembang.

**Tabel II-108 Desa dan Kelurahan Budaya di DIY Berdasarkan SK No 262/Kep/2016**

No.	Desa Budaya	Kecamatan	Kabupaten
1.	Sinduharjo	Ngaglik	Sleman
2.	Bangunkerto	Turi	Sleman
3.	Sendang Mulyo	Minggir	Sleman
4.	Argomulyo	Cangkringan	Sleman
5.	Wedomartani	Ngemplak	Sleman
6.	Banyurejo	Tempel	Sleman
7.	Mulyodadi	Bambanglipuro	Bantul
8.	Trimurti	Srandakan	Bantul
9.	Srigading	Sanden	Bantul
10.	Dlingo	Dlingo	Bantul
11.	Triwidadi	Pajangan	Bantul
12.	Seloharjo	Pundong	Bantul
13.	Pagerharjo	Samigaluh	Kulon Progo
14.	Tanjungharjo	Nanggulan	Kulon Progo
15.	Banjarharjo	Kalibawang	Kulon Progo
16.	Sidorejo	Lendah	Kulon Progo
17.	Sukoreno	Sentolo	Kulon Progo
18.	Glagah	Temon	Kulon Progo
19.	Sendang Sari	Pengasih	Kulon Progo
20.	Jatimulyo	Girimulyo	Kulon Progo
21.	Brosot	Galur	Kulon Progo
22.	Hargomulyo	Kokap	Kulon Progo
23.	Semin	Semin	Gunungkidul
24.	Semanu	Semanu	Gunungkidul
25.	Bejiharjo	Karangmojo	Gunungkidul
26.	Kemadang	Tanjungsari	Gunungkidul
27.	Putat	Patuk	Gunungkidul
28.	Girisekar	Panggang	Gunungkidul
29.	Giring	Paliyan	Gunungkidul
30.	Katongan	Nglipar	Gunungkidul
31.	Kepek	Wonosari	Gunungkidul

No.	Desa Budaya	Kecamatan	Kabupaten
32.	Jerukwudel	Girisubo	Gunungkidul
33.	Wonokerto	Turi	Sleman
34.	Margodadi	Sayegan	Sleman
35.	Pandowoharjo	Sleman	Sleman
36.	Sendangagung	Minggir	Sleman
37.	Selopamioro	Imogiri	Bantul
38.	Sitimulyo	Piyungan	Bantul
39.	Sabdodadi	Bantul	Bantul
40.	Tambakromo	Ponjong	Gunungkidul
41.	Wiladeg	Karangmojo	Gunungkidul
42.	Bugel	Panjatan	Kulon Progo
43.	Tuksono	Sentolo	Kulon Progo
44.	Girikerto	Turi	Sleman
45.	Margoagung	Sayegan	Sleman
46.	Gilangharjo	Pandak	Bantul
47.	Bangunjiwo	Kasihani	Bantul
48.	Panggungharjo	Sewon	Bantul
49.	Beji	Ngawen	Gunungkidul
50.	Ngalang	Gedangsari	Gunungkidul
51.	Giripurwo	Purwosari	Gunungkidul
52.	Sogan	Wates	Kulon Progo
53.	Tayuban	Panjatan	Kulon Progo
54.	Kalirejo	Kokap	Kulon Progo
55.	Kricak	Tegalrejo	Yogyakarta
56.	Terban	Gondokusuman	Yogyakarta

Sumber : Dinas Kebudayaan, 2017

#### II.3.1.2.17 Urusan Perpustakaan

Pasal 2 Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan menjelaskan dasar penyelenggaraan perpustakaan di Indonesia, pada umumnya yaitu bahwa : Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran dan kemitraan. Sementara itu pasal 7 ayat 1b menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat. Sebagai sebuah sistem pengelolaan dokumentasi dan rekaman atas berbagai pemikiran, pengalaman, pengetahuan, dan gagasan manusia, perpustakaan memiliki andil besar dalam melestarikan hasil karya manusia, baik berupa karya cetak maupun karya rekam lainnya untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perpustakaan tidak lagi terbatas menghimpun dan mengelola hasil karya manusia, namun keberadaannya menjadi pusat sumber daya pengetahuan yang dinamis. Perpustakaan merupakan pintu gerbang pengetahuan, menyediakan kebutuhan dasar bagi pembelajaran sepanjang hayat serta pengembangan kebebasan dan budaya bagi individu maupun kelompok.

Menurut hasil penelitian UNESCO, indeks minat baca masyarakat di Indonesia baru mencapai 0,001 (artinya setiap 1000 penduduk hanya ada satu orang yang berminat membaca). Berdasarkan World Bank dan *International Association for the Evaluation of Education Achievement*, skor membaca Indonesia terendah dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya. Hasil penelitian BPAD menyatakan bahwa indeks minat baca DIY berada di atas rata-rata nasional, tetapi masih rendah, hanya mencapai 0,049 atau setiap 1000 penduduk DIY hanya 49 yang berminat membaca. Padahal banyak negara yang membuktikan keberhasilan pelestarian peradaban bangsanya adalah melalui pembangunan perpustakaan dan tradisi membaca yang kuat yang didukung masyarakat bibliofil (masyarakat yang sangat suka membaca, menikmati dan mengapresiasi buku, menjadikan buku sebagai *way of life* dan aset negara).

Salah satu wahana dan media pembelajaran yang dimiliki oleh bangsa ini untuk mewujudkan impiannya menjadi bangsa *bibliofil* adalah perpustakaan. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan dapat menjadi icon peradaban baru dan Rennaisans Yogyakarta. Pembangunan perpustakaan juga dijiwai oleh amanat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya.

Upaya meningkatkan budaya baca masyarakat DIY didukung oleh perpustakaan pemerintah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah, perpustakaan desa, perpustakaan komunitas, dan lainnya. Pemerintah DIY memiliki sejumlah perpustakaan yang keberadaannya menyebar, seperti unit perkantoran Jalan Tentara Rakyat Mataram 29, perpustakaan unit Grhatama Pustaka Jl. Janti Banguntapan Bantul, perpustakaan unit Malioboro yang mengutamakan koleksi humaniora, dan Rumah Belajar Modern Sewon, Banguharjo, Bantul.

Perkembangan minat baca masyarakat terutama yang menjangkau hingga pedesaan DIY didukung oleh peningkatan perpustakaan desa. Perpustakaan desa menjadi wahana belajar masyarakat. Di DIY sejak tahun 2015 setiap desa/kelurahan telah memiliki perpustakaan desa/kelurahan atau 100% dari 438 desa/kelurahan dan telah menerima bantuan sarana prasarana perpustakaan dalam bentuk buku, rak buku dan computer melalui hibah Pemda DIY.

**Tabel II-109 Jumlah Perpustakaan Desa Tiap-Tiap Kabupaten Kota Hingga Tahun 2016**

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah Perpustakaan Desa							
			2012	%	2013	%	2014	%	2015/ 2016	%
1	Kota Yogyakarta	45	43	95,56	45	100	45	100	45	100
2	Bantul	75	51	68,00	60	80,00	66	86,76	75	100
3	Gunungkidul	144	106	73,61	110	76,39	120	83,72	144	100
4	Kulon Progo	88	67	76,14	71	80,68	77	86,76	88	100
5	Sleman	86	55	63,95	66	76,74	72	83,72	86	100
	<b>Jumlah</b>	<b>438</b>	<b>322</b>	<b>73,52</b>	<b>352</b>	<b>80,37</b>	<b>380</b>	<b>86,76</b>	<b>438</b>	<b>100</b>

Sumber : BPAD DIY, 2016

Kunjungan masyarakat ke perpustakaan dinilai semakin meningkat seiring dengan peningkatan pelayanan dan fasilitas yang disediakan. Koleksi perpustakaan pun semakin beragam dan memiliki keunikan.

**Tabel II-110 Jumlah Pustakawan DIY Tahun 2017**

No	Kabupaten/Kota/Provinsi	Tahun		
		2015	2016	2017
1	Bantul	8	9	9
2	Sleman	9	6	6
3	Yogyakarta	8	7	6
4	Gunungkidul	12	11	11
5	Kulon Progo	10	10	10
<b>Total</b>		<b>65</b>	<b>60</b>	<b>58</b>

Sumber: dataku Bappeda DIY, 2018

**Tabel II-111 Jumlah Pengunjung ke Perpustakaan Tahun 2011-2016**

Tahun	Jumlah Kunjungan	Jumlah Orang dalam populasi yang harus dilayani	Rata-rata kunjungan setiap orang
2012	201.881	2500	81
2013	662.196	3000	243
2014	702.270	2.500	245
2015	1.190.928.	2.719	248
2016	926.174	2800	250

Sumber : BPAD DIY,2016

Pembangunan perpustakaan di DIY telah berhasil melestarikan pustaka lama sehingga mampu menerobos zaman modernisasi dan komputerisasi. Hingga 2016, koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah DIY sebagai berikut:

**Tabel II-112 Jumlah Koleksi Buku di Perpusta**

Tahun	Jumlah Koleksi Judul Buku di Perpustakaan Daerah	Jumlah Eksemplar Buku di Perpustakaan Daerah
2012	191.988	388.484
2013	169.683	381.371
2014	169.683	387.541
2015	182.900	280.119
2016	191.012	299.665

Sumber : BPAD DIY,2016

Layanan-layanan unggulan perpustakaan DIY yang lainnya antara lain adalah *Jogja Library for All* (JLA) yang memadukan konsep perpustakaan, kearsipan dan permuseuman untuk koleksi pustaka dan arsip, *Center of Excellence*, *Kyoto Corner*, *Yogyasiana*, *Pustaka Nusantara*. Pengelolaan pustaka di DIY sudah menunjukkan inovasi teknologi melalui pelayanan pustaka dari manual ke digital, *Radio Frequency Identification* (RFID), *Jogja Library for All*, *Jogja Mobile Library*, *Webgis*, Layanan Surat Kabar dan Pustaka Digital serta yang terbaru adalah *iJogja* yaitu perpustakaan digital yang dapat diakses melalui *smart phone*/PC. Otomasi pelayanan perpustakaan sudah dikembangkan secara bertahap.

JLA sebagai salah satu bentuk layanan digital merupakan sebuah aplikasi dimana data katalog bukunya bersumber pada 40 Perpustakaan di Jogja sehingga muatan informasi sangat banyak. Berbagai macam informasi dari mulai pendidikan, teknologi, sosial budaya semua ada di aplikasi jogjalib sehingga masyarakat pada umumnya bisa menjadikan acuan portal informasi jogja tentang pendidikan maupun ilmu pengetahuan yang lain. yang mulai dirintis sejak tahun 2006. Awalnya mencakup 18 perpustakaan perguruan tinggi hingga saat ini menjadi sekitar 40 perpustakaan yaitu seperti UGM, UNY, UII, ISI, USD, UAD, UKDW, UMY, UIN Sunan Kalijaga, STMIK Amikom.

*Jogja Mobile Library* adalah aplikasi khusus yang dibuat untuk semakin memudahkan kita mendapatkan informasi buku perpustakaan di wilayah DIY. Aplikasi ini selain untuk mencari informasi buku yang sedang dicari di perpustakaan, bisa juga untuk mencari update informasi buku baru di perpustakaan favorit yang ada DIY.

Layanan *Center of Excellence* Budaya Jawa menyediakan layanan perpustakaan dan informasi yang merepresentasikan khazanah pustaka budaya se-Jawa, tidak hanya dari Yogyakarta. Koleksi berupa buku dan audiovisual yang hanya dinikmati di tempat. Kegiatan-kegiatan yang mendukung layanan *Center of Excellence* ini antara lain adalah diskusi tentang kebudayaan Jawa, macapat dan bedah pustaka langka. Juga pengalihan huruf dan pengalihan bahasa terhadap buku-buku yang berhuruf dan berbahasa Jawa. Selain itu ada layanan pustaka Nusantara yang menyajikan koleksi buku, majalah, audio visual tentang budaya dan daerah wisata dari beberapa provinsi di Indonesia.

*Aplikasi iJogja* diharapkan akan mempopulerkan sistem peminjaman perpustakaan digital di DIY. Aplikasi ini dibuat agar dapat meningkatkan kecepatan dan kepraktisan dalam layanan perpustakaan khususnya perpustakaan digital. Dengan adanya aplikasi ini maka untuk meminjam buku tidak memerlukan pelayanan petugas untuk mengambilkan buku dan menerima pengembaliannya karena sudah dibatasi jangka waktu peminjamannya. Kemudian juga memperluas jangkauan layanan aksesibilitas layanan perpustakaan yang tidak terbatas pada ruang dan waktu karena dilakukan secara *online* internet, sampai akhir tahun 2016 koleksi digital yang dapat dipinjam yaitu 2.232 koleksi.

*Jogja Library Center* yang berdiri pada masa revolusi kemerdekaan merupakan cikal bakal perpustakaan negara dan menyimpan koleksi-koleksi Yogyakarta yang berupa dokumen yang bernilai sejarah. JLC melayani audiovisual baik film, *Compact Disc*, *VCD*, radio dan televisi. Layanan surat kabar dan majalah yang terbit tempo dulu hingga kontemporer tersedia di JLC Malioboro ini. Selain itu, bangunan JLC merupakan juga peninggalan bersejarah (*heritage*). Lingkungan yang mendukung minat baca dengan ruang berlantai kayu yang sejuk, koneksi internet dan *wifi area*, mini theater atau ruang audio visual, dan ruang diskusi. Sudut-sudut layanan yang ada di JLC antara lain adalah *Center of Excellent*, *Kyoto Corner* yaitu bentuk kerjasama dalam penyediaan layanan pustaka dilakukan antara Pemda DIY dan Prefektur Kyoto adalah Kyoto Corner (Kedai Buku Kyoto) yang memiliki koleksi 481 judul, 581 eksemplar, kemudian juga ada Layanan Surat Kabar dan Pustaka Digital.

Rumah Belajar Modern Sewon ini merupakan proyek percontohan di DIY yang nantinya akan dikembangkan pula di Kabupaten/Kota di DIY. Fasilitas yang ada di Rumah Belajar Modern Bantul antara lain, perpustakaan anak yang sangat lengkap, arena permainan anak yang lengkap pula setelah anak membaca buku mereka bisa bermain di arena permainan atau

bermain games maupun berinternet, perpustakaan keluarga, ruang kreativitas bagi masyarakat umum yang mana masyarakat membaca sekaligus mengaplikasikan kandungan bacaan seperti menyulam, merajut, membatik dan memasak, membuat hantaran pengantin dan souvenir. Selain itu disediakan juga ruang aula, arena olahraga, ruang pertunjukan, ceramah.

Gedung perpustakaan Grhatama Pustaka menyediakan layanan perpustakaan yang sudah berdiri megah di pusat perkotaan Jogja Expo Center. Tantangan ke depan dalam pengembangan perpustakaan di DIY adalah menjadi Ibu Kota Buku Dunia. Setiap tahun UNESCO dan tiga penerbit buku raksasa *the International Publishers Association* (IPA), *the International Booksellers Federation* (IBF), *the International Federation of Library Associations and Institutions* (IFLA) menetapkan ibu kota buku dunia untuk kurun masa 12 bulan antara dua perayaan yaitu hari buku Internasional dan hari Hak Cipta Internasional (23 April). Proses menuju Ibukota Buku di dunia perlu dimulai sejak sekarang dengan menggali dukungan kerjasama dari pemerintah kabupaten/kota, penerbit, penulis, perpustakaan, dunia pendidikan, dunia kebudayaan, masyarakat, dan lainnya.

#### II.3.1.2.18 Urusan Kearsipan

Potensi kearsipan di DIY dipengaruhi oleh sejarah panjang DIY baik sebagai provinsi maupun sebagai kerajaan. Keistimewaan DIY perlu dikuatkan melalui strategi pengelolaan arsip yang optimal. Bukti-bukti otentik perjalanan peradaban DIY terkandung di dalam arsip. Banyak pihak bertanggung jawab atas penyelamatan arsip.

**Tabel II-113 Data Kearsipan DIY Hingga Tahun 2016**

No	Pengolahan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pengelolaan arsip secara baku	-	19	20	21	25
2	Jumlah arsiparis	15	15	15	15	12

Sumber : BPAD DIY, 2016

DIY telah mengembangkan aplikasi sistem informasi kearsipan statis (SIKS) dan aplikasi sistem informasi daftar katalog khasanah arsip statis (SIDKKAS). Sistem ini dapat diibaratkan pameran virtual kearsipan DIY yang merupakan mozaik peradaban DIY dari masa ke masa untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai kaedah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

**Tabel II-114 Data Pengelolaan Arsip Statis Hingga Tahun 2016**

No	Pengolahan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Arsip Teksual	2.540	2.800	7.000	27.000	53.968
2	Arsip Foto	474	674	1.000	1.500	1.986
3	Arsip Rekaman	0	0	0	2	190
4	Arsip Audiovisual	0	0	0	0	28

Sumber : BPAD DIY, 2016

Pengelolaan arsip statis meliputi: Pengolahan, Alih media, tulisan, dan bahasa. Arsip yang diolah dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori yaitu arsip tekstual, arsip foto, arsip rekaman, arsip audiovisual.

**Tabel II-115 Data Alih Media Hingga Tahun 2016**

No	Pengolahan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Alih Media	9.619	11.619	33.939	76.085	97.585
2	Alih Tulisan	5.799	6.549	7.299	7.826	7.826
3	Alih Bahasa	4.208	5.131	6.260	8.260	8.260

Sumber : BPAD DIY,2016

Hingga akhir tahun 2016, Pemda DIY telah mengupayakan akuisisi terhadap arsip-arsip yang sangat bernilai dalam menggambarkan peradaban masyarakat DIY sejak awal berdirinya. Kegiatan akuisisi dilakukan dengan dua cara yaitu penarikan arsip statis dan reproduksi dengan cara mengkopi/scanning arsip tersebut. Beberapa akuisisi tersebut, antara lain menyangkut arsip lembaga pengairan jaman Hindia Belanda, arsip seniman, arsip pemilu 2004 dan 2009, arsip museum di DIY, arsip-arsip gempa bumi di Yogyakarta pada tahun 2006, arsip sejarah keistimewaan DIY, arsip pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Rafles serta arsip yang berada di Belanda dan Inggris.

Arsip Inaktif adalah arsip dinamis yang frekuensi penggunaannya untuk penyelenggaraan administrasi sudah menurun. Penanganan arsip dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) meliputi penanganan arsip tekstual, arsip kartografi, serta arsip foto. Arsip inaktif tekstual adalah informasi yang direkam/dicatat di atas lembaran kertas, seperti surat hasil korespondensi, laporan mingguan, berkas-berkas, arsip inaktif kartografi adalah informasi yang berupa peta. Dalam hal ini tidak termasuk gambar-gambar yang berkaitan dengan kearsitekturan.

**Tabel II-116 Data Arsip Inaktif Hingga Tahun 2016**

No	Pengolahan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Arsip Inaktif Tekstual	45.739	50.800	57.800	77.800	77.800
2	Arsip Inaktif Kartografi	2.153	2.691	4.691	4.691	4.691
3	Arsip Inaktif Foto	15.587	39.308	40.308	40.808	40.808

Sumber : BPAD DIY,2016

Depo arsip yang menjadi impian Pemda DIY yang akan menjadi pusat pengelolaan dan pelayanan arsip daerah secara terpadu dengan sistem yang lebih optimal akan dilanjutkan secara bertahap pembangunannya meliputi struktur dan atapnya mulai tahun 2017 ini. Depo arsip ini nantinya akan dilengkapi diorama yang menunjukkan sejarah terbentuknya DIY. Diharapkan semua ragam arsip dari zaman ke zaman dapat terlestarikan baik secara informasi maupun fisik arsipnya.

### **II.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan**

#### **II.3.2.1.1 Urusan Pariwisata**

Dalam 5 tahun terakhir, perkembangan jumlah wisawatan di DIY mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama pada jumlah wisawatan nusantara. Pada tahun 2016, jumlah wisatawan yang mengunjungi DIY sebanyak 4.549.574 orang yang terdiri dari wisatawan nusantara sebanyak 4.194.261 orang dan wisatawan mancanegara sebanyak 355.313 orang. Secara keseluruhan jumlah tersebut meningkat sebesar 10% dibandingkan

dengan tahun sebelumnya. Lima besar wisatawan mancanegara yang mengunjungi DIY adalah wisatawan dari Negara Belanda, Jepang, Malaysia Perancis, dan Singapura.



Sumber: Dinas Pariwisata DIY Tahun 2017

**Gambar II.63 Perkembangan Jumlah Wisatawan di DIY, Tahun 2012-2016**

Lama tinggal wisatawan di DIY pada tahun 2016 capaiannya tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Hal tersebut dipengaruhi oleh pola kecenderungan wisatawan memanfaatkan libur pendek akhir pekan (*weekend*). Selain itu, DIY masih menjadi daerah tujuan wisata kedua setelah Bali.

**Tabel II-117 Perkembangan Lama Tinggal Wisatawan dan Jumlah Wisatawan di DIY, Tahun 2012-2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara (Hari)	1,82	1,90	1,95	2,07	2
Lama Tinggal Wisatawan Nusantara (Hari)	1,56	1,59	1,58	1,85	1,9

Sumber: Dinas Pariwisata DIY Tahun 2017

Jumlah kunjungan wisatawan di DTW mengalami kenaikan dari 18.435.445 orang pada tahun 2015 menjadi 19.753.145 orang pada tahun 2016 atau meningkat sebesar 7%. Peningkatan tersebut tergolong belum signifikan karena jumlah daya tarik wisata baru di DIY yang tidak banyak mengalami peningkatan, untuk tahun 2016 sebanyak 92 DTW atau hanya bertambah satu DTW apabila dibandingkan dengan tahun 2015 sebanyak 91 DTW. Selain itu, faktor lain yang berpengaruh adalah pembatasan kegiatan penyelenggaraan *Meetings Incentives Conferencing Exhibitions* (MICE) di Hotel bagi aparaturnya pemerintah.

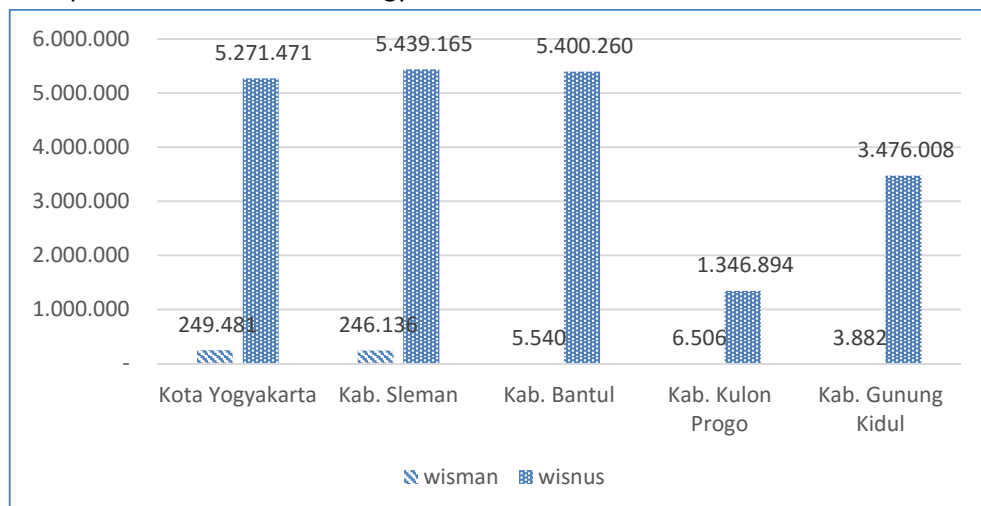


Sumber: Dinas Pariwisata DIY Tahun 2017

**Gambar II.64 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan DTW di DIY, Tahun 2012-2016**

Jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi wisata Kab/kota, pada tahun 2015 peningkatan sebesar 7 % jika dibandingkan tahun 2014. Pada tahun 2015 jumlah pengunjung daya tarik wisata (DTW) sebesar 18.435.445 orang, sementara untuk tahun 2016 berhasil mencapai 19.753.145 orang pengunjung. Peningkatan tersebut tidak jauh berbeda dengan kinerja peningkatan jumlah kunjungan pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan wisatawan yang tarik ke DTW wilayah DIY mulai mengalami kejenuhan terhadap daya tarik wisata yang ada.

Meskipun secara keseluruhan jumlah kunjungan wisatawan di DIY mengalami peningkatan, namun jika dilihat dari komposisi persentase di kabupaten/kota masih terdapat ketimpangan antar wilayah. Jumlah kunjungan wisatawan di DIY masih terkonsentrasi di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.



Sumber: Dinas Pariwisata DIY Tahun 2017

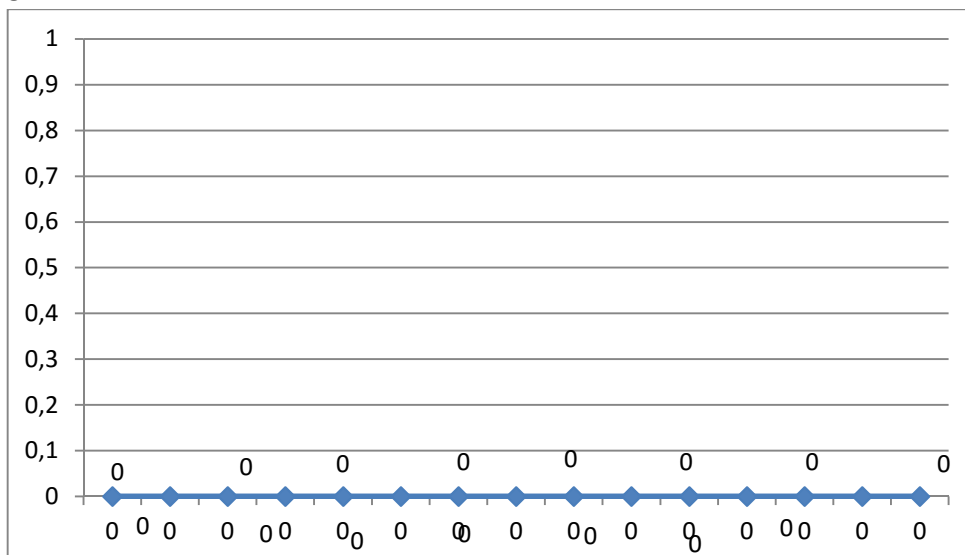
**Gambar II.65 Sebaran Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara di ODTW di Kabupaten/Kota Tahun 2016**

Pengembangan kepariwisataan di DIY sudah semestinya dikembangkan secara *sustainable tourism development*, dimana dalam pengembangan destinasi baru harus menjaga kelangsungan destinasi yang ada dan membentuk reputasi destinasi untuk menciptakan keunikan dan keunggulan. Untuk mencapai hal tersebut perlu disiapkan manajemen SDM dan kelembagaan yang memadai melalui pelatihan dan sertifikasi bagi SDM pelaku pariwisata. Selain itu penataan sistem aksesibilitas dan manajemen transportasi ke lokasi-lokasi daya tarik wisata (jaringan jalan, area parkir, penataan rute jalur/rute wisata dan angkutan umum) perlu dilakukan untuk mengurangi kemacetan akibat menumpuknya wisatawan yang berkunjung di satu lokasi daya tarik wisata. Pengembangan pariwisata juga mengedepankan aspek pemberdayaan berbasiskan komunitas salah satunya adalah dengan pendekatan berbasiskan desa wisata. Sampai dengan tahun 2016 terdapat 85 Desa Wisata yang tersebar di Kabupaten/kota di DIY. Pengembangan desa wisata disamping sebagai upaya pemberdayaan masyarakat lokal juga diharapkan dapat mendorong pelestarian lingkungan dan tradisi budaya lokal.

#### II.3.2.1.2 Urusan Pertanian

Sektor pertanian menjadi tiga besar penyumbang PDRB di DIY, sebesar 10,41% pada tahun 2016. Namun kontribusi sektor pertanian DIY cenderung mengalami penurunan dalam kurun waktu 2012-2016, ini disebabkan kompetisi dengan sektor lain dalam hal penggunaan sumber daya lahan dan air serta terjadi alih fungsi lahan rata-rata sebesar 0,42% per tahun selama kurun waktu 2006-2016. Selain itu, penurunan jumlah rumah tangga pertanian juga berdampak pada penurunan kontribusi pertanian.

Alih fungsi lahan terjadi pada lahan sawah produktif dengan frekuensi tanam dan tingkat produktivitas tinggi, sebagaimana banyak ditemui pada lahan sawah di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman. Sehingga alih fungsi lahan menjadi isu strategis DIY agar laju alih fungsi lahan tidak semakin besar. Perkembangan lahan sawah di DIY dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2017

**Gambar II.66 Perkembangan Luas Lahan Sawah di DIY**

Sawah di DIY dibagi menjadi sawah beririgasi dan sawah non irigasi atau sawah tadah hujan, di mana luasan sawah beririgasi mengalami penurunan dari tahun ketahun, namun untuk sawah non irigasi/tadah hujan justru mengalami kenaikan. Data luas lahan sawah irigasi dan non irigasi/tadah hujan dari tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II-118 Luas Lahan Sawah Beririgasi dan Non Irigasi di DIY**

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016
Sawah Beririgasi	47.015	46.926	46.300	45.976	45.880
Sawah Non Irigasi	9.349	9.401	9.350	9.449	9.412

Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2017

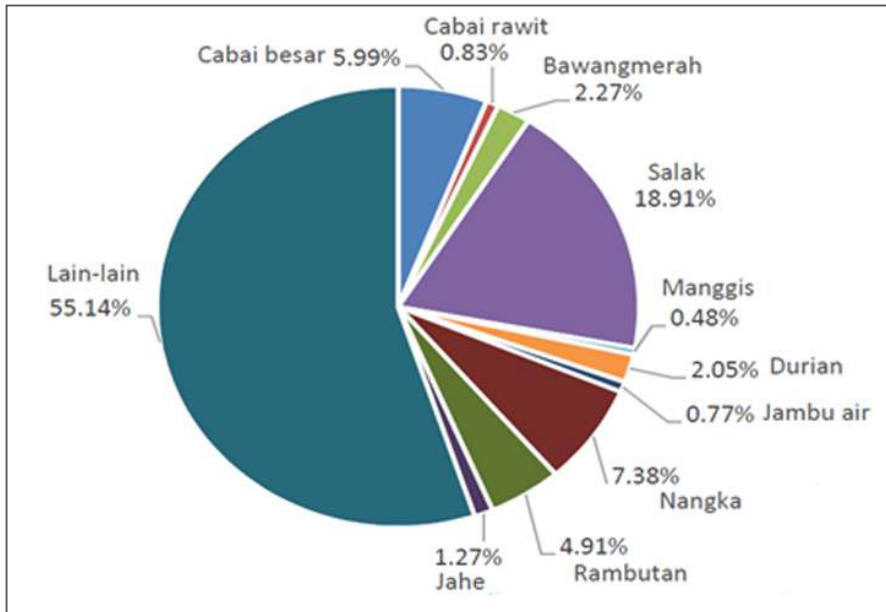
Sektor pertanian terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Namun yang menjadi *core* utama pertanian adalah tanaman pangan, hortikultura dan peternakan. Produksi tanaman pangan di DIY pada tahun 2016 meningkat 1.482 ton (0,73%) dibanding tahun 2015 menjadi 2.204.717 ton. Kenaikan produksi dikarenakan penerapan adanya upaya khusus terutama pada tanaman padi, jagung dan kedelai pada tahun 2016, meskipun terjadi kendala adanya perubahan iklim sehingga berpengaruh pada mundurnya masa tanam. Produksi tanaman pangan tahun 2012-2016 secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel II-119 Produksi Tanaman Pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2016 (Ton)**

No	Jenis Tanaman	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2012	2013	2014	2015	2016*)	
1	Padi Sawah	737.446	721.674	719.194	746.810	712.285	-0,80
	Padi Ladang	208.778	200.150	200.379	198.326	170.417	-10,34
	Total Padi	946.224	921.824	919.573	945.136	882.702	-2,91
2	Jagung	336.608	289.580	312.236	299.084	310.257	5,57
3	Kedelai	36.033	31.677	19.579	18.822	16.763	-51,99
4	Kacang Tanah	62.901	70.834	71.582	83.300	75.816	9,15
5	Kacang Hijau	300	318	261	230	289	-3,89
6	Ubi Kayu	866.357	1.013.565	884.931	873.362	1.125.375	9,76
7	Ubi Jalar	5.047	4.951	5.237	6.070	3.256	-11,27

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2017

Produksi tanaman hortikultura di DIY juga mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar 389.573 ton menjadi 392.421 ton pada tahun 2016, melebihi target tahun 2016 sebesar 390.900 ton. Komoditas Salak merupakan subsektor terbesar dalam produksi hortikultura di DIY tahun 2016, yaitu sebesar 18,91%. Salak dikembangkan di daerah Sleman bagian Utara (Turi, Cangkringan, dan Pakem). Sementara itu, Nangka merupakan kontributor terbesar kedua dengan sumbangan sebesar 7,38%. Proporsi produksi hortikultura DIY pada tahun 2016 disajikan dalam diagram pada Gambar berikut.



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2017

**Gambar II.67 Proporsi Produksi Holtikultura di DIY Tahun 2016**

Jumlah populasi ternak tahun 2016 mengalami peningkatan 2,09% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi 620.516 animal unit. Peternakan di DIY masih didominasi ternak sapi potong dan ternak kecil, sedangkan ternak sapi perah tidak terlalu banyak, hal ini dikarenakan iklim dan topografi DIY tidak terlalu cocok untuk pengembangan ternak sapi perah, kecuali di kabupaten Sleman.

Populasi ternak sapi potong sebagian besar dari Gunungkidul dengan kontribusi sebesar 48,45%, Sleman berkontribusi sangat besar terhadap populasi sapi perah dengan peranan sebesar 92,71%. Sleman juga menyumbang jumlah populasi kerbau terbesar DIY dengan proporsi sebesar 46,11%. Populasi ternak lebih rinci disampaikan dalam tabel berikut:

**Tabel II-120 Populasi Ternak DIY Tahun 2012-2016**

Kelompok	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Pertumbuhan
Ternak Besar	365.090	279.877	309.037	307.418	311.766	3,67
Ternak Kecil	516.777	514.030	565.786	576.697	585.622	4,04
Ternak Unggas	13.752.060	11.937.631	13.535.473	15.047.604	15.465.288	7,73

Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2017

### II.3.2.1.3 Urusan Kehutanan

Wilayah dengan fungsi hutan di DIY pada tahun 2016 seluas 97.018,26 Ha yang didominasi hutan rakyat dengan luasan 78.303,20 Ha dan sisanya 18.715,06 Ha merupakan hutan negara. Wilayah hutan (baik hutan rakyat dan hutan negara) pada wilayah DIY sebagian besar berada di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang memiliki luasan sebesar 59.006,37 Ha, terdiri dari 44.110,87 Ha (hutan rakyat) dan 14.895,50 Ha (hutan negara, termasuk hutan AB).

**Tabel II-121 Luas Hutan di DIY Berdasarkan Kewilayahan Tahun 2016**

Kabupaten	Hutan Negara (ha)	Hutan Rakyat (ha)	Total Hutan (ha)	% Total hutan
Gunungkidul	14.895,50	42.569,96	57.465,46	60,24
Bantul	1.052,60	8.595,00	9.647,60	10,11
Sleman	1.729,46	4.756,11	6.485,57	6,80
Kulon Progo	1.037,50	20.759,41	21.796,91	22,85
Hutan di DIY	18.715,06	76.680,48	95.395,54	100,00

Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2017

Berdasarkan tata guna hutan negara, kawasan hutan negara terbagi atas: hutan produksi 13.411,70 Ha, Hutan lindung 2.312,80 Ha, Hutan konservasi 2.990,56 Ha (TNGM 1.728,906 Ha, Tahura Bunder 634,10 Ha, Cagar alam 11,4375 Ha, Taman wisata alam 1,0465 Ha, Suaka Margasatwa 615,60 Ha). Mengacu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 197/Kpts-II/2000 tertanggal 12 Juli 2000, hutan AB juga dikelompokkan menjadi hutan produksi.

Pengelolaan hutan produksi di DIY dikelola oleh Balai KPH Yogyakarta (UPTD Dishutbun DIY). Potensi hutan produksi (13.411,70 ha) di DIY didominasi oleh tanaman jati (50,79%) dan tanaman kayu putih (34,32%). Saat ini, hasil tanaman kayu putih yang diolah menjadi minyak kayu putih memberikan kontribusi pendapatan yang cukup besar bagi Pemda DIY. Pengembangan tanaman kayu putih di DIY mengalami kendala produktivitas yang rendah karena jumlah populasi tegakan yang kurang memadai. Upaya pemenuhan populasi tegakan tanaman kayu putih senantiasa dilakukan secara bertahap dan diimplementasikan sinergis melalui skema kemitraan bersama masyarakat sekitar hutan dalam desain terpadu untuk pengentasan kemiskinan.

**Tabel II-122 Produksi Daun dan Minyak Kayu Putih di DIY , Tahun 2012-2016**

Tahun	Produksi daun (ton)	Produksi MKP (liter)	Nilai Pejualan (Rp.)
2012	4.774,48	46.321,00	7.581.060.000
2013	4.743,77	44.669,00	7.561.000.000
2014	5.003,50	47.641,00	9.973.126.000
2015	4.532,00	43.825,00	8.374.957.500
2016	3.340,00	31.247,00	5.311.990.000

Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2017

Luas lahan kritis di DIY pada periode 2013 hingga 2016 mengalami rata-rata penurunan sebesar 2,40%. Hal ini merupakan dampak dari adanya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang telah dilakukan baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Upaya yang dilakukan di dalam kawasan hutan adalah dengan penanaman pada kawasan hutan yang bertumbuhan kurang, kawasan hutan dengan kriteria kritis dan pada tanah kosong atau kawasan hutan yang tidak terdapat tanaman. Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka menurunkan luas lahan kritis di luar kawasan hutan adalah meningkatkan usaha penanaman hutan rakyat serta peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan melalui sosialisasi, gerakan tanam dan pembinaan petani sekitar hutan.

Kerusakan hutan terjadi akibat adanya kebakaran hutan, bencana alam dan pencurian kayu. Jumlah kerusakan hutan di Kabupaten Gunungkidul, Kulon Progo, dan Bantul dari tahun 2012–2016 mengalami fluktuasi dengan Kabupaten Gunungkidul memiliki kasus terbanyak. Kasus pencurian kayu tertinggi dalam kurun waktu 2012-2016 terjadi pada tahun 2014, yaitu sebanyak 81 kasus dengan volume kayu yang dicuri sebanyak 353 meter kubik. Luas areal hutan yang terbakar terbesar selama kurun waktu 2012 – 2016 terjadi pada tahun 2015 yaitu seluas 128,5 hektar, sedangkan pada tahun 2016 tidak terjadi kebakaran hutan. Jumlah titik lokasi kebakaran hutan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebanyak 19 titik. Di sisi lain, deforestasi tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebanyak 40,49 hektar, sedangkan pada tahun 2016 hanya sebesar 0,42 hektar. Penurunan kerusakan hutan diwujudkan melalui peningkatan upaya perlindungan dan pengamanan hutan. Selain itu, didukung dengan upaya pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan dalam rangka peningkatan pendapatannya melalui skema tumpangsari maupun pola kerjasama lain.

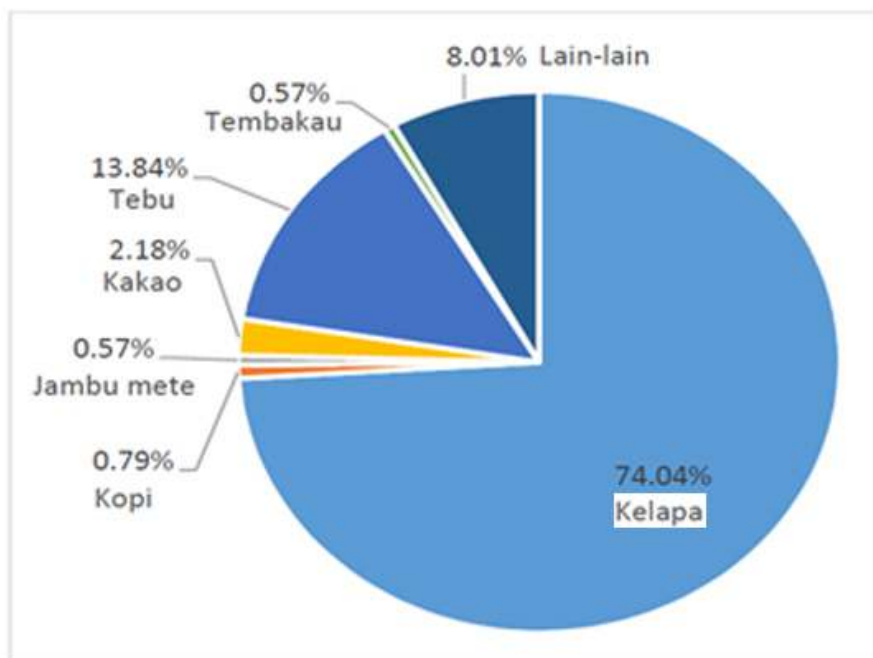
Wilayah DIY yang memiliki lahan kering dengan topografi bergelombang (berbukit/bergunung) menyebabkan konsentrasi komoditas perkebunan yang cukup beragam dari sisi luasan, diantaranya: kelapa, kakao, kopi, tembakau, dan tebu. Sentra produksi kelapa, kakao, dan jambu mete berada di Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul. Sedangkan sentra komoditas kopi berada di Kabupaten Sleman. Komoditas perkebunan tersebut memiliki cakupan luas yang cukup besar, prospek pasar yang potensial, nilai strategis dalam pertumbuhan ekonomi wilayah, dan berperan dalam mendukung kebijakan ketahanan pangan (tebu).

**Tabel II-123      Perkembangan Luas Komoditas Perkebunan Strategis di DIY, Tahun 2012-2016**

<b>Komoditas Perkebunan Strategis (Ha)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Kelapa	43.371,38	43.815,39	43.453,02	43.016,86	42.835,26
Kakao	4.811,00	5.012,15	5.117,13	5.155,75	5.065,97
Kopi	1.778,84	1.725,92	1.746,50	1.737,59	1.703,43
Tembakau	2.209,52	2.310,90	2.396,14	2.058,80	700,80
Tebu	3.613,13	3.602,66	3.400,54	3.357,00	3.228,21

*Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2017*

Dilihat lebih rinci dapat diketahui bahwa komoditas kelapa merupakan kontributor utama yang mendominasi produksi perkebunan di DIY pada tahun 2016 dengan peranan sebesar 74,04%. Sedangkan komoditas strategis tebu merupakan penyumbang terbesar kedua dengan kontribusi sebesar 13,84%.



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2017

**Gambar II.68 Proporsi Produksi Perkebunan di DIY Tahun 2016**

Penerapan agribisnis dilakukan melalui intensifikasi usaha tani yang lebih produktif, memanfaatkan teknologi tepat guna dan penguatan tingkat kemampuan petani serta kelembagaan petani dalam mengakses pemenuhan kebutuhan agribisnis yang memadai.

Efisiensi usaha tani diharapkan dapat tercapai apabila produksi yang optimal dapat diimbangi dengan biaya produksi yang efisien. Terkait dengan potensi sumber daya alam yang ada di DIY, maka langkah strategis yang harus diupayakan adalah mendorong tercapainya peningkatan produktivitas dan mutu produk yang memadai sehingga daya saing produk mampu memenuhi permintaan dan selera pasar.

#### **II.3.2.1.4 Energi dan Sumber Daya Mineral**

Peningkatan kebutuhan energi merupakan fungsi dari pertumbuhan ekonomi. Rencana pembangunan simpul-simpul ekonomi baru di DIY seperti pembangunan kawasan-kawasan industri, bandara baru internasional Yogyakarta, kawasan cagar budaya, serta kawasan pertumbuhan ekonominya lainnya pasti akan memerlukan energi yang cukup besar. Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana energi di DIY ditujukan untuk memaksimalkan sumber daya manusia dan sumber daya energi lokal. Pengembangan dan pemanfaatan energi berupa pembangkit listrik dan energi bahan bakar terus didorong keberlanjutannya, ditujukan untuk membangun keamanan energi, keadilan energi, keberlanjutan lingkungan, serta peningkatan akses energi masyarakat.

##### **1. Rasio Elektrifikasi**

Ketersediaan energi listrik adalah salah satu parameter penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Pengelolaan energi listrik yang benar dan terarah merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Hal ini sejalan

dengan makin meningkatnya peran pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sumber daya energi, termasuk di dalamnya sektor ketenagalistrikan. Hal ini terlihat dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yaitu Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dana pembangunan sarana dan prasarana penyediaan tenaga listrik untuk membantu kelompok tidak mampu.

Berdasarkan data rata-rata rasio elektrifikasi PT. PLN (Persero) Area Yogyakarta tahun 2015 wilayah DIY adalah untuk kota Yogyakarta 68,52%, Kabupaten Bantul 97,17%, Kulon Progo 88,91%, Sleman 87,78%, Gunungkidul 80,10% dan total rasio elektrifikasi DIY sebesar 86,27%, dari data tersebut menunjukkan bahwa rasio elektrifikasi terkecil pada wilayah Kota Yogyakarta. Pemda DIY pada tahun 2016 melakukan updating data dan sinkronisasi pemenuhan rasio elektrifikasi untuk mengkaji potensi peningkatan rasio elektrifikasi yang meliputi Pemetaan terhadap jumlah rumah tangga berlistrik sebagai pelanggan PLN, Pemetaan terhadap jumlah rumah tangga (KK) yang listriknnya masih menyalur, pemetaan terhadap jumlah rumah tangga (KK) yang belum berlistrik.

Hasil pemetaan tersebut diperoleh data rumah tangga belum berlistrik sekitar 333 rumah tangga. Jumlah rumah tangga belum berlistrik tersebut nilainya cukup kecil. Apabila diinputkan di dalam perhitungan rasio elektrifikasi seharusnya rasio elektrifikasi di DIY bisa mencapai 96,31% dengan rincian untuk kota Yogyakarta 99,86%, Kabupaten Bantul 99,22%, Kulon Progo 94,08%, Sleman 99,995%, Gunungkidul 84,69%. Di waktu yang hampir bersamaan yaitu pada akhir tahun 2016, Kementerian ESDM menerbitkan data rasio elektrifikasi DIY sebesar 88,66%, di mana kondisi rasio elektrifikasi nasional adalah 91,16%.

Perbedaan hasil perhitungan rasio elektrifikasi antara PT. PLN (Persero) Area Yogyakarta dan Pemda DIY dikarenakan PT. PLN (Persero) Area Yogyakarta menghitung rasio elektrifikasi dari perbandingan antara jumlah rumah tangga yang menjadi pelanggan PLN dengan jumlah rumah tangga total. Sedangkan pemda DIY menggunakan perhitungan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang menikmati listrik dengan jumlah rumah tangga total. Jumlah rumah tangga yang menikmati listrik adalah jumlah rumah tangga total dikurangi rumah tangga belum berlistrik (hasil dari survei). Dari kedua perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa ada rumah tangga berlistrik yang bukan pelanggan PLN. Data inilah yang belum dimiliki PT. PLN (Persero) Area Yogyakarta, sehingga menimbulkan perbedaan hasil perhitungan.

## **2. Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan**

Kebijakan diversifikasi energi melalui pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan yang telah dilakukan di DIY antara lain pemanfaatan tenaga air, tenaga angin, tenaga surya dan biogas. Pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan di tahun 2015 dilakukan dengan optimalisasi pemanfaatan mikro hidro untuk pembangkit listrik skala kecil terutama pada wilayah-wilayah yang mempunyai kondisi kelistrikan yang kurang baik, mendorong pemanfaatan tenaga surya untuk wilayah perkotaan dan pemanfaatan bio energi khususnya biogas rumah tangga sebagai pengganti bahan bakar minyak atau LPG tabung 3 Kg bagi lokasi yang mempunyai potensi biogas yang cukup besar.

Pada tahun 2015 pencapaian Pengembangan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan di DIY sebesar 118.153,28 SBM dari target sebesar 117.950 SBM. Realisasi pencapaian target di tahun 2015 dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

- Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat dari Dana Alokasi Khusus Kementerian ESDM sebesar 13.600 watt peak di Kabupaten Gunungkidul atau setara 187,27 SBM;
- Pemasangan 200 unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dari APBD DIY di 10 unit gedung Pemda DIY atau setara 206,54 SBM;
- Pembangunan Digester Biogas sebanyak 50 unit dari APBD DIY di Kabupaten Sleman, 150 unit dari Dana Alokasi Khusus Kementerian ESDM di Kabupaten Gunungkidul dan 50 unit dari Yayasan Rumah Energi (YRE) dengan lokasi tersebar di DIY atau total setara 693,03 SBM;
- Optimalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro sebesar 30 kW di Kabupaten Kulon Progo dan 8 kW di Kabupaten Sleman atau setara 523,24 SBM.

Pengembangan pemanfaatan energi baru terbarukan merupakan langkah menuju keamanan energi berdasarkan produksi energi setempat. Berikut data jenis energi baru terbarukan di DIY yang terpasang pada tahun 2015.

**Tabel II-124 Data Jenis Energi Baru Terbarukan**

Jenis EBT	Potensi		Terpasang 2015	
	Kapasitas	TOE	Kapasitas	TOE
PLTS	10MWp	301	200kWp	0.32
PLTMH	2MW	817	882kW	358
PLTBayu	100MW	165.920	131kW	24,6
PLTBagasse	3.6 MVA / 2.5MW	929	3.6 MVA /	873
PLTSampah	30MW	9,040	5kW	2
Bioethanol	36 JutaLiter	18.060	5juta	2.508
Biogas Ternak Sapi	15,000unit	2.768	1.500Unit	328
Biogas Sanitasi	500unit	92	100Unit	11
Biogas Ampas Tahu	500Unit	91	10Unit	2
Biomassa Pellet	1,500Ton	548	600Ton	219
DME	20Lokasi		1Lokasi	
TotalEnergi(TOE)		98.567		4.388

Pada tahun 2016 pencapaian target Pengembangan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan di DIY sebesar 123.590 SBM ditempuh melalui kegiatan pembangunan instalasi biogas skala rumah tangga sebanyak 120 unit di Kabupaten Sleman, 230 unit di Kabupaten Gunungkidul, 130 unit di Kabupaten Bantul, 120 unit di Kabupaten Kulon Progo. Selain itu juga pembangunan PLTS tersebar di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 100 unit dan Kabupaten Kulon Progo sebanyak 100 unit. Optimalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro off grid sebanyak 3 unit juga dilakukan untuk mendukung pencapaian target tersebut.

### 3. Rerata Penurunan Muka Air Tanah

Pelaksanaan sub urusan air tanah guna mempertahankan rerata penurunan muka air tanah di DIY Tahun 2015, diprioritaskan dengan upaya peningkatan konservasi air tanah melalui pembuatan sumur resapan, pemantauan muka air tanah melalui pembuatan sumur

pantau dan pembinaan, pengawasan serta pengendalian perizinan air tanah. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan muka air tanah di wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Yogyakarta-Sleman tetap dalam kondisi aman yaitu penurunan muka air tanah <20% terhadap tebal rata-rata akuifer yaitu sebesar 100 meter.

Kondisi muka air tanah pada musim hujan terbasah di CAT Yogyakarta-Sleman pada tahun 2014 adalah sebesar 7,28 meter atau 7,28% terhadap rata-rata tebal akuifer dan pada musim kemarau terkering sebesar 9,35 meter atau 9,35% terhadap rata-rata tebal akuifer. Sedangkan pada tahun 2015 adalah sebesar 6,81 meter (6,81% terhadap rata-rata tebal akuifer) atau terjadi tingkat kenaikan sebesar 6,46% pada musim hujan terbasah dan sebesar 9,22 meter (9,22% terhadap rata-rata tebal akuifer) atau terjadi tingkat kenaikan sebesar 1,39% pada musim kemarau terkering. Dengan melihat kondisi muka air tanah pada musim kemarau dan musim hujan di tersebut di atas, rerata muka air tanah di CAT Yogyakarta – Sleman tahun 2015 masih <20% terhadap tebal rata-rata akuifer sesuai target tahun 2015.

Pada tahun 2016 dilakukan peningkatan upaya konservasi dan pemantauan muka air tanah untuk mempertahankan rerata penurunan muka air tanah tetap pada kondisi <20%, melalui kegiatan :

- a. Pembangunan 100 unit sumur resapan air tanah;
- b. Konservasi air tanah paling sedikit 150,72 m<sup>3</sup> di 100 titik;
- c. Pembangunan 5 unit sarana pemantauan air tanah dalam;
- d. Pemeliharaan/perbaikan 3 unit sumur pemantauan air tanah dalam.

#### **4. Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Konservasi Energi**

Mengacu Rencana Umum Energi Daerah (RUED), pelaksanaan konservasi energi di DIY diarahkan untuk mengurangi konsumsi energi sebesar 12,5 % di tahun 2025 dan 24 % di tahun 2050. Sebagai upaya mencapai target tersebut, dilakukan pendekatan konservasi energi di berbagai sektor. Pelaksanaan konservasi energi melalui APBD DIY Tahun 2015 diprioritaskan untuk sektor publik yaitu gedung pemerintah, yang dilakukan melalui pelaksanaan audit energi gedung pemerintahan khususnya milik pemerintah daerah. Pelaksanaan audit energi tersebut menghasilkan rekomendasi yang berisi arahan untuk melakukan efisiensi dalam pemanfaatan energi listrik.

Pada tahun 2014, pencapaian kinerja pelaksanaan konservasi energi yang dilakukan melalui kegiatan audit energi sebesar 10% (15 gedung pemerintah terhadap 150 gedung pemerintah). Adapun target pelaksanaan konservasi energi sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar 9% (14 gedung pemerintah), dengan realisasi sebesar 18 % (27 gedung pemerintah).

#### **5. Pencapaian Kinerja Pengelolaan Usaha Pertambangan**

Peningkatan kinerja pengelolaan usaha pertambangan APBD 2015 dilakukan melalui akselerasi peningkatan nilai tambah mineral dan batuan dengan mewajibkan melakukan pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi, khususnya bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan maupun dengan pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Pengolahan. Sampai dengan tahun 2015, pencapaian kinerja pengelolaan usaha pertambangan adalah sebesar 11% (5 pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Pengolahan dari total potensi izin sebanyak 45).

#### II.3.2.1.5 Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan sektor dominan pendorong pertumbuhan ekonomi di DIY. Perkembangan sektor perdagangan tidak terlepas dari dukungan sektor ekonomi lainnya serta dukungan infrastruktur yang berupa sarana dan prasarana penunjang pertumbuhan sektor perdagangan seperti pergudangan, pasar modern, pasar tradisional dan lainnya.

Sektor perdagangan terbagi dalam perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Perkembangan perdagangan luar negeri di DIY dapat dilihat dari kegiatan ekspor. Pada tahun 2016, nilai ekspor DIY tercatat senilai 252,18 Juta US\$ dengan jumlah komoditi yang diekspor sebanyak 88 komoditi, jumlah eksportir sebanyak 286 eksportir serta terdapat 112 negara tujuan ekspor. Jumlah nilai ekspor tersebut meningkat sebesar 4% jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang hanya sebesar 242,47 Juta US\$. Peningkatan ekspor DIY terutama didukung oleh 3 (tiga) komoditas utama ekspor yaitu produk pakaian jadi, tekstil, mebel kayu, sarung tangan kulit. Tujuan ekspor komoditas DIY terutama pada Jerman, diikuti oleh Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan Belanda

**Tabel II-125 Perkembangan Ekspor di DIY, Tahun 2012-2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Volume (Juta kg)	33,54	34,03	57,51	56,90	57,01
Nilai (Juta US \$)	177,07	211,76	233,25	242,47	252,18
Komoditi	108	127	166	110	88
Negara	98	111	114	115	112
Eksportir	235	286	310	325	286

Sumber: Dataku Bappeda DIY, Tahun 2017

Perkembangan di sektor perdagangan dalam negeri dapat dilihat dari banyaknya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Tercatat pada tahun 2012-2016 jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang terdaftar di DIY mengalami peningkatan tiap tahunnya. Realisasi jumlah kumulatif penerbitan SIUP pada tahun 2016 sebanyak 48.517 SIUP, tumbuh sebesar 4,10% apabila dibandingkan dengan realisasi SIUP pada tahun sebelumnya sebanyak 46.607 SIUP. Dilihat dari klasifikasinya, usaha perdagangan di DIY didominasi oleh golongan pengusaha kecil sebesar 87,01%.

**Tabel II-126 Perkembangan Jumlah SIUP Berdasarkan Golongan Usaha di DIY, Tahun 2012-2016**

No	Golongan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pengusaha Besar	1.040	1.057	1.067	1.076	1.094
2	Pengusaha Menengah	2.316	2.629	2.717	2.684	2.872
3	Pengusaha Kecil	38.589	40.132	40.710	40.861	42.217
4	Pengusaha Mikro	872	1.644	1.821	1.986	2.334
Jumlah		42.817	45.462	46.855	46.607	48.517

Sumber: Dataku Bappeda DIY, Tahun 2017

Jumlah TDP sepanjang tahun 2012-2016 mengalami pertumbuhan tiap tahunnya. Realisasi jumlah TDP DIY Per Kabupaten / Kota pada tahun 2016 sebanyak 52.142 unit, tumbuh sebesar 4,33% dari tahun sebelumnya sebanyak 49.976 unit. Mayoritas TDP pada tahun 2016

dimiliki oleh pengusaha di Kota Yogyakarta sebesar 29,25%, diikuti oleh pengusaha di Kab. Sleman (28,26%), dan pengusaha di Kabupaten Bantul (21,41%).

**Tabel II-127 Perkembangan Jumlah Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di DIY per Kabupaten Kota, Tahun 2012-2016**

No	Kab/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
1	Bantul	6.670	9.571	10.152	10.627	11.163
2	Sleman	9.440	13.308	13.815	14.294	14.737
3	Kulon Progo	2.427	3.875	3.880	4.598	5.316
4	Gunungkidul	4.799	5.144	5.430	5.578	5.676
5	Yogyakarta	12.724	13.689	14.448	14.879	15.250
<b>Jumlah</b>		<b>36.060</b>	<b>45.587</b>	<b>47.725</b>	<b>49.976</b>	<b>52.142</b>

Sumber: Dataku Bappeda DIY, Tahun 2017

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, perkembangan TDP berdasarkan bentuk perusahaan terus mengalami pertumbuhan tiap tahun. Mayoritas TDP dimiliki oleh perusahaan perorangan (PO). Pada tahun 2016, perusahaan perorangan (PO) masih mendominasi kepemilikan TDP sebanyak (60,68%) dari total TDP. Sementara TDP paling sedikit dimiliki oleh bentuk perusahaan Firma (Fa) dengan persentase sebesar (0,14%).

**Tabel II-128 Perkembangan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di DIY Berdasarkan Bentuk Perusahaan, Tahun 2012-2016**

No	Bentuk Perusahaan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Perseroan Terbatas (PT)	4,857	5,234	5.726	6.176	6.638
2	Koperasi	914	951	976	1.000	1.017
3	CV	9,519	10,244	10.997	11.623	12.190
4	Fa	69	69	69	71	73
5	Perorangan (PO)	27,207	28,592	29.551	30.559	31.642
6	Bentuk Usaha Lain	392	400	406	411	416
<b>Jumlah</b>		<b>39.458</b>	<b>45.490</b>	<b>47.725</b>	<b>49.840</b>	<b>51.970</b>

Sumber: Dataku Bappeda DIY, Tahun 2017

Perkembangan sektor perdagangan DIY juga didukung dengan tersedianya sarana perdagangan seperti toko modern dan pasar tradisional. Perkembangan sarana perdagangan tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah toko modern hingga tahun 2016 sejumlah 777 unit, sementara jumlah pasar tradisional sebanyak 349 unit. Peningkatan jumlah toko modern yang lebih pesat dibandingkan dengan pasar tradisional ini perlu menjadi perhatian. Pasar tradisional merupakan pusat ekonomi rakyat yang menjadi penyangga perekonomian nasional, sehingga diperlukan peningkatan kelembagaan, kapasitas pelaku usaha dan sarana prasarana penunjang di pasar-pasar tradisional agar pasar tradisional memiliki daya saing dan tetap terjaga eksistensinya.

**Tabel II-129 Perkembangan Toko Modern dan Pasar Tradisional, Tahun 2012-2016**

Jenis Toko	2012	2013	2014	2015	2016
Toko Modern	416	644	661	710	777
Pasar Tradisional	333	532	361	361	349
<b>Jumlah</b>	<b>749</b>	<b>1.176</b>	<b>1.022</b>	<b>1.071</b>	<b>1.126</b>

Sumber: Dataku Bappeda DIY, Tahun 2017

### II.3.2.1.6 Urusan Perindustrian

Industri di DIY didominasi oleh sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan jumlah sebesar 90.906 unit usaha. Jumlah IKM di DIY dalam kurun waktu lima tahun terakhir selalu mengalami pertumbuhan tiap tahunnya. Pada tahun 2016, jumlah IKM di DIY mengalami pertumbuhan sebesar 2.269 unit usaha (2,56%) dibanding tahun 2015. Peningkatan jumlah IKM di DIY diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 7.311 orang (2,24%) apabila dibandingkan tahun sebelumnya. Diharapkan IKM mampu menjadi pendorong utama perekonomian di DIY karena keberadaan IKM dirasa mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup banyak.

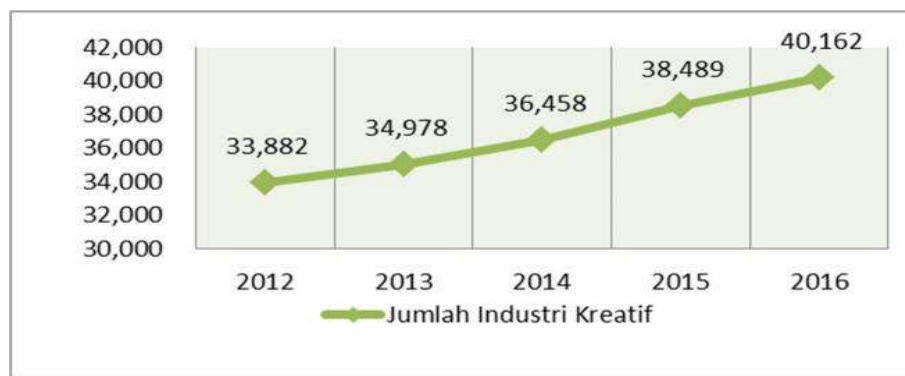
**Tabel II-130 Perkembangan IKM di DIY, Tahun 2012-2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Unit Usaha	81.523	84.234	86.087	88.637	90.906
Penyerapan Tenaga Kerja (orang)	300.539	310.173	318.858	326.669	333.980
Nilai Investasi (Rp Juta)	1.010.585	1.064.180	1.151.443	1.187.754	1.269.897
Nilai Produksi (Rp Juta)	3.199.224	3.294.485	3.399.909	3.489.769	3.643.222
Nilai Bahan Baku dan Penolong (RpMilyar)	1.388.023	1.449.435	1.524.806	1.550.832	1.593.631

Sumber: Dataku Bappeda DIY, Tahun 2017

Untuk dapat bersaing dengan industri luar, produk-produk DIY harus memiliki nilai tambah yang lebih dari pesaingnya. Nilai tambah adalah selisih antara nilai produksi (output) dengan nilai bahan baku dan penolong lainnya (input). Pada tahun 2016 total Nilai Bahan Baku dan Penolong IKM adalah sebesar Rp. 1,5 trilyun. Sementara itu, untuk Nilai Produksi ditaksir berjumlah sebesar Rp. 3,6 trilyun. Dengan demikian nilai tambah produk IKM di DIY bernilai sebesar Rp. 1,5 trilyun pada tahun 2016. Nilai tambah tersebut meningkat sekitar 5,71% dibandingkan dengan tahun 2015.

Sementara untuk IKM Industri Kreatif di DIY selama kurun waktu 2012 – 2016 mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Jumlah IKM Industri Kreatif pada tahun 2016 sebesar 40.162 unit usaha, naik sebesar 4,35% dibanding tahun sebelumnya dengan jumlah sebesar 38.489 unit usaha. Jumlah IKM Industri Kreatif tercatat mendominasi sebesar 44,18% dari jumlah total IKM di DIY.



Sumber: Dataku Bappeda DIY, Tahun 2017

**Gambar II.69 Perkembangan IKM Industri Kreatif di DIY, Tahun 2012-2016**

Sektor industri pengolahan sebagai sektor yang dominan di DIY dan didukung oleh potensi sumber daya manusia yang memadai dan kekayaan warisan budaya yang istimewa diharapkan dapat membuka peluang industri pengolahan berbasis budaya seperti kerajinan, batik, serta cinderamata khas DIY. Dukungan komunitas intelektual di DIY diharapkan akan membuka peluang inovasi produk dan variasi industri pengolahan yang lebih besar dengan memaksimalkan sektor industri kreatif. Keberadaan sektor industri kreatif dipandang mampu memberi solusi penciptaan sisi pembeda yang membuat DIY memiliki nilai tawar lebih dibanding daerah lain untuk menutupi permasalahan keterbatasan lahan dan modal yang dialami DIY.

Secara lebih luas, potensi ekonomi kreatif di DIY tidak hanya didukung oleh sektor industri pengolahan namun juga mencakup sektor lain seperti kuliner, musik, arsitektur, seni pertunjukan, seni rupa dan lainnya. Strategi umum pengembangan ekonomi kreatif DIY mencakup empat aspek. Pertama, perluasan pasar (ekspor dan domestik) yang diarahkan untuk mendorong ekspansi ekonomi kreatif ke pasar global. Kedua, fasilitasi ruang kreasi dan jejaring untuk mendorong perkembangan usaha. Ketiga, fasilitasi nilai ekonomi kreatif untuk mendorong perkembangan usaha yang sudah relatif tinggi. Keempat, fasilitasi start up usaha kreatif pemula.

#### II.3.2.1.7 Urusan Transmigrasi

Pemda DIY sebagai daerah pengirim calon transmigran telah bekerjasama dengan provinsi daerah penempatan dalam penyelenggaraan transmigrasi. Dengan adanya kerjasama tersebut, diharapkan dapat memudahkan penyelenggaraan transmigrasi sehingga permasalahan-permasalahan yang ada dapat diminimalisir sedini mungkin. Hingga saat ini, animo masyarakat DIY untuk bertransmigrasi masih cukup tinggi melebihi kuota yang diberikan oleh Pemerintah Pusat namun dengan kecenderungan menurun.

**Tabel II-131 Jumlah Animo Masyarakat dan Pendaftar Transmigrasi di DIY Tahun 2012-2016**

KAB/KOTA	2012		2013		2014		2015		2016	
	Animo	Pendaftar	Animo	Pendaftar	Animo	Pendaftar	Animo	Pendaftar	Animo	Pendaftar
	(KK)	(KK)	(KK)	(KK)	(KK)	(KK)	(KK)	(KK)	(KK)	(KK)
Yogyakarta	95	65	74	48	59	39	71	47	55	41
Sleman	491	480	465	465	468	468	281	281	286	286
Bantul	1.206	683	260	130	334	167	210	105	172	81
Kulon Progo	531	259	312	122	338	133	343	137	270	117
Gunungkidul	162	87	104	50	155	98	40	30	70	44
Jumlah	2.485	1.574	1.215	815	1.354	905	945	600	853	569

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

Selama kurun 2011-2016, Pemerintah DIY telah memberangkatkan transmigrasi sebanyak 923 KK terdiri dari 2.972 jiwa, jika dilihat dari daerah asal transmigran, selama kurun

waktu 2011 hingga 2016 mayoritas transmigran berasal dari Bantul dengan jumlah 296 KK atau 973 jiwa, sedangkan jumlah terendah dari Kota Yogyakarta dengan jumlah 86 KK (277 jiwa).

**Tabel II-132 Realisasi Pelaksanaan Transmigrasi Menurut Daerah Asal di DIY, Tahun 2011-2016**

Kabupaten/Kota	Tahun											
	2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
Yogyakarta	25	85	19	59	15	46	5	15	12	39	10	33
Sleman	70	233	56	170	10	31	11	36	22	82	9	27
Bantul	75	265	80	264	53	168	23	73	40	128	25	75
Kulon Progo	49	154	53	162	47	138	19	65	27	85	16	48
Gunungkidul	40	129	40	126	25	75	12	41	15	56	20	64
<b>Jumlah</b>	<b>259</b>	<b>866</b>	<b>248</b>	<b>781</b>	<b>150</b>	<b>458</b>	<b>70</b>	<b>230</b>	<b>116</b>	<b>390</b>	<b>80</b>	<b>247</b>

Sumber: BPS, DIY dalam Angka, beberapa tahun terbitan dan Disnakertrans DIY

**Tabel II-133 Perkembangan dan Distribusi Transmigran Asal DIY Menurut Provinsi Tujuan, Tahun 2013-2016**

Daerah Tujuan	Tahun							
	2013		2014		2015		2016	
	KK	%	KK	%	KK	%	KK	%
Sumatera Selatan	90	(60,00)	20	(28,6)	25	(21,6)	-	-
Kalimantan Barat	10	(6,7)	15	(21,4)	-	-	10	(12,5)
Kalimantan Tengah	25	(16,7)	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Utara	-	-	-	-	50	(43,1)	50	(62,5)
Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	20	(25,0)
Sulawesi Selatan	15	(10,0)	-	-	25	(21,6)	-	-
Sulawesi Tenggara	10	(6,7)	25	(35,7)	16	(13,8)	-	-
Bangka Belitung	-	-	10	(14,3)	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>150</b>	<b>(100)</b>	<b>70</b>	<b>(100)</b>	<b>116</b>	<b>(100)</b>	<b>80</b>	<b>(100)</b>

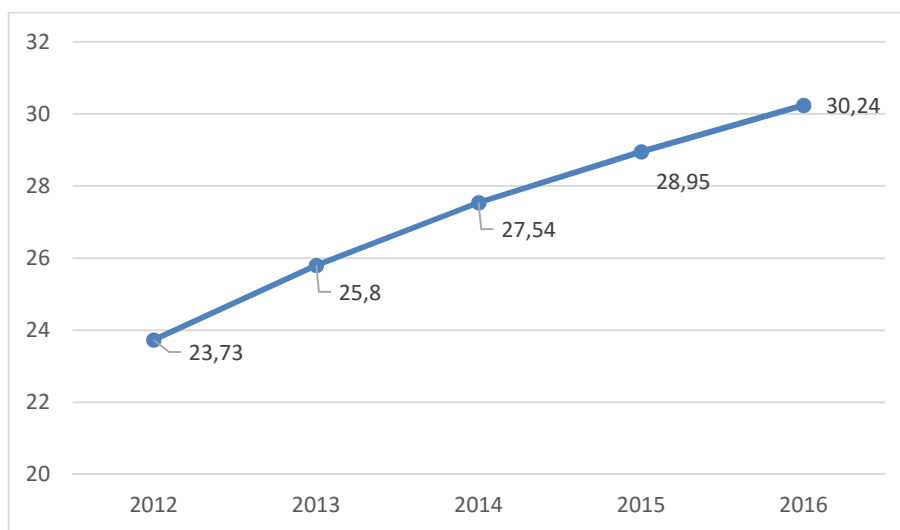
Berdasarkan lokasi penempatan transmigran, Provinsi Sumatera Selatan tercatat menjadi tujuan utama transmigrasi asal DIY selama tahun 2013 hingga 2015. Jumlah transmigran yang ditempatkan di Sumatera selatan mencapai 135 KK dengan proporsi 40,2%. Meskipun demikian, realisasi jumlah transmigran ke Sumatera Selatan dalam dua tahun terakhir cenderung menurun karena ada beberapa lokasi tujuan transmigrasi alternatif yang lain yang disediakan oleh pemerintah pusat dan pada tahun 2016 hanya ada 3 lokasi tujuan alternatif transmigran asal DIY yaitu adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan dengan proporsi terbanyak di Kalimantan Utara (62,5%) dengan jumlah keluarga sebanyak 50 KK.

Besarnya animo masyarakat terhadap program transmigrasi dan jumlah pendaftar calon transmigrasi belum sebanding dengan kuota/alokasi penempatan transmigrasi oleh

Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi. Oleh karena itu guna memenuhi kebutuhan pendaftar transmigrasi perlu dilakukan penambahan alokasi program penempatan melalui sharing anggaran pembiayaan APBD dengan daerah penempatan, meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, penjajakan kerjasama dengan daerah penempatan transmigrasi dan melakukan penjajakan pelaksanaan transmigrasi lokal.

#### II.3.2.1.8 Urusan Kelautan dan Perikanan

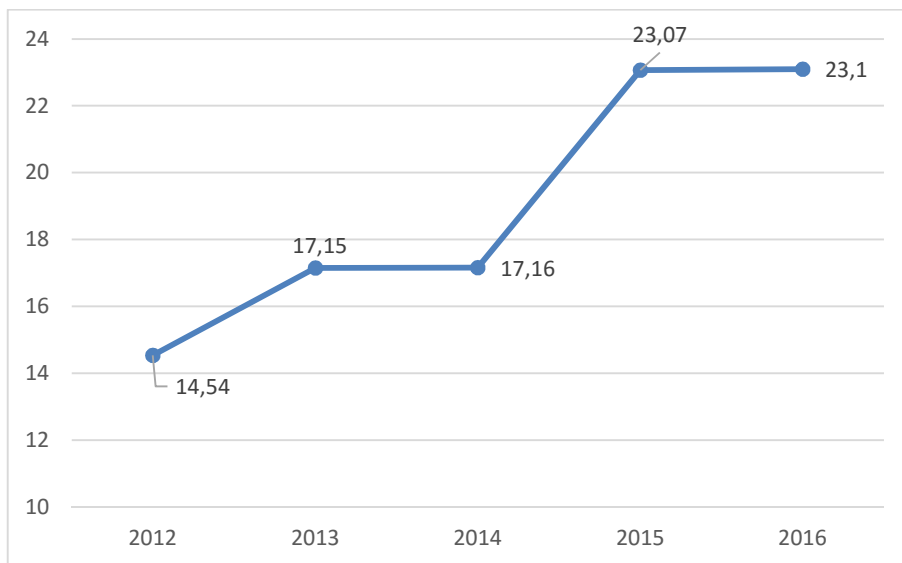
Ketersediaan ikan per kapita DIY mengalami kecenderungan meningkat dalam 5 tahun terakhir. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh produksi ikan di DIY yang terus tumbuh terutama pada budidaya perikanan. Walaupun demikian, ketersediaan ikan di DIY masih disertai dengan adanya pasokan ikan dari luar daerah. Tingkat ketersediaan ikan DIY ditunjukkan dalam gambar berikut:



Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2017

#### Gambar II.70 Tingkat Ketersediaan Ikan di DIY (Kg/Kapita/Tahun), Tahun 2012-2016

Peningkatan konsumsi ikan juga disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya asupan kebutuhan protein dari ikan. Rata-rata pertumbuhan konsumsi ikan DIY dalam periode tahun 2012 hingga 2016 sebesar 13,14%. Namun demikian konsumsi ikan DIY masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Oleh karena itu, penggiatan kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) memegang peranan penting dalam upaya peningkatan konsumsi ikan melalui berbagai kegiatan sosialisasi. Tingkat konsumsi ikan di DIY dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2017

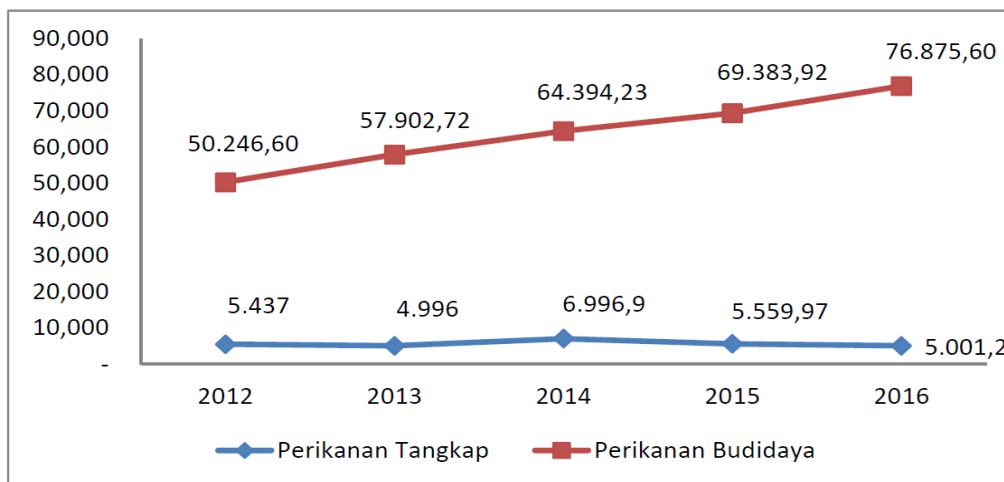
**Gambar II.71 Konsumsi Ikan di DIY (Kg/Kapita/Tahun), tahun 2012-2016**

Pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan di DIY dilakukan melalui peningkatan produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Produksi perikanan DIY terus mengalami peningkatan sejak tahun 2012. Jumlah produksi perikanan DIY selama periode 2012-2016 rata-rata tumbuh sebesar 18,12%.

Produksi perikanan budidaya mendominasi jumlah produksi perikanan DIY secara keseluruhan. Kontribusi rata-rata perikanan budidaya terhadap total produksi perikanan DIY selama lima tahun terakhir mencapai 91,79%, di mana pada tahun 2016 memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 93,89%. Hal ini dikarenakan keberhasilan budidaya perikanan air tawar khususnya di kabupaten Sleman yang selama ini menjadi basis pengembangan perikanan budidaya. Selain itu didukung pula dengan bertambahnya usaha budidaya lahan kering di Gunungkidul dan Kulon Progo dengan menggunakan sistem terpal, serta pemanfaatan embung untuk budidaya perikanan.

Sementara kontribusi perikanan tangkap cenderung menurun dari 9,76% pada tahun 2012 menjadi 6,11% pada tahun 2016, bahkan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 7,42%. Penurunan produksi perikanan tangkap disebabkan terjadinya *over fishing* pada jalur 1 dan *illegal fishing* serta belum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana perikanan tangkap seperti Kapal Inka Mina 30 GT dan Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto, serta penerapan teknologi penginderaan jarak jauh untuk mencari titik penangkapan ikan. Di sisi lain, budaya melaut yang masih tergolong baru ditambah dengan nelayan tangkap DIY yang sebagian besar merupakan nelayan sambilan di mana bertani menjadi mata pencaharian pokok, hal ini menyebabkan upaya peningkatan aktivitas penangkapan ikan di laut tidak mudah dilakukan dan masih memerlukan waktu lebih lama. Namun demikian, faktor cuaca yang tidak menentu adalah faktor utama yang sangat mempengaruhi produksi perikanan tangkap di DIY, sehingga kedepan perlu adanya optimalisasi teknologi prakiraan cuaca di laut serta mitigasi bencana laut, agar kedepannya nelayan dapat menentukan trip melaut yang

dapat dilakukan. Berikut grafik pertumbuhan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap DIY



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2017

**Gambar II.72 Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya DIY (Ton), Tahun 2012-2016**

### II.3.3 Fokus Layanan Urusan Penunjang

#### II.3.3.1.1 Urusan Perencanaan Pembangunan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam menyusun perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah DIY memadukan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas untuk mewujudkan perencanaan pembangunan DIY yang visioner dan implementatif.

Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan dilakukan dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom up* dan *top down* process. Artinya perencanaan daerah selain memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel dan konsisten dengan rencana lain yang relevan, kepemilikan rencana (*sense of ownership*) juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan

menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Mulai 2017 pemerintah menggunakan pendekatan *money follow function* menjadi *money follow program* adalah pendekatan penganggaran yang lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas nasional serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Pendekatan penganggaran *money follow program* ini mendukung pendekatan perencanaan yang holistik tematik yaitu penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan program prioritas, terintegrasi yaitu keterpaduan seluruh kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran prioritas nasional, dan spasial yaitu kegiatan prioritas yang direncanakan berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan di lapangan.

Dengan menggunakan pendekatan *money follow program*, jumlah kegiatan yang ada di Pemda DIY terus mengalami penurunan secara signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 kegiatan masih 2.809 kegiatan kemudian menjadi 2.566 kegiatan pada tahun 2015, 1.876 kegiatan pada tahun 2016 dan 872 kegiatan pada tahun 2017.

RPJMD 2017-2022 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

#### **II.3.3.1.2 Urusan Keuangan**

Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan mulai dari proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Selain itu akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik dalam arti bahwa proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan akan dihasilkan pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab.

Pengelolaan Barang Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi, dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dan untuk memperoleh data barang daerah yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan serta dalam rangka meningkatkan pengelolaan barang milik daerah Pemda DIY dan mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

### II.3.3.1.3 Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

#### 1. Pergeseran Paradigma dari Administrasi ke Manajemen ASN

Hadirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengubah paradigma manajemen kepegawaian, dari administrasi pegawai ke manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Administrasi ASN sekedar merupakan rangkaian aktivitas penyusunan dan pencatatan data serta informasi (drafting and recording data plus information) pegawai secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan ASN. Sementara Manajemen ASN adalah rangkaian aktivitas menilai ASN sebagai sumberdaya, aset, faktor determinan dalam sukses/gagalnya program-program pembangunan pemerintah, sehingga dalam manajemen ASN, program dan kegiatan terstruktur serta transparan dalam pengelolaan human capital ASN. Pemda DIY yang memiliki banyak predikat keunggulan perlu bergegas menjadi pioneer dalam mendesain dan mengimplementasikan paradigma baru manajemen ASN di lingkup Pemda.

Paradigma baru manajemen ASN memandang perlu ada perubahan dalam pengelolaan ASN, dari perspektif lama manajemen kepegawaian yang menekankan pada hak dan kewajiban individual pegawai menuju perspektif baru yang menekankan pada manajemen pengembangan SDM secara strategis (*strategic human resource management*).

**Tabel II-134 Data kesenjangan antara eksisting dengan kebutuhan pegawai Tahun 2017**

No.	Jenis Jabatan	Bezetting	ABK	Selisih
1.	Jabatan Pimpinan Tinggi	42	46	4
2.	Jabatan Administrator	220	228	8
3.	Jabatan Pengawas	597	667	70
4.	Jabatan Pelaksana	4.541	8.055	3.514
5.	Jabatan Fungsional	7.312	7.612	300
	<b>Jumlah</b>	<b>12.712</b>	<b>16.608</b>	<b>3.896</b>

Sumber: BKD DIY, 2017

Untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi pegawai ASN perlu dibangun sistem manajemen ASN yang profesional dan terintegrasi (*unified sytem*). Manajemen ASN dilaksanakan berdasarkan asas “merit” yang menekankan perbandingan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh calon pegawai dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi yang sejalan dengan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Manajemen ASN meliputi tahapan berikut ini.

#### a. Rekrutmen

Proses awal dari manajemen ini adalah rekrutmen yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing instansi atau lembaga terkait. Termasuk dengan memerhatikan Analisis Jabatan yang direncanakan oleh pemerintah seperti kebutuhan pegawai, kewenangan, tanggungjawab, hak, syarat-syarat dan lainnya sebagai penunjang jabatan yang akan ditempati oleh calon ASN. Secara umum, dalam merekrut pegawai ASN

menurut kepada anjab (analisis jabatan) adalah menentukan hal yang bersifat kualitatif. Sedangkan Analisis Beban Kerja meliputi beban yang kerja yang akan ditempuh oleh pegawai seperti jam kerja dan untuk mengetahui informasi jabatan yang telah dilakukan melalui proses penelitian untuk mendapatkan kinerja sesuai dengan jabatan tersebut. Untuk rekrutmen digunakan sistem CAT (computer assessment test) baik untuk CPNS maupun Pegawai Non PNS.

#### **b. Pengembalian Pegawai**

Untuk mencapai Reformasi Birokrasi, Pemda menerapkan sistem ini sebagai salah satu penunjang tercapainya Reformasi Birokrasi dalam lingkup ASN. Mengembangkan kompetensi pegawai menjadi suatu kegiatan yang perlu dan khusus untuk tercapainya reformasi ini. Upaya yang dilakukan dalam melaksanakan program ini adalah dengan memberikan atau mengadakan baik tugas belajar, ijin belajar, seminar, pelatihan, kursus serta diklat teknis lainnya untuk menunjang kinerja pegawai dalam menduduki jabatannya. Dengan adanya kegiatan seperti ini bisa memaksimalkan kinerja pegawai aparatur sipil negara menjadi lebih baik.

#### **c. Promosi**

Promosi yang dilakukan disini adalah adanya kenaikan pangkat jika terdapat kinerja yang baik yang ditunjukkan oleh pegawai dilingkungan aparatur sipil negara. Setiap pegawai memiliki hak yang sama untuk bisa menuju kepada jabatan ini jika kinerja yang dilakukan telah maksimal dan telah mendapatkan nilai yang objektif dari pemerintah atau kepala instansi yang berkaitan sehingga bisa dilaksanakan promosi ke jabatan yang lebih tinggi. Penempatan ASN sesuai dengan kualifikasi serta kompetensinya merupakan dasar dalam pengambilan keputusan dan kebijakan promosi, sehingga profil jabatan masing-masing pegawai merupakan acuan yang sangat diperlukan.

#### **d. Kesejahteraan**

Kesejahteraan setiap ASN perlu diperhatikan sehingga pada setiap tahunnya terdapat perubahan kebijakan mengenai pemenuhan kesejahteraan aparatur sipil negara seperti dalam pemberian tunjangan untuk PNS yang telah ditentukan dan dianggarkan pada tiap tahunnya. Namun, tunjangan tidak semata-mata diberikan begitu saja, yang bersangkutan harus mengikuti tahap yang telah menjadi syarat untuk proses Reformasi Birokrasi. Besarnya tunjangan yang didapat oleh pegawai tergantung kepada kinerja, tanggungjawab, beban dan resiko yang telah dilakukan.

#### **e. Disiplin**

Manajemen kinerja merupakan pembinaan dan penialain pegawai yang dilakukan oleh pemerintah terkait dalam memberikan sanksi atas tidak tercapainya kinerja dari pegawai yang bersangkutan baik PNS ataupun PPPK (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja). Pembinaan ini dilakukan menurut kepada prestasi dan sistem karir.

Setelah pembinaan oleh pemerintah atau pihak terkait, maka diterapkan disiplin etika yang harus diterapkan oleh pegawai. Kode etik yang tidak sesuai dengan peraturan, maka

diperlukan sanksi yang tegas untuk tetap berjalannya rencana untuk mencapai Reformasi Birokrasi.

#### f. Pensiun

Hingga tahap akhir dari manajemen ASN ini yaitu pensiun maka berakhir tugas sebagai aparatur sipil negara di instansi terkait. Pada tahap akhir ini, masih merupakan bagian dari pemenuhan kesejahteraan pegawai. Disini, diberikan tunjangan sebagai penghormatan dan penghargaan atas dedikasi yang telah dilakukan oleh pegawai tersebut untuk melayani masyarakat dan mengabdikan kepada negara.

**Tabel II-135 Perkembangan Jumlah PNSD Tahun 2012-2017**

No.	Tahun	Jumlah PNSD	Kebutuhan	Kurang/lebih	Rasio Riil Terhadap Kebutuhan
1.	2012	6.133	9.097	-2.964	67,42
2.	2013	7.385	10.268	-2.883	71,92
3.	2014	6.814	10.502	-3.688	64,88
4.	2015	7.139	10.547	-3.408	67,69
5.	2016	6.273	9.911	-3.638	63,29
6.	2017	12.712	24.330	-11.618	52,25

Sumber: BKD DIY, 2017

Para pejabat ASN, khususnya Pejabat Pimpinan Tinggi sebagai penentu arah dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintahan menjadi garda terdepan yang menjadi panutan, dan penentu arah dalam memberikan service kepada publik. Oleh karena itu menempatkan pegawai ASN pada Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) harus selektif yang betul-betul bisa mendapatkan pejabat yang kompeten dibidangnya. Sistem manajemen ASN diarahkan untuk mendapatkan pejabat ASN yang profesional. Sistem rekrutmen JPT (sebelumnya dikenal dengan istilah Eselon/Struktural) polanya diubah dengan merit system melalui pelamaran, seleksi, dan kontrak kinerja jabatan yang jelas, obyektif, dan transparan sebagaimana telah diamanatkan dalam UU ASN.

#### 2. Arus Besar Purna Tugas Pejabat Struktural Pemda DIY 2017-2020

Pos jabatan struktural di lingkup Pemda DIY dalam 3 tahun ke depan akan ditandai dengan arus besar purna-tugas Pejabat Struktural Pemda DIY (hingga tahun 2020). Berdasar Data dari BKD DIY (Agustus 2017), arus purna tugas pejabat struktural itu tersaji sebagai berikut.

**Tabel II-136 Data Pejabat Pensiun 2017 s/d 2020**

Eselon	Formasi	Pensiun s/d 2017	Pensiun s/d 2018	Pensiun s/d 2019	Pensiun s/d 2020	Total Pensiun s/d 2020
I	1	0	0	0	0	0
II	45	4	7	2	11	24
III	230	27	30	22	27	106
IV	670	54	50	45	49	198
V	69	9	15	7	8	39

Eselon	Formasi	Pensiun s/d 2017	Pensiun s/d 2018	Pensiun s/d 2019	Pensiun s/d 2020	Total Pensiun s/d 2020
Jumlah	1.015	94	102	76	95	367

Sumber: BKD DIY, 2017

Arus purna-tugas yang sedemikian besar itu perlu direspon dan diantisipasi dengan penyiapan kader-kader pengganti yang perlu mulai diidentifikasi, ditemukeni, termasuk dibekali agar siap menggantikan pos-pos jabatan itu dengan lebih mumpuni. Perlu segera dilakukan proses penelusuran melalui *assessment* atau *talent-pool* atau *talent-scout* dan dilanjutkan dengan pembekalan melalui diklat, pemagangan, kursus, dan lain sebagainya untuk meng-upgrade kompetensi dan kapasitas para calon penerus pos struktural Pemda DIY di masa depan tersebut.

#### II.3.3.1.4 Urusan Penelitian dan Pengembangan

Para pemangku kepentingan utama dalam penelitian dan pengembangan di DIY sangat kaya dan beragam. Mensinergikan sumberdaya kelitbangan yang kaya tidak mudah, sekalipun ini tetap menjadi kebutuhan bagi pembangunan daerah. Sinergisitas mungkin dijalankan dalam relasi yang saling mengenal (tepung), memahami (dunung), berjejaring kerja dan melaksanakan (srawung). Sumberdaya kelitbangan di DIY diantaranya adalah: Perguruan Tinggi, Pemda, Instansi Vertikal, Dunia Usaha (PMA, PMDN, dan UMKM), Desa, Komunitas, dan sebagainya), Konsultan, dan Agensi Pengetahuan dan Teknologi. Oleh karena itu, sinergisitas penelitian dan pengembangan dapat ditempuh dengan membangun jejaring yang kuat terhadap pemangku kepentingan tersebut.

Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dipahami sebagai “suatu interaksi subsistem pengetahuan dan eksploitasi pengetahuan untuk mengkomersialisasikan pengetahuan baru”. Struktur pembentuk terdiri dari dua dimensi utama untuk memahami fungsi sub- sistem teritorial ini, yakni terdiri dari infrastruktur pemerintahan dan suprastruktur dunia usaha dan masyarakat.

SIDa adalah salah satu pendekatan pembangunan yang dilakukan secara menyeluruh, sistematis, sistemik, dan berkelanjutan. Sebagai sebuah cara pendekatan pembangunan, SIDa memerlukan obyek pembangunan yang akan diusung dalam sebuah sistem. Obyek yang dimaksud berwujud “tema strategis” yang merupakan bidang yang menjadi prioritas, dan diperoleh dari hasil analisis terhadap seluruh potensi sumberdaya daerah.

Dalam menetapkan jenis bidang prioritas dalam SIDa, beberapa hal yang dipertimbangkan di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Didukung oleh potensi sumberdaya yang dimiliki daerah;
2. Kesesuaian terhadap visi pembangunan daerah;
3. Adanya kesepakatan dari semua *stakeholder*;
4. Menjadi “ikon daerah”.

Supaya penguatan SIDa memiliki kontribusi yang positif terhadap perekonomian daerah, maka penguatan SIDa harus diintegrasikan dan merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah DIY. Dalam konteks pembangunan daya saing daerah, SIDa merupakan suatu strategi pembangunan untuk diterapkan oleh pemerintah DIY dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di DIY.

Berdasarkan Undang-Undang No 18/2002 tentang “Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”, serta Peraturan Pemerintah Nomor 20/2005 tentang “Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan”, memberikan arahan kepada pemerintah dan pemerintah daerah, berkaitan dengan upaya menata, mengatur, dan menghasilkan teknologi, yang lebih bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat dan dunia usaha.

Peraturan bersama Menristek RI No 03/2012 dan Mendagri RI No 36/2012 tentang “Penguatan Sistem Inovasi Daerah”, disebutkan bahwa Sistem Inovasi Daerah (SIDa) merupakan keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuh kembangkan inovasi yang dilakukan bersama antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah. Melalui pendekatan pembangunan SIDa ini, keseluruhan pelaku, lembaga jaringan, kemitraan, aksi, dan proses produksi serta kebijakan yang mempengaruhi arah perkembangan, kecepatan, dan difusi inovasi serta proses pembelajaran dilaksanakan untuk mewujudkan pembangunan sebuah daerah dengan daya saing yang tinggi.

Peningkatan daya saing dan kapasitas pemerintah daerah untuk melaksanakan inovasi sebagai suatu agenda kerja merupakan suatu keniscayaan dan harus dilakukan dengan komitmen tinggi, menjadikannya suatu program yang strategis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program strategis ini disusun berdasarkan landasan Sistem Inovasi Daerah, termasuk penguatan kelembagaan, mekanisme hubungan dan dokumen rencana yang berkelanjutan.

Dalam rangka menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha dan masyarakat, Pemda DIY menyusun kebijakan untuk menata, mengatur kelembagaan yang sistematis, dan berjangka panjang untuk mendorong, menyebarluaskan dan menerapkan inovasi teknologi dalam pembangunan yang dibangun melalui SIDa. Beberapa kondisi yang perlu direspon dalam pengembangan SIDa itu antara lain sebagai berikut:

Dalam dasawarsa terakhir ini terjadi pergeseran dari ekonomi yang berbasis industri menuju ekonomi berbasis pengetahuan, ide, gagasan kreatif.

Daya saing daerah ditentukan kemampuan memanfaatkan SDM melalui inovasi.

Sistem inovasi dibutuhkan karena karakteristik pasar yang dinamis, kompetisi global, kecenderungan membentuk jejaring, posisi tenaga kerja dengan upah tinggi, ketrampilan luas dengan berbagai disiplin pembelajaran tanpa kenal waktu dan sepanjang hayat, dan

Pengelolaan SDM kolaboratif serta rendahnya jiwa kewirausahaan masyarakat

#### **II.3.3.1.5 Urusan Pengawasan**

Dalam rangka mewujudkan clean government and good governance di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, maka dilakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, antara lain dimaksudkan bahwa :

Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah.

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi pengawasan internal merupakan bagian tak terpisah dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja pengawasan internal, khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh entitas unit kerja dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata kelola pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Pencegahan korupsi memberikan garansi bagi penyelarasan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan, yang pada akhirnya dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan, sekaligus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini (early warning system) terhadap potensi penyimpangan / kecurangan yang terjadi, disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.

Pengawasan internal adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektifitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Untuk itu, APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan fungsinya guna memberi nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini sejalan dengan peran pengawasan internal untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (risk management), pengendalian (control) dan tata kelola (governance) organisasi. APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pengawasan diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Sampai dengan bulan Desember 2016 telah dilaksanakan pemeriksaan reguler sebanyak 180 obyek pemeriksaan, serta pengukuran kinerja instansi atas pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2015 terhadap 34 SKPD di lingkungan Pemerintah DIY. Hasil dari pemeriksaan tahun 2016 terdapat 345 temuan dengan 799 rekomendasi dan telah ditindak lanjuti sejumlah 658 (82.35 %). Adapun 141 rekomendasi baru dalam proses tindak lanjut, hal ini dikarenakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Jenderal Kementerian

Dalam Negeri RI pada bulan Juni 2016 di Pemerintah Daerah DIY baru diterimakan bulan Desember 2016.

Hal-hal yang telah dilakukan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan internal terhadap Pemerintah Daerah DIY Tahun 2016 antara lain adalah:

- a. Pemeriksaan berkala, sewaktu-waktu dan pemeriksaan terpadu.
- b. Pemeriksaan khusus dan pengembangan temuan.
- c. Kegiatan pengusutan.
- d. Melakukan Evaluasi LAKIP.
- e. Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- f. Review Atas Laporan Keuangan SKPD dan Pemda DIY.
- g. Evaluasi AKIP Kabupaten/Kota
- h. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD).
- i. Sedangkan bentuk dan hasil pengawasan lainnya meliputi :
- j. Pengujian laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari SKPD.
- k. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijaksanaan, pelaksanaan program dan kegiatan.
- l. Pencermatan RKA SKPD.
- m. Consulting dan Quality Assurance.
- n. Melakukan Kas Opname dan Stok Opname.
- o. Pendampingan pengelolaan dana keistimewaan SKPD.

Beberapa kegiatan-kegiatan yang juga dilaksanakan dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengawasan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis.
- b. Melaksanakan inventarisasi temuan pengawasan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan.
- c. Melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan tingkat Daerah dan mengikuti pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan APIP tingkat Nasional serta tindak lanjut dengan BPK.
- d. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah dengan Inspektorat Kabupaten/Kota dan mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Nasional (RAKORWASDANAS) dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis.
- e. Menyelenggarakan Rapat Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) untuk memaparkan temuan hasil pemeriksaan APIP antara lain hasil pemeriksaan : Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY yang dihadiri oleh semua Kepala SKPD se Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten/Kota dan pihak-pihak terkait lainnya.
- f. Memaparkan temuan hasil pemeriksaan Kabupaten/Kota pada acara Rapat Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) di Kabupaten/Kota masing-masing.
- g. Melakukan penilaian Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P) kepada PNS Daerah Istimewa Yogyakarta Golongan III/a ke atas untuk dilaporkan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Menteri Dalam Negeri.

- h. Membantu kelancaran tugas Tim Daerah dan Tim Pelaksana Teknis Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD).
- i. Membantu Tim Daerah dan Tim Pelaksana Teknis Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
- j. Penggerakan Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012.

Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN serta agar mampu bersaing di bidang pengawasan, Pemerintah Daerah DIY terus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada perubahan paradigma dari keberhasilan input menjadi tercapainya keseimbangan antara output dengan outcome.

Pelaksanaan pengawasan perlu disusun melalui perencanaan yang matang, sehingga tidak lagi terjadi kegiatan pengawasan yang tumpang tindih ataupun pembatalan obyek pemeriksaan. Terkait dengan hal tersebut dan mengacu pada Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah DIY melaksanakan sinergitas kebijakan pengawasan di daerah dengan mengedepankan peran *consulting* dan *quality assurance* terhadap Obyek Pemeriksaan dan sekaligus untuk membantu dan mendorong agar tujuan Pemerintah Daerah DIY dapat dicapai secara optimal.

#### **II.3.3.1.6 Urusan Sekretariat Dewan**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 95 ayat (1) menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah. Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan Pemerintah Daerah DIY berkewajiban mengatur dan mengelola urusan pemerintahan untuk melaksanakan pembangunan secara menyeluruh yang menempatkan rakyat sebagai subyek dan obyek pembangunan.

Sekretariat DPRD DIY berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2015 mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Sehubungan dengan hal itu, sebuah konsep baru mulai diperkenalkan yaitu konsep (*Good Governance*) tata pemerintahan yang baik. *Good governance* menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah, tetapi menekankan pada

pelaksanaan fungsi pemerintahan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat madani dan pihak swasta. *Good governance* juga berarti implementasi kebijakan sosial-politik dan kinerja dari lembaga pemerintahan untuk kemaslahatan rakyat banyak, bukan hanya kemakmuran orang-per-orang atau kelompok tertentu.

Sekretariat DPRD strategis menjadi jembatan komunikasi yang harmonis antara Eksekutif dan Legislatif dalam membuat kebijakan daerah dan penyusunan produk hukum daerah guna menunjang program-program pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat DIY.

Adapun hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam penyelenggaraan ketugasan Sekretariat DPRD ke depan adalah:

1. Perlunya peningkatan kualitas pelaksanaan tugas fungsi DPRD dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan DIY melalui penyelesaian Regulasi/Produk Hukum Daerah, Penganggaran dan Pengawasan Dewan yang tepat waktu.
2. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, akan mewarnai pengambilan keputusan terhadap kebijakan yang ditetapkan, sehingga alokasi waktu pembahasan bahan acara tidak dapat diseragamkan.
3. Perubahan kebijakan pusat yang begitu cepat yang berdampak pada aturan-aturan dan mekanisme yang sifatnya teknis yang perlu disiapkan oleh daerah dan membutuhkan waktu untuk penyesuaian, terutama kebijakan yang berbentuk Peraturan Daerah yang harus melibatkan DPRD.
4. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja DPRD kepada masyarakat penyebarluasan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kinerja dan hasil kerja dewan melalui berbagai macam media komunikasi kepada masyarakat tetap menjadi bagian dari fasilitasi kedewanan.
5. Kebutuhan ruang kerja bagi Anggota Dewan yang belum memadai yang menyebabkan kinerja masing-masing anggota belum maksimal karena ruang kerja Anggota DPRD masih tergabung dalam ruang rapat fraksi maupun ruang rapat komisi. Hal ini juga disebabkan oleh keterbatasan lahan kawasan perkantoran DPRD di Jalan Malioboro Nomor 54 Yogyakarta. Untuk meningkatkan optimalisasi kinerja pimpinan dan anggota DPRD DIY diperlukan bangunan yang memadai.
6. Sekretariat DPRD mempunyai peran strategis sebagai unsur SKPD (eksekutif) dan penyelenggaraan pelayanan kepada DPRD yang secara tidak langsung diperlukan untuk menjaga harmonisasi dan kelancaran hubungan koordinasi antara Eksekutif dan Legislatif.
7. Adanya rangkai jabatan antar alat kelengkapan DPRD menuntut penyusunan jadwal kegiatan antara Alat Kelengkapan DPRD yang lebih cermat, agar tidak berbenturan.
8. Pengembangan e-Parlemen dan perpustakaan DPRD sebagai tempat pembelajaran bagi masyarakat.

### II.3.4 Fokus Layanan urusan Keistimewaan

**Tabel II-137 Kinerja Capaian Fisik dan Keuangan Per Urusan 2013-2017**

Tahun	Total Pagu Dana Keistimewaan	Pengisian Jabatan		Kelembagaan		Kebudayaan		Pertanahan		Tata Ruang	
		Realisasi fisik (%)	Realisasi keuangan (%)	Realisasi fisik (%)	Realisasi keuangan (%)	Realisasi fisik (%)	Realisasi keuangan (%)	Realisasi fisik (%)	Realisasi keuangan (%)	Realisasi fisik (%)	Realisasi keuangan (%)
2013	231.392.653.500	-	-	54,98	39,39	27,93	22,5	87,3	70,36	16,62	13,06
2014	523.874.719.000	100	57,39	100	80,2	86,11	71,43	97,27	31,92	85	65,42
2015	547.450.000.000	-	-	100	89,48	95,12	84,68	100	88,59	97	96,43
2016	547.450.000.000	-	-	100	94,49	99,94	94,67	94,22	79,37	99,54	99,09
2017	800.000.000.000	100	88,69	90	77,44	99,62	95,69	99,86	89,33	99,57	99,31

Kinerja capaian fisik dan keuangan yang tersaji pada tabel di atas, merupakan akumulasi pelaksanaan lima urusan yang menjadi kewenangan DIY, yang terdiri dari Urusan Kebudayaan, Urusan Kelembagaan, Urusan Tata Ruang, Urusan Pertanahan, dan Urusan Tatacara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

Berikut catatan beberapa implementasi dari setiap urusan dalam kerangka Keistimewaan DIY:

#### 1. Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY

Pada tahun 2014 Dais pada urusan ini digunakan untuk menyusun Draft Perdas Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, sedangkan pada tahun 2017 digunakan untuk acara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur.

#### 2. Urusan Kelembagaan

Kelembagaan sebagai wadah tempat berinteraksinya antar elemen baik pemerintah maupun masyarakat dalam proses pembangunan, memiliki arti penting sebagai salah satu penentu keberhasilan pembangunan Keistimewaan di DIY.

Alokasi anggaran keistimewaan di bidang kelembagaan juga digunakan untuk mereview budaya kerja pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas ASN DIY yang disingkat dengan SATRIYA (Selaras, Akal Budi Luhur, Teladan, Rela Melayani, Inovatif, Yakin Percaya Diri, dan Ahli Profesional). SATRIYA dilakukan dalam rangka pembaharuan sikap dan tindakan demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada pelayanan masyarakat. Dalam rangka optimalisasi kelembagaan pemerintah daerah serta memberi ruang terjadinya interaksi dalam wadah penta helix forum, Gubernur DIY membentuk lembaga Parampara Praja. Parampara Praja merupakan lembaga non struktural yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pertimbangan,

saran dan pendapat kepada Gubernur untuk membuat kebijakan sesuai dengan amanat yang ada dalam Undang-Undang Keistimewaan.

### **3. Urusan Kebudayaan**

Salah satu semangat yang menjadi inti dari pelaksanaan keistimewaan DIY adalah menjadikan filosofi budaya sebagai dasar pembangunan di segala bidang. Membangun kebudayaan tidak hanya berkaitan dengan keramaian dan gebyar kesenian, kelestarian cagar budaya dan warisan budaya, pelestarian adat istiadat, namun juga terkait dengan ekonomi, politik, hukum, sosial keagamaan, pendidikan, dan nilai-nilai budaya. Kebudayaan melalui rekayasa revolusi mental diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan kemakmuran masyarakat.

Beberapa event besar baik skala nasional maupun internasional yang telah digelar untuk mendukung perkembangan seni dan budaya antara lain Festival Jogja Kota Batik Dunia, Festival Kebudayaan Yogyakarta, Jogja International Street Performance, serta beberapa yang lain. Selain itu dalam rangka semakin meningkatkan kunjungan wisata khususnya wisata budaya di DIY juga dilakukan berbagai promosi wisata antara lain melalui media internasional.

Event budaya yang digelar selain mempromosikan budaya lokal DIY, juga terdapat event yang bertujuan membantu akulturasi yang ada di DIY agar berjalan dengan baik serta tidak ada benturan dan dapat menjadi ajang pertemuan bagi pelajar dan mahasiswa dan menyatukan semua suku, yakni Selendang Sutera (Semarak Legenda Suku-suku Nusantara).

Pengelolaan program-program urusan kebudayaan terbukti telah mendorong peningkatan kreativitas kelompok masyarakat, berkembangnya pembinaan seni dan budaya, semakin optimalnya pelestarian cagar budaya, penyelenggaraan *event* kebudayaan mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, serta menumbuhkan partisipasi masyarakat.

Berbagai capaian yang berasal dari program-program dan kegiatan inovatif juga menunjukkan Urusan Kebudayaan telah memberikan manfaat langsung bagi kegiatan seni dan budaya yang sebelumnya telah tumbuh di masyarakat. Perkembangan desa budaya, yang semula hanya berjumlah 32 desa menjadi 56 desa, Pendampingan Desa Budaya, Desa/Kelurahan rintisan budaya, Jaga Warga, Film Masuk Desa Budaya, Wana desa, Bersih Sungai yang diadopsi dari Merti Kali, Jogja Kota batik, Wayang Durasi Singkat Museum Sonobudoyo, diplomasi budaya, Gerakan wajib Kunjung Museum, Museum *Go to Mall*, Pentas Adiluhung, Simponi Keistimewaan, sekolah basis budaya, laboratorium budaya, Anugerah Budaya, Gebyar Museum Pleret, dan lain sebagainya.

Khusus di kawasan Malioboro, salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam rangka menjaga dan meningkatkan keamanan dan kondisi kondusif yang nyaman bagi pengunjung kawasan malioboro yang berasal dari partisipasi masyarakat maupun komunitas malioboro adalah Jogoboro.

Selanjutnya dalam rangka memfasilitasi kebutuhan para seniman handal yang sudah diakui kemampuannya dan belum memiliki sertifikat atau ijasah dari lembaga

pendidikan dalam bidang seni, didirikanlah Akademi Komunitas Seni dan Budaya Negeri Yogyakarta.

#### **4. Urusan Pertanahan**

Urusan Pertanahan telah diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY mengatur penyelenggaraan kewenangan pertanahan atas kepemilikan tanah keprabon dan bukan keprabon yang menjadi hak milik Kasultanan dan Kadipaten, sebagai badan hukum yang diakui Undang-Undang. Kasultanan dan Kadipaten memiliki kewenangan dalam mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten untuk tujuan sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Kewenangan DIY dalam Urusan Pertanahan sesuai dengan Perda 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten meliputi: (a) kegiatan inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan dan pendaftaran tanah; (b) pengadaan sarana prasarana untuk perawatan dan pemeliharaan dokumen; (c) penyelenggaraan pemantauan dan penertiban penggunaan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten yang menyalahi Serat Kekancingan; (d) penanganan sengketa atas Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten; (e) penyiapan bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah; dan (f) kegiatan peremajaan data Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten.

Kondisi saat ini tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten banyak dimanfaatkan dan digunakan baik oleh instansi pemerintah untuk perkantoran maupun untuk kepentingan sosial dan masyarakat tetapi belum mempunyai kekuatan hukum yang jelas. Dengan kedudukan Kasultanan dan Kasultanan masing-masing sebagai badan hokum khusus, maka tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang ada di seluruh wilayah DIY yang digunakan bagi kelembagaan, kebudayaan, sosial dan kesejahteraan masyarakat di DIY. Dalam kaitan ini maka pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten oleh pihak lain harus mendapatkan persetujuan Kasultanan untuk tanah Kasultanan dan persetujuan Kadipaten untuk tanah Kadipaten. Upaya untuk mengadministrasi keberadaan tanah Kasultanan dan Kadipaten dilakukan melalui proses pendaftaran. Upaya ini dimaksudkan agar diperoleh data fisik maupun data yuridis tanah sebagai dasar untuk memberikan jaminan kepastian hokum serta sekaligus jaminan perlindungan hukum baik bagi Kasultanan dan Kadipaten maupun instansi atau masyarakat yang menempati tanahnya.

Dalam urusan pertanahan tersebut, Pemda DIY memiliki peran untuk memfasilitasi:

- a. penatausahaan, pemeliharaan, pelestarian, pelepasan, dan pengawasan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten; dan
- b. memfasilitasi pembentukan regulasi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.

## 5. Urusan Tata Ruang

Tata Ruang Keistimewaan merupakan kebijakan dan strategi tata ruang pada kawasan strategis DIY yang berwujud struktur ruang dan pola ruang pada tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten, serta wilayah yang memiliki nilai-nilai Keistimewaan baik sebagian atau seluruhnya dan diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan di DIY. Kewenangan Kasultanan dan Kadipaten dalam Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat (2) huruf e adalah terbatas pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.

Kewenangan Pemerintah Daerah DIY dalam urusan Tata Ruang sesuai Perdas No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi : (a) penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan satuan ruang strategis kadipaten, (b) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada satuan ruang strategis kasultanan dan satuan ruang strategis kadipaten; (c) Penyusunan rencana induk pada satuan ruang strategis kasultanan dan satuan ruang strategis kadipaten; (d) pelaksanaan penataan ruang; (e) penyelenggaraan pemantauan dan penertiban pemanfaatan ruang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang menyalahi rencana tata ruang; (f) penanganan sengketa atas pemanfaatan ruang tanah kasultanan atau tanah kadipaten; (g) penyiapan bahan pertimbangan teknis izin pemanfaatan ruang; (h) pengendalian pemanfaatan ruang; dan (i) pengawasan terhadap penyelenggaraan penataan ruang. Penataan Ruang dilakukan dengan prinsip mengembalikan, memperbaiki, menguatkan dan mengembangkan yang akan difokuskan pada 18 kawasan keistimewaan. Terdapat beberapa aspek tata ruang yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pelestarian Kawasan Strategis Keistimewaan, seperti sarana dan prasarana yang saling menunjang dan harus direncanakan dengan baik. Sarana pra sarana yang baik dan sesuai konteks kawasan menjadikan perkotaan Yogyakarta sebagai kawasan yang merepresentasikan nilai dasar filosofi Keistimewaan Yogyakarta. Sinergi antara aspek fisik berupa sarana pra sarana dan upaya pelestarian lainnya sangat diperlukan dalam hal perencanaan kawasan strategis keistimewaan Yogyakarta ini.

### II.4 Aspek Daya Saing

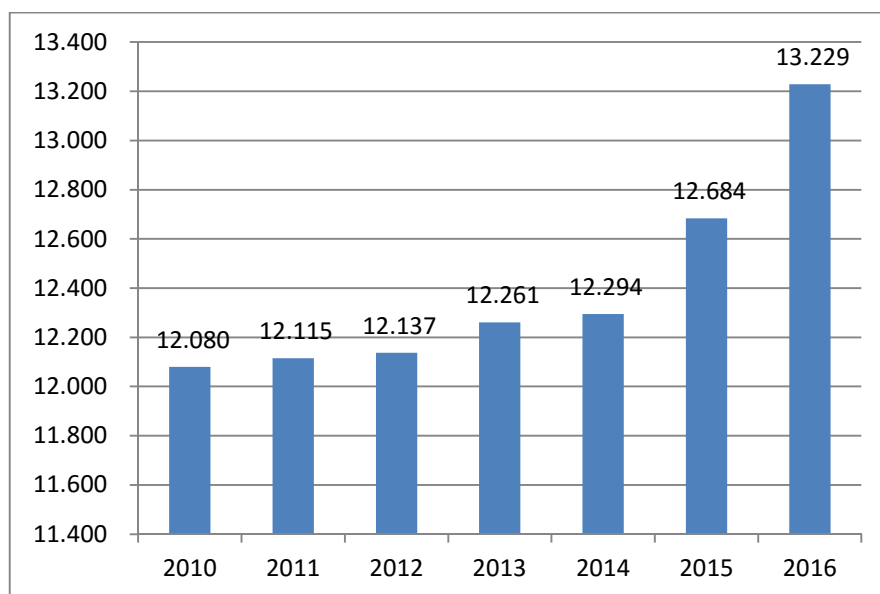
Indikator yang digunakan untuk menganalisis daya saing daerah meliputi pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita, Nilai Tukar Petani (NTP), pengeluaran konsumsi non-pangan perkapita, rasio ekspor-impor terhadap PDRB, angka kriminalitas, dan angka ketergantungan. Terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan terkait capaian indikator-indikator tersebut. *Pertama*, pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita DIY memiliki tren meningkat, yang menunjukkan bahwa daya beli masyarakat DIY mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut berasal dari kelompok masyarakat dengan pengeluaran konsumsi perkapita per bulan lebih dari Rp500 ribu. Hal ini menjadi indikasi bahwa perlu upaya untuk meningkatkan produktivitas kelompok masyarakat pengeluaran per kapita rendah. *Kedua*, NTP DIY memiliki kecenderungan meningkat tetapi masih relatif kecil di beberapa sub

sektor pertanian. NTP sub sektor perkebunan relatif tinggi dibandingkan sub sektor lain. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kesejahteraan petani cenderung meningkat, tetapi penting untuk meningkatkan nilai tambah sebagai pengungkit pendapatan petani. *Ketiga*, masyarakat DIY memiliki pola pengeluaran konsumsi non-pangan lebih besar dibandingkan konsumsi pangan. *Keempat*, keterbukaan ekonomi DIY dilihat dari rasio ekspor-impor terhadap PDRB masih relatif rendah meskipun memiliki tren meningkat. *Kelima*, angka kriminalitas DIY cenderung meningkat, terutama kasus terkait pencurian, penipuan, penganiayaan, dan narkoba. Hal ini penting diperhatikan sebagai upaya menjaga stabilitas keamanan untuk mendorong peningkatan aktivitas ekonomi. Keenam, angka ketergantungan DIY selama lima tahun terakhir memiliki tren menurun, yang menunjukkan bahwa DIY memiliki potensi sumber daya manusia yang produktif yang dapat menjadi salah satu keunggulan DIY.

Indikator-indikator aspek daya saing tersebut diuraikan lebih rinci dalam sub bagian berikut.

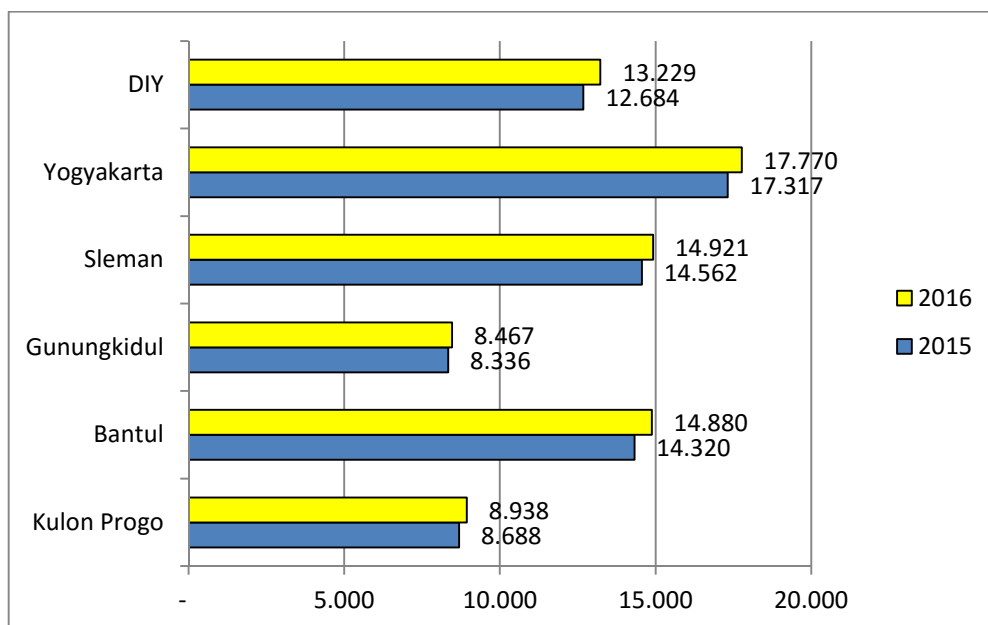
#### II.4.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Selama periode 2010-2016, pengeluaran riil per kapita atau angka konsumsi rumah tangga perkapita DIY mengalami kenaikan. Pengeluaran riil per kapita tahun 2010 sebesar Rp12.080 ribu meningkat menjadi Rp13.229 ribu tahun 2016. Menurut kabupaten/kota, pengeluaran riil per kapita terbesar adalah Kota Yogyakarta, sebesar Rp17.317 ribu tahun 2015 dan Rp17.770 ribu tahun 2016. Sementara itu, pengeluaran riil per kapita Kabupaten Gunungkidul adalah yang terkecil.



Sumber: BPS Provinsi DIY, IPM DIY 2016

**Gambar II.73 Pengeluaran Riil per Kapita DIY, 2010-2016 (ribu rupiah)**



Sumber: BPS Provinsi DIY, IPM DIY 2016

**Gambar II.74 Pengeluaran Riil per Kapita menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2010-2016 (ribu rupiah)**

Pengeluaran rata-rata per kapita menurut golongan pengeluaran tahun 2014-2015 bervariasi. Rumah tangga dengan golongan pengeluaran di bawah Rp300 ribu mengalami penurunan sedangkan jumlah rumah tangga dengan golongan pengeluaran lebih besar dari Rp500 ribu mengalami peningkatan.

**Tabel II-138 Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan menurut Golongan Pengeluaran di DIY, 2014-2015**

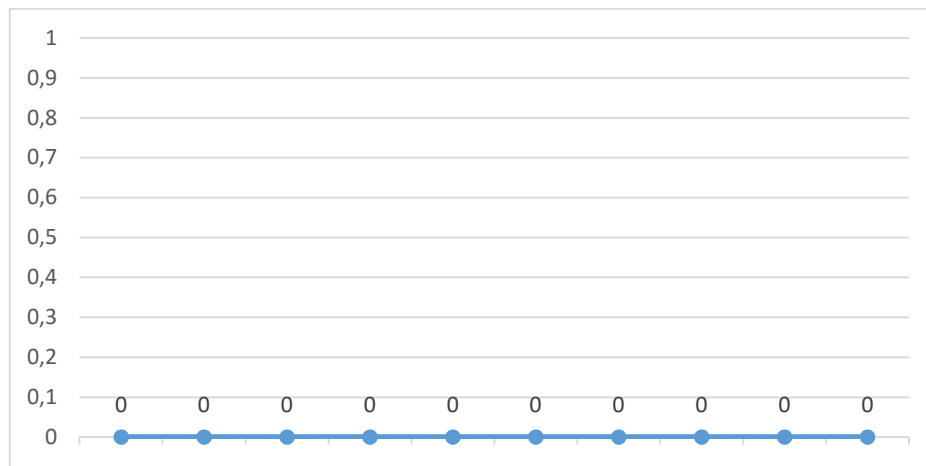
Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan	Jumlah Rumah Tangga	
	2014	2015
< 100.000	-	88
100.000 – 149.999	585	1.854
150.000 – 199.999	7.299	11.460
200.000 – 299.999	96.384	89.161
300.000 – 499.999	332.386	271.514
≥ 500.000	673.757	746.400

Sumber: BPS Provinsi DIY, DDA 2015-2016

#### II.4.2 Nilai Tukar Petani (NTP)

Indikator kinerja sektor pertanian diantaranya adalah Nilai Tukar Petani (NTP) dan produktivitas tanaman pertanian. NTP DIY selama kurun waktu 2007-2013 menunjukkan tren yang meningkat, tahun 2007 tercatat sebesar 100 menjadi 116,89 tahun 2013. Artinya selama kurun waktu 2007-2013, sektor pertanian menjadi pilihan mata pencarian yang menguntungkan, ditambah subsistem agribisnis hilir (pasca panen, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian) yang memberikan nilai tambah signifikan.

NTP tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 1,13 dari tahun sebelumnya, kemudian meningkat menjadi 104,09 tahun 2016.



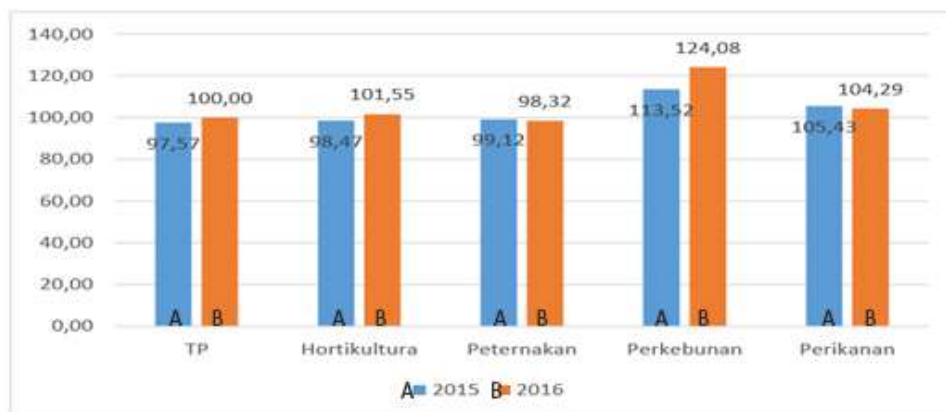
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2007-2016

Tahun 2014-2016, BPS menggunakan metode penghitungan baru

**Gambar II.75 Nilai Tukar Petani DIY, 2007-2016**

Perbandingan angka NTP menurut subsektor pertanian selama 2015-2016 menunjukkan bahwa NTP subsektor perkebunan rakyat memiliki nilai tertinggi. Selain itu, NTP subsektor ini mengalami kenaikan lebih besar dibanding subsektor pertanian lain. Hal ini diasumsikan bahwa kesejahteraan petani subsektor perkebunan rakyat lebih tinggi dibanding subsektor petani subsektor pertanian lain.

Tahun 2016 subsektor yang memiliki angka NTP terbesar kedua adalah subsektor perikanan 104,29, diikuti subsektor hortikultura, tanaman pangan, dan peternakan.



**Gambar II.76 Nilai Tukar Petani DIY Per Subsektor, 2015-2016**

#### II.4.3 Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Per Kapita

Pengeluaran konsumsi non-pangan per kapita dalam kurun 2010-2015 mengalami fluktuasi. Pengeluaran non-makanan lebih besar dibanding pengeluaran pangan. Pengeluaran non-pangan per kapita turun tahun 2013-2014, dan meningkat menjadi Rp563.590 ribu tahun 2015.

**Tabel II-139 Pengeluaran Per kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas di DIY**

Kelompok Komoditas	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Makanan	244.003	44,05	276.323	44,21	308.587	42,44	359.522	46,95	355.504	47,51	365.011	39,30
Bukan Makanan	309.963	55,95	348.721	55,79	418.516	57,56	406.192	53,05	392.800	52,49	563.590	60,69
<b>Jumlah</b>	<b>553.966</b>	<b>100,00</b>	<b>625.044</b>	<b>100,00</b>	<b>727.102</b>	<b>100,00</b>	<b>765.714</b>	<b>100,00</b>	<b>748.304</b>	<b>100</b>	<b>928.601</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Provinsi DIY

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan menurut kelompok bukan makanan selama tahun 2010-2015 berfluktuasi. Tahun 2010-2014, pengeluaran konsumsi non-pangan terbesar adalah kelompok barang-barang dan jasa, tetapi tahun 2015 pengeluaran non-pangan terbesar adalah kelompok perumahan, bahan bakar, penerangan dan air.

**Tabel II-140 Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan menurut kelompok Bukan Makan di DIY, 2010-2015**

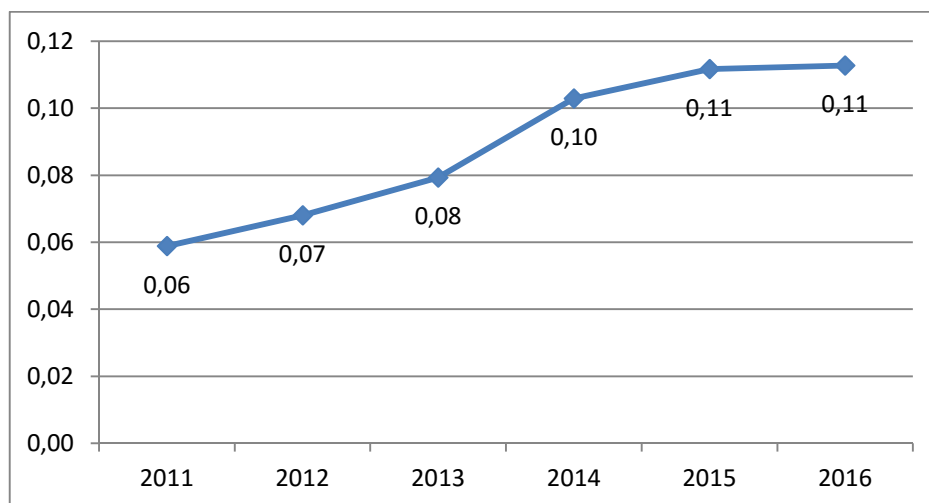
Kelompok	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	Nilai (Rupiah)	%	Nilai (Rupiah)	%	Nilai (Rupiah)	%	Nilai (Rupiah)	%	Nilai (Rupiah)	%	Nilai (Rupiah)	%
1. Perumahan, Bahan Bakar, Penerangan & Air	109.997	19,86	121.996	19,52	135.795	18,68	147.181	19,22	146.720	19,61	247.836	26,69
2. Barang-Barang & Jasa	124.291	22,44	151.625	24,26	170.509	23,45	170.005	22,20	166.528	22,25	165.253	17,80
3. Pakaian, Alas Kaki & Tutup Kepala	15.912	2,87	14.128	2,26	20.967	2,88	20.665	2,70	19.987	2,67	26.368	2,84
4. Barang Tahan Lama	40.722	7,35	34.823	5,57	64.473	8,87	37.403	4,88	29.126	3,89	75.981	8,18
5. Pajak Pemakaian & Premi Asuransi	10.601	1,91	12.348	1,98	14.191	1,95	13.577	1,77	12.604	1,68	29.583	3,19
6. Keperluan pesta dan upacara	8.440	1,52	13.802	2,21	12.580	1,73	17.361	2,27	17.835	2,38	18.569	2,00
	<b>309.963</b>	<b>55,95</b>	<b>348.722</b>	<b>55,79</b>	<b>418.516</b>	<b>57,56</b>	<b>406.192</b>	<b>53,05</b>	<b>392.800</b>	<b>52,49</b>	<b>563.590</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2010-2015

#### II.4.4 Rasio Ekspor-Impor terhadap PDRB

Ekspor dan impor adalah indikator keterbukaan ekonomi yang menunjukkan keterkaitan aktivitas ekonomi suatu daerah/negara dengan daerah/negara lain. Rasio ekspor dan impor terhadap PDRB dapat digunakan untuk melihat kontribusi aktivitas perekonomian suatu daerah dengan daerah lain terhadap PDRB. Selama kurun waktu 2011-2016, keterbukaan ekonomi DIY relatif rendah tetapi memiliki kecenderungan meningkat, yang

ditunjukkan oleh rasio ekspor-impor DIY terhadap PDRB, tahun 2011 sebesar 0,06 meningkat menjadi 0,11 tahun 2016.



Sumber: Bappeda DIY, Analisis PDRB 2012-2016, diolah

**Gambar II.77 Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDRB ADHB DIY, 2012-2016**

#### II.4.5 Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas menjadi salah satu pertimbangan yang digunakan oleh pihak luar, seperti wisatawan dan investor untuk melakukan aktivitas ekonomi di suatu daerah. Indikator ini menjamin bahwa kestabilan keamanan sehingga aktivitas yang dilakukan akan memberi berkembang dan memberikan keuntungan di masa depan bagi pihak luar. Bagi daerah, hal ini mendatangkan devisa yang dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.

Perkembangan angka kriminalitas DIY tahun 2008-2010 mengalami peningkatan. Setelah menurun pada tahun 2011, angka kriminalitas tersebut meningkat tahun 2012-2013. Tahun 2012, angka kriminalitas tercatat sebesar 0,12. Meskipun angka tersebut relatif rendah, tetapi dilihat dari perkembangannya menunjukkan bahwa angka kriminalitas DIY penting untuk mendapatkan perhatian, terutama kriminalitas dengan jumlah kasus tinggi seperti kasus pencurian, penipuan, penganiayaan, dan narkoba.

**Tabel II-141 Jumlah Tindak Kejahatan menurut Jenis Kasus di DIY, 2008-2014**

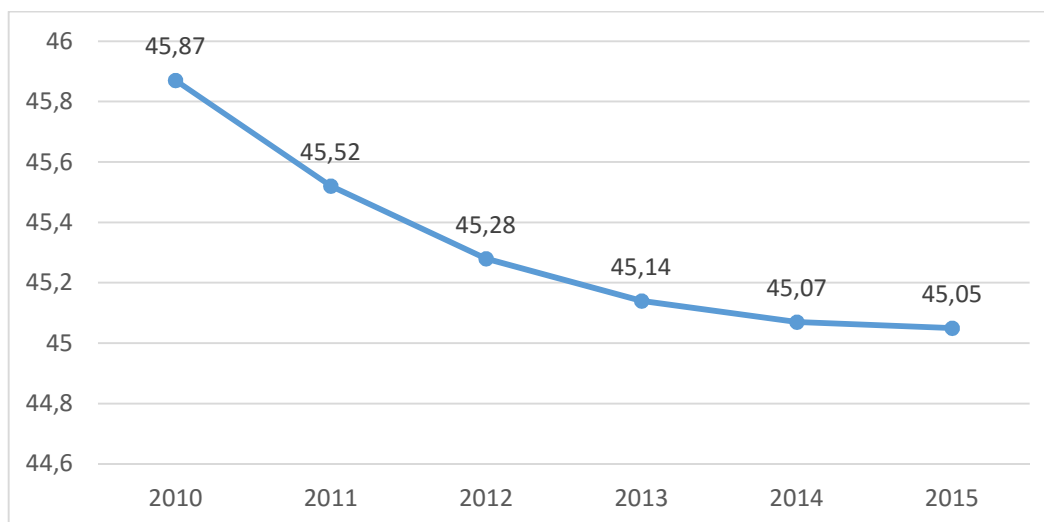
Jenis Kriminal	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah kasus narkoba	332	268	266	262	257	336	389
Jumlah kasus pembunuhan	15	15	14	10	9	12	10
Jumlah kejahatan seksual	29	19	18	13	20	21	21
Jumlah kasus penganiayaan (ringanberat)	474	627	579	536	461	442	499

Jenis Kriminal	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah kasus pencurian (curat, curanmor, curas, pencurian ringan biasa)	904	1.156	3.902	3.042	2.446	2.460	2.183
Jumlah kasus penipuan	940	1.038	1.428	1.301	1364	1403	1296
Jumlah kasus pemalsuan uang	12	5	5	6	4	3	1
Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun	2.706	3.128	3.719	3.072	4561	4677	4399
Jumlah penduduk	3.393.003	3.426.637	3.457.491	3.487.325	3.514.762	3.594.854	3.637.116
Angka kriminalitas (8)/(9)	0,08	0,09	0,11	0,09	0,13	0,13	0,12

Sumber: BPS Provinsi DIY, DDA beberapa edisi

#### II.4.6 Tingkat Ketergantungan/Rasio Ketergantungan

Penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dipertimbangkan dalam pembangunan. Pemanfaatan penduduk usia produktif diperhatikan sebagai faktor kunci kemajuan pembangunan. Selama kurun waktu 2010-2015, jumlah penduduk usia produktif mendominasi struktur penduduk DIY. Angka ketergantungan penduduk, rasio jumlah penduduk usia non-produktif terhadap usia produktif, menunjukkan tren menurun. Tahun 2010 sebesar 45,87 menurun menjadi 45,05 tahun 2015. Penurunan angka ketergantungan sebagai indikator bahwa DIY memiliki keunggulan jumlah penduduk produktif, sehingga kesempatan ini harus digunakan untuk kemajuan pembangunan.



Sumber : Analisis Statistik DIY, 2016

**Gambar II.78 Rasio Ketergantungan Penduduk Usia Non Produktif Terhadap Penduduk Usia Produktif, Tahun 2010-2015**

Hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan pemerintah daerah daerah istimewa Yogyakarta ditampilkan dengan tabel sebagai berikut:

**Tabel II-142 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Stand ar (Satua n)	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		(n-5) Th 2013	(n-4) Th 2014	(n-3) Th 2015	(n-2) Th 2016	(n-1) Th 2017		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>A</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB</b>							
<b>A.1</b>	<b>Urusan Terkait dengan Pelayanan Dasar</b>							
<b>1</b>	<b>Pendidikan</b>							
1.1	Ketercapaian wajib belajar 12 tahun	-	-	-	-	12	Ta hun	Target 12 tahun Realisasi 12 Tahun Persentase ketercapaian 100% ( <b>sesuai target</b> )
	Rerata lama sekolah	-	9,33	9	9,10	-	Ta hun	
1.2	Persentase sekolah yang mengimplementasikan pendidikan berkarakter dan sinergis dengan kebutuhan pembangunan	-	-	29,17	35,83	45,88	%	Target 45,83% Realisasi 45,88% Persentase ketercapaian 100,10% ( <b>melampaui target</b> )
	Persentase satuan pendidikan yang mengimplementasikan model unggulan mutu pendidikan	-	5	-	-	-	%	
1.3	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	79,32	83,13	84,62	84,96	82,15	%	Target 75,11% Realisasi 82,15% Persentase ketercapaian 109,37% ( <b>melampaui target</b> )
<b>2</b>	<b>Kesehatan</b>							
2.1	Persentase Rumah tangga ber-PHBS	36,27	37,74	40,42	40,20	43,24	%	Target 40% Realisasi 43,24% Persentase ketercapaian 108,10% ( <b>melampaui target</b> )
2.2	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terfasilitasi untuk akreditasi	-	-	-	-	60,91	%	Target 57,02% Realisasi 60,91% Persentase ketercapaian 106,82% ( <b>melampaui target</b> )
	Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu	73,37	67,33	57,40	71,50	-	%	
2.3	Persentase layanan kesehatan tingkat	-	-	-	-	100	%	Target 100% Realisasi 100%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar (Satuan)	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		(n-5) Th 2013	(n-4) Th 2014	(n-3) Th 2015	(n-2) Th 2016	(n-1) Th 2017		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	lanjutan tipe B terakreditasi							Persentase ketercapaian 100% ( <b>sesuai target</b> )
	Persentase Pemenuhan Standar Rumah Sakit dan Laboratorium Kesehatan Sesuai Tipenya*	-	-	-	87,75	-	%	
	Persentase pemenuhan standar RS tipe C	-	79	85,7	-	-	%	
	Persentase pemenuhan Laboratorium Kesehatan Tipe Utama	-	79	80	-	-	%	
2.4	Prosentase pasien gangguan jiwa berat yang mampu melakukan ADL ( <i>Activity Daily Living</i> )		-	-	-	85,98	%	Target 31% Realisasi 85,98% Persentase ketercapaian 277,35% ( <b>melampaui target</b> )
	Persentase penderita gangguan jiwa yang ditangani RS Jiwa Grhasia DIY	48,55	53,66	8,64	8,82	-	%	
2.5	Persentase angka kesembuhan ( <i>cure rate</i> ) penyakit paru	-	-	-	-	100	%	Target 85% Realisasi 100% Persentase ketercapaian 117,65% ( <b>melampaui target</b> )
<b>3</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>							
3.1	Prosentase aksesibilitas jalan di wilayah provinsi		-	91,88	92,48	92,79	%	Target 90% Realisasi 92,79% Persentase ketercapaian 103,10% ( <b>melampaui target</b> )
	Persentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap	72,87	73,70	-	-	-	%	
	Cakupan jalan dan jembatan yang diinspeksi	100	100	-	-	-	%	
	Persentase penyediaan Aksesibilitas bagi kawasan strategis dan kawasan strategis baru	28,55	32,35	-	-	-	%	
3.2	Prosentase penduduk berakses air minum	74,25	77,65	81,25	85,27	90,48	%	Target 87,83% Realisasi 90,48% Persentase ketercapaian 103,02% ( <b>melampaui target</b> )
3.3	Prosentase penduduk berakses sanitasi yang layak	-	-	87,05	88,91	90,34	%	Target 90% Realisasi 90,34% Persentase ketercapaian 100,38% ( <b>melampaui target</b> )

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar (Satuan)	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		(n-5) Th 2013	(n-4) Th 2014	(n-3) Th 2015	(n-2) Th 2016	(n-1) Th 2017		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Layanan jaringan air limbah terpusat di KPY	16.191	18.701	-	-	-	SR	
	Persentase penerapan sistem pengelolaan sampah ramah lingkungan	53	57,26	-	-	-	%	
3.4	prosentase penyelenggaraan jasa konstruksi	-	-	87,42	90,05	101,91	%	Target 90,83% Realisasi 101,91% Persentase ketercapaian 112,20% ( <b>melampaui target</b> )
	Persentase performance / kinerja jasa konstruksi	78,34	80,06	-	-	-	%	
3.5	Prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang	-	-	-	-	75,09	%	Target 75% Realisasi 75,09% Persentase ketercapaian 100,1% ( <b>melampaui target</b> )
	Kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung terhadap rencana RTRW Provinsi meningkat.	-	-	62,28	62,74	-	%	
	Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi	63,93	64,21	-	-	-	%	
3.6	Persentase penataan ruang pada kawasan keistimewaan	-	-	-	-	37	%	Target 37% Realisasi 37% Persentase ketercapaian 100% ( <b>melampaui target</b> )
	Kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya terhadap rencana RTRW Provinsi meningkat.	-	-	66,44	66,51	-	%	
	Ketersediaan rencana tata ruang pada kawasan Strategis Provinsi	12	14	-	-	-	Kawasan Starategis	
	Prosentase Pengaturan zonasi Kawasan Perkotaan Yogyakarta dan Kawasan Lindung Bawah	20	47,88	-	-	-	%	
<b>4</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>							
4.1	Prosentasi prasarana dan prasarana dasar permukiman di kecamatan miskin	-	-	-	-	63,8	%	Target 60% Realisasi 63,8%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Stand ar (Satuan)	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		(n-5) Th 2013	(n-4) Th 2014	(n-3) Th 2015	(n-2) Th 2016	(n-1) Th 2017		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Persentase ketercapaian 106,33% ( <b>melampaui target</b> )
	Persentase rumah tidak layak huni	-	-	7,17	6,89	-	%	
	Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni	8	7,49	-	-	-	%	
	Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman yang difokuskan wilayah kecamatan miskin	32,71	39,25	-	-	-	%	
<b>5</b>	<b><i>Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</i></b>							
5.1	Indeks Aspek Kebebasan Sipil Dalam IDI	-	-	-	90,41	90	Nilai Indeks	Target 91 Realisasi 90 Persentase ketercapaian 98,90% ( <b>belum mencapai target</b> )
5.2	Indeks Aspek Hak-hak Politik Dalam IDI	-	-	-	77,98	81,59	%	Target 60% Realisasi 81,59% Persentase ketercapaian 135,98% ( <b>melampaui target</b> )
	Peningkatan Kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	-	50,93	-	%	
	Peningkatan Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	305	289	303	-	-	kasus	
	Peningkatan Pengamanan Asset Pemerintah Daerah DIY	45,05	45,05	6,57	-	-	%	
	Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang tertangani	-	-	-	32,83	-	%	
	Persentase penurunan konflik	6,75	33,33	100	-	-	Persen	
	Kasus ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	10	5	1	-	-	Kasus	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Stand ar (Satuan)	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		(n-5) Th 2013	(n-4) Th 2014	(n-3) Th 2015	(n-2) Th 2016	(n-1) Th 2017		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase korban tertolong dalam kejadian kecelakaan di Gunung, Laut, Waduk dan Sungai	85,80	86,72	89,43	-	-	Persen	
<b>6</b>	<b>Sosial</b>							
6.1	Prosentase Tuna Sosial, Korban Penyalahgunaan Napza, Penyandang Disabilitas dan Anak Bermasalah Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, mendapatkan perlindungan, bimbingan mental sosial, pengembangan potensi dan mampu mandiri	-	-	-	-	34,14	%	Target 14,76% Realisasi 34,14% Persentase ketercapaian 231,30% ( <b>melampaui target</b> )
	Persentase Anak Bermasalah Sosial, Korban Bencana, Lanjut Usia Terlantar, dan Penyandang Disabilitas yang mengalami peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial.	-	-	79,13	53,13	-	%	
6.2	Prosentase Fakir Miskin, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, KTK dan Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang mendapatkan bimbingan keterampilan berusaha dan meningkat kemampuan ekonominya	-	-	-	-	45,99	%	Target 9,59% Realisasi 4,41% Persentase ketercapaian 45,99% ( <b>belum mencapai target</b> )
	Persentase Fakir Miskin, Korban Tindak Kekerasan dan Para Tuna Sosial yang mengalami peningkatan kualitas hidup, peningkatan ekonomi, kemandirian dan keberfungsian sosial	-	-	102,51	18,79	-	%	
	Persentase keberfungsian sosial bagi Tuna Sosial	5,43	36,01	-	-	-	%	
	Persentase pemberdayaan sosial keluarga miskin dan fakir miskin	8,76	7,73	-	-	-	%	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Stand ar (Satuan)	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		(n-5) Th 2013	(n-4) Th 2014	(n-3) Th 2015	(n-2) Th 2016	(n-1) Th 2017		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6.3	Prosentase Lanjut Usia Terlantar, Korban Bencana, dan Penerima Manfaat Pelayanan Dalam Panti yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial	-	-	-	-	48,09	%	Target 48,09% Realisasi 48,09% Persentase ketercapaian 100% (sesuai target)
	Persentase penerimaan Jaminan, Perlindungan, Rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas dan trauma	2,04	7,51	-	-	-	%	
	Persentase Pelayanan panti Asuhan/Jompo Sesuai Standar Pelayanan	1,91	9,41	-	-	-	%	
6.4	Prosentase PSKS dan Masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesos	-	-	-	-	76,47	%	Target 76,47% Realisasi 76,47% Persentase ketercapaian 100% (sesuai target)
	Persentase kenaikan cakupan dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh tenaga kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial	50,66	45,00	132,34	73,47	-	%	
	Persentase PSKS dalam usaha kesejahteraan sosial	71,54	66,40	-	-	-	%	
6.5	Prosentase Masyarakat yang memberikan dukungan dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesos	-	-	-	-	70,82	%	Target 70% Realisasi 70,82% Persentase ketercapaian 101,17 % (melampaui target)
	Persentase peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penanggulangan PMKS dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan UKS	-	-	100	100	-	%	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Stand ar (Satuan)	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		(n-5) Th 2013	(n-4) Th 2014	(n-3) Th 2015	(n-2) Th 2016	(n-1) Th 2017		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase berkembangnya modal sosial masyarakat melalui kegiatan kesetiakawanan sosial, dan peningkatan jiwa nasionalisme pada generasi muda dan masyarakat	-	50,66	57,83	64,56	-	%	
<b>A.2</b>	<b>Urusan Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>							
<b>1</b>	<b>Tenaga Kerja</b>							
1.1	Persentase besaran lulusan pelatihan yang ditempatkan	-	-	-	-	0,32	%	Target 0,19% Realisasi 0,32% Persentase ketercapaian 168,42% ( <b>melampaui target</b> )
1.2	Jumlah kesempatan kerja	-	-	-	-	2.053.168	Orang	Target 2.063.565 orang Realisasi 2.053.168 orang Persentase ketercapaian 99.50 % ( <b>belum mencapai target</b> )
	Persentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja	5,96	10,51	22,06	19,4	-	%	
	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat	19,29	26,66	30,69	31,73	-	%	
1.3	Persentase besaran turunnya kasus yang diselesaikan melalui pengadilan hubungan industrial	-	-	-	-	0	%	Target 16% Realisasi 0% Persentase ketercapaian 200% ( <b>melampaui target</b> )
	Persentase besaran penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	-	100	91,66	100	-	%	
1.4	Persentase perusahaan nihil kecelakaan kerja	-	-	-	-	95,55	%	Target 95,5% Realisasi 95,55% Persentase ketercapaian 100,05% ( <b>melampaui target</b> )
	Persentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan di bidang Norma Kerja dan K3	-	17	38,9	36,65	-	%	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar (Satuan)	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		(n-5) Th 2013	(n-4) Th 2014	(n-3) Th 2015	(n-2) Th 2016	(n-1) Th 2017		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase lembaga yang terstandarisasi sesuai perundangan yang berlaku	-	62,23	69,47	75,44	-	%	
<b>2</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>							
2.1	Persentase peningkatan jumlah pekerja perempuan di lembaga Pemerintah, Swasta, dan Politik	-	-	-	-	0,02	%	Target 0,02% Realisasi 0,02% Persentase ketercapaian 100,00% ( <b>sesuai target</b> )
	Persentase Partisipasi Perempuan di bidang Pemerintah, Swasta dan Politik	-	-	48,91	49,05	-	%	
	Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga swasta	96,65	94,56	-	-	-	%	
	Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintah	35,50	36,50	-	-	-	%	
	Persentase Keanggotaan Perempuan dalam Organisasi Politik	8,61	13,07	-	-	-	%	
	Persentase Pembinaan Organisasi perempuan	50,14	62,64	75,28	87,76	-	%	
2.1	Penurunan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	-	-	-	-	0,515	%	Target rasionya 0,54 Realisasi rasionya 0,515% Persentase ketercapaian 104,63% ( <b>melampaui target</b> )
	Rasio korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	-	-	0,47	87,76	-	%	
	Jumlah penanganan perempuan korban kekerasan	795	642	-	-	-	Orang	
	Jumlah Penanganan Anak Korban kekerasan	301	347	-	-	-	Anak	
<b>3</b>	<b>Pangan</b>							
3.1	Angka Ketersediaan Energi	3.867	3.699	-	-	3.727	Kkal/Kapita/Hari	Target 3.511Kkal/Kapita/Hari Realisasi 3.727Kkal/Kapita/Hari Persentase ketercapaian 106,15% ( <b>melampaui target</b> )
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	83,1	85,3	85,3	88,5	-	%	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Stand ar (Satua n)	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		(n-5) Th 2013	(n-4) Th 2014	(n-3) Th 2015	(n-2) Th 2016	(n-1) Th 2017		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.2	Angka Ketersediaan Protein	98,23	107,3	-	-	101,47	Gram/Kapita/Hari	Target 90,83Gram/Kapita/Hari Realisasi 101,47Gram/Kapita/Hari Persentase ketercapaian 111.71% ( <b>melampaui target</b> )
3.3	Angka Konsumsi Energi	-	-	-	-	2.299,50	Kkal/Kapita/Hari	Target 2.000Kkal/Kapita/Hari Realisasi 2.299,50Kkal/Kapita/Hari Persentase ketercapaian 114,97 %( <b>melampaui target</b> )
3.4	Angka Konsumsi Protein	-	-	-	-	68	Gram/Kapita/Hari	Target 56.5Gram/Kapita/Hari Realisasi 68Gram/Kapita/Hari Persentase ketercapaian 120.35 ( <b>melampaui target</b> )
	Penurunan Jumlah Desa Rawan Pangan	60	26	-	-	-	Desa	
<b>4</b>	<b>Pertanahan</b>							
4.1	Persentase Pengelolaan Bidang SG, PAG dan TKD	-	-	-	-	60	%	Target 60% Realisasi 60% Persentase ketercapaian 100% ( <b>sesuai target</b> )
	Bidang SG, PAG, dan Tanah Desa yang memiliki kepastian hukum	8.426	9.168	11.548	12.479	-	Bi dang	
<b>5</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>							
5.1	Persentase peningkatan kualitas air	-	7,8	10,43	14,95	18,69	%	Target 18,69% Realisasi 18,69% Persentase ketercapaian 100% ( <b>sesuai target</b> )
5.2	Persentase peningkatan kualitas udara	-	4,51	6,76	9,01	11,26	%	Target 11,26% Realisasi 11,26% Persentase ketercapaian 100% ( <b>sesuai target</b> )
	Prosentase peningkatan kualitas lingkungan	3,14	6,29	-	-	-	%	
<b>6</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil</b>							
6.1	Persentase penduduk yang ber-KTP (NIK)	95	94,91	92,23	97,17	97,87	%	Target 97% Realisasi 97,87% Persentase ketercapaian 100,90% ( <b>melampaui target</b> )
<b>7</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar (Satuan)	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		(n-5) Th 2013	(n-4) Th 2014	(n-3) Th 2015	(n-2) Th 2016	(n-1) Th 2017		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.1	Persentase Peningkatan keluarga sejahtera	-	-	-	-	0,6	%	Target 0,6% Realisasi 0,6% Persentase ketercapaian 100% (sesuai target)
	Persentase Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat	36,36	74,27	98,33	93,70	-	%	
	Persentase Desa yang telah membentuk Bumdes	35,18	46,53	35,46	38,78	-	%	
	Persentase Desa yang telah memiliki profil	32	36,36	96,58	100	-	%	
<b>8</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>							
8.1	Prevalensi pasangan usia subur ber KB	-	-	-	85,25	-	%	
	Persentase Cakupan Peserta KB Aktif	80,22	80,05	80,35	-	-	%	
	Persentase Penurunan Pernikahan Usia di bawah 20 tahun	0,520	0,89	0,430	0,24	-	%	
	Persentase Tahapan Keluarga Sejahtera	44,10	45,24	43,45	43,45	-	%	
	Persentase lembaga Bina Keluarga berkategori Percontohan	21,49	23,28	23,61	23,79	-	%	
<b>9</b>	<b>Perhubungan</b>							
9.1	Penumpang yang terlayani angkutan umum di DIY	-	-	N/A	9.268	16.705	penumpang/hari	Target 33.372 penumpang/hari Realisasi 16.705 penumpang/hari Persentase ketercapaian 50,06 (Belum mencapai target)
	Load factor Penumpang Angkutan Umum Perkotaan Yogyakarta	34,49	37,82	-	-	-	%	
	Peningkatan Pelayanan Transportasi antar Moda	30	36,44	-	-	-	%	
9.2	Persentase ketersediaan prasarana lalu lintas di DIY	-	-	-	-	87	%	Target 87% Realisasi 87% Persentase ketercapaian 100% (sesuai target)
	Peningkatan Dukungan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Untuk Mendukung Layanan Transportasi Antar Moda Yang Efektif dan	-	-	22,37	30,31	-	%	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar (Satuan)	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		(n-5) Th 2013	(n-4) Th 2014	(n-3) Th 2015	(n-2) Th 2016	(n-1) Th 2017		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Efisien dan Berkeselamatan Tinggi							
	Peningkatan Dukungan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan	80,65	82,68	83	-	-	%	
9.3	Persentase kawasan manajemen	-	-	-	-	42	%	Target 42% Realisasi 42% Persentase ketercapaian 100% ( <b>sesuai target</b> )
	Penerapan Manajemen Perkotaan Berbasis Kawasan	8,4	16,8	25,2	-	-	%	
<b>10</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>							
10.1	Kualitas standar keamanan informasi		-	-	-	1	ISO	Target 1 ISO Realisasi 1 ISO Persentase ketercapaian 100% ( <b>sesuai target</b> )
10.2	Kualitas standar pelayanan TIK		-	-	-	1	ISO	Target 1 ISO Realisasi 1 ISO Persentase ketercapaian 100% ( <b>sesuai target</b> )
	Peningkatan layanan unggulan DGS per urusan	10	11	12	-	-	urusan/ bidang	
10.3	Kualitas layanan penyelenggaraan informasi publik	-	-	-	-	3,87	Nilai Indeks	Target dengan indeks 3 Realisasi dengan indeks 3,87 Persentase ketercapaian 129% ( <b>melampaui target</b> )
	Dukungan layanan informasi teknologi	-	-	-	60,87	-	%	
	Penyebarluasan Informasi Pembangunan bagi masyarakat	60	65,98	71	-	-		
	Persentase penyediaan jaringan IT di Pemda DIY	42	85,80	86	-	-	%	
<b>11</b>	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>							
11.1	Persentase Pertumbuhan Koperasi aktif dan UMKM	-	-	4,24	3,71	3,85	%	Target 4% Realisasi 3,85% Persentase ketercapaian 96,25% ( <b>belum mencapai target</b> )
	Jumlah Koperasi Aktif	2.176	2.269	-	-	-	Unit	
	Jumlah UKM	205.210	220.703	-	-	-	UKM	
	Jumlah Wirausaha UMKM Baru	87	172	-	-	-	Wirau saha	
<b>12</b>	<b>Penanaman Modal</b>							
12.1	Nilai Investasi	8.067.770	9.524.400	-	-	12.834.941	juta rupi	Target 14.002.769 juta rupiah

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Stand ar (Satuan)	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		(n-5) Th 2013	(n-4) Th 2014	(n-3) Th 2015	(n-2) Th 2016	(n-1) Th 2017		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							ah	Realisasi 12.952.233 juta rupiah Persentase ketercapaian 92,55 ( <b>belum mencapai target</b> )
	Nilai PMTB (Pembentuk-an Modal Tetap Bruto)	-	22.640.000	30.935.037	33.428.978	-	Juta Rupiah	
12.2	Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama	-	-	-	-	122,22	%	Target 75% Realisasi 122,22% Persentase ketercapaian 162,96% ( <b>melampaui target</b> )
	Jumlah surat persetujuan / ijin prinsip	354	379	-	-	-	ijin	
<b>13</b>	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>							
13.1	Prestasi Cabang Olahraga	-	-	11 (POP AS)	2 (POP WIL)	9	pering kat	Target 13 (peringkat) Realisasi 9 (peringkat) Persentase ketercapaian 130,77% ( <b>melampaui target</b> )
	Cakupan Peningkatan Prestasi Cabang Olahraga	37	39	-	-	-	medal i	
13.2	Pemuda yang mendapatkan layanan kepemudaan	-	-	-	-	420	Kelom pok	Target 420 kelompok Realisasi 420 kelompok Persentase ketercapaian 100% ( <b>sesuai target</b> )
	Peningkatan Jumlah Sentra Pemberdayaan Pemuda	10	12	13	14	-	Sentra	
	Persentase penguatan organisasi pemuda dalam pembinaan/pemberdaya an pemuda	-	-	100	100	-	%	
	Peningkatan Fasilitas Layanan pemuda dan Olahraga	28,57	45	-	-	-	%	
	Peningkatan Jumlah Kelompok Wirausaha Muda	320	345	365	385	-	Kelompo k	
	Peningkatan Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan	37	39	-	-	-	Orgsnisas i	
<b>14</b>	<b>Statistik</b>							
	Persentase ketersediaan data statistik dalam mendukung perencanaan	92,39	96,04	97,07	98,03	-	%	
<b>15</b>	<b>Persandian</b>							
	Sandiman yang memiliki kompetensi	20	50	80	-	-	%	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Stand ar (Satua n)	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		(n-5) Th 2013	(n-4) Th 2014	(n-3) Th 2015	(n-2) Th 2016	(n-1) Th 2017		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	persandian profesi dari sandi negara							
<b>16</b>	<b>Kebudayaan</b>							
16.1	Persentase kinerja pengembangan seni budaya DIY	-	-	-	-	100	%	Target 100% Realisasi 100% Persentase ketercapaian 100% ( <b>sesuai target</b> )
16.2	Persentase meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum	-	-	-	-	2	%	Target 2% Realisasi 2% Persentase ketercapaian 100% ( <b>sesuai target</b> )
16.3	Persentase Museum yang terakreditasi	-	-	-	-	9,5	%	Target 10% Realisasi 9,5% Persentase ketercapaian 95% ( <b>tidak mencapai target</b> )
	Peningkatan organisasi budaya dan desa budaya kategori maju	-	-	3	3	-	unit	
	Persentase Jumlah Organisasi budaya dan desa budaya kategori maju	-	22	24,5	-	-	%	
	Persentase organisasi budaya berkategori maju	1	1,15	-	-	-	%	
	Persentase nilai budaya, adat, dan Tradisi yang digali, direvitalisasi, diaktualisasi	14	16	17,68	20,30	-	%	
	Persentase ruang seni dan budaya yang representatif	20,76	31	41,12	55,14	-	%	
	Persentase peningkatan jumlah warisan budaya dan cagar budaya yang dilestarikan.	-	-	52,80	52,83	-	%	
	Persentase jumlah Benda Cagar Budaya (BCB) tidak bergerak yang tertangani	44,49	46,80	52,80	-	-	%	
	Persentase Implementasi Hasil Kesepakatan	5	12	15	20,30	-	%	
<b>17</b>	<b>Perpustakaan</b>							
17.1	persentase meningkatnya koleksi pustaka yang dimanfaatkan	-	-	-	-	21,5	%	Target 21% Realisasi 21,5% Persentase ketercapaian 102,38% ( <b>melampaui target</b> )
	Persentase jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan	14.51	19,54	30,56	38,6	-	%	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Stand ar (Satuan)	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		(n-5) Th 2013	(n-4) Th 2014	(n-3) Th 2015	(n-2) Th 2016	(n-1) Th 2017		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Jumlah fasilitas perpustakaan	73,13	74,91	-	-	-	%	
<b>18</b>	<b><i>Kearsipan</i></b>							
18.1	persentase peningkatan dokumen arsip yang diselamatkan	-	-	-	-	51,5	%	Target 50% Realisasi 51,5% Persentase ketercapaian 103% ( <b>melampaui target</b> )
	Persentase peningkatan jumlah khasanah arsip warisan budaya.	-	-	16,5	49,62	-	%	
	Penambahan khasanah arsip dari jumlah arsip yang sudah ada	11,6	41,19	-	-	-	%	
18.2	Persentase arsip yang dimanfaatkan	7,16	19,42	20,38	25,10	20,25	%	Target 20% Realisasi 20,25% Persentase ketercapaian 101,25% ( <b>melampaui target</b> )
<b>B</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>							
<b>1</b>	<b><i>Kelautan dan Perikanan</i></b>							
1.1	PDRB sektor perikanan	-	-	-	-	400.000	Juta rupiah	Target 400.000juta rupiah Realisasi 400.000juta rupiah Persentase ketercapaian 100% ( <b>sesuai target</b> )
	produksi perikanan budidaya dan tangkap	-	71.391,228	74.943,89	81.876,80	-	ton	
	Peningkatan produksi perikanan tangkap	5.626,9	6.996,90	-	-	-	ton	
	Peningkatan produksi perikanan budidaya	57.902,72	64.394,24	-	-	-	ton	
	NTP sektor perikanan meningkat	116,31	119,92	122,34	104,28	-	%	
1.2	Rasio luas kawasan lindung perairan	-	-	-	-	1,42	%	Target 0,17% Realisasi 1,42% Persentase ketercapaian 835.29% ( <b>melampaui target</b> )
	Rasio kawasan konservasi perairan terhadap total luas perairan total	-	1,4	1,42	1,42	-	rasio	
<b>2</b>	<b><i>Pariwisata</i></b>							
2.1	Peningkatan lama tinggal wisatawan yang menggunakan jasa akomodasi	-	-	-	-	0,15	%	Target 0,15 hari Realisasi 0,15 hari Persentase ketercapaian 100% ( <b>sesuai target</b> )

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Stand ar (Satua n)	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		(n-5) Th 2013	(n-4) Th 2014	(n-3) Th 2015	(n-2) Th 2016	(n-1) Th 2017		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Lama Tinggal Wisatawan Nusantara	1.60	1,58	1,85	1,95	-	Hari	
	Lama Tinggal Wisataan Mancanegara	1.84	1,95	2,07	2	-	Hari	
	Jumlah daya tarik baru	86	88	91	92	-	DTW/ Lokasi	
	Jumlah Desa Wisata	71	77	80	85	-	Desa	
	Jumlah Pokdarwis	77	82	86	91	-	Kelompo k/ Pokdarwi s	
2.2	Peningkatan jumlah wisatawan yang menggunakan jasa akomodasi	-	-	-	-	791.6 63	orang	Target 663.798 orang Realisasi 791.663 orang Persentase ketercapaian 119,26% ( <b>melampaui target</b> )
	Jumlah Kunjungan Wisatawan di Daerah Tujuan Wisata (DTW)	13,88 3,950	16.77 4.235	18.435 .445	19.753 .145	-	Orang	
	Jumlah Wisatawan Nusantara	2,602, 074	3.091.96 7	3.813 .720	4.194 .261	-	Orang	
	Jumlah Wisatawan Mancanegara	235,8 43	254.213	308 .485	355 .313	-	Orang	
<b>3</b>	<b>Pertanian</b>							
3.1	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura	-	-	2.592 .808	2.597 .138	2.603. 485	ton	Target 2.603.465 ton Realisasi 2.603.485 ton Persentase ketercapaian 100% ( <b>sesuai target</b> )
	Jumlah produksi tanaman pangan	2.332. 884	2.193.60 5	2.203.23 5	-	-	Ton	
	Jumlah produksi hortikultura	383.6 78	383.913	389.573	-	-	Ton	
3.2	Jumlah Populasi Ternak	568.1 27	607.709	616.0 00	620.5 16	641.4 16	anima l unit	Target 641.416 animal unit realisasi 641.416 animal unit Persentase ketercapaian 100% ( <b>sesuai target</b> )
3.3	Peningkatan Nilai Tukar Petani	-	-	-	-	98,14 5	Indeks NTP	Target Indeks NTP 99 Realisasi Indeks NTP 98,145 Persentase ketercapaian 99,14% ( <b>belum mencapai target</b> )
	NTP sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan	-	99,45	98,39	99,96	-	%	
3.4	PDRB DIY sub sektor perkebunan	-	-	-	-	201.4 86	juta rupiah	Target 270.000 juta rupiah Realisasi 201.486 juta rupiah

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar (Satuan)	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		(n-5) Th 2013	(n-4) Th 2014	(n-3) Th 2015	(n-2) Th 2016	(n-1) Th 2017		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Persentase ketercapaian 74,62% ( <b>belum mencapai target</b> )
	Produksi Perkebunan	78.61 9,81	80.084	82.379 ,82	73.755 ,65	-	ton	
	NTP Sektor Perkebunan	127,2 5	141,28	139,75	124,08	-	%	
<b>4</b>	<b>Kehutanan</b>							
4.1	Peningkatan pemanfaatan sumberdaya hutan	-	-	-	-	36,09	%	Target 35,24% Realisasi 36,09% Persentase ketercapaian 102,41% ( <b>melampaui target</b> )
	Peningkatan produksi hasil hutan	1,98	5,51	5,29	6,08	-	%	
4.2	Peningkatan luas hutan	-	-	-	-	0,53	%	Target 0,16% Realisasi 0,53% Persentase ketercapaian 331,25% ( <b>melampaui target</b> )
	Persentase luas hutan	27,04	29,78	29,94	30,45	-	%	
<b>5</b>	<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>							
	Prosentase penduduk berakses energi	-	-	93,14	94,33	95,46	%	Target 94% Realisasi 95,46% Persentase ketercapaian 101,55% ( <b>melampaui target</b> )
	Rasio Elektrifikasi	80,60	82,70	-	-	-	%	
<b>6</b>	<b>Perdagangan</b>							
6.1	Nilai sub sektor perdagangan dalam negeri terhadap PDRB	-	-	-	-	6.180.000.000.000	rupiah	Target 6.180.000.000.000 rupiah Realisasi 6.180.000.000.000 rupiah Persentase ketercapaian 100% ( <b>sesuai target</b> )
	Nilai Sub Sektor Perdagangan Terhadap PDRB DIY	-	13.954.129	14.787.035	15.642.125	-	Juta Rupiah	
6.2	Nilai ekspor non migas DIY	-	-	-	-	296.609.000	US\$	Target 277.804.482 US\$ Realisasi 296.609.000 US\$ Persentase ketercapaian 106,77% ( <b>sesuai target</b> )
	Nilai Ekspor	211,76	233,25	-	-	-	Juta US\$	
<b>7</b>	<b>Perindustrian</b>							
7.1	Prosentase peningkatan jumlah dan nilai produksi IKM	-	-	-	-	121,27	%	Target 3% Realisasi 121,27% Persentase ketercapaian 4042,33% ( <b>melampaui target</b> )

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Stand ar (Satua n)	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		(n-5) Th 2013	(n-4) Th 2014	(n-3) Th 2015	(n-2) Th 2016	(n-1) Th 2017		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Nilai Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB DIY	-	10.469.6 37	10.693 .036	11.234 .804	-	Juta Rupiah	
	Jumlah IKM	84.23 4	86.08 7	-	-	-	Unit Usaha	
	Jumlah IKM Industri Kreatif	34.97 8	36.45 6	-	-	-	Unit Usaha	
	Nilai Produksi IKM	3.294. 485	3.399. 909	-	-	-	Juta Rupia h	
<b>8</b>	<b>Ketransmigrasian</b>							
8.1	Persentase pemenuhan hak transmigran (Lahan pekarangan, lahan usaha I, lahan usaha II)	-	-	-	-	72,73	%	Target 50% Realisasi 72,73% Persentase ketercapaian 145,46% ( <b>sesuai target</b> )
	Persentase besaran calon transmigran yang ditempatkan	15.58	7.38	10,55	8,44	-	%	
<b>C</b>	<b>PENUNJANG URUSAN</b>							
<b>1</b>	<b>Perencanaan Pembangunan</b>							
1.1	Persentase Sinergitas Perencanaan	-	-	-	-	100	%	Target 95% Realisasi 100% Persentase ketercapaian 105,267,5% ( <b>melampaui target</b> )
1.2	Persentase Keterukuran Perencanaan	-	-	-	-	100	%	Target 90% Realisasi 100% Persentase ketercapaian 111,11% ( <b>melampaui target</b> )
1.3	Persentase Konsistensi Perencanaan	-	-	-	-	100	%	Target 90% Realisasi 100% Persentase ketercapaian 111,11% ( <b>melampaui target</b> )
1.4	Persentase Kelengkapan perencanaan	-	-	-	-	100	%	Target 92% Realisasi 100% Persentase ketercapaian 108,7% ( <b>melampaui target</b> )
1.5	Persentase Tingkat Partisipatif dalam Perencanaan	-	-	-	-	90	%	Target 90% Realisasi 90% Persentase ketercapaian 100% ( <b>sesuai target</b> )
1.6	Persentase Inovasi yang dilakukan dalam perencanaan	-	-	-	-	100	%	Target 95% Realisasi 100% Persentase ketercapaian 105,26% ( <b>melampaui target</b> )
1.7	Persentase tingkat Pengendalian Perencanaan Kinerja	-	-	-	-	102	%	Target 90% Realisasi 102%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Stand ar (Satuan)	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		(n-5) Th 2013	(n-4) Th 2014	(n-3) Th 2015	(n-2) Th 2016	(n-1) Th 2017		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Persentase ketercapaian 113,33% ( <b>melampaui target</b> )
1.8	Persentase tingkat Pengukuran kinerja	-	-	-	-	100	%	Target 90% Realisasi 100% Persentase ketercapaian 111,11% ( <b>melampaui target</b> )
1.9	Persentase tingkat Pelaporan Kinerja	-	-	-	-	101	%	Target 95% Realisasi 101% Persentase ketercapaian 106,32% ( <b>melampaui target</b> )
1.10	Persentase tingkat Evaluasi Internal	-	-	-	-	111	%	Target 95% Realisasi 111% Persentase ketercapaian 116,84% ( <b>melampaui target</b> )
1.11	Persentase tingkat Pencapaian sasaran kinerja	-	-	-	-	100	%	Target 98% Realisasi 100% Persentase ketercapaian 102,04% ( <b>melampaui target</b> )
	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan	26,82	16,90	8,28	-	-	%	
	Persentase Capaian Sasaran Tahunan terhadap Target Sasaran RPJMD	77	81,12	86,57	-	-	%	
	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang pemerintahan, perekonomian, kesejahteraan rakyat dan sarana prasarana	26,82	16,90	-	-	-	%	
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Daerah</b>							
2.1	Persentase peningkatan PAD			-	-	10,93	%	Target 4,1% Realisasi 10,93% Persentase ketercapaian 266,59% ( <b>melampaui target</b> )
	Persentase pendapatan BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD	25.34	20,01	18,12	18,88	-	%	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar (Satuan)	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		(n-5) Th 2013	(n-4) Th 2014	(n-3) Th 2015	(n-2) Th 2016	(n-1) Th 2017		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Presentase Aset Daerah yang dapat dioptimalkan	-	-	-	57,06	-	%	
	Persentase aset daerah yang dapat dimanfaatkan	11,53	12,82	13,65	-	-	%	
2.2	Kesesuaian penyajian Laporan Keuangan terhadap SAP	-	-	-	-	1	Nilai Skor	Target skornya 1 Realisasi skornya 1 Persentase ketercapaian 100% ( <b>sesuai target</b> )
	Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah	-	-	100	100	-	%	
2.3	Persentase kinerja pengelolaan keuangan daerah Kab/Kota	-	-	-	-	100	%	Target 100% Realisasi 100% Persentase ketercapaian 100% ( <b>sesuai target</b> )
	Persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah.	47,08	52,62	53,11	50,18	-	%	
	Opini Pemeriksaan BPK	WTP	WTP	WTP	-	-	Angka Opini	
<b>3</b>	<b>Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan</b>							
3.1	Persentase Pemenuhan Kebutuhan dengan Kompetensi Aparatur	-	-	-	-	80,88	%	Target 80,96% Realisasi 80,88% Persentase ketercapaian 99,9 ( <b>belum mencapai target</b> )
	Presentase kualitas manajemen sumber daya aparatur	-	69,87	65,74	75,19	-	%	
	Persentase kesesuaian penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi dan kualifikasi	67	72	-	-	-	%	
3.2	Nilai Akreditasi Badan Diklat (1 = A, 2 = B, 3 = C)	-	2	2	2	1	Termasuk dalam klasifikasi	Targetnya termasuk dalam klasifikasi 1 Realisasi termasuk dalam klasifikasi 1 Persentase ketercapaian 100% ( <b>sesuai target</b> )
<b>4</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>							
<b>5</b>	<b>Pengawasan</b>							
5.1	Jumlah SKPD dengan kinerja Baik (B)	-	-	-	-	42	%	Target 42% Realisasi 42% Persentase ketercapaian 100% ( <b>sesuai target</b> )

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar (Satuan)	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		(n-5) Th 2013	(n-4) Th 2014	(n-3) Th 2015	(n-2) Th 2016	(n-1) Th 2017		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase penurunan temuan hasil pemeriksaan	-	2	0,53	0,18	-	%	
	Peningkatan Nilai LAKIP SKPD	-	27	-	-	-	SKPD	
	Penurunan persentase SKPD dengan temuan penyimpangan keuangan	61,76	79,41	-	-	-	%	
	Penurunan persentase SKPD dengan temuan penyimpangan Aset	38,24	64,71	-	-	-	%	
	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (internal dan eksternal)	82	93,13	-	-	-	%	
<b>6</b>	<b>Sekretariat Dewan</b>							
6.1	Persentase penyelesaian agenda DPRD tepat waktu	-	-	-	94,21	100	%	Target 100% Realisasi 100% Persentase ketercapaian 100% ( <b>sesuai target</b> )
	Persentase perda, perdais pembahasan anggaran dan LKPJ Gubernur yang terselesaikan tepat waktu.	-	-	95,27	-	-	%	
	Prosentase prolegda yang terselesaikan	99,16	88,90	-	-	-	%	
<b>7</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>							
<b>1.1</b>	<b>Tata Pemerintahan</b>							
1.1.1	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah yang direspon dengan kebijakan	-	-	-	70,5	82,5	%	Target 80% Realisasi 82,5% Persentase ketercapaian 103,13% ( <b>melampaui target</b> )
	Persentase bahan rumusan kebijakan pemerintahan	100	100	100	-	-	%	
<b>1.2</b>	<b>Fasilitasi Parampara Praja</b>							
1.2.1	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Kebijakan Pokja Parampara Praja	-	-	-	70	171	%	Target 80% Realisasi 171% Persentase ketercapaian 213,75% ( <b>melampaui target</b> )
<b>1.3</b>	<b>Fasilitas Pemerintahan</b>							
1.3.1	Persentase jumlah pengunjung yang mengapresiasi positif	-	-	-	-	29,98	%	Target 11% Realisasi 29,98%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Stand ar (Satua n)	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		(n-5) Th 2013	(n-4) Th 2014	(n-3) Th 2015	(n-2) Th 2016	(n-1) Th 2017		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	terhadap promosi potensi daerah							Persentase ketercapaian 272,55% ( <b>melampaui target</b> )
	Persentase peningkatan jumlah pengunjung event seni budaya di anjungan DIY	-	-	-	-	9	%	Target 9% Realisasi 9% Persentase ketercapaian 100% ( <b>sesuai target</b> )
	Jumlah kunjung-an anjungan DIY di TMII	-	-	78.741	92.20 5	-	orang	
	Persentase rerata unsur pemerintah yang puas terhadap pelayanan informasi, transportasi dan penginapan	-	-	-	-	84	%	Target 80% Realisasi 84% Persentase ketercapaian 105% ( <b>melampaui target</b> )
1.4	<b>Kelembagaan</b>							
1.4.1	Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	-	-	-	-	85,37	%	Target 84% Realisasi 85,37% Persentase ketercapaian 101,63% ( <b>melampaui target</b> )
	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	75	80	87,69	98,65	-	%	
1.4.2	Indeks kepuasan masyarakat minimal baik	-	-	-	-	93,48	%	Target 84% Realisasi 93,48% Persentase ketercapaian 111.29% ( <b>melampaui target</b> )
	Persentase peningkatan skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) pada unit pelayanan publik	80	80	87,50	87,09	-	%	
1.4.3	Persentase SKPD yang menerapkan SOP	-	-	-	-	85,37	%	Target 80% Realisasi 85,37% Persentase ketercapaian 106,71% ( <b>melampaui target</b> )
1.5	<b>Fasilitas Perundang- undangan dan Hukum</b>							
1.5.1	Persentase Kesesuaian Produk Hukum dengan perencanaan hukum daerah	-	-	-	-	100	%	Target 100% Realisasi 100% Persentase ketercapaian 100% ( <b>sesuai target</b> )
	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum	-	99,15	120,5 5	100	-	%	
	Persentase Rancangan Perda dan Perdais yang tidak bertentangan	100	100	-	-	-	%	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Stand ar (Satuan)	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		(n-5) Th 2013	(n-4) Th 2014	(n-3) Th 2015	(n-2) Th 2016	(n-1) Th 2017		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	dengan peraturan UU dan kepentingan umum							
1.5.2	Meningkatnya kualitas layanan Hukum	-	-	-	-	100	%	Target 100% Realisasi 100% Persentase ketercapaian 100% ( <b>sesuai target</b> )
	Persentase layanan dan bantuan hukum serta layanan informasi hukum	-	-	118,54	100	-	%	
	Pemberian Layanan Hukum	100	100	-	-	-	%	
1.6	<i>Fasilitas Kesra</i>							
1.6.1	Persentase Bahan Kebijakan yang Menjadi Rumusan Kebijakan	-	-	-	-	100	%	Target 66,67% Realisasi 100% Persentase ketercapaian 149,99% ( <b>melampaui target</b> )
	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang Menjadi Kebijakan	13,33	35,29	44,44	71,43	-	%	
1.6.2	Persentase Fasilitasi Pembinaan kehidupan beragama	100	100	100	100	100	%	Target 100% Realisasi 100% Persentase ketercapaian 100% ( <b>sesuai target</b> )
1.7	<i>Fasilitas Perekonomian dan Sumber Daya Alam</i>							
1.7.1	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang Menjadi Kebijakan	20	33,33	36,45	48,83	51,17	%	Target 51,17% Realisasi 51,17% Persentase ketercapaian 100% ( <b>sesuai target</b> )
1.8	<i>Fasilitas Administrasi Pembangunan</i>							
1.8.1	Persentase bahan kebijakan yang menjadi rumusan kebijakan	-	-	-	-	50	%	Target 50% Realisasi 50% Persentase ketercapaian 100% ( <b>sesuai target</b> )
	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang Menjadi Kebijakan	8	25	36,45	48,83	-	%	
1.8.2	persentase aduan terhadap hasil pengadaan barang dan jasa	-	-	-	-	0	%	Target 0% Realisasi 0% Persentase ketercapaian 100% ( <b>sesuai target</b> )
	Persentase penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa	-	85,14	100	100	-	%	
1.9	<i>Fasilitas Umum dan Protokol</i>							
1.9.1	Persentase rerata Pimpinan dan Tamu Yang Menyatakan puas terhadap layanan	-	-	-	-	99,05	%	Target 95% Realisasi 99,05%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Stand ar (Satua n)	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		(n-5) Th 2013	(n-4) Th 2014	(n-3) Th 2015	(n-2) Th 2016	(n-1) Th 2017		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	keprotokolan, kerumahtangaan dan persandian							Persentase ketercapaian 104,26% ( <b>melampaui target</b> )
	Kualitas keprotokolan dan pelayanan terhadap pimpinan dan tamu yang memuaskan	-	-	-	97,20	-	%	
	Persentase SKPD terlayani tata kearsipan berbasis TI	-	100	100	-	-	%	
	Unit kerja yang menerapkan sistem administrasi naskah dinas terpadu dan tata kearsipan berbasis TI	80	95	-	-	-	%	
	Kualitas pelayanan yang tanggap, cepat dan tepat	85	98,39	161,93	-	-	%	
	Penataan Kawasan Kompleks Kepatihan	1	8,5	80	-	-	%	
	Kelancaran Pelayanan keprotokolan	85	96,43	99,96	-	-	%	
	Aktivitas Pemda dalam media massa dan jejaring dengan pemangku kepentingan	70	165	165	-	-	%	
1.10	<i>Penanggulangan Bencana</i>							
	Indeks Ketahanan Daerah	-	-	53,4	60,4	64,5	Nilai Indeks (Angk a)	Target 60% Realisasi 64,5% Persentase ketercapaian 107,5% ( <b>melampaui target</b> )



## BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

### III.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kondisi keuangan daerah di masa lalu dilihat dengan melakukan analisis terhadap kinerja pelaksanaan APBD dan kondisi neraca keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kemampuan daerah juga dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Dari sisi pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan, sejak tahun 2010, laporan keuangan Pemerintah DIY telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion* dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini ini merupakan cerminan komitmen Pemerintah Daerah DIY untuk menyelenggarakan administrasi keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. Perubahan standar akuntansi pemerintahan, dari *cash to accrual basis* (PP 25/2004) ke *full accrual* (PP 71/2010), mampu diatasi dengan baik, sehingga opini WTP bisa dipertahankan. Opini BPK ini juga merupakan bukti nyata tentang kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah DIY.

Dari sisi strategi pendanaan, sesuai dengan tujuan desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah DIY menekankan pada upaya memanfaatkan seoptimal mungkin berbagai potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengingat Pemerintah Daerah DIY tidak memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah, optimalisasi potensi PAD dilakukan dengan menekankan pada sumber pendapatan dari berbagai jasa (*service*) dan menggali sumber pendapatan dari sektor pariwisata, yang memang merupakan salah satu keunggulan Pemerintah Daerah DIY. Kreativitas dan inovasi layanan memegang peran penting. Selama lima tahun, sedangkan total pendapatan daerah tumbuh rata-rata sebesar 20,64 per tahun. Meskipun pertumbuhan PAD setiap tahun relatif tinggi, namun sampai saat ini, belanja Pemerintah Daerah DIY masih ditopang oleh dana perimbangan. Menyangkut aspek belanja daerah, alokasi belanja ditentukan berdasarkan prioritas program dan kegiatan, sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah. Belanja daerah, terutama untuk belanja modal, mempertimbangkan prinsip *value for money*, artinya belanja harus diukur tidak aspek efisiensi, tapi juga mempertimbangkan aspek ekonomis dan keefektifan (*effectiveness*). Dengan kata lain, aspek belanja Pemerintah Daerah DIY menekankan pada optimalisasi potensi manfaat yang akan diterima, yang dilihat dari peningkatan pelayanan publik Pemerintah Daerah DIY dan kemampuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di masa yang akan datang.

#### III.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Daerah DIY berpedoman pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara umum, pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah DIY didasarkan pada prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, transparansi, dan tepat guna, berorientasi pada value for money. Sistem dan prosedur pengelolaan daerah telah dituangkan dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 30 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Pergub ini mengganti Pergub Nomor 49 2012).

Berdasarkan peraturan tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek Pendapatan dan Aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, Aspek Belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dan Aspek Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

#### **III.1.1.1 Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Segala pengelolaan pendapatan daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas.

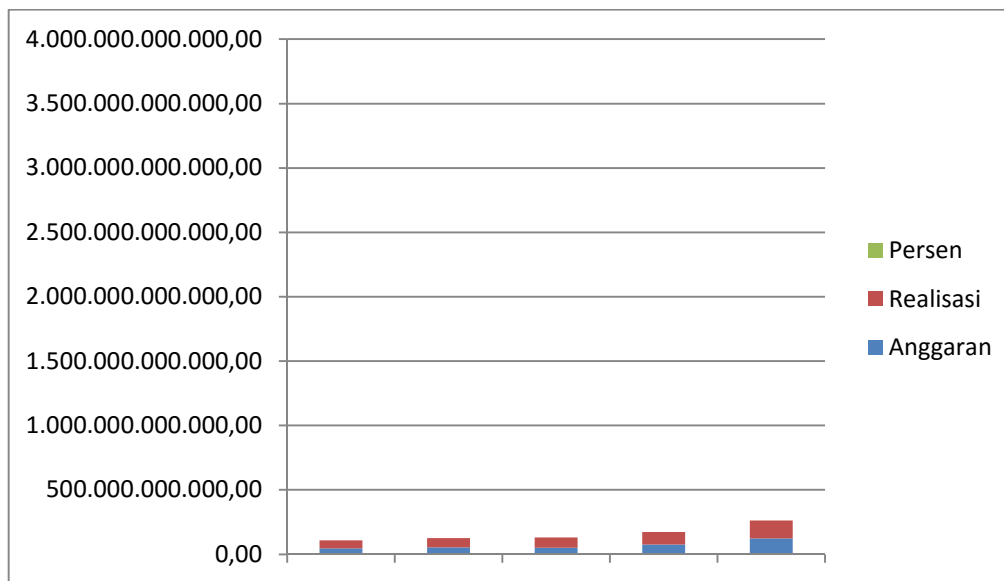
Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, pendanaan dari pemerintah pusat yang disebut sebagai dana transfer yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Selama lima tahun terakhir (2012-2016) pendapatan asli daerah tumbuh rata-rata 16,42 persen per tahun, sedangkan total pendapatan daerah tumbuh rata-rata sebesar 20,64 persen per tahun. Meski pertumbuhan setiap tahun relatif tinggi, namun sampai saat ini, belanja DIY masih ditopang oleh dana perimbangan dan dana keistimewaan (Danais). Tingkat kemandirian daerah, yang direpresentasikan oleh rasio kemandirian daerah (rasio antara pendapatan asli daerah dengan dana perimbangan), selama tahun 2012-2017 berkisar antara 118,54 persen sampai 86,47 persen, sedangkan rasio desentralisasi fiskal, yang dicerminkan oleh rasio antara pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah berkisar antara 46,51 persen sampai 51,03 persen.

Rata-rata pertumbuhan pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel III-1 Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2016**

URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Pertumbuhan
	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	
<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.171.734.307.663,33</b>	<b>2.583.056.763.524,01</b>	<b>3.139.871.880.417,16</b>	<b>3.400.014.811.777,00</b>	<b>3.899.192.985.313,51</b>	<b>20,64%</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>1.004.063.125.812,33</b>	<b>1.216.102.749.617,01</b>	<b>1.464.604.954.200,16</b>	<b>1.593.110.769.595,00</b>	<b>1.673.749.196.521,51</b>	<b>16,42%</b>
Pendapatan Pajak Daerah	871.630.605.393,00	1.063.314.117.923,00	1.291.664.420.808,00	1.397.772.209.370,00	1.440.571.518.513,00	17,42%
Pendapatan Retribusi Daerah	34.115.157.619,03	38.043.014.004,85	44.595.094.779,94	45.811.953.262,71	36.603.883.321,00	6,22%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	35.492.532.563,21	40.817.517.188,12	48.247.880.493,70	52.502.631.979,68	57.333.770.984,56	16,04%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	62.824.830.237,09	73.928.100.501,04	80.097.558.118,52	97.023.974.982,61	139.240.023.702,95	9,72%
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>894.544.324.851,00</b>	<b>957.561.850.914,00</b>	<b>1.013.811.389.590,00</b>	<b>1.021.886.268.197,00</b>	<b>1.697.108.535.480,00</b>	<b>9,06%</b>
Dana Bagi Hasil Pajak	118.434.888.851,00	94.731.182.914,00	76.756.229.590,00	62.257.506.197,00	113.065.428.524,00	-6,67%
Dana Alokasi Umum	757.056.696.000,00	828.334.768.000,00	899.923.550.000,00	920.544.722.000,00	940.835.434.000,00	10,35%
Dana Alokasi Khusus	19.052.740.000,00	34.495.900.000,00	37.131.610.000,00	39.084.040.000,00	643.207.672.956,00	19,00%
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>273.126.857.000,00</b>	<b>409.392.162.993,00</b>	<b>661.455.536.627,00</b>	<b>785.017.773.985,00</b>	<b>528.335.253.312,00</b>	<b>166,95%</b>
Pendapatan Hibah	6.568.977.000,00	10.291.886.370,00	8.822.952.137,00	11.740.118.046,00	9.537.781.616,00	16,76%
Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus-Dana Keistimewaan	266.557.880.000,00	399.100.276.623,00	652.632.584.490,00	773.277.655.939,00	518.205.064.166,00	203,26%
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	592.407.530,00	



**Gambar III.1 Proporsi Pendapatan Daerah Tahun 2012-2016**

Berdasarkan realisasi pendapatan selama kurun waktu 2012-2016, pendapatan Pemerintah Daerah DIY terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan pendapatan daerah rata-rata per tahun adalah sebesar 20,64 persen. Adanya peningkatan pendapatan daerah berarti Pemerintah Daerah DIY memiliki kinerja yang bagus dalam menggali potensi-potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah. Pendapatan Daerah terdiri dari tiga elemen utama yakni Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Pada tahun 2012-2015, Pendapatan Asli Daerah memiliki proporsi paling besar dibandingkan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Namun pada tahun 2016, Dana Perimbangan memiliki proporsi yang paling besar. Hal ini disebabkan adanya kenaikan Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat.

#### **III.1.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah**

Dalam era otonomi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan menjadi pendorong utama bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka semakin kecil tingkat ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat ke daerah. Dalam jangka waktu 2012-2016, Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah DIY tumbuh dengan baik dengan rata-rata sebesar 13,85 persen per tahun. Pada tahun 2012, Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp 1.004.063.125.812,33 sedangkan di tahun 2016 penerimaan PAD mencapai Rp 1.673.749.196.521,51

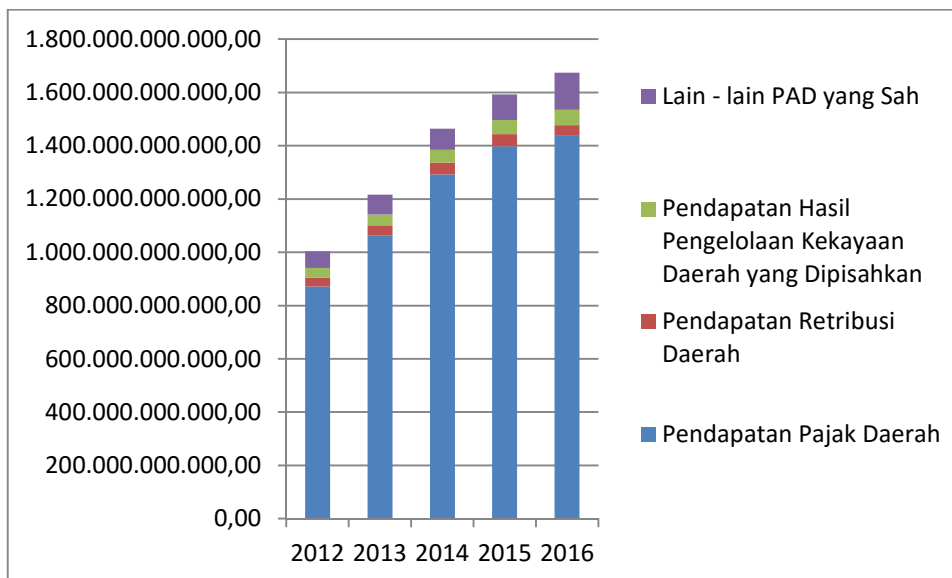
Realisasi penerimaan PAD DIY setiap tahun pada periode 2012-2016 berhasil melampaui target yang dianggarkan. Pada tahun 2012, realisasi PAD melebihi 9 persen dari yang dianggarkan. Keberhasilan ini berlanjut pada empat tahun berikutnya meskipun dengan proporsi yang menurun. Hal ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Daerah DIY dalam memungut sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pajak Daerah merupakan penyumbang penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang terbesar. Pada tahun 2012, Pajak Daerah memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar 86,81

persen. Selama empat tahun berikutnya, penerimaan Pajak Daerah selalu memberikan kontribusi sebesar lebih dari 80 persen terhadap PAD. Di samping itu, realisasi penerimaan Pajak Daerah juga melampaui jumlah yang dianggarkan. Dengan demikian kinerja pemungutan Pajak Daerah DIY selama 2012-2016 dapat dinilai efektif.

**Tabel III-2 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah DIY tahun 2012 – 2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>					
Anggaran	917,957,788,795.00	1,151,006,344,797.00	1,342,290,475,580.27	1,518,860,030,656.77	1.643.358.958.571,80
Realisasi	1,004,063,125,812.33	1,216,102,749,617.01	1,464,604,954,200.16	1,593,110,769,595.00	1.673.749.196.521,51
Persen	109.38%	105.66%	109.11%	104.89%	101,85%
<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>					
Anggaran	805,095,980,000.00	1,021,820,720,000.00	1,202,117,342,494.00	1,347,894,743,697.00	1.424.186.479.922,00
Realisasi	871,630,605,393.00	1,063,314,117,923.00	1,291,664,420,808.00	1,397,772,209,370.00	1.440.571.518.513,00
Persen	108.26%	104.06%	107.45%	103.70%	101,15%
<b>Pendapatan Retribusi Daerah</b>					
Anggaran	32,149,648,150.00	35,715,599,098.00	40,682,507,208.00	43,088,502,025.00	37.637.651.033,00
Realisasi	34,115,157,619.03	38,043,014,004.85	44,595,094,779.94	45,811,953,262.71	36.603.883.321,00
Persen	106.11%	106.52%	109.62%	106.32%	97,25%
<b>Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>					
Anggaran	35,572,913,845.00	40,411,499,192.00	48,063,944,818.32	52,604,081,931.77	57.368.821.720,85
Realisasi	35,492,532,563.21	40,817,517,188.12	48,247,880,493.70	52,502,631,979.68	57.333.770.984,56
Persen	99.77%	101.00%	100.38%	99.81%	99,94%
<b>Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah</b>					
Anggaran	45,139,246,800.00	53,058,526,507.00	51,426,681,059.95	75,272,703,003.00	124.166.005.895,95
Realisasi	62,824,830,237.09	73,928,100,501.04	80,097,558,118.52	97,023,974,982.61	139.240.023.702,95
Persen	139.18%	139.33%	155.75%	128.90%	112,14%



**Gambar III.2 Proporsi Pendapatan Asli Daerah DIY Tahun 2012-2016**

Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PABT-AP) dan Pajak Rokok. Secara umum, peningkatan Pajak Daerah disebabkan oleh makin meningkatnya objek pajak seperti jumlah kendaraan bermotor. Selain itu, Pajak Daerah bisa meningkat akibat pelaksanaan dari perubahan tarif BBN-KB I (kendaraan baru) berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta kemudahan dan fasilitas mengurus pajak. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pajak Rokok mulai tahun 2014 diberlakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga berkontribusi untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah.

Dalam jangka waktu 2012 – 2016, Retribusi Daerah meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 2,84 persen per tahun. Namun demikian, Retribusi Daerah hanya memiliki proporsi yang kecil terhadap PAD, yakni sekitar 3 persen dari total PAD per tahun. Retribusi Pemerintah Daerah DIY terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah dikontribusi oleh hal-hal seperti: peningkatan kunjungan wisata, jasa transportasi Trans Jogja, sewa lahan/ rumah dinas, dan izin trayek.

Pos Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan mengalami kenaikan pertumbuhan rata-rata sebesar 12,81 persen. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan berasal dari dividen laba BUMD yakni Bank BPD DIY, PD. Tarumartani, PT. Anindya Mitra Internasional, PT. Yogya Indah Sejahtera, PT. Asuransi Bangun Askrida serta Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP).

Total realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan ini cenderung sesuai dengan yang dianggarkan. Selisih realisasi hanya berkisar lebih atau kurang 1 persen dari anggaran. Capaian Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan ini menunjukkan bahwa BUMD Daerah Istimewa Yogyakarta sudah bisa menyumbang penerimaan Pendapatan Asli

Daerah. Meski begitu, dengan proporsi hanya berkisar 3-3,5 persen dari total Pendapatan Daerah, proporsi penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan masih perlu ditingkatkan.

Selama lima tahun, Pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mengalami kenaikan dengan tingkat rata-rata 6 persen per tahun. Sesuai Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015, Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri dari a) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan secara tunai dan/atau angsuran/cicilan; b) Pendapatan dari jasa giro; c) Pendapatan bunga deposito; d) Pendapatan atas tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi daerah; e) Pendapatan dari penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah; f) Pendapatan dari penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; g) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas oleh skpd; h) Pendapatan denda pajak; i) Pendapatan denda retribusi; j) Pendapatan dari pengembalian; k) Pendapatan dari eksekusi atas jaminan l) Pendapatan dari penyelenggaraan fasilitas sosial dan fasilitas umum; m) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; n) Pendapatan dari jasa layanan BLUD; o) Pendapatan dari pengelolaan dana bergulir; p) Pendapatan dari dana pembinaan dan jasa produksi pengelolaan BUKP; q) Pendapatan dari hasil pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah atau kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; r) Pendapatan dari jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan sanggahan dan jaminan pemeliharaan pada proses pengadaan barang dan jasa; s) Pendapatan dari tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan; dan t) Pendapatan dari denda lain-lain. Realisasi Pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah selalu melebihi dari yang dianggarkan dengan kisaran sekitar 22 persen.

#### **III.1.1.1.2 Dana Perimbangan**

Instrumen utama desentralisasi fiskal di Indonesia adalah dana transfer ke daerah. Dana transfer ini terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus. Dana Perimbangan merupakan komponen terbesar dari dana transfer ke daerah. Dana ini bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah.

Dana Perimbangan merupakan pendanaan yang berasal dari APBN untuk mengatasi ketimpangan vertikal dan horizontal antar daerah. Dana Perimbangan berperan penting untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Pemerintah Daerah.

Setiap jenis dana perimbangan ini memiliki fungsinya masing-masing. Dana Bagi Hasil berperan sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dan daerah, DAU berperan sebagai pemerataan fiskal antar daerah (fiscal equalization), dan DAK berperan sebagai dana yang didasarkan pada kebijakan yang bersifat khusus untuk membiayai pelaksanaan program prioritas nasional di daerah. Penggunaan dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini lebih efektif dan efisien untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.

Selama kurun 2012 – 2016, Dana Perimbangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 9,0 persen per tahun. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Dana Bagi Hasil mengalami kecenderungan menurun sebesar 6,67 persen per tahun. Sebaliknya, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus mengalami peningkatan rata-rata masing-masing 10,35 persen dan 19 persen per tahun.

Besarnya Dana Alokasi Umum yang ditransfer ke daerah ditentukan oleh alokasi dasar (AD) dan celah fiskal (CF). Yang menentukan alokasi dasar adalah gaji PNS di daerah. Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal. Kapasitas fiskal dipengaruhi oleh jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Kemahalan Konstruksi, dan PDRB per kapita, serta besarnya belanja daerah. Kapasitas fiskal adalah penjumlahan PAD, DBH Pajak, dan DBH SDA. Apabila variabel-variabel tersebut dapat diproyeksi, maka dapat diproyeksi pula besaran DAU yang akan diterima daerah. Namun demikian, pembobotan untuk variabel-variabel seperti jumlah penduduk, luas wilayah, IPM, IKK dan PDRB per kapita lebih banyak ditentukan secara arbitrer. Dengan demikian, lebih *costless* untuk melakukan proyeksi berdasarkan tren data historis DAU yang telah diterima daerah.

Seperti dibahas di atas bahwa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Penyesuaian Otonomi Khusus DIY merupakan sumber pendapatan bagi DIY. DAU dan DAK merupakan bagian dari Dana perimbangan, sedangkan Dana Penyesuaian Otonomi Khusus merupakan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Secara rata-rata persentase DAU terhadap Dana Perimbangan adalah sebesar 82 persen. Sementara itu, persentase DAK dan DBH Pajak dan Bukan Pajak masing-masing sebesar 8 persen dan 10 persen.

**Tabel III-3 Dana Perimbangan DIY 2012-2016 (dalam jutaan rupiah)**

Tahun	Dana Perimbangan	Dana Bagi Hasil Pajak & Bagi Hasil Bukan Pajak	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus
2012	850.513	74.404	757.057	19.053
2013	961.191	98.36	828.335	34.496
2014	1.038.621	101.566	899.924	37.132
2015	1.046.869	87.24	920.545	39.084
2016	1.768.772	108.902	940.835	719.034

Sumber: Kemenkeu. 2016

### Perubahan Kebijakan Transfer Daerah

Pada tahun 2016 terjadi perubahan postur transfer ke daerah dan dana desa. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel III-4 Perubahan Postur Transfer ke Daerah dan Dana Desa**

2015	2016
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

2015	2016
I. TRANSFER KE DAERAH	I. TRANSFER KE DAERAH
A. Dana Perimbangan	A. Dana Perimbangan
1. Dana Bagi Hasil	1. Dana Transfer Umum ( <i>General Purpose Grant</i> )
2. Dana Alokasi Umum	a. Dana Bagi Hasil
3. Dana Alokasi Khusus	b. Dana Alokasi Umum
B. Dana Otonomi Khusus	2. Dana Alokasi Khusus ( <i>Specific Purpose Grant</i> )
C. Dana Keistimewaan Yogyakarta	a. Dana Otonomi Khusus Fisik
D. Dana Transfer lainnya	b. Dana Alokasi Khusus Non-Fisik
	B. Dana Insentif Daerah
	C. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan
II. DANA DESA	II. DANA DESA

Sumber: Kemenkeu. 2016

Adapun yang menjadi dasar adanya perubahan kebijakan peningkatan anggaran transfer ke daerah dan dana desa adalah beberapa hal di bawah ini:

1. Perlunya memperkuat ciri Indonesia sebagai negara Desentralisasi Fiskal.
2. Adanya kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan telah diserahkan dari Pusat ke Daerah (sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).
3. Perlunya peningkatan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk mendukung implementasi Nawacita. Yaitu cita:
  - a. Ketiga: membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI;
  - b. Kelima: meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
  - c. Keenam: meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
  - d. Ketujuh: kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor domestik.
4. Adanya UU Desa yang telah memberikan kewenangan dan sumber keuangan kepada desa antara lain berupa Dana Desa dari APBN.

Pemerintah pusat juga melakukan reformulasi kebijakan DTU untuk Dana Alokasi Umum. Baik jangka pendek. Menengah. Maupun panjang.

1. Jangka Pendek
  - a. Perbaikan Formula khususnya perhitungan Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal sesuai dengan variabel yang sudah ditentukan di Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  - b. Perbaikan transparansi perhitungan DAU dengan mempertimbangkan bobot variabel dalam jangka menengah (tidak berubah tiap tahun).
  - c. Masa transisi penerapan revisi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. (dengan menghilangkan AD) → bobot atau peranan AD secara bertahap terus dikurangi sehingga jika perubahan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 disepakati untuk menghilangkan AD maka formula baru akan lebih mudah dirancang tanpa AD.
2. Jangka Menengah

Revisi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dinyatakan bahwa formulasi DAU diubah dengan menghilangkan AD dan menerapkan konsep Celah Fiskal.

3. Jangka Panjang

- a. Formula DAU berdasarkan *cluster*. Misalnya berdasarkan kepadatan penduduk untuk Kab./Kota atau luas wilayah untuk Kabupaten dan jumlah penduduk untuk Kota.
- b. Kebutuhan daerah diukur dari kebutuhan riil daerah yang dikaitkan dengan kinerjanya dari estimasi menurut fungsi dan cakupan pelayanan.
- c. Pengukuran Kapasitas Fiskal menggunakan variabel potensi berdasarkan rasio agregat (PAD + DBH Pajak) dan DBH SDA dengan basis terkait (*average effective taxes/revenue rate*)

Selain itu juga dilakukan reformulasi kebijakan DTU yang mencakup Dana Bagi Hasil.

Adapun reformulasi yang dilakukan adalah:

1. Memperbaiki cakupan DBH melalui: (a). menghapus DBH PBB P2 karena telah menjadi pajak daerah dan DBH SDA Perikanan karena akan dijadikan sebagai pungutan daerah (retribusi daerah). Dan (b). Menambah cakupan DBH PBB termasuk PBB sektor lainnya diluar sektor pertambangan. Perkebunan. Dan perhutanan.
2. Memperbaiki porsi pembagian DBH kepada daerah penghasil berdasarkan prinsip *by origin*.
3. Memperbaiki pola penyaluran DBH untuk memberi kepastian bagi penerimaan kas daerah.  
Dana Alokasi Khusus juga mengalami reformulasi. Dimana ini ditujukan untuk:
  1. Memperbaiki ruang lingkup DAK hingga mencakup DAK Fisik dan DAK Non Fisik.
  2. Meningkatkan anggaran DAK. Termasuk dari pengalihan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang sudah menjadi kewenangan daerah ke DAK.
  3. Mempertajam fokus DAK Fisik untuk mendanai bidang/sub bidang infrastruktur publik dan sarana/prasarana pelayanan dasar berdasarkan prioritas nasional dan kewilayahan (daerah perbatasan. Tertinggal. Dan kepulauan).
  4. Melakukan revolusi sistem pengalokasian DAK dari semula bersifat top down menjadi bottom up untuk mengakomodasi kebutuhan daerah guna memenuhi pencapaian standar pelayanan nasional. Serta
  5. Tidak ada kewajiban menyediakan dana pendamping DAK.

Dana Insentif Daerah (DID) yang merupakan dana yang dialokasikan kepada Provinsi. Kabupaten. Dan Kota berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja juga mengalami reformulasi. Tujuan dari DID adalah memberikan penghargaan (*reward*) kepada daerah yang mempunyai kinerja baik dalam beberapa bidang. Yaitu (i) Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan daerah (termasuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). (ii) Pelayanan Dasar Publik. Serta (iii) Perekonomian dan kesejahteraan (termasuk pengendalian tingkat inflasi). Reformulasi yang dilakukan meliputi anggaran. Dimana pagu diperbesar agar besaran alokasi yang diterima masing-masing daerah lebih signifikan sebagai instrumen fiskal untuk menstimulasi peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan kesehatan fiskal daerah. Kinerja pelayanan dasar. Dan kinerja ekonomi serta kesejahteraan daerah. Selain itu. Reformulasi juga dilakukan terhadap penggunaan dana yang tidak terikat pada fungsi pendidikan saja.

Perubahan mendasar yang lain adalah adanya peningkatan Anggaran Dana Desa. Adapun dasar kebijakan tersebut adalah:

1. Mempercepat perwujudan kesejahteraan umum masyarakat desa melalui peningkatan pelayanan publik desa dan peningkatan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Pasal 72 ayat (2) dan Penjelasannya: Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015. Pasal 30 A ayat (1): Pengalokasian anggaran Dana Desa dalam APBN dilakukan secara bertahap. Yang dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Tahun Anggaran 2015 paling sedikit sebesar 3% (tiga per seratus) dari anggaran Transfer ke Daerah;
  - b. Tahun Anggaran 2016 paling sedikit sebesar 6% (enam per seratus) dari anggaran Transfer ke Daerah; dan
  - c. Tahun Anggaran 2017 dan seterusnya sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari anggaran Transfer ke Daerah.

#### **III.1.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan yang sangat signifikan dalam jangka waktu 2011 – 2015 dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 166.7 persen per tahun. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya Dana Keistimewaan yang berlaku sejak tahun 2013 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan Dana Keistimewaan untuk dialokasikan pada empat urusan keistimewaan yakni Kelembagaan. Kebudayaan. Pertanahan dan Tata Ruang. Selama tiga tahun pelaksanaan. Dana Keistimewaan mengalami kenaikan signifikan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 86 persen per tahun.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari Hibah. Dana Darurat. DBH Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya. Dana Penyesuaian dan Otsus. Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemda Lainnya. Serta Lain-Lain. Untuk DIY selama 2009-2016 hanya ada 2 sumber yang termasuk dalam kelompok ini. Yaitu Hibah dan Dana Penyesuaian dan Otsus. Persentase Dana Penyesuaian dan Otsus terhadap Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2009 hanya sebesar 40 persen. Namun sejak tahun 2012 secara signifikan. Rata-rata menjadi sekitar 98 persen.

**Tabel III-5 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah DIY 2012-2016 (dalam jutaan rupiah)**

Tahun	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Hibah	Dana Darurat	DHB Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	Dana Penyesuaian dan Otsus	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	Lain-lain
2012	284,778	5,496	-	-	279,282	-	-

Tahun	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Hibah	Dana Darurat	DHB Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	Dana Penyesuaian dan Otsus	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	Lain-lain
2013	311,575	8,815	-	-	302,759	-	-
2014	827,838	9,177	-	-	818,662	-	-
2015	924,194	9,015	-	-	915,178	-	-
2016	599,117	10,956	-	-	588,161	-	-

Sumber: Kemenkeu. 2016

Dana keistimewaan DIY digunakan supaya Pemerintah Daerah DIY menyediakan lebih banyak jasa publik yang terkait dengan tata ruang, pertanahan, kebudayaan, dan kelembagaan, seperti yang disyaratkan oleh efisiensi. Dana ini bersifat *lumpsum* yang besarnya tidak berubah ketika pengeluaran maupun penerimaan pajak daerah berubah.

Survei media menunjukkan bahwa publik beropini agar peruntukan terbesar dari dana tersebut dialokasikan untuk sektor kebudayaan. Pemerintah Daerah DIY mengalokasikan sekitar 90 persen dari dana keistimewaan ini untuk sektor kebudayaan. SKPD-SKPD terlibat dalam perencanaan, penganggaran, dan implementasi penggunaan dana keistimewaan.

Dana keistimewaan DIY berbeda dengan dana otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Papua dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Dana otsus untuk Provinsi Papua dan NAD merupakan tanggapan Pemerintah Pusat atas tekanan yang terjadi seputar pembagian penerimaan dari sumber daya alam. Otsus memberikan 70 persen penerimaan sumber daya alam kepada masing-masing Provinsi Papua dan NAD. Tambahan penerimaan dari migas diterima langsung oleh Pemerintah Provinsi Papua dan NAD yang bertanggungjawab akan alokasi dana kepada seluruh Kabupaten dan Kota dengan menggunakan formulanya sendiri. *Revenue sharing* ini digunakan sebagai piranti untuk mengatasi ketidakseimbangan vertikal dan untuk mengatasi isu politik. Dana keistimewaan DIY sama sekali tidak berkaitan dengan *revenue sharing* dari sumber daya alam dan tidak bernuansa asertif secara politis sehingga besarnya juga tidak sebesar dana otsus untuk Provinsi Papua dan NAD. Dana ini juga berbeda dari dana transfer khusus seperti DAK. Dana Alokasi Khusus merupakan piranti Pemerintah Pusat agar pemerintah daerah dapat melangsungkan pengeluaran pemerintah yang menjadi prioritas nasional seperti pengeluaran untuk sektor kesehatan dan pendidikan. Dana keistimewaan DIY bersifat historis dan lebih mencerminkan preferensi masyarakat lokal serta lebih bersifat *bottom-up*. Selain itu, dana keistimewaan DIY tidak berpagu dan tidak berjangka waktu. Pemerintah Daerah DIY juga diberi kewenangan untuk mendefinisikan sendiri penggunaan dana keistimewaannya dan menuangkannya dalam Perda.

Dana keistimewaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah DIY termasuk dalam kategori *non-matching grants*. Pemerintah Pusat memberikan sejumlah Rupiah tertentu dengan persyaratan bahwa dana tersebut dialokasikan untuk mendukung keistimewaan DIY. Sesuai dengan Undang-undang nomor 13 tahun 2012 pasal 42 ayat 1 dan 2, Pemerintah menyediakan pendanaan penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kebutuhan DIY dan Kemampuan Keuangan

Negara. Dengan demikian Pemerintah Daerah DIY memiliki daya beli yang lebih tinggi untuk mengonsumsi sektor pariwisata, budaya, pertanian, tata ruang, dan kelembagaan sebesar besarnya dana keistimewaan tersebut. Namun, diduga peningkatan konsumsi di bidang-bidang tersebut tidak akan sebesar jumlah dana keistimewaan yang diberikan karena Pemerintah Daerah DIY, sesuai dengan stipulasi dana keistimewaan, mengalokasikan seluruh dana keistimewaan di bidang-bidang yang telah ditentukan, tetapi, Pemerintah Daerah DIY dapat mengurangi alokasi anggarannya sendiri (yang berasal dari PAD) untuk bidang-bidang yang telah disokong pendanaannya oleh dana keistimewaan. Apabila Pemerintah Pusat mengharapkan Pemerintah Daerah DIY untuk meningkatkan konsumsinya di bidang-bidang yang mendukung keistimewaan DIY sebesar jumlah dana keistimewaan yang diberikan, Pemerintah Daerah DIY dapat bereaksi dengan tidak memenuhi sepenuhnya harapan tersebut dengan jalan menurunkan alokasi anggarannya sendiri. Supaya implementasi dana lebih efisien, perlu dilakukan dialog lebih intensif antara masyarakat, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi supaya lebih menjamin tercapainya preferensi masyarakat DIY, khususnya dialog mengenai prioritas pembangunan di bidang pariwisata dan budaya. Dialog ini akan mengisi *gap* perbedaan persepsi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah DIY tentang alokasi belanja di bidang pariwisata dan budaya. Alokasi anggaran di bidang pariwisata dan budaya dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi *overlap* antara dana dekon dengan dana keistimewaan.

Selama 2012 – 2016, Pendapatan Hibah memiliki kecenderungan untuk meningkat dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 16,76 persen per tahun. Pendapatan Hibah berasal dari hibah badan/lembaga/organisasi/swasta dalam negeri dan hibah dari luar negeri.

Permasalahan dalam Pendapatan Daerah yang diidentifikasi dari Catatan atas Laporan Keuangan antara lain: Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah sebagai sumber penerimaan retribusi; Dana Perimbangan yang lebih bersifat *given* (terberikan) dari Pemerintah Pusat; Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan Pemerintah Pusat; Kurangnya sumber daya manusia yang memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan dalam mengelola objek pendapatan daerah; Monitoring dan pengawasan pemungutan dan penyetoran pendapatan daerah yang kurang intensif; Banyaknya aset/barang milik daerah kewenangan SKPD berpendapatan dalam kondisi kurang terawat; Kurangnya apresiasi SKPD berpendapatan tentang upaya mencari strategi dalam memberdayakan barang milik daerah atau kewenangan yang dimilikinya, sehingga kecenderungan dalam penetapan tarif dan target pendapatan terlalu rendah.

Di masa mendatang, arah kebijakan penggunaan Dana Keistimewaan DIY adalah untuk: (i) Meningkatkan kualitas perencanaan Dana Keistimewaan DI Yogyakarta; (ii) Meningkatkan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (iii) Mendorong pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Daerah; dan (iv) Mewujudkan ketepatan penggunaan dana keistimewaan DI Yogyakarta dalam rangka mendukung efektivitas penyelenggaraan keistimewaan DIY.

Adapun kewenangan dalam urusan Keistimewaan yang dimiliki DIY adalah dalam hal; (i) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; Kelembagaan; (iii) Kebudayaan; (iv) Pertanian; dan (v) Tata Ruang. Ketentuan

lebih lanjut mengenai kewenangan dalam urusan Keistimewaan diatur dengan Perda Istimewa (Perdais) yang dibentuk oleh Gubernur dan DPRD DIY.

Penyelesaian Perdais untuk masing-masing urusan Keistimewaan perlu diprioritaskan karena akan menjadi acuan dalam menyusun kegiatan urusan Keistimewaan, selain RKPD dan RPJMD.

Pengalokasian Dana Keistimewaan DIY didasarkan pada PMK 173/PMK.07/2017, dimana pengalokasian DK DIY diajukan oleh Pemerintah Daerah DIY, dibahas dengan kementerian/lembaga terkait, dan kemudian dianggarkan dan ditetapkan dalam APBN sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Pengalokasian Dana Keistimewaan DIY sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara.

Ke depan Pemerintah Daerah DIY harus mempertimbangkan perubahan kebijakan Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Seperti diketahui bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal daerah maka pemerintah pusat melakukan perubahan kebijakan transfer ke daerah dan dana desa. Perubahan tersebut mencakup:

- Perubahan struktur dan cakupan transfer ke daerah dan dana desa.
- Peningkatan anggaran transfer ke daerah dan dana desa.
- Reformulasi kebijakan transfer ke daerah, meliputi Dana Transfer Umum (DTU), Dana Transfer Khusus (DTK), dan Dana Insentif Daerah (DID).
- Kebijakan Dana Desa.
- Kebijakan Dana Keistimewaan DIY

#### **III.1.1.1.4 Analisis Rasio Pendapatan Daerah**

Analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan. Analisis ini dapat digunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja pendapatan dari tahun ke tahun dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis. Dalam kajian ini digunakan rasio kemandirian daerah dan derajat desentralisasi.

**Tabel III-6      Perkembangan Rasio Keuangan Pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 – 2015**

<b>Analisis</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	118.54%	86.47%	89.64%	87.89%	88.74%
Rasio Desentralisasi Fiskal	54.03%	46.23%	47.08%	46.65%	46.86%

#### **1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan pendapatan daerah yang berasal dari bantuan pemerintah pusat dan atau pinjaman lain.

Tabel diatas menunjukkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta tinggi. Selama 5 tahun, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah selalu di atas 80 persen. Semakin tinggi rasio kemandirian mempunyai arti bahwa tingkat ketergantungan provinsi terhadap bantuan pemerintah pusat semakin rendah. Dengan demikian tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Pemerintah Pusat tergolong rendah.

## **2. Rasio Desentralisasi Fiskal**

Rasio Desentralisasi fiskal menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan. Rasio desentralisasi fiskal diukur dengan membandingkan total pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah.

Tabel diatas menunjukkan Rasio Desentralisasi Fiskal Daerah Istimewa Yogyakarta tinggi. Dalam jangka 2011 – 2015, rasio selalu di atas 40 persen. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Daerah Istimewa Yogyakarta dinilai telah bisa menyelenggarakan desentralisasi fiskal dengan baik.

### **III.1.1.2 Belanja Daerah**

Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Dalam struktur APBD, belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Dalam kurun waktu 2012 – 2016, realisasi belanja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 22,31 persen per tahun. Total belanja daerah di tahun 2012 sebesar Rp 2.053.825.959.467,00 sedangkan di tahun 2016 meningkat menjadi Rp 3.847.962.965.846,72. Peningkatan Belanja Daerah ini didorong secara bersamaan oleh peningkatan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Selama tahun 2012 – 2016 Belanja Langsung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 29,41 persen per tahun. Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 17,01 persen per tahunnya.

Pertumbuhan rata-rata Belanja Modal yang mencapai kenaikan sebesar 44,79% per tahun patut diapresiasi dengan baik. Realisasi Belanja Modal pada tahun 2012 sebesar Rp 216.419.982.440,00 meningkat menjadi Rp 836.873.712.179,35 pada tahun 2016. Proporsi Belanja Modal dalam Total Belanja Daerah pun meningkat dari 9,14 persen tahun 2012 menjadi 17,94 persen pada tahun 2016, dibandingkan dengan Proporsi Belanja Pegawai yang terus menurun dari 31,9 persen pada tahun 2012 menjadi 19,14 persen pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta didorong untuk meningkatkan infrastruktur daerah agar pelayanan publik meningkat.

**Tabel III-7 Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Pertumbuhan
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.053.825.959.467,00</b>	<b>2.509.643.375.218,35</b>	<b>2.981.068.320.421,41</b>	<b>3.496.425.502.266,45</b>	<b>3.847.962.965.846,72</b>	<b>22,31%</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.239.114.375.495,00</b>	<b>1.440.462.296.966,78</b>	<b>1.560.157.355.822,47</b>	<b>1.810.940.126.778,80</b>	<b>1.998.595.549.413,17</b>	<b>17,01%</b>
Belanja Pegawai	455.794.239.590,00	491.077.276.246,00	512.498.970.935,00	540.817.461.612,00	570.939.444.554,50	6,85%
Belanja Bunga						
Belanja Subsidi						
Belanja Hibah	369.002.245.000,00	437.147.781.000,00	441.914.970.000,00	562.260.178.868,00	727.099.422.000,00	37,81%
Belanja Bantuan Sosial	24.153.330.000,00	12.509.468.500,00	9.919.078.000,00	7.073.500.000,00	1.919.000.000,00	-50,18%
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota/ dan Pemdes	314.308.555.000,00	376.702.290.858,78	472.309.827.352,47	583.092.613.250,80	611.852.157.038,67	21,45%
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota/ dan Pemdes	74.683.445.362,00	123.025.480.362,00	121.560.574.535,00	117.696.373.048,00	86.724.507.820,00	5,23%
Belanja Tak Terduga	1.172.560.543,00		1.953.935.000,00		61.018.000,00	
<b>Belanja Langsung</b>	<b>814.711.583.972,00</b>	<b>1.069.181.078.251.57</b>	<b>1.420.910.964.598.94</b>	<b>1.685.485.375.487,65</b>	<b>1.849.367.416.433,55</b>	<b>29,41%</b>
Belanja Pegawai	116.229.477.602,00	143.754.843.434,00	111.425.291.725,00	128.727.296.270,00	136.990.455.052,00	11,33%
Belanja Barang Jasa	482.062.123.930,00	556.030.440.778,57	867.039.199.272,94	929.155.893.652,65	875.503.249.202,20	25,51%
Belanja Modal	216.419.982.440,00	369.395.794.039,00	442.446.473.601,00	627.602.185.565,00	836.873.712.179,35	44,79%

**Tabel III-8 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Total Belanja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2016**

Tahun Anggaran	Anggaran	Realisasi	%	Bertambah/(Berkurang)
2012	2,285,140,075,735.00	2,053,825,959,467.00	89.88	-231,314,116,268.00
2013	2,917,270,974,520.00	2,509,643,375,218.35	86.02	-407,627,599,301.65
2014	3,466,745,462,269.77	2,981,068,320,421.41	85.99	-485,677,141,848.36
2015	3,806,092,624,463.02	3,496,425,502,266.45	91.86	-309,667,122,196.57
2016	4.039.848.730.885,60	3.847.962.965.846,72	95,25	-191.885.765.038,88

Namun demikian, penting dicermati bahwa pertumbuhan Belanja Daerah tidak diimbangi oleh nilai realisasi belanja 100 persen sesuai dengan yang dianggarkan. Kinerja Realisasi Belanja Daerah selama lima tahun cenderung fluktuatif dalam kisaran 86 – 92 persen dari yang dianggarkan. Nilai ini mengindikasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang cukup baik. Namun, ke depannya, capaian realisasi ini harus ditingkatkan agar keefektifan anggaran semakin baik dalam memberikan pelayanan publik. Masalah-masalah utama dalam Belanja Daerah yang diidentifikasi dari Catatan atas Laporan Keuangan antara lain: pengalokasian belanja daerah yang terkait dengan kewenangan antara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota; penerapan SPM dalam penyusunan anggaran belanja daerah yang belum optimal; pengelolaan Dana Keistimewaan yang belum lengkap regulasinya; sebagian program dan kegiatan masih berorientasi jangka pendek sehingga kurang memperhatikan keberlanjutan dan dampaknya; belum mantapnya penafsiran kewenangan dan produk-produk hukum sehingga antisipasi akan permasalahan masyarakat kurang akurat.

### **III.1.1.3 Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Sepanjang tahun 2012-2016. Pembiayaan Daerah mengalami saldo yang positif karena jumlah Penerimaan Pembiayaan selalu lebih besar daripada Pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan Daerah mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 19,40 persen tahun.

**Tabel III-9 Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2012-2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Pertumbuhan
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>261,333,592,856.23</b>	<b>308,606,708,591.84</b>	<b>339,527,178,236.50</b>	<b>461,093,118,507.25</b>	<b>140.879.687.992,80</b>	<b>19.40%</b>
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>293,608,592,856.23</b>	<b>403,200,658,867.84</b>	<b>389,527,178,236.50</b>	<b>511,093,118,507.25</b>	<b>370.879.687.992,80</b>	<b>19.07%</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	269,529,213,643.23	379,241,941,052.56	382,020,096,897.50	498,330,738,232.25	364.682.428.017,80	21.05%
Pencairan Dana Cadangan	-	3,224,600,842.28	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	23,019,937,048.00	20,367,526,960.00	7,507,081,339.00	12,762,380,275.00	6.197.259.975,00	-
Penerimaan dari Biaya Penyusutan Kendaraan	1,059,442,165.00	366,590,013.00	-	-	-	-
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>32,275,000,000.00</b>	<b>94,593,950,276.00</b>	<b>50,000,000,000.00</b>	<b>50,000,000,000.00</b>	<b>230.000.000.000,00</b>	<b>16.28%</b>
Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah	32,275,000,000.00	94,593,950,276.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00	230.000.000.000,00	109.41%
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
Penyelesaian Kegiatan DPA-L	-	-	-	-	-	-

Penerimaan Pembiayaan selama lima tahun mengalami kenaikan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 19,40 persen per tahun. Penting dicermati bahwa dalam Penerimaan Pembiayaan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah (SiLPA) tahun sebelumnya mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dengan tingkat rata-rata pertumbuhan sebesar 19,07 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa penyusunan perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu diperbaiki.

Pengeluaran Pembiayaan cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 16,28 persen, meskipun fluktuatif pada tahun 2013. Pengeluaran Pembiayaan yang paling dominan adalah Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah yang tumbuh rata-rata sebesar 109,41 persen setiap tahun. Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah diperuntukkan untuk menambah modal PT. Bank BPD DIY dan BUMD lainnya serta penguatan Modal Bergulir Daerah.

Berdasarkan uraian kinerja pelaksanaan APBD diatas yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah maka rata-rata pertumbuhan APBD DIY Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel III-10 Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2012-2016 Daerah Istimewa Yogyakarta**

No.	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Pertum- buhan
		REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.171.734.307.663,33</b>	<b>2.583.056.763.524,01</b>	<b>3.139.871.880.417,16</b>	<b>3.400.014.811.777,00</b>	<b>3.899.192.985.313,51</b>	<b>20,64%</b>
<b>1.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>1.004.063.125.812,33</b>	<b>1.216.102.749.617,01</b>	<b>1.464.604.954.200,16</b>	<b>1.593.110.769.595,00</b>	<b>1.673.749.196.521,51</b>	<b>16,42%</b>
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	871.630.605.393,00	1.063.314.117.923,00	1.291.664.420.808,00	1.397.772.209.370,00	1.440.571.518.513,00	17,42%
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	34.115.157.619,03	38.043.014.004,85	44.595.094.779,94	45.811.953.262,71	36.603.883.321,00	6,22%
1.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	35.492.532.563,21	40.817.517.188,12	48.247.880.493,70	52.502.631.979,68	57.333.770.984,56	16,04%
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	62.824.830.237,09	73.928.100.501,04	80.097.558.118,52	97.023.974.982,61	139.240.023.702,95	9,72%
<b>1.2.</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>894.544.324.851,00</b>	<b>957.561.850.914,00</b>	<b>1.013.811.389.590,00</b>	<b>1.021.886.268.197,00</b>	<b>1.697.108.535.480,00</b>	<b>9,06%</b>
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak	118.434.888.851,00	94.731.182.914,00	76.756.229.590,00	62.257.506.197,00	113.065.428.524,00	-6,67%
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	757.056.696.000,00	828.334.768.000,00	899.923.550.000,00	920.544.722.000,00	940.835.434.000,00	10,35%
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	19.052.740.000,00	34.495.900.000,00	37.131.610.000,00	39.084.040.000,00	643.207.672.956,00	19,00%
<b>1.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>273.126.857.000,00</b>	<b>409.392.162.993,00</b>	<b>661.455.536.627,00</b>	<b>785.017.773.985,00</b>	<b>528.335.253.312,00</b>	<b>166,95%</b>
1.3.1.	Pendapatan Hibah	6.568.977.000,00	10.291.886.370,00	8.822.952.137,00	11.740.118.046,00	9.537.781.616,00	16,76%
1.3.2.	Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus-Dana Keistimewaan	266.557.880.000,00	399.100.276.623,00	652.632.584.490,00	773.277.655.939,00	518.205.064.166,00	203,26%
1.3.3.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	592.407.530,00	

No.	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Pertum buhan
		REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.053.825.959.467,00</b>	<b>2.509.643.375.218,35</b>	<b>2.981.068.320.421,41</b>	<b>3.496.425.502.266,45</b>	<b>3.847.962.965.846,72</b>	<b>22,31%</b>
<b>2.1.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.239.114.375.495,00</b>	<b>1.440.462.296.966,78</b>	<b>1.560.157.355.822,47</b>	<b>1.810.940.126.778,80</b>	<b>1.998.595.549.413,17</b>	<b>17,01%</b>
2.1.1.	Belanja Pegawai	455.794.239.590,00	491.077.276.246,00	512.498.970.935,00	540.817.461.612,00	570.939.444.554,50	6,85%
2.1.2.	Belanja Bunga						
2.1.3.	Belanja Subsidi						
2.1.4.	Belanja Hibah	369.002.245.000,00	437.147.781.000,00	441.914.970.000,00	562.260.178.868,00	727.099.422.000,00	37,81%
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	24.153.330.000,00	12.509.468.500,00	9.919.078.000,00	7.073.500.000,00	1.919.000.000,00	-50,18%
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota/ dan Pemdes	314.308.555.000,00	376.702.290.858,78	472.309.827.352,47	583.092.613.250,80	611.852.157.038,67	21,45%
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota/ dan Pemdes	74.683.445.362,00	123.025.480.362,00	121.560.574.535,00	117.696.373.048,00	86.724.507.820,00	5,23%
2.1.8.	Belanja Tak Terduga	1.172.560.543,00		1.953.935.000,00		61.018.000,00	
<b>2.2.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>814.711.583.972,00</b>	<b>1.069.181.078.251.57</b>	<b>1.420.910.964.598.94</b>	<b>1.685.485.375.487,65</b>	<b>1.849.367.416.433,55</b>	<b>29,41%</b>
2.2.1.	Belanja Pegawai	116.229.477.602,00	143.754.843.434,00	111.425.291.725,00	128.727.296.270,00	136.990.455.052,00	11,33%
2.2.2.	Belanja Barang Jasa	482.062.123.930,00	556.030.440.778,57	867.039.199.272,94	929.155.893.652,65	875.503.249.202,20	25,51%
2.2.3.	Belanja Modal	216.419.982.440,00	369.395.794.039,00	442.446.473.601,00	627.602.185.565,00	836.873.712.179,35	44,79%
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>261,333,592,856.23</b>	<b>308,606,708,591.84</b>	<b>339,527,178,236.50</b>	<b>461,093,118,507.25</b>	<b>140.879.687.992,80</b>	<b>19.40%</b>
<b>3.1.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>293,608,592,856.23</b>	<b>403,200,658,867.84</b>	<b>389,527,178,236.50</b>	<b>511,093,118,507.25</b>	<b>370.879.687.992,80</b>	<b>19.07%</b>
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	269,529,213,643.23	379,241,941,052.56	382,020,096,897.50	498,330,738,232.25	364.682.428.017,80	21.05%
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-	3,224,600,842.28	-	-	-	-

No.	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Pertum buhan
		REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	
3.1.3.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
3.1.4.	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	23,019,937,048.00	20,367,526,960.00	7,507,081,339.00	12,762,380,275.00	6.197.259.975,00	-
3.1.5.	Penerimaan dari Biaya Penyusutan Kendaraan	1,059,442,165.00	366,590,013.00	-	-	-	-
<b>3.2.</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>32,275,000,000.00</b>	<b>94,593,950,276.00</b>	<b>50,000,000,000.00</b>	<b>50,000,000,000.00</b>	<b>230.000.000.000,00</b>	<b>16.28%</b>
3.2.1.	Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah	32,275,000,000.00	94,593,950,276.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00	230.000.000.000,00	109.41%
3.2.2.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
3.2.3	Penyelesaian Kegiatan DPA-L	-	-	-	-	-	-

### **III.1.2 Neraca Daerah**

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Neraca Daerah menjadi salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Neraca Daerah sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya untuk memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, maka selambat-lambatnya Pemerintah Daerah harus membuat laporan keuangan berbasis akrual selambat-lambatnya pada tahun 2015. Berdasar pada hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menyajikan Laporan Keuangan tahun 2015 dengan Basis Akrual untuk pertama kalinya. Pada awal tahun 2015, Pemda menetapkan neraca awal dengan mengacu neraca per 31 Desember 2014 (*audited*) dengan penyesuaian atas akun-akun yang terpengaruh dengan adanya perubahan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual dan adanya perubahan Bagan Akun Standar terutama terkait dengan penyajian aset tetap.

#### **III.1.2.1 Aset**

Jumlah aset Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam jangka waktu 2012 – 2016, mengalami peningkatan yang kecil dengan pertumbuhan rata-rata per tahun 2,58 persen. Selama tiga tahun di awal, aset mengalami penambahan sebesar Rp 1.304.625.229.796,42. Namun di tahun 2015 aset mengalami penurunan sebesar 25,02 persen. Hal ini disebabkan oleh kewajiban pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah pada tahun 2015 yang mengakibatkan penyesuaian terhadap akun-akun aset daerah, seperti pemberlakuan akumulasi penyusutan pada aset tetap dan piutang pendapatan daerah. Apabila dilihat secara lebih mendetail, Aset Lancar mengalami penurunan rata-rata sebesar 4,20 persen per tahun.

Tidak seperti Aset Lancar, Aset Tetap Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kenaikan sebesar 0,28 persen per tahun. Walaupun pada tiga tahun awal yakni 2012 – 2014, aset tetap mengalami peningkatan namun nilai tersebut pada tahun 2015 menurun sebesar 32,59 persen. Kondisi ini banyak dipengaruhi oleh penyesuaian Aset Tetap yang memberlakukan Akumulasi Penyusutan karena pelaksanaan akuntansi berbasis akrual di Laporan Keuangan tahun 2015.

Aset Lainnya mengalami peningkatan pertumbuhan rata-rata sebesar 48,20 persen per tahun. Peningkatan ini disebabkan oleh reklasifikasi Aset Tetap seperti Tanah Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Aset Tetap Lainnya ke rekening Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Selain itu, pada pos aset tidak berwujud dan aset lain-lain juga mengalami kenaikan.

### **III.1.2.2 Kewajiban**

Kewajiban Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 43,09 persen per tahun. Meski nilai tersebut meningkat sebesar Rp 6.643.514.964,73 dalam kurun lima tahun, terjadi fluktuasi setiap tahunnya. Pada 2012 – 2014, terjadi penurunan kewajiban kemudian naik signifikan sebesar 141 persen pada 2015.

Pos Kewajiban pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta hanya dikontribusi oleh Kewajiban Jangka Pendek, tanpa adanya pos Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Pendapatan Diterima di Muka, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Mulai tahun 2015 dengan adanya penerapan kebijakan akuntansi berbasis akrual, layanan barang atau jasa yang telah dinikmati oleh SKPD tapi belum dibayar sampai dengan akhir periode pelaporan harus diakui sebagai kewajiban dan mengurangi ekuitas, yakni rekening Utang Belanja.

### **III.1.2.3 Ekuitas**

Selama kurun waktu 2012 – 2016, Ekuitas Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta meningkat secara rata-rata sebesar 2,56 persen per tahun. Peningkatan ini terdiri dari kenaikan secara terus menerus Ekuitas dari tahun 2012 – 2014 dan penurunan pada tahun 2015. Pada tahun 2015 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mulai menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sehingga Ekuitas dihitung berdasarkan penyesuaian yang melibatkan perhitungan Ekuitas awal ditambah Surplus/Defisit-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain. Perhitungan Ekuitas di tahun 2015 dilakukan secara lebih rinci pada Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Modal.

Ekuitas Neraca 31 Desember 2014 disajikan dengan obyek rekening terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan. Penyesuaian saldo awal Neraca, Ekuitas disajikan dengan objek rekening terdiri dari Ekuitas, Ekuitas Perubahan SAL dan Ekuitas Dikonsolidasikan. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2014 (*audited*) sebesar Rp7.083.132.937.448,03. Dalam penyajian neraca awal terdapat penyesuaian dan koreksi yang mempengaruhi Ekuitas terdiri dari pengurangan Ekuitas sebesar Rp2.290.947.158.293,39 dan penambahan Ekuitas sebesar Rp7.568.289.809.469,18 sehingga saldo Ekuitas pada Neraca awal tahun 2015 menjadi sebesar Rp5.277.342.651.175,79.

### **Kinerja Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas Pemerintah Daerah dilihat dari hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan RI yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi gambaran kinerja akuntabilitas dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Perkembangan Opini BPK atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tahun 2012 – 2016 adalah sebagai berikut.

- **Tahun 2012**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyajikan laporan keuangan secara wajar untuk semua hal yang material.

- **Tahun 2013**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyajikan laporan keuangan secara wajar untuk semua hal yang material.

- **Tahun 2014**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyajikan laporan keuangan secara wajar untuk semua hal yang material.

- **Tahun 2015**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyajikan laporan keuangan secara wajar untuk semua hal yang material.

- **Tahun 2016**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyajikan laporan keuangan secara wajar untuk semua hal yang material.

**Tabel III-11 Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Neraca Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2012-2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Pertumbuhan (%)
<b>ASET</b>	<b>5,781,079,490,878.14</b>	<b>6,313,759,966,766.44</b>	<b>7,085,704,720,674.56</b>	<b>5,313,019,451,167.96</b>	<b>6.050.819.887.074,37</b>	2,58
<b>ASET LANCAR</b>	<b>505,975,693,897.27</b>	<b>505,567,312,678.15</b>	<b>675,698,050,148.98</b>	<b>598,850,729,775.74</b>	<b>365.398.004.294,29</b>	-4,20
Kas dan Setara Kas	379,467,769,637.56	382,061,444,776.90	498,391,976,288.25	364,682,428,017.80	194.378.352.721,59	-10,60
Kas di Kas Daerah	372,028,340,287.77	374,835,728,277.89	484,739,697,430.54	350,228,496,778.09	172.991.324.108,50	-12,07
Kas di Bendahara Pengeluaran	2,753,889,586.00	467,565,975.00	444,101,586.00	22,780,076.00	171.398.099,00	117,37
Kas di Bendahara Penerimaan	225,828,585.00	33,202,874.40	61,158,056.00	31,498,712.00	27.490.664,00	-15,58
Kas di BLUD	4,459,711,178.79	6,724,947,649.61	13,147,019,215.71	14,399,652,451.71	18.922.341.992,09	46,81
Kas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265.797.858,00	
Setara Kas						
Investasi Jangka Pendek						
Piutang Pendapatan	165,848,000.00	229,068,500.00	357,537,400.00	11,071,668,545.84	2.894.124.774,55	754,25
Piutang Lain-lain	2,521,682,628.19	11,151,031,995.17	5,876,464,952.46		1.264.024.890,00	
Penyisihan Piutang	(468,474,290.86)	(964,289,446.68)	(760,973,634.25)	(1,284,443,338.10)	(1.087.538.108,29)	34,55
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	1,550,000.00					
Beban dibayar di muka	28,100,000.00	357,175,886.38	109,874,167.00	405,947,179.69	436.422.158,93	344,71
Persediaan	124,259,217,922.38	112,732,880,966.38	171,723,170,975.52	223,975,129,370.51	167.512.617.857,51	12,07
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>354,930,156,492.98</b>	<b>444,894,861,561.02</b>	<b>543,553,822,039.65</b>	<b>573,069,314,130.77</b>	<b>838.352.343.727,85</b>	24,81

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Investasi Non Permanen	31,646,566,577.00	30,703,132,117.00	21,974,980,752.80	8,883,136,814.50	6.290.805.575,50	-30,04
Investasi Permanen	323,283,589,915.98	414,191,729,444.02	521,578,841,286.85	564,186,177,316.27	832.061.538.152,35	27,42
<b>ASET TETAP</b>	<b>4,832,413,108,328.00</b>	<b>5,259,003,123,680.19</b>	<b>5,735,473,197,925.00</b>	<b>3,866,394,567,138.81</b>	<b>4.478.669.646.379,90</b>	0,28
Tanah	1,758,127,072,490.00	1,826,576,704,949.00	1,894,473,690,930.00	1,900,646,511,846.00	2.126.499.974.997,00	4,95
Peralatan dan Mesin	348,549,187,368.00	407,525,835,707.00	482,329,119,004.00	587,608,900,320.00	690.971.065.355,80	18,67
Gedung dan Bangunan	1,128,228,185,025.00	1,215,255,759,030.00	1,432,532,090,570.00	1,485,664,889,569.07	1.586.592.964.602,07	9,02
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,474,306,759,697.00	1,644,445,187,113.00	1,807,440,942,488.00	2,014,908,795,067.00	2.249.781.894.580,00	11,15
Aset Tetap Lainnya	28,037,353,579.00	32,912,528,143.19	47,398,584,108.00	58,087,014,445.00	68.982.953.055,00	25,68
Konstruksi dalam Pengerjaan	95,164,550,169.00	132,287,108,738.00	71,298,770,825.00	124,143,376,377.00	211.716.080.245,00	34,39
Akumulasi Penyusutan				(2,304,664,920,485.26 )	(2.455.875.286.454,97 )	
<b>DANA CADANGAN</b>	<b>3,228,100,950.42</b>					
Dana Cadangan	3,228,100,950.42					
<b>ASET LAINNYA</b>	<b>84,532,431,209.47</b>	<b>104,294,668,847.08</b>	<b>130,979,650,560.93</b>	<b>274,704,840,122.64</b>	<b>368.399.892.672,33</b>	48,20
Tagihan Penjualan Angsuran						
Tagihan Bagi Hasil Kemitraan	5,987,000,000.00	5,532,000,000.00	5,077,000,000.00			
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan						
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah						

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Tagihan Jangka Panjang						
Tagihan Sewa Jangka Panjang	4,171,915,542.47	11,114,178,470.27	6,964,103,267.12			
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	7,038,500,000.00	7,038,500,000.00	7,038,500,000.00	155,596,763,692.64	232.759.345.234,63	540,06
Aset Tidak Berwujud	51,084,724,807.00	70,215,967,069.00	65,235,095,441.00	78,816,883,216.00	89.677.202.241,00	16,24
Aset Lain-lain	16,250,290,860.00	10,394,023,307.81	46,664,951,852.81	40,291,193,214.00	45.963.345.196,70	78,34
<b>JUMLAH ASET DAERAH</b>	<b>5,781,079,490,878.14</b>	<b>6,313,759,966,766.44</b>	<b>7,085,704,720,674.56</b>	<b>5,313,019,451,167.96</b>	<b>6.050.819.887.074,37</b>	
<b>KEWAJIBAN</b>	<b>6,291,413,360.51</b>	<b>2,750,592,428.86</b>	<b>3,015,804,812.53</b>	<b>7,270,069,439.84</b>	<b>12.934.928.325,24</b>	<b>43,09</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>6,291,413,360.51</b>	<b>2,750,592,428.86</b>	<b>3,015,804,812.53</b>	<b>7,270,069,439.84</b>	<b>12.934.928.325,24</b>	<b>43,09</b>
Utang Perhitungan Pihak Ketiga		3,231,281.00	80,000.00		2.268.645.262,00	
Utang Bunga						
Utang Kepada Pihak Ketiga		4,889,000.00				
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang						
Pendapatan Diterima di Muka	1,280,528,961.51	1,479,337,509.86	1,816,778,717.53	2,617,950,564.84	3.644.234.323,04	30,41
Utang Belanja				3,757,512,573.00	1.813.805.440,20	
Utang Jangka Pendek Lainnya	5,010,884,399.00	1,263,134,638.00	1,198,946,095.00	894,606,302.00	5.208.243.300,00	94,23

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Pertumbuhan (%)
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>						
Utang Jangka Panjang						
<b>EKUITAS</b>	<b>5,774,788,077,517.63</b>	<b>6,311,009,374,337.58</b>	<b>7,082,688,915,862.03</b>	<b>5,305,749,381,728.12</b>	<b>6.037.884.958.749,13</b>	<b>2,56</b>
<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>	<b>499,684,280,536.76</b>	<b>502,816,720,249.29</b>	<b>672,682,245,336.45</b>			
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	374,782,229,873.77	375,295,149,247.89	485,183,719,016.54			
SILPA di BLUD	4,459,711,178.79	6,724,947,649.61	13,147,019,215.71			
Pendapatan yang Ditangguhkan	225,828,585.00	33,227,598.40	61,158,056.00			
Cadangan Piutang	2,248,706,337.33	10,772,986,934.87	5,582,902,885.21			
Cadangan Persediaan	124,259,217,922.38	112,732,880,966.38	171,723,170,975.52			
Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(6,291,413,360.51)	(2,742,472,147.86)	(3,015,724,812.53)			
<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>	<b>5,271,875,696,030.45</b>	<b>5,808,192,654,088.29</b>	<b>6,410,006,670,525.58</b>			
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	354,930,156,492.98	444,894,861,561.02	543,553,822,039.65			

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	4,832,413,108,328.00	5,259,003,123,680.19	5,735,473,197,925.00			
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	84,532,431,209.47	104,294,668,847.08	130,979,650,560.93			
Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang						
<b>EKUITAS DANA CADANGAN</b>	<b>3,228,100,950.42</b>					
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	3,228,100,950.42					
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>5.781.079.490.878,14</b>	<b>6.313.759.966.766,44</b>	<b>7.085.704.720.674,56</b>	<b>5.313.019.451.167,96</b>	<b>6.050.819.887.074,37</b>	

### III.1.3 Kinerja Pelaksanaan Urusan Keistimewaan

Kewenangan dalam urusan keistimewaan meliputi : (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur; (2) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; (3) kebudayaan; (4) pertanahan; dan (5) tata ruang.

Alokasi besaran anggaran keistimewaan per urusan tahun 2013-2017 sebagai berikut:

**Tabel III-12 Alokasi Besaran Anggaran Keistimewaan per Urusan Tahun 2013-2017**

Tahun	Total Pagu Dana Keistimewaan	Pengisian Jabatan	Kelembagaan	Kebudayaan	Pertanahan	Tata Ruang
2013	231.392.653.500	-	2.516.142.500	212.546.511.000	6.300.000.000	10.030.000.000
2014	523.874.719.000	400.000.000	1.676.000.000	375.178.719.000	23.000.000.000	123.620.000.000
2015	547.450.000.000	-	1.650.000.000	420.800.000.000	10.600.000.000	114.400.000.000
2016	547.450.000.000	-	1.800.000.000	179.050.365.000	13.850.000.000	352.749.635.000
2017	800.000.000.000	2.832.737.000	14.256.040.000	439.901.748.000	17.197.300.000	325.812.175.000

Adapun perkembangan realisasi fisik dan keuangannya tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III-13 Perkembangan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2013-2017**

Tahun	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)
2013	29,35	23,58
2014	92,77	64,88
2015	97,86	79,52
2016	99,17	97,13
2017	98,94	96,69

## III.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kemampuan fiskal daerah (*fiscal capacity*) merupakan faktor yang sangat krusial dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan umum dan pembangunan daerah secara umum. Karena itu, upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu dan sinergi antar-SKPD/unit kerja pengelola pendapatan daerah.

### III.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Belanja pemenuhan kebutuhan merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan. Belanja pemenuhan kebutuhan aparatur digunakan untuk membiayai belanja yang berkaitan dengan operasional aparatur di dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Proporsi besaran belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan total pengeluaran. Pada tahun 2014 proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur sebesar 20,93 persen dan pada tahun 2015 turun 1,78 persen menjadi 19, 15 persen. Pada tahun 2016 turun menjadi 17,36 persen. Proporsi belanja

pemenuhan kebutuhan aparatur tahun anggaran 2014-2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel III-14 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun Anggaran 2014-2016**

No	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (Rp)	Persentase
1	Tahun Anggaran 2014	623.924.262.660,00	2.981.068.320.421,41	20,93
2	Tahun Anggaran 2015	669.544.757.882,00	3.496.425.502.266,45	19,15
3	Tahun Anggaran 2016	707.929.899.606,50	4.077.962.965.846,72	17,36

### III.2.2 Analisis Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Jika Pendapatan Daerah lebih kecil dari Belanja Daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang defisit dan harus ditutupi dengan Penerimaan Daerah. Jika Pendapatan Daerah lebih besar dari Belanja Daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang surplus dan harus digunakan untuk Pengeluaran Daerah. Oleh sebab itu, Pembiayaan Daerah terdiri Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya dijabarkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari antara lain:

- Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA);
- Pencairan Dana Cadangan;
- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- Penerimaan Pinjaman Daerah;
- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman;
- Penerimaan Piutang Daerah;
- Penerimaan Pembayaran Askes;
- Penerimaan Pembayaran Pihak Ketiga;
- Penerimaan Piutang Pihak Ketiga.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah bersumber dari antara lain:

- Pembentukan Dana Cadangan;
- Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- Pembayaran Pokok Utang;
- Pemberian Pinjaman Daerah;
- Pembayaran Utang Belanja.

Kebijakan pembiayaan daerah Pemerintah Daerah DIY selama tahun anggaran 2012-2017 adalah sebagai berikut:

- 1) Kebijakan umum penerimaan pembiayaan diarahkan pada perhitungan perkiraan sisa lebih (SiLPA) baik berupa pelapauan pendapatan atas dasar peningkatan kinerja maupun sisa belanja atas asumsi terjadinya efisiensi belanja,
- 2) Kebijakan umum pengeluaran pembiayaan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan pengeluaran pembiayaan dalam rangka tambahan modal BUMD,

Defisit APBD direncanakan akan diatasi melalui selisih antara proyeksi penerimaan pembiayaan dengan rencana pengeluaran pembiayaan.

Analisis Pembiayaan Daerah dimaksudkan untuk memberi gambaran atau informasi pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus atau defisit belanja daerah. Gambaran ini menjadi bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan Pemerintah Daerah DIY periode tahun 2012-2016 terutama terkait dengan penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Untuk mengetahui besaran dari pendanaan pembangunan, maka kondisi realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah perlu dijelaskan tentang posisi surplus belanja dan/atau defisit belanja selama periode pemerintahan yang lalu.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Perkembangan Pembiayaan Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tabel berikut.

### **III.2.3 Kinerja BUMD di DIY**

BUMD DIY terdiri dari empat (4) lembaga, yaitu PT Taru Martani, PT Bank BPD DIY, PT Anindya Mitra Internasional, dan Badan Usaha Kredit Pedesaan. Masing-masing lembaga berkinerja baik dan telah dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah DIY dalam bentuk deviden yang disetor sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi BUMD terhadap PAD rerata sebesar 3% per tahun.

#### **a. PT. Bank BPD DIY**

PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (PT Bank BPD DIY) adalah Bank Umum yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kota/Kabupaten se-DIY. Dalam menjalankan fungsinya, PT Bank BPD DIY sejak tahun 2015 sudah mengalami transformasi yang diarahkan pada tiga sasaran utama: (1) peningkatan daya saing, kemampuan bisnis, dan kualitas layanan; (2) penguatan ketahanan kelembagaan; dan (3) peningkatan kontribusi untuk pembangunan daerah.

Pada akhir tahun 2016, para pemegang saham telah melakukan setoran modal secara bertahap untuk memenuhi modal dasar Rp1 Triliun. Dengan tambahan setoran modal disertai dengan hasil kinerja yang baik, maka modal inti PT Bank BPD DIY tercapai sebesar Rp 1,36 Triliun. Indikator ini selanjutnya menempatkan PT Bank BPD DIY ke dalam Bank Umum dengan Kategori Buku 2. Dengan kategori BUKU 2, maka Bank BPD DIY dapat melakukan kegiatan produk atau aktivitas dalam rupiah dan valuta asing dengan cakupan yang lebih luas dari BUKU 1.

Sebagai Bank dengan Kategori BUKU 2, maka diperlukan penambahan setoran modal dari para pemilik untuk memperkuat struktur permodalan menjadi Rp4 Triliun sampai dengan tahun 2025. Hal ini sesuai dengan Berita Acara RUPS Tahunan Nomor 40 tanggal 21 April 2017 dan Berita Acara RUPS Luar Biasa Nomor 41 tanggal 21 April 2017.

Rencana Pengembangan PT Bank BPD DIY dari Tahun 2018 s.d. 2022 meliputi :

1. Mengembangkan produk dan manajemen dana yang kompetitif guna memperoleh funding yang efisien.
2. Mengembangkan produk kredit yang kompetitif yg menjadi solusi nasabah.
3. Membangun sistem layanan berbasis budaya.
4. Meningkatkan volume bisnis dan jumlah kemitraan institusi / korporasi yang kokoh dan saling menguntungkan.
5. Membangun layanan digital banking yang adaptive dengan preferensi nasabah.
6. Membangun kekuatan kelembagaan dan kesehatan Unit Usaha Syariah (UUS) untuk mempersiapkan Bank DIY Syariah.
7. Infrastruktur operasional yang supportif
8. Teknologi informasi dan komunikasi yang adaptif, responsif dan andal.
9. SDM yang produktif dan mengamalkan budaya kerja Istimewa
10. Kelembagaan dan permodalan yang kuat

Kesepuluh rencana pengembangan diatas kemudian dijabarkan dalam Action Plan setiap tahunnya.

Penambahan modal perlu dilakukan dengan pertimbangan:

1. Memperkuat ketahanan kelembagaan Bank dan meningkatkan kemampuan Bank menyerap risiko, yaitu sebagai penyangga (buffer) apabila terjadi krisis keuangan dan ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan
2. Memperluas ruang gerak Bank dalam melakukan ekspansi bisnis
3. Meningkatkan layanan kepada masyarakat dan berperan mendorong perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Meningkatkan kinerja keuangan Bank dan dividen yang diterima, sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah.
5. Mendukung rencana spin off Unit Usaha Syariah BPD DIY menjadi Bank BPD DIY Syariah pada tahun 2022 yang membutuhkan modal minimal Rp500.000.000.000,00 (Lima ratus miliar rupiah) dan modal di Bank induk (PT Bank BPD DIY) minimal Rp2.500.000.000,00 (Dua triliun lima ratus miliar rupiah)

Berikut rencana rincian pemenuhan modal disetor Pemda DIY pada PT Bank BPD DIY:

**Tabel III-15 Rencana Rincian Pemenuhan Modal Disetor Pemda DIY pada PT Bank BPD DIY**

Tahun Anggaran	Jumlah Setoran Modal
2018	Rp191.250.000.000,-
2019	Rp204.440.000.000,-
2020	Rp222.041.000.000,-
2021	Rp244.668.000.000,-
2022	Rp270.603.000.000,-
2023	Rp299.828.000.000,-
2024*	Rp48.585.000.000,-
2025*	Rp48.585.000.000,-

\* (Rencana penambahan modal terpenuhi 51% kewajiban Pemerintah Daerah DIY).

Terkait dengan rencana penambahan modal pada PT Bank BPD DIY maka diperkirakan deviden yang akan diterima pada periode 2018 – 2023 akan meningkat. Berikut perhitungan peningkatan kontribusi PT Bank BPD DIY terhadap PAD:

**Tabel III-16 Peningkatan Kontribusi PT Bank BPD DIY terhadap PAD**

Tahun Anggaran	Kontribusi PAD
2018	Rp76.680.000.000,-
2019	Rp85.150.000.000,-
2020	Rp93.670.000.000,-
2021	Rp103.000.000.000,-
2022	Rp111.950.000.000,-
2023	Rp126.710.000.000,-
2024*	Rp141.720.000.000,-
2025*	Rp153.210.000.000,-

\* (Asumsi deviden sesuai rencana setoran modal terpenuhi 51%).

#### b. PT Anindya Mitra Internasional (PT. AMI)

PT AMI merupakan Perusahaan Daerah yang bergerak di bidang industri, jasa, perdagangan umum, angkutan, agrobisnis dan pertambangan, dengan Modal Dasar ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,-.

Modal Disetor sampai dengan Tahun 2017 sebesar Rp31.144.910.000,- (tiga puluh satu miliar seratus empat puluh empat juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), masih kurang setor sebesar Rp. 18.855.090.000,00 (delapan belas miliar delapan ratus delapan puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah), dan diharapkan dapat segera terpenuhi untuk pengembangan usaha Perseroan.

Sampai dengan saat ini, Kinerja Perseroan berkembang dengan baik sehingga dapat memberikan peningkatan kontribusi terhadap PAD. Untuk masa yang akan datang, akan melaksanakan pengembangan usaha pada semua unit usaha dan memaksimalkan potensi unit usaha perdagangan tambang dan pariwisata serta transportasi.

Berikut perhitungan Asumsi/rencana kontribusi (Deviden) PT AMI terhadap PAD pada periode 2018 - 2023 :

**Tabel III-17 Perhitungan Asumsi/Rencana Kontribusi (deviden PT AMI terhadap PAD 2018-2023**

Tahun Anggaran	Kontribusi PAD (Deviden)
2018	Rp1.025.906.377,-
2019	Rp1.128.497.015,-
2020	Rp1.184.921.865,-
2021	Rp1.244.167.959,-
2022	Rp1.306.376.357,-
2023	Rp1.371.695.174,-

c. PT Taru Martani

PT. Taru Martani merupakan perusahaan milik Pemda DIY dengan bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas berdasarkan Perda Nomor 9 tahun 2004. Bidang usaha Perseroan meliputi produksi cerutu dan tembakau shag, distribusi produk, industry pengolahan dan perdagangan, dan usaha lainnya yang sah.

Pada Tahun 2017 PT. Taru Martani bekerjasama dengan PT. Young Sin Aneka Energy kemudian mendirikan pabrik/perusahaan dengan nama PT. Young Sin Aneka Martani dan bergerak di bidang Industry Energy (Sawdust Charcoal Briquette) dan Bio Food (Smoked Fish dan Refined Salt).

Modal dasar yang ditetapkan untuk PT. Taru Martani sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), sampai dengan tahun anggaran 2017 telah disetorkan sebesar Rp15.842.500.000,00 ( lima belas miliar delapan ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Masih terdapat kurang setor sebesar Rp. 34.157.500.000,00 (tiga puluh empat milyar seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida, kurang setor sebesar Rp.34.157.500.000,00 (tiga puluh empat milyar seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan dipenuhi sampai Tahun Anggaran 2019.

PT Taru Martani berencana melakukan pengembangan usaha :

1. Usaha Tani (pengolahan padi);
2. Pengolahan Pakan Ternak (penggilingan jagung) dan
3. Peternakan (penggemukan sapi).

Terkait dengan rencana pengembangan usaha, Asumsi/rencana Deviden yang akan disetorkan sebagai PAD :

**Tabel III-18 Asumsi/Rencana Deviden yang Akan Disetor sebagai PAD**

Tahun Anggaran	Kontribusi PAD
2018	Rp450.000.000,-
2019	Rp765.000.000,-
2020	Rp772.650.000,-
2021	Rp880.376.500,-
2022	Rp924.395.325,-
2023	Rp970.615.091,-

**d. BUKP**

BUKP didirikan dengan tujuan untuk memberikan akses kredit bagi pelaku usaha mikro yang tidak bankable dan sulit mengakses kredit dari Perbankan. Tujuan lain adalah menjauhkan para pelaku usaha mikro tersebut dari para renternir.

Untuk mendorong pengembangan kelembagaan BUKP, perlu melakukan penyempurnaan perizinan usaha dan kelembagaan. Dengan berjalannya waktu dan meningkatnya anime masyarakat terhadap BUKP, kemudian berdampak pada kebutuhan dana untuk disalurkan pada masyarakat semakin bertambah. Untuk itu diperlukan penguatan struktur Kelembagaan dan permodalan BUKP, dan Tahun 2018 mulai disusun Naskah Akademik tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan DIY.

Modal Dasar yang ditetapkan untuk BUKP adalah sebesar Rp20 miliar dan telah terpenuhi sepenuhnya. Kemudian untuk memperkuat Struktur Permodalan, pada tahun Anggaran 2018 Pemerintah Daerah DIY mengalokasikan Dana Bergulir untuk BUKP sebesar Rp2 miliar, yang direncanakan akan diteruskan untuk dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran berikutnya.

Berikut ini kami sampaikan proyeksi Deviden dari tahun 2018 s.d. 2023 :

**Tabel III-19 Proyeksi Deviden dari Tahun 2018-2023**

Tahun Anggaran	Proyeksi Deviden
2018	Rp3.440.183.613,-
2019	Rp3.612.192.794,-
2020	Rp3.792.802.434,-
2021	Rp3.982.442.556,-
2022	Rp4.181.564.683,-
2023	Rp4.390.642.917,-

Rencana Pengembangan :

1. Review Kelembagaan BUKP.
2. Tetap melayani masyarakat mikro yang tidak bankable, yang sulit mengakses kredit ke Lembaga Perbankan.
3. Kontribusi PAD dan Deviden yang meningkat.

Dalam rangka Peningkatan Kinerja dan Peningkatan Kapasitas BUMD, masih dibutuhkan Penguatan Modal dari Pemerintah Daerah. Berikut disampaikan tabel informasi tentang masing-masing BUMD.

**Tabel III-20 Penyertaan Modal BUMD DIY**

No	BUMD	Perda Pembentukan	Bidang Usaha	Modal Dasar	Modal Disetor Pemda DIY	Deviden	Deviden	Deviden	Deviden	Deviden
						Tahun Buku 2013	Tahun Buku 2014	Tahun Buku 2015	Tahun Buku 2016	(Rencana) Tahun Buku 2017
1	PT. TARU MARTANI	1. Perda Prov DIY Nomor 8 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Prov DIY Nomor 3 Tahun 1995. 2. Perda DIY Nomor 5 Tahun 2013	Cerutu, tembakau shag	50.000.000.000,-	15.842.500.000,-	40.404.234,-	493.207.600,-	760.000.000,-	1.015.000.000,-	880.000.000,-
2	PT. AMI	Perda DIY Nomor 8 Tahun 2004	- Industry - Jasa dan Perdagangan	50.000.000.000,-	31.144.910.000,-	400.000.000,-	500.000.000,-	600.000.000,-	685.864.895,-	1.025.906.377,-
3	PT. BANK BPD DIY	1. Perda Prov DIY Nomor 2 Tahun 1993 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Prov DIY Nomor 4 Tahun 2005.	Perbankan	1.000.000.000.000,-	510.000.000.000,-	32.415.405.521,43	46.643.980.857,77	52.300.921.299,98	66.132.661.551,70	70.502.000.000,-
4	BUKP	Perda Prov DIY nomor 1 Tahun 1989	Penyaluran Kredit Mikro	20.000.000.000,-	20.000.000.000,-	3.584.920.201,89	4.215.168.557,91	3.451.453.420,58	3.345.955.827,50	4.371.263.888,91

**Tabel III-21 Defisit Riil Anggaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2012-2016**

No	Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	2.171.734.307.663,33	2.583.056.763.524,01	3.139.871.880.417,16	3.400.014.811.777,00	3.899.192.985.313,51
	Dikurangi realisasi					
2	Belanja Daerah	2.053.825.959.467,00	2.509.643.375.218,35	2.981.068.320.421,41	3.496.425.502.266,45	3.847.962.965.846,72
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	32.275.000.000,00	94.593.950.276,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	230.000.000.000,00
<b>A</b>	<b>Defisit Riil</b>	<b>85.633.348.196,33</b>	<b>(21.180.561.970,34)</b>	<b>108.803.559.995,75</b>	<b>(146.410.690.489,45)</b>	<b>(178.769.980.533,21)</b>
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	269.529.213.643,23	379.241.941.052,56	382.020.096.897,50	498.330.738.232,25	364.682.428.017,80
2	Pencairan Dana Cadangan	0	3.224.600.842,28	0	0	
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0	0	0	0	
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	
5	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	23.019.937.048,00	20.367.526.960,00	7.507.081.339,00	12.762.380.275,00	6.197.259.975,00
6	Penerimaan Dari Biaya Penyusutan Kendaraan	1.059.442.165,00	366.590.013,00	0	0	
7	Penerimaan Pembayaran ASKES	0	0	0	0	
8	Penerimaan Pembayaran Pihak ke III	0	0	0	0	
9	Penerimaan Piutang Pihak ke III	0	0	0	0	
<b>B</b>	<b>Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>293.608.592.856,23</b>	<b>403.200.658.867,84</b>	<b>389.527.178.236,50</b>	<b>511.093.118.507,25</b>	370.879.687.992,80
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>379.241.941.052,56</b>	<b>382.020.096.897,50</b>	<b>498.330.738.232,25</b>	<b>364.682.428.017,80</b>	192.109.707.459,59

Sumber: DPPKA Daerah Istimewa Yogyakarta

Dari tabel di atas, terlihat bahwa terdapat defisit riil anggaran selama tahun 2012-2016 yang cenderung meningkat. Tahun 2012 defisit riil anggaran sebesar Rp 85.633.348.196,33, namun pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi – Rp 21.180.561.970,34, kemudian defisit tersebut meningkat kembali pada tahun 2014 dan menurun kembali pada 2015 dan 2016. Untuk menutupi defisit anggaran tersebut dilakukan optimalisasi pembiayaan melalui realisasi Penerimaan Pembiayaan dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

**Tabel III-22      Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Daerah Istimewa Yogyakarta  
Tahun Anggaran 2012-2016**

No	Uraian	Proporsi Dari Total Defisit Riil				
		Tahun 2012 (%)	Tahun 2013 (%)	Tahun 2014 (%)	Tahun 2015 (%)	Tahun 2016 (%)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	100	100	100	100	100
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
6	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
7	Penerimaan Pembayaran ASKES	0	0	0	0	0
8	Penerimaan Pembayaran Pihak ke III	0	0	0	0	0
9	Penerimaan Piutang Pihak ke III	0	0	0	0	0

Sedangkan perkembangan realisasi sisa lebih perhitungan anggaran Pemerintah Daerah DIY pada kurun waktu 2011 – 2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel III-23 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2011-2015**

No	Uraian	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Rata-rata
		(Rp)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA	Pertumbuhan
1	Jumlah SiLPA	269.529.213.643,23	100,00	379.241.941.052,56	100,00	382.020.096.897,50	100,00	498.330.738.232,25	100,00	364.682.428.017,80	100,00	100,00
2	Pelampauan penerimaan PAD	91.995.437.363,87	34,13	86.105.337.017,33	22,70	23.603.006.897,01	6,18	122.314.478.619,89	24,54	74.250.738.938,23	20,36	21,58
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	7.172.727.247,00	2,66	20.883.170.097,00	5,51	(6.834.683.108,00)	-1,79	(32.416.099.059,00)	-6,50	(34.722.597.963,00)	-9,52	-1,93
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	1.278.406.500,00	0,47	(13.439.950.000,00)	-3,54	(133.575.048.757,00)	-34,97	(105.787.438.326,00)	-21,23	2.724.784.571,00	0,75	-11,70
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	146.605.835.127,00	54,39	231.314.116.268,00	60,99	407.627.599.301,65	106,70	485.677.141.848,36	97,46	309.667.122.196,57	84,91	80,89
6	Pelampauan penerimaan pembiayaan	1.914.753.252,36	0,71	10.878.690.670,23	2,87	17.861.224.639,84	4,68	7.507.081.339,00	1,51	12.762.380.275,00	3,50	2,65
7	Sisa Pengeluaran Pembiayaan	20.562.054.153,00	7,63	43.500.577.000,00	11,47	31.844.600.000,00	8,34	21.035.573.810,00	4,22	-	0,00	6,33

Dari tabel di atas, terlihat bahwa selama tahun 2011-2015 adanya kecenderungan penurunan SiLPA (Sisa Lebih Hasil Perhitungan Anggaran) pada setiap tahunnya. Berdasarkan ketentuan pasal 62 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, SiLPA bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Di masa mendatang, diharapkan SiLPA semakin menurun. Dengan semakin menurunnya SiLPA, semakin sinergis pula perencanaan dengan penganggaran. Selain itu, semakin besar dana yang dikeluarkan untuk pembangunan maka akan memiliki *multiplier effect* yang besar bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **Pengeluaran Periodik Wajib Mengikat**

Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Gambaran tentang realisasi pengeluaran wajib dan mengikat DIY pada 5 (lima) tahun terakhir, tertuang pada tabel berikut:

**Tabel III-24 Pengeluaran Periodik, Wajib, dan Mengikat Serta Prioritas Utama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2011 – 2015**

No	Uraian	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi
	<b>BELANJA</b>						
<b>a.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>961.364.910.688</b>	<b>1.239.114.375.495</b>	<b>1.440.462.296.967</b>	<b>1.560.157.355.822</b>	<b>1.810.940.126.779</b>	<b>17,38</b>
	Belanja Pegawai	414.966.135.024	455.794.239.590	491.077.276.246	512.498.970.935	540.817.461.612	6,87
	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
	Belanja Hibah	17.578.561.700	369.002.245.000	437.147.781.000	441.914.970.000	562.260.178.868	511,49
	Belanja Bantuan Sosial	114.820.604.720	24.153.330.000	12.509.468.500	9.919.078.000	7.073.500.000	(44,14)
	Belanja Bagi Hsl Kpd Prov/ Kab /dan Pemerintah Desa	268.047.340.000	314.308.555.000	376.702.290.859	472.309.827.352	583.092.613.251	21,49
	Belanja Bantuan Keuangan	145.929.020.362	74.683.445.362	123.025.480.362	121.560.574.535	117.696.373.048	2,88
	Belanja Tak Terduga	23.248.882	1.172.560.543	-	1.953.935.000	-	-
<b>b.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>600.903.823.957</b>	<b>814.711.583.972</b>	<b>1.069.181.078.252</b>	<b>1.420.910.964.599</b>	<b>1.685.485.375.488</b>	<b>29,58</b>
	Belanja Pegawai	83.786.456.016	116.229.477.602	143.754.843.434	111.425.291.725	128.727.296.270	13,86
	Belanja Barang Jasa	374.323.534.963	482.062.123.930	556.030.440.779	867.039.199.273	929.155.893.653	26,81
	Belanja Modal	142.793.832.978	216.419.982.440	369.395.794.039	442.446.473.601	627.602.185.565	45,97
<b>c.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>27.344.846.900</b>	<b>32.275.000.000</b>	<b>94.593.950.276</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>40,99</b>
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-			
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.600.000.000	32.275.000.000	94.593.950.276	50.000.000.000	50.000.000.000	321,82

No	Uraian	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Rata-rata Pertumbuha n Realisasi
	<b>BELANJA</b>						
	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-		
	Pemberian Pinjaman Daerah	23.225.000.000	-	-	-	-	
	Penyelesaian Kegiatan DPA-L	1.519.846.900	-	-	-	-	
	Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu Yang Blm Terselesaikan	-	-	-	-	-	
	<b>Total (a+b+c)</b>	<b>1.589.613.581.545</b>	<b>2.086.100.959.467</b>	<b>2.604.237.325.494</b>	<b>3.031.068.320.421</b>	<b>3.546.425.502.266</b>	

**Tabel III-25 Sisa Lebih Riil Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2015**

No	Uraian	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Saldo Kas Neraca Daerah	290.091.267.796,23	422.742.518.052,56	413.864.696.897,50	519.366.312.042,25	364.682.428.017,80
	Dikurangi :					
2	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	20.562.054.153,00	43.500.577.000,00	31.844.600.000,00	21.035.573.810,00	-
3	Kegiatan Lanjutan					
	<b>Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>269.529.213.643,23</b>	<b>379.241.941.052,56</b>	<b>382.020.096.897,50</b>	<b>498.330.738.232,25</b>	<b>364.682.428.017,80</b>

### **III.3 Kerangka Pendanaan**

Kerangka pendanaan keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja dan pembiayaan daerah. Kerangka pendanaan keuangan daerah dikelola dengan menganut azas-azas: tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama serta belanja tidak mengikat, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 5 tahun kedepan (2018-2023) dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) DIY.

#### **III.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja**

Kuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

Peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah sebuah tuntutan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan dalam periode 2017-2022. Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimaksudkan meliputi pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja dan pengelolaan pembiayaan. Untuk menghasikan pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan efektif terutama terkait dengan proyeksi peningkatan pendapatan daerah, belanja pemerintah dan defisit anggaran yang tidak melampaui ambang batas sesuai dengan peraturan yang ada, penetapan asumsi-asumsi yang akurat sebagai dasar rencana pengelolaan keuangan daerah menjadi prasyarat yang harus dipenuhi.

Ada dua asumsi yang digunakan terkait dengan penyusunan rencana pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (i) perkembangan ekonomi makro daerah, seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan perkapitadan tingkat inflasi; dan (ii) pokok-pokok

kebijakan fiskal daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah, seperti perkiraan PAD, Dana Perimbangan dan Pendapatan lain-lain yang sah.

**Tabel III-26 Asumsi APBD**

Indikator	Asumsi												
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk (dalam ribu)	3457,49	3510	3496,1	3525,3	3553,1	3580,3	3604,9	3629,5	3652,2	3674,8	3697,84*	3721,38*	3744,92*
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (%)	4,14	5,21	5,37	5,47	5,16	4,94	4,32*	4,34*	4,16*	3,99*	3,84*	3,69*	3,56*
Produk Domestik Regional Bruto (miliar Rp) Atas Dasar Harga Konstan 2010	64679	68049,9	71702,5	75627,5	79532,3	83461,57	87070,62*	90850,2*	94629,8*	98409,4*	102189*	105969*	109748*
Inflasi (%)**	7,38	3,88	3,88	6,74	5,42	5,14*	5,04*	4,93*	4,82*	4,72*	4,61*	4,50*	4,40*
Persentase penduduk miskin (%)		16,01	15,50	15,03	14,55	13,16	13,34	12,51*	11,92*	11,32*	10,72*	10,12*	9,53*
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,69	4,39	3,90	3,24	3,33	4,07	2,72	2,46*	2,10*	1,74*	1,37*	1,01*	0,65*

Sumber: BPS

\* Hasil Proyeksi

\*\* Sumber dari Bank Indonesia

### III.3.1.1 Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah terdiri dari pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan dalam perpajakan terkait dengan prinsip keadilan horisontal dan vertikal. Keadilan horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip keadilan vertikal dilandasi pada konsep bahwa masyarakat dengan kondisi yang berbeda, diperlakukan secara berbeda pula. Implikasinya adalah masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi atau memiliki kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Contohnya adalah pemberlakuan *differential service taxation* atau *differential commodity taxation*.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah DIY, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur APBD DIY.

Untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah, pemerintah daerah perlu mengedepankan sumber-sumber pembiayaan yang potensinya besar untuk menjadi fokus program dan kegiatan. Dilihat dari struktur APBD DIY, penerimaan yang bersumber dari Pajak Daerah, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok merupakan sumber pendapatan primadona bagi DIY. Mengingat dampak pajak yang signifikan, pemerintah daerah perlu memberi perhatian khusus terhadap pengelolaan pajak daerah, tentu saja dengan tidak mengabaikan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, beberapa strategi yang perlu dilakukan antara lain:

- (1) Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
- (2) Penguatan kelembagaan dan SDM petugas pemungut pajak dan retribusi
- (3) Penggalan potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, terutama di luar pajak dan retribusi daerah;

- (4) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;
- (5) Mendorong pembentukan sistem pembayaran pendapatan daerah yang langsung ke bank/lembaga keuangan;
- (6) Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antar SKPD yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;
- (7) Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
- (8) Meningkatkan partisipasi dan peranan Pihak Ketiga penyediaan biaya pembangunan daerah;
- (9) Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan pajak dilakukan melalui:
  - a) meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak;
  - b) meningkatkan kemudahan pembayaran pajak melalui: Peningkatan kapasitas *sistem on line* pembayaran pajak, *one-stop service*, *samsat keliling*, peningkatan efektivitas *drive thru*, penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak.
  - c) meningkatkan informasi dan komunikasi perpajakan daerah;
  - d) meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah.
  - e) membentuk sistem pembayaran pajak melalui *electronic payment (e-payment)* dan secara bertahap menghapuskan sistem pembayaran pajak yang *face to face* dengan fiscus.
  - f) Pembentukan PPNS pajak daerah dan juru sita pajak daerah

### III.3.1.2 Proyeksi Variabel-variabel Keuangan Daerah

Salah satu tujuan studi ini adalah untuk mengestimasi potensi PAD sesuai kewenangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. PAD yang dianalisis meliputi pajak provinsi yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok serta total penerimaan retribusi. Untuk mengestimasi potensi PAD, studi ini menghitung proyeksi masing-masing variabel pajak provinsi dan total retribusi. Potensi PAD juga dianalisis dengan menggunakan variabel yang berpengaruh terhadap PAD yaitu, jumlah penduduk, inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah kendaraan bermotor, dan volume penjualan bahan bakar kendaraan bermotor. Metode proyeksi yang digunakan adalah metode *moving average* dan trend linier (*linear trend*). Selain itu, studi ini membandingkan *trend* pajak atau retribusi dengan variabel ekonomi lain seperti jumlah penduduk, inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah kendaraan bermotor, dan volume penjualan bahan bakar kendaraan bermotor.

Metode *moving average* dapat digunakan untuk memperkecil fluktuasi data sehingga tampak *trend* data tersebut (Lind, 2012: 643). Metode ini menggunakan data terbaru sebagai dasar untuk menghitung proyeksi periode berikutnya. Secara matematis formula proyeksi pada tingkat k dengan metode *moving average* adalah sebagai berikut:

$$F_{t+1} = \frac{\sum(\text{nilai data terakhir})}{k} = \frac{\sum Y_t + Y_{t-1} + \dots + Y_{t-k+1}}{k}$$

(1)

dimana:

$F_{t+1}$  = proyeksi untuk periode  $t+1$

$Y_t$   $F_{t+1}$  = nilai data aktual pada periode  $t$

Metode *moving average* biasa digunakan untuk melakukan proyeksi dalam jangka pendek. Perhitungan proyeksi dengan metode ini hanya membutuhkan beberapa data terbaru.

Apabila sebuah variabel bergerak mengikuti pola yang selalu naik atau turun maka metode trend linier dapat digunakan untuk proyeksi variabel tersebut. *Trend* jangka panjang sebuah variabel dapat ditulis sebagai berikut:

$$(2) \quad \hat{Y} = a + bt$$

dimana:

$\hat{Y}$  = nilai proyeksi variabel  $Y$  pada waktu

$t$  = periode/waktu

$a$  = *intercept*

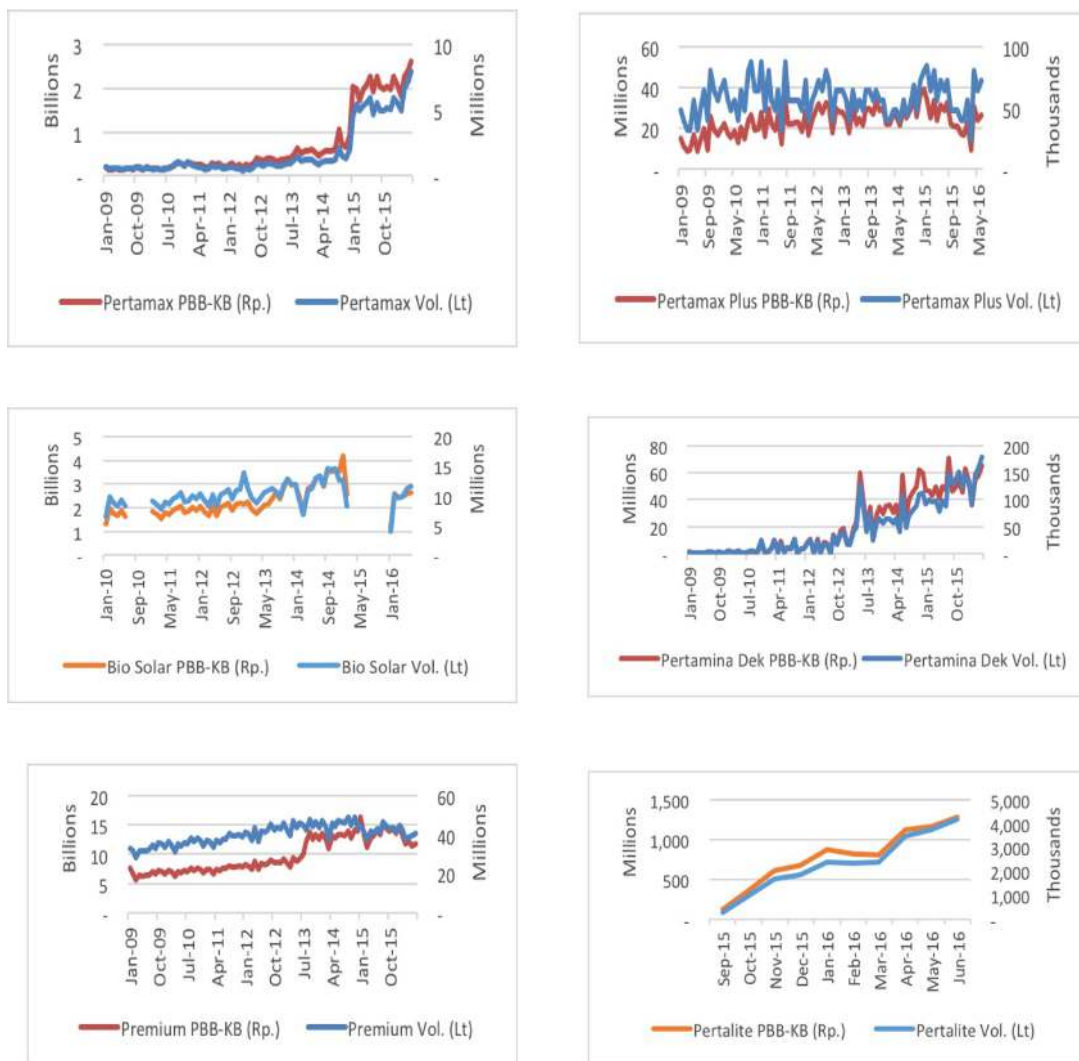
$b$  = *slope*

Proyeksi variabel  $Y$  pada periode berikutnya dihitung berdasarkan garis trend linier pada persamaan (2).

#### 1. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB) terdiri dari pajak bahan bakar berikut: premium, solar, pertamax, pertamax plus, Pertamina dex, pertalite, bio solar, dan dextrite. Data pajak bahan bakar yang tersedia cukup panjang, dari bulan Januari 2009 sampai dengan Juli 2016 atau lebih dari 90 observasi untuk data bulanan. Data pajak dan volume bio solar, dextrite, dan pertalite tidak tersedia secara lengkap dari tahun 2009. Pertalite dan dextrite baru diperkenalkan pada tahun 2015 dan 2016 sehingga data pajak dan volume baru tersedia pada tahun tersebut.

Gambar dibawah ini menunjukkan pergerakan penerimaan pajak untuk masing-masing jenis bahan bakar dan volume penjualannya. Dari gambar tersebut terlihat bahwa untuk semua jenis bahan bakar, pergerakan penerimaan pajak sejalan dengan pergerakan volume penjualan. Kenaikan volume diikuti oleh kenaikan pajak dan sebaliknya. Semua pajak menunjukkan pola atau trend yang meningkat meskipun pergerakan aktual setiap bulan berfluktuasi.



**Gambar III.3 PBB-KB (Rp) dan Volume Penjualan (liter) untuk Enam Jenis Bahan Bakar**

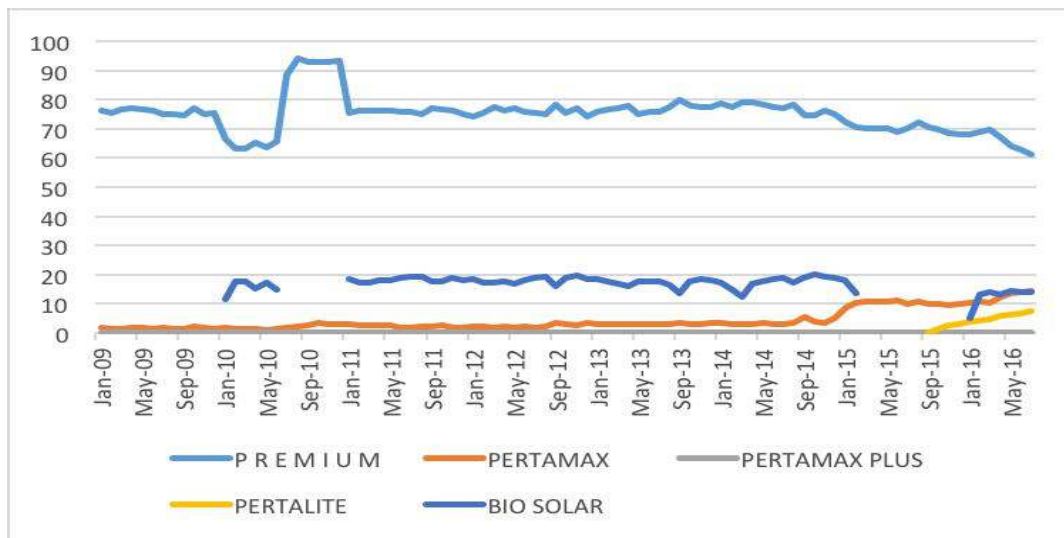
**Tabel III-27 Pertumbuhan PBB-KB 2013-2016**

Bahan Bakar	Pertumbuhan Pajak Juni 2013-Juni 2016 (%)	Pertumbuhan Per Bulan Rata-rata (%)
Premium	28	0.8
Pertamax	589	16
Pertamax Plus	6	0.2
Pertamina Dex	80	2.2
Bio solar	22	0.6
Peralite*	1087	120

Tabel di atas Menampilkan pertumbuhan pajak yang dihitung dengan membandingkan pajak pada bulan Juni 2013 dengan pajak pada Juni 2016. Selama tiga tahun tersebut pajak untuk pertamax mengalami pertumbuhan tertinggi (589 persen) atau tumbuh sekitar 16 persen perbulan. Pajak pertamax plus mengalami pertumbuhan terendah. Pajak

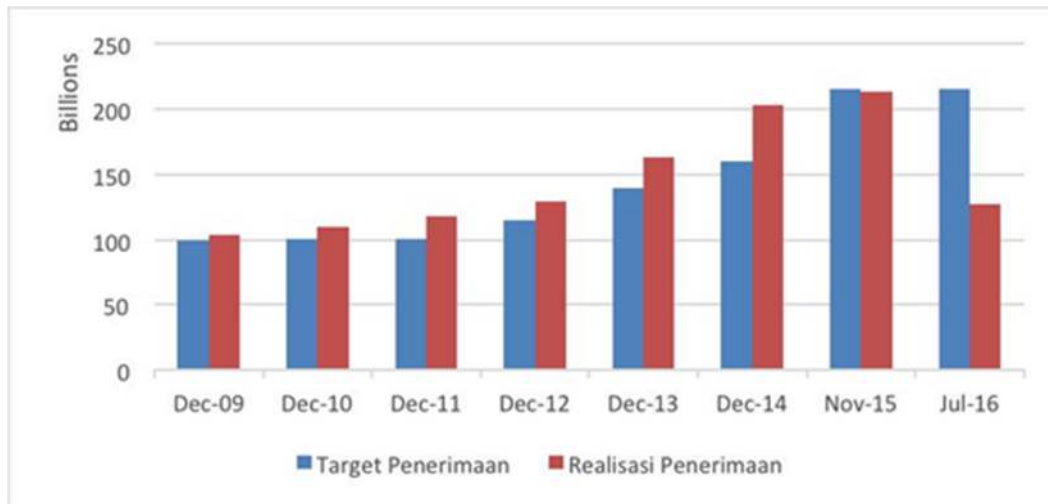
bakar pertalite yang baru dipungut bulan September 2015 juga mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Perhitungan pertumbuhan ini tidak memperhitungkan perubahan harga/inflasi, apabila perubahan harga ikut diperhitungkan angka pertumbuhan menjadi lebih kecil.

Apabila dilihat dari kontribusi setiap jenis pajak bahan bakar, pajak bahan bakar premium merupakan komponen terbesar sejak tahun 2009 sampai saat ini. Pada bulan Juni 2016, 61,4 persen PBB-KB disumbang oleh pajak dari jenis premium. Namun, meskipun pajak premium masih merupakan komponen terbesar sumbangannya semakin menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Gambar diatas menunjukkan bahwa proporsi pertamax dan pertalite semakin meningkat mulai tahun 2015. Gambar dibawah ini menunjukkan bahwa proporsi pertamax dan pertalite semakin meningkat mulai tahun 2015.



**Gambar III.4 Perkembangan Proporsi PBB-KB (%)**

Data dari DPPKA DIY menunjukkan data perbandingan antara target dan realisasi penerimaan PBB-KB. Gambar di bawah ini mengindikasikan bahwa target penerimaan selalu meningkat sejak 2009. Realisasi penerimaan juga selalu meningkat sampai November 2015, namun turun relatif drastis setelah bulan tersebut.



**Gambar III.5 Target dan Realisasi Penerimaan PBB-KB**

Tabel berikut menampilkan proyeksi total pajak kendaraan bermotor (PBB-KB) untuk tahun 2012-2022. Jumlah PBB-KB memiliki trend meningkat dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 dan berdasarkan kecenderungan tersebut PBB-KB diproyeksikan meningkat menjadi lebih dari 330 miliar rupiah pada tahun 2022.

**Tabel III-28 Proyeksi PBB-KB 2012-2022**

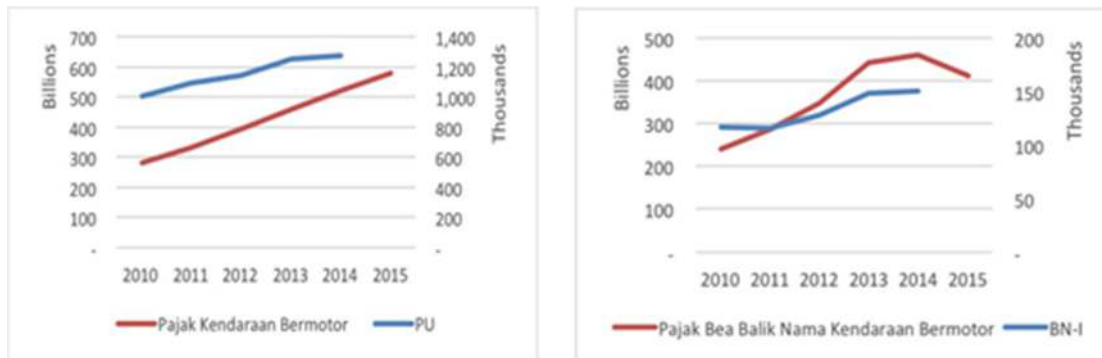
Tahun	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) (Rp)
2012	129,926,506,423
2013	162,983,026,583
2014	203,174,965,469
2015	234,213,042,995
2016	215,000,000,000
2017*	237,424,827,424
2018	240,000,000,000
2019	263,959,188,180
2020	275,436,835,858
2021	301,561,201,637
2022	330,855,343,014

## 2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

Proyeksi untuk PKB dan BBN-KB dilakukan menggunakan metode *trend* linier. Metode ini tepat digunakan karena kedua jenis pajak menunjukkan pola yang selalu naik dari tahun ke tahun. Analisis proyeksi pajak dan retribusi pada bagian ini dan selanjutnya menggunakan metode *trend* linier.

Gambar di bawah ini menggabungkan perkembangan penerimaan PKB dan pendaftaran ulang (PU) serta BBN-KB dan Balik Nama I (BN-I). Penerimaan PKB meningkat

sejalan dengan jumlah pendaftaran ulang kendaraan. Hal yang sama juga berlaku untuk BBN-KB dengan Bea Balik Nama I.



**Gambar III.6** PKB, BBN-KB, BN-I, dan PU

Proyeksi BBN-KB ditampilkan dalam tabel berikut. BBN-KB berfluktuasi selama 2012 - 2017. BBN-KB mencapai nilai tertinggi pada tahun 2014 yang mencapai lebih dari 460 miliar rupiah dan angka tersebut turun di tahun 2015 dan 2016. Oleh karena itu hasil proyeksi menunjukkan peningkatan moderat dan pada tahun 2022 BBN-KB akan mencapai nilai 546 miliar rupiah.

**Tabel III-29** Proyeksi BBN-KB 2012-2022

Tahun	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Rp)
2012	348,377,629,450
2013	441,929,215,350
2014	461,683,119,850
2015	411,908,125,820
2016	368,991,842,000
2017*	446,250,000,000
2018	390,000,000,000
2019	429,931,980,301
2020	478,565,831,497
2021	510,058,109,723
2022	546,911,902,503

Pajak kendaraan bermotor (PKB) tumbuh lebih cepat dan stabil selama tahun 2012 - 2017 dibandingkan dengan pertumbuhan BBN-KB, sehingga hasil proyeksi untuk tahun 2022 juga lebih tinggi. Pada tahun 2022 PKB diperkirakan akan mencapai nilai 1,173 miliar rupiah.

**Tabel III-30** Proyeksi PKB 2012-2022

Tahun	Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)
2012	393,213,761,700
2013	458,210,055,800
2014	521,733,334,200
2015	580,297,749,000
2016	604,385,073,800

Tahun	Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)
2017*	655,859,786,065
2018	695,019,920,000
2019	790,856,672,721
2020	901,755,821,424
2021	1,031,562,590,806
2022	1,173,784,758,367

### 3. Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok

Pajak air permukaan tumbuh relatif cepat selama tahun 2012-2017. Jumlah penerimaan pajak air permukaan meningkat lebih dari dua kali lipat dari sekitar 112 juta rupiah menjadi 278 juta rupiah pada tahun 2017. Hal ini juga sejalan dengan pola kenaikan jumlah penduduk dan PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil proyeksi pajak air permukaan ditunjukkan dalam tabel berikut ini. Pada tahun 2022 pajak air permukaan diperkirakan akan mencapai sekitar 518 juta rupiah.

**Tabel III-31 Proyeksi Pajak Air Permukaan 2012-2022**

Tahun	Pajak Air Permukaan (Rp)
2012	112,707,820
2013	191,820,190
2014	218,396,300
2015	277,381,200
2016	198,000,000
2017*	354,000,000
2018	354,000,000
2019	389,400,000
2020	428,340,000
2021	471,174,000
2022	518,291,400

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Dengan demikian, basis pengenaan pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah atas rokok. Tarif pajak rokok ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 sebesar 10 persen dari cukai rokok. Pajak rokok baru diberlakukan pada tahun 2014. Data 2014-2017 juga menunjukkan bahwa penerimaan pajak rokok cenderung meningkat, sehingga penerimaan dari pajak rokok diperkirakan akan naik pada tahun/periode berikutnya dan akan mencapai lebih dari 232 miliar rupiah pada tahun 2022.

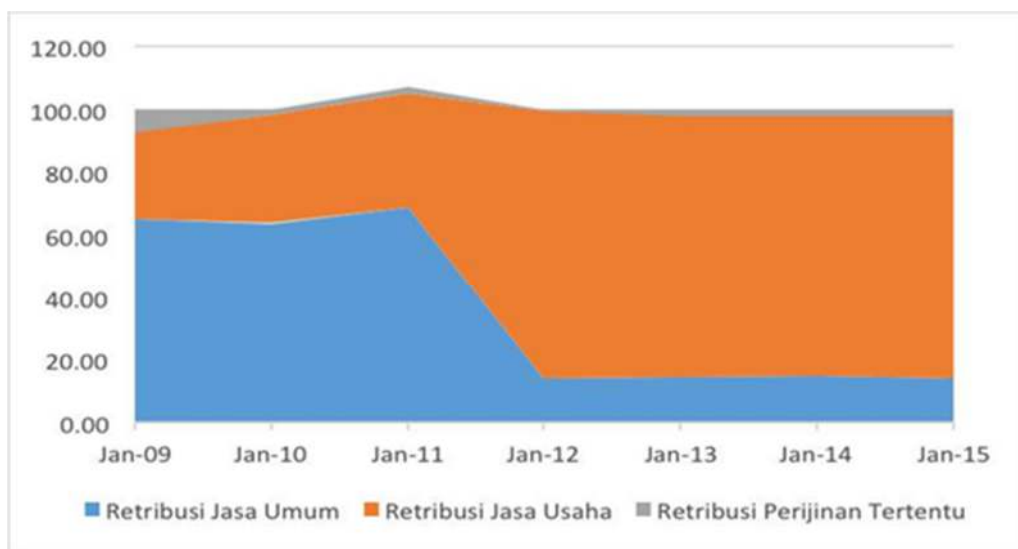
**Tabel III-32 Proyeksi Pajak Rokok 2014-2022**

Tahun	Pajak Rokok (Rp)
2014	104,854,604,989
2015	171,074,910,355
2016	188,581,267,000
2017*	207,191,233,352

Tahun	Pajak Rokok (Rp)
2018	200,596,757,535
2019	208,112,125,000
2020	215,916,329,688
2021	224,013,192,051
2022	232,413,686,753

#### 4. Retribusi

Total retribusi dalam APBD Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan peningkatan selama tahun 2009-2015, sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan PDRB. Total retribusi digolongkan menjadi tiga sub kategori yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu. Selain jenis retribusi yang beragam, jenis penerimaan retribusi yang terkumpul setiap tahun juga dapat berasal dari jenis retribusi yang berbeda. Sebagai contoh, retribusi tempat pelelangan, retribusi penggunaan jasa mobil box, retribusi sewa gedung/ruang/aula hanya ada pada tahun 2011 dan 2010. Variasi jenis retribusi juga disebabkan karena beberapa jenis retribusi memang baru diperkenalkan atau diberhentikan pada tahun tertentu. Retribusi perpanjangan IMTA (Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing) diperkenalkan pada tahun 2013 dan retribusi dispensasi kelebihan muatan, retribusi ijin pos dan telekomunikasi, rekomendasi ketinggian bangunan/tower, dan retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan diberhentikan pada tahun 2009.



**Gambar III.7 Proporsi Jenis Retribusi (%)**

Meskipun jenis retribusi yang dipungut relatif beragam dari tahun-ketahun, secara umum total retribusi memiliki kecenderungan yang meningkat dari tahun 2012 sampai 2017. Diperkirakan penerimaan retribusi akan mencapai hampir 42 miliar rupiah pada tahun 2022.

**Tabel III-33      Proyeksi Total Retribusi 2010-2022 (dalam jutaan rupiah)**

Tahun	Total Retribusi(Rp)
2012	37,709
2013	36,228
2014	41,437
2015	36,670
2016	40,376
2017*	39,887
2018	40,148
2019	40,790
2020	41,431
2021	42,072
2022	42,714

Bagian berikut ini menjelaskan proyeksi retribusi berdasarkan jenis retribusi. Retribusi Daerah Istimewa Yogyakarta dibagi menjadi tiga sub kategori dan masing-masing sub kategori terdiri dari beberapa jenis retribusi. Tabel berikut menampilkan jenis-jenis retribusi tersebut.

**Tabel III-34      Jenis-Jenis Retribusi**

No	Uraian
<b>A.</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan
2	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
3	Retribusi Pelayanan Pendidikan
4	Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan
5	Retribusi Pelayanan Pertanian dan Peternakan
6	Retribusi Pelayanan Bidang Kehutanan dan Perkebunan
7	Retribusi Jasa Sertifikasi
8	Retribusi Pelayanan Sosial
9	Retribusi Pelayanan Pemukiman dan Prasarana Wilayah
10	Retribusi Pelayanan Umum (Bus Trans Jogja)
11	Retribusi Jasa
12	Retribusi Pelayanan Perikanan****
13	Hasil Penjualan Bibit/Benih****
<b>B.</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
3	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
4	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
5	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
6	Retribusi Bibit/Benih
7	Retribusi Tempat Pelelangan*
8	Retribusi Penggunaan Jasa Mobil Box*
9	Retribusi Sewa Rumah Dinas
10	Sewa Gedung/Ruang/Aula*
11	Retribusi Sewa Lahan
12	Retribusi Pasar Grosir dan/Atau Pertokoan****

No	Uraian
<b>C.</b>	<b>Retribusi Perijinan Tertentu</b>
1	Retribusi Ijin Trayek
2	Retribusi Ijin Pelayanan Kesehatan
3	Retribusi Ijin Pelayanan dibidang Sosial
4	Retribusi Ijin Pelayanan Perpustakaan
5	Retribusi Ijin Penggantian STNK hilang
6	Retribusi Ijin Cek Fisik Residu Kendaraan Dinas
7	Retribusi Rekomendasi Bengkel Karoseri
8	Retribusi Ijin Sertifikat Registrasi Uji Tipe
9	Retribusi Izin Jasa Titipan
10	Retribusi Izin Insidentil
11	Retribusi Kartu Pengawasan
12	Retribusi Izin Operasi
13	Retribusi Izin Perikanan
14	Retribusi Perpanjangan IMTA (Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing)***
15	Retribusi Dispensasi Kelebihan Muatan***
16	Retribusi Ijin Pos dan Telekomunikasi****
17	Rekomendasi Ketinggian Bangunan/Tower****

Sumber: CALK DPPKA DIY

\*hanya ada di tahun 2010 dan 2011\*\*\*dimulai tahun 2013 dan 2012

\*\*\*\*hanya sampai tahun 2009

Data retribusi yang tersedia menunjukkan bahwa hanya beberapa jenis retribusi tersedia secara lengkap selama tahun 2009-2015. Untuk retribusi jasa umum, retribusi yang memiliki data lengkap adalah 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan, 2) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, 3) Retribusi Pelayanan Pendidikan. Untuk retribusi jasa usaha, retribusi yang datanya tersedia lengkap adalah 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, 2) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, 3) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, 4) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, 5) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Sedangkan untuk retribusi perijinan tertentu hanya satu jenis retribusi yaitu Retribusi Ijin Trayek yang datanya tersedia secara lengkap. Beberapa retribusi dimulai setelah tahun 2012 dan 2013 seperti Retribusi Perpanjangan IMTA (Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing) dan Retribusi Dispensasi Kelebihan Muatan.

### Retribusi Jasa Umum

Total retribusi jasa umum berfluktuasi dari 2012-2022. Salah satu sebab penurunan retribusi adalah banyak jenis retribusi, 10 dari 13 jenis retribusi yang termasuk di dalam retribusi jasa umum, yang tidak dipungut lagi setelah tahun 2012 atau tidak tersedia datanya setelah 2012. Tabel berikut menunjukkan hasil proyeksi retribusi jasa umum. Pada tahun 2022, total retribusi jasa umum diperkirakan akan mencapai 14,5 miliar rupiah.

**Tabel III-35 Proyeksi Retribusi Jasa Umum 2012-2022**

Tahun	Retribusi Jasa Umum
2012	4,776,102,947
2013	5,401,513,410

Tahun	Retribusi Jasa Umum
2014	6,554,368,147
2015	6,336,414,859
2016	15,111,159,660
2017*	14,596,927,391
2018	8,345,001,044
2019	9,523,824,243
2020	13,414,715,589
2021	14,163,961,831
2022	14,585,626,434

#### Retribusi Jasa Usaha

Total retribusi jasa usaha menunjukkan trend yang meningkat dari 2012 - 2015. Dari tiga kelompok retribusi, hanya retribusi jasa usaha yang memiliki trend meningkat serta memiliki proporsi paling besar diantara kelompok retribusi yang lain. Tabel berikut menunjukkan proyeksi retribusi jasa usaha. Pada tahun 2022, diperkirakan retribusi jasa usaha akan mencapai 31 miliar rupiah.

**Tabel III-36 Proyeksi Retribusi Jasa Usaha 2012-2022**

Tahun	Retribusi Jasa Usaha (Rp)
2012	29,179,152,672
2013	31,917,226,395
2014	37,039,056,133
2015	38,487,692,604
2016	20,844,108,637
2017*	26,167,568,934
2018	34,576,559,243
2019	35,285,134,055
2020	34,743,423,491
2021	32,219,271,459
2022	31,892,103,766

#### Retribusi Perijinan Tertentu

Total retribusi jasa umum menunjukkan trend yang menurun sampai tahun 2012 kemudian meningkat sampai tahun 2017. Hasil proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2022, retribusi perijinan tertentu akan mencapai sekitar 1,2 miliar rupiah.

**Tabel III-37 Proyeksi Retribusi Perijinan Tertentu 2012 - 2022**

Tahun	Retribusi Perijinan Tertentu (Rp)
2012	159,902,000
2013	724,274,200
2014	1,001,670,500
2015	987,845,800
2016	1,043,460,000

Tahun	Retribusi Perijinan Tertentu (Rp)
2017*	667,797,400
2018	755,374,428
2019	1,115,537,705
2020	1,198,132,932
2021	1,317,656,087
2022	1,275,290,163

### III.3.1.3 Kebijakan Belanja Daerah pada Tahun 2018-2020

Pembangunan kedepan membutuhkan suatu perencanaan sistimatis terutama terhadap kerangka pendanaan dan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun kedepan. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah, belanja, pengeluaran pembiayaan yang wajib/mengikat dan prioritas utama serta belanja tidak mengikat, dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah untuk membiayai program/kegiatan selama lima tahun kedepan.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran kedalam program dan kegiatan.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulant terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek *multiplier* yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan 5 tahun ke depan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrument pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil). Kebijakan belanja daerah tahun 2018-2023 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran program prioritas pembangunan daerah, dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif yaitu:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

2. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

3. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

4. Optimalisasi belanja langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

#### **III.3.1.4 Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang diperoleh. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

##### **Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sementara itu, pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah

angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh.

Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### **Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah.

#### **Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran Berjalan (SiLPA).

#### **Kebijakan Bantuan Keuangan Partai Politik**

Sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018, pencairan bantuan keuangan partai politik di DIY masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, yang diatur pula dalam Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 98/KEP/2015 tentang Penetapan Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta Hasil Pemilu 2014. Dalam Surat Keputusan Gubernur DIY tersebut, diatur bahwa besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik adalah sebesar Rp. 681,00 (*enam ratus delapan puluh satu rupiah*) per suara sah.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, terdapat ketentuan-ketentuan terkait formulasi besaran bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat provinsi, yaitu: Pasal 5 ayat (3) : “*Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik di tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) sebesar Rp.1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah.*”

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah DIY akan melakukan perubahan besaran bantuan bagi partai politik di tingkat provinsi, sesuai dengan pasal 5 ayat (3) dalam Peraturan Pemerintah dimaksud, sebagaimana berikut : Tahun 2018 Rp.1.360.127.931,00. Selanjutnya di tahun 2019 sampai dengan 2022 dengan asumsi jumlah perolehan suara yang sama sebanyak 1.997.251 suara, maka bantuan keuangan yang dianggarkan sebesar Rp.2.396.701.200,00.

#### **III.3.1.5 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018-2022**

Berdasarkan Strategi peningkatan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah diatas proyeksi anggaran pendapatan belanja daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel III-38      Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018-2022 Daerah Istimewa Yogyakarta**

U R A I A N	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
<b>PENDAPATAN</b>	<b>5.048.111.436.627,63</b>	<b>5.409.182.670.918,69</b>	<b>5.799.905.338.237,76</b>	<b>6.377.198.000.684,49</b>	<b>6.956.523.584.860,34</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>1.745.595.798.780,63</b>	<b>1.920.155.378.658,69</b>	<b>2.112.170.916.524,56</b>	<b>2.323.388.008.177,02</b>	<b>2.555.726.808.994,72</b>
Pendapatan Pajak Daerah	1.525.963.920.000,00	1.693.249.366.202,43	1.872.103.158.467,48	2.067.666.268.217,09	2.284.483.982.036,80
Pendapatan Retribusi Daerah	37.480.490.290,00	39.290.207.422,50	39.904.262.771,63	48.907.737.660,21	51.353.124.543,22
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan	81.817.486.244,44	90.923.381.008,81	99.701.450.059,25	109.402.116.562,22	118.672.222.390,33
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	100.333.902.246,19	96.692.424.024,95	100.462.045.226,20	97.411.885.737,51	101.217.480.024,38
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>2.287.023.595.000,00</b>	<b>2.304.371.942.260,00</b>	<b>2.348.394.499.313,20</b>	<b>2.393.297.507.507,46</b>	<b>2.439.098.575.865,61</b>
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	129.055.112.000,00	103.244.089.600,00	103.244.089.600,00	103.244.089.600,00	103.244.089.600,00

U R A I A N	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Dana Alokasi Umum	1.312.215.989.000,00	1.338.460.308.780,00	1.365.229.514.955,60	1.392.534.105.254,71	1.420.384.787.359,81
Dana Alokasi Khusus	845.752.494.000,00	862.667.543.880,00	879.920.894.757,60	897.519.312.652,75	915.469.698.905,81
- DAK Fisik	-	-	-	-	-
- DAK Non Fisik	845.752.494.000	862.667.543.880	879.920.894.758	897.519.312.653	915.469.698.906
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.015.492.042.847,00</b>	<b>1.184.655.350.000,00</b>	<b>1.339.339.922.400,00</b>	<b>1.660.512.485.000,00</b>	<b>1.961.698.200.000,00</b>
Pendapatan Hibah	14.827.192.847,00	8.515.100.000,00	8.683.580.000,00	8.860.484.000,00	9.046.233.200,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1.000.000.000.000,00	1.175.475.400.000,00	1.329.991.492.400,00	1.650.987.151.000,00	1.951.987.116.800,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya	664.850.000,00	664.850.000,00	664.850.000,00	664.850.000,00	664.850.000,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>5.048.111.436.627,63</b>	<b>5.409.182.670.918,69</b>	<b>5.799.905.338.237,76</b>	<b>6.377.198.000.684,49</b>	<b>6.956.523.584.860,34</b>

U R A I A N	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
<b>BELANJA</b>	<b>5.174.314.222.543,32</b>	<b>5.495.658.643.090,79</b>	<b>5.771.015.210.394,48</b>	<b>6.219.413.927.291,35</b>	<b>6.648.961.174.597,49</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2.075.892.341.092,00</b>	<b>2.151.149.183.712,50</b>	<b>2.211.855.648.535,50</b>	<b>2.248.681.298.356,93</b>	<b>2.339.495.052.363,90</b>
Belanja Pegawai	1.335.096.365.092,00	1.393.767.194.747,00	1.456.479.399.481,00	1.523.581.458.546,00	1.595.380.661.746,00
Belanja Bunga	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	25.700.000.000,00	25.700.000.000,00	25.700.000.000,00	25.700.000.000,00	25.700.000.000,00
Belanja Bansos	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kota	634.095.976.000,00	696.881.215.133,00	758.257.881.759,00	830.623.872.740,00	910.756.464.798,00
Bantuan Keuangan	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	49.000.000.000,00	-	-
Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>3.095.164.681.351,32</b>	<b>3.344.509.459.378,29</b>	<b>3.559.159.561.858,98</b>	<b>3.970.732.628.934,42</b>	<b>4.309.466.122.233,59</b>
Belanja Pegawai					
Belanja Barang dan Jasa	-				
Belanja Modal					
Dana Keistimewaan	1.000.000.000.000,00	1.175.475.400.000,00	1.329.991.492.400,00	1.650.987.151.000,00	1.951.987.116.800,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>5.174.314.222.543,32</b>	<b>5.495.658.643.090,79</b>	<b>5.771.015.210.394,48</b>	<b>6.219.413.927.291,35</b>	<b>6.648.961.174.597,49</b>

U R A I A N	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
<b>SURPLUS/( DEFISIT)</b>	<b>(126.202.785.915,69)</b>	<b>(134.040.454.709,53)</b>	<b>(140.756.468.546,21)</b>	<b>(151.693.022.616,86)</b>	<b>(162.169.784.746,28)</b>
	<b>(2,50)</b>	<b>(2,50)</b>	<b>(2,50)</b>	<b>(2,50)</b>	<b>(2,50)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>					
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>321.452.785.915,69</b>	<b>349.669.566.772,97</b>	<b>375.037.633.455,94</b>	<b>404.099.950.017,11</b>	<b>448.513.089.621,51</b>
SILPA	321.452.785.915,69	349.669.566.772,97	375.037.633.455,94	404.099.950.017,11	448.513.089.621,51
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian	-	-	-	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Investasi Dana	-	-	-	4.000.000.000,00	-
Penerimaan dari Penyusutan	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>321.452.785.915,69</b>	<b>348.480.454.709,53</b>	<b>370.796.468.546,21</b>	<b>400.363.022.616,86</b>	<b>436.769.784.746,28</b>
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>195.250.000.000,00</b>	<b>214.440.000.000,00</b>	<b>230.040.000.000,00</b>	<b>248.670.000.000,00</b>	<b>274.600.000.000,00</b>
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-

U R A I A N	T A H U N				
	2018	2019	2020	2021	2022
Penyertaan Modal	191.250.000.000,00	210.440.000.000,00	226.040.000.000,00	244.670.000.000,00	270.600.000.000,00
Pembayaran Hutang	-	-	-	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
DPAL		-	-	-	-
Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu		-	-	-	-
<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>195.250.000.000,00</b>	<b>214.440.000.000,00</b>	<b>230.040.000.000,00</b>	<b>248.670.000.000,00</b>	<b>274.600.000.000,00</b>
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>126.202.785.915,69</b>	<b>134.040.454.709,53</b>	<b>140.756.468.546,21</b>	<b>151.693.022.616,86</b>	<b>162.169.784.746,28</b>
<b>SILPA TAHUN BERKENAAN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### III.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja dan pembiayaan daerah. Kerangka pendanaan keuangan daerah dikelola dengan menganut azas-azas: tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama serta belanja tidak mengikat, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 5 tahun kedepan (2018-2023) dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) DIY.

**Tabel III-39 Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupiah)**

Tahun	Pembiayaan Netto	Penerimaan	SiLPA TA Sebelumnya	Pencairan Dana Cadangan	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	Pengeluaran
2012	188,841	221,416	191,725	-	1,116	-	28,575	32,275
2013	168,064	213,739	190,048	-	1,116	-	22,575	94,593
2014	229,872	280,822	280,822	-	-	-	-	50,000
2015	271,989	281,989	281,989	-	-	-	-	50,000
2016	268,924	405,924	405,924	-	-	-	-	230,000
2017	179,451	194,371	192,109	-	-	-	-	14,920*
2018	126,202	321,452	321,452	-	-	-	-	195,250
2019	135,229	349,669	349,669	-	-	-	-	214,440
2020	144,997	375,037	375,037	-	-	-	-	230,040
2021	159,429	408,099	404,099	-	-	-	-	248,670
2022	173,913	448,513	448,513	-	-	-	-	274,600

Sumber: data diolah

**Tabel III-40 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta**

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pendapatan	5,048,111,436,627.63	5,409,182,670,918.69	5,799,905,338,237.76	6,377,198,000,684.49	6,956,523,584,860.34
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai perda)	-	-	-	-	-
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	321.452.785.915,69	348.669.566.772,97	375.037.633.455,94	404.099.950.017,11	448.513.089.621,51
	<b>Total Penerimaan</b>	<b>5.369.564.222.543,32</b>	<b>5.758.852.237.691,66</b>	<b>6.174.942.971.693,70</b>	<b>6.781.297.950.701,60</b>	<b>7.405.036.674.481,84</b>
	Dikurangi					
4.	Belanja Tidak Langsung	2.075.892.341.092,00	2.197.348.409.879,88	2.300.437.281.239,61	2.390.905.331.286,38	2.542.837.126.543,82
5.	Pengeluaran Pembiayaan	195.250.000.000,00	214.440.000.000,00	230.040.000.000,00	248.670.000.000,00	274.600.000.000,00
	<b>Kapasitas riil kemampuan keuangan</b>	<b>3.098.421.881.451,32</b>	<b>3.347.063.827.811,79</b>	<b>3.644.465.690.454,09</b>	<b>4.141.722.619.415,22</b>	<b>4.587.599.547.938,02</b>

**Tabel III-41 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Kapasitas riil Kemampuan Keuangan	3.098.421.881.451,32	3.347.063.827.811,79	3.644.465.690.454,09	4.141.722.619.415,22	4.587.599.547.938,02
Prioritas I	2.433.547.220.798,93	2.976.127.453.100,69	3.134.393.627.869,56	3.262.372.411.623,36	3.604.164.514.563,97
Prioritas II	664.874.660.652,39	370.936.374.711,10	510.072.062.584,53	879.350.207.791,86	983.435.033.374,05

## BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

### IV.1 Telaah RTRW

Penyusunan RPJMD DIY 2017-2022 berpedoman pada Perda DIY Nomor 2 Tahun tentang RTRW DIY 2009-2029 dan dokumen RaperdaReview RTRW DIY. Telaah terhadap kedua dokumen RTRW ini dibagi menjadi telaah terhadap struktur ruang, pola ruang, dan indikasi program pemanfaatan ruang.

#### IV.1.1 Telaah Terhadap Rencana Struktur Ruang

##### IV.1.1.1 Peta Rencana Struktur Ruang

Kebijakan pengembangan sistem perkotaan di arahkan untuk memantapkan struktur atau hirarki sistem perkotaan, mendesentralisasikan sebagian fungsi Kota Yogyakarta ke Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan di Daerah dan mengintegrasikan fungsi setiap kota dalam sistem perkotaan di Daerah. Rencana Pengembangan Sistem Prasarana wilayah diwujudkan dalam kebijakan pengembangan, strategi pengembangan dan arahan pengembangan. Sistem prasarana wilayah terdiri atas jaringan jalan, jaringan kereta api, jaringan prasarana transportasi laut, jaringan prasarana transportasi udara, jaringan telematika, prasarana sumber daya air, jaringan ennergi dan prasarana lingkungan.



Sumber : Perda Nomor 2 Tahun 2010

**Gambar IV.1** Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi DI Yogyakarta

#### **IV.1.1.2 Rencana Sistem Perkotaan**

Pengembangan sistem perkotaan dibagi dalam hirarki I, hirarki II, hirarki III, dan hirarki IV berdasarkan kesesuaian fungsi pengembangan sistem perkotaan dibagi dalam kota besar, kota sedang, kota kecil. Sistem Pelayanan Wilayah terdiri atas: Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Wilayah Promosi, dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

#### **IV.1.1.3 Rencana Jaringan Transportasi**

Pengembangan jaringan jalan di DIY direncanakan terdiri dari jalan bebas hambatan, jalan arteri primer dan jalan kolektor primer diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas ke seluruh wilayah daerah dan menembus keterisolasian. Pengembangan jaringan jalan kereta api dilakukan untuk meningkatkan peran kereta api sebagai angkutan regional/wilayah melalui pengembangan poros utama timur–barat, dan utara-selatan serta jaringan kereta api perkotaan. Pengembangan jaringan prasarana transportasi laut dilakukan melalui optimalisasi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng di Kabupaten Gunungkidul, mengembangkan Pelabuhan Perikanan (PP) Glagah di Kabupaten Kulon Progo serta PP Pandansimo di Kabupaten Bantul sebagai pelabuhan perikanan dan pendukung wisata pantai sebagai upaya pembukaan akses selatan selatan sebagai pelabuhan perikanan. Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Transportasi Udara melalui pengembangan Bandara Adisutjipto ditujukan untuk mendukung kebijakan nasional mengenai peran bandara Adisutjipto sebagai Pusat Penyebaran Sekunder dan pengembangan landasan TNI AU Gading sebagai landasan pendukung (*auxilliary field*).

#### **IV.1.1.4 Rencana Jaringan Energi/ Kelistrikan**

Pengembangan Jaringan Energi dilaksanakan melalui: Pengembangan jaringan listrik hingga daerah terpencil; Pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan Pengembangan sumber energi angin, energi air, dan energi tenaga surya.

#### **IV.1.1.5 Rencana Jaringan Telekomunikasi**

Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Telematika dilakukan melalui: pengembangan jaringan telekomunikasi sebagai bagian sistem jaringan nasional di setiap permukiman perdesaan dan merencanakan pusat pelayanan dan teknologi informasi Daerah di kota Yogyakarta dan mengembangkan jaringan telekomunikasi pada setiap fasilitas pendidikan, fasilitas kebudayaan, dan di setiap obyek wisata.

#### **IV.1.1.6 Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

Pengembangan Prasarana Sumber Daya Air dilakukan melalui pengembangan waduk, embung, tendon air dan kolam, sumber air sungai bawah tanah, daerah Irigasi, sumur resapan, dan air tanah.

#### **IV.1.1.7 Rencana Pengembangan Prasarana Lingkungan**

Rencana pengembangan prasarana lingkungan melalui perwujudan sistem prasarana lingkungan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan mulai dari hulu hingga hilir, menyediakan prasarana lingkungan meliputi sistem penyediaan air minum, sistem penanganan air limbah dan sampah, drainase, serta jalan lingkungan.

#### **IV.1.2 Telaah Terhadap Rencana Pola Ruang**

##### **IV.1.2.1 Rencana Kawasan Lindung**

Penetapan kawasan lindung meliputi: kawasan lindung bawahan, kawasan lindung setempat, kawasan suaka alam, kawasan suaka margasatwa, dan kawasan rawan bencana alam.

Kebijakan penetapan kawasan lindung bawahan adalah memantapkan fungsi lindung kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air. Kebijakan penetapan kawasan lindung setempat memantapkan fungsi lindung Kawasan Sempadan Pantai, Kawasan Sempadan Sungai, Kawasan Sempadan Waduk, Embung, Telaga, Laguna, dan Kawasan Sempadan Mata Air. Kebijakan penetapan kawasan suaka alam memantapkan fungsi lindung kawasan cagar alam, kawasan taman hutan raya, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

##### **IV.1.2.2 Rencana Kawasan Budidaya yang Memiliki Nilai Strategis**

Rencana kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis dibagi menjadi 5 kategori yaitu :

- 1) kawasan strategis pertumbuhaneкономи meliputi :
  - a. kawasan strategis nasional meliputi kawasan perkotaan Yogyakarta.
  - b. kawasan strategis provinsi meliputi:
    1. kawasan perkotaan Yogyakarta;
    2. kawasankoridor yang menghubungkan Yogyakarta, Piyungan, Wonosari, Rongkop, dan Sadeng;
    3. kawasan koridor yang menghubungkan Temon, Wates, Yogyakarta, dan Prambanan;
    4. IKK Sewon, Kasihan, Sedayu, Srandakan, Imogiri, dan Piyungan di Kabupaten Bantul;
    5. IKK Godean, dan Pakem di Kabupaten Sleman;
    6. Kawasan Peruntukan Industri Sentolo di Kabupaten Kulon Progo;dan
    7. Kawasan Koridor yang menghubungkan Tempel, dan Parangtritis.
- 2) kawasan strategis pelestarian sosial budaya terdiri atas :
  - a. kawasan strategis nasional kawasan taman wisata Candi Prambanan dan Candi Ratu Boko di Kabupaten Sleman;
  - b. kawasan strategis provinsi meliputi: Kraton Yogyakarta, Kota lama Kotagede, makam Imogiri, Puro Pakualaman, dan kawasan Malioboro, dan candi-candi yang terdapat di Kabupaten Sleman dan Bantul

- 3) kawasan strategis pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi terdiri atas :
  - a. kawasan pantai selatan untuk pembangkit listrik tenaga anngin dan gelombang laut di Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul;dan
  - b. kawasan teknologi tinggi di wilayah Gunung Merapi Kabupaten Sleman.
- 4) kawasan strategis lindung dan budidaya terdiri atas :
  - a. Kawasan strategis nasional meliputi Taman Nasional Gunung Merapi seluas 1.743,250 ha di Kec. Turi, Cangkringan dan Pakem Kabupaten Sleman.
  - b. Kawasan strategis provinsi meliputi:
    - (1) kawasan ekogeowisata karst di Kabupaten Gunungkidul;
    - (2) kawasan Parangtritis dan gumuk pasir di Kabupaten Bantul;dan
    - (3) kawasan Pantai Wedi Ombo di Kabupaten Gunungkidul.
- 5) kawasan strategis pengembangan pesisir dan pengelolaan hasil laut terdiri atas :
  - a. Pantai Depok, Pantai Samas, Pantai Kuwaru, dan Pantai Pandansimo di Kabupaten Bantul;
  - b. Pantai Trisik, Pantai Karangwuni, Pantai Glagah, Pantai Congot di Kabupaten Kulon Progo;dan
  - c. Pantai Sadeng, Pantai Sundak, Pantai Baron, Pantai Ngrenahan dan Pantai Gesing di Kabupaten Gunungkidul.

Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dikelola dengan mempertimbangkan situasi, kondisi daerah dan aspek pelestarian lingkungan hidup, kawasan strategis pelestarian sosial dan budaya dikelola dengan mempertimbangkan kepentingan aspek ekonomi, kawasan strategis pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi dikelola dengan mempertimbangkan fungsi lindung, kepentingan masyarakat setempat, kepentingan nasional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kawasan strategis pengembangan pesisir dan pengelolaan hasil laut dikelola dengan memperhitungkan pengembangan pesisir dan pengolahan hasil laut, fungsi lindung kawasan sempadan pantai, dan tidak merugikan kepentingan masyarakat setempat.

## A. Telaah Indikasi Program Pemanfaatan Ruang

**Tabel IV-1 Hasil Telaah Struktur Ruang terhadap Perda 2 tahun 2010 tentang RTRW DIY**

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II	Lima Tahun ke-III	Lima Tahun ke-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	Rencana Pengembangan Jaringan Jalan	meningkatkan kualitas sistem jaringan jalan	DIY				
		meningkatkan kualitas jalan beserta bangunan pelengkap jalan sesuai fungsinya					
		meningkatkan kelengkapan jalan;					
		mengembangkan sistem perparkiran yang efektif dan efisien;					
		mengurangi jumlah perlintasan sebidang dengan jalan kereta api;dan					
		membangun jaringan jalan baru.					
II	Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Kereta Api	menerapkan kebijakan nasional penetapan jaringan kereta api jalur selatan Pulau Jawa	Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, Bantul, Sleman				
		merencanakan Jaringan Kereta Api sesuai dengan kebijakan nasional sistem jaringan kereta api;dan					
		mengembangkan jaringan kereta api perkotaan					
III	Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Transportasi Laut	menyinerigikan pelabuhan-pelabuhan perikanan;	Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul				
		mendukung upaya ekspor terutama hasil laut.					
IV	Rencana jaringan telekomunikasi	memadukan berbagai pelayanan transportasi wilayah Jawa Selatan Bagian Tengah;dan	DIY				

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II	Lima Tahun ke-III	Lima Tahun ke-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		menyediakan ruang untuk pengembangan Bandara Adisutjipto.					
V	Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Telematika	menyediakan ruang untuk fasilitas jaringan telematika sesuai dengan kebijakan nasional dan kepentingan Daerah;	DIY				
		menyediakan prasarana jaringan telematika; dan					
		menyiapkan peraturan tentang sistem telematika					
VI	Rencana Pengembangan Prasarana Sumber Daya Air	melakukan konservasi sumber daya air secara berkesinambungan terhadap air tanah dan air permukaan;	DIY				
		mengendalikan secara ketat penggunaan lahan di daerah tangkapan air dan di sekitar sumber air;					
		memperbanyak tampungan air yang berupa waduk, embung, tendon air dan kolam penampung air untuk memenuhi kebutuhan air baku dan konservasi;					
		mencegah perubahan penggunaan lahan sawah beririgasi;					
		memantapkan prasarana sumber daya air yang sudah ada agar berfungsi optimal;					
		menguatkan kelembagaan masyarakat pengelola air mandiri untuk air minum dan untuk pertanian di daerah yang tidak terjangkau Perusahaan Daerah Air Minum					

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II	Lima Tahun ke-III	Lima Tahun ke-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		(PDAM) maupun Jaringan Irigasi; dan melibatkan peran masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan prasarana sumber daya air.					
VII	Rencana Pengembangan Jaringan Energi	Mengembangkan jaringan energi yang mendukung kebijakan energi nasional dengan menyediakan runag untuk fasilitas jaringan energi sesuai dengan kebijakan energi nasional  Merencanakan pengembangan prasarana energi di tingkat daerah dengan menyiapkan pengaturan tentang pengembangan jaringan energi daerah	DIY				

**Tabel IV-2 Hasil Telaah Pola Ruang terhadap RTRW DIY**

No	Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II	Lima Tahun ke-III	Lima Tahun ke-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.	<b>Rencana Kawasan Lindung</b>						
I.1	kawasan hutan lindung	Mengendalikan kegiatan yang berlokasi di kawasan hutan lindung agar tidak mengganggu fungsi lindung	Kabupaten Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul				
		Mengembalikan fungsi hidroorologi kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan					
		kawasan resapan air					
		mencegah kegiatan budi daya di kawasan resapan air yang mengganggu fungsi lindung					
		mengendalikan kegiatan budi daya yang telah ada di kawasan resapan air agar tidak mengganggu fungsi lindung					
I.2	kawasan sempadan pantai	mengendalikan kegiatan di dalam Kawasan Sempadan Pantai;	Kabupaten Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul				
		mencegah kegiatan di sepanjang pantai yang dapat mengganggu fungsi pantai					
		mengembalikan fungsi lindung pantai yang telah mengalami kerusakan					
I.3	kawasan sempadan sungai	mengendalikan kegiatan budi daya dalam kawasan sempadan sungai	DIY				
		mencegah kegiatan budi daya di sepanjang sungai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas dan kuantitas air serta morfologi sungai;					
I.4	kawasan sempadan waduk,	mengendalikan kegiatan yang telah ada di dalam dan di sekitar kawasan sempadan waduk, embung, telaga, dan laguna;	Kabupaten Kulon Progo, Bantul,				

No	Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II	Lima Tahun ke-III	Lima Tahun ke-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	embung, telaga, dan laguna	mengendalikan kegiatan budi daya di sekitar kawasan waduk, embung, telaga, dan laguna yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya mengamankan daerah sempadan waduk, embung, telaga, dan laguna	Sleman dan Gunungkidul				
I.5	kawasan sempadan mata air	mengendalikan pemanfaatan mata air untuk mempertahankan kuantitas dan kualitasnya; mencegah kegiatan budi daya di sekitar kawasan sempadan mata air yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya; Mengamankan daerah sempadan mata air	Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul				
I.6	kawasan cagar alam	mengelola kawasan cagar alam agar tetap lestari; melarang kegiatan budi daya yang tidak berkaitan dengan fungsinya; melarang mengubah bentang alam, penggunaan lahan, dan ekosistem yang ada	Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul				
I.7	kawasan taman hutan raya	memadukan kepentingan pelestarian dan kepariwisataan; mengembangkan zona-zona pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata dan pendidikan melarang mengubah bentang alam, penggunaan lahan, dan ekosistem yang ada	Kabupaten Gunungkidul				
I.8		mengelola kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dengan memadukan kepentingan pelestarian budaya Daerah dan pariwisata budaya;	DIY				

No	Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II	Lima Tahun ke-III	Lima Tahun ke-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	mengelola kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dengan mengembangkan zona-zona pengembangan ilmu pengetahuan, dan pariwisata rekreasi dan pendidikan melarang kegiatan budi daya apa pun yang tidak berkaitan dengan fungsinya dan tidak berkaitan dengan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya					
I.9	kawasan suaka margasatwa	mengelola kawasan suaka margasatwa agar tetap lestari; melarang kegiatan perburuan dan menangkap satwa, menembak satwa, dan merusak habitat satwa	Kabupaten Gunungkidul				
I.10	kawasan rawan bencana alam	menegakkan aturan untuk mempertahankan fungsi lindung; mengatur penghunian di dalam kawasan untuk keselamatan manusia; mengatur kegiatan kehidupan untuk mitigasi bencana.	DIY				
<b>II.</b>	<b>Rencana Kawasan Budidaya</b>						
II.1	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	mempertahankan dan meningkatkan luasan kawasan hutan produksi meningkatkan prasarana dan sarana pendukung	Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo				
II.3	Kawasan Peruntukan Pertanian	mempertahankan luasan kawasan pertanian lahan basah mempertahankan luasan kawasan pertanian lahan kering meningkatkan prasarana dan sarana pendukung	Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Sleman				
II.4		mengoptimalkan kawasan peruntukan pertambangan					

No	Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II	Lima Tahun ke-III	Lima Tahun ke-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Kawasan Peruntukan Pertambangan	menghindari perubahan fungsi lahan	Kabupaten Kulon Progo, Gunungkidul, dan Sleman				
		mengembangkan pengelolaan kawasan dengan potensi sumber daya mineral, batu bara dan panas bumi secara optimal dengan memperhatikan daya dukung lingkungan					
II.5	Kawasan Peruntukan Industri	mengembangkan sentra industri Usaha Mikro dan Kecil	Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul				
		mengembangkan kawasan industri Usaha Menenga					
II.6	Kawasan Peruntukan Pariwisata	melestarikan obyek wisata	DIY				
		memanfaatkan obyek wisata secara bijaksana					
		mengembangkan obyek wisata yang sesuai dengan sifat dan karakteristiknya					
		menyediakan fasilitas pelayanan yang sesuai dan memadai					
II.7	Kawasan Peruntukan Permukiman	mengintensifkan lahan permukiman dengan pengembangan ke atas dan ke samping	DIY				
		menyediakan prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang memadai					
		meningkatkan pengetahuan penduduk tentang lingkungan permukiman yang sehat dan aman					
		meningkatkan pengetahuan penduduk mengenai budi daya tanaman tahunan di permukiman desa pada kawasan lindung					
		khusus perkotaan Yogyakarta, pemanfaatan lahan permukiman dilakukan pengembangan ke atas, kecuali di kawasan cagar budaya					
		menyediakan prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang memadai					

No	Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II	Lima Tahun ke-III	Lima Tahun ke-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		mengarahkan pembangunan sarana kota sesuai dengan peringkat dan skala pelayanan yang diperlukan					
		mengendalikan mobilitas penduduk antar wilayah melalui pengefektifan peraturan perundang-undangan tentang kependudukan					
		menerapkan konsolidasi lahan ( <i>urban land readjustment</i> ) untuk pengembangan perumahan di kawasan perkotaan					
II.8	Kawasan Pendidikan Tinggi	mengendalikan perluasan kawasan pendidikan tinggi dan kawasan pendidikan tinggi baru untuk perguruan tinggi	DIY				
		menyediakan prasarana dan sarana pendukung kawasan pendidikan tinggi					
II.9	Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan yang mengancam kelestarian lingkungan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil	Kabupaten Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul				
II.10	Kawasan Militer dan Kepolisian	menyediakan ruang untuk peningkatan kemampuan kegiatan pertahanan dan keamanan negara	Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul				



#### **IV.1.3 Telaah Terhadap Struktur Ruang**

1. Pengembangan sistem jaringan transportasi darat ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas. Pada sistem jaringan jalan dilakukan pengembangan jaringan jalan nasional dan Pengembangan jaringan jalan provinsi
2. Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan(LLAJ) dilakukan melalui pengembangan manajemen lalu lintas dan pengembangan angkutan masal
3. Sistem perparkiran dilakukan melalui pelarangan parkir di badan jalan, menyediakan parkir di luar badan jalan dengan membangun gedung atau taman parkir pada pusat kegiatan. Penyediaan fasilitas parkir perpindahan moda dilakukan secara terintegrasi dengan sistem angkutan jalan
4. Pengembangan sistem dan prasarana pedestrian dan sepeda diarahkan berada di pusat kegiatan primer, pusat kegiatan sekunder, dan kawasan TOD, kawasan pariwisata, dan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan jaringan angkutan umum berikut fasilitas pendukung dengan memperhatikan aksesibilitas penyandang cacat
5. Sistem dan prasarana angkutan barang berupa penyediaan terminal angkutan barang beserta fasilitas untuk mendukung kawasan industri dan kegiatan ekspor dan impor diarahkan berada di kawasan pelabuhan dan industri atau pergudangan dan dekat dengan jaringan jalan arteri serta terintegrasi dengan sistem dan jaringan transportasi perkeretaapian
6. Sistem jaringan transportasi perkeretaapian untuk menghubungkan antar pusat kegiatan primer/sekunder dan antar pusat kegiatan primer/sekunder dengan kota di wilayah sekitar. Sistem jaringan transportasi dilakukan di permukaan, layang dan/atau bawah tanah. Jaringan perkeretaapian terdiri jaringan jalur kereta api meliputi jaringan jalur kereta api umum, stasiun kereta api besar, sedang, kecil, dan barang.
7. Sistem dan jaringan transportasi sungai dan penyeberangan meliputi sistem, prasarana dan teknologi yang digunakan. Sistem dan jaringan transportasi sungai berwujud alur sungai dan/atau kanal untuk keperluan angkutan sungai dan/atau kanal dengan memperhatikan debit sungai dan/atau kanal saat musim hujan dan musim kemarau.
8. Pengembangan Sistem jaringan transportasi laut dilakukan melalui pengembangan tatanan kepelabuhanan dan Pemanfaatan alur pelayaran
9. Pengembangan Sistem jaringan transportasi udara dilakukan dengan pengembangan bandar udara di Kec. Temon, Kabupaten Kulon Progo, pengembangan kawasan bandar udara di Kec. Temon, Kabupaten Kulon Progo dengan melengkapi fasilitas transportasi yang mengkombinasikan angkutan multimoda berupa angkutan bus dan kereta api, Pengembalian fungsi Bandar Udara Adisutjipto kepada TNI AU untuk digunakan sebagai pangkalan militer dan bandar udara khusus dan Lapangan Terbang Gading sebagai landasan pendukung sekolah penerbangan TNI AU dan lapangan terbang khusus.

10. Pengembangan Sistem jaringan energi dilakukan dengan mengembangkan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi serta ketenagalistrikan. Pengembangan Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi dilakukan dengan cara pengamanan fungsi Terminal BBM dan Stasiun Rewulu di Kec. Sedayu, pengamanan fungsi jalur pipa penyalur BBM Cilacap-Boyolali sebagai jalur suplai BBM, pengembangan depot penyuplai BBM Bandara di Kec. Temon, dan Pengembangan jaringan gas perkotaan dan industri di DIY. Pengembangan ketenagalistrikan dilakukan dengan pengembangan jaringan listrik sesuai dengan rencana pengembangan jaringan listrik nasional, pengembangan energi listrik tenaga air di Waduk Sermo, dan saluran irigasi Kalibawang Kabupaten Kulon Progo, pengembangan energi listrik tenaga bayu dan tenaga surya di pantai selatan, peningkatan kapasitas terpasang listrik pada kawasan peruntukan industri dan kawasan industry, pengembangan energi baru terbarukan di seluruh DIY, transmisi energi listrik dengan pembangunan GITET (Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi), SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi), Gardu Induk, SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi), sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan perkembangan pemanfaatan ruang, dan distribusi energi listrik dengan pembangunan gardu distribusi, SUTM (Saluran Udara Tegangan Menengah) dan SUTR (Saluran Udara Tegangan Rendah) sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
11. Pengembangan Sistem jaringan telekomunikasi dilakukan dengan pengembangan jaringan tetap dan jaringan bergerak. Pengembangan jaringan tetap terdiri dari sistem jaringan telekomunikasi sesuai dengan rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi nasional, sistem jaringan telekomunikasi menuju *smart city*, jaringan telekomunikasi sebagai bagian sistem jaringan telekomunikasi nasional di setiap kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, merencanakan pusat pelayanan dan teknologi informasi daerah, jaringan telekomunikasi pada setiap fasilitas pendidikan, fasilitas kebudayaan, dan di setiap obyek wisata; dan jaringan telekomunikasi dengan teknologi serat optik sedangkan jaringan bergerak berupa pengembangan menara BTS.
12. Pengembangan Sistem jaringan sumber daya air berupa sumber air dan jaringan sumber daya air, jaringan air baku untuk kebutuhan air minum domestik dan non domestik, jaringan air baku untuk kebutuhan air minum domestik dan non domestik, sistem distribusi air minum, sistem konservasi, pengendalian daya rusak air, dan penyediaan air baku
13. Pengembangan Sistem jaringan Pengolahan Air Limbah berupa pengembangan dan pengelolaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) terpusat berskala regional untuk melayani Kawasan Perkotaan Yogyakarta, pembangunan IPAL terpusat berskala kota, pembangunan IPAL terpusat berskala kawasan, pembangunan dan pengembangan IPAL terpusat berskala komunitas untuk wilayah yang tidak terlayani IPAL terpusat berskala regional dan/atau kota, pembangunan dan pengembangan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT)

14. Pengembangan Sistem jaringan Persampahan berupa pengembangan pengelolaan sampah berbasis masyarakat perkotaan dan perdesaan pembangunan dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS), TPS 3R (*reduce, reuse, recycle*), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan *Intermediate Treatment Facilities* (ITF) untuk mendukung sistem 3R di seluruh Kabupaten dan kota, pengembangan dan pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional di Kec. Piyungan Kabupaten Bantul, dan pengembangan dan pengelolaan TPA sampah di Kec. Nanggulan dan Kec. Pengasih, Kabupaten Kulon Progo dan TPA sampah di Kec. Wonosari Kabupaten Gunungkidul
15. Pengembangan Sistem Jaringan Drainase berupa pembangunan dan pengembangan sistem jaringan drainase dengan menerapkan pengembangan drainase yang berwawasan lingkungan dengan tujuan konservasi air tanah dan pengendalian banjir

#### **IV.1.4 Telaah Terhadap Pola Ruang**

1. Rencana Pola Ruang DIY terdiri atas Kawasan lindung dan budidaya dan digambarkan dalam peta dengan skala 1:100.000
2. Penetapan kawasan lindung berupa kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, perlindungan setempat, konservasi, lindung geologi, ruang terbuka hijau, rawan bencana dan lindung lainnya.
3. Penetapan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa Kawasan hutan lindung, resapan air, dan transisi resapan air.
4. Penetapan Kawasan perlindungan setempat berupa sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar waduk, dan sekitar mata air;
5. Penetapan Kawasan konservasi berupa Kawasan Suaka Alam (KSA) yang meliputi Cagar alam dan Suaka margasatwa dan berupa Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang meliputi Taman nasional, Taman hutan raya; dan Taman wisata alam.
6. Penetapan Kawasan lindung geologi berupa Kawasan cagar alam geologi; dan Kawasan perlindungan air tanah ;
7. Penetapan Kawasan ruang terbuka hijau berada di Kabupaten dan kota di DIY;
8. Penetapan Kawasan rawan bencana berupa kawasan rawan bencana alam geologi, tanah longsor, tsunami, gelombang pasang, banjir, gempa bumi, dan kekeringan
9. Penetapan Kawasan lindung lainnya yaitu kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan
10. Penetapan kawasan budidaya meliputi kawasan peruntukan hutan produksi, hutan rakyat, peruntukan pertanian, peruntukan perikanan, peruntukan pertambangan, peruntukan industri, peruntukan pariwisata, peruntukan permukiman, dan peruntukan budidaya lainnya.

#### **IV.1.5 Tata Ruang dan RZWP3K**

Kawasan Selatan menjadi kawasan prioritas penanganan di lima tahun ke depan 2017-2022 sejalan dengan tema visi Gubernur DIY 2017-2022 yaitu Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja . Secara pengaturan dalam dokumen RTRW maupun RZWP3K harus menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD 2017-2022 khususnya dalam landasan pijakan pemanfaatan ruang pengembangan wilayah; mewujudkan keseimbangan pembangunan; menentukan lokasi investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta khususnya di dalam wilayah kawasan Selatan. Hal-hal yang diatur dalam dokumen rencana tata ruang terkait pemanfaatan kawasan Selatan khususnya untuk kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil diatur terkait ketentuan pemanfaatan ruangnya yaitu untuk tanaman pantai dan hutan mangrove kecuali di kawasan gumuk pasir barchan serta bangunan pengendali ombak dan abrasi . Untuk kegiatan yang diperbolehkan meliputi Bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini (*early warning system*) dan Penangkapan hasil laut, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi Kegiatan penelitian dan pariwisata tanpa merubah bentang alam pantai ,Sarana dan prasarana pendukung pariwisata bahari tanpa mengubah bentang alam dan Hutan mangrove di wilayah pesisir pantai.

Kawasan pantai selatan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki nilai strategis yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah DIY sehingga penataan ruangnya diprioritaskan dan ditetapkan menjadi Kawasan Strategis Provinsi (KSP). Kawasan strategis pantai selatan DIY terbagi menjadi tiga segmen berdasarkan wilayah administrasi yaitu Pantai Selatan Kulon Progo, Kawasan Pantai Selatan Bantul, dan Kawasan Pantai Selatan Gunungkidul. Pengembangan pada setiap segmen didasarkan pada hal yang berbeda. Kawasan pantai selatan Kulon Progo dikembangkan dengan basis kegiatan industri dan energi. Kawasan pantai selatan Kulon Progo juga memiliki potensi pasir besi dan wisata. Kawasan tersebut diarahkan untuk kegiatan ekonomi berupa pusat pelelangan ikan di wilayah Pelabuhan Tanjung Adikarto sehingga menjadi basis perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Di samping itu terdapat kawasan pertambangan pasir besi di kawasan pesisir Kecamatan Wates hingga Kecamatan Galur. Pengembangan kegiatan ekonomi tersebut didukung kemudahan akses di pantai selatan Kulon Progo dengan adanya Bandara Temon dan Pelabuhan Tanjung Adikarto. Kawasan pantai selatan Bantul dikembangkan dengan basis kegiatan budaya dan ekologi. Kawasan tersebut diarahkan untuk pengembangan industri kreatif di beberapa sentra industri kecil. Selain itu, kawasan tersebut juga dikembangkan sebagai pusat pariwisata pantai. Keberadaan gumuk pasir di kawasan tersebut merupakan

potensi yang harus dilindungi karena merupakan keunikan di DIY. Kegiatan pariwisata di gumuk pasir tidak boleh mengganggu pelestarian dan perlindungan gumuk pasir. Sementara kawasan pantai selatan Gunungkidul dikembangkan dengan basis kegiatan wisata ekologi. Pantai selatan Gunungkidul memiliki kawasan karst dan potensi wisata pantai yang sangat unik. Kegiatan yang akan dikembangkan di kawasan tersebut adalah pariwisata dengan memperhatikan keberadaan bentang alam karst. Kegiatan pariwisata yang ada diarahkan agar tidak merusak bentang alam karst. Selain itu kawasan pantai selatan dapat diarahkan sebagai kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi dikarenakan mempunyai potensi energi yang besar. Gelombang laut dan angin belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber energi terbarukan. Pengembangan gelombang laut dan angin dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga gelombang laut dan pembangkit listrik tenaga bayu/ angin.

Dalam upaya mewujudkan Kawasan Pantai Selatan sebagai salah satu Kawasan Strategis Provinsi maka dilakukan pengembangan system jaringan prasarana wilayah yang meliputi sistem jaringan transportasi, jaringan sumberdaya air, jaringan irigasi, system penyediaan air minum, system pengelolaan air limbah, system jaringan persampahan, system jaringan drainase, dan system jaringan prasarana lainnya.

Kontribusi sektor ekonomi di Kawasan Pantai Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat dari Kontribusi PDRB kecamatan terhadap provinsi. Kontribusi PDRB kecamatan terhadap provinsi (%) rata-rata per kecamatan di Kawasan Pantai Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 0,74%. Total kontribusi Kontribusi PDRB Kawasan Pantai Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap provinsi (%) adalah 24,33% dari PDRB DIY.

**Tabel IV-3 Kontribusi PDRB Kawasan Pantai Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Provinsi (%)**

Kecamatan	Kontribusi PDRB kec terhadap prov (%)	Kecamatan	Kontribusi PDRB kec terhadap prov (%)	Kecamatan	Kontribusi PDRB kec terhadap prov (%)
Bambanglipuro	0,70%	Paliyan	0,52%	Sanden	0,37%
Bantul	1,39%	Pandak	0,78%	Saptosari	0,63%
Dlingo	0,51%	Panggang	0,46%	Sedayu	0,84%
Galur	0,59%	Panjatan	0,56%	Semanu	0,95%
Girisubo	0,45%	Pengasih	1,02%	Sentolo	0,89%
Imogiri	0,97%	Piyungan	1,00%	Srandakan	0,53%
Jetis	0,98%	Playen	1,07%	Tanjungsari	0,50%
Kokap	0,40%	Pleret	0,83%	Temon	0,44%

Kecamatan	Kontribusi PDRB kec terhadap prov (%)		Kecamatan	Kontribusi PDRB kec terhadap prov (%)		Kecamatan	Kontribusi PDRB kec terhadap prov (%)
Kretek	0,58%		Pundong	0,49%		Tepus	0,49%
Lendah	0,44%		Purwosari	0,37%		Wates	1,40%
Pajangan	0,49%		Rongkop	0,47%		Wonosari	2,20%
<b>Kontribusi PDRB Kawasan Pantai Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap prov (%)</b>				<b>24,33%</b>			

#### **Kawasan Bentang Alam Karst**

Kawasan bentang alam karst diarahkan sebagai kawasan suaka alam. Kawasan suaka alam karst Gunung Kidul berperan sebagai kawasan lindung setempat, disamping itu dapat dimanfaatkan dengan budidaya terbatas dengan kegiatan pariwisata alam berbasis masyarakat dengan mengutamakan kelestarian alam.

#### **Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis**

Kawasan gumuk pasir Parangtritis diarahkan sebagai kawasan alam yang perlu dilindungi sehingga ditetapkan sebagai kawasan lindung setempat sebab memiliki fungsi untuk melindungi kawasan pesisir dari bencana alam tsunami dan interusi air laut. Walaupun demikian kondisi saat ini terdapat pusat penelitian kawasan pesisir berupa Laboratorium Geospasial Pesisir dan sarana rekreasi berupa Museum Gumuk Pasir. Sehingga secara garis besar kawasan gumuk pasir dibagi menjadi tiga zona menurut peruntukannya, yaitu zona inti sebagai fungsi lindung dan konservasi, zona penunjang peruntukan lainnya diarahkan untuk budidaya terbatas dan fungsi penunjang pariwisata, khususnya wisata alam, dan zona terbatas yang bisa dimanfaatkan sebagai wisata alam.

Berdasarkan hasil analisis kesesuaian pemanfaatan umum penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kawasan pemanfaatan umum di Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas zona pariwisata, zona pelabuhan, zona perikanan tangkap, dan zona energi. Adapun penyajian zona-zona secara detail diuraikan sebagai berikut ini:

#### **Zona Pariwisata**

Zona pariwisata ini terdiri atas 3 sub zona yaitu:

- 1) Sub Zona Wisata Alam Bentang Laut;
- 2) Sub Zona Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
- 3) Sub Zona Wisata Budaya.

**Arahan pengembangan sub zonawisata alam bentang laut**

terdapat di perairan Pulau Watulawang, Pulau Drini, Pulau Jumpino, dan Pulau Ngrawe di Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul.

**Arahan pengembangan sub zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil terdapat di :**

Pantai Congot – Glagah – Bugel dan sekitarnya di Kecamatan Temon dan Kecamatan Panjatan di Kabupaten Kulon Progo; Pantai Parangtritis – Depok – Kuwaru dan sekitarnya di Kecamatan Srandakan dan Kecamatan Kretek di Kabupaten Bantul; Pantai Baron - Sundak dan sekitarnya Kecamatan Purwosari, Kecamatan Panggang, Kecamatan Saptosari dan Kecamatan Tanjungsari di Kabupaten Gunungkidul; dan Siung - Wediombo dan sekitarnya di Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul.

**Arahan pengembangan sub zona wisata budaya terdapat di :**

Pantai Parangtritis – Parangkusumo di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul; dan Pantai Ngobaran – Ngrenahan – Watu Gupit di Kecamatan Saptosari dan Kecamatan Purwosari di Kabupaten Gunungkidul.

**Zona Pelabuhan**

Zona Pelabuhan di Daerah Istimewa Yogyakarta mencakup pelabuhan pendaratan ikan dan pelabuhan laut TNI AL. Dengan adanya rencana pengembangan di Kawasan Pelabuhan konsekuensinya akan memerlukan alokasi ruang untuk zona pelabuhan, terutama dalam pengembangan infrastruktur pelabuhan (peningkatan alur, tanda-tanda lalu lintas laut dan lain-lain).

**Arahan pengembangan sub zona WK (Wilayah Kerja) dan WOPP (Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan)terdapat di :**

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tanjung Adikarto di Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo; dan

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng, di Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul.

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Jangkaran di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo;

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Congot di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo;

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Glagah di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo;

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bugel di Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo;

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Trisik di Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo;

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pandansimo di Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul;

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kuwaru di Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul;

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Patehan di Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul;  
Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Samas di Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul;  
Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Depok di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul;  
Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Gesing, di Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul;  
Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ngrehen di Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul;  
Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Baron di Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul;  
Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Drini di Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul;  
Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ngandong di Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul;  
Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Siung di Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul; dan  
Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Nampu di Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul.

### **Zona Perikanan Tangkap**

Zona perikanan tangkap adalah ruang wilayah laut yang dialokasikan untuk kegiatan penangkapan ikan. Adapun tujuan dari zona penangkapan ikan ini adalah untuk menyediakan ruang bagi kelangsungan mata pencaharian nelayan, memanfaatkan sumberdaya ikan di perairan pesisir, menjadikan kegiatan perikanan tangkap sebagai salah satu penggerak ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Zona perikanan tangkap meliputi sub zona perikanan tangkap pelagis dan demersal yang terdapat di perairan Samudera Hindia.

Sasaran pengelolaan zona ini adalah membangun usaha perikanan tangkap berbasis potensi wilayah, penguatan dan pengembangan teknologi penangkapan ikan, penguatan dan pengembangan kapasitas sarana prasarana penangkapan ikan, pengembangan industri pengolahan hasil perikanan.

### **Zona Energi**

Zona energi adalah perairan laut yang diperuntukan bagi kegiatan pengembangan energi alternatif terbarukan yang berasal dari potensi gelombang laut. Arah pengembangan zona energi terdapat di perairan Pantai Parangruncuk dan sekitarnya di Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul sebagai pembangkit listrik tenaga gelombang laut.

#### **Arahan pemanfaatan zona energi dilakukan dengan cara:**

Peningkatan sarana dan prasarana pengembangan pembangkit listrik tenaga gelombang; dan  
Penerapan teknologi terbarukan dalam upaya pengembangan energi alternatif gelombang.

#### **IV.1.6 Kawasan Konservasi**

Kawasan Konservasi adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara

berkelanjutan. Kawasan Konservasi merupakan suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan ekosistem. Kawasan konservasi yang efektif perlu diwujudkan guna memberikan manfaat sosial-ekonomi-budaya bagi masyarakat dan keberlanjutan sumberdaya.

Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas :

- 1) Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
- 2) Kawasan Konservasi Perairan.

**Arahan pengembangan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil terdapat di perairan :**

Pantai Pasir Kadilangu – Pasir Mendit di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo;

Pantai Trisik di Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo;

Pantai Pandansimo di Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul;

Pantai Patehan di Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul;

Pantai Pandansari di Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul;

Pantai Baros di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul; dan

Kecamatan Purwosari, Kecamatan Panggang, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tepus, dan Kecamatan Girisubo di Kabupaten Gunungkidul.

Arahan pengembangan kawasan konservasi perairan terdapat di perairan Pantai Wediombo-Siung di Kecamatan Tepus dan Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul.

#### **Alur Laut**

Alur laut (Penjelasan Pasal 10 huruf (a), UU-RI 27/2007), merupakan perairan yang dimanfaatkan, antara lain untuk : alur pelayaran dan perlintasan, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut. Kesesuaian untuk peruntukan alur laut ini didasarkan pada kondisi eksisting alur laut yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Alur Pelayaran dan/ atau Perlintasan**

Alur pelayaran dan/ atau perlintasan mengacu pada kondisi alur pelayaran yang sering digunakan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Alur pelayaran dan/ atau perlintasan tersebut merupakan alur pelayaran kapal kargo, kapal tongkang dan kapal tangker yang melayani rute pelayaran regional, nasional maupun internasional.

Arahan pemanfaatan alur pelayaran dan/ atau perlintasan dilakukan dengan cara:

Penetapan sistem rute pelayaran;

Penetapan tata cara berlalu lintas; dan/atau

Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran.

Beberapa program prioritas yang lokasi kegiatan berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seperti swasembada garam, peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya rumput laut, pengembangan pariwisata bahari, serta pembangunan-pembangunan prasarana bawah laut seperti pembangunan pipa dan kabel bawah laut membutuhkan kepastian alokasi ruang. Dengan adanya penetapan RZWP3K akan memberikan kepastian baik secara ruang maupun hukum untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam program-program prioritas tersebut. RZWP3K memetakan potensi-potensi kelautan yang dapat digarap secara optimal karena penetapan lokasi juga akan diikuti oleh pengaturan tentang jaringan prasarana pendukungnya.

Misalnya ketika suatu lokasi ditetapkan sebagai kawasan pelabuhan dalam perencanaan dilokasi tersebut akan didukung oleh infrastruktur konektivitas antar moda, atau misalnya pelabuhan perikanan terpadu maka akan didukung pula alokasi ruang untuk industri pengolahan hasil perikanan, demikian pula untuk koridor kabel/pipa bawah laut tentu dilokasi tersebut tidak dapat diberikan izin lokasi untuk pembangunan pelabuhan karena kegiatannya dapat mengganggu fungsi kabel/pipa. Tidak hanya untuk kawasan pemanfaatan umum, daya dukung untuk suatu kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi juga diperhatikan, seperti taman nasional laut atau situs budaya, tentu dalam lokasi tersebut tidak akan diperkenankan melakukan kegiatan- kegiatan yang mengganggu fungsi lindung seperti kegiatan pertambangan ataupun kepelabuhan.

Indikasi Program di kawasan Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang tertuang dalam dokumen kajian RTRW dalam kurun waktu sampai dengan 2017-2022 meliputi antara lain :

1. Pengembangan pusat pelayanan pertambangan dan pengolahan hasil tambang
2. Pengembangan pusat konservasi dan mitigasi
3. Pengembangan pusat pelayanan transportasi
4. Pengembangan pusat konservasi dan pelayanan pariwisata dan geopark
5. Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS)
6. Pembangunan jalur dan stasiun kereta api Temon-Samas
7. Pembangunan pelabuhan TNI-AL LANAL
8. Pembangunan bandar udara baru
9. Pembangunan prasarana energi listrik tenaga angin dan tenaga uap
10. pembangunan pembangkit energi listrik untuk menunjang kegiatan industri di Kawasan Pantai Selatan
11. pembangunan IPAL skala kota dan kawasan

12. Pengembangan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana jalur evakuasi
13. Pengendalian pemanfaatan ruang di sempadan pantai
14. Pengembangan mangrove dan tanaman pantai
15. Konservasi penyu
16. Pembuatan struktur buatan untuk mencegah daya rusak air
17. Pengembangan kawasan warisan geologi untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pariwisata minat khusus
18. Rehabilitasi kawasan warisan geologi yang terdegradasi
19. Pelestarian kawasan gumuk pasir
20. Penyediaan prasarana mitigasi bencana
21. Pengembangan tanaman untuk mengurangi daya rusak air
22. Pembuatan struktur buatan untuk mengurangi/meredam kekuatan gelombang pasang
23. Pengendalian kegiatan budi daya di dalam kawasan rawan bencana tsunami
24. Pengembangan sarana prasarana pendukung perikanan tangkap
25. Pengembangan kawasan minapolitan tangkap Sadeng
26. Pengembangan kawasan minapolitan perikanan budidaya
27. rehabilitasi kawasan peruntukan perikanan tangkap untuk menjaga ekosistem sekitarnya
28. Peningkatan aksesibilitas menuju kawasan pesisir
29. Pengembangan sarana prasarana pariwisata bahari

**Tabel IV-4 Hasil Telaah Struktur Ruang Draft Raperda Review RTRW DIY**

No	RENCANA STRUKTUR RUANG	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II	Lima Tahun ke-III	Lima Tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Rencana Pusat Kegiatan	Program Perwujudan Pengembangan Pusat Kegiatan					
		Pemantapan dan penataan Pusat Kegiatan Nasional (PKN)					
		a. Revitalisasi dan Pengembangan Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY)	Yogyakarta				
		b. Peningkatan kapasitas pelayanan air minum di Kawasan Perkotaan Yogyakarta	Yogyakarta				
		c. Pengembangan transportasi massal Perkotaan Yogyakarta (BRT)	Yogyakarta				
		Pemantapan dan penataan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)					
		a. Revitalisasi dan pengembangan Ibu Kota Kabupaten sebagai PKW	Sleman dan Bantul				
		b. Peningkatan kapasitas pelayanan air minum di kawasan perkotaan.	Sleman dan Bantul				
		Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal					
		a. Revitalisasi dan Pengembangan Perkotaan Temon-Wates dan Wonosari sebagai PKW	Wonosari dan Wates				
		b. Pengembangan Perkotaan Temon sebagai Simpul Transportasi	Temon				
		c. Pengembangan Pusat Kegiatan Perdagangan dan Jasa Skala Provinsi	Wonosari, Wates, dan Temon				
		d. Peningkatan kapasitas pelayanan air minum di kawasan perkotaan.	Wonosari, Wates, dan Temon				
		e. Pengembangan pusat pelayanan pertambangan dan pengolahan hasil tambang	IKK Galur				
		f. Pengembangan pusat pelayanan perdagangan dan jasa	SP Dekso dan IKK Karangmojo				
		g. Pengembangan pusat konservasi dan mitigasi	IKK Pakem dan Kretek				

No	RENCANA STRUKTUR RUANG	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II	Lima Tahun ke-III	Lima Tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
		h. Pengembangan pusat konservasi cagar budaya dan pariwisata budaya	IKK Imogiri dan Prambanan				
		i. Pengembangan pusat pelayanan transportasi	IKK Piyungan, Srandakan, Tempel, Panggang, dan SP Sambipitu				
		j. Pengembangan pusat konservasi dan pelayanan pariwisata dan geoprak	IKK Sanden, Tepus, dan Girisubo				
		k. Pengembangan pusat pelayanan pertanian dan industri pengolahan pertanian	IKK Nanggulan, dan Godean				
		l. Pengembangan pusat konservasi perhutanan rakyat	IKK Semin dan Playen				
		m. Pengembangan pusat pelayanan aneka industri berat	IKK Sentolo dan Sedayu				
II	Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah					
		Perwujudan sitem jaringan transportasi					
		Perwujudan sistem jaringanTransportasi Darat					
		Perwujudan Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)					
		a. Pengembangan transportasi massal Perkotaan Yogyakarta (BRT)	Yogyakarta				
		b. Pengembangan angkutan pengumpan/feeder	Kawasan sekitar KPY				
		c. Peningkatan kualitas terminal tipe A	Kota Yogyakarta				
		d. Pengembangan dan pengelolaan kualitas terminal tipe B	Kabupaten Gunungkidul				
		e. Pembangunan dan pengembangan kualitas terminal tipe B	Kabupaten Kulon Progo				
		f. Pengembangan dan pengelolaan kualitas terminal tipe B	Kabupaten Sleman				
		Perwujudan Sistem dan Prasarana Jalan					

No	RENCANA STRUKTUR RUANG	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II	Lima Tahun ke-III	Lima Tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
		a. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Jaringan Jalan di DIY	Seluruh DIY				
		b. Pelaksanaan preservasi dan peningkatan jalan nasional	Seluruh DIY				
		c. Pembangunan simpang tidak sebidang (flyover / underpass)					
		-Simpang Gejayan	Kabupaten Sleman				
		- Simpang Kentungan	Kabupaten Sleman				
		- Simpang Monjali	Kabupaten Sleman				
		d. Pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatan jalan provinsi	Seluruh DIY				
		e. Pembangunan, peningkatan jalan konektivitas Bandara Kulon Progo - KSPN Borobudur					
		- Ruas Jalan Sentolo - Nanggulan - Dekso - Klangon	Kabupaten Kulonprogo				
		- Ruas Jalan Temon - Tegalsari - Samigaluh - Suroloyo - Klangon	Kabupaten Kulonprogo				
		f. Peningkatan jalan akses Yogyakarta - Bandara Kulon Progo					
		- Yogyakarta - Bantul - Srandakan - Ngremang - Temon	Kabupaten Bantul dan Kulon Progo				
		- Yogyakarta – Sentolo – Wates – Toyan – Karangnongko	Kabupaten Bantul dan Kulon Progo				
		g. Pembangunan jalan bebas hambatan					
		- Yogyakarta – Temon – Cilacap	Kabupaten Sleman, Bantul dan Kulon Progo				
		- Yogyakarta – Bawen	Kabupaten Sleman				
		- Yogyakarta – Solo	Kabupaten Sleman				
		h. Pembangunan jalan konektivitas KSPN Prambanan - KSPN Karst Gunungkidul dan KSPN	Kabupaten Sleman, Gunungkidul				

No	RENCANA STRUKTUR RUANG	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II	Lima Tahun ke-III	Lima Tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
		i. Pembangunan jalan Jogjakarta Outer Ring Road (JORR)	Kabupaten Bantul, Sleman				
		j. Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS)	Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul				
		- Pengadaan tanah	Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul				
		- Pembangunan konstruksi	Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul				
		k. Penyusunan Masterplan TOD	Terminal Giwangan dan Terminal Jombor				
		l. Inventarisasi Kebutuhan lahan dan dokumen perencanaan pengadaan tanah TOD	Terminal Giwangan dan Terminal Jombor				
		m. Pembebasan lahan TOD	Terminal Giwangan dan Terminal Jombor				
		n. Pembangunan Fasilitas kawasan TOD	Terminal Giwangan dan Terminal Jombor				
		Perwujudan Sistem Perparkiran					
		a. Pembangunan gedung/taman parkir	Kawasan Perkotaan Yogyakarta				
		b. Pembangunan fasilitas parkir perpindahan moda ( <i>park and ride</i> )	Kawasan sekitar TOD				
		c. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang perparkiran	DIY				
		Perwujudan Sistem dan Prasarana Pedestrian dan Sepeda					
		a. Pengembangan prasarana pedestrian dan sepeda	Kawasan Perkotaan Yogyakarta				

No	RENCANA STRUKTUR RUANG	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II	Lima Tahun ke-III	Lima Tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
		b. Pengembangan prasarana pedestrian dan sepeda	Kawasan sekitar TOD				
		c. Penetapan jalur prioritas prasarana pedestrian dan sepeda dengan Peraturan Gubernur	DIY				
		Perwujudan Sistem dan Prasarana Angkutan Barang					
		Pembangunan terminal barang	Kec. Sedayu, Kabupaten Bantul dan Kec. Sentolo, Kabupaten Kulon Progo				
		Perwujudan Manajemen Lalu Lintas					
		a. Penyusunan Kajian Integrasi angkutan umum massal	DIY				
		b. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang penerapan “earmarking” bagi peningkatan sistem lalu lintas dan angkutan jalan	DIY				
		Perwujudan sistem jaringanTransportasi Perkeretaapian					
		a. pengembangan jaringan dan layanan perkeretaapian perkotaan	DIY				
		b. Penyusunan DED jaringan, stasiun tambahan dan layanan perkeretaapian rute Bandar udara Temon – Stasiun Tugu – Stasiun Maguwoharjo	DIY				
		c. Konstruksi jaringan kereta api tambahan, stasiun tambahan dan layanan perkeretaapian rute Bandar udara Temon – Stasiun Tugu – Stasiun Maguwoharjo	DIY				
		d. <i>Feasibility study</i> jalur dan stasiun kereta api rute Temon – Samas	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul				
		e. Penyusunan DED jalur dan stasiun kereta api rute Temon - Samas	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul				

No	RENCANA STRUKTUR RUANG	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II	Lima Tahun ke-III	Lima Tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
		f. Konstruksi jalur dan stasiun kereta api Temon – Samas	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul				
		g. Revitalisasi Stasiun Kedundang sebagai pendukung bandar udara Temon	Kabupaten Kulon Progo				
		h. <i>Feasibility study</i> jalur dan stasiun kereta api rute Samas – Yogyakarta – Borobudur	Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul				
		i. Penyusunan DED jalur dan stasiun kereta api rute Samas – Yogyakarta – Borobudur	Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul				
		j. Konstruksi jalur dan stasiun kereta api rute Samas – Yogyakarta – Borobudur	Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul				
		k. Revitalisasi Stasiun Tempel	Kabupaten Sleman				
		l. Revitalisasi Stasiun Patukan	Kabupaten Sleman				
		m. Revitalisasi Stasiun Sedayu sebagai stasiun angkutan barang	Kabupaten Bantul				
		n. Revitalisasi Stasiun Kalimenur sebagai stasiun angkutan barang	Kabupaten Kulon Progo				
		o. Revitalisasi Stasiun Sentolo sebagai stasiun angkutan barang	Kabupaten Kulon Progo				
		p. Revitalisasi Stasiun Palbapang sebagai stasiun utama	Kabupaten Bantul				
		q. Pembangunan Stasiun Temon (Bandar Udara)	Kabupaten Kulon Progo				
		r. Pembangunan Stasiun Samas	Kabupaten Bantul				
		s. Penyusunan Masterplan TOD	Stasiun Tugu; Stasiun Lempuyangan; Stasiun Patukan; Stasiun				

No	RENCANA STRUKTUR RUANG	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II	Lima Tahun ke-III	Lima Tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
			Kedundang;Stasiun Wates; Stasiun Sentolo; Stasiun Maguwo;Stasiun Tempel; danStasiun Palbapang				
		t. Inventarisasi Kebutuhan lahan dan dokumen perencanaan pengadaan tanah TOD	Stasiun Tugu;Stasiun Lempuyangan;Stasiun Patukan;Stasiun Kedundang;Stasiun Wates; Stasiun Sentolo; Stasiun Maguwo;Stasiun Tempel; danStasiun Palbapang				
		u. Pembebasan lahan TOD	Stasiun Tugu;Stasiun Lempuyangan;Stasiun Patukan;Stasiun Kedundang;Stasiun Wates; Stasiun Sentolo; Stasiun Maguwo;Stasiun Tempel; danStasiun Palbapang				
		v. Pembangunan Fasilitas kawasan TOD	Stasiun Tugu;Stasiun Lempuyangan;Stasiun Patukan;Stasiun				

No	RENCANA STRUKTUR RUANG	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II	Lima Tahun ke-III	Lima Tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
			Kedundang; Stasiun Wates; Stasiun Sentolo; Stasiun Maguwo; Stasiun Tempel; dan Stasiun Palbapang				
		Perwujudan sistem jaringan Transportasi Laut					
		a. Pembangunan pelabuhan TNI-AL LANAL	Kawasan Pesisir Selatan				
		b. Pembangunan pelabuhan	Kawasan Pesisir Selatan				
		Perwujudan sistem jaringan Transportasi Udara					
		a. Pembangunan bandar udara baru	Kabupaten Kulon Progo				
		b. Pengembalian fungsi Bandar udara Adisutjipto sebagai pangkalan militer dan Bandar Udara Khusus.	Kec. Depok, Kabupaten Sleman				
		c. Pengembangan Bandar Udara Gading sebagai landasan pendukung untuk sekolah penerbangan	Kec. Playen, Kabupaten Gunungkidul				
		d. Penataan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar bandara	Kawasan sekitar bandara di DIY				
		Perwujudan Sistem Transportasi Sungai dan Penyeberangan					
		a. Kajian pengembangan sistem transportasi sungai dan penyeberangan	DIY				
		b. Pengembangan sistem transportasi sungai dan penyeberangan	DIY				
		Perwujudan sistem jaringan energi					
		a. Pengembangan jaringan gas perkotaan	Kawasan Perkotaan DIY				

No	RENCANA STRUKTUR RUANG	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II	Lima Tahun ke-III	Lima Tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
		b. Pembangunan instalasi baru, pengoperasian instalasi penyaluran dan peningkatan jaringan distribusi.	Seluruh DIY				
		c. Peningkatan kapasitas terpasang listrik pada kawasan industri dan kawasan peruntukan industri	Kawasan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo dan Kawasan Sedayu, Kabupaten Bantul				
		d. Pembangunan PLTA Waduk Sermo.	Kabupaten Kulon Progo				
		e. Pembangunan prasarana energi listrik tenaga angin dan tenaga uap	Kawasan Pantai Selatan				
		f. pembangunan pembangkit energi listrik untuk menunjang kegiatan industri di Kawasan Pantai Selatan	Kec. Srandakan, Kabupaten Bantul				
		g. Pembangunan Gardu Induk SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi), SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi), SUTM (Saluran Udara Tegangan Menengah), dan SUTR (Saluran Udara Tegangan Rendah)	Seluruh DIY				
		h. Pembangunan prasarana energi alternatif.	Seluruh DIY				
		Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi					
		a. Pengembangan jaringan telekomunikasi	Seluruh DIY				
		b. Pengembangan fasilitas telekomunikasi perdesaan dan model-model telematika alternatif.	Seluruh DIY				
		c. Pengembangan jaringan telekomunikasi dengan teknologi serat optik	Seluruh DIY				

No	RENCANA STRUKTUR RUANG	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II	Lima Tahun ke-III	Lima Tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
		d. Penyediaan data center	DIY				
		e. Penyediaan digital information	Seluruh DIY				
		f. Pengembangan menara BTS	Seluruh DIY				
		Perwujudan Jaringan Sumberdaya Air					
		a. Konservasi sungai dan DAS	DAS Progo, DAS Opak, DAS Serang				
		b. Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan bangunan pengambilan dari sumber air permukaan di DAS Progo, DAS Opak, DAS Serang dan bangunan pengambilan dari sumber air tanah	DIY				
		c. Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan jaringan pembawa dan pembuang primer, sekunder, dan tersier	DIY				
		d. Pembangunan embung/ tandon air/telaga/situ untuk menyediakan air baku serta konservasi sumber air	Seluruh DIY				
		e. Pengembangan dan pengelolaan waduk dan embung/tendon air/telaga/situ untuk menyediakan air baku serta konservasi sumber air	DIY				
		f. pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan prasarana pengendalian banjir	Waduk, Embung, dan sistem resapan air hujan di seluruh DIY				
		g. pembangunan dan pengelolaan sabo dam	Sungai – sungai yang berhulu di Gunung Merapi				

No	RENCANA STRUKTUR RUANG	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II	Lima Tahun ke-III	Lima Tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
		h. pengadaan tanah untuk pengembangan sistem distribusi air baku dari Bendungan Bener	DIY dan Jateng				
		Perwujudan Jaringan Irigasi					
		Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi	Seluruh DIY				
		Perwujudan sistem penyediaan air minum					
		a. Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan jaringan air baku untuk kebutuhan industri	Kawasan Industri Sentolo, Kabupaten Kulon Progo; Kawasan Industri Sedayu dan Pajangan, Kabupaten Bantul; Kawasan Industri Piyungan, Kabupaten Bantul				
		b. Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan jaringan air baku dari sumber air tanah	cekungan air tanah Yogyakarta-Sleman, Wates, Menoreh, Wonosari, dan Oyo				
		c. Pengembangan dan pengelolaan SPAM regional	Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman				
		d. Pengembangan SPAM Non PDAM	DIY				
		Perwujudan sistem pengelolaan air limbah					

No	RENCANA STRUKTUR RUANG	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II	Lima Tahun ke-III	Lima Tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
		a. Pengembangan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) skala regional	Kec. Sewon, Kabupaten Bantul				
		b. Pembangunan IPAL skala regional	Kec. Pleret, Kabupaten Bantul				
		c. Penyiapan IPAL skala regional	Kabupaten Bantul				
		d. Pembangunan IPAL skala kota	Kec. Wates, Kabupaten Kulon Progo				
		e. Pembangunan IPAL skala kota	Kec. Bambanglipuro, Kabupaten Bantul				
		f. Pembangunan IPAL skala kota	Kec. Wonosari, Kabupaten Gunungkidul				
		g. Pembangunan IPAL skala kawasan	Kec. Berbah, Kabupaten Sleman				
		h. Pembangunan IPAL skala kawasan	Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman				
		i. Pembangunan IPAL skala kawasan	Kec. Gamping, Kabupaten Sleman				
		j. Pembangunan IPAL terpusat skala komunitas	Seluruh Kabupaten dan kota				
		k. Perbaikan sistem dan teknologi sistem setempat	Kawasan perdesaan				
		Perwujudan sistem jaringan persampahan					
		a. Pengaturan sistem pengelolaan persampahan	Regional (Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul), Kabupaten				

No	RENCANA STRUKTUR RUANG	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II	Lima Tahun ke-III	Lima Tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
			Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul				
		b. Pengembangan sarpras persampahan untuk mendukung sistem 3R	Seluruh wilayah DIY				
		c. Pengembangan dan pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah regional	Kec. Piyungan, Kabupaten Bantul				
		d. Penyiapan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah regional	DIY				
		e. Pengembangan dan pengelolaan TPA Banyuroto	Kabupaten Kulon Progo				
		f. Pengembangan dan pengelolaan TPA Baleharjo	Kabupaten Gunungkidul				
		Perwujudan sistem jaringan drainase					
		a. Pengembangan sistem drainase terpadu dengan penerapan ekodrainase	Seluruh wilayah DIY				
		b. Penyusunan masterplan jaringan drainase	DIY				
		Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya					
		a. Pengembangan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana jalur evakuasi	Jaringan Jalan di DIY				
		b. Pemantapan sarana dan prasarana jalur evakuasi	Jaringan Jalan di DIY				

**Tabel IV-5 Hasil Telaah Pola Ruang Draft Raperda Review RTRW DIY**

No	RENCANA POLA RUANG	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II	Lima Tahun ke-III	Lima Tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Rencana Kawasan Lindung	Perwujudan Kawasan Lindung					
		Program untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya					
		Program pemantapan hutan lindung					
		Rehabilitasi dan konservasi lahan di hutan lindung guna mengembalikan/meningkatkan fungsi lindung.	Kec. Pengasih, Kokap (Kabupaten Kulon Progo) Kec. Imogiri, Dlingo, Pleret, Piyungan (Kabupaten Bantul) Kec. Ponjong, Panggang, Playen, Karangmojo, Ngawen, Semin (Kabupaten Gunungkidul)				
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung.					

No	RENCANA POLA RUANG	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II	Lima Tahun ke-III	Lima Tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan hutan lindung.					
		Pengendalian pemanfaatan lahan pada hutan lindung.					
		Kawasan resapan air					
		Pengembangan Sumur Resapan	Kec. Ponjong, Karangmojo, Playen, Semin, Ngawen, Nglipar, Patuk, Gedangsari dan Wonosari (Kabupaten Gunungkidul) Kec. Turi, Pakem, Cangkringan (Kabupaten Sleman), Kec. Kokap, Girimulyo, Kalibawang, Temon, Wates, Pengasih, Panjatan, Sentolo, Lendah, Galur (Kabupaten Kulonprogo)				
		Pengendalian Pengambilan Air Tanah	Kec. Ponjong, Karangmojo, Playen, Semin, Ngawen, Nglipar, Patuk, Gedangsari dan Wonosari (Kabupaten Gunungkidul) Kec. Turi, Pakem, Cangkringan (Kabupaten Sleman), Kec. Kokap, Girimulyo, Kalibawang, Temon,				

No	RENCANA POLA RUANG	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II	Lima Tahun ke-III	Lima Tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wates, Pengasih, Panjatan, Sentolo, Lendah, Galur (Kabupaten Kulonprogo)				
		Kawasan transisi resapan air					
		a. Pengendalian perkembangan lahan terbangun	Kec. Mlati, Kalasan, Ngemplak, Ngaglik, Sleman, Tempel, Turi, Pakem, Cangkringan, Seyegan (Kabupaten Sleman)				
		b. Pengendalian pencemaran air tanah					
		c. Penambahan lahan terbuka hijau					
		Program kawasan perlindungan setempat					
		Konservasi kawasan sempadan pantai					
		a. Pengendalian pemanfaatan ruang di sempadan pantai	Pantai Selatan DIY				
		b. Pengembangan mangrove dan tanaman pantai	Kec. Srandakan, Kec. Kretek, Kec. Panjatan, Kec. Sanden Kabupaten Bantul, Kec. Temon Kabupaten Kulon Progo				
		c. Konservasi penyu	Kec. Srandakan, Kec. Sanden, Kec. Kretek Kabupaten Bantul; Kec. Galur Kabupaten Kulon Progo; Kec. Tepus dan				

No	RENCANA POLA RUANG	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II	Lima Tahun ke-III	Lima Tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
			Kec. Girisubo Kabupaten Gunungkidul				
		d. Pembuatan struktur buatan untuk mencegah daya rusak air	Pantai Selatan DIY				
		Konservasi kawasan sempadan sungai					
		a. Perlindungan kondisi fisik sungai dan dasar sungai dari pendangkalan	Seluruh Wilayah DIY				
		b. Pengendalian pemanfaatan ruang sempadan sungai	Seluruh Wilayah DIY				
		c. Pembuatan struktur buatan pengaman sungai	Seluruh Wilayah DIY				
		d. Pengembangan struktur alami pengaman sungai	Seluruh Wilayah DIY				
		Konservasi kawasan sekitar waduk					
		Pemeliharaan kawasan sekitar danau/waduk dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian fungsi waduk/danau	Kec. Kokap Kabupaten Kulon Progo				
		Konservasi kawasan sekitar mata air					
		a. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sekitar mata air	Seluruh Wilayah DIY				
		b. Pengaturan pemanfaatan mata air	Seluruh Wilayah DIY				
		Program perwujudan kawasan konservasi					
		a. Pelestarian dan perlindungan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam	Cagar Alam Imogiri, Kabupaten Bantul; Cagar Alam/Taman Wisata Alam Batu Gamping, Kabupaten Sleman; Suaka Margasatwa Sermo, Kabupaten Kulon Progo; Suaka Margasatwa Paliyan, Kabupaten Gunungkidul				
		b. Pengembangan kawasan konservasi suaka margasatwa	Kec. Pengasih dan Kokap (Kabupaten Kulon Progo)				

No	RENCANA POLA RUANG	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II	Lima Tahun ke-III	Lima Tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
			Kec. Paliyan dan Saptosari (Kabupaten Gunungkidul)				
		c. Pengembangan kawasan konservasi Taman Hutan Raya	Kec. Playen, Kec. Patuk (Kabupaten Gunungkidul)				
		d. Rehabilitasi dan restorasi kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) yang mengalami kerusakan	Kec. Turi, Kec. Cangkringan, dan Kec. Pakem (Kabupaten Sleman)				
		e. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada kawasan TNGM	Kec. Turi, Kec. Cangkringan, dan Kec. Pakem (Kabupaten Sleman)				
		Perwujudan pengelolaan kawasan lindung geologi					
		Kawasan cagar alam geologi					
		a. Pengembangan kawasan warisan geologi untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pariwisata minat khusus	a. Batu Gamping Eosin di Kec. Gamping, Kabupaten Sleman; b. Lava Bantal Berbah di Sungai Opak, Kec. Berbah, Kabupaten Sleman; c. Endapan Vulkanik Purba Candi Ijo di Kec. Prambanan, Kabupaten Sleman;				

No	RENCANA POLA RUANG	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II	Lima Tahun ke-III	Lima Tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
			d. Goa Kiskendo di Kec. Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo; e. Geotapak Mangan Kliripan di Kec. Kokap, Kabupaten Kulon Progo; f. Gunungapi Purba Nglanggeran Kec. Patuk, Kabupaten Gunungkidul; g. kawasan Pantai Wediombo-Siung di Kec. Girisubo dan Kec. Tepus, Kabupaten Gunungkidul; dan h. situs bioturbasi Kali Ngalang di Kec. Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul.				
		b. Rehabilitasi kawasan warisan geologi yang terdegradasi					
		c. Pelestarian kawasan gumuk pasir	Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul				
		Kawasan perlindungan air tanah					

No	RENCANA POLA RUANG	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II	Lima Tahun ke-III	Lima Tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
		a. Pengendalian perkembangan kawasan budidaya terbangun di kawasan bentang alam karst	Kec. Kokap, Kec. Girimulyo, (Kabupaten Kulon Progo); Kec. Pundong, Kec. Imogiri, dan Kec. Dlingo (Kabupaten Bantul); i. Kec. Karangmojo, Kec. Nglipar, Kec. Panggang, Kec. Purwosari, Kec. Paliyan, Kec. Saptosari, Kec. Tepus, Kec. Tanjungsari, Kec. Rongkop, Kec. Girisubo, Kec. Semanu, Kec. Ponjong, Kec. Wonosari, Kec. Playen, dan Kec. Nglipar (Kabupaten Gunungkidul)				
		b. Pengendalian kegiatan yang menghasilkan limbah					
		c. Pengembangan prasarana pengelolaan limbah					
		d. Pengaturan kegiatan pertambangan secara ketat					
		Perwujudan pengelolaan kawasan ruang terbuka hijau					

No	RENCANA POLA RUANG	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II	Lima Tahun ke-III	Lima Tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
		a. Pengembangan ruang terbuka hijau hingga mencapai paling sedikit 30% dari luas kawasan	a. Kawasan Perkotaan Yogyakarta; b. Kawasan Perkotaan Sleman; c. Kawasan Perkotaan Bantul d. Kawasan Perkotaan Temon - --ates; dan e. Kawasan Perkotaan Wonosari				
		b. Pengembangan ruang terbuka hijau di setiap kawasan budidaya	a. kawasan peruntukan industri; b. kawasan peruntukan pariwisata; c. kawasan peruntukan permukiman; d. kawasan peruntukan instalasi militer; e. kawasan peruntukan instalasi kepolisian f. kawasan peruntukan riset dan pendidikan tinggi; g. kawasan peruntukan Transit Oriented Development (TOD);				

No	RENCANA POLA RUANG	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II	Lima Tahun ke-III	Lima Tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
			h. kawasan peruntukan pesisir dan pulau-pulau kecil				
		Perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana alam					
		Kawasan rawan bencana alam geologi					
		a. Pengendalian secara ketat kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana alam geologi	Kawasan letusan Gunung Merapi yang meliputi Kec. Ngemplak, Kec. Ngaglik, Kec. Tempel, Kec. Turi, Kec. Pakem, dan Kec. Cangkringan di Kabupaten Sleman				
		b. Pengembangan sarana prasarana pemantau bencana dan evakuasi bencana					
		Kawasan Rawan Bencana Longsor					
		a. Pengendalian kegiatan budi daya di dalam kawasan rawan bencana tanah longsor	a. Kec. Pundong, Kec. Imogiri, Kec. Dlingo, Kec. Piyungan, Kec. Kasihan, dan Kec. Sedayu di Kabupaten Bantul; b. Kec. Panggang, Kec. Purwosari, Kec. Playen, Kec. Patuk, Kec. Gedangsari, Kec. Nglipar, Kec. Semin, Kec. Ponjong dan				

No	RENCANA POLA RUANG	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II	Lima Tahun ke-III	Lima Tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
			Kec. Ngawen di Kabupaten Gunungkidul; c. Kec. Gamping dan Kec. Prambanan di Kabupaten Sleman; dan d. Kec. Kokap, Kec. Girimulyo, Kec. Nanggulan, Kec. Samigaluh, dan Kec. Kalibawang di Kabupaten Kulon Progo.				
		b. Konservasi tanah pada kawasan rawan bencana tanah longsor					
		Kawasan Rawan Gelombang Pasang dan Kawasan Rawan Tsunami					
		a. Penyediaan prasarana mitigasi bencana	a. Kec. Temon, Kec. Wates, Kec. Panjatan, dan Kec. Galur di Kabupaten Kulon Progo; b. Kec. Srandakan, Kec. Sanden, dan Kec. Kretek di Kabupaten Bantul; dan c. Kec. Purwosari, Kec. Saptosari, Kec.				

No	RENCANA POLA RUANG	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II	Lima Tahun ke-III	Lima Tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
			Tepus, Kec. Tanjungsari, dan Kec. Girisubo di Kabupaten Gunungkidul				
		b. Pengembangan tanaman untuk mengurangi daya rusak air					
		c. Pembuatan struktur buatan untuk mengurangi/meredam kekuatan gelombang pasang					
		d. Pengendalian kegiatan budi daya di dalam kawasan rawan bencana tsunami					
		Kawasan Rawan Banjir					
		a. Pengendalian kegiatan budi daya di dalam kawasan rawan bencana banjir	a. Kec. Temon, Kec. Wates, Kec. Panjatan, Kec. Galur, dan Kec. Lendahdi Kabupaten Kulon Progo; b. Kec. Srandakan, Kec. Sanden, Kec. Kretek, Kec. Pundong, Kec. Pandak, Kec. Jetis, Kec. Pleret, Kec. Banguntapan, Kec. Sewon, dan Kec. Pajangan di Kabupaten Bantul; dan				

No	RENCANA POLA RUANG	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II	Lima Tahun ke-III	Lima Tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
			c. Kec. Karangmojo, Kec. Wonosari, Kec. Gedangsari, Kec. Nglipar, dan Kec. Semin di Kabupaten Gunungkidul.				
		b. Pengembangan prasarana resapan air hujan					
		c. Pengembangan sistem drainase					
		d. Pembangunan talud pada sungai yang beresiko tinggi menyebabkan luapan banjir	Sungai di kawasan rawan bencana banjir				
		e. Pengembangan struktur alami seperti pohon bambu pada sungai yang belum bertalud					
		Kawasan Rawan Gempa Bumi					
		a. Pengendalian bangunan pada kawasan rawan bencana gempa bumi	a. Kawasan gempa bumi di Kabupaten Bantul yang dilewati patahan meliputi Kec. Kretek, Kec. Pundong, Kec. Jetis, Kec. Imogiri, Kec. Dlingo, Kec. Pleret, Kec. Piyungan, Kec. Srandakan, Kec. Sanden, Kec. Bambanglipuro, Kec. Pandak, Kec. Sewon, Kec. Kasihan, Kec.				

No	RENCANA POLA RUANG	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II	Lima Tahun ke-III	Lima Tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pajangan, dan Kec. Sedayu; b. Kawasan gempa bumi di Kabupaten Kulon Progo yang dilewati patahan meliputi Kec. Galur, Kec. Kalibawang, Kec. Lendah, Kec. Sentolo dan Kec. Pengasih; dan c. Kawasan gempa bumi di Kabupaten Sleman yang dilewati patahan meliputi Kec. Mlati, Kec. Depok, Kec. Berbah, Kec. Prambanan, Kec. Kalasan, Kec. Sleman.				
		b. Pembuatan pedoman pembuatan bangunan tahan gempa yang terjangkau	Seluruh DIY				
		c. Penyediaan sarana prasarana mitigasi bencana gempa bumi					
		d. Pengembangan bangunan tahan gempa pada gedung pemerintah					
		Kawasan Rawan Kekeringan					
		a. Penyediaan infrastruktur air bersih	a. Kec. Prambanan di Kabupaten Sleman				

No	RENCANA POLA RUANG	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II	Lima Tahun ke-III	Lima Tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
			b. Kec. Pengasih, Kec. Kokap, Kec. Girimulyo, Kec. Nanggulan, Kec. Kalibawang, dan Kec. Samigaluh di Kabupaten Kulon Progo; c. Kec. Pajangan, Kec. Pandak, Kec. Sedayu, Kec. Piyungan, Kec. Kretek, Kec. Pundong, Kec. Imogiri, dan Kec. Dlingo di Kabupaten Bantul; dan d. Kec. Panggang, Kec. Purwosari, Kec. Paliyan, Kec. Saptosari, Kec. Tepus, Kec. Tanjungsari, Kec. Rongkop, Kec. Girisubo, Kec. Semanu, Kec. Ponjong, Kec. Wonosari, dan Kec.				

No	RENCANA POLA RUANG	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II	Lima Tahun ke-III	Lima Tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
			Playen di Kabupaten Gunungkidul.				
		b. Pengembangan infrastruktur penangkap, penyimpan, dan penyalur air hujan					
		c. Fasilitasi pengembangan budi daya pertanian					
		Kawasan Lindung Lainnya					
		Konservasi dan rehabilitasi kawasan Cagar Budaya dan ilmu pengetahuan	Kec. Prambanan dan kawasan penanda keistimewaan DIY				
	Rencana Kawasan Budidaya	Perwujudan Kawasan Budidaya					
		Program Perwujudan Kawasan Hutan Produksi					
		a. Pelestarian kawasan hutan produksi	Kec. Temon, Kokap (Kabupaten Kulon Progo) Kec. Panggang, Purwosari, Paliyan, Saptosari, Tepus, Girisubo, Karangmojo. Wonosari, Playen, Patuk, Gedangsari, Nglipar (Kabupaten Gunungkidul)				
		b. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan produksi					
		Program Perwujudan Kawasan Hutan Rakyat					

No	RENCANA POLA RUANG	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II	Lima Tahun ke-III	Lima Tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
		a. Pelestarian kawasan hutan rakyat	Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul				
		b. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan rakyat					
		Program Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertanian					
		a. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian	Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul				
		b. Peningkatan dan perbaikan sistem irigasi					
		c. Penetapan LP2B					
		d. Pemberian insentif bagi pemilik LP2B	Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul				
		e. Intensifikasi pertanian	Seluruh DIY				
		f. Pembangunan pusat perbenihan (Jogja Agro Tekno Park)	Kec. Nanggulan Kabupaten Kulon Progo Kec. Pakem Kabupaten Sleman				
		g. Rehabilitasi lahan pertanian yang sudah terdegradasi	Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo,				

No	RENCANA POLA RUANG	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II	Lima Tahun ke-III	Lima Tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
			dan Kabupaten Gunungkidul				
		h. Pengembangan tanaman perkebunan sesuai dengan potensi atau kesesuaian lahannya secara optimal.	Kec. Pundong dan Piyungan (Kabupaten Bantul) Kec. Purwosari, Paliyan, Saptosari, Rongkop, Girisubo, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Wonosari, Playen, Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin (Kabupaten Gunungkidul) Kec. Prambanan (Kabupaten Sleman)				
		i. Pemantapan dan pelestarian kawasan perkebunan dengan komoditas khas sebagai keunggulan tanaman pekebunan daerah.					
		j. Pengendalian perluasan tanaman perkebunan untuk memelihara kelestarian lingkungan.					
		k. Pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata dan pengembangan agrowisata.					
		l. Pengembangan peternakan sapi potong.	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul				

No	RENCANA POLA RUANG	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II	Lima Tahun ke-III	Lima Tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
		m. Pengembangan peternakan kambing/domba/kambing PE	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul				
		n. Pengembangan peternakan sapi perah	Kabupaten Sleman				
		o. Pengembangan peternakan unggas	Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul				
		Program Perwujudan Kawasan Perikanan					
		a. Pengembangan sarana prasarana pendukung perikanan tangkap	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul				
		b. Pengembangan kawasan minapolitan tangkap Sadeng	Kec. Girisubo, Kabupaten Gunungkidul				
		c. Pengendalian dan pengaturan kegiatan perikanan tangkap agar tetap lestari	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul				
		d. Pengembangan kawasan minapolitan perikanan budidaya	Kec. Wates, Kec. Nanggulan Kabupaten Kulon Progo; Kec. Berbah, Kec. Ngemplak Kabupaten Sleman; Kec. Pandak, Kabupaten Bantul; Kec. Playen Kabupaten Gunungkidul				
		e. Pengembangan sarana prasarana pendukung kegiatan perikanan budidaya	Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo,				

No	RENCANA POLA RUANG	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II	Lima Tahun ke-III	Lima Tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
			dan Kabupaten Gunungkidul				
		f. rehabilitasi kawasan peruntukan perikanan tangkap untuk menjaga ekosistem sekitarnya	Wilayah Pesisir DIY				
		g. revitalisasi wilayah penangkapan ikan yang mengalami gejala tingkat penangkapan yang berlebihan	Wilayah Pesisir DIY				
		h. Penataan kawasan budidaya tambak	Kawasan pesisir Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul				
		Program Perwujudan Kawasan Pertambangan					
		a. Pemetaan kawasan peruntukan pertambangan secara rinci	Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul				
		b. Pengawasan kegiatan pertambangan, reklamasi pasca tambang					
		c. Evaluasi pemanfaatan kawasan peruntukan pertambangan					
		d. Kajian kelayakan ekologis pada kawasan yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan berada di kawasan lindung					
		e. Pengembangan Industri pengolahan hasil tambang dalam rangka peningkatan nilai tambah bahan galian					
		Program Perwujudan Kawasan Industri					
		a. penyediaan prasarana dasar pendukung kawasan peruntukan industri	a. Kec. Piyungan, Kec. Pajangan, Kec. Sedayu, Kec. Srandakan, Kec.				

No	RENCANA POLA RUANG	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II	Lima Tahun ke-III	Lima Tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
			Sanden di Kabupaten Bantul; b. Kec. Berbah, Kec. Gamping di Kabupaten Sleman dan c. Kec. Sentolo, Kec. Lendah, dan Kec. Galur di Kabupaten Kulon Progo				
		b. Penetapan persyaratan kawasan industri untuk meminimalkan dampak negative kawasan industri terhadap lingkungan dan menjamin terwujudnya kawasan industri yang aman					
		c. Pengembangan sarana pengelolaan limbah pada sentra IKM	Sentra IKM di seluruh DIY				
		d. Pengembangan infrastruktur dasar dan sarana pendukung usaha IKM	Sentra IKM di seluruh DIY				
		e. Pemulihan lingkungan akibat kegiatan industri	Sentra IKM di seluruh DIY				
		Program Perwujudan Kawasan Peruntukan Pariwisata					
		a. Penyusunan master plan pengembangan kawasan pariwisata	Kawasan pariwisata di seluruh DIY				
		b. Pengembangan destinasi wisata	Kawasan pariwisata di seluruh DIY				
		c. Pembangunan fasilitas kepariwisataan	Kawasan pariwisata di seluruh DIY				
		d. Peningkatan aksesibilitas menuju kawasan pariwisata	Kawasan pariwisata di seluruh DIY				
		e. Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan pariwisata	Kawasan pariwisata di seluruh DIY				

No	RENCANA POLA RUANG	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II	Lima Tahun ke-III	Lima Tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
		f. Konservasi kawasan pariwisata yang terancam keberlanjutannya	Kawasan pariwisata di seluruh DIY				
		g. Revitalisasi kawasan pariwisata yang telah menurun kualitasnya	Kawasan pariwisata di seluruh DIY				
		h. Pengembangan desa wisata dan desa budaya	Desa yang potensial dikembangkan sebagai desa wisata dan desa budaya				
		i. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, amenitas, dan sub kawasan di Kawasan Menoreh.	Sub Kawasan Banjaroya-Sendangsono, Sub Kawasan Suroloyo, Sub Kawasan Nglinggo-Tritis, Sub Kawasan Kiskendo Kelir, Sub Kawasan Sermo-Kalibiru, Sub Kawasan Sentolo-Pengasih, Penanda Keistimewaan di pintu masuk arah Purworejo dan Bandara Baru Temon				
		j. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, amenitas, dan sub kawasan di Kawasan Patuk, Nglanggeran dan sekitarnya.	Sub Kawasan Geosite Nglanggeran dan sekitarnya, Sub Kawasan Patuk, dan Sub Kawasan Gedangsari.				
		k. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik dan amenitas di Kawasan Karst Gunungsewu dan sekitarnya.	Pengembangan sub kawasan geosite Sri				

No	RENCANA POLA RUANG	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II	Lima Tahun ke-III	Lima Tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
			Gethuk dan Kalisuci-Jomblang				
		l. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, amenitas, dan sub kawasan di Kawasan Purwosari-Ngobaran	Pengembangan sub kawasan kluster Purwosari-Panggang				
		m. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, amenitas, dan sub kawasan di Baron-Sundak dan sekitarnya	Pengembangan sub kawasan kluster Pantai Baron Kukup, Pengembangan sub kawasan kluster Pantai Krakal-Pok Tunggal				
		n. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, amenitas, dan sub kawasan Pantai Siung, Wediombo, Bengawan Solo Purba, dan sekitarnya	Pengembangan sub kawasan kluster Pantai Jogan-Dadapan-Siung, pengembangan sub kawasan Bengawan Solo Purba-Pantai Sadeng dan sekitarnya, penanda keistimewaan di pintu masuk DIY dari Wonogiri				
		o. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik dan amenitas, di Kawasan Parangtritis-Depok-Samas	Kawasan Parangtritis-Depok-Samas				
		p. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik dan amenitas di Kawasan Imogiri-Mangunan-Dlingo	Kawasan Imogiri-Mangunan-Dlingo				
		q. Pengembangan aksesibilitas, daya tarik, amenitas, dan sub kawasan di Kawasan Sleman	Sub Kawasan Wisata Prambanan dan Penanda				

No	RENCANA POLA RUANG	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II	Lima Tahun ke-III	Lima Tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
			Keistimewaan di Pintu Masuk DIY dari Magelang				
		Program Perwujudan Kawasan Peruntukan Permukiman					
		Program Pengurangan Kawasan Kumuh					
		<b>Permukiman perkotaan</b>					
		a. Pencegahan kawasan kumuh	Kawasan Perkotaan Yogyakarta, Kawasan Perkotaan Sleman, Kawasan Perkotaan Bantul, Kawasan Perkotaan Temon, Kawasan Perkotaan Wates, Kawasan Perkotaan Wonosari dan Kawasan Strategis Provinsi				
		b. Penanganan kawasan kumuh					
		c. Perbaikan rumah yang tidak layak huni di kawasan kumuh					
		<b>Permukiman Pedesaan</b>	Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul				
		a. Pencegahan kawasan kumuh					
		b. Penanganan kawasan kumuh					
		c. Perbaikan rumah yang tidak layak huni di kawasan kumuh					

No	RENCANA POLA RUANG	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II	Lima Tahun ke-III	Lima Tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
		Program Pengembangan Perumahan					
		<b>Permukiman Perkotaan</b>					
		a. Pengendalian pembangunan permukiman untuk menjamin lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman sesuai dengan arahan peraturan zonasi yang telah ditetapkan	Kawasan Perkotaan Yogyakarta, Kawasan Perkotaan Sleman, Kawasan Perkotaan Bantul, Kawasan Perkotaan Temon, Kawasan Perkotaan Wates, Kawasan Perkotaan Wonosari dan Kawasan Strategis Provinsi				
		b. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi dan Fasilitas penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah					
		c. Pengembangan unit rumah susun					
		d. Peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum di permukiman					
		e. Pendataan Perumahan dan Kawasan Permukiman					
		f. Konsolidasi tanah pada kawasan permukiman berkepadatan tinggi (kampung padat penduduk)					
		<b>Permukiman perdesaan</b>					
		d. Pengendalian pembangunan permukiman untuk menjamin lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman sesuai dengan arahan peraturan zonasi yang telah ditetapkan					

No	RENCANA POLA RUANG	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II	Lima Tahun ke-III	Lima Tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
		e. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi dan Fasilitas penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah					
		f. Pengembangan unit rumah susun					
		g. Peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum di permukiman					
		h. Pendataan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul				
		Program Perwujudan Kawasan Budidaya Lainnya					
		Kawasan peruntukan instalasi militer					
		Pengembangan dan pembangunan infrastruktur di kawasan peruntukan instalasi militer	Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul				
		Kawasan peruntukan instalasi kepolisian					
		Pengembangan dan pembangunan infrastruktur di kawasan peruntukan instalasi kepolisian	Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul				
		Kawasan peruntukan riset dan pendidikan tinggi					
		a. Pengembangan kawasan riset	Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul				
		b. Peningkatan aksesibilitas menuju kawasan riset	Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul				
		c. Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan pendidikan tinggi	Kawasan Perkotaan Yogyakarta				

No	RENCANA POLA RUANG	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II	Lima Tahun ke-III	Lima Tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
		d. Pengembangan kawasan pendidikan tinggi baru	Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul				
		Kawasan peruntukan pesisir dan pulau-pulau kecil					
		a. Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan pesisir	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul				
		b. Pelindungan dan pengembangan pulau-pulau kecil	Pulau Timang, Pulau Kalong, Pulau Drini, Pulau Jumpino, Pulau Watunganten, Pulau Gunungsemar, Pulau Payung, Pulau Ngrawe, Pulau Lawang, Pulau Watupayungsiratan, Pulau Watulawang, Pulau Ngondo, Pulau Watupatungsiung, Pulau Watupanjang, Pulau Watuglambor, Pulau Watubebek, Pulau Watutogog, Pulau Jungwok, Pulau Watutopi, Pulau Ngusalan, Pulau Amben, Pulau Watugrek, Pulau				

No	RENCANA POLA RUANG	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II	Lima Tahun ke-III	Lima Tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
			Gununggandul, Pulau Godeg, Pulau Baron, Pulau Layar, dan Pulau Krokoh (Kabupaten Gunungkidul)				
		c. Peningkatan aksesibilitas menuju kawasan pesisir	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul				
		d. Pengembangan sarana prasarana pariwisata bahari					
		Kawasan peruntukan pemanfaatan ruang dalam bumi					
		a. Studi pemanfaatan ruang dalam bumi	Seluruh wilayah DIY				
		b. Penyusunan peraturan gubernur tentang pemanfaatan ruang dalam bumi	Seluruh wilayah DIY				
		Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya					
		a. Penetapan kawasan strategis sudut kepentingan sosial dan budaya dengan Keputusan Gubernur	Kawasan strategis sudut kepentingan sosial dan budaya di seluruh DIY				
		b. Penyusunan kajian RDTR kawasan sudut kepentingan sosial dan budaya DIY					
		c. Penetapan RDTR kawasan strategis sudut kepentingan sosial dan budaya dengan Peraturan Daerah					
		d. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan strategis sudut kepentingan sosial dan budaya					
		Kawasan strategis kepentingan ekonomi					
		Kawasan Perkotaan Yogyakarta					
		a. Penyusunan kajian RTR Kawasan Perkotaan Yogyakarta	Kawasan Perkotaan Yogyakarta				
		b. Penetapan RTR Kawasan Perkotaan Yogyakarta dengan Peraturan Daerah					

No	RENCANA POLA RUANG	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II	Lima Tahun ke-III	Lima Tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
		c. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Yogyakarta					
		Kawasan Temon-Prambanan					
		a. Penyusunan kajian RTR Kawasan Temon-Prambanan	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman				
		b. Penetapan RTR Kawasan Temon-Prambanan dengan Peraturan Daerah					
		c. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Temon-Prambanan					
		d. Pembangunan kawasan aerotropolis di sekitar bandara baru Yogyakarta sebagai kawasan pergudangan, perdagangan, dan jasa.	Kec. Temon dan Kec. Wates, Kabupaten Kulon Progo				
		Kawasan Tempel-Parangtritis					
		a. Penyusunan kajian RTR Kawasan Tempel-Parangtritis	Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul				
		b. Penetapan RTR Kawasan Tempel-Parangtritis dengan Peraturan Daerah					
		c. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Tempel-Parangtritis					
		Kawasan Pantai Selatan DIY					
		a. Penyusunan kajian RTR Kawasan Pantai Selatan DIY	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul				
		b. Penetapan RTR Kawasan Pantai Selatan DIY dengan Peraturan Daerah					
		c. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Pantai Selatan DIY					

No	RENCANA POLA RUANG	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II	Lima Tahun ke-III	Lima Tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup					
		Kawasan Bentang Alam Karst					
		a. Penyusunan kajian RTR Kawasan Bentang Alam Karst	a. Kec. Karangmojo, Kec. Nglipar, Kec. Paliyan, Kec. Panggang, Kec. Playen, Kec. Ponjong, Kec. Purwosari, Kec. Rongkop, Kec. Saptosari, Kec. Semanu, Kec. Tanjungsari, Kec. Tepus, Kec. Wonosari di Kabupaten Gunungkidul; dan b. Kec. Dlingo dan Kec. Imogiri di Kabupaten Bantul c. Kec. Kokap, Kec. Girimulyo, di Kabupaten Kulon Progo				
		d. Penetapan RTR Kawasan Bentang Alam Karst dengan Peraturan Daerah					
		e. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Bentang Alam Karst					
		Kawasan Gumuk Pasir					

No	RENCANA POLA RUANG	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-I	Lima Tahun ke-II	Lima Tahun ke-III	Lima Tahun ke-IV
1	2	3	4	5	6	7	8
		a. Penyusunan kajian RTR Kawasan Gumuk Pasir	Kec. Kretek Kabupaten Bantul				
		b. Penetapan RTR Kawasan Gumuk Pasir dengan Peraturan Daerah					
		c. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Gumuk Pasir					
		Kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi					
		a. Penyusunan kajian RTR Kawasan Pantai Selatan sebagai kawasan pengembangan energi baru terbarukan	Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul				
		b. Penetapan RTR Kawasan Pantai Selatan sebagai kawasan pengembangan energi baru terbarukan Peraturan Daerah					
		c. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Pantai Selatan sebagai kawasan pengembangan energi baru terbarukan					

## IV.2 Telaah RPJPD

Penekanan pembangunan lima tahun ketiga (2016-2020) RPJPD DIY adalah pendayagunaan kapasitas keunggulan daerah melalui penguatan SDM dan fasilitas-fasilitas utama pendukung keunggulan daerah, akselerasi usaha ekonomi dan industri unggulan, serta penguatan jejaring untuk meningkatkan daya saing keunggulan daerah sesuai misi-misi berikut:

### 1. Misi 1

Menguatkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel, yang didukung oleh sumber daya pendidikan yang handal. Terdiri dari beberapa prioritas :

- a. Menguatkan sistem dan lembaga pendidikan melalui model kerjasama antar lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri melalui pelaksanaan reorientasi pendidikan dan pengembangan kerjasama untuk mewujudkan kualitas pendidikan berstandar internasional dan berdayasaing.
- b. Memeratakan pelayanan pendidikan dengan dibarengi pemerataan kualitas pendidikan, di semua wilayah DIY dan pada semua jenjang pendidikan
- c. Meningkatkan relevansi pendidikan dengan dunia kerja melalui peningkatan standar kompetensi lulusan, pengembangan profesionalisme dan jiwa kepemimpinan yang sesuai dengan permintaan pasar kerja.
- d. Mengembangkan kluster wilayah pendidikan untuk mencapai efisiensi penyediaan dan penggunaan sarana dan prasarana pendidikan dan pengembangan spesifikasi pendidikan.
- e. Menerapkan jaringan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada layanan pemerintahan yang mendukung peningkatan layanan, pengetahuan dan wawasan seluruh lapisan masyarakat dengan mengembangkan layanan/media pendidikan dan pengetahuan melalui pemanfaatan TIK untuk mendukung *cyber province*
- f. Menerapkan sistem pendidikan yang mampu mendukung pengembangan jiwa kewirausahaan untuk membekali lulusan siap kerja dan membuka kesempatan kerja dengan mengembangkan pendidikan yang menghasilkan lulusan siap kerja dan siap membuka kesempatan kerja.
- g. Memantapkan kualitas pendidikan guru dan dosen melalui peningkatan standar kualitas (standar nasional dan internasional) dan mengembangkan budaya kompetisi.
- h. Mengembangkan pendidikan non formal berbasis masyarakat dan berciri budaya lokal melalui peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat pada umumnya, perlu dikembangkan pendidikan non formal berbasis masyarakat dan berciri budaya lokal.
- i. Mengembangkan jaringan kerjasama internasional melalui peningkatan jaringan kerjasama internasional dalam upaya peningkatan mutu dan relevansi program pendidikan melalui kegiatan penelitian.
- j. Melibatkan masyarakat dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pendidikan baik di lembaga formal maupun non formal

- k. Menciptakan sinergi antara berbagai lingkungan masyarakat dalam mendukung pemanfaatan ruang yang menunjang terselenggaranya pengembangan sarana pendidikan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
- l. Memantapkan kualitas pendidikan dan keterampilan kaum perempuan melalui penyelenggaraan pendidikan dan keterampilan bagi kaum perempuan dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan pelaku pendidikan lainnya.
- m. Membentuk lembaga/kelompok penanganan dan antisipasi bencana di lingkungan masyarakat.
- n. Memantapkan peserta didik yang sehat dan berkualitas, meliputi aspek jasmani dan rohani pada setiap jenjang pendidikan

## **2. Misi 2**

Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan. Misi kedua terdiri dari prioritas :

- a. Terselenggaranya proses perkembangan budaya yang sehat dan terhormat di semua lapisan masyarakat yang ditopang oleh Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan pusat-pusat pengembangan kebudayaan lainnya.
- b. Terlaksananya partisipasi secara penuh dan peningkatan kesadaran yang tinggi di semua lapisan masyarakat akan pentingnya kelestarian dan perlindungan kawasan dan cagar budaya.

## **3. Misi 3**

Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif, dengan prioritas :

- a. Meningkatkan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara yang didukung oleh lingkungan yang aman dan nyaman
- b. Meningkatkan pengelolaan obyek wisata oleh masyarakat yang sinergis dan terintegrasi dengan pemerintah dan swasta.

## **4. Misi 4**

Mewujudkan sosiokultur dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat, dengan prioritas:

- a. Menyediakan sarana penanganan masalah kesejahteraan sosial didukung petugas dan relawan yang berkemampuan pada unit-unit kelompok peduli kesejahteraan sosial di masing-masing lingkungan masyarakat.
- b. Meningkatkan jumlah dan spesifikasi sumberdaya manusia di bidang pelayanan kesehatan, didukung penggunaan dan penerapan teknologi kesehatan yang terkini, serta perbaikan dalam sarana – prasarana pelayanan kesehatan.

- c. Meningkatkan kualitas etos, dan produktivitas tenaga kerja didukung perlindungan dan peningkatan kesejahteraan menuju terwujudnya hubungan industrial yang lebih mutualis, humanis, harmonis, dan progresif.
- d. Meningkatkan minat transmigrasi secara swakarsa baik untuk bidang usaha budidaya tanaman, perikanan, industri, jasa maupun tenaga kerja sektor konstruksi, diperkuat oleh pemerintah melalui dukungan modal material dan pelatihan keterampilan usaha.
- e. Mewujudkan kultur kesetaraan gender untuk mengatasi persoalannya dan berperan nyata dalam lingkungan masyarakatnya melalui peningkatan kemandirian perempuan untuk mengatasi persoalannya, mensejahterakan dirinya (*self help*) melalui pendidikan dan pelatihan di masyarakat.
- f. Mengintegrasikan ekonomi produktif serta pusat-pusat pertumbuhan baru dalam sisten jaringan infrastruktur dan komunikasi untuk mempermudah transportasi input produksi dan pemasaran hasil produksi dan pemasaran hasil produksi, serta terbentuknya kawasan agropolitan.
- g. Meningkatkan komoditas, produk industri kecil, kerajinan rakyat dan industri kecil, koperasi yang menjangkau pasar lebih luas dan berkualitas, di tingkat regional, nasional, dan internasional.
- h. membentuk sikap petani yang berorientasi kemajuan dan keuntungan (petani *progressive*) serta mudah menerima pengenalan metode tanam, teknologi, maupun komoditas yang lebih maju.
- i. Meningkatkan produktivitas perikanan dan peningkatan kualitas sehingga memperluas jangkauan pemasaran produk perikanan ke pasar swalayan, supermarket, dan pasar luar daerah dan ekspor.
- j. Mewujudkan hutan yang berkembang dan lebih dinamis dengan flora dan fauna yang lebih variatif, serta fasilitas pendukung optimalisasi fungsi hutan dalam perbaikan kualitas lingkungan, kebersihan udara, dan kesejahteraan social dan ekonomi masyarakat.
- k. Menjalin kerjasama antar lembaga dilandai kompetensi dan komitmen yang tinggi dalam mewujudkan pelayanan terbaik dan pencapaian rencana dan program pembangunan daerah.

Penekanan pembangunan lima tahun keempat (2021-2025) RPJPD DIY adalah penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan energi yang diuraikan pada misi-misi berikut:

#### **1. Misi 1**

Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumberdaya pendidikan yang handal, melalui :

- a. Mewujudkan Provinsi DIY sebagai pusat unggulan (*center of excellence*) dalam bidang pendidikan di Asia Tenggara.
- b. Mewujudkan masyarakat terdidik dan berbudaya.
- c. Menciptakan Provinsi DIY sebagai wilayah yang menghasilkan para pemimpin, manajer, pelaksana, dan pemikir (inisiator dan inovator)
- d. Mewujudkan kualitas pendidikan berstandar internasional dan berdaya saing.
- e. Menjaga kapasitas jaringan kerjasama.
- f. Menciptakan masyarakat yang memiliki kreativitas dalam pengembangan kegiatan dan usaha.
- g. Mewujudkan kualitas tenaga pendidikan yang handal dan profesional.
- h. Menciptakan masyarakat baru yang berbasis pengetahuan (*knowledge society*).
- i. Mewujudkan wilayah Provinsi DIY yang unggul dalam bidang penelitian dan pengembangan pengetahuan.
- j. Menciptakan gerakan peduli pendidikan.
- k. Menciptakan kawasan pendidikan nyaman dan aman
- l. Menciptakan penurunan angka pengangguran dan kemiskinan.
- m. Mewujudkan masyarakat tanggap bencana.
- n. Mewujudkan masyarakat yang sehat dan berpendidikan.

## **2. Misi 2**

Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan, melalui :

- a. Terwujudnya tatanan sosial masyarakat DIY yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kemanusiaan dan budaya.
- b. Terlaksananya upaya perlindungan dan pelestarian Kawasan Budaya dan Benda Cagar Budaya yang berkelanjutan yang berbasis partisipasi masyarakat secara penuh.

## **3. Misi 3**

Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif, melalui:

- a. Terwujudnya DIY sebagai daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara yang mempunyai ciri khas dan kekhususan daerah dengan keanekaragaman obyek, atraksi dan budaya, termasuk produk wisata inovatif dan peningkatan kunjungan wisatawan baik wisnu maupun wisman.
- b. Tersedianya paket wisata terpadu antar obyek dan antar daerah yang didukung oleh meningkatnya dukungan sektor lain (perhubungan, pendidikan, perdagangan, jasa, pertanian, industri, perhotelan) terhadap sektor pariwisata.

## **4. Misi 4**

Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat, melalui:

- a. Mengembangkan sikap dan budaya masyarakat yang tanggap dini terhadap gejala dan kecenderungan masalah-masalah kesejahteraan sosial.
- b. Menciptakan masyarakat yang mengutamakan pola hidup sehat, aktif mengelola kebersihan dan kesehatan sanitasi lingkungan hunian dan ruang publik, serta tanggap dini terhadap gangguan kesehatan.
- c. Menyediakan tenaga kerja yang memenuhi standarisasi, kompetensi, serta profesionalitas yang mampu bersaing di pasar tenaga kerja regional, nasional, maupun internasional dengan tetap mempertahankan jati diri kulturalnya.
- d. Memindahkan transmigran ke luar daerah penerima secara teratur dan sistematis dengan semakin menguatnya keberhasilan usaha ekonomi di berbagai sektor produktif.
- e. Meningkatkan keterwakilan dan proporsi perempuan dalam lembaga-lembaga sosial ekonomi lokal, organisasi kemasyarakatan, maupun lembaga-lembaga formal yang penting bagi penguatan kesetaraan gender.
- f. Mewujudkan struktur ruang dan infrastruktur yang mantap yang mampu mengakomodasi dinamika sosial ekonomi masyarakat.
- g. Membentuk ekonomi industri kecil, koperasi dan industri kreatif yang kuat serta budaya berkerajinan (craftmanship) yang menghasilkan produk berkualitas, orisinal, dan berpeluang memperoleh hak paten dengan daya dukung kecukupan energi.
- h. Membentuk petani yang dinamis, mandiri, berlandaskan semangat gotong royong dan berorientasi kesejahteraan.
- i. Mewujudkan pembentukan obyek kunjungan wisata dan rekreasi serta atraksi wisata mina-tani yang terintegrasikan dalam paket wisata daerah serta didukung penyediaan infrastruktur dan pelayanan.
- j. Mengintegrasikan wilayah-wilayah hutan dalam kegiatan pariwisata dan rekreasi wana wisata, dalam sistem pendidikan, dan penelitian untuk pengembangan lebih lanjut.
- k. Mewujudkan sistem kelembagaan dengan kesatuan pandang yang bersifat dialogis dalam penanganan masalah, peningkatan reputasi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.

### **IV.3 Telaah RPJMN 2005-2025**

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 merupakan tahapan ketiga dari RPJPN 2005-2025. Pembangunan RPJMN 2015-2019 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Indonesia menghadapi tiga masalah pokok dan tantangan, yaitu: (1) merosotnya kewibawaan negara/pemerintah; (2) lemahnya sendi-sendi perekonomian; dan (3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

RPJMN 2015-2019 telah mengidentifikasi beberapa kondisi yang dapat berpengaruh terhadap pembangunan nasional, termasuk DIY, yaitu:

### **1. Kondisi Geo-Ekonomi**

Kondisi geo-ekonomi global akan menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perekonomian Indonesia dalam lima tahun ke depan. Tantangan dan peluang tersebut antara lain adalah:

- a. proses pemulihan ekonomi global saat ini diperkirakan akan berlangsung secara moderat
- b. pusat ekonomi dunia ke depan diperkirakan akan bergeser terutama dari kawasan Eropa-Amerika ke kawasan Asia Pasifik
- c. tren perdagangan global ke depan tidak saja dipengaruhi oleh peranan perdagangan barang
- d. harga komoditas secara umum diperkirakan menurun, namun harga produk manufaktur dalam tren meningkat
- e. semakin meningkatnya hambatan non tarif di negara tujuan ekspor
- f. implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
- g. pergeseran fenomena kerjasama ekonomi ke arah plurilateral dan mega blok

### **2. Kondisi Geo-Politik**

- a. Konstelasi Geo-politik global
- b. Lingkungan Geo-politik Regional
- c. Lingkungan Strategis Nasional

### **3. Bonus Demografi**

RPJMN memuat visi nasional yaitu Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Selanjutnya tercermin dalam misi-misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
- b. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
- c. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
- d. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
- e. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
- f. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu
- g. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum
- h. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional

Secara prinsip antara agenda prioritas pembangunan nasional dan sasaran pokok pembangunan nasional merupakan satu bagian integral yang tidak terpisahkan dalam

penyelenggaraan pembangunan nasional jangka menengah (2015-2019). Agenda prioritas pembangunan nasional dijabarkan menjadi 9 agenda (Nawacita) sebagai berikut:

- a. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
- b. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
- c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
- d. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya
- e. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
- f. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara
- g. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
- h. Melakukan revolusi karakter bangsa
- i. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

**Tabel IV-6 Sasaran RPJMN 2015-2019 untuk DIY Tahun 2017-2019**

Sasaran	Tahun		
	2017	2018	2019
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,9 – 6,3	6,1 – 6,7	6,2 – 6,9
Tingkat kemiskinan (%)	10,8 – 10,2	9,6 – 8,8	7,6 – 6,9
Tingkat Pengangguran (%)	4,4 – 4,1	4,3 – 3,9	4,2 – 3,8

Sumber: Bappenas, 2014

Pembangunan infrastruktur strategis yang akan dikembangkan pada Tahun 2017-2022 sebagai keberlanjutan implementasi RPJMN yaitu:

- a. Pembangunan Bandar Udara Kulon Progo (New Yogyakarta International Airport)
- b. Tindaklanjut Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto (penyelesaian *breakwater*)
- c. Penyelesaian Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS)
- d. Pengembangan Transportasi Umum Massal (Kereta Api Pendukung Bandara termasuk dalam hal ini pembangunan Mono Rail Transport, Pengembangan Bus Rapid Transit)
- e. Pembangunan jalan lingkar Kota Yogyakarta (Jogja Outer Ring Road)

#### **IV.4 Telaah RPJMD Daerah Lain**

##### **IV.4.1 RPJMD Jawa Tengah 2013-2018**

Visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 yaitu Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari. Jawa Tengah dan DIY menghadapi beberapa permasalahan yang hampir serupa antara lain berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, pangan, koperasi dan UKM, pariwisata, penanaman modal, infrastruktur, dan lingkungan hidup.

Berkaitan dengan dengan letak Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan DIY, maka pembangunan di Jawa Tengah akan memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap DIY, demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Jawa Tengah dan DIY saling berkaitan. Beberapa strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Jawa Tengah yang terkait dengan DIY antara lain:

**Tabel IV-7 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah RPJMD Jawa Tengah 2013-2018 yang berimplikasi pada DIY**

Strategi	Arah Kebijakan
<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemantapan fungsi-fungsi pusat kegiatan, baik Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), maupun Pusat Kegiatan Lokal (PKL)</li> <li>Peningkatan kapasitas pelayanan prasarana sarana dasar wilayah;</li> <li>Pengembangan interkoneksi antara pusat kegiatan dan hinterland;</li> <li>Pemantapan perkembangan kawasan di sepanjang Pantura dan mempercepat pertumbuhan kawasan di sepanjang Pansela.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerataan pembangunan infrastruktur terutama di wilayah tengah dan selatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kapasitas dan aksesibilitas terutama di wilayah tengah dan selatan</li> <li>Pengembangan sistem transportasi darat, laut, dan udara secara terpadu guna meningkatkan aksesibilitas antar wilayah</li> <li>Pengembangan sistem energi secara optimal dan mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan listrik agar terdistribusi merata</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemeliharaan dan pemulihan fungsi kawasan lindung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rehabilitasi dan konservasi kawasan yang berfungsi lindung baik hutan maupun non hutan berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS)</li> <li>Peningkatan rehabilitasi pada lahan-lahan kritis</li> <li>Rehabilitasi daerah resapan air guna mempertahankan ketersediaan air.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong percepatan pembangunan wilayah tertinggal dan kawasan perbatasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan akses masyarakat terhadap lahan dan pemanfaatan sumber daya alam terutama di perdesaan yang termasuk wilayah tertinggal dan di kawasan perbatasan</li> <li>Mendorong pengembangan investasi pada wilayah tertinggal, terutama di wilayah selatan</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan kerjasama antar daerah/ wilayah/regional dan antar pihak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memfasilitasi pengembangan kerjasama antar wilayah/daerah</li> </ul>

Potensi pengembangan wilayah di Jawa Tengah terbagi dalam 8 (delapan) sistem perwilayahan (regionalisasi) dengan mempertimbangkan perpaduan dari aspek homogenitas, nodalitas dan administratif. Dari delapan sistem perwilayahan tersebut, terdapat 2 (dua) wilayah yang berbatasan dengan DIY, yaitu: (1) Subosukawonosraten meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten; serta (2) Purwomanggung meliputi Kabupaten Purworejo, Wonosobo, Magelang, Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung. Cakupan wilayah, potensi dan arah pengembangan pada setiap wilayah tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1) Subosukowonosraten

Pengembangan wilayah diarahkan untuk pengembangan kerjasama kawasan perbatasan dengan DIY di wilayah Pawonsari (Pacitan–Wonogiri–Wonosari/Gunung Kidul) dan Kesukosari (Klaten– Sukoharjo–Wonosari/Gunung Kidul). Sektor unggulan wilayah Subosukowonosraten adalah pariwisata, industri dan pertanian. Sedangkan potensi regional yang dimiliki wilayah pengembangan Subosukowonosraten adalah potensi: (1) primer meliputi pertambangan, pertanian, perkebunan, peternakan; (2) sekunder terdiri dari industri kayu, Tekstil Produk Tekstil, batik, jamu, kerajinan; dan (3) tersier berupa perdagangan dan pariwisata

#### 2) Purwomanggung

Wilayah Purwomanggung meliputi Kabupaten Purworejo, Wonosobo, Magelang, Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung, berfungsi sebagai PKW dan PKL di bagian tengah dan selatan Jawa Tengah, yang berbatasan dengan DIY. Potensi unggulan yang dapat dikembangkan adalah pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, perikanan, didukung oleh sektor perkebunan, dan peternakan. Simpul utama sebagai penggerak ekonomi adalah Kota Magelang dan sekitarnya sebagai pusat kegiatan berskala nasional, didukung oleh koridor perkotaan Magelang-Mungkid Borobudur-Muntilan-Salam, koridor perkotaan Purworejo-Kutoarjo, koridor perkotaan Temanggung-Parakan, Wonosobo, Kertek, dan Wadas Lintang. Sedangkan potensi regional yang dimiliki wilayah pengembangan Purwomanggung adalah: (1) primer berupa pertambangan, pertanian, perkebunan, dan peternakan; (2) sekunder berupa industri kayu dan pengolahan buah; dan (3) tersier berupa pariwisata (termasuk dalam rangka mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur)

RPJMN 2015-2019 juga memuat kegiatan strategis infrastruktur di Jawa Tengah. Beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan wilayah DIY antara lain:

- a. Lanjutan elektrifikasi jalur kereta api antara Yogyakarta – Solo
- b. Elektrifikasi jalur kereta api antara Kutoarjo – Yogyakarta
- c. Reaktivasi jalur kereta api antara Yogyakarta – Magelang dan Magelang – Ambarawa
- d. Rehabilitasi Sungai Progo dan anak sungainya.

### **IV.5 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Proses pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemda DIY secara umum menunjukkan hasil positif di berbagai segi kehidupan masyarakat. Meskipun begitu terdapat isu-isu lingkungan yang masih menjadi perhatian bersama untuk dapat diatasi secara optimal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pada pasal 15 disebutkan bahwa instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

KLHS merupakan serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan

terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau KRP. Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Daerah adalah proses membuat dan melaksanakan KLHS yang dilakukan pada penyusunan atau pada saat evaluasi RPJPD; RPJMD; dan/atau KRP yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup yang termuat dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Penyusunan KLHS untuk RPJMD sebagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi rencana pembangunan daerah. Pasal 1 angka 10 UU PPLH menyebutkan bahwa KLHS sebagai “rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program”. Selanjutnya pada pasal 15 ayat 1 UU PPLH disebutkan Pemerintah Pusat dan Pemda wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Pada Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, pasal 2 menyebutkan bahwa “Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup”.

Proses penyusunan KLHS RPJMD dimulai dengan melakukan identifikasi pemangku kepentingan untuk pemetaan pemangku kepentingan, selanjutnya Pra pelingkupan untuk mempersiapkan daftar panjang isu-isu lingkungan kemudian pelingkupan untuk memperoleh daftar pendek isu-isu lingkungan. Tahap berikutnya adalah pengkajian konsistensi pembangunan berkelanjutan RPJMD, pengkajian pengaruh RPJMD terhadap isu sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan. Tahap berikutnya adalah merumuskan mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif dan merumuskan rekomendasi yang diintegrasikan ke dalam RPJMD.

Dari proses pra pelingkupan didapatkan daftar panjang isu strategis pembangunan berkelanjutan sebanyak 129 isu, yang selanjutnya melalui proses pelingkupan didapatkan daftar pendek isu strategis pembangunan berkelanjutan sebanyak 5 isu yaitu:

1. Pencemaran Lingkungan dan Risiko Bencana Alam
2. Belum Optimalnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tingginya Alih Fungsi Lahan Pertanian
3. Masih Tingginya Ketimpangan Wilayah
4. Penyediaan Infrastruktur Strategis di Kawasan Pesisir Selatan Belum Optimal
5. Angka Kemiskinan Masih Tinggi.

KLHS untuk RPJMD menghasilkan saran-saran sebagai berikut:

1. Hasil kajian menunjukkan bahwa draft rancangan awal RPJMD telah konsisten dan memiliki keterkaitan terhadap dokumen RPJMN, RPJPD DIY, RTRW DIY, dan RPJMD Jawa Tengah, serta memperhatikan aspek keterkaitan antar waktu, antar sektor, antar pemangku kepentingan, serta aspek keseimbangan dan keadilan.

2. Setiap program memiliki dampak atau pengaruh terhadap isu pendek pembangunan berkelanjutan, baik positif dan/atau negatif.
3. Semua program yang direncanakan dalam RPJMD dapat dilanjutkan dengan mengupayakan mitigasi/adaptasi.
4. Setiap program pembangunan membutuhkan upaya mitigasi/adaptasi dan beberapa membutuhkan KLHS Renstra Perangkat Daerah.

#### **IV.5.1 Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan DIY dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)**

Isu strategis pembangunan berkelanjutan DIY sejalan dengan muatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Beberapa poin Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, secara implisit dapat terlingkupi dalam isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan. Hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Isu pencemaran, kerusakan lingkungan hidup dan risiko bencana melingkupi beberapa tema tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu air bersih dan sanitasi (tujuan ke-6), penyediaan permukiman (tujuan ke-11), perubahan iklim (tujuan ke-13), pengelolaan ekosistem laut dan pengelolaan ekosistem daratan (tujuan ke-15), Isu pencemaran lingkungan sangat erat kaitannya dengan tujuan TPB ke-6 yaitu “menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua”. Hal ini disebabkan salah satu jenis pencemaran yaitu pencemaran air dapat diminimasi dengan beberapa sasaran dalam tujuan TPB ke 6 terutama dengan penyediaan air baku, pencegahan pencemaran air yang dilakukan melalui pembangunan infrastruktur pengolahan air limbah, peningkatan kualitas air sungai, dan pengendalian penggunaan air tanah. Isu pencemaran lingkungan dan risiko bencana juga memiliki keterkaitan dengan tujuan TPB ke-11 yaitu “Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan “. Sasaran tujuan TPB ke-11 yang tercakup dalam isu pencemaran lingkungan yaitu penanganan sampah dan limbah perkotaan, sedangkan sasaran yang tercakup dalam isu risiko bencana yaitu penurunan indeks risiko bencana, peningkatan kapasitas masyarakat terhadap perubahan iklim dan bencana, dan penyediaan sistem peringatan dini. Isu risiko bencana memiliki keterkaitan dengan tujuan TPB ke-13 yaitu “mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya”, sasaran TPB terkait yaitu menurunnya indeks risiko bencana melalui strategi pengurangan risiko bencana. Isu pencemaran dan kerusakan lingkungan juga berkaitan erat dengan tujuan ke-14 terkait pengelolaan ekosistem perairan dan tujuan ke-15 terkait pengelolaan ekosistem darat. Dalam tujuan ke-14, sasaran yang terlingkup dalam isu ini yaitu peningkatan wilayah konservasi perairan. Untuk tujuan ke-15, sasaran-sasaran TPB bidang pengelolaan ekosistem darat yang terkait dengan isu pencemaran dan kerusakan lingkungan yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan tutupan lahan, pengurangan luasan lahan kritis melalui rehabilitasi,
2. Isu kedua yaitu belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan tingginya alih fungsi lahan pertanian juga melingkupi beberapa tujuan TPB. Isu ini berkaitan dengan tujuan TPB ke-11 dan ke-2. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang melingkupi sasaran dalam tujuan TPB ke-11 terkait upaya menjadikan kota dan

permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Sasaran yang dilingkupi adalah perwujudan kota dan kawasan permukiman yang layak huni melalui pengembangan kota pusaka berbasis karakter sosial budaya. Tingginya alih fungsi lahan pertanian melingkupi sasaran tujuan TPB ke-2 terkait menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Sasaran pembangunan berkelanjutan yang terkait yaitu penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

3. Isu ketimpangan wilayah melingkupi sasaran pada tujuan TPB ke-8 terkait “meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua. Sasaran tujuan TPB yang berkaitan dengan isu ketimpangan wilayah yaitu peningkatan PDRB. Isu ketimpangan juga terkait dengan tujuan TPB ke-10 yaitu mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara, sasaran yang terlingkupi yaitu penurunan jumlah desa tertinggal dan peningkatan jumlah desa mandiri.
4. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur strategis di kawasan pesisir selatan DIY merupakan isu bidang ekonomi yang memiliki keterkaitan dengan tujuan TPB ke-9 yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif, dan berkelanjutan serta mendorong inovasi. Sasaran TPB yang terlingkupi dalam isu penyediaan inrastruktur ini adalah pembangunan bandara baru.
5. Isu masih tingginya angka kemiskinan melingkupi dua tujuan TPB yaitu tujuan ke-1, mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun, dan tujuan ke-10, mengurangi kesenjangan intra dan antar negara. Sasaran dalam tujuan ke-1 yang tercakup dalam isu kemiskinan yaitu penurunan tingkat kemiskinan, penurunan persentase penyandang disabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, dan penurunan jumlah keluarga sangat miskin yang mendapat bantuan tunai bersyarat. Sasaran dalam tujuan ke-10 yang terkait dengan isu ini yaitu penurunan persentase penduduk miskin terutama di daerah tertinggal.

**Tabel IV-8 Ketekaitan Isu-isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan DIY dengan TPB**

<b>Isu Pembangunan Berkelanjutan DIY</b>	<b>Tujuan TPB :</b>
1. Pencemaran, kerusakan lingkungan hidup dan risiko bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang <b>(tujuan 6)</b></li> <li>2. Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan <b>(tujuan 11)</b></li> <li>3. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya <b>(tujuan 13)</b></li> <li>4. Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan <b>(tujuan 14)</b></li> <li>5. Melindungi, memperbaiki, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati <b>(tujuan 15)</b></li> </ol>

2. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan tingginya alih fungsi lahan pertanian	1. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan <b>(tujuan 2)</b> 2. Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan <b>(tujuan 11)</b>
3. Masih Tingginya ketimpangan wilayah	1. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang <b>(tujuan 8)</b> 2. Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara <b>(tujuan 10)</b>
4. Penyediaan infrastruktur di kawasan pesisir selatan bekum optimal	1. Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi <b>(tujuan 9)</b>
5. Angka kemiskinan masih tinggi	1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun <b>(tujuan 1)</b> 2. Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara <b>(tujuan 10)</b>
6. Pengembangan Pendidikan Karakter dan Pendidikan Vokasi	1. Menajmain pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang (Tujuan 4)
7. Pelestarian Budaya Baik Benda Maupun Tak Benda	-
8. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ( <i>Good Governance</i> )	1. Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggungjawab untukseluruh kalangan (Tujuan 16)
9. Pertumbuhan Ekonomi yang Belum Inklusif	1. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua. (Tujuan 7) 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.(Tujuan 8) 3. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.( Tujuan 9) 4. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara. (Tujuan 10)
10. Kebijakan Internasional Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja PBB	1. Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan (Tujuan 17)

#### IV.5.2 Kebijakan Internasional Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement (PA) yang ditandatangani oleh 195 negara di dunia, melalui UU No 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim. Paris Agreement adalah kesadaran dan sikap baru untuk bersama-sama menghadapi ancaman perubahan iklim, mengambil tindakan yang lebih secara progresif dan juga bersama mencapai tujuan untuk melindungi kelompok rentan di dunia.

Sebagai tindak lanjut Paris Agreement Pemerintah RI telah menetapkan National Determined Contribution (NDC) atau Kontribusi yang ditetapkan Secara Nasional yang mencakup aspek mitigasi dan adaptasi. Pada periode pertama, target NDC Indonesia adalah mengurangi emisi sebesar 29 % dengan upaya sendiri dan menjadi 41 % jika ada kerja sama internasional terhadap kondisi tanpa ada aksi mitigasi dan adaptasi (*Business As Usual*) pada

tahun 2030, yang akan dicapai antara lain melalui sektor energy, transportasi, pengelolaan limbah, proses industri dan penggunaan produk, kehutanan dan pertanian. Komitmen NDC Indonesia untuk periode selanjutnya ditetapkan berdasarkan kajian kinerja dan harus menunjukkan peningkatan dari periode selanjutnya.

Sebelumnya berdasarkan pertemuan G-20 di Pittsburgh, Pemerintah RI telah mengeluarkan Perpres 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Perpres 71 tahun 2011 tentang Inventarisasi Gas Rumah Kaca sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penurunan emisi Gas Rumah Kaca. Pada tahun 2012 Pemerintah DIY menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2012 dengan target capaian penurunan emisi GRK sampai dengan tahun 2020 sebesar 3,62% dari total emisi sebesar 5,667,673.14 Ton CO<sub>2</sub>-eq yang terdiri dari tiga kelompok bidang, yaitu (1) berbasis lahan meliputi sektor kehutanan dan pertanian; (2) berbasis energi meliputi sektor transportasi dan energi serta (3) berbasis bidang pengelolaan limbah. Saat ini Perpres 61 Tahun 2011 sedang dievaluasi menyesuaikan dengan UU No 16 Tahun 2016, serta sedang dilakukan juga kaji ulang BAU Baseline dan rencana aksi mitigasi perubahan iklim. RAD GRK DIY juga akan meninjau kembali target penurunan emisi GRK hingga tahun 2020 dan 2030.

Mekanisme PEP RAD-GRK yang dilaksanakan oleh BAPPEDA DIY selaku Sekretariat RAD-GRK Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu mengadakan rapat dan koordinasi dengan OPD pengampu bidang berbasis lahan, energi, dan pengelolaan limbah. OPD yang terlibat di dalam diskusi dan pembahasan, serta proses perhitungan usaha capaian penurunan emisi gas rumah kaca adalah:

- Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY dan kab/kota;
- Dinas Pertanian DIY dan kab/kota;
- Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral (DPUP-ESDM) DIY dan kab/kota;
- Dinas Perhubungan (Dishub) DIY dan kab/kota;
- Badan Lingkungan Hidup (BLH) DIY dan kab/kota;
- OPD dan lembaga terkait lainnya.

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan serta untuk memenuhi tercapainya Goal 13 (tentang Perubahan Iklim) Sustainable Development Goals (SDG) sesuai dengan Perpres No.59/2017, intervensi kebijakan pembangunan sektoral dan wilayah yang memiliki co-benefit terhadap penurunan emisi GRK harus diprioritaskan. Dalam konteks ini, telah kita pahami bahwa emisi GRK merupakan penyebab utama terjadinya perubahan iklim yang dapat mengancam kehidupan bangsa. Di samping itu, peningkatan ketahanan pembangunan sektoral dan wilayah terhadap dampak perubahan iklim juga penting dilakukan.

Menindaklanjuti komitmen penurunan emisi GRK nasional sebesar 26% di tahun 2020 melalui Perpres 61/2011 tentang RAN-GRK, pemerintah telah berupaya untuk melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi trajectory pencapaian target penurunan emisi GRK tersebut untuk tiga bidang yaitu berbasis lahan, energi dan limbah. Pelaksanaan RAN-GRK tersebut juga didukung oleh pemerintah daerah melalui 34 Peraturan/Keputusan Gubernur tentang Rencana-Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK).

Kementerian PPN/Bappenas melalui Sekretariat RAN-GRK telah mengupayakan keterlibatan aktif K/L, pemerintah daerah, dan pihak terkait untuk mengkoordinasikan pelaksanaan dan melaporkan upaya penurunan emisi GRK sejak tahun 2010. Data yang terkumpul menunjukkan potensi pencapaian penurunan emisi GRK (di luar sektor kehutanan) telah mencapai 10,6% di tahun 2016 dan angka tersebut diperkirakan meningkat 13,47% di tahun 2016 bila sektor kehutanan dimasukkan dan terus memperbaiki kualitas data tersebut melalui kerjasama intensif dengan K/L, pemda serta mitra pembangunan. Pemerintah Indonesia berterima kasih khususnya kepada Pemerintah Jerman, Amerika Serikat, Jepang, dan Inggris yang terus membantu kami dalam mengarusutamakan isu perubahan iklim serta memberikan dukungan dalam upaya Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) emisi GRK.

Integrasi pembangunan ekonomi, sektoral, dan penurunan emisi GRK memerlukan basis hukum yang kuat. Perpres 61/2011 tentang RAN-GRK akan diperkuat dengan Perpres Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) dengan semangat mengarusutamakan isu perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan nasional yang saat ini masih dalam tahap rancangan. Rancangan Perpres PPRK, berorientasi kepada keseimbangan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan stabilitas sosial serta upaya penurunan emisi GRK. Dalam kesempatan ini dapat saya sampaikan bahwa Indonesia telah berhasil menurunkan intensitas emisi nasional (emisi GRK per satuan output ekonomi) dari 681,16 ton CO<sub>2</sub>e/ Miliar Rp di tahun 2010 menjadi 512,08 ton CO<sub>2</sub>e/Miliar Rp di tahun 2016.

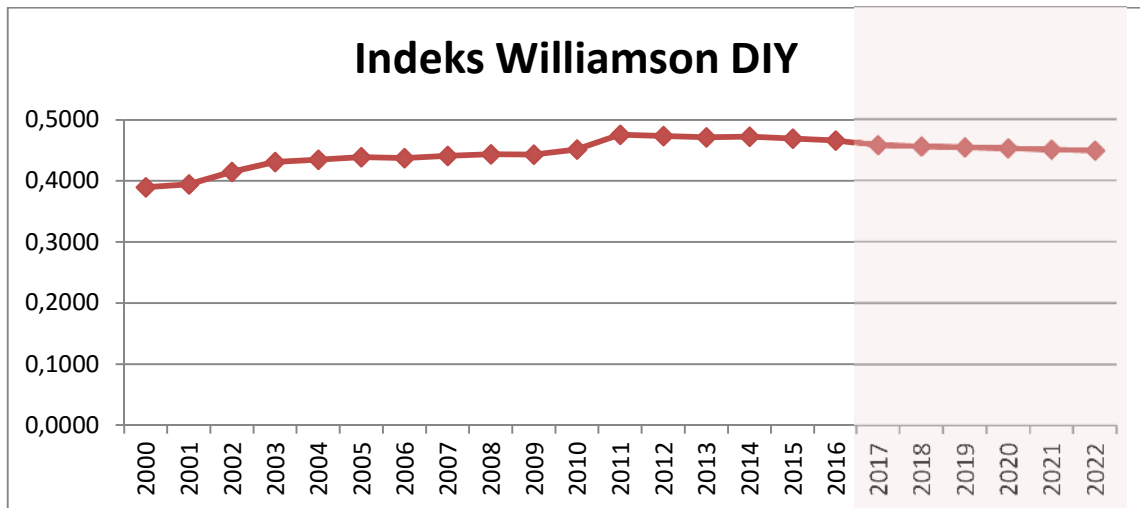
## **IV.6 Permasalahan Pembangunan**

### **IV.6.1 Permasalahan Pokok**

#### **IV.6.1.1 Ketimpangan Antar Wilayah**

Indeks Williamson adalah indeks yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar wilayah. Angka indeks Williamson sebagai ukuran ketimpangan pendapatan antar wilayah mempunyai selang nilai antara 0 (nol) dan 1 (satu). indeks Williamson sama dengan 0 (nol) menunjukkan nilai ketimpangan yang rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan indeks Williamson sama dengan 1 (satu) menunjukkan nilai ketimpangan yang tinggi (kesenjangan sempurna). Nilai indeks Williamson dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Indeks Williamson bernilai  $> 0,5$  menandakan kesenjangan tinggi;
- b. Indeks Williamson bernilai  $0,35 - 0,5$  menandakan kesenjangan sedang;
- c. Indeks Williamson bernilai  $< 0,35$  menandakan kesenjangan rendah;



**Gambar IV.3 Indeks Williamson DIY**

Masalah ketimpangan pendapatan antar wilayah memang juga bukan isu yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Nilai indeks Williamson DIY di tahun 2016 adalah 0,4662. Selama lima tahun nilai indeks Williamson diproyeksikan menurun sebesar 0,0174 menjadi 0,4489 di tahun 2022. Estimasi ini masih menggunakan asumsi kondisi pertumbuhan pembangunan yang normal. Rencana pembangunan bandara baru dan mega infrastruktur lain yang sudah direncanakan belum dimasukkan sebagai faktor yang mempengaruhi asumsi.

Faktor yang mempengaruhi ketimpangan antar wilayah:

1. Ketimpangan kepemilikan SDA dan SDM. Daerah yang kaya SDM dan SDA cenderung memiliki potensi PDRB yang relatif tinggi dibandingkan daerah lain. PDRB yang tinggi dapat menciptakan pendapatan per kapita penduduk suatu daerah yang relatif lebih tinggi.
2. Ketimpangan ketersediaan sarana dan prasarana dapat mendorong ketimpangan mobilitas sumber daya. Daerah yang mobilitas sumber daya dan produknya lebih lancar akan mendorong tingkat efisiensi dan produktivitas daerah yang lebih tinggi. Hal itu akan mendorong daerah yang mobilitasnya lancar untuk lebih memiliki tingkat output yang lebih tinggi dan mempunyai pendapatan per kapita yang lebih tinggi juga. Mobilitas sumber daya dan output akan meningkatkan daya tarik investasi sehingga daerah yang mobilitasnya lancar akan dapat lebih menarik investor sehingga mendorong tingkat pencapaian output yang lebih tinggi.
3. Ketimpangan alokasi intervensi pemerintah. Daerah yang mendapatkan alokasi dana yang lebih besar dalam berbagai bentuk proyek pembangunan akan meningkatkan kapasitas daerah untuk mencapai kinerja ekonomi yang lebih baik dibandingkan daerah yang mendapatkan intervensi pemerintah yang lebih sedikit.

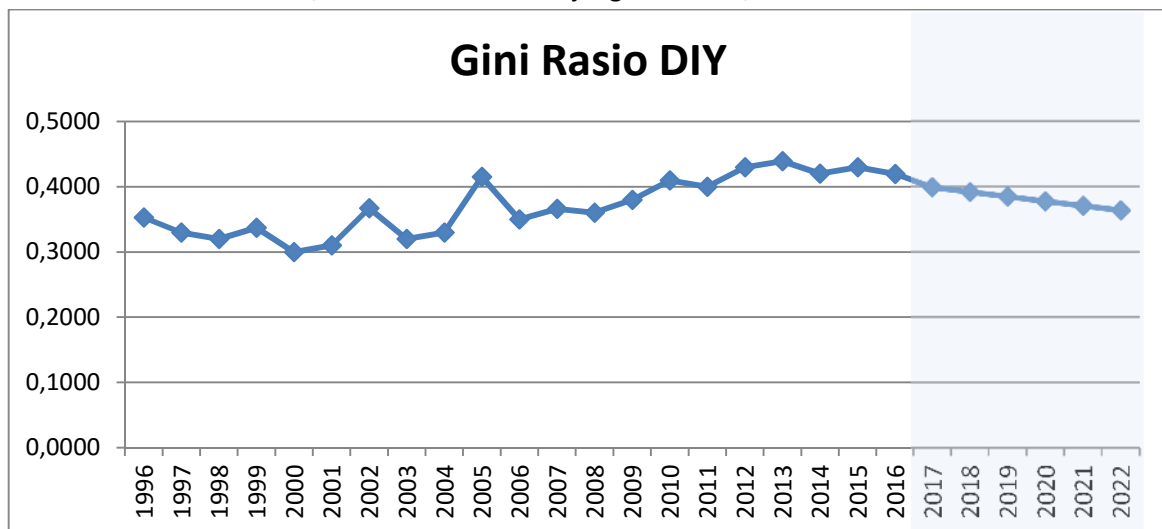
Ketimpangan antar wilayah yang ditunjukkan dengan Indeks Williamson masih tinggi. Meskipun dalam kurun waktu 2011-2015 nilai IW di DIY menunjukkan kecenderungan menurun, yaitu dari 0,4756 pada tahun 2011 menjadi 0,4692 pada tahun 2015, angka tersebut masih dipandang tinggi. Ketimpangan antar wilayah disebabkan diantaranya karena adanya kesenjangan infrastruktur pendukung antar-wilayah Sebagai contoh jika dihubungkan dengan luas wilayahnya Gunungkidul adalah wilayah dengan jaringan jalan paling terbatas. Sebaliknya

Kota Yogyakarta memiliki jaringan jalan paling pendek, tetapi dibandingkan luas wilayah menjadi wilayah dengan jaringan jalan paling banyak. Penyebab lain ketimpangan adalah minat investasi antar wilayah yang tidak seimbang. Investasi masih terpusat di wilayah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta terutama pada sektor tersier dan sekunder. Investasi pada sektor tersebut memberikan bangkitan ekonomi yang cepat sehingga pertumbuhan PDRB di kedua wilayah tersebut jauh di atas tiga Kabupaten lainnya. Maka sudah saatnya pembangunan infrastruktur dan investasi diarahkan agar mampu menumbuhkan pusat-pusat kegiatan ekonomi di wilayah yang masih belum berkembang.

#### IV.6.1.2 Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan

Gini ratio merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan di suatu daerah. Angka gini ratio sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai selang nilai antara 0 (nol) dan 1 (satu). Gini ratio sama dengan 0 (nol) menunjukkan nilai ketimpangan yang rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan gini ratio sama dengan 1 (satu) menunjukkan nilai ketimpangan yang tinggi (kesenjangan sempurna). Todaro mengklasifikasikan nilai gini ratio sebagai berikut:

- Gini Ratio bernilai  $> 0,50$  menandakan kesenjangan tinggi;
- Gini Ratio bernilai  $0,3-0,5$  menandakan kesenjangan sedang;
- Gini Ratio bernilai  $< 0,3$  menandakan kesenjangan rendah;



**Gambar IV.4 Gini Rasio DIY**

Masalah ketimpangan pendapatan memang bukan isu yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Nilai indeks gini DIY di tahun 2016 adalah 0,4230. Selama lima tahun nilai indeks gini diproyeksikan menurun sebesar 0,0563 menjadi 0,3635 di tahun 2022. Estimasi ini masih menggunakan asumsi kondisi pertumbuhan pembangunan yang normal. Rencana pembangunan bandara baru dan mega infrastruktur lain yang sudah direncanakan belum dimasukkan sebagai faktor yang mempengaruhi asumsi.

Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya ketimpangan diantaranya:

1. Struktur ekonomi. Daerah dengan struktur ekonomi yang didominasi sektor agraris cenderung mempunyai ketimpangan pendapatan yang rendah. Sedangkan daerah dengan struktur ekonomi yang didominasi sektor industri cenderung mempunyai ketimpangan pendapatan yang tinggi. Kuznet (dalam Prastowo dkk, 2014) menyatakan bahwa kondisi ketimpangan di wilayah agraris cenderung rendah karena level penghasilan yang diterima oleh individu di wilayah agraris relative rendah dibandingkan dengan di wilayah industri.
2. Ketimpangan aset dalam berbagai bentuk seperti modal dana, tanah dan kondisi SDM. Kepemilikan aset di tiap anggota masyarakat akan menyebabkan ketimpangan kapasitas produktif sehingga terjadi ketimpangan potensi menghasilkan pendapatan antara individu.
3. Intervensi pemerintah yang kurang tepat. Intervensi pemerintah seharusnya difokuskan pada kelompok masyarakat yang masih membutuhkan bantuan untuk meningkatkan produktivitasnya. Intervensi yang tidak tepat kurang dapat memberikan efek pendorong bagi kelompok masyarakat terbelakang untuk meningkatkan produktivitasnya.

Berdasarkan data yang ada terlihat bahwa dari enam provinsi di Pulau Jawa, tiga diantaranya memiliki angka kemiskinan diatas rata-rata nasional yaitu DIY (13,02%), Jawa Tengah (13,15%) dan Jawa Timur (12%). Sedangkan tiga provinsi lainnya masih berada di bawah rata-rata nasional, yaitu Jawa Barat (9,50%), Banten (7%) dan DKI Jakarta (3,5%). DIY menjadi daerah termiskin di Pulau Jawa disebabkan karena beberapa hal dan salah satunya adalah karena kurangnya infrastruktur yang terbangun di wilayah DIY dibandingkan daerah lainnya yang menyebabkan minat investor untuk menanamkan modal masih rendah. Selain itu, pembangunan infrastruktur pendukung perekonomian masyarakat juga masih terkonsentrasi pada area perkotaan yang menyebabkan ketimpangan investasi antarsatu daerah dengan daerah lain di DIY.

Di sisi lain, ketimpangan pendapatan juga masih cukup tinggi. Hal tersebut ditunjukan dengan Indeks Gini yang mencapai 0,4230 pada tahun 2016 atau masih cukup tinggi apabila dibandingkan dengan nilai Rasio Gini nasional sebesar 0,40 pada tahun yang sama. Nilai tersebut juga tergolong cukup tinggi apabila dibandingkan dengan nilai Rasio Gini daerah lain misalnya Provinsi Jawa Tengah dengan nilai Rasio Gini hanya sebesar 0,357 pada tahun 2016. Peningkatan pendapatan 40% penduduk termiskin belum tumbuh secepat pendapatan 20% penduduk terkaya sehingga kesenjangan tersebut semakin melebar. Dengan demikian, untuk memperkecil ketimpangan tersebut, perlu dilakukan program-program afirmatif dalam rangka peningkatan pendapatan penduduk miskin.

#### **IV.6.1.3 Disparitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Antar Wilayah**

Dibandingkan dengan Provinsi lain di Pulau Jawa, pada tahun 2016 IPM DI Yogyakarta adalah yang tertinggi kedua dengan nilai 78,38. Namun jika dilihat berdasarkan Kabupaten/kota maka di DIY memiliki perbedaan nilai IPM yang cukup besar. IPM tertinggi terdapat di Kota Yogyakarta dengan nilai 85,32. Sementara itu IPM terendah terdapat di Kabupaten Gunungkidul dengan nilai 67,82. Nilai IPM Gunungkidul tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 70,18. Penyebab ketimpangan IPM di DIY dipengaruhi kondisi kesejahteraan ekonomi yang masih timpang.

#### **IV.6.1.4 Keterbatasan Kemampuan Pembiayaan Pembangunan**

Salah satu faktor penting untuk mencapai tujuan pembangunan adalah ketersediaan pembiayaan pembangunan. Kebutuhan pembiayaan pembangunan semakin meningkat seiring dengan proyek-proyek strategis yang dicanangkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pembangunan Bandara Baru di Kulon Progo sebagai contoh, menciptakan kebutuhan ketersediaan infrastruktur untuk memberikan pelayanan terhadap kegiatan sosial-ekonomi yang muncul dari bandara tersebut. Selain itu, pemerintah daerah memerlukan pendanaan yang cukup untuk mengatasi permasalahan pembangunan seperti kemiskinan dan ketimpangan antar wilayah. Di sisi lain Pemerintah Daerah dihadapkan pada keterbatasan kemampuan fiskal. Oleh karena itu, pembiayaan daerah perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Dalam arti sempit, upaya pemenuhan pembiayaan pembangunan dilakukan sebagai bentuk upaya untuk menutup defisit anggaran. Usaha yang dilakukan mulai dari optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah hingga melalui sumber utang. Dalam arti luas pembiayaan pembangunan tidak cukup hanya dari APBD saja, namun juga harus melibatkan aktor lain di luar pemerintah seperti dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha atau melalui penggalan dana-dana CSR.

Dari sisi APBD, postur pendapatan dan belanja daerah menunjukkan, DIY masih sangat mengandalkan transfer dari pusat. Dominasi transfer Dana Perimbangan mencapai 58%, sehingga diperlukan penguatan pembiayaan yang berasal dari potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber PAD ini masih menggunakan instrumen generik seperti pajak dan retribusi. Ratio PAD terhadap Total Pendapatan juga menurun dari sekitar 30% di 2014 menjadi sekitar 28% di 2017. Ini mengindikasikan tingkat kemandirian fiskal daerah juga menurun. Maka, langkah memperbesar kegiatan investasi dalam komposisi PDRB DIY semakin diperlukan.

Dari sisi perbankan, peluang pembiayaan pembangunan menggunakan dana perbankan cukup terbuka. Ini tercermin dari kondisi *Loan to Deposit Ratio* (LDR) perbankan DIY masih rendah, sekitar 60-65%. Dengan LDR ideal di level 90%, perbankan DIY masih punya ruang memberikan kredit untuk proyek pembangunan melalui simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) masyarakat. Ruang tersebut kian terbuka melihat kondisi NonPerformingLoan (NPL) perbankan DIY yang relatif aman, 2,07% di Triwulan III 2017. Dengan posisi DPK di Triwulan III-2017 sekitar Rp 55,9 triliun, bisa dikalkulasi kemampuan kredit perbankan DIY dalam pembiayaan pembangunan sekaligus untuk meningkatkan angka LDR hingga mencapai level 90%. (sumber : Budi Hananto, Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY)

#### **IV.6.2 Permasalahan Per Urusan**

Permasalahan per urusan dijelaskan menurut urusan yang dibedakan menjadi urusan wajib dan urusan pilihan didasarkan pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah:

##### **IV.6.2.1 Urusan Wajib**

###### **IV.6.2.1.1 Urusan Pendidikan**

- **Belum tersedianya infrastruktur pendidikan secara memadai.**

Berbagai infrastruktur pendidikan yang mendukung proses pembelajaran dan penelitian yang bertujuan untuk pengembangan wawasan keilmuan seperti halnya sekolah, perpustakaan, laboratorium, jaringan jalan di perdesaan, dan lainnya telah tersedia dengan kualitas yang cukup baik namun belum merata persebarannya, masih terdapat ketimpangan jumlah infrastruktur pendidikan di wilayah DIY.

- **Adanya disparitas tingkat pendidikan penduduk di masing-masing Kabupaten/kota.**  
Berdasarkan data perkembangan rata-rata lama sekolah per-masing-masing Kabupaten/kota, didapat bahwa Kota Yogyakarta memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan yang paling tinggi dari 2014 hingga 2015 yaitu sebesar 11,39 dan 11,41 tahun, sedangkan untuk daerah Kabupaten Gunungkidul memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan yang rendah dengan nilai sebesar 6,45 tahun pada 2014 dan 6,46 tahun pada 2015. Perbedaan yang signifikan antara Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul, merupakan indikasi kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan.
- **Rendahnya minat penduduk untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi.**  
Hal ini dibuktikan dengan data dari Sakernas, pada tahun 2011-2015 jumlah tenaga kerja berpendidikan lulusan SD adalah yang paling besar. Hal itu mengakibatkan daya saing dan kualitas ketenagakerjaan rendah. Tenaga kerja tidak mampu bersaing.  
Kecenderungan nilai angka partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan tiap tahunnya meningkat, namun cenderung mengalami penurunan nilai APM per jenjang seiring dengan peningkatan jenjang pendidikan. Pada tahun 2015 capaian APM sederajat dengan SD sebesar 96,71%, kemudian berkurang menjadi 84,34% pada jenjang pendidikan sederajat SLTP dan makin berkurang lagi pada jenjang pendidikan sederajat SLTA/SMK yaitu sebesar 65,24%.
- **Minat masyarakat untuk menyekolahkan di sekolah yang ada di perkotaan sangat tinggi.**  
Minat masyarakat yang tinggi untuk memilih sekolah di perkotaan dengan kualitas yang lebih baik membuat sekolah di perkotaan mengalami peningkatan jumlah murid, namun tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah tenaga pendidik. Berdasarkan data BPS, rasio murid terhadap guru tertinggi pada 2014-2015 terdapat di Kota Yogyakarta, baik untuk jenjang SD, SMP, maupun SMA. Sedangkan rasio murid terhadap guru yang terendah pada 2014-2015 terdapat di Kabupaten Kulon Progo untuk jenjang SD dan SMP serta Kabupaten Gunung Kidul untuk jenjang SMA. Hal ini menyebabkan ketimpangan kualitas tingkat pendidikan antara perkotaan dan pedesaan makin lebar.

#### **IV.6.2.1.2 Urusan Kesehatan**

- **Pelayanan Rumah Sakit yang Belum Optimal.**  
Salah satu indikator pelayanan rumah sakit adalah *Bed Occupancy Ratio* (BOR). BOR berfungsi untuk mengetahui seberapa jauh RS digunakan oleh masyarakat dan seberapa jauh masyarakat menggunakan pelayanan rawat inap. Pelayanan rumah sakit dikatakan efisien apabila angka BOR antara 75%-85%.  
Berdasarkan data sistem informasi rumah sakit Kementerian Kesehatan RI Tahun 2014, masing – masing Kabupaten/kota di DIY memiliki angka BOR yang tergolong rendah yaitu 56,69% di Kota Yogyakarta, 64,10% di Kabupaten Bantul, 50,32% di Kabupaten Kulon Progo, 66,50% di Kabupaten Gunungkidul, dan 58,48% di Kabupaten Sleman. Secara

keseluruhan BOR rumah sakit di DIY juga menunjukkan angka masih tergolong rendah yaitu 58,28 % dari semua kelas tempat tidur, dengan tempat tidur sebanyak 5.364 TT (tempat tidur) berdasarkan laporan 46 rumah sakit dari total 73 rumah sakit di DIY.

- **Ketersediaan tenaga kesehatan yang belum memenuhi standar nasional.**

Salah satu faktor peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat adalah ketersediaan tenaga kesehatan. Kecukupan tenaga kesehatan dengan masyarakat yang dilayani baik secara kuantitas maupun kualitas akan memberikan tingkat kepuasan yang semakin tinggi. Berdasarkan data, pada tahun 2011 – 2015 rasio dokter umum dan dokter gigi per 100.000 penduduk tergolong fluktuatif dengan penurunan rasio terendah terjadi pada tahun 2014. Sedangkan untuk rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk selama tahun 2011 – 2015 cenderung menurun dan hanya meningkat di tahun 2013 yaitu sebesar 35,11. Untuk tahun – tahun lainnya nilai rasio yang ada selalu lebih rendah dari tahun 2013 bahkan hanya mencapai 29,38 pada tahun 2015. Selain itu untuk tenaga kesehatan selain dokter seperti perawat, bidan, tenaga farmasi dan tenaga gizi, berdasarkan data dari dinas kesehatan DIY pada tahun 2013 – 2015 hanya tenaga farmasi yang mengalami peningkatan rasio per 100.000 penduduk pada tahun 2015. Sedangkan untuk perawat, bidan, tenaga farmasi dan tenaga gizi terus mengalami penurunan rasio per 100.000 penduduk pada tahun 2013-2015 dengan nilai terendah pada tahun 2015.

- **Prevalensi Penyakit Tidak Menular yang Terus Meningkat dan Melebihi Angka Nasional.**

Hasil Riskesdas tahun 2013 menunjukkan prevalensi penyakit tidak menular (PTM) seperti diabetes melitus, stroke, kanker dan jantung yang melebihi angka nasional. Prevalensi kanker sebesar 4,1 permil, lebih besar dari nasional yang hanya sebesar 1,4. Prevalensi gagal jantung DIY sebesar 0,38, lebih besar dari nasional sebesar 0,30. Adapun prevalensi gangguan jiwa di DIY sebesar 2,7 permil, lebih tinggi dari prevalensi rata-rata nasional sebesar 1.7 permil.

Selain itu prevalensi penyakit tidak menular juga meningkat dibandingkan tahun 2007 yaitu pada prevalensi diabetes perubahan nilai meningkat dari 1,8 menjadi 3 pada Tahun 2013 serta pada prevalensi stroke perubahan nilai meningkat dari 8,1 menjadi 16,2. Selain itu angka gangguan jiwa berat cukup tinggi yaitu 0,27% dibanding angka nasional 0,17%. Kecenderungan meningkatnya penyakit tidak menular banyak dipengaruhi oleh faktor perilaku dan lingkungan yang kurang sehat antara lain, yaitu : pola makan yang belum memenuhi gizi seimbang, kurangnya aktivitas fisik, dan menurunnya kualitas kesehatan lingkungan. Tingginya angka gangguan jiwa dipengaruhi oleh kerapuhan kesehatan mental sehingga kurang siap menghadapi perubahan yang sangat cepat di masyarakat. Penderita gangguan jiwa seringkali mendapatkan stigma negatif. Bahkan di DIY masih ada kasus pasung terhadap penderita oleh keluarga karena rasa malu.

- **Kurangnya Kesadaran Masyarakat untuk Hidup Sehat.**

Kebutuhan dasar harus tersedia untuk semua warga agar dapat menjaga kesehatannya. Kebutuhan dasar tersebut misalnya meliputi pemenuhan gizi, lingkungan yang sehat, higiene diri yang tinggi. Kebutuhan ini belum cukup untuk menjaga kesehatan setiap warga tanpa adanya kesadaran untuk hidup sehat. Kesadaran masyarakat untuk hidup sehat bisa tercermin dari indikator Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). tahun 2016, antara lain

merokok di dalam rumah, memberi ASI eksklusif selama 6 bulan, konsumsi buah dan sayur serta aktivitas fisik. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah sebuah perwujudan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesehatan. Indikator PHBS mengalami peningkatan dari 36,72% pada tahun 2013 menjadi 40,2% pada tahun 2016. Hasil pencermatan terhadap pencapaian masing-masing indikator dari 10 indikator Rumah Tangga ber-PHBS, secara berurutan capaian yang terendah adalah pada indikator tidak merokok di dalam rumah, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, konsumsi sayur dan buah dan aktivitas fisik.

- **Skema Pembiayaan Penanganan Kesehatan dan Kesakitan .**

Skema penanganan kesehatan dan kesakitan ini sebenarnya dibiayai dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tetapi Jaminan Kesehatan Nasional diprioritaskan untuk pengobatan orang sakit. Oleh karena itu diperlukan pendanaan dampingan dari APBD untuk memenuhi kebutuhan terutama untuk menjaga agar warga tetap sehat juga untuk menyokong pelayanan kesehatan terutama pemenuhan SDM kesehatan berkualitas dan sarana prasarana kesehatan yang tidak banyak tertangani dalam skema JKN.

#### **IV.6.2.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

- **Konektivitas di daerah tertinggal dan antar kawasan masih terbatas.**

Pembangunan infrastruktur terlebih aspek aksesibilitas jalan masih belum optimal untuk meningkatkan/mengembangkan wilayah selatan yang merupakan kawasan tertinggal. Potensi pariwisata DIY pada kawasan strategis pariwisata baik daerah maupun nasional belum terkoneksi secara maksimal.

- **Akses penduduk terhadap layanan dasar belum mencapai 100%.**

Sumber air baku di DIY belum semuanya dapat termanfaatkan dan masih minimnya penyediaan jaringan distribusi air minum perpipaan mengakibatkan masih terdapat penduduk yang belum berakses air minum layak. Pola hidup bersih dan sehat belum dilakukan oleh seluruh masyarakat DIY serta belum terpenuhinya infrastruktur prasarana lingkungan mengakibatkan masih terdapat penduduk yang berakses sanitasi tidak layak.

- **Belum optimalnya penataan ruang sebagai alat keterpaduan pembangunan wilayah.**

Seluruh Kabupaten/Kota di DIY telah mempunyai rencana umum tata ruang berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota, namun sampai dengan tahun 2017 hanya Kota Yogyakarta yang telah menetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Rencana rinci tata ruang sangat penting untuk menjadi dokumen perencanaan pembangunan secara keruangan pada daerah yang cepat tumbuh dan perkotaan. Keterpaduan rencana pembangunan jangka menengah maupun tahunan dengan Rencana Tata Ruang (RTR) harus dilakukan untuk mencegah dampak pembangunan yang bersifat negatif. Implementasi hal ini masih belum optimal ditandai dengan masih terdapatnya pemanfaatan ruang yang dilakukan melalui program/kegiatan yang tidak menunjang perwujudan pola maupun struktur ruang dalam RTR.

- **Konversi lahan pertanian menjadi lahan terbangun.**

Implementasi peraturan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan belum dapat dilakukan sehingga masih terdapat perubahan penggunaan lahan dari lahan pertanian

menjadi lahan terbangun. Hal ini diperkuat dengan belum optimalnya kinerja jaringan irigasi dalam melayani daerah irigasi.

#### **IV.6.2.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman**

- **Masih terdapat penduduk yang bertempat tinggal di hunian tidak layak**  
Perumahan merupakan indikator yang berkontribusi terhadap penentuan angka kemiskinan dan merupakan hak dasar bagi seluruh masyarakat. Penduduk yang tinggal pada rumah tidak layak huni dan/kawasan kumuh umumnya merupakan masyarakat berpenghasilan rendah serta mempunyai sanitasi buruk yang pada akhirnya akan menghasilkan sumberdaya manusia dengan kualitas rendah.
- **Masih terjadi *Backlog* Perumahan.**  
Meskipun secara keseluruhan ketersediaan rumah di DIY mengalami surplus, namun masih terjadi *backlog* baik berupa kepemilikan maupun penghunian. Angka *backlog* kepemilikan bersumber dari jumlah rumah dengan status kontrak, bebas sewa, bertempat tinggal pada rumah dinas, dan lainnya. Sedangkan *backlog* penghunian didapatkan dari jumlah status bebas sewa.
- **Pengembangan kawasan pertumbuhan baru yang berdampak pada perkembangan perumahan secara masif dan dinamis.**  
Pembangunan bandara baru di Kabupaten Kulon Progo direncanakan untuk beroperasi terbatas pada tahun 2019. Adanya program tersebut jelas akan mempengaruhi perkembangan perumahan yang cukup signifikan baik di kawasan sekitar bandara, maupun koridor bandara menuju kota Yogyakarta. Selain itu, rencana pembangunan bandara di Kabupaten Kulon Progo juga membuka wacana untuk melakukan pengembangan kawasan yang berorientasi pada *Transit Oriented Development* (TOD), di mana perumahan menjadi bagian penting dalam pengembangan.

#### **IV.6.2.1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

- **Angka kriminalitas yang cukup tinggi.**  
Tingkat kriminalitas di DIY masih menunjukkan angka yang cukup tinggi. Walaupun angka kriminalitas tersebut menurun tiap tahunnya yaitu sebesar 0,17 di tahun 2012 dan menurun hingga 0,12 di tahun 2016. Namun dari tiap-tiap tahun terjadi fluktuasi jumlah kriminal per masing-masing jenis tindak kejahatan, dengan jumlah kejahatan tertinggi berada pada kasus pencurian dan penipuan.
- **Jumlah demonstrasi yang cukup tinggi.**  
Jumlah aksi unjuk rasa di DIY masih tergolong tinggi walaupun mengalami penurunan tiap tahunnya. Penurunan tersebut dimulai dari angka 256 di tahun 2012 dan terakhir sejumlah 203 pada tahun 2016. Berbagai unjuk rasa yang selama ini terjadi di DIY relatif dapat berjalan tertib sehingga tidak sampai menimbulkan berbagai kerugian sebagaimana terjadi pada peristiwa-peristiwa demonstrasi besar yang terjadi di Indonesia.
- **Angka penyalahgunaan narkoba yang cukup besar.**  
Tahun 2014 jumlah pengguna dan penyalahgunaan narkoba di DIY sebanyak 62.028 orang, dan pada 2016 sebanyak 60.182 orang. Meskipun peringkatnya turun dari posisi lima besar provinsi dengan kasus penyalahgunaan narkoba terbesar di Indonesia, BNN masih

menetapkan DIY sebagai daerah darurat Narkoba. Pada 2016 BNN mencatat pertambahan sekitar 36.000 pecandu baru di wilayah DIY. Dari jumlah tersebut ditemukan 120 kasus narkoba dilakukan mahasiswa dan pelajar. Tambahan pecandu baru itu menempatkan DIY sebagai provinsi kedelapan dengan kasus penyalahgunaan narkoba tertinggi di Indonesia. Berdasarkan Statistik Politik dan Keamanan BPS DIY tahun 2016, pada tahun 2015, 8% dari jumlah desa di DIY sudah terjadi kasus penyalahgunaan narkoba.

#### **IV.6.2.1.6 Urusan Sosial**

- **Penyelenggaraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Keluarga**

Berdasarkan data PMKS tahun 2012 – 2016, terdapat kategori yang mengalami penurunan angka, namun masih ada kategori yang capaian angkanya tergolong meningkat dan fluktuatif, antara lain anak berhadapan dengan hukum, anak jalanan, lanjut usia terlantar, pemulung, orang dengan HIV dan AIDS, perempuan rawan sosial ekonomi serta keluarga bermasalah sosial psikologis. Sedangkan jenis PMKS yang mengalami peningkatan terutama dari tahun 2014 ke 2016 antara lain penyandang disabilitas menjadi 26.177 orang, tuna susila menjadi 385 orang, gelandangan menjadi 171 orang, dan korban tidak kekerasan menjadi 7.335 orang.

#### **IV.6.2.1.7 Urusan Ketenagakerjaan**

- **Meningkatnya angka pengangguran terdidik**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi terjadi pada Angkatan Kerja dengan tingkat pendidikan SMA sebesar 7,64% diikuti universitas 3,43% dan SMK 1,98%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengangguran adalah pengangguran terdidik dengan tingkat pendidikan minimal SMA/SMK ke atas. Sedangkan TPT terendah terjadi pada angkatan kerja dengan tingkat pendidikan tertinggi SD kebawah sebesar 0,48% dan tingkat pendidikan SMP sebesar 1,29%. Pada sektor formal lebih sulit dimasuki oleh para angkatan kerja karena lebih banyak menggunakan keahlian atau syarat-syarat tertentu dibandingkan sektor non formal. Pengangguran terdidik akan berusaha mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan ijazah ataupun keahlian yang dimiliki.

- **Tidak seimbangnya jumlah kesempatan kerja dengan jumlah angkatan kerja.**

Rendahnya kesempatan kerja berbanding terbalik dengan bertambahnya jumlah angkatan kerja tiap tahunnya. Hal ini menimbulkan permasalahan baru pada penambahan jumlah pengangguran di DIY. Akibatnya banyak pengangguran yang dapat memicu penambahan daftar permasalahan kemiskinan DIY.

- **Kurangnya upaya untuk menciptakan lapangan kerja baru.**

Tingginya angka pengangguran terbuka di DIY mengindikasikan bahwa upaya untuk menciptakan lapangan kerja secara mandiri masih sangat rendah.

- **Belum optimalnya fungsi harmonisasi hubungan industrial di DIY.** Banyaknya pemutusan hubungan kerja secara sepihak dari pihak perusahaan terhadap masyarakat lokal DIY membuat para tenaga kerja ini kehilangan mata pencaharian mereka sehingga akibatnya jumlah pengangguran di DIY juga akan bertambah.

#### **IV.6.2.1.8 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- **Capaian IPG dan IDG yang belum optimal.**

Berdasarkan data Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2016, capaian IPG terus mengalami peningkatan dan termasuk dalam lima provinsi teratas ranking IPG di seluruh Indonesia, namun peringkat ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu dari peringkat 3 menjadi 4. Selain itu capaian angka IDG pada tahun 2015 masih berada di peringkat 14 dari seluruh provinsi di Indonesia serta di bawah angka IDG Indonesia yang sebesar 70,83.

- **Belum terwujudnya komitmen partisipasi perempuan di legislatif**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Pemilu Legislatif) mewajibkan terselenggaranya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dengan kuota sebesar 30%. Dalam faktanya, baik DPRD DIY maupun DPRD Kabupaten/kota masih belum mencapai kuota tersebut. Pada Pemilu 2014, rasio tertinggi keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif terjadi di Kota Yogyakarta, yakni sebesar 25%. Sementara, rata-rata rasio keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif di DIY berada pada angka 16.7%.

- **Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang belum optimal.**

Pada tahun 2014, terdapat 1371 kasus baru korban kekerasan yang ditangani, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 sebanyak 1509 korban. Dari jumlah tersebut, 855 adalah kasus kekerasan terhadap perempuan, dan 455 kasus adalah kasus kekerasan terhadap anak. Mayoritas kasus kekerasan tersebut dilakukan dalam lingkungan rumah tangga sebanyak 850 kasus. Fakta ini memperlihatkan bahwa pelaku kekerasan cenderung berasal dari lingkungan terdekat korban. Temuan ini diperkuat dengan data bahwa 144 tindak kekerasan tersebut dilakukan oleh pasangan dan 51 tindak kekerasan dilakukan oleh keluarga.

#### **IV.6.2.1.9 Urusan Pangan**

- **Belum adanya upaya pemerataan pemanfaatan hasil produksi pangan pada musim panen dan *paceklik***

Ketersediaan bahan pangan di DIY bersifat musiman menyebabkan ketidakseimbangan kondisi pangan pada musim panen raya dan paceklik. Bahan pangan melimpah pada bulan Januari hingga Juli, sementara itu ketersediaan bahan pangan tidak mencukupi kebutuhan masyarakat pada bulan Agustus hingga Desember.

- **Ketergantungan masyarakat dalam konsumsi beras cukup tinggi**

Konsumsi beras yang cukup tinggi menyebabkan bertambahnya nilai impor beras dan karbohidrat lainnya. Bertambahnya nilai impor juga disebabkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk DIY yang semakin meningkat, Faktor lain penyebab impor beras adalah hasil produksi berfluktuasi akibat ketidakpastian kondisi iklim di DIY. Impor merupakan salah satu cara DIY untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Berdasarkan data BPS, terjadi penurunan produksi pada tahun 2013 dan 2014, kemudian meningkat pada tahun 2015 dan kembali turun cukup signifikan pada tahun 2016.

- **Belum optimalnya nilai PPH (Pola Pangan Harapan) masyarakat DIY**  
Skor PPH tahun 2012-2016 cenderung dalam kondisi meningkat. Namun nilai konsumsi beberapa kelompok bahan pangan (misal buah dan sayur) masih berada di bawah standar yang telah ditentukan.
- **Masih terdapat desa rawan pangan di DIY**  
Pada akhir tahun 2016 ada 16 desa rawan pangan yaitu 3 desa di Kabupaten Bantul, 7 desa di Kabupaten Gunungkidul, dan 6 desa di Kabupaten Kulon Progo. Adanya kerawanan pangan ini disebabkan oleh rendahnya aksesibilitas, terbatasnya ketersediaan dan pemanfaatan pangan karena akibat kemiskinan masyarakat.
- **Rendahnya pengawasan pangan yang beredar**  
Kondisi pangan yang beredar di masyarakat masih banyak yang belum terjamin mutu dan keamanannya, antara lain masih beredarnya makanan yang mengandung zat kimia berbahaya. Peredaran makanan berformalin, makanan yang mengandung boraks, penggunaan bahan warna tekstil pada makanan, pengawet makanan yang berlebihan, isu beras plastik, dan bahan pangan lain palsu menambah keresahan masyarakat sehingga diperlukan adanya kontrol dari pemerintah dalam penanganan masalah ini.
- **Minimnya jumlah penyuluh pertanian**  
Jumlah penyuluh pertanian PNS yang tersedia masih belum mencukupi kebutuhan sesuai UU 16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian walaupun sudah didukung penyuluh THL (Tenaga Harian Lepas) dan penyuluh swadaya/mandiri. Perlu peningkatan kualitas tenaga penyuluh melalui pelatihan-pelatihan tambahan agar para penyuluh dapat meningkat kapasitasnya.
- **Belum sinergisnya peran lintas sektor dalam pembangunan ketahanan pangan**  
Peran lintas sektor pembangunan ketahanan pangan belum berjalan optimal sehingga diperlukan koordinasi terpadu agar tercipta sinergitas antar sektor. Sinergi lintas ini selanjutnya perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik agar tujuan pembangunan ketahanan pangan dapat dicapai.

#### **IV.6.2.1.10 Urusan Pertanian**

DIY sebagai daerah otonom melaksanakan urusan wajib pertanahan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya. Selain kedudukan sebagai daerah otonom, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, Pemda DIY juga berkedudukan sebagai daerah istimewa dimana Urusan Pertanian menjadi salah satu urusan yang diamanahkan sebagai urusan keistimewaan. Secara umum permasalahan sektor pertanahan di DIY tidak dapat dilepaskan dari persoalan perkembangan wilayah dan adanya keistimewaan urusan pertanahan.

Permasalahan yang bersifat umum dan terkait dengan masyarakat luas adalah:

- a. Tingginya alih fungsi penggunaan tanah pertanian ke non pertanian
- b. Tingginya fragmentasi tanah-tanah pertanian
- c. Tidak terkendalinya harga tanah
- d. Belum semua bidang-bidang tanah terdaftar
- e. Belum adanya sistem informasi pertanahan berbasis bidang bidang tanah

f. Masih terjadinya sengketa dan konflik pertanahan.

Permasalahan terkait penyelenggaraan keistimewaan urusan pertanahan dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) permasalahan, meliputi permasalahan fisik, sosial, budaya dan permasalahan yuridis.

a. Permasalahan Fisik

- batas fisik tanah keistimewaan belum sepenuhnya dapat diidentifikasi secara jelas;
- belum adanya peta objek dan subjek serta pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pemanfaatan tanah keistimewaan
- sebagian tanah keistimewaan adalah tanah-tanah marjinal.

b. Permasalahan Sosial

- sebagian besar SG/PAG sudah dimanfaatkan oleh subjek hak, baik pemerintah, TNI, POLRI, badan hukum, desa dan masyarakat
- belum adanya persepsi yang sama terhadap keberadaan tanah keistimewaan oleh stakeholder yang berkepentingan
- upaya inventarisasi dan identifikasi tanah keistimewaan, diinterpretasikan sebagai upaya menarik kembali tanah-tanah SG/PAG ke Kasultanan dan Kadipaten.

c. Permasalahan Budaya

Permasalahan budaya berkenaan dengan nilai-nilai dasar keistimewaan tampaknya belum terinternalisasi secara baik ketika masih beragamnya persepsi masyarakat terhadap tanah keistimewaan. Pengakuan eksistensi budaya kraton dan kadipaten berproses secara dinamis, sehingga pemaknaannya menjadi berkembang dan memungkinkan munculnya berbagai perbedaan persepsional antar pemangku kepentingan. Perbedaan persepsi ini perlu mendapatkan perhatian agar tetap berkontribusi dalam meneguhkan keistimewaan DIY.

d. Permasalahan Yuridis

- belum adanya definisi yang jelas dan operasional tentang tanah keistimewaan, terutama tanah bukan keprabon
- terdapatnya tanah keistimewaan yang sudah diberikan hak kepada subjek hak berdasarkan UUPA, yang secara legal formal terpenuhi segala persyaratannya;
- terbitnya UU Keistimewaan tidak serta merta membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan terhadap SG/PAG yang pada saat perbuatan hukum itu dilakukan dianggap sebagai tanah negara belum sinkronnya tafsir terhadap Tanah Desa, antara UU Keistimewaan dengan UU Desa.

#### **IV.6.2.1.11 Urusan Lingkungan Hidup**

##### **• Pencemaran air**

Berdasarkan data Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) DIY tahun 2013-2015, 10 sungai di DIY statusnya tercemar. Sebanyak 5 sungai mengalami peningkatan dan 5 sungai mengalami penurunan kualitas air sungai. Pencemaran air sungai disebabkan pembuangan limbah rumah tangga, peternakan, dan UMKM. Pada kualitas air tanah, berdasarkan pengujian 68 sampel air sumur, terdapat 1 sampel yang tidak memenuhi baku mutu kekeruhan, 5 sampel tidak memenuhi baku mutu kandungan mangaan, dan 22

sampel tidak memenuhi baku mutu kandungan total *coliform*. Sebesar 41,17% sampel air tanah yang ada di DIY telah tercemar. Berdasarkan pemantauan kualitas air laut dengan 11 sampel, rata-rata kualitas air laut tidak sesuai standar baku mutu air laut.

- **Konversi lahan pertanian dan kehutanan menjadi lahan terbangun**

Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan lahan permukiman meningkat. Konversi lahan pertanian terjadi di daerah pinggiran Kota Yogyakarta khususnya di wilayah Kabupaten Sleman. Hal ini menyebabkan penurunan produksi pertanian yang mengancam ketahanan pangan. Konversi lahan hutan di daerah resapan air mengakibatkan penurunan ketersediaan air.

- **Bencana alam**

DIY memiliki wilayah yang berpotensi mengalami bencana alam yang beragam. Di antaranya Gunung Api Merapi, banjir lahar akibat luapan material Gunung Api Merapi yang terjadi di sepanjang Sungai Code dan Sungai Opak, tanah longsor dan erosi linier yang terjadi di perbukitan jalur Batur Agung dan Pegunungan Kulon Progo. Wilayah pegunungan kapur Gunung Sewu berpotensi sebagai daerah rawan erosi berat dan daerah perbukitan monoklinal pada Formasi Sentolo rawan erosi sedang. Daerah dataran rendah bagian selatan dari Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul memiliki potensi rawan banjir. Kabupaten Bantul memiliki potensi terjadi gempa bumi. Dan untuk wilayah pesisir DIY berpotensi terjadi tsunami.

Intensitas bencana yang meningkat dalam kurun waktu tahun 2014-2016 adalah bencana hidrometeorologi yaitu banjir, kekeringan, tanah longsor dan angin puting beliung.

- **Pencemaran udara di perkotaan**

Pencemaran udara di perkotaan diakibatkan oleh meningkatnya volume lalu lintas kendaraan. Peningkatan polutan udara seperti CO, NO<sub>2</sub>, HC dan partikel lainnya terjadi karena penambahan pemakaian kendaraan bermotor dan kemacetan lalu lintas di jam puncak kesibukan serta di pusat-pusat aktivitas penduduk. Meskipun berdasarkan data yang didapat dari SLHD DIY tahun 2014-2016 kualitas udara di DIY di bawah nilai baku mutu pencemaran.

- **Pembangunan pusat kegiatan dan berkurangnya RTH di wilayah DIY.**

Pembangunan hotel berbintang, pusat perbelanjaan, dan apartemen di wilayah DIY khususnya di Kota Yogyakarta dapat menyebabkan permasalahan lingkungan. Permasalahan yang terjadi berupa menurunnya kualitas air tanah dan kemacetan lalu lintas sehingga terjadi pencemaran udara serta berkurangnya RTH.

- **Konversi Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi lahan permukiman**

Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan permintaan lahan meningkat, sehingga wilayah DAS dijadikan sebagai lahan permukiman untuk memenuhi permintaan akan lahan. Hal ini menyebabkan terjadinya degradasi sungai, seperti pencemaran sungai, kenaikan debit air pada musim penghujan karena tingginya sedimentasi dan yang paling mencolok adalah munculnya kawasan permukiman kumuh dan berbagai permasalahan lingkungan.

- **Kegiatan penambangan.**

Kegiatan penambangan terjadi di kawasan karst di Kabupaten Gunungkidul, padahal kawasan ini merupakan kawasan lindung geologi yang harus diawasi aktivitas penggunaannya. Apabila tidak dilakukan pengawasan dan pengendalian dapat merusak ekosistem kawasan karst tersebut.

#### **IV.6.2.1.12 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

- **Kepemilikan Akta**

Kepemilikan dokumen kependudukan (terutama akta kelahiran, akta kematian, dan akta perkawinan) oleh penduduk, terutama pada keluarga miskin, masih rendah. Berdasarkan data SIAK (sistem informasi administrasi kependudukan) tahun 2016, meskipun cakupan kepemilikan akta kelahiran anak di DIY terus meningkat namun masih terdapat 176.794 anak yang belum memiliki akta kelahiran atau sekitar 19,03% dari total jumlah anak. Penyebab dari masalah ini antara lain ketiadaan biaya pengurusan akta, kurangnya pemahaman warga dan kurangnya sosialisasi oleh pemerintah.

#### **IV.6.2.1.13 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

- **Belum terdapatnya adanya data tunggal rumah tangga miskin**

Tidak adanya data tunggal rumah tangga miskin mengakibatkan masing-masing sektor dan lembaga memiliki sasaran penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang berbeda-beda. Perbedaan sasaran ini yang menyebabkan penanggulangan kemiskinan kurang berjalan optimal.

- **Ego sektoral dalam penyusunan dan pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat.**

Ego masing-masing sektor dalam penyusunan program-program pemberdayaan masyarakat ini menyebabkan pembiayaan yang dikeluarkan untuk setiap program dan kegiatannya menjadi lebih tinggi tidak efisien dan kurang optimal.

- **Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program pemberdayaan masyarakat**

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat. Supaya bantuan tepat sasaran dan diterima utuh, diperlukan partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program. Partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan khususnya terkait kesadaran bahwa konsep pemberdayaan masyarakat memerlukan partisipasi masyarakat secara langsung. Pemberdayaan masyarakat merupakan tanggung jawab masyarakat.

- **Kapasitas dan peran kelembagaan pemberdayaan masyarakat masih relatif rendah.**

Peran kelembagaan masyarakat dirasakan masih belum optimal selama ini. Perangkat kelembagaan masyarakat dari tingkat Rukun Tetangga hingga Desa belum dioptimalkan untuk turut ambil bagian dalam program pemberdayaan masyarakat. Pelibatan kelembagaan masyarakat diperlukan untuk memperkuat proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pemberdayaan masyarakat. Selain pelibatan kelembagaan sosial-pemerintahan lokal, kelembagaan ekonomi dan keuangan masyarakat pedesaan juga perlu ditingkatkan. Lemahnya lembaga ekonomi dan keuangan

desa akan berdampak pada lemahnya kekuatan ekonomi dan keuangan masyarakat pedesaan. Kemandirian masyarakat dan desa juga akan sulit diwujudkan.

#### **IV.6.2.1.14 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana**

- **Ketahanan Keluarga**

Rapuhnya ketahanan penyebab berbagai permasalahan keluarga seperti kasus perceraian dan KDRT. Pada tahun 2016 data menunjukkan bahwa rumah tangga sebagai tempat kejadian tertinggi dari kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yakni sebesar 63,55% . Oleh sebab itu, peningkatan ketahanan keluarga dinilai sebagai upaya yang penting untuk dilakukan.

- **Distribusi Penduduk yang Tidak Merata**

Permasalahan kependudukan yang masih belum terselesaikan di DIY adalah terkait dengan persebaran atau distribusi penduduk. Terkonsentrasinya penduduk DIY di Kota Yogyakarta menjadikan permasalahan tersendiri di wilayah kota. Salah satu penyebab dari permasalahan ini adalah tingginya arus migrasi ke Kota Yogyakarta baik yang berasal dari kawasan DIY sendiri maupun dari luar DIY.

- **Perubahan Komposisi Penduduk**

Berdasarkan proyeksi penduduk periode 2010-2035 yang disusun oleh BPS, penduduk usia muda (<15 tahun) atau penduduk yang belum produktif akan semakin menurun jumlahnya dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 jumlahnya tercatat sekitar 22,1% dari total keseluruhan penduduk dan diproyeksikan mengalami penurunan yang signifikan hingga mencapai 18,6% pada tahun 2035. Selain masalah tersebut, terdapat pula peningkatan jumlah penduduk usia lanjut (65 ke atas) yang pada 2010 tercatat sekitar 9,3% dan akan meningkat pada kisaran 14,0 pada tahun 2035. Menurunnya jumlah penduduk usia muda dan usia produktif serta meningkatnya penduduk usia lanjut berdampak pada peningkatan angka *Dependency Ratio*. Menurut hasil proyeksi, *Dependency Ratio* di DIY menurun dan mencapai angka terendah pada tahun 2015 yaitu 44,9. Sedangkan pada tahun 2018 – 2035 kenaikan angka ketergantungan yang tajam akan terjadi hingga mencapai 48,4 pada tahun 2035.

- **Tingginya Jumlah Pasangan Usia Subur yang Tidak Ber-KB (Kelompok *Unmet Need*)**

*Unmet need* adalah perempuan berstatus menikah yang kebutuhan pelayanan KB-nya tidak terpenuhi. Secara umum Kabupaten/Kota di DIY mengalami peningkatan nilai *Unmet Need* pada tahun 2014 – 2015, dimana peningkatan paling tinggi terdapat di Kabupaten Gunungkidul yaitu 7,1% pada tahun 2014 menjadi 8,27 pada tahun 2015. Hanya Kabupaten Bantul yang mengalami penurunan nilai *unmet need*. Dibutuhkan upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini karena *unmet need* berkorelasi dengan Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD) yang pada level tertentu dapat mendorong peningkatan angka kematian ibu khususnya yang disebabkan oleh praktik aborsi yang tidak aman.

#### **IV.6.2.1.15 Urusan Perhubungan**

- **Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan kepadatan lalu lintas**

Jumlah kepemilikan kendaraan bermotor dari tahun-ketahun terus meningkat yang tidak didukung pula dengan peningkatan kapasitas jalan khususnya pada ruas-ruas jalan di

perkotaan. Pajak kendaraan bermotor masih menjadi pendapatan asli daerah yang utama sedangkan penerapan manajemen lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum massal belum optimal sebagai penyeimbang atau pengendali kondisi lalu lintas .

Pelayanan angkutan umum di DIY masih terkonsentrasi di pusat kota dan belum mampu untuk mendukung aktivitas masyarakat sampai ke wilayah pedesaan. Belum adanya integrasi antara transportasi pedesaan dengan angkutan utama di kota, hal tersebut memicu penggunaan kendaraan pribadi yang memiliki fleksibilitas dalam operasional dan lebih efisien dari segi waktu.

- **Keberadaan Bandara Baru**

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandara Udara Baru Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu segera disiapkan program-program strategis yang mendukung keberadaan bandara baru tersebut. Diperkirakan sekitar 14 juta penumpang per tahun tahap 1 di tahun 2019 dan 25 juta penumpang pertahun tahap 2 di tahun 2036 akan dilayani oleh Bandara Baru, kondisi tersebut harus diantisipasi dengan penyediaan sarana prasarana transportasi yang memadai sebagai bagian dari penyediaan mobilisasi baik orang maupun barang untuk menuju dari dan ke bandara baru.

Berdasarkan data tahun 2011-2015, jumlah pesawat datang di Bandara Adisucipto mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2013, kemudian turun di tahun 2014 dan naik kembali di tahun 2015. Selain penumpang, jumlah pengiriman barang melalui paket pos atau cargo dengan menggunakan pesawat juga mengalami peningkatan, sehingga hal ini merupakan potensi untuk meningkatkan jasa di bidang angkutan barang.

#### **IV.6.2.1.16 Urusan Komunikasi dan Informatika**

##### **1) Akselerasi Jogja Smart Province**

Pemerintah Daerah DIY dalam rangka pengembangan e-government telah menyusun Pergub No. 42 Tahun 2006 tentang Blueprint Jogja Cyber Province dengan konsep Digital Government Services (DGS), yang pada tahun 2011 juga telah dilakukan updating Blueprint Jogja Cyber Province. Sampai dengan akhir tahun 2016, telah diselesaikan 13 (tiga belas) dokumen bidang unggulan dari target akhir di tahun 2017 sebanyak 14 (empat belas) dokumen Blueprint DGS. Permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam akselerasi Jogja Smart Province adalah integrasi berbagai interface pelayanan publik, diantaranya layanan transportasi publik, parkir, pengurai macet, integrasi informasi layanan inter-moda, informasi kuliner, serta layanan keamanan dengan CCTV.

#### **IV.6.2.1.17 Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**

- **Rendahnya daya saing koperasi dibanding pelaku usaha non koperasi.** Daya saing sangat dibutuhkan agar produk yang ditawarkan oleh koperasi sesuai dengan keinginan konsumen. Salah satu indikasi rendahnya daya saing koperasi disebabkan masih kurangnya inovasi dalam pembuatan produk-produk yang dihasilkan.

- **Rendahnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia.**  
Kapasitas dan kompetensi para anggota koperasi perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan produktivitas dan jenis usaha. Kompetensi ini juga berkaitan erat dengan kemampuan untuk menambahkan inovasi-inovasi baru pada kualitas promosi agar mampu meningkatkan daya saing usaha.
- **Rendahnya partisipasi anggota dalam pengembangan koperasi.** Partisipasi merupakan hal penting dalam pengembangan sebuah koperasi. Tanpa adanya partisipasi dari para anggotanya, maka pengembangan koperasi tidak akan berjalan secara optimal.
- **Masih adanya koperasi yang tidak aktif.**  
Jumlah koperasi yang terdaftar di DIY cukup banyak, namun masih ada koperasi yang tidak aktif. Tahun 2016 masih 311 unit koperasi aktif. Koperasi yang tidak aktif dapat disebabkan antara lain lemahnya pengelolaan koperasi oleh pengurus, kondisi keuangan koperasi yang tidak sehat hingga permasalahan perputaran usaha koperasi yang kurang optimal penerimaan labanya.
- **Masih rendahnya skala usaha ekonomi lokal**  
Berdasarkan Sensus Ekonomi tahun 2016 sekitar 98,4 persen dari total usaha/perusahaan di DIY adalah skala usaha mikro dan kecil. Usaha mikro dan kecil memberikan lapangan pekerjaan yang cukup besar. Namun di sisi lain, skala usaha mikro dan kecil tersebut harus dinaikan skala usahanya. Usaha menengah dan besar masih terkonsentrasi di wilayah Sleman dan Yogyakarta. Lebih lanjut, secara makro kinerja perekonomian di kedua wilayah ini mampu tumbuh lebih optimal dibandingkan dengan wilayah lain. Faktor utama yang menyebabkan masih rendahnya skala usaha adalah rendahnya kualitas SDM yang menghambat peningkatan produktivitasnya. Selain itu ketersediaan faktor produksi seperti modal dan peralatan juga sangat menentukan keberhasilan pembangunan UKM.

#### IV.6.2.1.18 Urusan Penanaman Modal

- **Pendataan investasi di DIY**  
Jumlah investasi formal (berizin) perlu diperbarui untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi, sehingga diperlukan sinkronisasi data tingkat Kabupaten Kota.
- **Pertumbuhan ekonomi masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga** Penggerak pertumbuhan ekonomi masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga Berdasarkan data BPS, selama 2012-2016, rata-rata pertumbuhan PMTB sebesar 12,15% lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan PDRB DIY sebesar 5,16%. Ekonomi yang digerakkan oleh konsumsi pada umumnya akan lebih rapuh dibanding digerakkan investasi. Hal ini dikarenakan investasi tidak hanya menghasilkan *multiplier effect*, tetapi juga penyerapan tenaga kerja.
- **Rendahnya Porsi Investasi Formal**  
Data investasi yang tercatat di BKPM DIY, hanya 5% dari PMTB. Ini berarti investasi DIY didominasi oleh sektor informal. Jika dilihat dari *multiplier effect*, sebetulnya tidak ada masalah dengan sektor informal. Namun demikian, jika sektor informal terlalu dominan, maka akan muncul persoalan terkait dengan:
  - a. Pajak karena belum ada ketentuan jelas bagaimana menarik pajak di sektor informal
  - b. Keteraturan ruang menjadi terganggu

- c. Pembinaan menjadi kurang optimal
- d. Pengolahan limbah sulit dikontrol
- **Penyebaran Investasi AntarKabupaten/Kota yang Tidak Merata**  
 Investasi di DIY pada tahun 2016 terkonsentrasi di Kota Yogyakarta sebesar 42,31% dan Kabupaten Sleman sebesar 40,93% dari total seluruh investasi. Sedangkan persentase investasi di tiga Kabupaten lainnya hanya sebesar 8,99% di Kabupaten Kulon Progo, 1,52% di Kabupaten Gunungkidul, dan 6,1% di Kabupaten Bantul. Jika investasi yang merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi masih terkonsentrasi di kedua wilayah ini, maka ketimpangan antar wilayah akan semakin melebar.

#### **IV.6.2.1.19 Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

- **Minimnya sarana olahraga**  
 Sarana olahraga merupakan salah satu bentuk upaya dalam meningkatkan bakat dan prestasi masyarakat di bidang olahraga. Jumlah sarana olahraga di DIY tiap tahunnya tidak mengalami penambahan dari tahun 2012 hingga 2016 yaitu berjumlah 3 unit yang berstandar nasional.
- **Belum optimalnya layanan pendidikan keolahragaan**  
 Jumlah layanan pendidikan keolahragaan di DIY yang minim membuat layanan pendidikan dalam bidang olahraga ini belum dapat berjalan optimal.
- **Belum optimalnya pembudayaan olahraga**  
 Usaha untuk meningkatkan kebiasaan atau budaya olahraga masyarakat perlu dilakukan DIY agar dapat meningkatkan kesehatan masyarakatnya karena gemar berolahraga.
- **Belum optimalnya pengembangan kapasitas/pemberdayaan kaum muda yang berkontribusi pada pembangunan**  
 Hal ini dapat dilihat dari stagnansi karang taruna sebagai barisan pemuda di masing-masing daerah. Jumlah karang taruna dari tahun 2011 hingga 2015 yaitu 440 orang dengan jumlah organisasi sebanyak 50 kelompok. Tidak adanya perubahan jumlah karang taruna mengindikasikan bahwa tidak ada proses pengembangan organisasi di kalangan pemuda.

#### **IV.6.2.1.20 Urusan Statistik**

- **Ketersediaan Data Statistik yang Tidak Tepat Waktu**  
 Data yang dibutuhkan dalam perencanaan belum tersedia tepat waktu sesuai tata kala perencanaan. Sementara itu, beberapa data capaian indikator yang menjadi tolak ukur kinerja Pemerintah Daerah ketersediaannya bergantung pada pihak di luar Pemerintah Daerah.
- **Perbedaan Data Statistik pada Masing – masing Instansi**  
 Urusan statistik di daerah ditangani secara bersama antara BPS, OPD dan instansi serta lembaga terkait lainnya, yang dalam rangka pertanggungjawaban produk data, sering terjadi perbedaan angka atau data. Hal tersebut disebabkan perbedaan definisi data.
- **Terbatasnya SDM statistik profesional dan kompeten sesuai dengan bidang tugasnya**  
 Pengelolaan statistik memerlukan SDM yang kompeten dibidangnya, sehingga produk data yang dihasilkan valid, aktual dan aksesibel.

#### **IV.6.2.1.21 Urusan Kebudayaan**

- **Terancamnya kelestarian cagar budaya dan warisan budaya oleh proses alamiah dan dinamika perkotaan.**

Faktor alamiah dan dinamika perkotaan yang berlangsung sangat cepat telah mengancam dan memperlambat upaya-upaya pemeliharaan dan pengembangan cagar budaya dan warisan budaya di DIY.

- **Belum optimalnya upaya penggalan reaktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya, adat istiadat, bahasa, seni dan tradisi luhur**

Kearifan-keunggulan budaya lokal sebagai basis ketahanan budaya perlu mendapat perhatian serius karena arus informasi, globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dengan dampaknya (baik-buruk) telah memasuki berbagai ranah kehidupan.

- **Sarana prasarana museum dan manajemen museum yang belum memadai sehingga kehadiran museum belum menyentuh masyarakat luas**

Pengembangan museum masih memerlukan strategi yang tepat karena diindikasikan berbagai persoalan yang mengurangi daya tarik dan daya saing museum sebagai tempat tujuan kunjungan yang favorit bagi semua lapisan masyarakat.

- **Kebudayaan lokal belum menjadi pandangan hidup masyarakat, sehingga perlu peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni, adat istiadat dan tradisi, serta kesejarah purbakalaan.**

Internalisasi dan implementasi kecintaan terhadap budaya lokal melalui berbagai model yang sesuai dengan peta karakter masyarakat terkini perlu terus dipupuk.

#### **IV.6.2.1.22 Urusan Perpustakaan**

- **Rendahnya kompetensi pustakawan**

Adanya sertifikasi pustakawan di DIY telah memberi indikator bahwa ada kesadaran untuk meningkatkan kualitas pustakawan sebagai pengelola informasi. Namun dibalik keberhasilan tersebut, jumlah pustakawan yang memiliki sertifikasi masih tergolong rendah.

- **Rendahnya minat baca masyarakat**

Jika dilihat pada level nasional, minat baca masyarakat DIY merupakan yang tertinggi dibanding provinsi lain. Namun demikian, pada tingkat internasional masih terhitung sangat rendah. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, hanya 0,001 %. Artinya, dari 1000 orang Indonesia, Cuma satu orang yang rajin membaca. Berdasarkan iset Central Connecticut State University pada Maret 2016, juga menunjukkan Indonesia pada peringkat kedua dari bawah (peringkat 60 dari 61 negara).

Rendahnya minat baca disebabkan beberapa faktor diantaranya budaya masyarakat yang masih didominasi budaya tutur. Berdasarkan data BPS tahun 2012, masyarakat kita belum menjadikan kegiatan membaca sebagai sumber utama mendapatkan informasi dimana lebih menonton televisi (91,68 %), dan/atau mendengarkan radio (18,57) daripada membaca buku/surat kabar/majalah (17,66%). Selain itu, penggunaan internet saat ini juga sudah menjadi kebutuhan sehingga sedikit banyak mempengaruhi minat baca (132,7 juta orang Indonesia pada 2016 tercatat sebagai pengguna internet).

- **Belum optimalnya pinjam silang antar perpustakaan**

Perpustakaan yang melaksanakan pinjam silang jumlahnya masih terbatas. Hal ini disebabkan karena Kerjasama layanan perpustakaan melalui sistem layanan pinjam silang perpustakaan belum ada koordinasi dan kesepakatan yang lebih baik. Adanya koordinasi dan kesepakatan maka masing-masing perpustakaan mengetahui kebutuhan, kekurangan atau kelebihan, maka untuk saling melengkapi;

#### **IV.6.2.1.23 Urusan Kearsipan**

- **Penyelenggaraan kearsipan dan pemanfaatan arsip yang belum optimal**

Penataan arsip statis dan dinamis belum terlaksana sepenuhnya sebagaimana standarisasi pengelolaan arsip. Selain itu, arsip belum dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat.

#### **IV.6.2.1.24 Urusan Persandian**

- **Jumlah sandiman yang belum optimal**

Permasalahan pengelolaan persandian yang paling utama adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM) sandi yang berkualifikasi ahli sandi yang terbatas. Hal ini terjadi karena regenerasi SDM sandi kurang berjalan dengan baik, minat menjadi SDM sandi yang kurang, dan kualitas calon peserta diklat sandi yang kurang. Hal ini menyebabkan potensi ancaman berupa operasional persandian berhenti atau terganggu sementara.

#### **IV.6.2.2 Urusan Pilihan**

##### **IV.6.2.2.1 Urusan Kelautan dan Perikanan**

- **Masih rendahnya budaya bahari pada masyarakat DIY**

Masyarakat DIY belum mempunyai budaya perikanan dan kelautan (budaya bahari) sebagai nelayan yang kuat karena sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, perlu rekayasa sosial untuk merubah pola pikir (mind set), nilai-nilai, norma, perilaku dan budaya.

- **Pelabuhan Tanjung Adikarto dibutuhkan sebagai klaster pertumbuhan ekonomi**

Penyelesaian dan operasional Pelabuhan Tanjung Adikarto mendesak dibutuhkan sebagai klaster pertumbuhan ekonomi baru bagi DIY dalam rangka upaya optimalisasi pemanfaatan pelabuhan yang telah dibangun.

- **Pemanfaatan kapal INKAMINA (>30GT) masih jauh dari kemampuan dan kapasitasnya**

Nelayan masih belum dapat memanfaatkan kapal yang memiliki GT besar karena keterbatasan pada kemampuan dan kapasitasnya. Kapal 30 GT yang ada belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh nelayan.

- **Belum optimalnya kelembagaan nelayan**

Biaya operasional nelayan untuk melaut cukup tinggi khususnya BBM dan sarana pendingin es untuk distribusi hasil tangkapan yang terbatas dan dalam skala kecil. Akibatnya keuntungan yang didapat oleh nelayan DIY kecil dan tidak sebanding dengan modal yang harus mereka keluarkan. Kelembagaan nelayan yang ada saat ini belum optimal dalam hal pemenuhan kebutuhan pembiayaan operasional melaut.

- **Pembangunan baik Perikanan Tangkap maupun Perikanan Budidaya belum menerapkan prinsip *minabisnis* dan *minaindustri***

Sistem pemberdayaan dan perlindungan meliputi penyuluhan, pelatihan dan pendampingan belum dilaksanakan secara intensif, komprehensif, dan terpadu.

- **Penyediaan kebutuhan ikan DIY masih banyak dipasok dari luar daerah**  
Hasil produksi ikan DIY belum mampu mengimbangi tingkat konsumsi terhadap ikan yang meningkat tiap tahunnya. Tahun 2016, kebutuhan ikan mencapai 106.000 ton namun jumlah produksi sekitar 81.000 ton, sehingga untuk menutupi kekurangan diperlukan tambahan pasokan dari daerah lain.
- **Konsumsi ikan masyarakat DIY relatif rendah dibanding tingkat nasional**  
Berdasarkan hasil analisis angka konsumsi ikan 2010 – 2015 oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, DIY merupakan provinsi dengan pertumbuhan konsumsi ikan terbesar pada tahun 2010-2014 yaitu sebesar 22,28%. Meskipun mengalami peningkatan, tetapi angka konsumsi ikan di DIY masih di bawah nasional yang pada tahun 2016 mencapai 43 kg/kapita/tahun.

#### **IV.6.2.2.2 Urusan Pariwisata**

- **Produk Wisata Berkelas Dunia yang belum berkembang dengan optimal**  
Visi DIY sebagai destinasi pariwisata yang terkemuka memerlukan upaya pengembangan daya tarik wisata baru yang unik dan berkelas dunia. Meskipun dalam 5 tahun terakhir terdapat perkembangan yang positif dalam hal jenis daya tarik wisata (berkembangnya desa-desa wisata, wisata petualangan di lereng Merapi–Kulon Progo, Gunungkidul, serta pantai-pantai baru di kawasan Gunungkidul), namun perkembangan daya tarik wisata baru tersebut belum sepenuhnya seimbang dengan perkembangan segmentasi pasar yang semakin luas dan beragam. Dapat dikatakan pengembangan daya tarik wisata baru yang unik dan berkelas dunia, belum cukup ada stagnasi pengembangan produk wisata untuk kunjungan ke DIY yang masih terpadu pada 3 poros utama yaitu Borobudur, Prambanan dan Kraton Kasultanan - Malioboro Yogyakarta. Untuk mendorong bertumbuhnya produk wisata berkelas dunia, diperlukan pengembangan destinasi yang didukung industri pariwisata yang memiliki keunggulan pelayanan. Pengembangan destinasi semestinya memperhatikan perkembangan pasar wisatawan. Sementara itu, untuk menyiapkan industri pariwisata yang unggul, diperlukan peningkatan kompetensi dan mutu pelayanan.
- **Pengeluaran wisatawan**  
Rata-rata pengeluaran atau belanja wisatawan mengalami peningkatan namun besarannya masih dapat ditingkatkan. Rata-rata belanja wisatawan nusantara Wisatawan nusantara sebesar tahun 2017 sebesar Rp1.889.363,00 atau naik sebesar 22% dibanding tahun 2016 yang sebesar Rp1.547.198,00. Sementara itu, Wisatawan mancanegara sebesar US\$ 828,23 atau naik sebesar 14% dibandingkan tahun 2016 yang sebesar US \$ 721,5. Untuk dapat meningkatkan belanja wisatawan, perlu dilakukan upaya seperti meningkatkan lama menetap, meningkatkan kualitas destinasi dan daya tarik wisata dan meningkatkan variasi dan kualitas produk cinderamata
- **Peningkatan kunjungan wisatawan yang belum optimal**  
Jumlah kunjungan wisatawan di Daya Tarik Wisata (DTW) mengalami kenaikan dari 18.435.445 orang pada tahun 2015 menjadi 19.753.145 orang pada tahun 2016 atau

meningkat sebesar 7%. Peningkatan tersebut belum optimal karena jumlah daya tarik wisata baru di DIY yang tidak banyak mengalami peningkatan, untuk tahun 2016 sebanyak 92 DTW atau hanya bertambah 3 DTW apabila dibandingkan dengan tahun 2015 sebanyak 89 DTW. Selain itu, faktor lain yang berpengaruh adalah pembatasan kegiatan penyelenggaraan Meetings Incentives Conferencing Exhibitions (MICE) di hotel bagi aparat pemerintah.

- **Lama tinggal wisatawan yang cenderung menurun**

Berdasarkan data rata-rata lama menginap tamu asing dan domestik tahun 2012–2016 dapat dilihat bahwa rata-rata lama menginap tamu asing di DIY terus mengalami penurunan. Terdapat peningkatan pada tahun 2014 sebesar 2,27 hari yang juga menjadi nilai tertinggi sejak tahun 2012– 2016. Sedangkan tamu domestik angka rata-rata lama menginap lebih kecil dari pada tamu asing dan secara keseluruhan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan angka rata-rata lama menginap tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 1,9 hari. Hal ini berpengaruh pada pendapatan DIY yang didapatkan dari sektor pariwisata, antara lain karena pola kecenderungan wisatawan memanfaatkan libur pendek akhir pekan (weekend). DIY masih menjadi daerah wisata alternatif setelah Bali, Jakarta, dan Bandung bagi wisatawan mancanegara. Untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan, diperlukan sinergi antara upaya pemasaran dan penyiapan daya tarik wisatawan. Informasi terkait alternatif-alternatif atau produk wisata yang baru harus dapat terkomunikasikan dengan baik kepada calon wisatawan. Dengan demikian, wisatawan memiliki pilihan yang lebih beragam dan memutuskan untuk lebih lama tinggal di DIY.

#### **IV.6.2.2.3 Urusan Pertanian**

- **Keterbatasan Kapasitas SDM Pertanian**

Sensus Pertanian 2013 menunjukkan terjadinya penurunan jumlah rumah tangga pertanian sebesar 13,75% dibandingkan data pada Sensus Pertanian 2003. Selain itu, proporsi sebesar 47,91% merupakan rumah tangga petani dengan kelompok umur di atas 55 tahun yang tingkat pendidikannya relatif rendah. Tingkat produktivitas tenaga kerja sektor pertanian juga merupakan yang terendah bila dibandingkan dengan sektor lainnya (Rp. 24 juta/orang/tahun)

- **Peningkatan NTP pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan peternakan) belum optimal**

Merujuk pada data BPS, NTP DIY sub sektor tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan pada periode 2014-2016 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,31%. Namun, peningkatan tersebut masih belum optimal, karena angka NTP hanya sedikit melampaui angka minimal indikator kesejahteraan petani, yaitu 100. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh produksi maupun kualitas hasil panen sejumlah komoditas, dan peningkatan tingkat konsumsi petani yang dipengaruhi fluktuasi harga barang (bahan makanan, komunikasi, dan transportasi).

- **Peningkatan alih fungsi lahan pertanian ke kegiatan non pertanian**

Alih fungsi lahan pertanian cukup tinggi dikarenakan meningkatnya kebutuhan akan ruang untuk permukiman dan sarana pendukung kehidupan masyarakat. Di sisi lain, upaya

perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan masih belum optimal karena belum ditetapkan lahan dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Berdasarkan data dari BPS, tren penurunan luas lahan pertanian DIY dari tahun 2002 sebesar 58.367 Ha hingga tahun 2016 sebesar 55.425 Ha.

#### IV.6.2.2.4 Urusan Kehutanan

- **Masih terdapat lahan kritis di kawasan hutan**  
Lahan kritis di kawasan hutan tersebar di empat kabupaten di DIY dengan luasan paling besar berada di Gunungkidul ( $\pm 18.000$  ha). Lahan kritis antara lain disebabkan faktor alam, seperti yang terjadi di Gunungkidul, terutama bagian Selatan yang strukturnya didominasi bebatuan kapur
- **Hasil hutan produksi yang dikelola KPH Yogyakarta masih belum optimal**  
Hasil hutan yang dimaksud terutama berkaitan dengan produksi minyak kayu putih, tegakan jati dan tanaman kayu lainnya, serta potensi hasil hutan non kayu. Pengembangan tanaman tersebut mengalami kendala produktivitas yang rendah karena jumlah populasi tegakan yang kurang memadai.
- **Kerusakan hutan**  
Kerusakan hutan yang disebabkan bencana alam, kebakaran hutan, maupun pembalakan liar masih terjadi di kawasan hutan DIY.
- **Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan lain yang tidak berizin**  
Permasalahan pengelolaan hutan meliputi permasalahan pada kawasan hutan serta tekanan sosial masyarakat. Masalah mendasar di kawasan hutan disebabkan ketidakjelasan batas kawasan, sehingga kepastian wilayah kelola juga belum bisa terpenuhi. Di sisi lain, pemanfaatan hutan oleh masyarakat sekitar kawasan untuk keperluan pertanian, permukiman maupun sektor lain di luar kepentingan sektor kehutanan juga menimbulkan tekanan terhadap hutan.

#### IV.6.2.2.5 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional telah ditetapkan target-target Nasional yang didasarkan kepada sasaran Kebijakan Energi Nasional Tahun 2015 – 2050 sebagai berikut.

**Tabel IV-9 Sasaran-sasaran yang diamanatkan dalam kebijakan Energi Nasional Tahun 2015-2050**

No.	Sasaran KEN	Satuan	2015	2020	2025	2050
1	Penyediaan energi primer	MTOE			>400	>1.000
2	Target bauran energi					
	a. EBT	%			>23	>31
	b. Minyak bumi	%			<25	<20
	c. Batu bara	%			>30	>25
	d. Gas bumi	%			>22	>24
3	Penyediaan pembangkit tenaga listrik	GW			>115	>430
4	Rasio elektrifikasi	%	85	100		

No.	Sasaran KEN	Satuan	2015	2020	2025	2050
5	Pemanfaatan energi primer per kapita	TOE			1,4	3,2
6	Pemanfaatan listrik per kapita	KWh			2.500	7.000
7	Elastisitas energi				<1	
8	Penurunan intensitas energi final	%	1 % per tahun			
9	Rasio penggunaan gas rumah tangga	%	85			

Menindaklanjuti Rencana Umum Energi Nasional tersebut maka Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menjabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Umum Energi Daerah yang akan digunakan sebagai acuan untuk penyelenggaraan energi di tingkat daerah. Pemda DIY pada tahun 2018 menargetkan dapat menyelesaikan penyusunan sekaligus penetapan Rencana Umum Energi Daerah DIY.

Kebutuhan tenaga listrik di DIY dipasok dari Perusahaan Listrik Negara Sistem Jawa Madura Bali. Kebutuhan tenaga listrik di DIY diperkirakan mencapai 5,722 GWh pada tahun 2025 dan untuk melayani kebutuhan tersebut, PLN telah merencanakan pengembangan 2 (dua) Gardu Induk baru dengan kapasitas 240 MVA dalam rangka memenuhi target penyediaan sebesar 660 MVA.

Rasio elektrifikasi di DIY pada tahun 2016 tercatat sebesar 88,66%. Dalam rangka mencapai target KEN dan RUEN yakni rasio elektrifikasi sebesar 100% pada tahun 2020 maka perlu upaya penyediaan listrik berupa pembangunan jaringan listrik perdesaan dan bantuan sambungan rumah bagi masyarakat kurang mampu.

Potensi energi baru terbarukan yang ada di DIY cukup terbatas dan beberapa sudah terbangun untuk menghasilkan tenaga listrik dalam skala kecil. Mempertimbangkan kondisi tersebut Pemda DIY akan mengoptimalkan pengembangan energi skala kecil dari potensi yang tersedia untuk meningkatkan target bauran energi bersumber dari EBT.

Elastisitas energi di DIY masih di atas 1. Bahkan di tahun 2016 nilai elastisitas energi di DIY sangat tinggi yaitu 1,7. Artinya konsumsi energi lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi atau boros energi. Dalam upaya mencapai target KEN dan RUEN yakni elastisitas energi di bawah 1 pada tahun 2025, penghematan energi harus dilakukan dan dapat dicapai dengan penggunaan energi secara efisien di mana manfaat yang sama diperoleh dengan menggunakan energi lebih sedikit, ataupun dengan mengurangi konsumsi dan kegiatan yang menggunakan energi. Konservasi energi di DIY khususnya energi listrik belum dilakukan dilakukan secara optimal. Belum optimalnya konservasi energi dapat terlihat dari konsumsi energi listrik di DIY, di mana sektor rumah tangga menjadi konsumen terbesar, yaitu 1.466,53 GWH di tahun 2016. Hal ini berdampak pada tingginya elastisitas energi.

#### **IV.6.2.2.6 Urusan Perdagangan**

- **Persaingan usaha sektor perdagangan sangat kompetitif, tidak terkelola, dan memarginalisasi pelaku skala kecil.**

Tingginya persaingan usaha terbukti dari banyaknya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pada tahun 2012-2016 yang mengalami pertumbuhan di berbagai golongan usaha yaitu

pengusaha besar, menengah, kecil dan mikro. Sehingga total jumlah SIUP di DIY pada tahun 2016 sebanyak 48.517 SIUP. Selain SIUP, hal lain yang menunjukkan semakin kompetitifnya persaingan usaha perdagangan adalah peningkatan jumlah pemilik Tanda Daftar Perusahaan (TDP), baik di setiap kabupaten/kota maupun menurut bentuk usaha dengan total TDP sebanyak 52.142 TDP. Pelaku perdagangan usaha kecil berhadapan dengan pelaku usaha ritel modern atau ritel berjejaring. Peningkatan kapasitas pelaku usaha perdagangan lokal khususnya UKM diperlukan terutama dalam aspek manajemen dan kualitas pelayanan terhadap konsumen.

- **Infrastruktur ekspor masih terbatas.**

Ekspor barang ke luar negeri DIY hanya bergantung pada transportasi udara. Padahal transportasi udara memiliki keterbatasan dalam melakukan pengangkutan barang. Untuk transportasi laut yang memiliki kapasitas dan kemampuan lebih baik dalam pengangkutan barang tidak dimiliki oleh DIY. Pada tahun 2015 volume bandara Adisutjipto sebesar 0,6 juta kg atau 1,05 dari volume nasional dengan nilai 6,77 juta US\$ atau 2,79% dari nilai nasional.

#### **IV.6.2.2.7 Urusan Perindustrian**

- **Kurangnya daya saing produk hasil industri**

industri pengolahan skala IKM menghadapi permasalahan daya saing produk dari sisi kualitas, kesesuaian dengan perubahan selera konsumen, persaingan harga produk impor, dan aspek standarisasi dan sertifikasi produk serta perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Secara makro, industri pengolahan mengalami tantangan pelambatan pertumbuhan dengan ditunjukan nilai pertumbuhan sektor tersebut yang lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan PDRB. Rata-rata pertumbuhan sektor industri pengolahan 2012-2016 hanya mencapai 4,46% atau lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan PDRB yang mencapai 5,16%. Pelambatan pertumbuhan sektor industri pengolahan menunjukan masih belum optimalnya nilai tambah dan daya saing produk industri pengolahan

- **Ketergantungan bahan baku/penolong impor**

Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi masih berasal dari luar negeri dan luar daerah, belum bisa memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah.

- **Keterbatasan kemampuan SDM dan teknologi produksi**

Berdasarkan uraian dari urusan ketenagakerjaan dapat diketahui bahwa kualitas SDM di DIY ini masih didominasi oleh masyarakat dengan skill rendah atau lulusan sekolah dasar dengan proporsi paling besar. Faktor lainnya adalah kurangnya kemampuan dalam mengoperasikan mesin yang sudah *High technology*.

- **Belum optimalnya perlindungan dan pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual**

Sistem perlindungan HKI yang mencakup merk, desain industri, paten, hak cipta dan indikasi geografis masih belum optimal dimanfaatkan oleh pelaku IKM. Padahal dengan didaftarkanya HKI suatu produk, pelaku IKM memiliki nilai tawar yang lebih dalam persaingan usaha. Terkait dengan merk, Pemda DIY telah memiliki pengaturan pemanfaatan logo *co-branding* 100% Jogja, Jogja Mark dan Jogja Tradition yang dapat dimanfaatkan oleh IKM sebagai identitas produk.

#### **IV.6.2.2.8 Urusan Transmigrasi**

- **Keterbatasan kuota transmigrasi dari pemerintah pusat**  
Berdasarkan data perkembangan dan distribusi transmigran menurut provinsi tujuan, terlihat bahwa minat penduduk dalam melakukan transmigrasi tetap tinggi, namun kuota dari Pemerintah Pusat tidak sesuai atau belum mencukupi dari permohonan DIY.

#### **IV.6.2.3 Urusan Penunjang**

##### **IV.6.2.3.1 Perencanaan**

- **Belum Optimalnya Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah**  
Salah satu prinsip di dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah adalah perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan perencanaan pembangunan nasional, untuk itu harus dilakukan sinkronisasi di dalam perencanaan yang dilakukan pusat daerah. Perubahan waktu dan proses perencanaan di Pusat sangat berpengaruh terhadap perencanaan di daerah. Akibatnya daerah dalam rangka sinkronisasi dengan perencanaan pusat harus menyesuaikan dengan kebijakan pusat tersebut sementara perencanaan di daerah mempunyai kepentingan sendiri dan waktu yang terbatas.
- **Kesenjangan Capaian Sasaran Pembangunan dengan Rencana**  
Pelaksanaan program dan kegiatan selama ini masih terdapat kesenjangan antara hasil dengan rencana sehingga pencapaian sasaran pembangunan yang ditetapkan dengan yang dicapai masih terdapat kesenjangan.

##### **IV.6.2.3.2 Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**

- **Konsistensi penerapan sistem merit dalam manajemen ASN**  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menggeser paradigma manajemen kepegawaian, dari administrasi pegawai ke manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Manajemen ASN dilaksanakan berdasarkan asas “merit” yang menekankan perbandingan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh calon pegawai dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi yang sejalan dengan tata pemerintahan yang baik (good governance). Pegawai ASN pada Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) harus selektif yang betul-betul bisa mendapatkan pejabat yang kompeten dibidangnya. Sistem manajemen ASN diarahkan untuk mendapatkan pejabat ASN yang profesional. Sistem rekrutmen JPT (sebelumnya dikenal dengan istilah Eselon/Struktural) polanya diubah dengan merit system melalui pelamaran, seleksi, dan kontrak kinerja jabatan yang jelas, obyektif, dan transparan sebagaimana telah diamanatkan dalam UU ASN. Pemerintah Daerah DIY memiliki tantangan untuk menjadi pionier (tuladha) penerapan merit system dalam manajemen ASN itu secara konsisten.
- **Adanya Purna Tugas Pejabat Struktural Pemda DIY 2017-2020**  
Dalam rentang tahun 2017-2020 sebanyak 367 pejabat struktural (eselon I sampai dengan eselon IV) yang akan purna tugas. Purna-tugas yang sedemikian besar itu perlu direspon dan diantisipasi dengan penyiapan kader-kader pengganti yang perlu mulai diidentifikasi,

ditemukenali, termasuk dibekali agar siap menggantikan pos-pos jabatan itu dengan lebih mumpuni. Perlu segera dilakukan proses penelusuran melalui assessment atau talent-pool atau talent-scout dan dilanjutkan dengan pembekalan melalui diklat, pemagangan, kursus, dan lain sebagainya untuk meng-upgrade kompetensi dan kapasitas para calon penerus pos struktural Pemda DIY di masa depan tersebut.

#### **IV.6.2.3.3 Urusan Keuangan**

- **Terbatasnya sumber-sumber pendapatan daerah**

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, diatur mengenai penerimaan daerah, yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah memperoleh penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah serta lain-lain penerimaan yang sah.

Pendapatan asli daerah provinsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada pasal 2 disebutkan bahwa jenis-jenis pajak yang dapat dipungut oleh provinsi yang menjadi sumber PAD terdiri dari :

- a. Pajak kendaraan bermotor
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d. Pajak air permukaan
- e. Pajak rokok

Hal ini menjadi faktor penyebab sulitnya mendapatkan alternatif sumber pendapatan yang lain bagi pemerintah daerah karena keterbatasan sumber pajak yang diatur oleh Undang-Undang.

UU Nomor 28/2009 juga mengatur tentang retribusi daerah, yang pada level provinsi diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011, dan kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016. Retribusi daerah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah, namun proporsinya masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan pajak daerah. Pada APBD 2016, proporsi pendapatan dari pajak daerah adalah sekitar 80%, sedangkan dari retribusi daerah hanya sekitar 2%.

- **Kurangnya efektivitas dan efisiensi pengalokasian belanja daerah**

Permasalahan keuangan daerah ada pada sisi pendapatan dan pada sisi belanja. Dengan terbatasnya sumber-sumber pendapatan daerah, maka efektivitas dan efisiensi pengalokasian belanja daerah menjadi isu utama yang harus diselesaikan. Pada APBD DIY 2015 dan 2016, struktur belanja tidak langsung maupun belanja langsung hampir berimbang. Pada APBD 2015, proporsi belanja langsung adalah sebesar 50,7%, dan belanja tidak langsung adalah 49,3%. Pada struktur APBD 2016, proporsi belanja langsung adalah sebesar 50,6%, dan belanja tidak langsung adalah sebesar 49,4%.

#### **IV.6.2.3.4 Urusan Penelitian dan Pengembangan**

- **Kurangnya sinergi sumberdaya penelitian dan pengembangan**

Pemangku kepentingan dalam penelitian dan pengembangan di DIY sangat banyak, namun sinergi diantara para pemangku kelitbang tidak mudah. Masing-masing unit litbang (di Perguruan Tinggi, lembaga think-tank, pemerintah (unit kelitbang

Kementerian/Lembaga yang ada di DIY maupun unit litbang di Pemda) masih berkuat dengan habitusnya sendiri. Jarlitbang (Jaringan Penelitian dan Pengembangan) belum berjalan dengan optimal. Belum ada silang perjumpaan antar-unit litbang yang sinergis untuk menghasilkan benefit hasil penelitian bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

#### **IV.6.2.3.5 Urusan Pengawasan**

- **Pergeseran dari paradigma *watchdog* ke paradigma *consulting* dan *quality assurance***  
Pergeseran peran pengawasan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dari paradigma lama menuju paradigma baru, ditandai dengan perubahan orientasi dan peran yang lebih berorientasi untuk memberikan kepuasan kepada Perangkat Daerah sebagai mitra audit (*customer satisfaction*). APIP tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog* (pengawasan yang berorientasi pada koleksi temuan pemeriksaan), namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi stakeholder. Tantangan dalam pergeseran paradigma pengawasan ini terutama pada peran APIP sebagai katalis berkaitan dengan *quality assurance*, sehingga APIP dapat membimbing manajemen Perangkat Daerah dalam mengenali risiko-risiko yang mengancam pencapaian tujuan Pemerintah Daerah. *Quality assurance* bertujuan untuk meyakinkan bahwa proses kerja yang dijalankan telah menghasilkan manfaat yang dapat berkontribusi dalam pencapaian visi, misi, dan sasaran Pemerintah Daerah.

#### **IV.6.2.3.6 Urusan Sekretariat Daerah**

- **Asimetri kebutuhan bahan kebijakan dengan ketersediaan bahan rumusan kebijakan**  
Dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tinggi memerlukan respon cepat dalam kebijakan. Dalam mendesain kebijakan yang baik dan handal, diperlukan bahan rumusan kebijakan yang berkualitas dan memenuhi aspek *timely manner* (tersedia pada saat dibutuhkan). Hal tersebut masih menjadi tantangan bagi Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah DIY.

#### **IV.6.2.3.7 Urusan Sekretariat DPRD**

- **Kesenjangan kebutuhan fasilitasi DPRD dengan kapasitas fasilitasi Sekretariat DPRD**  
Peran Sekretariat DPRD dalam fasilitasi tugas fungsi DPRD guna mendukung pencapaian prioritas pembangunan DIY melalui penyelesaian Produk Hukum Daerah, Penganggaran dan Pengawasan Dewan yang tepat waktu, belum cukup bisa berjalan dengan baik. Tingginya demand (permintaan) fasilitasi dan dinamika aktivitas DPRD belum seimbang dengan kapasitas fasilitasi yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD. Dinamika politik, dinamika kebijakan Pemerintah Pusat yang berimbas ke Daerah, serta ekspektasi masyarakat yang meningkat terhadap kinerja DPRD menjadi tantangan bagi Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD.

#### **IV.6.2.4 Urusan Keistimewaan**

Dinamika permasalahan pelaksanaan dana keistimewaan dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2013, pada penyelenggaraan kegiatan dengan dais, terdapat permasalahan:
  - PMK turun di Triwulan IV (Bulan November).
  - Fluktuasi rupiah sehingga sebagian pagu tidak mencukupi untuk dilaksanakan.
2. Pada Tahun 2014, pada penyelenggaraan kegiatan dengan dais, terdapat permasalahan:
  - Kekurangan SDM pelaksana pengelola keuangan.
  - Perbedaan persepsi tentang peraturan yang menyebabkan sebagian PA/KPA khawatir terhadap proses PBJ.
3. Pada Tahun 2015, pada penyelenggaraan kegiatan dengan dais, terdapat permasalahan:
  - Kendala Realisasi Hibah.
  - Kendala Rentang Kendali di mana beberapa PA mengampu terlalu banyak KPA.
  - Kegiatan pengadaan lahan banyak terkendala negosiasi dari pemilik yang melebihi harga appraisal.
4. Pada Tahun 2016, pada penyelenggaraan kegiatan dengan dais, terdapat permasalahan:
  - Raperdais (tata ruang) belum selesai dibahas di DPRD sehingga mempengaruhi pelaksanaan urusan tata ruang.
  - Masalah pertanahan yang terkendala faktor teknis regulasi (tanah kas desa).
5. Pada Tahun 2017, pada penyelenggaraan kegiatan dengan dais, terdapat permasalahan:
  - Ketergantungan pada pihak lain yang menyebabkan administrasi pertanahan terhambat.
  - Keterlambatan pembahasan Raperdais kelembagaan karena perlu berkoordinasi dengan Bupati/walikota.
  - Kejelasan lokasi pelantikan Gubernur.

Beberapa dinamika permasalahan tersebut sudah dapat di atasi, sehingga masih menyisakan permasalahan:

1. Ketergantungan pada pihak lain yang menyebabkan administrasi pertanahan terhambat.
2. Keterlambatan pembahasan Raperdais kelembagaan karena perlu berkoordinasi dengan Bupati/walikota.

## **IV.7 Analisis Isu Strategis**

### **IV.7.1 Tingginya Angka Kemiskinan**

DIY mempunyai komitmen untuk menurunkan tingkat kemiskinan dalam rangka mendukung sasaran Tujuan pertama dalam sasaran Global SDGs/TPB dimana Pada Tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. Tingkat kemiskinan pada periode 2010 sampai dengan September 2016 cenderung mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin 2010 sebesar 16,83 persen, turun menjadi 13,02 persen pada Maret 2017. Namun demikian, jika dibandingkan dengan kemiskinan nasional,

tingkat kemiskinan DIY memang masih lebih tinggi. Dalam sasaran pengurangan kemiskinan pada RPJMN 2015-2019, target tingkat kemiskinan DIY tahun 2019 adalah 7%-8%. Dengan kondisi DIY capaian saat ini per September 2017 sebesar 12.36 %, ditarget dalam RAD SDGs/TPB DIY secara bertahap diupayakan diturunkan dengan target per tahun kurang lebih 1% pertahun sehingga diharapkan pada 5 (lima) tahun mendatang Tahun 2022 turun menjadi 7 %.

Jika dilihat perkembangan pengurangan kemiskinan terdapat perbedaan karakter antar Kabupaten/kota. Berdasarkan kajian dari BPS, Kabupaten Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta meskipun memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata provinsi, namun pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata provinsi. Tantangan yang dihadapi pada wilayah ini adalah mendorong pengembangan kegiatan ekonomi di sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. Sementara itu, Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata provinsi namun pengurangan kemiskinan di atas rata-rata provinsi DIY. Tantangan yang harus dihadapi pemerintah daerah adalah menjaga efektivitas dan efisiensi kebijakan dan program pengurangan kemiskinan, dan secara bersamaan mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang. Yang perlu menjadi perhatian adalah wilayah Kulon Progo di mana rata-rata pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata provinsi dan tingkat pengurangan kemiskinannya juga di bawah rata-rata provinsi.

#### **IV.7.2 Tingginya Ketimpangan Wilayah**

Isu strategis terkait Ketimpangan Wilayah mendapatkan perhatian di dalam beberapa tujuan dalam SDGs/TPB. Adapun yang secara khusus berkaitan dengan ketimpangan wilayah adalah tujuan 8 dan Tujuan 10. Tujuan 8 yaitu Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang dan tujuan 10 yaitu Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara. Sasaran dalam tujuan TPB dalam hal ini antara lain yaitu : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita per tahun, tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun, menurunnya koefisien gini, dan menurun tingkat kemiskinan.

Ketimpangan wilayah terjadi karena kegiatan ekonomi di DIY masih terpusat di wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Nilai PDRB kedua wilayah ini mencapai 60% dari total PDRB DIY. Sementara itu, Kulon Progo dan Gunungkidul yang mencakup 65 persen dari luas wilayah DIY, pangsa distribusi ekonomi dua wilayah ini terhadap DIY hanya sekitar 21%. Dua wilayah ini letaknya jauh dari pusat kota Yogyakarta dan belum adanya pusat kegiatan ekonomi yang besar di wilayah tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut masih lambat.

Komposisi struktur ekonomi tiap Kabupaten/kota menarik untuk dicermati karena mencerminkan kemampuan daya saing ekonomi. Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul masih mengandalkan sektor pertanian dalam menopang pertumbuhan ekonominya. Sementara itu Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta penggerak utama perekonomian adalah sektor industri pengolahan. Melihat perbedaan karakter tersebut

kebutuhan investasi di Kabupaten/kota, tantangan ke depan adalah bagaimana menumbuhkan investasi secara proporsional dengan memperhitungkan potensi yang dimiliki tiap daerah agar kesenjangan Kabupaten/kota tereliminir.

Ketimpangan di DIY tidak hanya terjadi pada sektor ekonomi saja, tetapi juga terjadi pada sektor-sektor yang lain. Dalam sektor pembangunan bidang sosial, ketimpangan dapat dicerminkan dari perbandingan nilai indeks pembangunan manusia (IPM) dari masing-masing Kabupaten-kota. Seperti halnya dalam kasus ketimpangan ekonomi, dalam hal ketimpangan sosial, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman cenderung memiliki nilai IPM yang lebih tinggi dibandingkan ketiga Kabupaten yang lain. Data perkembangan IPM tahun 2010-2015 menunjukkan bahwa peringkat IPM dari yang tertinggi ke terendah berturut-turut yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul. Penyebab ketimpangan IPM di DIY dipengaruhi kondisi kesejahteraan ekonomi yang masih timpang.

Jika dilihat ketimpangan di dalam masing-masing Kabupaten/kota, angka indeks gini tertinggi adalah Kota Yogyakarta kemudian diikuti oleh Bantul dan Sleman. Terdapat tiga kabupaten dengan angka Gini Rasio di bawah Gini Rasio D.I. Yogyakarta. Ketiganya adalah Kabupaten Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul. Jika dicermati, struktur ekonomi di ketiga kabupaten tersebut masih didominasi oleh Sektor Agraris. Sementara itu, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta yang mempunyai Gini Rasio di atas angka D.I. Yogyakarta masing-masing merupakan wilayah dengan struktur perekonomian yang lebih didominasi oleh sektor industri. Situasi tersebut nampaknya selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Kuznet yang menyatakan bahwa kondisi ketimpangan di wilayah agraris lebih kecil dibandingkan dengan wilayah industri karena rendahnya level penghasilan yang diterima oleh individu di wilayah agraris tersebut.

**Tabel IV-10 Perkembangan Indeks Gini per Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2014-2016**

Kab/Kota	2014	2015	2016
<b>Kulon Progo</b>	0,382	0,367	0,372
<b>Bantul</b>	0,320	0,376	0,397
<b>Gunungkidul</b>	0,296	0,319	0,334
<b>Sleman</b>	0,412	0,446	0,394
<b>Yogyakarta</b>	0,396	0,446	0,429

*sumber: BPS, data diolah*

Rendahnya level penghasilan yang diterima oleh penduduk di kabupaten Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul tersebut terkonfirmasi oleh persentase jumlah penduduk miskinnya. Persentase penduduk miskin di tingkat kabupaten berturut-turut yang tertinggi adalah Kulon Progo, Gunungkidul dan Bantul. Tingkat kemiskinan di Kulon Progo mencapai 20,03%, diikuti oleh Gunungkidul yang mencapai 18,65% dan Bantul 14,07%. Sementara itu, persentase penduduk miskin di kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta berada di bawah rata-rata provinsi dan sudah berada di bawah 10%.

**Tabel IV-11 Persentase Penduduk Miskin per Kabupaten/Kota di DIY (per Maret)**

Kab/Kota	2014	2015	2016
Kulon Progo	21,4	20,3	20,03
Bantul	16,33	14,55	14,07
Gunungkidul	21,73	19,34	18,65
Sleman	9,46	8,21	8,13
Kota Yogyakarta	8,75	7,7	7,64
D.I. Yogyakarta	14,91	13,34	13,02

Sumber: BPS, data diolah

Gambaran kemiskinan tersebut sejalan dengan kinerja perekonomian makro DIY. Dengan menggunakan pendekatan pendapatan perkapita atau PDRB perkapita, tiga kabupaten yang berada di sebelah selatan yaitu Gunungkidul, Bantul dan Kulon Progo relatif tertinggal dibandingkan dengan Sleman dan Kota Yogyakarta. Sebagai contoh, nilai PDRB perkapita Kota Yogyakarta hampir 3,5 kali lebih besar daripada PDRB perkapita Kabupaten Kulon Progo.

**Tabel IV-12 Nilai PDRB Per Kapita menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku, 2012 - 2016 (rupiah)**

Kabupaten/Kota/	2013	2014	2015*)	2016**)
Kulonprogo	16.096.061	17.307.864	18.611.318	19.949.109
Bantul	17.040.684	18.430.369	19.891.904	21.275.441
Gunungkidul	16.467.422	17.741.562	19.291.212	20.737.011
Sleman	24.782.819	26.775.411	29.005.756	31.377.250
Yogyakarta	55.969.623	60.501.060	64.919.752	69.218.903
<b>D I Y</b>	23.623.920	25.526.402	27.573.470	29.589.170

Keterangan: \*\*) Angka sementara

Sumber: BPS, data diolah

### IV.7.3 Pencemaran, Kerusakan Alam, dan Resiko Bencana Alam

Isu terkait lingkungan menjadi isu yang terus dibicarakan mulai dari MDGs sampai dengan adanya SDGs/TPB. Pada MDGs masuk pada tujuan ke-7 (tujuh) terkait lingkungan, namun dalam pelaksanaan aksi pencapaian SDGs/TPB menjadi pilar tersendiri yaitu pilar Lingkungan yang terdiri tujuan ke-6, yaitu: Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, tujuan ke-11, yaitu : Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan, tujuan ke-12, yaitu : Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, tujuan ke-13, yaitu : Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya, tujuan ke-14, yaitu : Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan, dan tujuan ke-15 yaitu : Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

Isu terkait lingkungan hidup mencakup antara lain pencemaran lingkungan (air, udara dan tanah), dampak pembangunan terhadap lingkungan serta ketersediaan sumber daya air. Hasil pemantauan kualitas udara ambien menggunakan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) tahun 2015 menunjukkan bahwa nilai ISPU DIY sebesar 30,5 yang berada dalam kategori relatif sehat/baik. Namun demikian, potensi pencemaran udara di wilayah perkotaan Yogyakarta akan semakin tinggi seiring dengan pesatnya perkembangan jumlah kendaraan bermotor di DIY. Data menunjukkan bahwa untuk pada tahun 2015, kendaraan bermotor khususnya kendaraan roda dua mengalami kenaikan hampir 4 kali lipat dibandingkan jumlah pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 jumlah kendaraan roda dua adalah 361.368 unit dan tahun 2015 naik menjadi 1.233.482 unit. Pencemaran udara terutama terjadi di wilayah perkotaan yang ditunjukkan dengan meningkatnya polutan udara, seperti CO, NO, HC dan partikulat lainnya. Terus meningkatnya jumlah kendaraan bermotor serta kondisi emisi gas buang dari kendaraan angkutan umum di DIY, terutama di Kota Yogyakarta dan sekitarnya, dapat menjadi penyebab memburuknya kualitas udara di ruas-ruas jalan utama, terutama pada saat jam sibuk. Konsentrasi polutan udara terjadi terutama pada titik-titik kemacetan dan pusat-pusat aktivitas penduduk. Kualitas udara sangat relevan dengan angka kesakitan yg bersumber dari pencemaran udara (ISPA, Paru-paru).

Sementara itu, Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air sungai tahun 2015 diketahui bahwa kadar Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Dissolved Oxygen (DO), kadar residu terlarut/Total Dissolved Solid (TDS), dan kandungan bahan kimia lain yang terkandung di air Sungai Tambakbayan, Sungai Oyo, Sungai Kuning, Sungai Konteng, Sungai Belik, Sungai Bedog, Sungai Gadjahwong, Sungai Code, dan Sungai Winongo telah melampaui ambang batas Baku Mutu kualitas air. Nilai BOD di sembilan sungai tersebut hampir seluruhnya telah jauh melebihi ambang batas, baik di daerah hulu, tengah, maupun hilir. Nilai COD sebagian besar sungai juga sudah melampaui ambang batas, namun nilai DO di semua bagian di sembilan sungai masih memenuhi standard baku mutu. Begitu pula untuk parameter TDS (zat padat terlarut), semua sampel air sungai masih berada di bawah baku mutu maksimum yang ditentukan.

Masih terdapat wilayah yang mengalami kekurangan air yang pada akhirnya akan berdampak pada kesehatan dan produktivitas penduduk. Data Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) DIY tahun 2015 menyebutkan bahwa pada tahun 2015, di Kabupaten Gunungkidul terdapat 112 desa yang berpotensi mengalami bencana kekeringan. Kekeringan juga ditemukan di wilayah Kabupaten Sleman dengan luas total wilayah yang mengalami kekeringan seluas 4.135 ha. Kebutuhan air baku untuk kebutuhan domestik, pertanian dan kegiatan industri, infrastruktur strategis seperti pelabuhan, bandara semakin besar sementara volume air hujan relatif tetap setiap tahunnya, sehingga perlu dipersiapkan rencana untuk pemenuhan air baku tersebut. Risiko bencana harus tetap menjadi perhatian dalam pembangunan wilayah. Wilayah rawan bencana telah diidentifikasi. Kawasan rawan bencana gunung berapi di lereng Gunung Merapi, Kabupaten Sleman. Kawasan yang terdampak mencakup hampir seluruh wilayah DIY terutama Kabupaten Sleman bagian utara dan wilayah-wilayah sekitar sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Kawasan rawan bencana tanah longsor di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul. Gerakan tanah/batuan dan erosi berpotensi terjadi pada kawasan lereng pegunungan di Kulon Progo yang mencakup wilayah

Kulon Progo bagian utara dan barat serta pada lereng pegunungan selatan (Baturagung) yang mengancam wilayah Gunungkidul bagian utara dan Kabupaten Bantul bagian timur. Kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo. Banjir terutama berpotensi mengancam daerah pantai selatan Kabupaten Bantul dan Kulon Progo. Kawasan rawan bencana kekeringan di Kabupaten Gunungkidul, Bantul, Sleman dan Kulon Progo. Bahaya kekeringan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Gunungkidul bagian selatan khususnya pada wilayah dengan bentang alam karst. Kawasan rawan bencana angin topan berpotensi terjadi di wilayah pantai selatan Kabupaten Kulon Progo, Bantul dan daerah-daerah di Kabupaten Sleman bagian utara serta wilayah perkotaan Yogyakarta.

Kawasan rawan gempa bumi tektonik berpotensi terjadi karena wilayah DIY berdekatan dengan zona subduksi (kawasan tumbukan antar lempeng) di dasar samudera Indonesia yang berada di sisi selatan DIY. Di samping itu, secara geologi, di wilayah DIY terdapat beberapa sesar yang diduga aktif. Wilayah dataran rendah yang tersusun oleh sedimen lepas, terutama hasil endapan sungai merupakan wilayah yang rentan mengalami goncangan akibat gempabumi. Kawasan rawan bencana tsunami di sepanjang pantai Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul khususnya pada pantai dengan elevasi kurang dari 30 m dari permukaan air laut.

Permasalahan di DIY dalam penanggulangan bencana adalah:

1. Beban kondisi fisik DIY yang rawan bencana (terdapat 12 acaman bencana di 301 desa/kelurahan rawan bencana dari 438 desa/kelurahan se-DIY)
2. Pengarusutamaan PRB (Pengurangan Risiko Bencana) dalam pembangunan masih perlu diterjemahkan secara lebih jelas dalam program kerja masing-masing organisasi perangkat daerah.
3. Kapasitas kelembagaan yang kurang, yaitu masih rendahnya kapasitas dalam pengarusutamaan PRB dalam pembangunan di masing-masing organisasi perangkat daerah serta masih rendahnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dalam pemahaman strategi dan kebijakan pada pra, saat dan setelah bencana.
4. Suprastruktur/budaya penyelenggara pemerintahan dan masyarakat belum pro-Pengurangan Risiko Bencana, paradigma masih didominasi dengan tanggap darurat serta rendahnya pemahaman tentang pentingnya data dan pemanfaatan data.
5. Jejaring potensi penanggulangan bencana belum optimal, koordinasi antara *stakeholder* belum padu di dalam penanggulangan bencana, peran swasta masih di tanggap darurat dan akademisi (kampus) masih lebih dominan dalam posisi sebagai menara gading dalam penanggulangan bencana.

#### **IV.7.4 Belum Optimalnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tingginya Alih Fungsi Lahan Pertanian**

Isu terkait belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan tingginya alih fungsi lahan pertanian di DIY juga telah menjadi isu atau target sasaran dalam tujuan SDGs/TPB, terutama pada tujuan 2 dan tujuan 11. Tujuan ke-2, yaitu. Mengakhiri kelaparan, mencapai

ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan (tujuan 2) dan tujuan 11, yaitu Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan. Adapun sasaran pada tujuan 2, yaitu Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang, hingga akhir tahun 2016, diketahui kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW pada kawasan lindung di DIY sebesar 62,74 %. Sementara itu, kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW pada kawasan budidaya adalah sebesar 66,51 %. Pemanfaatan ruang dalam pelaksanaannya tidak selalu sejalan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Beberapa isu strategis terkait pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang antara lain masih maraknya alih fungsi lahan, yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. Alih fungsi lahan tersebut pada umumnya adalah kawasan pertanian menjadi non pertanian. Alih fungsi lahan pertanian yang tinggi dikarenakan melonjaknya kebutuhan akan ruang untuk permukiman dan sarana pendukung kehidupan masyarakat. Sementara di sisi lain, upaya perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan masih belum optimal dengan belum ditetapkannya lahan dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Pada tahun 2014-2015, lahan pertanian mengalami penurunan dari 76.26 % menjadi 76.04 %. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah untuk mengoptimalkan lahan produktif agar tidak berkurang kemanafaatannya (lahan-lahan produktif harus dilindungi fungsi dan pemanfaatannya melalui program PLP2B).

Berkembangnya lahan terbangun, seperti lahan permukiman, hotel, mal dan apartemen berpotensi mengurangi ruang terbuka hijau terutama di wilayah perkotaan. Dengan berkurangnya lahan terbuka hijau akan mengurangi kemampuan lingkungan untuk mereduksi pencemaran udara sekaligus mengurangi resapan air. Peningkatan lahan terbangun akan meningkatkan koefisien dasar bangunan (KDB) sehingga berpotensi mengakibatkan genangan dan banjir. Urbanisasi (proses perubahan suatu kawasan menjadi kota) juga turut mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di DIY. Berdasarkan data dari BPS, pada tahun 2014-2015 terjadi kenaikan persentase lahan terbangun dari 23.75 % menjadi 23.96 %.

#### **IV.7.5 Penyediaan Infrastruktur Dasar di Kawasan Pesisir Selatan Belum Optimal**

Infrastruktur strategis merupakan prasarana yang digunakan untuk mengembangkan atau menunjang proses perbaikan kondisi di suatu wilayah, yang dalam hal ini, wilayah yang dimaksud adalah kawasan pesisir selatan DIY. Penyediaan infrastruktur strategis di kawasan selatan bertujuan untuk menurunkan ketimpangan antar wilayah terutama pada penurunan penyimpangan PDRB di kawasan selatan terhadap PDRB di kawasan Utara (Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta), serta penurunan angka kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu faktor yang dapat memicu perkembangan wilayah adalah konektivitas. Dengan adanya konektivitas suatu wilayah akan mudah untuk berinteraksi dengan wilayah tersebut maupun antar wilayah lainnya. Konektivitas dapat menghubungkan pusat-pusat sub wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan guna meningkatkan perkembangan wilayah. Adanya konektivitas ini memerlukan dukungan infrastruktur strategis diantaranya jalan, bandara, jalur

kereta api penghubung dan TOD. Infrastruktur jalan dan konektivitas tidak dapat dipisahkan dalam perannya mempengaruhi perkembangan wilayah.

Salah satu penyediaan infrastruktur strategis di kawasan pesisir selatan yaitu Pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Desa Jangkaran, Kec. Temon, Kabupaten Kulonprogo, DIY yang dibangun di atas lahan seluas 587 hektar. Pembangunan NYIA dilatarbelakangi oleh ketidakseimbangan antara supply dan demand dalam hal pemanfaatan infrastruktur bandara eksisting. Daya tampung Bandara Internasional Adi Sucipto sudah terlampaui karena dari sisi jumlah penumpang, pengguna bandara Adi Sucipto tercatat berkisar antara 6 juta orang/tahun yang tentunya lebih besar dibandingkan kapasitas ideal bandara Adi Sucipto yakni 1,2 juta orang/tahun. Pemilihan lokasi di Kec. Temon, Kabupaten Kulon Progo disebabkan wilayah tersebut paling memenuhi syarat pembangunan bandara baru di antaranya dekat dengan area laut, juga tak jauh dari lintasan kereta api yang selama ini masih aktif digunakan. Pembangunan bandara di Kabupaten Kulon Progo juga diharapkan dapat menarik minat calon pengguna baru yang terutama berasal dari Karesidenan Kedu, Jawa Tengah.

Dengan adanya pembangunan bandara baru dengan estimasi jumlah penumpang 20 juta orang per tahun, maka perlu dikembangkan infrastruktur pendukung bandara untuk membuka akses-akses baru menuju bandara yang salah satunya terwujud melalui pengembangan jalur kereta penghubung ke bandara. Selain itu, pengembangan juga diarahkan untuk mewujudkan aero city dan aerotropolis yang didukung oleh penyediaan energi, air bersih dan pengolahan sanitasi yang memadai, serta didukung pengembangan TOD (Transit Oriented Development).

Pembangunan infrastruktur strategis lain di kawasan pesisir selatan DIY adalah pembangunan JJLS (Jaringan Jalan Lingkar Selatan). Salah satu faktor yang dapat memicu perkembangan wilayah adalah transportasi. Dengan adanya transportasi suatu wilayah akan mudah untuk berinteraksi dengan wilayah tersebut maupun antar wilayah lainnya. Transportasi dapat menghubungkan pusat-pusat sub wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan guna meningkatkan perkembangan wilayah. Adanya transportasi ini memerlukan dukungan dari infrastruktur yang ada berupa jalan.

Mega proyek JJLS dibangun dari wilayah Anyer sampai Panarukan. DIY yang wilayah bagian selatan juga dilalui oleh JJLS ini memanfaatkan momentum adanya mega proyek yang digagas oleh pemerintah pusat tersebut. Dengan latar belakang dan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah pantai selatan pemerintah DIY menggagas JJLS sebagai pintu masuk ke wilayah Provinsi DIY. Sehingga dengan adanya tujuan tersebut, pemerintah menggagas untuk membuka pintu masuk ke Provinsi DIY dari sisi selatan.

Infrastruktur juga diarahkan mendukung pengembangan wilayah sebagai upaya mewujudkan Wilayah Selatan DIY sebagai halaman depan DIY. Namun demikian, berkenaan dengan orientasi pembangunan tersebut perlu dipertimbangkan berkenaan dengan potensi bisnis dan hubungan dagang maupun hubungan politik dengan wilayah lain diluar DIY yang terkoneksi dengan DIY, serta pertimbangan terkait dengan potensi wilayah dan aspek-aspek kebencanaan mengingat pada Wilayah Selatan DIY rawan gempa bumi dan tsunami.

#### IV.7.6 Pengembangan Pendidikan Karakter dan Pendidikan Vokasi

Terkait isu pengembangan pendidikan, dalam SDGs/TPB DIY telah menyeleraskan sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam dokumen RAN, yaitu selaras dengan tujuan ke-4, yaitu: Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Adapun sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.
2. Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.
3. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.
4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.

Pendidikan merupakan sarana mewujudkan masyarakat DIY menjadi manusia cerdas utuh berbudaya sesuai dengan filosofi, dan ajaran moral nilai luhur Budaya. Menyoal tentang arah pembangunan bidang peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) RPJMN 2015-2019, pemerintah berupaya mengacu Misi 1 RPJPN 2005-2025 yang menegaskan bahwa: *“Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila dengan memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia sebagai landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa”* (RPJMN 2015-2019; 2-1).

Bagaimanapun juga, SDM adalah modal utama dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu kualitas SDM perlu terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan daya saing yang tinggi yang antara lain ditandai peningkatan taraf pendidikan melalui revolusi karakter siswa melalui pendidikan karakter dan perluasan pendidikan berbasis ketrampilan melalui program pendidikan kejuruan atau vokasi.

Pertama, Dalam rangka melakukan revolusi karakter bangsa, tantangan yang dihadapi adalah menjadikan proses pendidikan sebagai sarana pembentukan watak dan kepribadian siswa yang matang dengan internalisasi dan pengintegrasian pendidikan karakter dalam kurikulum, sistem pembelajaran dan sistem penilaian dalam pendidikan. Tanpa berpretensi mengabaikan aspek lainnya, aspek pendidikan berperan signifikan dalam menentukan dan membentuk sebuah bangsa yang maju dan modern. Karenanya, pemerintah berupaya melakukan revolusi karakter bangsa melalui pendidikan. Di sini, pendidikan harus dimaknai tidak hanya sebagai sarana untuk melakukan transfer pengetahuan dan keterampilan belaka,

tetapi juga sebagai suatu proses pembelajaran sepanjang hayat untuk membentuk karakter yang baik, mengembangkan potensi dan talenta individual, memperkuat daya intelektual dan pikiran, dan menanamkan jiwa mandiri serta spirit berdikari.

Kedua, sebagai upaya meningkatkan akses perluasan lapangan kerja melalui peningkatan ketrampilan dan penguasaan teknologi peserta didik maka perlu ditingkatkan kualitas layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan di Sekolah Menengah Kejuruan dan vokasional berbasis keunggulan lokal. Hal ini dilakukan dengan prioritas tahapan pada Peningkatan penguatan kompetensi dan keahlian berbasis keunggulan lokal bagi lulusan SMK dan vokasional. Pada akhirnya upaya ini dilakukan untuk mendorong lulusan agar memiliki keahlian dasar dan keahlian umum yang dibutuhkan oleh lapangan kerja dan mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi di lingkungan kerja.

#### **IV.7.7 Pelestarian Budaya Baik Benda Maupun Tak Benda**

Sebagaimana tercantum dalam Visi RPJP 2005-2025, kebudayaan menjadi salah satu pilar utama pembangunan. Upaya pembangunan kebudayaan semakin intens terutama seusai penetapan Undang-Undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Semakin kuatnya upaya pemeliharaan dan pengembangan budaya benda maupun tak benda menghadapi ancaman kerusakan sejumlah cagar budaya dan warisan budaya yang dipengaruhi oleh dinamika perkembangan perkotaan dan faktor alamiah. Hingga tahun 2017 Cagar Budaya dan warisan budaya yang terdiri dari benda, bangunan, situs, struktur dan kawasan cagar budaya berjumlah 2.239 buah, yang sudah mendapatkan SK sejumlah 1331, baru sejumlah 492 yang dilestarikan. Sementara itu, dalam aspek tak benda, sejumlah warisan budaya tak benda yang bersumber dari nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra telah mendapatkan pengakuan warisan budaya tak benda nasional sejumlah 40 buah dari 911 ragam budaya tak benda, sedangkan yang sudah masuk database Warisan Budaya tak benda di tingkat pusat berjumlah 246 buah. Organisasi seni dan budaya berjumlah 6293, yang dinilai telah maju karena manajemen dan kiprahnya di tingkat nasional dan internasional berjumlah 93 organisasi.

Kemajuan terbesar dalam pelestarian budaya berbasis desa dan kelurahan dengan diperbarunya SK 325/Kpts/1995 yang menyebutkan 32 desa budaya sebagai benteng ketahanan budaya menjadi SK 262/Kep/2016 yang menyebutkan 56 desa dan kelurahan budaya.

Upaya-upaya pelestarian budaya yang mencakup legalitas dan perlindungan fisik, penguatan, serta pemanfaatan akan terus ditingkatkan untuk mencapai Visi RPJPD mendatang.

#### **IV.7.8 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (*Good Governance*)**

Terkait dengan isu tata kelola pemerintahan telah menjadi bahasan dalam SDG's / TPB khususnya pada tujuan ke-16 yaitu meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan.

Skor Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) tahun 2016 mencapai 73,07 yang berada di atas rata-rata nasional sebesar 56.69. Pencapaian tersebut menjadikan DIY sebagai salah satu

provinsi terbaik dalam aspek reformasi birokrasi. Pencapaian ini tentu akan membawa DIY sebagai rujukan penerapan reformasi birokrasi. Pemerintah Daerah perlu menjaga komitmen yang kuat untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemda DIY serta perbaikan terus menerus dalam akuntabilitas kinerja pembangunan.

#### **IV.7.9 Pertumbuhan Ekonomi yang Belum Inklusif**

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dalam TPB merupakan pilar tersendiri yaitu pilar ekonomi, terdiri dari 4 (empat) tujuan yaitu : Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua (Tujuan 7), Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua (Tujuan 8), Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi ( Tujuan 9), Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara (Tujuan 10).

Paradigma pembangunan ekonomi mengalami pergeseran, dari yang mengejar angka pertumbuhan meningkat menjadi pertumbuhan yang bersifat inklusif. Pertumbuhan yang inklusif dapat diartikan sebagai suatu proses pertumbuhan yang menjamin kesetaraan akses terhadap peluang ekonomi bagi semua segmen sosial tanpa melihat keadaan masing-masing individu. Dengan demikian, pertumbuhan inklusif akan memberi rakyat miskin sebuah titik awal yang memungkinkan mereka untuk menikmati pertumbuhan ekonomi. Strategi pencapaian pertumbuhan yang inklusif dapat dicapai melalui beberapa cara, antara lain percepatan pertumbuhan yang dibarengi dengan pemerataan pertumbuhan, menghilangkan ketimpangan dengan menjamin kesetaraan terhadap peluang, peningkatan jumlah tenaga kerja produktif, penguatan kapasitas produksi, dan juga mewujudkan sistem perlindungan sosial.

Pertumbuhan inklusif diukur melalui *Inclusive Growth Index (IGI)* yang memiliki lima dimensi yaitu (1) dimensi pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja produktif, dan infrastruktur ekonomi, (2) dimensi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, (3) dimensi kesetaraan gender, (4) dimensi kapabilitas dan (5) dimensi perlindungan sosial. Hasil kajian yang dilaksanakan BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi DIY memuaskan tetapi belum inklusif. Berdasarkan pengukuran indeks IGI diperoleh dimensi infrastruktur ekonomi, kesetaraan gender dan kapabilitas manusia mencapai indeks kepuasan yang relatif tinggi. Sementara itu, dimensi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masih relatif rendah pencapaiannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan belum diikuti dengan penurunan kesenjangan baik distribusi pendapatan antar individu maupun distribusi pendapatan antarKabupaten/kota.



## **BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN**

### **V.1 Visi**

Visi adalah suatu kondisi ideal yang diharapkan terwujud di masa mendatang. Visi pembangunan untuk periode 2017-2022 sesungguhnya merupakan bagian dari kerangka pembangunan jangka panjang dan kelanjutan dari pembangunan lima tahun sebelumnya yang meletakkan konsep "*Renaissance Yogyakarta*" sebagai paradigma pembangunan.

"Renaissance Yogyakarta" sebagai paradigma pembangunan DIY mengandung maksud sebagai pangkal berpikir perubahan ke depan yang berlandaskan pada nilai-nilai lama yang unggul atau nilai-nilai yang pernah menjadi rujukan bagi praktek kehidupan Yogyakarta dan telah membawa Yogyakarta pada posisi keistimewaannya dalam perjalanan sejarah bangsa dan negara Indonesia. Dibawah payung paradigma "Renaissance Yogyakarta", maka Yogyakarta akan bergerak maju ke depan menjadi Yogyakarta yang maju, tetapi tetap berpijak pada nilai-nilai keluhuran, nilai-nilai keutamaan, dan nilai-nilai yang mencerminkan ke-Yogyakarta-an yang pernah menjadi penuntun gerak kehidupan Yogyakarta, sehingga Yogyakarta memiliki martabat yang istimewa dalam peta sejarah Indonesia. Sangat disadari, bahwa nilai-nilai tersebut saat ini telah mengalami peluruhan yang mengkhawatirkan, sehingga melalui paradigma "Renaissance Yogyakarta", maka pembangkitan kembali nilai-nilai tersebut ke dalam alam pikiran dan praktek kehidupan bermasyarakat, bernegara, kerja birokrasi, dan perilaku pemimpin, menjadi sangat penting untuk segera dilakukan.

Rencana Pembangunan Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (RPJPD DIY) 2005-2025 memiliki visi "Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera" dengan Misi:

- 1) Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya pendidikan yang handal.
- 2) Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan.
- 3) Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif.

- 4) Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.

Pada setiap tahapan RPJPD DIY 2005-2025 terdapat Penekanan 5 Tahunan. Penekanan 5 Tahunan tersebut dipedomani dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dapat diilustrasikan sebagai berikut:

**Tabel V-1 Penekanan 5 Tahun RPJPD DIY dan RPJMD DIY**

Penekanan 5 Tahun Pertama 2005-2009	Penekanan 5 Tahun Kedua 2010-2014	Penekanan 5 Tahun Ketiga 2015-2019	Penekanan 5 Tahun Keempat 2020-2025
Pembangunan sarana dan prasarana dasar keunggulan daerah, dan persiapan dasar kompetensi SDM yang berdaya saing unggul, serta konsolidasi potensi-potensi unggulan. <b>Keyword: Menyiapkan fondasi/meletakkan dasar</b>	Pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung utama keunggulan daerah yang memiliki daya dukung berantai positif ( <i>backward effect and forward effect</i> ) untuk mendorong kemajuan daerah dan melanjutkan pembangunan kompetensi SDM yang berdaya saing unggul secara lebih luas serta menggerakkan potensi ekonomi dan industri unggulan. <b>Keyword: Membangun/melanjutkan pembangunan di atas fondasi/dasar yang telah diletakkan.</b>	Pendayagunaan kapasitas keunggulan daerah melalui pengerahan SDM dan fasilitas-fasilitas utama pendukung keunggulan daerah, akselerasi usaha ekonomi dan industri unggulan, serta penguatan jejaring untuk meningkatkan daya saing keunggulan daerah. <b>Keyword: Mendayagunakan dan menguatkan yang telah dibangun.</b>	Penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan energi. <b>Keyword: Menguatkan dan mengoptimalkan yang telah di dayagunakan untuk mewujudkan cita-cita.</b>
<b>Implementasi dalam RPJMD DIY/ Rancangan Awal RPJMD DIY</b>			
	<b>RPJMD DIY 2009 -2013</b>	<b>RPJMD DIY 2012 -2017 "Jogja Renaisans"</b>	<b>Visi Misi Gubernur DIY 2017 -2022 "Abad Samudera Hindia" (Rancangan Awal)</b>
<b>Visi</b>	"Pemerintah daerah yang katalistik dan masyarakat mandiri yang berbasis keunggulan daerah serta sumberdaya manusia yang berkualitas unggul dan beretika".	"Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru"	"Menyongsong "Abad Samudera Hindia" untuk kemuliaan martabat manusia Jogja"

Sumber: Sudaryono (2017), Bahan Rapat Visi Misi Gubernur DIY 2017-2022, diolah

Penyusunan Visi Misi Gubernur DIY yang dituangkan dalam RPJMD DIY berupaya untuk menyinambungkan periode 5 tahun sebelumnya dengan periode yang mengikuti, sebagaimana Visi Misi Gubernur DIY pada periode 2017-2022 berkesinambungan dengan periode sebelumnya. Pada periode sebelumnya tahun 2012-2017, Visi Gubernur DIY memiliki tema "Jogja Renaisans" dengan visi "Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru." Konsep "Renaissans

*Yogyakarta*" atau "*Jogja Renaisans* merupakan sintesa dari trilogi filosofi Keistimewaan Yogyakarta (*Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi, dan Manunggaling Kawula Gusti*), ideologi negara Kesatuan Republik Indonesia: Pancasila, dan etos aseli (*Golong-Gilig, Sawiji, Greget, Sengguh, Ora Mingkuh*) dalam melahirkan kembali masa keemasan budaya klasik Yogyakarta. "*Renaisans Yogyakarta*" diwujudkan dengan semangat kolektif *Jogja Gumregah* untuk bergerak bersama membawa kebudayaan Yogyakarta ke tingkat yang lebih unggul. Semangat *Jogja Gumregah* tersebut dapat menjadi wahana penggerak masyarakat menuju ke peningkatan dimensi nilai, pencarian nilai-nilai kebenaran, dimensi ekonomi terkait nilai kegunaan, dimensi estetis pada keindahan, dimensi sosial pada nilai "*trust*", dimensi politik pada nilai kuasa, dimensi keagamaan, dan nilai ketuhanan yang berkebudayaan. Dalam lima tahun ke depan, spirit dari konsep "*Renaisans Yogyakarta*" secara konsisten tetap akan dipelihara, namun substansi dan penekanannya akan disesuaikan dengan perkembangan jaman dan prediksi atas kondisi-kondisi yang sekiranya akan terjadi dalam kurun lima tahun ke depan.

Dalam konteks "*Renaisans Yogyakarta*" sebagai "sintesa", ketika nilai-nilai Trilogi Filosofi Keistimewaan (*Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi, dan Manunggaling Kawula Gusti*) diletakkan sebagai "tesa" bagi pembangunan DIY, maka "anti-tesa" yang dihadapi dalam implementasinya adalah nilai-nilai pragmatis yang telah menyeret Yogyakarta pada situasi-situasi yang telah melahirkan gejala-gejala yang menunjukkan bahwa: (1) Bawana Yogyakarta tidak Hayu lagi baik dalam dimensi Bawana Alit-Bawana Ageng maupun Bawana Lahir-Bawana Batin, (2) pembangunan dan perubahan-perubahan yang terjadi di Yogyakarta telah menunjukkan gejala meninggalkan jatidiri dan nilai-nilai kawitan atau nilai-nilai sangkan paraning dumadi-nya Yogyakarta, dan (3) gejala dikotomi yang semakin nyata dalam konteks hubungan antara pamong penyelenggara birokrasi dengan masyarakat atas nama nilai-nilai kebebasan, sehingga kepentingan-kepentingan bersama serta nilai-nilai kebersamaan yang lebih luas menjadi terabaikan bahkan terkorbankan.

Konsep *Renaisans Yogyakarta* dan *Semangat Jogja Gumregah* tersebut dikemukakan kembali Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Gubernur DIY) dalam paparan visi dan misi pada tanggal 2 Agustus 2017. Pemaparan visi misi tersebut merupakan bagian dari rangkaian proses pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY untuk periode 2017-2022 seiring dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur DIY Tahun 2012-2017. Visi Gubernur DIY pada periode 2017-2022 dalam Pidato tersebut mengambil Tema

### **"Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja".**

Tema visi tersebut menggambarkan makna pembangunan yang ingin dicapai oleh Pemerintah DIY pada tahun 2017–2022:

**Abad Samudera Hindia** ialah momentum yang perlu dimanfaatkan segenap pemangku kepentingan DIY untuk memanfaatkan potensi kelautan di sisi selatan DIY sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan warga serta mengurangi angka kemiskinan.

Menyongsong Abad Samudera Hindia yang dimaksud dalam tema visi dilandasi pada aspek kesejahteraan, fenomena-fenomena *Indian Ocean Rim Association* (IORA), *Kra-Canal/ Thai Canal Project* serta Kemiskinan di Kawasan Jogja Selatan.

Dari aspek **kesejarahan**, nenek moyang bangsa Jawa telah melakukan ekspansi dagang ke wilayah Timur Indonesia setelah pusat perdagangan Asia Tenggara bergeser dari Tuban ke Malaka untuk mengimbangi pedagang Cina yang hendak mencari komoditas rempah-rempah dan memperdagangkan barang-barang dari Jawa ke wilayah tersebut (circa 1400).<sup>4</sup> Pernyataan tersebut melandasi pengetahuan bahwa orang Jawa telah cukup lama mengakrabi dua alam kehidupan perekonomian, yakni pertanian dan perdagangan melalui laut atau yang kita kenal sebagai *among tani dagang layar*. Pilihan tema kemaritiman sebagai payung kebijakan Pembangunan Lima Tahun ke depan, merupakan upaya menyambung sejarah yang telah lama diukir oleh nenek moyang, namun kemudian telah dilupakan sejak sekitar 1670-an melalui penghancuran sendiri armada-armada independen pedagang Jawa oleh Amangkurat I.<sup>5</sup>

Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki garis pantai sepanjang sekira 113 kilometer (Data Vertikal Pangkalan TNI AL dalam <http://bappeda.jogjapro.go.id/dataku>). Pada garis pantai kawasan-kawasan di bagian selatan yang membentang dari Kulon Progo, Bantul sampai dengan Gunungkidul memiliki potensi kekayaan sumberdaya alam yang melimpah. Ketiga kabupaten tersebut tentu juga akan memiliki posisi strategis dalam lalu lintas perekonomian di wilayah Samudera Hindia. Sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo, Abad 21 merupakan Abad Samudra Hindia yang diyakini merupakan masa depan maritim yang strategis bagi Indonesia setelah era Samudra Atlantik (abad 19) dan Samudra Pasifik (abad 20) berlalu. Diyakini, separuh dari kapal kontainer dunia, sepertiga lalu lintas kargo, dan dua pertiga pengiriman minyak dunia melalui jalur Samudera Hindia yang menjadi tempat tinggal sekira 2,6 miliar jiwa dari berbagai bangsa yang membentang dari Asia Tenggara sampai dengan Afrika Selatan.<sup>6</sup>

Dalam rangka meningkatkan potensi dan kerjasama antara negara-negara Samudra Hindia tersebut telah terbentuk **IORA** (*Indian Ocean Rim Association* atau Asosiasi Negara-negara Pesisir Samudera Hindia, 1997) yang digagas Nelson Mandela pada tahun 1995. Negara-negara anggota IORA mencakup negara-negara ASEAN, Australia, Asia Selatan, Asia Barat, Afrika Timur, dan Afrika Selatan. Asosiasi ini telah membuat kesepakatan-kesepakatan kerjasama di bidang perikanan, energi kelautan, pelabuhan dan pelayaran, mineral dasar laut, bioteknologi kelautan, pariwisata, perdagangan, investasi, dan ekonomi.

Terkait dengan potensi strategis maritim tersebut, terdapat tantangan ke depan dengan dibangunnya ***Kra-Canal Project*** (Terusan Kra di Thailand). Terusan yang mirip dengan

---

<sup>4</sup> Dikutip dari cf. Hauben 1996; Reid 1992 dalam Rahardjo, Supratikno (2011). *Peradaban Jawa dari Mataram Kuno sampai Majapahit Akhir*, Pengantar Edi Sedyawati, Komunitas Bambu, Jakarta.

<sup>5</sup> Ricklefs, M.C. (2002). *Yogyakarta di Bawah Sultan Mangkubumi 1749-1792: Sejarah Pembagian Jawa*, terjemahan dari *Jogjakarta under Sultan Mangkubumi 1749-1792: A History of the Division of Java*, oleh Hartono Hadikusumo dan E.Setiyawati Alkhatab, Matabangsa, Yogyakarta.

<sup>6</sup> Marsudi, Retno (2015). "Abad 20 Milik Samudera Pasifik, Abad 21 Milik Samudera Hindia", dalam <https://news.detik.com/berita/3026408/menlu-retno-abad-21milik-samudera-hindia>, diakses tgl 18 Juli 2017.

Suez dan Panama ini akan membuat sudetan pada leher semenanjung Thailand-Malaysia untuk menghubungkan perairan Laut Andaman dan perairan Teluk Thailand sehingga akan memperpendek jarak pelayaran dari belahan bumi bagian barat ke negara-negara Asia Timur seperti Jepang dan China.<sup>7</sup>

Dampak dari Kra-Canal terhadap peta intensitas lalulintas pelayaran di perairan Asia Timur dan Asia Tenggara tentu akan sangat berarti dan khusus untuk perairan Indonesia akan berdampak pada meningkatnya intensitas pelayaran di ALKI-II (Alur Laut Kepulauan Indonesia-II yang mencakup Laut Sulawesi, Selat Makasar, Laut Flores, dan Selat Lombok). Meningkatnya intensitas pelayaran di ALKI-II dapat berdampak pada meningkatnya intensitas lalulintas pelayaran silang antara Asia-Australia dan Samudera Hindia-Samudera Pasifik. Fenomena Kra-Canal perlu diantisipasi ke depan sebagai peluang Pulau Jawa Bagian Selatan menjadi sangat penting terutama dalam hal penyediaan jasa pelabuhan, energi, perikanan, dan pariwisata, maupun tantangan apabila terjadi perubahan lalu lintas pelayaran.

Harapan akan potensi dan tantangan masa depan dari Abad Samudra Hindia tentunya berada di Selatan DIY. Kabupaten-kabupaten yang berada di selatan DIY memiliki kesenjangan relatif tinggi dibanding wilayah utara dengan melihat dari angka kemiskinan. Angka kemiskinan menunjukkan Kabupaten di Selatan DIY memiliki angka kemiskinan Gunungkidul (20,83 %), Kulon Progo (20,64 %) dan Bantul (15,89 %) yang relatif tinggi dibanding wilayah utara seperti Sleman (9,50 %) dan Yogyakarta (8,67 %).<sup>8</sup> Secara umum angka kemiskinan DIY 12,36% (2017) lebih tinggi dari Nasional (10,96%) atau sekitar 488 ribu jiwa (BPS DIY, 2017). Sebagian besar penduduk miskin berada di wilayah perdesaan (16.11 %) daripada jumlah warga miskin di wilayah perkotaan (11.72 %). Sebagian besar Warga miskin di wilayah perdesaan masih terjerat pada persoalan penyediaan pangan berupa pengeluaran untuk pembelian beras (sebesar 33,08 %), sedangkan di wilayah perkotaan hanya menunjukkan angka sebesar 27,31 %. Selanjutnya dapat digambarkan kesenjangan antar kelompok pendapatan (Index Gini) di DIY tertinggi di Indonesia (0,4230; tahun 2016), dimana kesenjangan di perkotaan lebih tinggi (0,435) dibanding perdesaan (0,340).

Fenomena kemiskinan dan kesenjangan di Kawasan Selatan DIY ini memberikan latar belakang penting lima tahun ke depan untuk memberikan fokus dan perhatian terhadap pembangunan Wilayah Bagian Selatan Yogyakarta. Hal ini selaras dengan Tema Visi untuk menyongsong *"Abad Samudera Hindia"* juga untuk meningkatkan *"Harkat dan Martabat Warga Miskin di Wilayah Bagian Selatan Yogyakarta khususnya, dan di seluruh Wilayah Yogyakarta pada umumnya"*. Dengan demikian, potensi Kawasan Selatan Yogyakarta perlu

---

<sup>7</sup> Abdul Rahman, Noorul Shaiful Fitri; Mohd Salleh, Nurul Haqimin; Ahmad Najib, Ahmad Fayas; and Lun2 Venus Y. H. (2016). "A descriptive method for analysing the Kra-Canal decision on maritime business patterns in Malaysia", *Journal of Shipping and Trade*, in <https://jshippingandtrade.springeropen.com/track/pdf/10.1186/s4107201600160?site=jshippingandtrade.springeropen.com>, diakses 19 Juli 2017

<sup>8</sup> \_\_\_\_\_.2015. Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2015. Yogyakarta: BPS DIY.

dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya, agar lebih memiliki harkat dan martabat mulia. Tema visi tersebut dapat digambarkan perumusannya sebagai berikut,

**Tabel V-2 Perumusan Visi**

No.	Masalah Utama	Pokok-pokok Visi	Pernyataan Visi
1.	Menyongsong memiliki makna untuk berjalan maju menghadapi (menempuh) sesuatu yang datang dari arah yang berlawanan atau menyambut datangnya sebuah zaman/ abad/ peradaban. Samudera Hindia merupakan lokus strategis yang dipilih karena aspek kesejarahan, fenomena-fenomena Indian Ocean Rim Association (IORA), Kra-Canal/ Thai Canal Project serta Kemiskinan di Kawasan Jogja Selatan. Lokus Abad Samudra juga merupakan bentuk sinkronisasi dan penguatan terhadap dengan Agenda Pembangunan Pemerintahan Periode 2015-2019 Presiden Joko Widodo tentang konsep "Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia" "Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia." <sup>9</sup> senyampang dengan hal tersebut, dibayangkan pada masa yang akan datang Samudra Hindia merupakan peradaban yang maju setelah era Abad Atlantik dan Abad Pasifik berlalu.	Menyongsong Abad Samudera Hindia	<i>"Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja".</i>

<sup>9</sup> Dalam pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 East Asia Summit (EAS) tanggal 13 November 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar, Presiden Jokowi menegaskan konsep Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sehingga agenda pembangunan akan difokuskan pada 5 (lima) pilar utama, yaitu:

1. Membangun kembali budaya maritim Indonesia.
2. Menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama.
3. Memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim.
4. Menerapkan diplomasi maritim, melalui usulan peningkatan kerja sama di bidang maritim dan upaya menangani sumber konflik, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut dengan penekanan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara dan bukan memisahkan.
5. Membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.

Diakses dari \_\_, 2014. *Presiden Jokowi Deklarasikan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*. Jakarta: Kemenlu RI, diakses 1 November 2017.

No.	Masalah Utama	Pokok-pokok Visi	Pernyataan Visi
2.	Daerah istimewa Yogyakarta (DIY) masih memiliki tingkat kemiskinan dan ketimpangan antar kelompok pendapatan yang tinggi. Harkat dan martabat kesejahteraan masyarakat menjadi penting untuk ditingkatkan meskipun capaian Indeks Pembangunan Manusia DIY telah berada di rangking tertinggi di Indonesia.	Kemuliaan Martabat	
3.	Pembangunan di DIY terus diupayakan untuk berkelanjutan dan memiliki pendekatan pembangunan yang berpusat pada kesejahteraan manusia Jogja baik lahir maupun batin. Kesejahteraan ekonomi adalah kesejahteraan fisik yang harus dapat dinikmati oleh pelaku utama yaitu manusianya, sehingga kesejahteraan fisik itu harus diikuti oleh kesejahteraan yang lebih riil yang diterima oleh manusia yang terlibat dalam pembangunan. Manusia Jogja masih memiliki persoalan kesejahteraan dari aspek kemiskinan, ketimpangan antar kelompok pendapatan, dan tingginya angka ketergantungan sebaran pendapatan oleh angkatan kerja, mengingat angka ketergantungan yang cukup tinggi di DIY. Indikator kesejahteraan secara batin dapat tergambar pada agregat masyarakatnya: (1) terciptanya rasa keadilan dan rasa aman dalam kehidupan masyarakat baik pada ranah domestik maupun pada ranah publik oleh kepastian keterlindungan hukum (termasuk misalnya rasa aman dan rasa keterlindungan berada di ruang publik dan jalan raya), (2) semakin mengecilnya angka-angka kriminal dan konflik-konflik yang terjadi di wilayah Yogyakarta (diupayakan "mendekati nol" seperti yang	Manusia	

No.	Masalah Utama	Pokok-pokok Visi	Pernyataan Visi
	terjadi di Scandinavia), (3) semakin banyaknya karya-karya kreatif dan karya-karya unggul yang muncul di tengah-tengah masyarakat yang menunjukkan adanya suasana batin Yogyakarta yang tenang dan damai sehingga setiap orang dapat berkarya secara optimal, (4) semakin banyaknya perjumpaan-perjumpaan budaya dan kebudayaan di ruang publik yang menunjukkan adanya suasana aman serta nyaman, sehingga menyuburkan semangat saling tukar budaya dan kebudayaan di tengah-tengah masyarakat Yogyakarta.		
4.	Jogja merupakan lokus kewilayahan pembangunan DIY yang terdiri dari 5 kabupaten/kota : Yogyakarta, Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul dan Sleman.	Jogja	

Kemuliaan martabat manusia Jogja dalam visi Gubernur DIY digambarkan dalam ***“Lima Kemuliaan”*** atau ***“Panca Mulia”*** yakni:

- 1) terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing,
- 2) terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan,
- 3) terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan,
- 4) terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan
- 5) terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sesuai dengan **“Panca Mulia”** tersebut di atas, manusia Jogja yang bermartabat mulia digambarkan sebagai manusia sejahtera paripurna baik dari segi hidup-kehidupan-penghidupan sebagai individu, terlibat dan memperoleh manfaat dari ekonomi yang tumbuh dan berkeadilan, hidup dalam harmoni kolektif dan terlindungi oleh penyelenggaraan pemerintahan demokratis yang dijalankan oleh aparatur yang berintegritas. Manusia Jogja yang bermartabat mulia merupakan substansi penting dari visi Gubernur DIY 2017-2022 yang menggambarkan adanya tujuan peningkatan harkat dan martabat manusia Jogja. Peningkatan harkat dan martabat manusia Jogja mencakup pengertian peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan sosial dan beradab. Untuk itu strategi kebudayaan untuk meningkatkan harmoni kehidupan bersama masyarakat Yogyakarta serta mengatasi kesenjangan dan kemiskinan di wilayah Yogyakarta dalam kerangka meningkatkan harkat dan martabat manusia Jogja sangat perlu dikedepankan. Pembangunan ekonomi di wilayah Yogyakarta yang ditopang dengan pembangunan infrastruktur wilayah diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu meningkatkan pendapatan masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat yang kurang beruntung.

Upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia Jogja meniscayakan perlunya kemantapan tatakelola pemerintahan yang demokratis dan sumber daya manusia aparatur sipil negara yang memiliki etos, etika dan kualitas sebagai *“Trilogi SDM-DIY”*. *Etos* menyandang pesan perubahan persepsi (*mind set*) dari tugas birokrasi sebagai pekerjaan kantoran, menjadi tugas birokrasi sebagai "karya peradaban". Karya Peradaban yang dimaksudkan adalah bahwa birokrasi tidak hanya menjalankan fungsinya sebagaimana adanya, namun mempunyai rasa memiliki atas apa yang dilaksanakan. Menjalankan fungsinya merupakan bagian dari pengembangan diri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut. Merubah *mind set* dari *business as usual* menjadi sebuah karya yang mempunyai dampak pada peningkatan layanan kepada masyarakat, penciptaan inovasi yang berguna untuk birokrasi dan pembangunan serta pengembangan kemampuan diri atas potensi yang dimiliki.

*Etika*, menyandang pesan "kemuliaan" dalam pengertian bersatunya "pikiran mulia, niat mulia, dan tindakan mulia", dalam rangka menciptakan SDM yang "berintegritas" yang menjunjung tinggi budaya malu dan budaya merasa bersalah apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan. *Kualitas*, menyandang pesan adanya pergeseran *mind set*, bahwa karya birokrasi bukanlah dipersepsikan hanya sebagai "karya proyek berbasis kinerja penyerapan anggaran", melainkan menuju pada pembentukan "sikap" bahwa karya birokrasi DIY adalah "karya yang dapat menjadi rujukan" bagi birokrasi-birokrasi dan lembaga-lembaga lain diluar DIY (nasional maupun internasional). Ketika karya tersebut menjadi "rujukan", maka karya tersebut merupakan karya yang berkualitas, yang merupakan hasil dari karya yang "diniati" untuk menjadi "karya berkualitas tinggi".

Berangkat dari uraian diatas Tema Visi *“Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”* dapat dirumuskan bahwa Abad Samudera Hindia menjadi arah dari pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam lima tahun ke depan

untuk mengangkat potensi Selatan Yogyakarta khususnya dan Daerah istimewa Yogyakarta pada umumnya dengan visi:

### **“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”**

Penjelasan Visi tersebut sebagai berikut:

**Tabel V-3 Penjelasan Visi**

<b>Visi</b>	<b>Pokok-pokok Visi</b>	<b>Penjelasan Visi</b>
Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja	Terwujudnya	Suatu kondisi yang diharapkan pada 5 tahun ke depan untuk terlaksana; terbukti (KBBI)
	Peningkatan	proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan, dan sebagainya; KBBI) suatu kondisi yang telah ada menuju kondisi yang lebih baik.
	Kemuliaan	hal (keadaan) mulia; keluhuran; keagungan; kehormatan (KBBI). Kemuliaan dalam visi ini dimaknai paripurna dalam memenuhi <i>Panca Mulia</i> yakni dengan terpenuhinya, 1) peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban 2) peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat yang tumbuh, dan berkeadilan 3) terwujudnya kondisi hidup dalam harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi 4) pelayanan publik dengan tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan 5) pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur yang bermartabat dan memiliki integritas.
	Martabat	tingkat harkat kemanusiaan, harga diri (KBBI). manusia yang bermartabat adalah manusia yang berumur panjang dan hidup bahagia, mempunyai akses yang luas terhadap pengetahuan, dan dapat hidup layak
	Manusia Jogja	Frasa ini merepresentasikan insan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi subyek pembangunan. "Manusia Jogja" adalah semua individu yang hidup, berkehidupan dan berpenghidupan di wilayah Daerah

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
		<p>Istimewa Yogyakarta. Secara lebih rinci, yang dimaksud dengan manusia Jogja adalah:</p> <p>a) Semua individu yang telah menggantungkan hidupnya pada sumberdaya yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>b) Semua individu yang telah membangun jaringan dan juga telah dikuatkan serta dimuliakan oleh jaringan kehidupan sosial budaya masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>c) Semua individu yang telah membangun serta menggantungkan penghidupannya pada sumberdaya dan jaringan perekonomian dan jaringan sumber pendapatan yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>Sedangkan ciri khas manusia Jogja dalam perumusan visi "Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja" adalah mencakup pengertian mulia martabat hidupnya, mulia martabat kehidupannya, dan mulia martabat penghidupannya. Secara lebih rinci dapat digambarkan sebagai berikut:</p> <p>a) Manusia Jogja yang memiliki hidup biologis yang mulia karena didukung oleh kualitas dan kuantitas asupan makanan yang baik, memiliki tingkat kesehatan yang baik, dan hidup dalam kualitas lingkungan fisik yang baik. Sebaliknya, manusia Jogja akan memiliki martabat yang buruk apabila kondisi fisik biologisnya buruk karena asupan makanan yang buruk serta memiliki tingkat kesehatan yang buruk, serta hidup dalam lingkungan fisik infrastruktur yang buruk. Sebagai catatan, bahwa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta masih terdapat kasus-kasus keluarga dan anak-anak yang memiliki tingkat kesehatan buruk akibat bergizi buruk.</p> <p>b) Manusia Jogja yang memiliki kehidupan bermasyarakat yang mulia, termasuk: (i) mulia dalam berlalulintas (sopan santun, tenggang rasa serta taat disiplin pada peraturan lalulintas), (ii) mulia dalam perilaku berkehidupan bersama di ruang publik (perilaku memarkir kendaraan yang tidak</p>

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
		menzolimi orang lain sehubungan ukuran lebar jalan-jalan di Jogja relatif kecil, tidak membuang sampah dan limbah ke sungai atau jalan atau ruang publik, tidak membuat atau memancing rasa permusuhan terhadap kelompok masyarakat lain), (iii) mulia dalam berkehidupan menjalankan agama (saling menghormati kehidupan beragama kelompok agama lain).
	c)	Manusia Jogja yang memiliki penghidupan yang mulia, mencakup: (i) cara-cara menjalankan kegiatan penghidupan yang mulia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (tidak merendahkan martabat dirinya, tidak melanggar hukum atau melakukan tindak pidana kriminal, tidak mengganggu kesehatan dirinya maupun orang lain), (ii) tempat menjalankan penghidupan yang mulia (tidak menjalankan usahanya pada tempat-tempat yang mengganggu atau menzolimi atau merugikan hak orang lain, (iii) sistem kerja yang mulia (tidak mengeksploitasi anak-anak dan perempuan, memberi atau mendapat imbalan sesuai ketentuan yang berlaku, tidak merusak dan mencemari alam serta warisan budaya)

## V.2 Misi

Kemuliaan martabat manusia Jogja yang meningkat sebagai pernyataan tujuan dari Visi Gubernur DIY telah tergambarkan dalam rumusan *Panca Mulia* yang telah dijelaskan sebelumnya. Visi politis tersebut kemudian diselaraskan dengan data-data maupun analisa teknokratik untuk dapat dicapai melalui upaya-upaya yang tergambarkan dalam misi. Misi sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi diharapkan dapat membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Rumusan misi Gubernur DIY dalam RPJMD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah di DIY.

Rumusan misi Gubernur DIY diupayakan memenuhi substansi tujuan dan sasaran dalam rangka:

- 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 2) memajukan daerah;

- 3) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- 4) menyelesaikan persoalan daerah;
- 5) menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
- 7) memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.

Sehingga *Panca Mulia* dari Visi Gubernur DIY dapat diejawantahkan dalam rumusan 2 misi pembangunan DIY tahun 2017–2022 sebagai berikut:

1) ***Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban***

Rumusan misi pertama ini menerjemahkan kemuliaan martabat manusia Jogja yang termaktub pada Panca Mulia 1,2 dan 3. Melalui misi pertama ini, Pemerintah Daerah DIY, segenap pemangku kepentingan dan masyarakat akan mewujudkan peningkatan kualitas hidup-kehidupan dan penghidupan sekurangnya dari aspek:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar, misalnya dari aspek kesehatan, akses infrastruktur dasar
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, misalnya dari aspek pendidikan
- c. Peningkatan perekonomian masyarakat dengan basis sumberdaya lokal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan termasuk halnya dalam upaya menurunkan angka kemiskinan DIY, menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan (Gini Index), dan menurunkan ketimpangan antar wilayah (index williamson).
- d. Peningkatan harmoni kehidupan sosial, budaya dan politik yang memenuhi rasa aman, nyaman dan tertib bagi seluruh warga.

2) ***Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis;***

Rumusan misi kedua ini menerjemahkan kemuliaan martabat manusia Jogja yang termaktub pada Panca Mulia ke-4 dan ke-5. Misi kedua tersebut akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, dan mewujudkan perilaku aparatur sipil negara yang berintegritas. Upaya pewujudan misi kedua sekurangnya dengan,

- a. Melakukan semangat perjumpaan dan silang birokrasi akan diletakkan sebagai strategi untuk menciptakan tatakelola pemerintahan yang demokratis, baik melalui "strategi silang vertikal" (keterbukaan di internal SKPD), "strategi silang horisontal" (keterbukaan antar SKPD), dan "strategi silang heterarki" (gabungan keterbukaan vertikal dan horisontal antar SKPD).
- b. Mendorong semangat "Perjumpaan" dan "Silang Kelembagaan" akan diletakkan sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur sipil negara, melalui "silang belajar" ke lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemerintahan DIY, termasuk lembaga pendidikan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga perekonomian swasta, serta belajar dari pengalaman-pengalaman daerah dan negara lain, dalam rangka menciptakan "Trilogi SDM-DIY" atau "E2-K" yakni: ETOS, ETIKA, dan KUALITAS. Etos, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyandang pesan perubahan persepsi (mind set) dari tugas birokrasi sebagai pekerjaan kantoran, menjadi tugas birokrasi sebagai "karya peradaban", yang

menyandang arti bahwa semua karya pelayanan birokrasi adalah "karya peradaban", karena tanpa kontribusi karya pelayanan birokrasi, peradaban di DIY tentu tidak akan berkembang menjadi peradaban seperti yang dapat kita saksikan hari ini. Etika, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyandang pesan "kemuliaan" dalam pengertian bersatunya "pikiran mulia, niat mulia, dan tindakan mulia", dalam rangka menciptakan SDM yang "berintegritas" yang menjunjung tinggi budaya malu dan budaya merasa bersalah apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan. Kualitas, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyandang pesan adanya pergeseran *mind set*, bahwa karya birokrasi bukanlah dipersepsi hanya sebagai "karya proyek berbasis kinerja penyerapan anggaran", melainkan menuju pada pembentukan "sikap" bahwa karya birokrasi DIY adalah "karya yang dapat menjadi rujukan" bagi birokrasi-birokrasi dan lembaga-lembaga lain di tempat lain (nasional maupun internasional). Ketika karya tersebut menjadi "rujukan", maka karya tersebut merupakan karya yang berkualitas, yang merupakan hasil dari karya yang "diniati" untuk menjadi "karya berkualitas tinggi". Untuk itu, membangun birokrasi dengan "Ruh budaya karya berkualitas tinggi" akan menjadi penting bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Lima Tahun ke depan. Ketiga aspek "Trilogi SDM-DIY", merupakan satu kesatuan yang utuh. Negara Scandinavia dan Jepang, adalah contoh negara yang memiliki SDM dengan etos kerja tinggi, etika tinggi, dan budaya kualitas tinggi.

### V.3 Tujuan dan Sasaran

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah dengan memperhatikan visi. Untuk mewujudkan suatu misi, dapat dicapai melalui beberapa tujuan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Sesuai dengan kaidah perumusan sasaran yang harus memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bound dan continuously improve* (SMART-C), maka sasaran harus mempunyai indikator yang terukur dan penetapan sasaran akan lebih mengarahkan pencapaian tujuan secara lebih fokus sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapainya dapat lebih efektif dan efisien.

Berpijak dari visi dan misi pembangunan daerah, berikut disajikan tujuan dan sasaran pembangunan DIY tahun 2017-2022:

**Tabel V-4      Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

<b>Visi: “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”</b>					
<b>No.</b>	<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>
<b>1.</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban</b>	Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin kebhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta	Angka <i>Inclusive Growth Index</i> (IGI) 5,59 (2016) menjadi 6,2(2022);	1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
					Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
				1.2. Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat.	Indeks Gini
					Persentase Angka Kemiskinan
				1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi
				1.4. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi.
					IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)
					Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
					Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan

**Visi: “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”**

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
				1.5. Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah	Indeks Williamson
2.	<b>Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis;</b>	Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance)	Indikator Reformasi Birokrasi dari 73,07 (bb) (2016) menjadi 76 (a) (2022)	2. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan	Opini BPK Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP)
				2.2. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Persentase capaian sasaran Pelaksanaan Keistimewaan.
				2.3. Meningkatkan Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan

#### V.4 Keselerasan RPJMD 2017-2022 dengan RPJMN 2015-2019

RPJMD DIY 2017-2022 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur DIY yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD DIY 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019. Selanjutnya RPJMN 2015-2019 menjadi pedoman bagi RPJMD DIY 2017-2022 untuk diselaraskan dan disinergikan dalam mendukung pencapaian tujuan nasional. Melalui penyelarasan antara RPJMD DIY dengan RPJMN tersebut, diharapkan dapat terwujud capaian dukungan pencapaian tujuan pembangunan nasional Tahun 2015-2019 sebagai upaya sinergi antara pusat dan daerah serta antar wilayah, dengan mengacu kepada pembagian urusan pemerintahan.

Penyelarasan pencapaian tujuan pembangunan nasional Tahun 2015-2019 tersebut didasarkan pendekatan perencanaan pembangunan nasional dan menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial (HITS) dalam lingkup kewilayahan secara lintas bidang dan antar bagian urusan pemerintahan. Penyelarasan perencanaan pembangunan daerah dan nasional tersebut dilaksanakan dengan menggunakan prinsip *money follows program*.

Pendekatan tersebut mengutamakan pembagian sumber daya (anggaran) berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN dilaksanakan dengan :<sup>10</sup>

- 1) Penyelarasan isu strategis pembangunan daerah
- 2) Penyelarasan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah
- 3) Penyelarasan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
- 4) Penyelarasan Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 5) Penyelarasan Kerangka Pendanaan Program Pembangunan Daerah dan
- 6) Penyelarasan Indikasi Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Strategis Nasional di Daerah

Visi Pembangunan Nasional Republik Indonesia pada periode tahun 2015-2019 ialah, *“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”* melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

- 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
- 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
- 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
- 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
- 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
- 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Adapun tujuan pembangunan nasional dapat dilihat pada Nawa Cita Presiden Joko Widodo sebagai berikut:

- 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
- 2) Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih efektif, demokratis, dan terpercaya;
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;

---

<sup>10</sup> Surat Edaran Bersama Mendagri dan Menteri PPn/Kepala Bappenas Nomor 050/4936/SJ dan Nomor 0430/M.PPN/12/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019

- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
- 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Keterkaitan Visi-Misi-Tujuan Pembangunan Nasional dan Visi-Misi-Tujuan Pembangunan Daerah dalam RPJMD dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel V-5      Penyeragaman Visi-Misi-Tujuan RPJMN dan RPJMD DIY**

<b>Visi Pembangunan Nasional RPJMN 2015-2019</b> <i>Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong"</i> <b>Visi Pembangunan RPJMD DIY 2017-2022</b> <i>"Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja"</i>			
<b>Misi RPJMN</b>	<b>Misi RPJMD</b>	<b>Tujuan RPJMN</b>	<b>Tujuan RPJMD</b>
<b>Ke-2 Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.</b>  <b>Ke-4 Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.</b>  <b>Ke-5 Mewujudkan bangsa yang berdaya saing</b>  <b>Ke-7 Mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dalam kebudayaan.</b>	<b>ke-1 Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban</b>	<b>Ke-3 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;</b>	<b>ke-1 Meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin kebhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta</b>
		<b>Ke-5 Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;</b>	
		<b>Ke-6 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;</b>	
		<b>Ke-7 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.</b>	
		<b>Ke - 8 Melakukan revolusi karakter bangsa; dan</b>	
		<b>Ke-9 Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.</b>	

Misi RPJMN	Misi RPJMD	Tujuan RPJMN	Tujuan RPJMD
<b>Ke-1</b> <b>Mewujudkan</b> <b>keamanan</b> <b>nasional yang</b> <b>mampu menjaga</b> <b>kedaulatan</b> <b>wilayah,</b> <b>menopang</b> <b>kemandirian</b> <b>ekonomi dengan</b> <b>mengamankan</b> <b>sumber daya</b> <b>maritim, dan</b> <b>mencerminkan</b> <b>kepribadian</b> <b>Indonesia sebagai</b> <b>negara kepulauan.</b>	<b>Ke-2</b> <b>Mewujudkan</b> <b>Tata</b> <b>Pemerintahan</b> <b>yang Demokratis</b>	<b>Ke-1</b> <b>Menghadirkan kembali</b> <b>negara untuk melindungi</b> <b>segenap bangsa dan</b> <b>memberikan rasa aman</b> <b>kepada seluruh warga</b> <b>negara;</b>	<b>ke-2</b> <b>Terwujudnya reformasi</b> <b>Tata Kelola</b> <b>Pemerintahan yang baik</b> <b>(good governance).</b>
<b>Ke-3</b> <b>Mewujudkan</b> <b>politik luar negeri</b> <b>bebas-aktif dan</b> <b>memperkuat jati</b> <b>diri sebagai</b> <b>negara maritim</b>		<b>Ke-2</b> <b>Mengembangkan tata</b> <b>kelola pemerintahan</b> <b>yang bersih efektif,</b> <b>demokratis, dan</b> <b>terpercaya;</b>	
		<b>Ke-4</b> <b>Memperkuat kehadiran</b> <b>negara dalam</b> <b>melakukan reformasi</b> <b>sistem dan penegakan</b> <b>hukum yang bebas</b> <b>korupsi, bermartabat,</b> <b>dan terpercaya</b>	
<b>Ke-6</b> <b>Mewujudkan</b> <b>Indonesia menjadi</b> <b>negara maritim</b> <b>yang mandiri,</b> <b>maju, kuat, dan</b> <b>berbasis</b> <b>kepentingan</b> <b>nasional.</b>			

Tema Pembangunan Jawa-Bali Dalam RPJMN 2015-2019 dimana DIY berada di dalamnya ialah, sebagai *Salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia dengan pengembangan ekonomi kreatif dan Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perkapalan dan pariwisata bahari.* Gerbang destinasi wisata di DIY akan terkait dengan destinasi Jawa Tengah untuk wisata religi bagi penganut agama Budha Candi Borobudur Magelang dan pengembangan industri kreatif yang menonjol di DIY antara lain barang antik, dan seni pertunjukan<sup>11</sup>. Sementara itu, pembangunan berbasis maritim selaras dengan tema mendasar dari visi Gubernur DIY dalam *"Menyongsong Abad Samudera."*

<sup>11</sup>Buku III RPJMN

Sasaran penting pembangunan kewilayahan DIY yang termuat dalam RPJMN 2015-2019 ialah sasaran makro yang perlu mendapat perhatian yakni Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran. Sasaran pembangunan makro tersebut menjadi penekanan dan perlu dilakukan langkah-langkah untuk,<sup>12</sup>

- 1) Akselerasi laju pertumbuhan ekonomi untuk mendorong peningkatan distribusi PDRB Provinsi D.I Yogyakarta terhadap nasional.
- 2) Penurunan Gini Rasio untuk mengurangi kesenjangan antarindividu.
- 3) Peningkatan pendapatan perkapita dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan sekaligus pengendalian tingkat inflasi untuk mendorong pertumbuhan pengeluaran perkapita yang akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.
- 4) Dari sisi spasial (kewilayahan), pembangunan perlu difokuskan pada pengembangan Kab.Kulonprogo, Kab.Bantul dan Kab. Gunungkidul terutama dari aspek pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan.

Adapun sasaran RPJMD DIY apabila diselaraskan dengan sasaran RPJMN dapat digambarkan sebagai berikut.

**Tabel V-6 Penyelarasan Sasaran RPJMD DIY dan RPJMN**

No.	RPJMD Provinsi				RPJMN	
	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran/Indikator Sasaran/ Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/ Impact	Sasaran/ Impact
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia	Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban	Meningkatnya a kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin kebhineka-tunggal-ikatan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan	1.1.Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Sasaran Makro	
				a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Pokok: Pembangunan Manusia dan Masyarakat
					Sasaran Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan	Pokok: Pembangunan Gender dan Perempuan
				b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	
					Sasaran Makro	

<sup>12</sup> Gunawan, Awan. 2016. *Posisi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Konstelasi Wilayah Nasional Menurut Rpjmn 2015-2019*. Paparan dalam Rakor Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan DIY, 2016. Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan Kedeputan Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

No. RPJMD Provinsi		RPJMN				
	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran/Indikator Sasaran/ Impact	Sasaran/Indikator Impact	Sasaran/
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
			mengemban gkan budaya Yogyakarta	1.2. Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat.	Sasaran Pembangunan Masyarakat	Pokok: Manusia dan
			Indikator Tujuan: Angka Inclusive Growth Index (IGI) 5,59 (2016) menjadi 6,2 (2022);	a. Indeks Gini	a. Indeks Gini	
				b. Persentase Angka Kemiskinan	Sasaran Makro	
					Sasaran Ekonomi Makro	Pokok:
					Tingkat Kemiskinan	
				a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	
				1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Sasaran Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama	
					Sasaran Kebudayaan	Pokok:
				a. Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan keragaman budaya yang mencakup adat, tradisi, kepercayaan serta nilai-nilai positif sejarah bangsa untuk mendukung terwujudnya karakter dan jati diri bangsa yang memiliki ketahanan budaya yang tangguh;	
					Meningkatnya apresiasi terhadap keragaman seni dan kebudayaan;	
					Meningkatnya kualitas pengelolaan dalam upaya pemeliharaan dan pengembangan warisan budaya;	
					Meningkatnya kerjasama dan pertukaran informasi budaya antardaerah serta antara Indonesia dan mancanegara;	

No.	RPJMD Provinsi				RPJMN	
	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran/Indikator Sasaran/ Impact	Sasaran/Indikator Impact	Sasaran/ Impact
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
					Meningkatnya kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan dalam mendukung upaya pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan	
				1.4. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	Sasaran Makro	
					Sasaran	Pokok:
					Ekonomi Makro	
				a. Pertumbuhan Ekonomi.	a. Pertumbuhan Ekonomi.	
				b. IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan	
					Sasaran	Pokok:
					Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar dan Konektivitas	
					a. Lingkungan : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	
					b. Lingkungan : Emisi Gas Rumah Kaca	
					c. Lingkungan : Tambahan Rehabilitasi Hutan	
				c. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Sasaran Bidang Wilayah dan Tata Ruang	
					Sasaran : Tata Ruang	
					Tersedianya Peraturan Perundang-undangan Bidang Tata Ruang yang Lengkap, Harmonis, dan Berkualitas	
					Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Bidang Tata Ruang	
					Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas RTR serta Terwujudnya dan Tertib Pemanfaatan dan	

No.	RPJMD Provinsi				RPJMN	
	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran/Indikator Sasaran/ Impact	Sasaran/Indikator Impact	Sasaran/ Impact
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
					Pengendalian Ruang	Pemanfaatan Ruang
					Meningkatnya Pengawasan Penataan Ruang	Kualitas Penyelenggaraan penataan ruang berupa peningkatan kualitas pemanfaatan sistem informasi yang memadai dalam rangka pemantauan dan evaluasi keberhasilan penyelenggaraan penataan ruang yang didukung indikator outcome dan baseline, dan sistem evaluasi tingkat pencapaian implementasi RTR.
				d. Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	Sasaran Bidang Wilayah dan Tata Ruang  Sasaran : Tata Ruang	
					Tersedianya Peraturan Perundang-undangan Bidang Tata Ruang yang Lengkap, Harmonis, dan Berkualitas	
					Meningkatnya Kelembagaan Bidang Tata Ruang	Kapasitas
					Meningkatnya Kuantitas Tertib dan Pengendalian Ruang	Kualitas RTR serta Pemanfaatan dan Pemanfaatan Ruang

No.	RPJMD Provinsi				RPJMN	
	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran/Indikator Sasaran/ Impact	Sasaran/Indikator Impact	Sasaran/ Impact
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
					Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang Peningkatan kualitas pengawasan penataan ruang berupa pemanfaatan sistem informasi yang memadai dalam rangka pemantauan dan evaluasi keberhasilan penyelenggaraan penataan ruang yang didukung indikator outcome dan baseline, dan sistem evaluasi tingkat pencapaian implementasi RTR.	
				1.5. Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah.	Sasaran Pembangunan Kewilayahan dan Antarwilayah	
				a. Indeks Williamson	a. Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah	
					b. Peran Wilayah dalam Pembentukan PDB Nasional : Jawa	
					c. Pembangunan Perdesaan : Peningkatan desa	
					d. Pembangunan Kawasan Perkotaan : Penguatan 39 pusat	
2		Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis;		2.1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan	Sasaran Bidang Hukum dan Aparatur	
					Sasaran Pokok: Bidang Aparatur	
				a. Opini BPK	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel : Opini WTP atas Laporan Keuangan Provinsi	
				b. Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP)	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel : Instansi Pemerintah yang Akuntabel (Skor B atas SAKIP) Provinsi	

No. RPJMD Provinsi					RPJMN	
	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran/Indikator Sasaran/ Impact	Sasaran/Indikator Impact	Sasaran/ Impact
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
				2.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Sasaran Bidang Wilayah dan Tata Ruang	
				a. Persentase capaian sasaran Pelaksanaan Keistimewaan.	Efektivitas pelaksanaan Otonomi Khusus : Terlaksananya evaluasi pelaksanaan otsus dan pembenahan terhadap kelembagaan, aparatur, dan pendanaan pelaksanaan otsus;	
					Efektivitas pelaksanaan Otonomi Khusus : Tersusunnya peraturan perundangan dan kerangka regulasi yang mengatur mengenai otonomi khusus/istimewa;	
					Efektivitas pelaksanaan Otonomi Khusus : Menerbitkan regulasi daerah dalam rangka pemantapan sistem tata kelola pemerintahan yang baik;	
					Efektivitas pelaksanaan Otonomi Khusus : Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah otsus/ daerah istimewa	
				2.3. Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	Sasaran Bidang Wilayah dan Tata Ruang	
				a. bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk	Sasaran Pokok: Pertanahan	
					Meningkatnya kepastian hukum hak atas tanah	

No.	RPJMD Provinsi				RPJMN	
	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran/Indikator Sasaran/ Impact	Sasaran/Indikator Impact	Sasaran/ Impact
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
				dikelola serta dimanfaatkan	Semakin baiknya proporsi kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat	
					Meningkatnya kepastian ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	
					Meningkatnya pelayanan pertanahan	

## **BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Strategi merupakan serangkaian upaya yang didasarkan pada potensi sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan pembangunan guna mewujudkan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Secara konseptual, satu strategi dapat dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Sementara itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan strategi agar lebih sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang berkelanjutan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode pembangunan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Hasil-hasil pembangunan yang sudah dicapai DIY harus dipertahankan dan ditingkatkan dengan melakukan adaptasi terhadap perkembangan jaman, kemajuan daerah lainnya, dan lingkungan eksternal lainnya. Disamping itu lingkungan internal juga menjadi pertimbangan yang penting karena didalamnya berisi sumber daya yang dimiliki sehingga tujuan, sasaran, visi, dan misi yang dirumuskan harus berdasarkan kondisi riil.

### **VI.1 Strategi**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017-2022 tidak terlepas dari tahapan lima tahunan Rencana Jangka Panjang Daerah. Tahapan dan strategi Tahun 2017-2022 merupakan kesinambungan yang tidak terpisahkan dari RPJMD 2012-2017, dimana tahun terakhir RPJMD 2012-2017 akan menjadi tahun awal tahapan dan strategi Tahun 2017-2022.

Perumusan RPJMD 2017-2022 Pemda DIY dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi capaian RPJMD periode sebelumnya termasuk tahapan-tahapan yang dirumuskan didalamnya dan analisis faktor internal maupun faktor eksternal berdasarkan hasil telaah visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan. Analisis faktor-faktor internal dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sedangkan analisis faktor-faktor eksternal diperlukan untuk mengetahui peluang dan ancaman yang dihadapi Pemda DIY dalam mencapai tujuan pembangunan.

#### **VI.1.1 Capaian Sasaran Pembangunan Pemda DIY 2012-2017**

Pembangunan daerah di DIY merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi dan efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan. Sinergisitas tersebut tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi.

Dari 17 indikator kinerja utama, yang tertuang dalam RPJMD 2012-2017, terdapat 10 indikator yang sudah tercapai dengan optimal–bahkan melebihi target yang dicanangkan–. Ke-10 indikator tersebut meliputi: Derajat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya, Angka Melek Huruf, Persentase Satuan Pendidikan Yang Menerapkan Model Pendidikan Berbasis Budaya, Angka Harapan Hidup, Jumlah Wisatawan (Baik Wisnus Maupun Wisman), Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Opini Pemeriksaan BPK, Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan, dan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTRW Provinsi.

## **VI.1.2 Kondisi Daerah, Capaian Pembangunan, dan Isu-Isu Strategis**

### **Pembangunan Nasional**

Tingkat pencapaian visi dan misi Pemda DIY periode RPJMD 2012-2017 diukur dalam tiga (3) aspek, meliputi (1) aspek kesejahteraan masyarakat, (2) Aspek pelayanan umum (3) Aspek daya saing daerah.

**Aspek ekonomi** dianalisis menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan wilayah. Terdapat beberapa catatan kondisi makro DIY yang ditunjukkan oleh indikator-indikator tersebut selama kurun waktu lima tahun terakhir.

*Pertama*, pertumbuhan ekonomi DIY selama 2011-2016 berfluktuasi. Selama kurun waktu tersebut, capaian pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah 5,47% tahun 2013 sementara terendah adalah 4,95% tahun 2015. Lebih lanjut, dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa, pertumbuhan ekonomi DIY relatif rendah. Memperhatikan kemampuan keuangan daerah riil yang ada di Bab III dimana ketergantungan akan silpa pertahun sebesar 2,5 % untuk menutupi pembiayaan pembangunan, khususnya untuk program-program strategis yang memungkinkan menghasilkan *revenue* semisal SPAM Kulon Progo, TPA Piyungan, Pengelolaan Limbah B3, Jogja Agro Techno Park bahkan bila memungkinkan untuk penyelesaian dan pengelolaan Pelabuhan Tanjung Adi Karto, perlu ada alternatif pendanaan selain dari APBD. Hal ini untuk mempercepat kemanfaatan pembangunan bisa segera dinikmati masyarakat.

*Kedua*, ketimpangan pendapatan yang dihitung dengan Indeks Gini menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Indeks Gini tahun 2011 cenderung sama dengan tahun 2016, yaitu 0,4230 dan angka tersebut lebih besar dibandingkan Indeks Gini Nasional. Sementara itu, ketimpangan wilayah yang diindikasikan oleh Indeks Williamson menunjukkan trend yang menurun.

*Ketiga*, tingkat kemiskinan DIY cenderung mengalami penurunan dari tahun 2011 sebesar 16,08% turun menjadi 12,36% pada tahun 2017. Namun, capaian tahun 2017 tersebut masih lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan nasional.

**Aspek sosial dan budaya** tercatat beberapa capaian. *Pertama*, beberapa capaian indikator pendidikan, seperti Angka Harapan Lama Sekolah (AHL) dan angka rata-rata lama sekolah menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antar wilayah di DIY. Capaian indikator Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta berada di atas rata-rata capaian DIY sedangkan Kabupaten Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo masih relatif rendah. *Kedua*, capaian indikator kesehatan, seperti Angka Kematian Ibu (AKI) masih perlu mendapat perhatian karena pada tahun 2016 terjadi peningkatan kasus kematian ibu. Sementara itu,

jumlah kematian bayi dan jumlah kematian balita meskipun memiliki kecenderungan menurun tetapi jumlahnya masih besar.

**Aspek Layanan Umum** di bidang pelayanan pendidikan meskipun capaian DIY di atas rata-rata nasional, tetapi perlu upaya mengurangi kesenjangan antar daerah.

Dalam bidang kesehatan masih diperlukan akselerasi pemenuhan akses dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan pengendalian penyakit, meningkatkan gizi masyarakat dan mengedepankan upaya promotif dan preventif. Penyediaan air minum sebagai kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi di DIY masih perlu percepatan dalam penyediaan air minum agar seluruh warga di DIY mendapatkan air minum. Pelayanan dalam bidang perumahan rakyat agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum masih menjadi agenda prioritas. Kondisi lingkungan yang terkait dengan kesehatan masyarakat juga perlu mendapatkan perhatian, seperti pencemaran sungai dan kualitas air tanah yang tidak memenuhi baku mutu karena tercemar bakteri.

Pemenuhan hak kependudukan Kepemilikan dokumen administrasi kependudukan yang lain, kepemilikan akta (terutama akta kelahiran, akta kematian, dan akta perkawinan) oleh penduduk, masih rendah. Cakupan kepemilikan akta kelahiran anak di DIY sebesar 80,97%. Perhatian terhadap pelayanan terhadap anak juga harus dioptimalkan mengingat masih terjadinya kekerasan terhadap anak, anak terlantar, perkawinan di bawah umur.

Pemenuhan layanan Keluarga berencana dalam perspektif pengendalian penduduk diperlukan agar penduduk tumbuh seimbang dengan target *Total Fertility Rate* (TFR) sebesar 2,1 sehingga *dependency ratio* kecil sehingga banyak penduduk produktif yang bekerja yang kemudian mendorong pada peningkatan ekonomi. Di sisi lain perlu juga memperbaiki pelayanan terhadap lansia karena diproyeksikan semakin besar jumlahnya.

Isu kesetaraan gender perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan program kegiatan, karena isu gender masih cukup mengemuka seperti aktivitas perempuan dalam kegiatan ekonomi masih tertinggal dengan laki-laki, demikian halnya dengan posisi perempuan dalam lembaga politik yang masih rendah dibanding laki-laki. Di sektor domestik perempuan masih memikul beban ganda, yaitu mengurus kebutuhan domestik dan masih harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di samping itu kekerasan dalam rumah tangga dimana lebih banyak perempuan sebagai korban.

Kemacetan terjadi karena pertumbuhan volume (arus) lalu lintas yang semakin tinggi dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan antara lain karena pertumbuhan kendaraan bermotor yang cukup signifikan yaitu sekitar 10,7% per tahun untuk kendaraan roda empat dan 7,9% per tahun untuk kendaraan roda dua pada periode 2010-2015, belum optimalnya manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan, dan juga belum idealnya pelayanan angkutan umum. Perkembangan angkutan berbasis daring yang marak juga menjadi salah satu kompetitor bagi kinerja layanan angkutan umum.

Penanganan yang perlu dilakukan untuk mengatasi hal ini dapat bersifat pemberian supply secara terus menerus yang dapat berupa ; manajemen lalu lintas berbasis APILL, sistem satu arah, memperlebar ruas jalan atau pendekat pada simpang dan mengelola *demand* dengan baik yakni dengan memberikan pembatasan terhadap arus (*traffic restraint*) supaya faktor Q (arus/volume) dapat ditekan pertumbuhannya.

Kebijakan dalam mengurangi kemacetan secara umum adalah dengan melakukan distribusi peyediaan sarana pelayanan umum (fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur ekonomi, dll) yang merata dengan kualitas yang tidak jauh berbeda satu dengan yang lain. Hal ini akan berdampak kepada pengurangan mobilitas orang dan barang dalam satu wilayah.

Secara teknis, hal-hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Memperbaiki dan mengembangkan angkutan massal (baik berbasis bus atau dengan angkutan umum perkotaan Trans-Jogja, atau dengan mulaimembangun angkutan umum berbasis rel untuk kawasan perkotaan Yogyakarta). Pengembangan angkutan umum ini harus pula diimbangi dengan penambahan jalur layanan, keterpaduan, kepastian jadwal, dll.
2. Strategi membatasi akses kendaraan pribadi, dengan cara-cara :
  - a. Membuat sistem satu arah (SSA) pada beberapa ruas jalan (namun diberikan *contraflow* untuk angkutan umum).
  - b. Mendorong pihak Kota Yogyakarta untuk menerapkan tarif parkir sangat tinggi di pusat kota, namun memberikan layanan parkir gratis pada lokasi-lokasi yang terintegrasi dengan halte Trans-Jogja.
  - c. Melarang/membatasi akses-akses untuk mobil pribadi pada ruas-ruas jalan tertentu.
  - d. Menerapkan pajak kendaraan bermotor (pribadi) berbasis kilometer.
  - e. Pembatasan kecepatan pada ruas-ruas jalan lokal.
  - f. Menerapkan jalan berbayar.
3. Mulai membangun *off-street parking* atau gedung parkir untukmeningkatkan kapasitas ruas jalan di wilayah perkotaan Yogyakarta.
4. Mengembangkan TOD (Transit Oriented Development) pada titik-titik simpul angkutan umum.
5. Mengembangkan fasilitas *park and ride*.

Layanan Trans Jogja dengan Sistem *Buy the Service* yang telah dilakukan selama ini merupakan solusi perbaikan layanan public terhadap kinerja layanan angkutan perkotaan pada waktu itu dengan menggunakan sistem setoran yang memberikan efek negative bagi pemerintah, operator dan terutama masyarakat pengguna.

Situasi perkembangan angkutan perkotaan di DIY pada saat itu, dimana koperasi sebagai pemegang ijin trayek kurang berdaya dalam mengendalikan operasional armada karena kepemilikan dilakukan oleh perorangan Hal ini berakibat pada memburuknya pelayanan angkutan kepada masyarakat. Di sisi lain, penetapan tarif oleh pemerintah yang tidak diimbangi dengan aspek “menjaga *demand*” (dan derasnya kepemilikan kendaraan pribadi seperti sepeda motor) semakin mengurangi jumlah penumpang angkutan umum. Pengurangan jumlah penumpang pun akan berakibat pada menurunnya pendapatan operator, sehingga operator akan berusaha meminimalisasi pengeluaran (*cost*) dengan mengorbankan pelayanan. Pola ini membentuk “lingkaran setan” angkutan umum, yang berakibat fatal terhadap eksistensi angkutan umum itu sendiri. Hal ini dibuktikan dalam studi pada Tahun 2005 yang menunjukkan bahwa tingkat muat (*load factor*) angkutan perkotaan

rata-rata hanya mencapai angka 27,22%, atau rata-rata tidak mencapai sepertiga dari kapasitas tempat duduknya.

Berdasarkan Rencana Induk Transportasi tahun 2017 telah direncanakan beberapa indikator kinerja transportasi sebagai berikut; *mode share* angkutan umum sebesar 40% pada tahun ke-10, meningkatkan pelayanan angkutan umum dari 32% menjadi 57% dari total panjang jalan Provinsi dan Nasional, kenaikan kecepatan rata-rata pada seluruh jaringan jalan dari 22,20 km/jam menjadi 38,83 km/jam, menjaga tingkat kecelakaan dan tingkat fatalitas maksimal 4,7% per tahun. Target-target tersebut diharapkan dapat tercapai melalui strategi implementasi :

- a) Penyediaan angkutan umum dengan kualitas pelayanan tinggi
- b) Peningkatan kondisi fasilitas untuk berjalan kaki dan bersepeda
- c) Keterpaduan antar-moda yang efektif
- d) Kebijakan tata guna lahan yang dapat mendukung sustainibilitas transport
- e) Diterapkannya pembatasan kendaraan pribadi

Strategi Manajemen Permintaan Transportasi (*travel demand management*) perlu diterapkan untuk memaksimalkan efisiensi sistem transportasi melalui pembatasan penggunaan kendaraan pribadi yang tidak perlu dan mendorong moda transportasi yang lebih efektif, sehat dan ramah lingkungan, seperti angkutan umum dan kendaraan tidak bermotor. Ada dua jenis upaya dasar untuk meningkatkan efisiensi sistem transportasi yaitu *push* dan *pull*: *Push* yaitu upaya yang membuat kendaraan pribadi menjadi kurang menarik untuk digunakan, dan *Pull* yaitu upaya yang membuat moda transportasi selain kendaraan pribadi menjadi lebih menarik. Keduanya saling terkait dan harus dilakukan secara bersama-sama untuk memaksimalkan penerapannya secara efektif.

**Aspek Daya Saing Daerah** (*competitiveness*) merupakan salah satu kata kunci yang lekat dengan pembangunan ekonomi daerah, dan salah satu isu sentral. Daya saing daerah menjadi penting karena merupakan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional.

Indikator yang digunakan untuk menganalisis daya saing daerah meliputi pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita, Nilai Tukar Petani (NTP), pengeluaran konsumsi non-pangan perkapita, rasio ekspor-impor terhadap PDRB, angka kriminalitas, dan angka ketergantungan. Terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan terkait capaian indikator-indikator tersebut. *Pertama*, pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita DIY memiliki tren meningkat, yang menunjukkan bahwa daya beli masyarakat DIY mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut berasal dari kelompok masyarakat dengan pengeluaran konsumsi perkapita per bulan lebih dari Rp500 ribu. Hal ini menjadi indikasi bahwa perlu upaya untuk meningkatkan produktivitas kelompok masyarakat pengeluaran per kapita rendah. *Kedua*, NTP DIY memiliki kecenderungan meningkat tetapi masih relatif kecil di beberapa sub sektor pertanian. NTP sub sektor perkebunan relatif tinggi dibandingkan sub sektor lain. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kesejahteraan petani cenderung meningkat, tetapi penting

untuk meningkatkan nilai tambah sebagai pengungkit pendapatan petani. *Ketiga*, masyarakat DIY memiliki pola pengeluaran konsumsi non-pangan lebih besar dibandingkan konsumsi pangan. *Keempat*, keterbukaan ekonomi DIY dilihat dari rasio ekspor-impor terhadap PDRB masih relatif rendah meskipun memiliki tren meningkat. *Kelima*, angka kriminalitas DIY cenderung meningkat, terutama kasus terkait pencurian, penipuan, penganiayaan, dan narkoba. Hal ini penting diperhatikan sebagai upaya menjaga stabilitas keamanan untuk mendorong peningkatan aktivitas ekonomi. Keenam, angka ketergantungan DIY selama lima tahun terakhir memiliki tren menurun, yang menunjukkan bahwa DIY memiliki potensi sumber daya manusia yang produktif yang dapat menjadi salah satu keunggulan DIY.

### **VI.1.3 Analisis SWOT**

#### **VI.1.3.1 Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal Misi 1**

##### **1. Analisis Eksternal**

Secara umum, analisis eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan ancaman yang dihadapi DIY dalam kurun waktu lima tahun kedepan sebagai dasar untuk meletakkan kerangka pembangunan daerah. Tinjauan eksternal ini untuk melihat posisi DIY baik dalam lingkup regional, nasional maupun internasional.

Hasil identifikasi peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*):

##### **a Peluang**

- 1) Kesepakatan AFTA (ASEAN Free Trade Area) membuka peluang DIY ke akses pasar internasional dan kerjasama antar wilayah baik nasional maupun internasional dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang dengan pesat.
- 2) DIY sebagai pusat kegiatan Nasional akan menjadi satu-satunya hub koridor di wilayah Selatan Jawa.
- 3) DIY dapat menjadi bagian dari warisan budaya dunia, sehingga sangat strategis menjadi pusat pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan dunia, antara lain kegunungapian, kegempabumian, kebudayaan, kemasyarakatan, dan lain-lain;
- 4) Meningkatnya minat pariwisata dan kegiatan pendidikan yang menarik minat investor asing untuk melakukan investasi di Provinsi DIY;
- 5) Meningkatnya peluang kerjasama pembangunan antar daerah dan lembaga ilmiah nasional maupun luar negeri, seperti pengembangan Geopark di Kabupaten Gunungkidul;
- 6) Pemerintah sudah membuka peluang terkait penyelenggaraan program-program strategis melalui kerjasama dengan badan usaha/swasta dengan terbitnya Peraturan Presiden nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.

##### **b Ancaman**

- 1) Kenyamanan yang dirasakan masyarakat yang pernah tinggal di Yogyakarta menyebabkan Urbanisasi dan migrasi yang cukup tinggi dan berpotensi menggeser kehidupan sosial masyarakat DIY dan akhirnya infiltrasi budaya asing

yang mengganggu stabilitas sosial dan budaya lokal, berpotensi pada lunturnya nilai-nilai kearifan lokal.

- 2) Kebutuhan perumahan yang tinggi menyebabkan nilai tanah meningkat dan menarik bagi pengembang untuk berinvestasi mengakibatkan harga tanah tidak terkendali, disisi lain penduduk DIY tidak mampu menjangkau karena harga lahan yang tinggi, pengembangan permukiman yang meluas arahnya ke daerah-daerah kawasan lindung;
- 3) Masuknya pasar *retailmodern* mengancam keberadaan usaha masyarakat lokal;
- 4) Sebagian besar wilayah DIY adalah wilayah rawan bencana, di daerah selatan DIY tidak terlepas dari ancaman perubahan iklim yang serius ditandai dengan meningkatnya suhu lingkungan akibat pemanasan global (*global warming*), meningkatnya permukaan air laut yang menyebabkan muka air laut meninggi, meningkatnya emisi gas rumah kaca karena rusaknya lapisan ozon;
- 5) Adanya kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat limbah industri; rumah tangga dan jasa dan meningkatnya arus transportasi, alih fungsi lahan yang menyebabkan ruang terbuka hijau semakin berkurang serta ancaman kerusakan kawasan hutan, karst, pantai, gumuk pasir dll.
- 6) Eksternalitas DIY (konstelasi wilayah secara regional) tidak semuanya dapat optimum misalnya Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonogiri yang berbatasan langsung dengan DIY memiliki pertumbuhan ekonomi rendah.
- 7) Kejahatan transnasional yang menjadi ancaman bagi keamanan dan kestabilan kegiatan perekonomian khususnya pembangunan pariwisata yang mensyaratkan keamanan dan kenyamanan sebagai prasyarat utama.
- 8) Ancaman narkoba karena DIY merupakan pasar potensial dimana pengguna utamanya adalah generasimuda.
- 9) Prosedur dan mekanisme proses kerjasama pemerintah dan badan usaha cukup rumit sehingga masih ada keengganan dari Pemerintah Daerah maupun swasta untuk melaksanakan mekanisme pembiayaan non pemerintah untuk program strategis daerah.

## 2. Analisis Kondisi Internal

Tinjauan atau analisis internal kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan dalam rangka pemetaan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan serta mengenali dan memahami kelemahan/kekurangan agar dapat diantisipasi.

### a Kekuatan:

- 1) Pembangunan bandara internasional di Kecamatan Temon sebagai akses masuk ke Provinsi DIY akan menyebabkan perkembangan ekonomi yang cukup signifikan
- 2) Pembangunan Jalur Jalan Lingkar Selatan (JJLS) yang akan meningkatkan aksesibilitas dari wilayah selatan Pulau Jawa. Posisi DIY yang strategis dalam konstelasi wilayah regional Jawa yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah

menjadikan DIY sebagai salah satu pusat pertumbuhan (growth pole) di wilayah Selatan serta dilalui jalur transportasi barat-timur;

- 3) Potensi unggulan di bidang pertanian baik lahan kering dan basah, perikanan pesisir, peternakan, kehutanan (hutan produksi), pertambangan pasir, batu kapur, dan kaolin;
- 4) Potensi industri pengolahan berbasis produk lokal yang dikembangkan oleh masyarakat asli DIY antara lain kerajinan grabah, anyaman bambu, kerajinan kayu, dan potensi industri pengolahan berbasis hasil pertanian seperti makanan olahan;
- 5) Potensi sumber daya air yang melimpah karena DIY memiliki kawasan resapan air yang luas, sumber mata air, dan embung;
- 6) Potensi sumberdaya manusia yang jumlahnya cukup besar di angkatan kerja;
- 7) Komitmen para stakeholder pemerhati sejarah dan budaya serta konservasi artefak dan seni;
- 8) Kawasan, bangunan, benda, situs, dan struktur cagar budaya (*tangible asset*) dan adat istiadat, tradisi, seni pertunjukan, musik dan lagu daerah, bahasa dan aksara (*intangible asset*) merupakan aset bernilai tinggi yang masih melekat dalam kondisi DIY dan menjadi daya tarik luar biasa bagi pengembangan pariwisata budaya dan sejarah;
- 9) Potensi wisata unggulan yang menjadikan DIY sebagai Daerah Tujuan Wisata kedua setelah Bali.
- 10) Yogyakarta sebagai salah satu pusat pendidikan terkemuka di Indonesia bahkan dalam lingkup Asia Tenggara. DIY memiliki icon sebagai kota pendidikan dengan dukungan keberadaan perguruan tinggi negeri dan swasta unggulan dan melimpahnya potensi SDM unggul;
- 11) Komitmen para pelaku pendidikan yang kuat untuk mengembangkan kualitas pendidikan di DIY, Sarana dan prasarana pendidikan yang memadai hampir di seluruh wilayah DIY;
- 12) Komitmen pimpinan pada pengarusutamaan gender kuat;
- 13) Banyak potensi program – program strategis yang dapat didanai melalui mekanisme penganggaran non Pemerintah;

**b Kelemahan:**

- 1) Pemanfaatan Sumber daya Alam yang belum optimal;
- 2) Sarana dan prasarana perekonomian daerah dan penunjang pembangunan yang masih terbatas serta belum sesuai kebutuhan;
- 3) Pengendalian pemanfaatan ruang dan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya ketaatan pemanfaatan ruang masih rendah;
- 4) Sistem transportasi yang belum memadai untuk menjangkau daerah tertentu;
- 5) Tingkat pengangguran terdidik yang cukup tinggi;
- 6) Kesenjangan mutu pendidikan antara kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan;
- 7) Kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana masih rendah;
- 8) Ketimpangan tingkat kesehatan masyarakat antar daerah;

- 9) Distribusi pertumbuhan ekonomi belum terdistribusi secara merata ke kabupaten/kota. Masih terjadi ketimpangan pendapatan yang cukup lebar antara kabupaten/kota;
- 10) Petumbuhan ekonomi belum mampu mendorong terciptanya lapangan kerja yang luas bagi masyarakat;
- 11) Kapasitas SDM Pemda yang memahami aturan KPBU dan mekanisme perjanjian berkaitan dengan kerjasama dengan swasta sangat terbatas, belum adanya kelembagaan yang khusus menangani kerjasama dengan badan usaha/swasta dan belum adanya kesatuan visi di dalam memutuskan proyek-proyek yang bisa di KPBU kan;

### 3. Analisis Kondisi Internal

**Tabel VI-1 Analisis SWOT Misi 1**

<i>Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Berkeadaban</i>		
FAKTOR INTERNAL  &  FAKTOR EKSTERNAL	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Pembangunan bandara internasional di Kecamatan Temon sebagai akses masuk ke Provinsi DIY akan menyebabkan perkembangan ekonomi yang cukup signifikan</li> <li>o Pembangunan Jalur Jalan Lingkar Selatan (JJLS) yang akan meningkatkan aksesibilitas dari wilayah selatan Pulau Jawa. Posisi DIY yang strategis dalam konstelasi wilayah regional Jawa yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah menjadikan DIY sebagai salah satu pusat pertumbuhan (growth pole) di wilayah Selatan serta dilalui jalur transportasi barat-timur;</li> <li>o Potensi sumberdaya manusia yang jumlahnya cukup besar di angkatan kerja;</li> <li>o Yogyakarta sebagai salah satu pusat pendidikan terkemuka di Indonesia bahkan dalam lingkup Asia Tenggara. DIY memiliki icon sebagai kota pendidikan dengan dukungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Petumbuhan ekonomi belum mampu mendorong terciptanya lapangan kerja yang luas</li> <li>o Tingkat pengangguran terdidik yang cukup tinggi;</li> <li>o Ketimpangan tingkat kesehatan masyarakat antar daerah;</li> <li>o Kesenjangan mutu pendidikan antara perkotaan dan perdesaan;</li> <li>o Kesenjangan tingkat pendapatan dan kesenjangan distribusi pertumbuhan ekonomi yang tinggi;</li> <li>o Sarana dan prasarana perekonomian daerah dan penunjang pembangunan yang masih terbatas serta belum sesuai kebutuhan;</li> <li>o Distribusi pertumbuhan ekonomi belum terdistribusi secara merata ke kabupaten/kota. Masih terjadi ketimpangan pendapatan yang cukup lebar antara kabupaten/kota;</li> <li>o Pemanfaatan Sumber daya Alam yang belum optimal</li> <li>o Pengendalian pemanfaatan ruang dan kesadaran masyarakat tentang arti</li> </ul>

	<p>keberadaan perguruan tinggi negeri dan swasta unggulan dan melimpahnya potensi SDM unggul;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Komitmen para pelaku pendidikan yang kuat untuk mengembangkan kualitas pendidikan di DIY, Sarana dan prasarana pendidikan yang memadai hampir di seluruh wilayah DIY;</li> <li>o Komitmen pimpinan pada pengarusutamaan gender kuat;</li> <li>o Potensi penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai;</li> <li>o Potensi industri pengolahan berbasis produk lokal yang dikembangkan oleh masyarakat asli DIY antara lain kerajinan grabah, anyaman bambu, kerajinan kayu, dan potensi industri pengolahan berbasis hasil pertanian seperti makanan olahan;</li> <li>o Potensi wisata unggulan yang menjadikan DIY sebagai Daerah Tujuan Wisata kedua setelah Bali.</li> <li>o Potensi unggulan di bidang pertanian baik lahan kering dan basah, perikanan pesisir, peternakan, kehutanan (hutan produksi), pertambangan pasir, batu kapur, dan kaolin;</li> <li>o Potensi sumber daya air yang melimpah karena DIY memiliki kawasan resapan air yang luas, sumber mata air, dan embung;</li> <li>o Komitmen para stakeholder pemerhati sejarah dan budaya serta konservasi artefak dan seni</li> <li>o Kawasan, bangunan, benda, situs, dan struktur cagar budaya (tangible asset) dan adat istiadat, tradisi, seni pertunjukan, musik dan lagu daerah, bahasa dan aksara (intangible asset)</li> </ul>	<p>pentingnya ketaatan pemanfaatan ruang masih rendah;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Sistem transportasi yang belum memadai untuk menjangkau daerah tertentu;</li> <li>o Kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana masih rendah;</li> </ul>
--	---	--

	merupakan aset bernilai tinggi yang masih melekat dalam kondisi DIY dan menjadi daya tarik luar biasa bagi pengembangan pariwisata budaya dan sejarah	
<b>PELUANG (O)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Kesepakatan AFTA (<i>ASEAN Free Trade Area</i>) membuka peluang DIY ke akses pasar internasional dan kerjasama antar wilayah baik nasional maupun internasional dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang dengan pesat.</li> <li>o DIY sebagai pusat kegiatan Nasional akan menjadi satu-satunya hub koridor di wilayah Selatan Jawa</li> <li>o DIY dapat menjadi bagian dari warisan budaya dunia, sehingga sangat strategis menjadi pusat pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan dunia, antara lain kegunungpian, kegempabumian, kebudayaan, kemasyarakatan, dan lain-lain;</li> <li>o Meningkatnya minat pariwisata dan kegiatan pendidikan yang menarik minat investor asing untuk melakukan investasi di Provinsi DIY;</li> </ul>	<b>STRATEGI (S-O)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Peningkatan Kualitas manajemen dan layanan pendidikan di DIY</li> <li>o Peningkatan infrastruktur pada kawasan tertinggal dalam rangka memicu pertumbuhan ekonomi wilayah tertinggal</li> <li>o Meningkatkan pemberdayaan masyarakat</li> <li>o Mengoptimalkan kinerja sektor Dominan dengan fokus ekonomi berkelanjutan;</li> <li>o Akselerasi penciptaan dan penguatan pusat pertumbuhan baru dengan mendayagunakan lembaga ekonomi lokal</li> <li>o Peningkatan kewirausahaan dan penguatan kemandirian pelaku ekonomi lokal</li> <li>o Perlindungan dan Pengembangan Kawasan Keistimewaan</li> <li>o</li> </ul>	<b>STRATEGI (W-O)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Peningkatan Kualitas manajemen dan layanan pendidikan di DIY;</li> <li>o Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;</li> <li>o Menumbuhkan kewirausahaan dan kemandirian ekonomi lokal;</li> <li>o Pemenuhan layanan Dasar masyarakat miskin;</li> <li>o Peningkatan Pendapatan per Kapita Masyarakat;</li> <li>o Pengembangan kerjasama dengan stakeholder pelaku perkonomian;</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>o Meningkatnya peluang kerjasama pembangunan antar daerah dan lembaga ilmiah nasional maupun luar negeri, seperti pengembangan Geopark di Kabupaten Gunungkidul;</li> </ul>		
<b>ANCAMAN (T)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Kenyamanan yang dirasakan masyarakat yang pernah tinggal di Yogyakarta menyebabkan Urbanisasi dan migrasi yang cukup tinggi dan berpotensi menggeser kehidupan sosial masyarakat DIY dan akhirnya infiltrasi budaya asing yang mengganggu stabilitas sosial dan budaya lokal, berpotensi pada lunturnya nilai-nilai kearifan lokal.</li> <li>o Kebutuhan perumahan yang tinggi menyebabkan nilai tanah meningkat dan menarik bagi pengembang untuk berinvestasi mengakibatkan harga tanah tidak terkendali, disisi lain penduduk DIY tidak mampu menjangkau karena harga lahan yang tinggi, pengembangan permukiman yang meluas arahnya ke</li> </ul>	<b>STRATEGI (S-T)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Mengendalikan pertumbuhan penduduk;</li> <li>o Pemerataan dan pemenuhan standar pendidikan inklusif serta pengembangan pendidikan karakter ;</li> <li>o Pengembangan desa mandiri yang berketahanan budaya secara berkelanjutan</li> <li>o Internalisasi nilai-nilai budaya;</li> <li>o Pengembangan keterlindungan warga;</li> <li>o Pengembangan dan penguatan budaya lokal;</li> <li>o Pengembangan struktur dan pola ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten;</li> <li>o Peningkatan kualitas pengendaian pemanfaatan ruang;</li> <li>o Menumbuhkan kewirausahaan dan kemandirian ekonomi lokal;</li> <li>o Peningkatan upaya perlindungan dan pemenuhan hak dasar bagi keluarga miskin terhadap kebutuhan pokok, terutama pangan</li> <li>o</li> </ul>	<b>STRATEGI (W-T)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Mengoptimalkan kinerja sektor Dominan dengan fokus ekonomi berkelanjutan;</li> <li>o Menumbuhkan kewirausahaan dan kemandirian ekonomi lokal;</li> <li>o Pengembangan infrastruktur pendidikan di kawasan perdesaan;</li> <li>o Peningkatan Pendapatan per Kapita Masyarakat;</li> <li>o Peningkatan efektivitas dan efisiensi pembangunan dengan mendayagunakan pembiayaan alternatif di luar APBD</li> <li>o Peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar dan aksesibilitas yang mempercepat interkoneksi antarwilayah</li> <li>o Peningkatan kualitas pelaksanaan penataan, pembinaan dan pengawasan tata ruang dan pertanahan;</li> <li>o Peningkatan kesempatan kerja dan proporsi angkatan kerja berpendidikan tinggi;</li> <li>o Penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup;</li> <li>o Penguatan upaya penurunan kerentanan terhadap bencana;</li> <li>o Menjaga keamanan, dan ketertiban umum</li> </ul>

<p>daerah-daerah kawasan lindung;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Masuknya pasar <i>retail modern</i> mengancam keberadaan usaha masyarakat lokal;</li> <li>o Eksternalitas DIY (konstelasi wilayah secara regional) tidak semuanya dapat optimum misalnya Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonogiri yang berbatasan langsung dengan DIY memiliki pertumbuhan ekonomi rendah.</li> <li>o Kejahatan transnasional yang menjadi ancaman bagi keamanan dan kestabilan kegiatan perekonomian khususnya pembangunan pariwisata yang mensyaratkan keamanan dan kenyamanan sebagai prasyarat utama.</li> <li>o Ancaman narkoba karena DIY merupakan pasar potensial dimana pengguna utamanya adalah generasi muda.</li> <li>o Adanya kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat limbah industri; rumah tangga dan jasa dan meningkatnya arus transportasi, alih fungsi lahan yang menyebabkan ruang terbuka hijau</li> </ul>		
--	--	--

<p>semakin berkurang serta ancaman kerusakan kawasan hutan, karst, pantai, gumuk pasir dll.</p> <p>o Sebagian besar wilayah DIY adalah wilayah rawan bencana, di daerah selatan DIY tidak terlepas dari ancaman perubahan iklim yang serius ditandai dengan meningkatnya suhu lingkungan akibat pemanasan global (global warming), meningkatnya permukaan air laut yang menyebabkan muka air laut meninggi, meningkatnya emisi gas rumah kaca karena rusaknya lapisan ozon;</p>		
---	--	--

### VI.1.3.2 Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal Misi 2

#### 1. Analisis Kondisi Eksternal

Secara umum, analisis eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan ancaman yang dihadapi DIY dalam kurun waktu lima tahun kedepan sebagai dasar untuk meletakkan kerangka pembangunan daerah. Tinjauan eksternal ini untuk melihat posisi DIY baik dalam lingkup regional, nasional maupun internasional.

Hasil identifikasi peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*):

##### a Peluang:

- 1) Potensi pengembangan kerjasama dalam layanan publik;
- 2) Peningkatan tuntutan masyarakat yang cukup tinggi terhadap pelayanan birokrasi;
- 3) Perkembangan teknologi informasi yang cukup tinggi;
- 4) Komitmen pimpinan daerah yang tinggi terhadap pengembangan TI dalam rangka peningkatan layanan publik;
- 5) Potensi pengembangan kerjasama dalam layanan publik;

##### b Peluang:

- 1) Berkembangnya paham-paham anti demokrasi
- 2) Penetrasi modal asing yang mempengaruhi kebijakan pemerintah

## 2. Analisis Kondisi Internal

Tinjauan atau analisis internal kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan dalam rangka pemetaan kekuatan dan kelemahanyang dimiliki untuk diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan serta mengenali dan memahami kelemahan/kekurangan agar dapat diantisipasi.

### a Kekuatan:

- 1) Komitmen pimpinan daerah yang tinggi terhadap kualitas pelayanan publik;
- 2) Kondisi politik DIY yang relatif stabil, pasca penetapan UU no 13 Tahun 2012 menjadi daerah istimewa yang diakui keberadaan sejarah masa lampauya sebagai pusat budaya unggul dengan pengakuan kepada Kasultanan dan Kadipaten sebagai pemangku budaya yang didukung dengan anggaran keistimewaan yang memungkinkan DIY mempunyai sumberdaya untuk melaksanakan pembangunan.
- 3) Terdapat center of excellence yang memadai di DIY untuk pengembangan aparatur sipil negara;
- 4) Kreativitas dan inovasi serta budaya masyarakat DIY yang dikenal ramah dan toleran serta selalu menghindari konflik dan kekerasan menjadikan DIY sebagai salah satu kota ternyaman dan city of tolerance;
- 5) Komitmen kuat dari berbagai stakeholder Keistimewaan;
- 6) Komitmen pimpinan untuk mengelola tanah SG dan PAG

### b Kelemahan:

- 1) Pemanfaatan aset daerah yang belum optimal untuk meningkatkan PAD;
- 2) Kualitas layanan publik belum merata pada tataran OPD;
- 3) Potensi konflik sosial yang cukup tinggi;

## 3. Analisis SWOT Misi 2

Tabel VI-2 Analisis SWOT Misi 2

<i>Misi 2: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis;</i>		
FAKTOR INTERNAL  &  FAKTOR EKSTERNAL	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Komitmen pimpinan daerah yang tinggi terhadap kualitas pelayanan publik;</li> <li>o Kondisi politik DIY yang relatif stabil;</li> <li>o Terdapat center of excellence yang memadai di DIY untuk pengembangan aparatur sipil negara;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Potensi konflik sosial yang cukup tinggi;</li> <li>o Pemanfaat aset daerah yang belum optimal untuk meningkatkan PAD;</li> <li>o Kualitas layanan Publik yang belum merata antar OPD;</li> <li>o Harapan masyarakat yang terlampau tinggi terhadap penyelenggaraan pemerintahan</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Kreativitas dan inovasi serta budaya masyarakat DIY yang dikenal ramah dan toleran serta selalu menghindari konflik dan kekerasan menjadikan DIY sebagai salah satu kota ternyaman dan city of tolerance;</li> <li>o Komitmen kuat dari berbagai stakeholder Keistimewaan;</li> <li>o Komitmen pimpinan untuk mengelola tanah SG dan PAG</li> </ul>	
<b>PELUANG (O)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Peningkatan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan birokrasi;</li> <li>o Perkembangan teknologi informasi yang cukup tinggi;</li> <li>o Komitmen pimpinan daerah yang tinggi terhadap pengembangan TI dalam rangka peningkatan layanan publik;</li> <li>o Potensi pengembangan kerjasama dalam layanan publik;</li> </ul>	<b>STRATEGI (S-O)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Peningkatan pengelolaan tanah Kasultanan, Kadipaten, dan tanah desa</li> <li>o Mewujudkan sinergitas kelembagaan Pemerintah Provinsi Kabupaten Kota s/d Desa</li> <li>o <i>Penguatan</i> keistimewaan dalam Perangkat Daerah Pemerintah DIY dan Kab/Kota</li> <li>o Internalisasi keistimewaan dalam Perangkat Daerah, Kabupaten-Kota, Kecamatan, Desa</li> <li>o Meningkatkan tata kelola keuangan daerah (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban) yang baik (transparansi, akuntabel, dan partisipatif).</li> <li>o Peningkatan Kapasitas badan hukum (Kasultanan dan Kadipaten) dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan tanah</li> </ul>	<b>STRATEGI (W-O)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Penguatan praktik pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta optimalisasi aset pemerintah daerah;</li> <li>o Optimalisasi aset-aset pemerintah daerah.</li> <li>o Pengembangan pembiayaan pembangunan melalui kerjasama dengan swasta;</li> <li>o Penguatan integritas ASN</li> </ul>

	Kasultanan,Kadipaten, desa o Meningkatkan tata kelola keuangan daerah (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban) yang baik (transparansi, akuntabel, dan partisipatif). o Optimalisasi aset-aset pemerintah daerah.	
<b>ANCAMAN (T)</b>  o Berkembangnya paham-paham anti demokrasi; o Persaingan antar pemda yang semakin kompetitif;	<b>STRATEGI (S-T)</b>  o Menjaga keamanan, dan ketertiban umum o Meningkatkan tata kelola keuangan daerah (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban) yang baik (transparansi, akuntabel, dan partisipatif).; o Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. (pelayanan E-GOV dan Penumbuhan Inovasi pemda)	<b>STRATEGI (W-T)</b>  o Meningkatkan dukungan dan fasilitasi untuk mewujudkan stabilitas sosial; o Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan keuangan dan aset daerah; o Pengembangan keterlindungan warga

#### VI.1.4 Rumusan Strategi

Perumusan strategi hasil analisis SWOT seperti ditunjukkan pada sub bagian analisis SWOT dipilih untuk dirumuskan menjadi rumusan strategi yang disesuaikan dengan isu strategis dan rumusan visi, misi, tujuan sasaran Pemda DIY.

Setelah melalui proses penilaian atas alternatif strategi hasil dari analisis SWOT di atas dirumuskan strategi terpilih seperti dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel VI-3 Perumusan Strategi**

No	Permasalahan	Strategi
1	Pertumbuhan Ekonomi Yang belum inklusif	1) Menumbuhkan kewirausahaan dan kemandirian ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan (selaras dengan TPB 8)

No	Permasalahan	Strategi
		2) Memperkuat implementasi dan advokasi pengarusutamaan kesetaraan gender (selaras dengan TPB 5) 3) Mengoptimalkan kinerja sektor Dominan dengan fokus pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan ekonomi kreatif (selaras dengan TPB 8) 4) Memperluas kesempatan kerja, perlindungan pekerja, dan proporsi angkatan kerja terhadap lulusan pendidikan tinggi dan menengah (selaras dengan TPB 8) 5) Mengendalikan pertumbuhan penduduk 6) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat 7) Pengembangan keterlindungan warga, keamanan dan ketertiban umum
2	Pengembangan Pendidikan Karakter dan Pendidikan Vokasi	1) Peningkatan Kualitas manajemen dan layanan pendidikan di DIY yang inklusif dan berkeadilan (selaras dengan TPB 4) 2) Internalisasi nilai-nilai budaya yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan (selaras dengan TPB 11)
3	Angka kemiskinan yang masih diatas rata-rata nasional	1) Pemenuhan layanan dasar masyarakat miskin (selaras dengan TPB 1) 2) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat (selaras dengan TPB 3) 3) Peningkatan Pendapatan Perkapita Masyarakat (selaras dengan TPB 1 dan TPB 8) 4) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat (selaras dengan TPB 8)
4	Masih tingginya gangguan ketertiban umum dan kriminalitas	Pengembangan keterlindungan warga, keamanan dan ketertiban umum (selaras dengan TPB 11)
5	Pelestarian (Pemeliharaan dan Pengembangan) Budaya Baik tangible maupun intangible	Meningkatkan pemeliharaan (pelindungan secara fisik dan hukum) dan pengembangan (penguatan dan pemanfaatan) kebudayaan untuk mewujudkan pemukiman yang inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan (selaras dengan TPB 11)
6	Arus urbanisasi	Mengendalikan pertumbuhan penduduk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (selaras dengan TPB 8)
7	Masih tingginya ketimpangan wilayah	1) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru; (selaras dengan TPB 8) 2) Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah yang menunjang perekonomian (selaras dengan TPB 9)
8	Penyediaan Infrastruktur Strategis & Kawasan Pesisir Selatan Belum Optimal	Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar yang berketahanan dan berkelanjutan khususnya pada

No	Permasalahan	Strategi
		kawasan yang belum maju, maju tertekan, dan potensi cepat tumbuh (selaras dengan TPB 9)
9	Masih ditemukannya pengelolaan keuangan daerah yang belum sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabel, dan partisipatif	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang transparansi, akuntabel, dan partisipatif (selaras dengan TPB)
10	Kontribusi aset-aset daerah dalam peningkatan Pendapatan Daerah	Optimalisasi aset-aset pemerintah daerah (selaras dengan TPB 16)
11	Belum meratanya kualitas layanan publik secara merata pada Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan publik (selaras dengan TPB 16 )
12	Implementasi Undang-Undang Keistimewaan yang belum dapat menyasar sampai pada perangkat daerah paling rendah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan sinergitas kelembagaan Pemerintah Provinsi Kabupaten Kota s/d Desa</li> <li>2. Penguatan keistimewaan dalam Perangkat Daerah Pemerintah DIY dan Kab/Kota</li> </ol>
13	Pemanfaatan tanah kasultanan dan kadipaten yang belum sesuai dengan arah pemanfaatan ruang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1)Peningkatan Kapasitas badan hukum (Kasultanan dan Kadipaten) dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten, desa. Bersama dengan Pemkab/kot serta desa melakukan fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten dan desa (selaras dengan TPB 16)</li> <li>2)Pengembangan struktur dan pola ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten (selaras dengan TPB 15)</li> </ol>
14	Terbatasnya kapasitas fiskal daerah untuk pemenuhan kebutuhan program-program strategis daerah.	Mencari alternatif pembiayaan non pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha/swasta
15	Pelestarian (Pemeliharaan dan Pengembangan) Budaya Baik tangible maupun intangible	Meningkatkan pemeliharaan (pelindungan secara fisik dan hukum) dan pengembangan (penguatan dan pemanfaatan) kebudayaan untuk mewujudkan pemukiman yang inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan (selaras dengan TPB 11)
16	Beban kondisi fisik DIY yang rawan bencana (terdapat 12 acaman bencana di 301 desa/kelurahan rawan bencana dari 438 desa/kelurahan se-DIY) dan rendahnya kesadaran pengarusutamaan pengurangan risiko bencana.	Mengembangkan pusat-pusat percontohan pengurangan risiko bencana di DIY dengan platform bersama kolaboratif penta-helix pengelolaan bencana di DIY serta mitigasi struktural dan non-struktural dalam pembangunan.

## VI.2 Arah Kebijakan

Berdasarkan analisa SWOT dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan DIY untuk (lima) tahun kedepan, sebagai berikut:

**Tabel VI-4 Perumusan Arah Kebijakan Daerah**

<b>VISI</b> <i>Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja</i>			
<b>MISI 1</b> <i>Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Berkeadaban</i>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran :</b>	<b>Strategi :</b>	<b>Arah Kebijakan :</b>
Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta	1.Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	1. Meningkatkan Kualitas manajemen dan layanan pendidikan di DIY yang inklusif dan berkeadilan 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 3. Internalisasi nilai-nilai budaya yang berorientasi pada ketahanan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan	1. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan 2. Peningkatan kualitas pendidik dan sarana pendukung pendidikan 3. Peningkatan layanan pendidikan di DIY 4. Memperkuat dan mengembangkan pendidikan karakter. 5. Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) 6. Peningkatan panganekaragaman dan keamanan pangan (termasuk olahan) 7. Peningkatan pelayanan Medis, rehab medis, rehab sosial dan dukungan dari masyarakat bagi penderita gangguan jiwa 8. Peningkatan aksesibilitias dan pelayanan kesehatan yang berkualitas
	2. Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat	1. Menumbuhkan kewirausahaan dan kemandirian ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan 2. Pemenuhan layanan Dasar masyarakat miskin.	1. Penumbuhan Wirausaha Baru yang Mandiri 2. Pemenuhan ketercukupan pangan dan gizi masyarakat

		<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Peningkatan Pendapatan per Kapita Masyarakat</li> <li>4. Memperluas kesempatan kerja, perlindungan pekerja, dan proporsi angkatan kerja dan lulusan pendidikan tinggi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial masyarakat miskin</li> <li>4. Peningkatan Penduduk Berakses Air Bersih Layak</li> <li>5. Peningkatan Penduduk Berakses Energi</li> <li>6. Penyediaan Tempat Tinggal yang Layak dengan prioritas masyarakat berpenghasilan rendah</li> <li>7. Peningkatan Kapasitas dan akses Usaha Bagi Rumah Tangga Miskin</li> <li>8. Meningkatkan peluang kesempatan kerja, memperbanyak penempatan tenaga kerja, peningkatan kualitas pekerja dan calon pekerja, pengawasan dan hubungan industrial.</li> </ul>
	3. Meningkatnya Derajat Kualitas hidup sosial masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat implementasi dan advokasi pengarusutamaan Gender</li> <li>2. Mengendalikan pertumbuhan penduduk</li> <li>3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat</li> <li>4. Pengembangan keterlindungan warga, keamanan dan ketertiban umum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan dan penganggaran responsif gender</li> <li>2. Pengendalian usia perkawinan pertama penduduk</li> <li>3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan</li> <li>4. Peningkatan Ketertiban masyarakat dan ketaatan pada hukum</li> <li>5. Peningkatan akses dan kualitas Keluarga Berencana</li> </ul>
	4. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Meningkatkan pemeliharaan (perlindungan secara hukum dan fisik) dan pengembangan (penguatan dan pemanfaatan) kebudayaan untuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Menumbuhkembangkan kesadaran multi stakeholder pembangunan budaya benda dan tak benda.</li> </ul>

		mewujudkan pemukiman yang inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan	<p>2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan dan pengelolaan fasilitas kebudayaan</p> <p>3. Memperkuat lembaga pelestari budaya dan mengembangkan budaya di Kawasan Cagar Budaya, Saujana Budaya, Desa dan Kelurahan Budaya</p>
	5. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	<p>1. Mengoptimalkan kinerja sektor Dominan dengan fokus ekonomi berkelanjutan dan ekonomi kreatif</p> <p>2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar yang berketahanan dan berkelanjutan khususnya pada kawasan yang belum maju, maju tertekan, dan potensi cepat tumbuh</p> <p>3. Pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan</p> <p>4. Pengurangan resiko bencana</p> <p>5. Mencari alternatif pembiayaan non pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha/swasta</p>	<p>1. Peningkatan produksi, kualitas, inovasi dan nilai tambah produk-produk unggulan terutama pada sector pertanian, perikanan, kehutanan, industri, perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif</p> <p>2. Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian (PLP2B)</p> <p>3. Penyediaan ruang dan infrastuktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi</p> <p>4. Memperkuat daya saing dan perlindungan tenaga kerja</p> <p>5. Penyiapan regulasi yang kondusif untuk perekonomian</p> <p>6. Mengembangkan sosial-ekonomi masyarakat dengan memberdayakan lembaga-lembaga organik lokal, mendayagunakan potensi wisata, budaya dan kearifan lokal untuk meningkatkan kemandirian masyarakat</p> <p>7. Memperkuat partisipasi warga dan kelembagaan lokal dalam industri wisata</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>8. Memperkuat peran pelaku usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi dalam kegiatan perekonomian daerah</li> <li>9. Pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan</li> <li>10. Pengurangan resiko bencana secara komprehensif.</li> <li>11. Menyediakan regulasi yang memperkuat kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha/swasta</li> <li>12. Pembentukan lembaga yang khusus menangani KPBU dan investasi masyarakat lainnya</li> <li>13. Melakukan <i>capacity building</i> terkait pembiayaan non APBD dengan intensif</li> </ul>
	6. Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan baru</li> <li>2. Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. pengembangan transportasi dan infrastruktur pendukung Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA)</li> <li>2. Pengembangan Kawasan Selatan sebagai pusat pertumbuhan</li> <li>3. pengembangan sektor pariwisata di kawasan prioritas yang terintegrasi dengan sektor lainnya.</li> <li>4. Penyiapan potensi dan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong realisasi dan pemerataan investasi</li> </ul>

**MISI 2***Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis*

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran :</b>	<b>Strategi :</b>	<b>Arah Kebijakan :</b>
Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> )	1. Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	1. Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang transparansi, akuntabel, dan partisipatif 2. Optimalisasi aset-aset pemerintah daerah 3. Meningkatkan kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan publik	1. Optimalisasi potensi pendapatan daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah 2. Menyusun regulasi pengelolaan keuangan 3. Membuat/mengembangkan sistem keuangan daerah yang terintegrasi 4. Peningkatan efektivitas pengelolaan aset daerah melalui pemanfaatan dan kerjasama pihak ketiga.
	2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan urusan Keistimewaan	1. Mewujudkan sinergitas kelembagaan Pemerintah Provinsi Kabupaten Kota s/d Desa 2. Penguatan keistimewaan dalam Perangkat Daerah, Kabupaten-Kota, Kecamatan, Desa	1. Perumusan regulasi sebagai acuan pelaksanaan urusan keistimewaan di tingkat Kabupaten /Kota s.d Desa 2. Internalisasi budaya pemerintahan pada Pemda dan Kab/Kota
	3. Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	1. Peningkatan Kapasitas badan hukum (Kasultanan dan Kadipaten) dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten, Desa 2. Pengembangan struktur dan pola ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	1. Melakukan fasilitasi Penata usahaan, pemeliharaan dokumen dan pengawasan tanah Kasultanan, Kadipaten, dan tanah desa. 2. Melakukan fasilitasi perlindungan, pemanfaatan dan pelepasan tanah Kasultanan, Kadipaten, dan tanah desa

### VI.3 Tahapan Indikasi Tema Tahunan RPJMD 2017-2022

**Tabel VI-5 Indikasi Tema Tahunan RPJMD 2017-2022**

			<b>Tema/Fokus Tahun V (2022)</b> Internalisasi nilai-nilai budaya dalam masyarakat yang bermartabat	<b>Kata Kunci :</b> <i>Mengembangkan (inovasi)SDM Unggul dan Infrastruktur untuk Pengurangan Ketimpangan Wilayah dan Kemiskinan</i>
			<b>Tema/Fokus Tahun IV (2021)</b> Peningkatan kualitas SDM berbasis keistimewaan	<b>Kata Kunci:</b> <i>Mendayagunakan dan Memperkuat SDM Unggul (pendidikan, kesehatan,kebudayaan, ekonomi) dan Infrastruktur</i>
		<b>Tema/Fokus Tahun III (2020)</b> Infrastruktur (Titik Pertumbuhan) untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan wilayah	<b>Kata Kunci:</b> <i>Mendayagunakan dan Memantapkan SDM Unggul (pendidikan, kesehatan,kebudayaan, ekonomi) dan Infrastruktur (bandara NYIA beroperasi)</i>	
	<b>Tema/Fokus Tahun II (2019)</b> Infrastruktur (Aksesibilitas antar wilayah) untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah	Tema RKPD 2019: Pemerataan Pembangunan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan	<b>Kata Kunci:</b> <i>Memperkuat SDM dan Infrastruktur (JATP, Tanjung Adikarto, Sampah &amp; Limbah B3 Regional,RSUD Wates) untuk mengurangi Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah</i>	
<b>Tema/Fokus Tahun I (2018)</b> Menanggulangi kemiskinan dengan peningkatan pelayanan publik dan penguatan kelembagaan)	Tema RKPD 2018 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Infrastruktur untuk Menopang Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Wilayah yang Berkeadilan	<b>Kata Kunci:</b> <i>Memantapkan Pondasi SDM dan Infrastruktur Dasar (RTLH, Sanitasi, Jalan, Air, Elektrifikasi) untuk Menanggulangi Kemiskinan serta Mendukung Pertumbuhan Ekonomi</i>		

## VI.4 Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

### VI.4.1 Proyeksi Nilai PDRB Kabupaten dan Kota se-DIY

#### VI.4.1.1 Proyeksi Nilai PDRB Kabupaten Kulon Progo

Perkembangan PDRB riil di Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat dalam Tabel berikut. Nilai PDRB di Kabupaten Kulon Progo tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan hingga pada tahun 2022 nilai PDRB Kabupaten Kulon Progo adalah senilai Rp10.179.984,40 juta. Pertumbuhan ekonomi Kulonprogo mencapai tingkat paling tinggi dibandingkan ke empat daerah lainnya mengingat besaran nilai investasi proyek fisik terakumulasi paling tinggi di Kulonprogo yang berupa Pembangunan NYIA, Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Pansela dan akses menuju NYIA, Pembangunan SPAM Regional, Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Jaringan Distribusi Utama, Pembangunan Stasiun *Interchange*, Pembangunan Terminal Barang dan Pembangunan Jalan Bebas Hambatan. Proyek-proyek tersebut menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi kabupaten Kulonprogo sehingga mencapai rata-rata 6,06% per tahun selama periode 2017 – 2022. Adapun PDRB atas harga konstan selama tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel VI-6      Proyeksi PDRB Kabupaten Kulon Progo (juta rupiah)**

Tahun	PDRB
2017	7.004.743,85
2018	7.495.075,92
2019	8.087.186,92
2020	8.730.118,28
2021	9.425.908,70
2022	10.179.981,40

Sumber: Bappeda, 2016

#### VI.4.1.2 Proyeksi Nilai PDRB Kabupaten Bantul

PDRB Kabupaten Bantul senantiasa meningkat dari tahun ke tahun. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, nilai PDRB Kabupaten Bantul akan terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2022 nilai PDRB Kabupaten Bantul adalah senilai Rp23.010.149,87 rupiah dengan pertumbuhan rata-rata per tahun adalah 5,49%. Pertumbuhan ekonomi Bantul didukung dengan pembangunan beberapa infrastruktur strategis berupa Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Pansela dan Outer Ringroad dan akses menuju NYIA, Pembangunan Kawasan Industri, Penyediaan Air Baku, Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Jaringan Distribusi Utama, Pembangunan SPAM Regional, Pengembangan Pengelolaan Sampah dan Pembangunan Stasiun *Interchange*. Proyek-proyek tersebut menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi kabupaten Bantul sehingga mencapai rata-rata 5,49% per tahun selama periode 2017 – 2022. Adapun PDRB atas harga konstan selama tahun 2016 – 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel VI-7      Proyeksi PDRB Kabupaten Bantul (juta rupiah)**

Tahun	PDRB
2017	17.251.584,89
2018	18.217.673,65
2019	19.274.298,72
2020	20.421.119,49
2021	21.666.807,78
2022	23.010.149,87

Sumber: Bappeda, 2016

#### **VI.4.1.3 Proyeksi Nilai PDRB Kabupaten Gunungkidul**

Nilai PDRB Kabupaten Gunungkidul juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. nilai PDRB Kabupaten Gunungkidul akan terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2022 nilai PDRB Kabupaten Gunungkidul adalah senilai Rp16.182.963,23 juta. Pertumbuhan ini didorong antara lain oleh pelaksanaan proyek-proyek besar infrastruktur yaitu Pembangunan Jalan dan Jembatan berupa Pembangunan Jalur Pansela, Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Jaringan Distribusi Utama dan Pembangunan SPAM Regional. Pembangunan di berbagai sektor terutama infrastruktur mendorong pertumbuhan Kabupaten Gunungkidul mencapai rata-rata 5,49% per tahun selama periode 2017 – 2022 dengan rincian target PDRB tahunannya adalah sebagai berikut:

**Tabel VI-8      Proyeksi PDRB Kabupaten Gunungkidul (juta rupiah)**

Tahun	PDRB
2017	12.288.875,81
2018	12.934.041,79
2019	13.645.414,09
2020	14.423.202,69
2021	15.259.748,45
2022	16.182.963,23

Sumber: Bappeda, 2016

#### **VI.4.1.4 Proyeksi Nilai PDRB Kabupaten Sleman**

Nilai PDRB Kabupaten Sleman dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 akan terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2022 nilai PDRB Kabupaten Sleman adalah senilai Rp. 42.002.330,98 juta. Proyek-proyek fisik besar memberikan kontribusi besar pada pencapaian kinerja ekonomi tersebut. Proyek-proyek tersebut adalah Pembangunan Jalan dan Jembatan berupa Pembangunan JORR, Pembangunan Underpass Gejayan, Monjali dan Kentungan dan Pengembangan Jalan Selokan Mataram, Pengembangan SPAM Regional, Pembangunan Stasiun Interchange, Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Jaringan Distribusi Utama dan Pengembangan Jalan Bebas Hambatan. Pertumbuhan ekonomi rata-rata selama tahun 2017 – 2022 adalah 5,75%.

**Tabel VI-9      Proyeksi PDRB Kabupaten Sleman (juta rupiah)**

Tahun	PDRB
2017	31.342.392,99
2018	33.160.251,79
2019	35.116.706,64
2020	37.241.267,40
2021	39.531.605,34
2022	42.00.330,67

Sumber: Bappeda, 2016

#### VI.4.1.5 Proyeksi Nilai PDRB Kota Yogyakarta

Nilai PDRB Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 diramalkan bahwa nilai PDRB Kota Yogyakarta akan terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2022 nilai PDRB Kota Yogyakarta adalah senilai Rp. 32.725.315,18 juta. Peningkatan kinerja ekonomi selama periode 2017 – 2022 antara lain didukung oleh pembangunan sarana dan prasarana berupa proyek-proyek besar yaitu Pembangunan Akses Jalan Menuju NYIA, Pembangunan Jaringan Distribusi Air Baku serta Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Jaringan Distribusi Utama. Pertumbuhan ekonomi rata-rata sepanjang tahun 2017 – 2022 adalah 5,51% per tahun.

**Tabel VI-10      Proyeksi PDRB Kota Yogyakarta (juta rupiah)**

Tahun	PDRB
2017	24.815.433,63
2018	26.143.059,33
2019	27.567.856,07
2020	29.125.439,93
2021	30.843.840,89
2022	32.725.315,18

Sumber: Bappeda, 2016

#### VI.4.2 Proyeksi Nilai IPM Kabupaten dan Kota Se-DIY

Proyeksi IPM Kabupaten dan Kota se-DIY menunjukkan bahwa IPM mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan IPM teratas tetap Kota Yogyakarta seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini:

**Tabel VI-11      Proyeksi IPM Kabupaten dan Kota se-DIY**

Daerah	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kulon Progo	72.65	73.21	73.77	74.32	74.88	75.43
Bantul	78.98	79.51	80.03	80.56	81.08	81.61
Gunungkidul	68.64	69.26	69.88	70.50	71.12	71.74
Sleman	82.01	82.38	82.75	83.12	83.49	83.86
Yogyakarta	85.33	85.74	86.15	86.56	86.97	87.38

Pada akhir periode RPJMD, nilai IPM Kota Yogyakarta adalah 87,38 dan masih merupakan capaian tertinggi yang diikuti oleh Kabupaten Sleman sebesar 83,36. Sementara itu IPM Kabupaten Bantul berada di peringkat ketiga dengan nilai sebesar 81,61 yang diikuti oleh Kabupaten Kulonprogo sebesar 75,43. Sedangkan capaian terendah adalah Kabupaten Gunungkidul sebesar 71,74. Perkembangan ketimpangan IPM menurun seperti kinerja pada tahun-tahun sebelumnya yang didorong dengan perbaikan kinerja pembangunan pada sektor lain di semua daerah. Lebih lanjut, kondisi IPM DIY juga didukung secara signifikan oleh indikator pendidikan dan daya beli. Pada aspek kesehatan salah satu factor pendorong perbaikan pembangunan manusia yaitu peningkatan cakupan pelayanan kesehatan. Melalui Peraturan Gubernur DIY Nomor 19 Tahun 2011 tentang Sistem Jaminan Kesehatan (Jamkesda) yang selanjutnya dirubah dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 63 Tahun 2016. Pemda DIY berupaya menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesda) sebagai upaya Jaminan Kesehatan Semesta. Pelaksanaan jamkesda ditujukan untuk mengintegrasikan kepesertaan jaminan kesehatan yang dikelola pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Kepesertaan jamkesda dibagi menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN, Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jamkesmas, Mandiri Jamkesda, Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkeskhusus), dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jamkesda kabupaten/kota. Sasaran PBI Jamkesmas, PBI Jamkesmas, dan PBI Jamkesda ditujukan untuk masyarakat miskin.

#### VI.4.3 Proyeksi Tingkat Kemiskinan Kabupaten dan Kota Se-DIY

Tingkat kemiskinan Kabupaten dan Kota se-DIY menunjukkan bahwa persentase jumlah orang miskin mengalami penurunan dari tahun ke tahun dan persentase orang miskin paling kecil tetap berada di Kabupaten Sleman seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini:

**Tabel VI-12 Tingkat Kemiskinan Kabupaten dan Kota se-DIY (dalam persen)**

Daerah	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kulon Progo	19,07	17,03	14,98	12,94	10,89	8,85
Bantul	13,40	12,13	10,86	9,59	8,32	7,05
Gunungkidul	17,77	16,03	14,30	12,56	10,83	9,09
Sleman	7,74	7,05	6,87	6,36	6,01	5,67
Yogyakarta	7,27	6,91	6,24	6,15	6,00	5,45

Pada awal periode RPJMD, tingkat kemiskinan Kota Yogyakarta adalah 7,27% dan masih merupakan persentase terendah yang diikuti oleh Kabupaten Sleman sebesar 7,74%. Sementara itu tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Kabupaten Kulon Progo yaitu sebesar 19,07%. Sementara itu tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul masing-masing sebesar 13,40% dan 17,77%. Penurunan tingkat kemiskinan didukung dengan meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat sebagai hasil dari peningkatan PDRB serta

relatif stabilnya tingkat inflasi DIY yang merupakan salah satunya hasil dari kinerja efektif dari TPID dalam mengendalikan harga.

## **VI.5 Arah Kebijakan Pembangunan Keistimewaan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY, merupakan daerah Provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan Istimewa disini meliputi wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan dalam urusan Keistimewaan DIY tadi meliputi:

- a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
- c. kebudayaan;
- d. pertanahan; dan
- e. tata ruang.

### **1. Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur**

Pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan melalui penetapan yang secara prosedural dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur maka pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY sudah ditentukan melalui mekanisme penetapan setiap 5 tahun terhadap Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam yang bertahta menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur.

### **2. Kelembagaan**

Implementasi kewenangan Kelembagaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 30 Undang-Undang Keistimewaan DIY bahwa kewenangan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli. Arah kebijakan kelembagaan meliputi: 1) mengelaborasi aspek bentuk dan tata kelola kelembagaan pemerintahan asli, 2) mengelaborasi Aspek bentuk dan tata kelola pemerintahan berdasarkan regulasi nasional, 3) mengarusutamakan keistimewaan dalam kelembagaan. Strategi - –trategi yang dapat dilakukan pada urusan kelembagaan adalah:

- a. Mempedomani nilai-nilai budaya luhur DIY dan Internalisasi keistimewaan pada setiap lembaga dalam penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. Melembagakan peran dan tanggungjawab kasultanan dan kadipaten dalam memperkuat keistimewaan;

- c. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi terhadap regulasi;
- d. Sinergitas dengan Kelembagaan nasional untuk memperkuat kelembagaan DIY;
- e. Menerapkan prinsip *rightsizing*;
- f. Menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*;
- g. Mendesain lembaga yang memiliki keunikan sebagai penciri keistimewaan;

### **3. Kebudayaan**

Berdasarkan pada Pasal 31, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta memuat: Kewenangan kebudayaan diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY.

Tindaklanjut atas kewenangan urusan Kebudayaan tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan. Dimana pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan bertujuan untuk:

- a. menguatkan karakter dan jati diri masyarakat;
- b. mewujudkan pemeliharaan nilai-nilai budaya DIY dalam kehidupan masyarakat, lembaga, dan pemerintah;
- c. mengembangkan kebudayaan DIY untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya DIY di tengah peradaban dunia;
- d. mewujudkan pemerataan akses aktivitas berkebudayaan dan peningkatan apresiasi seni dan kreativitas karya budaya; dan
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan pembangunan keistimewaan urusan kebudayaan meliputi:

- a. Mewujudkan Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan yang berbasis pada pelestarian aset sejarah, asal usul, dan destinasi budaya demi peningkatan kualitas hidup-penghidupan warga
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan dan tatakelola infrastruktur publik sebagai arena apresiasi pelaku budaya dalam rangka perlindungan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya tangible dan intangible;
- c. Mewujudkan wilayah konservasi budaya dan lumbung budaya yang dapat menginspirasi pengembangan kebudayaan di tingkat nasional maupun global.
- d. Mewujudkan pendidikan karakter manusia sosial yang penuh keutamaan berbasiskan nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta;
- e. Memperkuat sistem ekonomi berbasis keberagaman potensi kewilayahan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan di bidang industri kreatif dan industri pariwisata berbasis aset/potensi budaya lokal;
- f. Memperkuat nilai-nilai keberagaman dan kebhinekaan dalam kemanunggalan cipta, rasa, karsa melalui asah asih asuh di antara multistakholder keistimewaan Yogyakarta;

- g. Memperkuat potensi lembaga lokal untuk meningkatkan kepedulian sosial, kerukunan, kesehatan dan perlindungan warga.

Untuk mengoptimalkan arah kebijakan tersebut di atas, pemerintah dengan didukung pemangku kepentingan lainnya (akademisi/budayawan, dunia bisnis dan masyarakat) perlu menempuh strategi pengembangan serta upaya konservasi budaya secara ex-situ dan mengupayakan konservasi maupun mendorong tumbuh-kembangnya budaya di tempat asalnya (in-situ). Pengembangan budaya secara in-situ ini bisa berpotensi besar menciptakan berbagai aktivitas lainnya, seperti tradisi budaya lokal, ekowisata budaya desa, kesenian lokal, ekonomi lokal, dan lain-lain, mengingat budaya yang tumbuh dan hidup di DIY tersebar di berbagai wilayah.

#### **4. Pertanahan**

Menurut Bab X Pasal 32 dalam penyelenggaraan kewenangan pertanahan menyatakan Kasultanan dan Kadipaten sebagai badan hukum. Kasultanan sebagai badan hukum merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kasultanan. Kadipaten sebagai badan hukum merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kadipaten. Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon yang terdapat di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah DIY. Kasultanan dan Kadipaten berwenang mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Kewenangan DIY dalam Urusan Pertanahan sesuai dengan Perdas 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten meliputi: (a) kegiatan inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan dan pendaftaran tanah; (b) pengadaan sarana prasarana untuk perawatan dan pemeliharaan dokumen; (c) penyelenggaraan pemantauan dan penertiban penggunaan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten yang menyalahi Serat Kekancingan; (d) penanganan sengketa atas Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten; (e) penyiapan bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah; dan (f) kegiatan peremajaan data Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten. Arah kebijakan dalam pengelolaan dan pemanfaatan pertanahan antara lain:

- a. Mewujudkan Administrasi Pertanahan keistimewaan,
- b. Mewujudkan Tertib Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah SG dan PAG,
- c. Mewujudkan Sistem Informasi Pertanahan Keistimewaan.

Teknis operasional dalam pelaksanaan penyelenggaraan keistimewaan urusan pertanahan antara lain adalah:

- a. Pembangunan dan pemeliharaan data base pertanahan yang up to date, agar tercapai kepastian hukum hak atas tanah, termasuk Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, Tanah Desa, dan tanah hak lainnya;
- b. Kepastian hubungan hukum dalam pemanfaatan dan pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, Tanah Desa, dan tanah hak lainnya;

- c. Peningkatan kapasitas SDM pengelola administrasi pertanahan, agar tercapai pelayanan publik yang: fairness, transparan, dan akuntabel;

Sampai dengan Tahun 2017 telah dilakukan pendataan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebanyak  $\pm 13.877$  bidang dengan keluasan  $\pm 79.331.371$  m<sup>2</sup>. Jumlah total bidang SG, PAG dan Tanah Desa yang telah didaftarkan agar memiliki kepastian hukum 13.750 bidang. Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sifatnya berkelanjutan, mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 telah didaftarkan sebanyak 5.369 bidang dan telah terbit sebanyak 3.196 sertifikat. Sedangkan Tanah Desa sampai tahun 2014 telah terbit sebanyak 8.381 sertifikat. Sedangkan untuk proses pendaftaran tanah kasultanan dan kadipaten dirincikan sebagai berikut :

**Tabel VI-13      Tabel Rincian Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten 2013 - 2017**

No	Kabupaten/ Kota	Inventarisasi			Pendaftaran														
		SG	PAG	Jml Bid	2013			2014			2015			2016			2017		
					SG	PAG	Jml	SG	PAG	Jml	SG	PAG	Jml	SG	PAG	Jml	SG	PAG	Jml
1	Yogyakarta	4.38	68	506	32	13	45	166	0	166	75	0	75	50	0	50	70	0	70
2	Bantul	3.432	0	3432	0	0	0	171	0	171	1367	0	1367 (967+400 )	300	0	300	350	0	350
3	Kulon Progo	1.286	288	1574	0	0	0	112	104	216	174	2	176	240	0	240	350	0	350
4	Gunung Kidul	4.046	0	4046	0	0	0	54	0	54	300	0	300	300	0	300	250	0	250
5	Sleman	4.486	0	4486	0	0	0	137	0	137	252	0	252	250	0	250	250	0	250
Jumlah		13.688	356		32	13		640	104		2167	2		1140	0		1270	0	
Jumlah Per Tahun					45			744			2170			1140			1270		

*Sumber : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 2017*

## 5. Tata Ruang

Bab XI Pasal 34 menyebutkan bahwa Kewenangan Kasultanan dan Kadipaten dalam tata ruang terbatas pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Dalam pelaksanaan kewenangan Kasultanan dan Kadipaten menetapkan kerangka umum kebijakan tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sesuai dengan Keistimewaan DIY. Kerangka umum kebijakan tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditetapkan dengan memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY. Tindak lanjut dari Urusan Tata Ruang adalah ditetapkannya Peraturan Daerah Itimewa No 2. Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Kewenangan Pemerintah Daerah DIY dalam urusan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi : (a) penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan satuan ruang strategis kadipaten, (b) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada satuan ruang strategis kasultanan dan satuan ruang strategis kadipaten; (c) Penyusunan rencana induk pada satuan ruang strategis kasultanan dan satuan ruang strategis kadipaten; (d) pelaksanaan penataan ruang; (e) penyelenggaraan pemantauan dan penertiban pemanfaatan ruang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang menyalahi rencana tata ruang; (f) penanganan sengketa atas pemanfaatan ruang tanah kasultanan atau tanah kadipaten; (g) penyiapan bahan pertimbangan teknis izin pemanfaatan ruang; (h) pengendalian pemanfaatan ruang; dan (i) pengawasan terhadap penyelenggaraan penataan ruang. Arah kebijakan dalam tata ruang meliputi:

- a. Pengaturan Tata Ruang Keistimewaan dengan mewujudkan dokumen regulasi Rencana Tata Ruang Keistimewaan menjadi produk hukum yang mengikat.
- b. Pembinaan Tata Ruang Keistimewaan dengan mewujudkan koordinasi yang masif antar SKPD dan antar level pemerintahan (Pemda DIY dan Pemkab/Pemkot) serta mewujudkan SDM (sumberdaya Manusia) yang siap untuk melaksanakan dan mewujudkan Tata Ruang Keistimewaan.
- c. Pelaksanaan Tata Ruang Keistimewaan dengan membuat dan melengkapi perencanaan tata ruang seluruh ruang keistimewaan dan memperkuat pengendalian tata ruang pada seluruh ruang keistimewaan.
- d. Pengawasan Tata Ruang Keistimewaan dengan mewujudkan pengawasan pelaksanaan dan perwujudan tata ruang keistimewaan secara keseluruhan.

Arah pemanfaatan ruang keistimewaan Yogyakarta, khususnya Satuan Ruang Strategis (SRS) dimaksudkan untuk (a). mengembalikan fungsi satuan Ruang, (b) memperbaiki fungsi satuan Ruang, (c) menguatkan fungsi satuan Ruang, dan (d) mengembangkan fungsi satuan Ruang. Secara khusus, Perdais Nomor 2 Tahun 2017 memberikan ketetapan fungsi arah pemanfaatan yang jelas pada Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, diantaranya:

**Tabel VI-14 Arah Pemanfaatan Ruang Keistimewaan DIY**

No	SRS	Arahan Pemanfaatan Ruang
1	Kraton (Zona Inti dan Penyangga)	<p>zona inti</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kegiatan ekonomi dan wisata dengan tidak mengubah bentuk bangunan cagar budaya;</li> <li>2. kegiatan industri rumah tangga yang tidak berdampak pencemaran lingkungan;</li> <li>3. kegiatan di Alun-Alun Utara dengan memperhatikan fungsi Alun-Alun Utara sebagai entitas dari Catur Gatra Tunggal; dan</li> <li>4. kegiatan penunjang wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.</li> </ol> <p>zona penyangga antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kegiatan ekonomi;</li> <li>2. wisata budaya dan sejarah;</li> <li>3. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan</li> <li>4. bangunan pendukung fungsi Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.</li> </ol>
2	Makam Raja-Raja di Imogiri	<p>zona inti berupa rehabilitasi/pengembangan bangunan Makam Imogiri yang dalam pelaksanaannya harus mengikuti prinsip pelestarian cagar budaya; dan</p> <p>zona penyangga antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. fasilitas penunjang kegiatan wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan</li> <li>2. bangunan baru dengan menggunakan gaya arsitektur tradisional Jawa.</li> </ol>
3	Sumbu Filosofi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemanfaatan Ruang di kanan dan kiri sumbu filosofi menyesuaikan dengan makna dari sumbu filosofi; dan</li> <li>b. pemanfaatan Ruang pada satuan Ruang sumbu filosofi dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ketinggian bangunan mengikuti kemiringan sudut 45o (empat puluh lima derajat) dari as Sumbu Filosofi;</li> <li>2. ketinggian bangunan paling tinggi 18 (delapan belas) meter pada area yang berjarak 60 (enam puluh) meter diukur dari batas ruang milik jalan; dan</li> <li>3. bangunan baru menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Yogyakarta.</li> </ol> </li> </ol>
4	Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. kegiatan ekonomi skala kecil;</li> <li>2. wisata budaya dan sejarah;</li> <li>3. <i>home stay</i>;</li> <li>4. ruang bawah tanah untuk fasilitas umum; dan</li> <li>5. fasilitas penunjang kegiatan wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.</li> </ol> <p>Ketentuan khusus arsitektur pada Satuan Ruang Strategis Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. arsitektur bangunan di Kawasan Kotagede harus selaras dengan arsitektur bangunan cagar budaya yang telah ada di Kawasan;</li> <li>b. bangunan baru menggunakan gaya arsitektur Jawa dan klasik; dan</li> <li>c. bangunan baru tidak boleh melebihi ketinggian masjid Kotagede</li> </ol>
5	Masjid Pathok Negro	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan ekonomi skala masyarakat;</li> <li>b. wisata budaya dan sejarah; dan</li> <li>c. pendidikan dan pengembangan budaya.</li> </ol>
6	Gunung Merapi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan budi daya hutan;</li> <li>b. kegiatan budi daya pertanian;</li> <li>c. wisata alam;</li> <li>d. pendidikan dan penelitian;</li> <li>e. budi daya permukiman dengan syarat penerapan prinsip <i>zero delta Q policy</i>;</li> <li>f. kegiatan budi daya terbangun dengan syarat penerapan teknologi yang mampu mengganti daya resap air ke permukaan tanah; dan</li> <li>g. pengembangan sistem mitigasi bencana.</li> </ol>
7	Samas – Parangtritis	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. pembangunan pelindung pantai;</li> </ol>

No	SRS	Arahan Pemanfaatan Ruang
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. pengembangan fasilitas pendukung pariwisata diarahkan ke pantai Samas;</li> <li>c. pembuatan jalan sebagai pembatas sempadan pantai;</li> <li>d. penangkapan hasil laut;</li> <li>e. pangkalan pendaratan ikan;</li> <li>f. pengembangan energi terbarukan;</li> <li>g. pendidikan dan penelitian;</li> <li>h. pariwisata terbatas dan minat khusus;</li> <li>i. pembudidayaan terbatas pada Wilayah diluar sempadan pantai;</li> <li>j. pembangunan fasilitas umum; dan</li> <li>k. pengembangan sistem mitigasi bencana.</li> </ul>
8	Kerto – Pleret	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. wisata budaya dan sejarah;</li> <li>b. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;</li> <li>c. bangunan pendukung fungsi Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan</li> <li>d. fasilitas penunjang kegiatan wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan</li> </ul>
9	Kotabaru	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. ruang terbuka hijau;</li> <li>b. permukiman;</li> <li>c. bangunan pendukung fungsi Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;</li> <li>d. perdagangan dan jasa; dan</li> <li>e. sarana pelayanan umum</li> </ul>
10	Candi Prambanan – Candi Ijo	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. wisata budaya dan sejarah;</li> <li>b. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;</li> <li>c. bangunan pendukung fungsi Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan</li> <li>d. fasilitas penunjang kegiatan wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.</li> </ul>
11	Sokoliman	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. wisata budaya dan sejarah;</li> <li>b. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;</li> <li>c. edukasi kepurbakalaan dan wisata minat khusus;</li> <li>d. permukiman perdesaan; dan</li> <li>e. fasilitas penunjang kegiatan wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak Kawasan</li> </ul>
12	Perbukitan Menoreh	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan budi daya hutan;</li> <li>b. penanaman tanaman hijau alamiah;</li> <li>c. permukiman perdesaan;</li> <li>d. pertanian;</li> <li>e. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam;</li> <li>f. pembangunan pemantau bencana; dan</li> <li>g. pemasangan system peringatan dini.</li> </ul>
13	Karst Gunungsewu	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penanaman tanaman hijau alamiah;</li> <li>b. wisata alam;</li> <li>c. penelitian;</li> <li>d. pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam;</li> <li>e. kegiatan permukiman kepadatan rendah;</li> <li>f. kegiatan budi daya terbatas untuk penduduk asli; dan</li> <li>g. sarana prasarana umum.</li> </ul>
14	Pantai Selatan Gunungkidul	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pembangunan pelindung pantai;</li> <li>b. konservasi ekosistem karst;</li> <li>c. pendidikan dan penelitian;</li> <li>d. pariwisata tanpa merubah bentang alam pantai;</li> <li>e. penangkapan hasil laut;</li> <li>f. pangkalan pendaratan ikan;</li> <li>g. pembudidayaan terbatas pada wilayah di luar sempadan pantai;</li> <li>h. tempat pelelangan ikan;</li> <li>i. pelabuhan;</li> <li>j. permukiman perdesaan;</li> <li>k. pengembangan energi terbarukan; dan</li> </ul>

No	SRS	Arahan Pemanfaatan Ruang
		l. Pengembangan sistem mitigasi bencana
15	Puro Pakualaman	a. zona inti antara lain: 2. pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi kerakyatan yang mendukung Puro Pakualaman; dan 3. kegiatan kebudayaan dan keagamaan. b. zona penyangga antara lain: 1. ruang terbuka hijau; 2. permukiman; dan 3. bangunan pendukung fungsi Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan
16	Makam Girigondo	a. pemakaman dan kegiatan adat dan tradisi; b. pelestarian rumah tradisional di sekitar Makam Girigondo; c. permukiman budaya; d. pariwisata; e. budi daya pertanian; f. kegiatan perdagangan dan jasa; dan g. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
17	pusat Kota Wates	a. pendukung Kerajaan Mataram; b. heritage peninggalan kolonial Belanda; c. pusat pemerintahan kabupaten; d. ruang terbuka hijau; e. permukiman; f. bangunan pendukung cagar budaya; dan g. perdagangan dan jasa dengan kepadatan sedang dan tinggi diarahkan berada didekat titik transit moda transportasi.
18	Pantai Selatan Kulon Progo	a. pembangunan pelindung pantai; b. pertahanan dan keamanan; c. pangkalan pendaratan ikan; d. pendidikan dan penelitian; e. pariwisata terbatas dan minat khusus; f. kegiatan penambangan pasir besi; g. pembangunan fasilitas umum; dan h. pengembangan sistem mitigasi bencana.

## VI.6 Program Pembangunan Daerah

Dengan berdasarkan arah kebijakan dan diselaraskan dengan program strategis nasional, maka disusun suatu Program Pembangunan Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Suatu Program Pembangunan Daerah menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan, sehingga Program Pembangunan Daerah merupakan keterkaitan program Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan.

**Tabel VI-15      Tabel Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif**

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)
MISI Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Berkeadaban															
TUJUAN Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin menjamin ke- bhineka-tunggal- ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta	Angka IGI 5,59 (2016) menjadi 6,2(2022)	5,59											6,2		
SASARAN Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	IPM	78,38	80,29		80,72		81,08		81,40		81,68		81,68		
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,80	69,91		70,02		70,12		70,22		70,32		70,32		

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD								
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)						
PROGRAM Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP);	N/A	11,00	1,123,397,790,30 0	11,49	1,192,263,006,420	12,10	1,264,518,804,502	12,59	1,343,564,053,258	13,20	1,430,169,631,144	13,20	6,353,913,285,624	Sekretaris Daerah  Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat						
	2. Harapan Lama Sekolah	15,23														15,51	15,66	15,82	15,97	16,12	16,12
	3. Peningkatan Jumlah Pemuda Kader Aktif	N/A														200	205	210	215	220	220
	4. Persentase sekolah yang melakukan pendidikan berbasis budaya dengan kategori maju	N/A														5,96	6,71	7,47	8,22	8,98	8,98
PROGRAM Program Peningkatan Usia Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup	74,71	75,06	330,943,225,250	75,20	432,449,025,288	75,32	554,711,329,896	75,41	567,509,211,378	75,49	594,826,171,385	75,49	2,480,438,963,197	Sekretaris Daerah  Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat						

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)
PROGRAM Program Pembangunan Sosial Masyarakat	1. Jumlah Kabupaten/Ko ta Layak Anak Berkategori Nindya ke Atas	N/A	2	24,858,388,700	3	48.762.386.020	4	52.857.754.722	5	58.802.633.394	5	63.983.171.134	5	249.264.333.970	Sekretaris Daerah  Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat
	2. Persentase perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif	N/A	20,72		21,17		21,17		21,62		21,62		21,62		
	3. Total Fertility Rate	N/A	2,1		2,1		2,1		2,1		2,1		2,1		
	4. Perkembangan Desa/Keluraha n Kategori Cepat Berkembang	24	36		42		48		54		60		60		
	5. Angka Kejahatan per 100.000 penduduk (crime rate)	N/A	12,59		10,99		9,60		8,39		7,33		7,33		
SASARAN Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat.	1. Indeks Gini	0,4400	0,3917		0,3846		0,3776		0,3705		0,3635		0,3635		
	2. Persentase Angka Kemiskinan	12,36	11,23		10,19		9,11		8,07		7		7		

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)
PROGRAM Program penanggulangan Kemiskinan	1. Persentase peningkatan Penumbuhan wirausaha baru	0,2	0,2	133.650.119.383	0,3	171.223.566.622	0,3	188.335.923.283	0,4	207.144.515.612	0,4	227.868.967.172	0,4	928.223.092.072	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat
	2. Jumlah penduduk miskin (jumlah penduduk miskin (pada tahun n)	466.330	484.947		376.260		343.101		309.021		278.509		278.509		
	3. Pengeluaran per kapita masyarakat	13.229	13.552		13.813		14.073		14.333		14.593		14.593		
SASARAN Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi	10,98	11,46		11,68		11,72		11,99		12,04		12,04		
PROGRAM Program Pelestarian budaya benda dan tak benda	1. Persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan	10,23%	11,22%	383.333.000.000	12,21%	529.747.442.000	13,20%	659.530.927.885	14,18%	714.720.526.765	15,17%	799.396.265.831	15,17 %	3.086.728.162.481	Sekretaris Daerah Paniradya Keistimewaan
	2. Persentase peningkatan budaya tak benda yang dilestarikan	N/A	12,99		13,41		15,05		16,82		20,00		20,00		
SASARAN Meningkatnya aktivitas perekonomian	1.Pertumbuhan Ekonomi.	5,21	5,24		5,26		5,29		5,31		5,34		5,34		
	2.IKLH(Indeks Kualitas	56,65	58,58		60,51		62,44		64,18		66,15		66,15		

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)
yang berkelanjutan	Lingkungan Hidup)														
	3. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	75	76,5		78		79,5		81		82,5		82,5		
	4. Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	11,11	21,11		30,42		40,69		49,03		54,44		54,44		
PROGRAM Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa)	1. Kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan dalam PDRB DIY	42,32	42,32	142.718.823.480	43,00	197.032.823.910	44,00	325.921.546.301	45,00	367.312.525.931	46,00	211.519.817.275	46,00	1.244.505.536.897	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
	2. Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	2,72	2,78		2,60		2,42		2,24		2,07		2,07		
	3. Jumlah desa mandiri budaya (desa/kampung wisata, desa/kelurahan budaya, desa preneur, desa prima): Target 2022 : 1 Desa mandiri budaya	N/A	0		5		10		15		20		20		

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)
<b>PROGRAM</b> Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	1. Indeks Kualitas Air	29,17	34,20	38.278.906.200	36,40	49.407.330.210	38,60	54.244.351.731	40,80	59.466.006.904	42,50	65.034.105.595	42,50	215,369,700,023	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
	2. Indeks kualitas Udara	86,39	87,06		87,73		88,40		89,07		89,74		89,74		
	3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	52,84	55,50		58,18		60,86		63,05		66,20		66,20		
	4. Indeks Resiko Bencana	165 (tinggi)	155 (tinggi)		150 (tinggi)		145 (tinggi)		135 (tinggi)		125 (sedang )		125 (sedan g)		
<b>PROGRAM</b> Peningkatan Keterpaduan program pemanfaatan Ruang	persentase dukungan program pemda terhadap keterwujudan struktur dna pola ruang	N/A	74,7	563.179.612.000	75,2	597.580.958.000	76,7	609.797.864.515	77,2	862.051.554.235	78,7	1.061.576.533.969	78,7	3.694.186.522.719	Sekretaris Daerah Paniradya Keistimewaan
<b>SASARAN</b> Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah	Indeks Williamson	0,4662	0,4559		0,4552		0,4524		0,4506		0,4489		0,448 9		
<b>PROGRAM</b> Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan	1. Persentase Peningkatan PDRB pada Kabupaten yang belum maju (GK, KP, Bantul)	40,15	40,21	279.634.258.693	40,23	350.919.925.738	40,24	406.570.232.355	40,25	412.917.476.908	40,26	574.319.992.249	40,26	2.024.361.885.943	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
	2. Persentase penyediaan sarana dan prasarana transportasi	N/A	61		67		72		78		83		83		

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)
MISI															
Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis															
TUJUAN															
Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance)	Indeks Reformasi Birokrasi dengan nilai 73,07 (BB) dalam kategori baik (2016) menjadi Sangat Baik dengan nilai 76 (A) (2022)	73,07 (BB)											76 (A)		
SASARAN															
Meningkatnya	1. Opini BPK	N/A	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
kapasitas tata	2. Nilai														
kelola	akuntabilitas	N/A	A		A		A		A		A		A		
pemerintahan	pemerintah (AKIP)														
PROGRAM															
Program	1. Kemampan	Sedang	Sedang	199.522.377.365	Sedang	187.309.801.227	sedang	202.003.429.940	sedang	216.979.858.991	sedang	232.419.905.936	sedan	1.061.978.726.359	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum
sinergitas Tata	Keuangan												g		
Kelola	2. Optimalisasi	N/A	9.424.67		9.818.077.		8.865.69		9.237.5		9.626.9		9.626.		
Pemerintah	aset-aset		2.744,-		561,-		6.693,-		91.665,-		94.395,-		994.3		
Daerah	pemda DIY (satuan Rp)												95,-		
	3. Nilai eksternal	N/A	8,50		8,60		8,70		8,75		8,80		8,80		
	pelayanan														
	publik														
	4. Nilai internal	4,16	4,20		4,30		4,40		4,50		4,60		4,60		
	integritas														
	organisasi														
	5. Nilai eksternal	5,21	5,40		5,60		5,80		5,90		6		6		
	persepsi														
	korupsi														

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)
<b>SASARAN</b> Meningkatnya kapasitas pengelolaan keistimewaan	persentase capaian program urusan keistimewaan	N/A	N/A		65.22		73.91		82.61		86.96		91.30		
<b>PROGRAM</b>  Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah	1. Terwujudnya penetapan Kepala Daerah sesuai UU Keistimewaan.	100	100	9.353.000.000	-	10.010.000.000	-	10.931.000.000	-	11.975.000.000	100	15.120.000.000	100	57.389.000.000	Sekretaris Daerah Paniradya Keistimewaan
	2. Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	N/A	N/A		25		50		75		100		100		
<b>SASARAN</b> Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	Bidang tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan	5369	7919		9419		13419		17619		21877		21877		
<b>PROGRAM</b>  Program Fasilitasi Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan,	Persentase tertib administrasi tanah kasultanan,kadip aten, dan tanah desa.	19,83%	31,57%	23.040.388.000	N/A	21.500.000.000	N/A	28.500.000.000	N/A	35.500.000.000	N/A	42.500.000.000	31,57 %	151.040.388.000	Sekretaris Daerah Paniradya Keistimewaan

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)
Kadipaten dan tanah desa	Capaian pengelolaan (persen) ditambah capaian pemanfaatan (persen)	N/A	N/A		46,51%		59,45%		73,16%		88,67%		88,67 %		

## VI.7 Program - Program Strategis DIY

Pada periode RPJMD 2017 -2022, target kinerja perekonomian DIY meningkat seiring dengan beberapa pembangunan terutama di sektor sarana dan prasarana yang didukung dengan beberapa proyek fisik besar. Dampak positif dari pembangunan sarana dan prasarana tidak hanya diciptakan melalui pembentukan output dari proyek-proyek itu sendiri melainkan juga didukung dengan efek penggangannya. Beberapa proyek besar adalah sebagai berikut:

**Tabel VI-16 Daftar Proyek-Proyek Besar Pembangunan Sarana Prasarana**

No.	Kelompok Pembangunan Infrastruktur	Rincian Kegiatan
1	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembangunan Jalur Jalan Lingkar Selatan (JJLS)
		Pembangunan Jogjakarta Outer Ring Road (JORR)
		Pembangunan Jalan/Jembatan Prambanan – Gading
		Pembangunan Akses Bandara Internasional baru
		Pembangunan Akses Kawasan Industri Piyungan Bantul
		Pembangunan Underpass Gejayan, Monjali dan Kentungan
		Pengembangan Jalan Selokan Mataran
2	Penyediaan Air Baku	Pembangunan Bendung Kamijoro
3	SPAM Regional	Pembangunan Jaringan Distribusi Air Baku, Jaringan Distribusi Air Bersih dan Jaringan Distribusi Utama
4	Pembangunan Bandara Internasional baru	Pembangunan Sisi Udara dan Sisi Darat Airport City
5	Pembangunan Stasiun Interchange	Pengembangan Stasiun KA Palbapang, Stasiun Kedundang dan Stasiun Pathukan
6	Pembangunan Terminal Angkutan Barang	Pembangunan Terminal Angkutan Barang
7	Pengembangan Pengelolaan Sampah	Pengembangan TPA Regional Piyungan
8	Pengembangan Jalan Bebas Hambatan	Pembangunan jalan tol Jogjakarta – Solo, Bawen - Jogjakarta dan Jogjakarta - Cilacap

Sebagai upaya akselerasi pemenuhan kebutuhan program-program strategik daerah maka perlu ada langkah-langkah kebijakan pembiayaan non pemerintah mendasari pada kondisi kapasitas fiskal daerah yang terbatas. Selama ini pembiayaan selain dari sumber pendapatan asli daerah juga pemerintah Daerah masih mengandalkan sumber-sumber pembiayaan dari Pemerintah Pusat melalui dana transfer. Dana transfer ini meliputi dana perimbangan, dana insentif daerah, dan dana otonomi khusus. Alternatif sumber pembiayaan pembangunan yang sudah berjalan di Indonesia yaitu melalui pinjaman dan atau hibah luar negeri (PHLN), Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta Pembiayaan Investasi Non Pemerintah (PINA) .

Mekanisme PHLN baru dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk proyek-proyek strategis di daerah . Saat ini alternatif untuk pembiayaan yang sedang diinisiasi oleh daerah termasuk Provinsi DIY yaitu melalui fasilitas pinjaman daerah. Manfaat dari fasilitas pinjaman daerah yaitu percepatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat , percepatan pencapaian target Program Pembangunan Daerah, Percepatan Pertumbuhan ekonomi daerah, alternatif pembiayaan bagi daerah selain APBD (multiyears), efisiensi dalam proses pengadaan (dilakukan satu kali) dan efisiensi transfer pusat ke daerah serta efisiensi DAK infrastruktur.

Selain mekanisme pinjaman daerah, sampai dengan saat ini alternatif KPBU yaitu kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan layanan infrastruktur untuk kepentingan umum berdasarkan perjanjian kedua belah pihak dengan memperhatikan prinsip pembagian risiko sudah juga menjadi bagian pertimbangan pembiayaan oleh Pemda DIY. Pertimbangan alternatif KPBU ini dikarenakan alokasi risiko yang optimal antara Pemerintah dengan pihak lain, fokus pada layanan, pemanfaatan keahlian dan inovasi swasta dalam desain dan konstruksi, peningkatan layanan publik karena dilakukan oleh swasta, mengatasi keterbatasan anggaran pembangunan dan optimasi biaya layanan serta pemerintah dapat lebih fokus berperan sebagai regulator dan pengawas.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah merencanakan langkah-langkah pemenuhan program-program strategis dalam upaya penanggulangan kemiskinan, penanganan ketimpangan wilayah ,dan dalam mempersiapkan dukungan terhadap keberadaan Bandara New Yogyakarta Internasional Airport melalui mekanisme pembiayaan non Government. Pola corporate Social Responsibility (CSR) juga ditempuh sebagai bagian dari solusi penanggulangan kemiskinan . Disamping itu sedang diinisiasi untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha dalam pembangunan proyek-proyek strategis di DIY. Program/kegiatan yang direncanakan akan dilakukan dengan mekanisme pinjaman daerah/KPBU/swasta antara lain ;

1. Pengelolaan Sampah dan limbah B3 Regional
2. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Regional
3. Pembangunan Sport Centre Kenari
4. Pembangunan Jogja Agro Tecno Park
5. Pengembangan Kawasan Agro Ngipiksari
6. Penataan Kawasan penanda keistimewaan
7. Penyelesaian Tanjung Adikarto.



## BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Indikasi rencana program prioritas Daerah Istimewa Yogyakarta berisi program-program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Jumlah dana yang tersedia tersebut diketahui dengan melihat kerangka pendanaan pembangunan daerah yang terdiri dari kapasitas riil keuangan dan belanja daerah. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pencapaian target kinerja program(*outcome*) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD DIY. Namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Kabupaten/Kota, dan Sumber-sumber pendanaan lainnya). Namun demikian, pencantuman pendanaan di dalam Tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan hanya yang bersumber dari APBD DIY termasuk Dana Keistimewaan.

**Tabel VII-1      Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018-2022 Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kapasitas Riil/Belanja	Proyeksi				
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
<b>KAPASITAS RIIL KEUANGAN</b>	<b>5,174,314,222,543</b>	<b>5.544.412.237.692</b>	<b>5.944.902.971.694</b>	<b>6.536.627.950.702</b>	<b>7.130.436.674.482</b>
<b>BELANJA</b>	<b>5,174,314,222,543</b>	<b>5.544.412.237.692</b>	<b>5.944.902.971.694</b>	<b>6.536.627.950.702</b>	<b>7.130.436.674.482</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>2.075.892.341.092</b>	<b>2.197.348.409.880</b>	<b>2.300.437.281.240</b>	<b>2.390.905.331.286</b>	<b>2.542.837.126.544</b>
Belanja Pegawai	1,335,096,365,092	1,393,767,194,747	1,456,479,399,481	1,523,581,458,546	1,595,380,661,746
Belanja Bunga	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	25,700,000,000	25,700,000,000	25,700,000,000	25,700,000,000	25,700,000,000
Belanja Bansos	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
Belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kota	634.095.976.000	696.881.215.133	758.257.881.759	830.623.872.740	910.756.464.798

Kapasitas Riil/Belanja	Proyeksi				
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Bantuan Keuangan	70,000,000,000	70,000,000,000	49,000,000,000	-	-
Belanja Tidak Terduga	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000
<b>Belanja Langsung</b>	<b>3.098.421.881.451</b>	<b>3.347.063.827.812</b>	<b>3.644.465.690.454</b>	<b>4.145.722.619.415</b>	<b>4.587.599.547.938</b>

**Tabel VII-2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp		Targe t	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
1			Urusan Wajib																
			Terkait Pelayanan Dasar																
	1		Pendidikan																
		1	Program Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	11,992,280,000	100%	9,060,498,000	100%	8.838.976.000	100%	9.515.378.000	100%	10.172.241.000	100%	49.579.373.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	9,679,677,000	100%	7,538,532,000.00	100%	6,685,656,000.00	100%	7,917,003,000.00	100%	8,463,527,000.00	100%	40.284.395.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pelaporan Keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sstem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	2,070,119,000	100%	1,470,246,000.00	100%	1,303,909,000.00	100%	1,544,059,000.00	100%	1,650,649,000.00	100%	8.038.982.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		4	Program Pendidikan Menengah	Prosentase Sekolah menengah dengan Akreditasi A	76,25%	77,60%	879.681.884.000	78,95%	735.604.242.000	80,30%	686.370.955.000	81,65%	707.702.295.000	83,00%	725.634.945.000	83,00%	3.734.994.321.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				Jumlah medali dalam kompetisi nasional dan internasional jenjang	33 medali	35med ali		37 medali		40 medali		42 medali		45 medali		45 medali			

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp		Targe t	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
				pendidikan menengah															
				Angka Putus Sekolah	0,27%	0,24%		0,22%		0,20%		0,19%		0,17 %		0,17%			
		5	Program Layanan Pendidikan Khusus	Persentase Jumlah SLB dengan akreditasi A	33.33%	39.74%	24.824.121.500	46.15%	18.736.100.000	52.56%	18.278.018.000	58.97%	19.676.742.000	65.38 %	21.035.062.000	65.38 %	102.550.043.500	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				Persentase Jumlah medali pada kompetisi nasional dan Internasional jenjang pendidikan khusus	3 medali	5 medali		7 medali		9 medali		11 medali		13 medali		13 medal i			
		6	Program Peningkatan Mutu Pendidikan	Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB (%)	99.45%	99.50%	17.891.489.500	99.53%	18.736.100.000	99.56%	18.278.018.000	99.59%	19.676.742.000	99.62 %	21.035.062.000	99.62 %	95.617.411.500	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				Jumlah medali lomba kompetisi nasional dan internasional (satuan medali)	43 medali	48 medali		52 medali		57 medali		61 medali		65 medali		65 medal i			

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		7	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten (%)	87,31%	87,39%	31,253,837,000	87,46%	24.340.488.000	87,54%	23.745.384.000	87,61%	25.562.498.000	87,68 %	27.327.121.000	87,68 %	132.229.328.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		8	Program Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK)	Persentase sekolah menengah dan khusus yang melaksanakan Pendidikan Berbasis TIK (%)	60%	67%	4,024,768,000	74%	3.134.489.000	81%	3.057.854.000	88%	3.291.856.000	95%	3.519.098.241,48	95%	17.028.065.241,48	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		9	Program Peningkatan Pelayanan Pelatihan Pendidikan Teknik	Peserta didik yang mendapatkan layanan pendidikan teknik berstandar	1977 siswa	2012 siswa	7,000,000,000	2045 siswa	5.451.600.000	2080 siswa	5.318.313.000	2113 siswa	5.725.296.000	2148 siswa	6.120.524.000	2148 siswa	29.615.733.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		10	Program Layanan Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kota Yogyakarta	80,69%	82,76%	1,420,972,000	84,83%	1.106.653.000	86,90%	1.079.596.000	88,97%	1.162.212.000	91,03 %	1.242.442.000	91,03 %	6.011.875.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		11	Program Layanan Pendidikan Menengah Kab. Bantul	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kab. Bantul	74,67%	76,67%	1,574,450,000	78,67 %	1.226.182.000	80,67 %	1.196.203.000	82,67 %	1.287.742.000	84,97 %	1.376.637.000	84,97 %	6.661.214.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		12	Program Layanan	Persentase sekolah dan	76,92%	79,02%	1,698,747,000	81,00 %	1.322.984.000	83,22 %	1.290.638.000	85,31%	1.389.404.000	87,41 %	1.485.317.000	87,41 %	7.187.090.000	Dinas Pendidikan,

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
			Pendidikan Menengah Kab. Gunungkidul	program keahlian yang memenuhi SNP di kab. Gunungkidul														Pemuda dan Olahraga
		13	Program Layanan Pendidikan Menengah Kab. Kulon Progo	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kab. Kulon Progo	66.67 %	69.67 %	1,255,023,000	72,67 %	977.412.000	75,67 %	953.515.000	78,67 %	1.026.483.000	81,67 %	1.097.343.000	81,67 %	5.309.776.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		14	Program Layanan Pendidikan Menengah Kab. Sleman	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kab. Sleman	80,00%	81,67%	1,698,738,000	83,33%	1.322.977.000	85,00 %	1.290.631.000	86,67%	1.389.397.000	88,33 %	1.485.309.000	88,33 %	7.187.052.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	2		KESEHATAN															
		1	Program Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1,882,346,000	100%	2.184.111.000	100%	2.710.578.240	100%	3,252,693,888	100%	3,903,232,666	100%	13.932.961.749	Dinas Kesehatan
		2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	848,198,000	100%	567.004.000	100%	1,221,405,120	100%	1,465,686,144	100%	1,758,823,373	100%	5.861.116.637	Dinas Kesehatan
		3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase peningkatan kualitas pegawai dan peningkatan	100%	100%	31,092,000	100%	26.417.000	100%	28.113.000	100%	33.015.000	100%	38.500.000	100%	157.137.000	Dinas Kesehatan

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp		Targe t	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				kapasitas sumber daya aparatur															
		4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pelaporan Keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	439,098,100	100%	373.081.000	100%	397.030.000	100%	466.255.000	100%	543.730.000	100%	2.219.194.100	Dinas Kesehatan	
		5	Program Kesehatan Masyarakat	Persentase Balita Sehat	38.44%	38.94%	2,852,837,000	39.48%	2.423.925.000	40.06%	2.579.523.000	40.64%	3.029.282.000	41.22 %	3.532.638.000	41.22 %	14.418.205.000	Dinas Kesehatan	
				Persentase Desa Sehat Mandiri	20.53%	25.91%		52.83%		54.66%		56.43%		58.21 %		58.21 %			
		6	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak menular	52.25%	53.58%	2.064.676.900	56.33%	2.832.994.000	58.92%	3.014.851.000	61.26%	3.540.513.000	62.84 %	4.128.816.000	62.84 %	15.581.850.000	Dinas Kesehatan	
		7	Program Pelayanan Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan primer, kesehatan rujukan, dan Pelayanan Kesehatan lainnya sesuai standar pelayanan	36.12%	38.37%	71.747.706.400	41.08%	106.575.950.000	48.08%	134.733.641.000	52.37%	145.040.019.000	54.85 %	155.045.321.000	54.85 %	613.142.637.000	Dinas Kesehatan	
		8	Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Persentase Fasyankes kesehatan memenuhi standar	40.09%	40.58%	832,895,600	50.24%	707.673.000	62.32%	753.100.000	71.98%	884.409.000	80.19 %	1.031.365.000	80.19 %	4.209.442.600	Dinas Kesehatan	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
				sarpras perijinan SDMK dan Pembiayaan														
				Persentase kefarmasian, perbekes dan makanan sesuai standar	59.25%	66.92%		72.05%		76.79%		81.07%		86.48 %		86.48 %		
		9	Program Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Balabkes	Jumlah layanan pengembangan laboratorium untuk mendukung program, rujukan dan kebutuhan masyarakat	8 layanan	9 layanan	3,500,000,000	11 layanan	2.973.790.000	13 layanan	3.164.685.000	14 layanan	3.716.472.000	15 layan an	4.334.013.000	15 layana n	17.688.960.000	Dinas Kesehatan
		10	Program Peningkatan Pelayanan Pelatihan Kesehatan pada BLUD Bapelkes	Persentase Mantan linatih yang meningkat kompetensinya	0%	60%	4,000,000,000	62%	3.398.617.000	64%	3.616.783.000	66%	4.247.396.000	68%	4.953.158.000	68%	20.215.954.000	Dinas Kesehatan
		11	Program Pelayanan Pada BLUD Bapel Jamkessos	Persentase penduduk miskin yang mendapatkan layanan jaminan kesehatan	100%	100%	56,498,988,000	100%	31.203.389.000	100%	28.533.570.000	100%	27.969.051.000	100%	30.052.721.000	100%	174.257.719.000	Dinas Kesehatan
				Jenis Layanan Jaminan Kesehatan Komplemen	18 jenis	20 jenis		23 jenis		25 jenis		26 jenis		27 jenis		27 jenis		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp		Targe t	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
				dan Suplemen Kesehatan														
		1 2	Program Pelayanan kesehatan pada BLUD RSJ Grhasia	Persentase pasien yang mampu ADL ( <i>activity daily living</i> )	85,98%	86.0%	20,740,920,000	87%	17.622.615.000	88%	18.753.852.000	89%	22.023.729.000	90%	25.683.265.000	90%	104.824.381.000	RSJ GRHASIA
				Angka Pasien Cidera karena Fiksasi	11%	7%		4%		3%		2%		1%		1%		
				Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi ≤ 30 menit	80%	82%		84%		86%		88%		90%		90%		
				Rata Rata Jam Pelatihan Karyawan per tahun	69%	70%		72%		75%		78%		80%		80%		
				Waktu Tunggu Pelayanan Rawat Jalan Jiwa ≤ 60 menit	61%	63%		66%		69%		72%		75%		75%		
			Tingkat Penggunaan Tem pat	56%	58%		60%		62%		64%		65%		65%			

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp		Targe t	Rp					
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)					
				Tidur / Bed Occu pancy 8Rate (BOR)																			
				Penyeleseian berkas pengajuan klaim pasien jaminan kesehatan	75%	76%				77%				78%					79%		80%		80%
				Penyusunan laporan tahunan Rumah Sakit	80%	81%				82%				83%					84%		85%		85%
				Pemenuhan Sumber Daya Manusia sesuai analisis beban kerja	85%	86%				87%				88%					89%		90%		90%
				Kesesuaian Inventarisasi Barang Rumah Sakit	60%	70%				80%				90%					95%		100%		100%
		13	Program Pelayanan Kesehatan Pada BLUD RS Paru Respira	1. Angka keberhasilan pengobatan (sucsess rate) TB	81.10%	82%	12,740,666,000	83%	10.825.164.000	84%	11.520.056.000	85%	13.528.666.000	86%	15.776.634.000	86%	64.391.186.000	RS RESPIRA					

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp		Targe t	Rp
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)	
				2. Angka kematian Pasien > 48 Jam	3.00%	2.50%		2.00%		1.50%		1.00%		1.00 %		1.00%		
				3. Rata-rata kunjungan rawat jalan per hari	72	75		80		80		80		80		80		
				4. Bed Occupancy Rate (BOR)	55%	60%		60%		60%		60%		60%		60%		
				5. Length of stay (LOS)	3.3	5		5		5		5		5		5		
1	3		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang															
		1	Program Administrasi Perkantoran		100%	100%	9.185.787.000	100%	10,104,365,000	100%	10,114,802,000	100%	11,226,282,500	100%	11,448,910,000	100%	52,080,146,500	Dinas PUP ESDM DIY
		2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		100%	100%	3.540.470.000	100%	3,200,000,000	100%	3,883,968,700	100%	4,012,365,500	100%	4,183,602,000	100%	18,820,406,200	Dinas PUP ESDM DIY
		3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pelaporan Keuangan		100%	100%	661.000.000	100%	727,100,000	100%	799,810,000	100%	879,791,000	100%	967,770,000	100%	4,035,471,000	Dinas PUP ESDM DIY

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp		Targe t	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
		4	Program Pengelolaan Persampahan, Air Minum, Dan Air Limbah Regional	Peningkatan pengelolaan persampahan regional	432 ton/hari	540 ton/hari	24.420.975.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	24.420.975.000	Dinas PUP ESDM DIY	
				Ketersediaan air curah yang dikelola	13000 SR	17000 SR		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		Dinas PUP ESDM DIY	
				Layanan Sistem air limbah terpusat yang dikelola	22465 SR	23000 SR		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.214.811.000	Dinas PUP ESDM DIY	
		5	Program Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Penyediaan air minum/air curah	168 lt/dtk	200 lt/dtk	61.100.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	61.100.000.000	Dinas PUP ESDM DIY	
				Penyediaan infrastruktur di kawasan strategis	0 lokasi	2 lokasi		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17.000.000.000	Dinas PUP ESDM DIY	
				Peningkatan Kinerja Pengembangan Sistem Air Limbah Terpusat	87.64%	92.03%		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	Dinas PUP ESDM DIY	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
		6	Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Sumber Daya Air Dan Drainase	Peningkatan kondisi jaringan irigasi	70 %	71,8 %	15.878.450.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15.878.450.000	Dinas PUP ESDM DIY	
				Penambahan Kapasitas Air Baku	35 lt/dtk	35 lt/dtk		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		Dinas PUP ESDM DIY	
				Penanganan titik genangan	1 lokasi	1 lokasi		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.650.000.000	Dinas PUP ESDM DIY		
		7	Program Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Sumber Daya Air Dan Drainase	Peningkatan kinerja sistem irigasi	60 %	66,48 %	23.611.550.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	23.611.550.000	Dinas PUP ESDM DIY	
				Pemenuhan Ketersediaan Air Baku	30 lt/dtk	40,8 lt/dtk		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14.439.000.000	Dinas PUP ESDM DIY	
		8	Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Sanitasi	Penanganan sampah sistem regional	432 ton/hari	N/A	N/A	600,00 ton/hari	25.836.300.000	660,00 ton/hari	19.520.000.000	720,00 ton/hari	21.272.000.000	780,00 ton/hari	25.099.200.000	91.727.500.000	Dinas PUP ESDM DIY	
				Penanganan lokasi genangan	1 lokasi	N/A	N/A	1,00 lokasi	10.835.000.000	1,00 lokasi	11.919.000.000	1,00 lokasi	13.111.000.000	1,00 lokasi	14.423.000.000	6,00 lokasi	50.288.000.000	Dinas PUP ESDM DIY
				Layanan sistem air limbah terpusat	22.465,00 SR	N/A	N/A	24.100,00 SR	6.836.300.000	25.200,00 SR	7.520.000.000	26.300,00 SR	8.272.000.000	27.400,00 SR	9.099.200.000	27.400,00 SR	31.727.500.000	Dinas PUP ESDM DIY

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp		Targe t	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
		9	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan Air Curah pada SPAM Regional	168,00 lt/dtk	N/A	N/A	450,00 lt/dtk	62.700.000.000	750,00 lt/dtk	68.000.000.000	1.100,00 lt/dtk	70.000.000.000	1.150,00 lt/dtk	64.000.000.000	1.150,00 lt/dtk	264.700.000.000	Dinas PUP ESDM DIY	
				Panjang jaringan distribusi SPAM regional	17.250,00 m	N/A	N/A	81.648,00 m		91.174,00 m		92.374,00 m		110.074,00 m		110.074,00 m		Dinas PUP ESDM DIY	
		10	Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Baku	Penyediaan Air Baku	35,00 lt/dtk	N/A	N/A	219,5 lt/dtk	23.000.000.000	19,5 lt/dtk	25.780.000.000	19,5 lt/dtk	27.558.000.000	19,5 lt/dtk	28.773.800.000	348,00 lt/dtk	105.111.800.000	Dinas PUP ESDM DIY	
				Pengelolaan Air Baku	30 lt/dtk	N/A	N/A	51,60 lt/dtk	16.990.680.000	62,40 lt/dtk	20.388.816.000	73,20 lt/dtk	24.466.579.200	84,00 lt/dtk	29.359.800.000	84,00 lt/dtk	91.205.875.200	Dinas PUP ESDM DIY	
		11	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi	Rerata hasil penilaian kondisi fisik prasarana jaringan irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan pemda DIY	70 %	N/A	N/A	72,30 %	24.000.000.000	74,50 %	33.000.000.000	75,85 %	34.000.000.000	77,20 %	34.219.406.250	77,20 %	125.219.406.250	Dinas PUP ESDM DIY	
				Rerata hasil penilaian Kinerja Daerah Irigasi pada	60 %	N/A	N/A	72,96 %	20.283.600.000	77,82 %	25.354.500.000	82,41 %	31.693.125.000	87,00 %	39.616.406.250	87,00 %	116.947.631.250	Dinas PUP ESDM DIY	

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp		Targe t	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					seluruh daerah irigasi kewenangan Pemda DIY														
		1	Program Penyelenggaraa n Jalan	Jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap	72,26 %	72,91 %	120.900.650.000	73,46 %	125.029.918.958,66	74,06 %	127.527.534.249,74	74,66 %	134.918.416.239,44	75,26 %	167.293.565.326,38	75,26 %	675.670.084.774,22	Dinas PUP ESDM DIY	
		2		Penambahan Jaringan Jalan Baru	0 %	33,02 %		33,44 %	12.000.000.000	46,99 %	14.400.000.000	69,11 %	30.000.000.000	100 %	91.200.000.000	100	212.500.000.000	Dinas PUP ESDM DIY	
		1	Program Pelayanan Jasa Pengujian dan Pembinaan Jasa Konstruksi	Peningkatan kinerja jasa konstruksi	53,80 %	62,84 %	4.207.097.000	N/A	3.800.452.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	27.666.495.431	Dinas PUP ESDM DIY	
		3		Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi	59,58%	N/A		64,12 %	1.782.000.000	75,13 %	1.960.200.000	86,15 %	2.516.220.000	99,14 %	2.371.842.000	99,14 %	8.630.262.000	Dinas PUP ESDM DIY	
				Peningkatan pelayanan jasa laboratorium pengujian	1544 LHU	800 LHU		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.587.097.200		
				Sertifikat/lap oran hasil uji yang diterbitkan	1544 LHU	N/A		800 LHU	3.518.452.192	800 LHU	3.870.297.411	800 LHU	4.257.327.152	800 LHU	4.683.059.868	5544 LHU	18.916.233.823	Dinas PUP ESDM DIY	

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp		Targe t	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
		1	Program Administrasi Perkantoran		100%	100%	1,350,000,000	100%	1,450,000,000	100%	1,550,000,000	100%	1,650,000,000	100%	1,750,000,000	100%	7,750,000,000	Dinas PTR	
		2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		100%	100%	1,750,000,000	100%	1,850,000,000	100%	1,900,000,000	100%	1,950,000,000	100%	2,100,000,000	100%	9,550,000,000	Dinas PTR	
		3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pelaporan Keuangan		100%	100%	335,000,000	100%	400,000,000	100%	420,000,000	100%	440,000,000	100%	450,000,000	100%	2,045,000,000	Dinas PTR	
		4	Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang pada aspek pengaturan dan pembinaan	45.40 %	61.9 %	400,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.100.000.000	Dinas PTR		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
				Capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pengaturan dan pembinaan	N/A	N/A	N/A	57.06 %	900,000,000	72.63 %	500,000,000	90.09 %	600,000,000	98.99 %	700,000,000	98.99 %		Dinas PTR
		5	Program Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang pada aspek pelaksanaan	20.10 %	27.85 %	1.530.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas PTR
				Capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pelaksanaan dan pengawasan	N/A	N/A	N/A	75.17 %	1.350.000.000	82.73 %	1,500,000,000	86.38 %	1,500,000,000	89.98 %	1,500,000,000	89.98 %	7,380,000,000	Dinas PTR
1	4		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman															

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp		Targe t	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
		1	Program Pengembangan Perumahan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh	Pengurangan Rumah Tidak Layak Huni	0	7,62 %	64.353.632.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	64.353.632.000	Dinas PUP ESDM DIY	
				Penyediaan kawasan pengembangan perumahan	0	7,19 %		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	800.000.000	Dinas PUP ESDM DIY	
				Penanganan Kawasan kumuh	28,29 %	39,8 %		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	35.553.632.000	Dinas PUP ESDM DIY	
				Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman	0 %	20 %		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16.000.000.000	Dinas PUP ESDM DIY	
		2	Program Penyelenggaraan Perumahan	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	0 %	N/A	N/A	21,75 %	98.000.000.000	32,43 %	64.450.000.000	43,10 %	69.895.000.000	53,78 %	65.884.500.000	53,78 %	298.229.500.000	Dinas PUP ESDM DIY	
				Perwujudan kawasan perumahan sesuai RTRW	N/A	N/A	N/A	8 %	27.500.000.000	12 %	10.000.000.000	16 %	10.000.000.000	20 %	10.000.000.000	20 %	127.627.500.000	Dinas PUP ESDM DIY	
				Cakupan penanganan kawasan kumuh	28,29 %	N/A	N/A	58,22 %		72,16 %	20.000.000.000	86,08 %	17.000.000.000	100,00 %	15.000.000.000	100,00 %		Dinas PUP ESDM DIY	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
		3	Program Penyelenggara n Prasarana Sarana Utilitas Kawasan	Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman	0 titik	N/A	N/A	48 titik	28.500.000.000	48 titik	16.000.000.000	48 titik	20.000.000.000	48 titik	15.000.000.000	212 titik	79.500.000.000	Dinas PUP ESDM DIY
				Penyediaan infrastruktur di kawasan strategis provinsi	0 titik	N/A	N/A	32 titik	15.000.000.000	32 titik	21.500.000.000	32 titik	18.000.000.000	32 titik	19.500.000.000	128 titik	69.000.000.000	Dinas PUP ESDM DIY
1	5		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
		1	Program Administrasi Perkantoran		100%	100%	1,624,089,980	100%	1.264.841.276,42	100%	1.233.916.979,24	100%	1.328.342.382,36	100 %	1.420.040.159,61	100%	6.871.230.777,84	BPBD
		2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		100%	100%	484,800,000	100%	377.562.240	100%	368.331.163,20	100%	396.517.677,6	100%	423.889.980,10	100%	2,051,101,060,90	BPBD
		3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		100%	100%	113,524,000	100%	88.412.491,20	100%	86.250.880,72	100%	92.851.222,84	100%	99.260.903,43	100%	480,299,498.19	BPBD
		4	Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Peningkatan Desa/Kelurah an Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana	188	25	2,854,819,520	25	3.009.000.000	25	2.809.852.500	25	2.817.482.500	13	2.836.700.000	301	14,327,854,520	BPBD

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Peningkatan Sekolah Aman (SSB) di Kawasan Rawan Bencana	71	10		25		25		25		25		181		
		5	Pengelolaan kedaruratan dan logistik bencana	rerata kecepatan waktu respon kejadian bencana	45menit	20	8.932.277.500	16	5.738.021.400	14	5.056.855.440	12	5.194.061.250	10	5.116.809.600	10 menit	30,038,025,190	BPBD
		6	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Indeks pemulihan pasca-bencana	50	65	1.321.600.000	70	2.738.483.820	75	2.831.138.310	80	3.078.012.065	85	3.615.816.078	85	13,585,050,273	BPBD
		7	Program Administrasi Perkantoran		100%	100%	1,053,650,000	100%	820.582.620	100%	800.520.070,35	100%	861.779.808,18	100%	921.269.961,90	100%	4,457,802,460.42	Bakesbangpol
		8	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		100%	100%	783,000,000	100%	609.800.400	100%	594.891.297	100%	640.415.308,50	100%	684.624.287,16	100%	3,312,731,292.66	Bakesbangpol
		9	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		100%	100%	314,350,000	100%	244.815.780	100%	238.830.241,65	100%	257.106.707,83	100%	274.855.229,46	100%	1,329,957,958.94	Bakesbangpol
		10	Program Pembinaan Ideologi Dan Kewaspadaan Nasional	Skor / Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	2.86	2.87	957.683.000	2.88	2.445.786.000	2.89	3.063.555.495	2.90	4.107.010.750	2.92	4.590.138.920	2.92	15,164,174,165	Bakesbangpol

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
		1	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Skor /Nilai Indek Ketahanan Nasional Gatra Politik	3.31	3.32	1.622.000.000	3,33	4.004.483.400	3.34	3.686.347.528,50	3.35	3.746.950.620	3.36	3.712.129.508	3.36	16,771,911,056.50	Bakesbangpol
		12	Program Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi	Skor/Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya dan Ekonomi	2,85	2,86		2,87	389.400.000	2,88	351.624.000	2,89	350.265.000	2,90	346.376.000	2,90	1,437,665,000	Bakesbangpol
		13	Program Administrasi Perkantoran		100%	100%	1,377,350,800	100%	1.072.680.803,04	100%	1.046.454.666,46	100%	1.126.534.530,77	100%	1.204.301.161,54	100%	5,827,321,961.81	Satpol PP
		14	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		100%	100%	925,819,000	100%	721.027.837,20	100%	703.399.317,62	100%	757.226.897,19	100%	809.499.582,33	100%	3,916,972,634.34	Satpol PP
		15	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		100%	100%	459,740,250	100%	358.045.706,70	100%	349.291.792,91	100%	376.021.320,76	100%	401.978.724,04	100%	1,945,077,794.41	Satpol PP
		16	Pemeliharaan Ketertiban Umum Dan Ketentaraman Masyarakat	Persentase gangguan tibum tranmas yang tertangani	32.83%	35%	1.667.216.000	40%	1.274.400.000	50%	1.130.220.000	70%	1.167.550.000	75%	1.134.680.000	75%	6,374,066,000	Satpol PP
		17	Peningkatan Perlindungan Masyarakat	Persentase desa yang memiliki Satlinmas dan Jaga Warga yang aktif	15%	18%	3.235.127.000	25%	2.738.544.000	30%	2.028.117.000	40%	2.120.025.000	55%	2.131.406.800	55%	12,253,219,800	Satpol PP

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp		Targe t	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
		18	Pembinaan Pelaksanaan Dan Penegakan Perda Dan Perkada	Pelanggaran Perda, Perdais dan Perkada yang tertangani	60%	65%	724,986,950	70%	701.486.400	75%	521.439.555	78%	519.559.750	80%	507.918.600	80%	2,975,391,255	Satpol PP
1	6		Sosial															
		1	Program Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	14,639,106,319	100%	12.438.182.000	100%	13.236.618.000	100%	15.544.523.000	100%	18.127.453.000	100%	73,985,882,319	Dinas Sosial
		2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1,758,626,800	100%	1.494.225.000	100%	1.590.142.000	100%	1.867.396.000	100%	2.177.689.000	100%	8,888,078,800	Dinas Sosial
		3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase peningkatan kualitas pegawai dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	16,067,000		13.651.000	100%	14.527.000	100%	17.060.000	100%	19.895.000	100%	81,200,000	Dinas Sosial
		4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pelaporan Keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	133,477,950	100%	113.410.000	100%	120.690.000	100%	141.733.000	100%	165.284.000	100%	674,594,950	Dinas Sosial

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp		Targe t	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
		5	Program Rehabilitasi Sosial	Prosentase Anak Balita Terlantar,Anak Terlantar, Anak yang Berhadapan Hukum, Anak Jalanan, Anak dengan Kedisabilitasan, Penyandang Disabilitas, Gelandangan , Pengemis, Pemulung, Orang Dengan HIV AIDS dan Korban Tindak Kekerasan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, memperoleh bimbingan keterampilan , mandiri dan mampu berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat	15.64%	5.32%	4,219,548,525	5.49%	3.286.395.000	5.91%	3.205.910.000	6.27%	3.451.144.000	6.70 %	3.689.215.000	6.70%	17,852,212,525	Dinas Sosial

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
		6	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Lanjut Usia Terlantar, Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	67.86%	51.15%	4.197.314.500	67.57%	1.677.887.000	67.60%	1.636.795.000	67.64%	1.762.000.000	67.68 %	1.883.549.000	50.85	11,157,545,500	Dinas Sosial
		7	Program Penanganan Fakir Miskin	Persentase fakir miskin yang memperoleh bimbingan dan keterampilan berusaha sehingga pendapatan dan asetnya meningkat	n/a	n/a	n/a	1.01%	3.946.908.000	1.01%	3.850.247.000	1.01%	4.144.769.000	1.01 %	4.430.688.000	1.01%	16,372,612,000	Dinas Sosial
		8	Program Perlindungan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas	Persentase warga binaan yang terpenuhi dan terlindungi hak-haknya, mampu hidup mandiri dan berfungsi sosial	23,53%	24.71%	1.632.960.177	25.29%	1.269.102.000	25.88%	1.238.022.000	27.06%	1.332.723.000	27.65 %	1.424.659.000	27.65 %	6,897,466,177	Dinas Sosial

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp		Targe t	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
		9	Program Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Perempuan Penyandang Masalah Sosial	persentase warga binaan yang memiliki kapasitas untuk mandiri dan berfungsi sosial	41,67 %	41.67%	839.369.269	43.33%	701.319.000	45%	684.143.000	46.67%	736.477.000	48.33 %	787.281.000	48.33 %	3,748,589,269	Dinas Sosial	
		10	Program Perlindungan dan Rehabilitasi Gelandangan, Pengemis, Pemulung dan Eks Psikotik	persentase warga binaan balai yang mampu berfungsi sosial dan hidup mandiri serta kembali ke keluarga / masyarakat	28%	14%	723.062.111	14.20%	597.927.000	14.40%	583.284.000	14.60%	627.902.000	14.80 %	671.217.000	14.80 %	3,203,392,111	Dinas Sosial	
		11	Program Perlindungan dan Rehabilitasi Remaja Penyandang Masalah Sosial	Persentase warga binaan yang mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga	75%	75%	757.875.081	77.50%	590.268.000	80%	575.812.000	82.50%	619.859.000	85%	662.618.000	85%	3,206,432,081	Dinas Sosial	
		12	Program Perlindungan dan Rehabilitasi Anak Penyandang Masalah Sosial	Persentase warga binaan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak - haknya dan mampu berfungsi sosial dalam pengasuhan keluarga	24,5%	27.20%	1.155.777.106	34.36%	911.165.000	39.76%	888.850.000	41.93%	956.843.000	47.33 %	1.022.849.000	47.33 %	4,935,484,106	Dinas Sosial	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
		13	Program Perlindungan Lanjut Usia Terlantar	Persentase warga binaan yang terpenuhi kebutuhan dasar dan hak- haknya	100%	100%	633.860.662	100%	534.961.000	100%	521.859.000	100%	561.779.000	100%	600.532.000	100%	2,852,991,662	Dinas Sosial
		14	Program Pengmembangn Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan	Persentase PSKS dan masyarakat yang mampu menangani PMKS dan menguatnya nilai - nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial dalam masyarakat	64.30%	51.56%	3.506.059.500	51.57%	4.015.455.000	51.58%	3.917.116.000	51.59%	4.216.753.000	51.60 %	4.507.638.000	51.6	20,163,021,500	Dinas Sosial
			Tidak Terkait Layanan Dasar															
1	7		URUSAN KETENAGAKERJAAN															
		1	Program Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	2,967,882,700	100%	2.311.533.000	100%	2.254.923.000	100%	2.427.412.000	100%	2.594.862.000	100%	12,556,612,700	Disnakertrans

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
		2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1.197.595.700	100%	932.202.000	100%	909.372.000	100%	978.934.000	100%	1.046.463.000	100%	5,064,566,700	Disnakertrans
		3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase peningkatan kualitas pegawai dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	119,915,500	100%	93.318.000	100%	91.033.000	100%	97.996.000	100%	104.756.000	100%	507,018,500	Disnakertrans
		4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pelaporan Keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	587.876.500	100%	424.980.000	100%	414.572.000	100%	446.285.000	100%	477.071.000	100%	2,350,784,500	Disnakertrans
		5	Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Jumlah perusahaan yang melaksanakan sarana hubungan industrial dan jaminan sosial	1188 perusahaan	1288 perusahaan	661.004.800	1388 perusahaan	497.463.000	1488 perusahaan	485.280.000	1588 perusahaan	522.401.000	1688 perusahaan	558.438.000	1688 perusahaan	2,724,586,800	Disnakertrans

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
		6	Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan nihil kecelakaan kerja	60%	60%	505.848.000	61%	391.711.000	62%	382.118.000	63%	411.348.000	64%	439.724.000	64%	2,130,749,000	Disnakertrans
		7	Program Pengujian Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja	Jumlah perusahaan besar dan menengah yang mempunyai kondisi lingkungan kerja dan kesehatan kerja sesuai standar	308 perusahaan	353 perusahaan	738,000,000	398 perusahaan	574.791.000	443 perusahaan	560.714.000	488 perusahaan	603.606.000	533 perusahaan	645.245.000	533 perusahaan	3,122,356,000	Disnakertrans
		8	Program Pembinaan Pelatihan, Standarisasi dan Pemagangan	Jumlah tenaga kerja yang lulus sertifikasi	651 orang	350 orang	1.298.454.000	375 orang	1.010.923.000	400 orang	986.165.000	425 orang	1.061.601.000	450 orang	1.134.834.000	2000 orang	5,491,977,000	Disnakertrans
				Jumlah Lembaga Peltihan Kerja yang Terakreditasi	67 lembaga	72 lembaga		77 lembaga		82 lembaga	-	87 lembaga	-	90 lembaga	-	90 lembaga	-	
		9	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Jumlah Lulusan Pelatihan yang Terampil	1.5%	1.90%	6.050.000.000	3.81%	4.610.792.000	5.71%	4.497.872.000	7.61%	4.841.934.000	9.52 %	5.175.945.000	9.52%	25,176,543,000	Disnakertrans

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
1	8		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak															
		1	Program Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1,206,060,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	1,206,060,000	BPPM
		2	Program Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	N/A	N/A	100%	939.340.000	100%	916.336.000	100%	986.430.000	100%	1.054.477.000	100%	3,896,583,000	DPPPA&DAL DUK
		3	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	764.547.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	764.547.000	BPPM
		4	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	N/A	N/A	100%	591.025.000	100%	576.550.000	100%	620.653.000	100%	663.468.000	100%	2,451,696,000	DPPPA&DAL DUK
		5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pelaporan Keuangan	Persentase peningkatan pengembang an sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	141,263,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	141,263,000	BPPM
		6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pelaporan Keuangan	Persentase peningkatan pengembang an sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	N/A	N/A	100%	110.023.000	100%	107.329.000	100%	115.539.000	100%	123.509.000	100%	456,400,000	DPPPA&DAL DUK

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
		7	Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	52.31%	70.00%	1.430.583.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70.00 %	1.430.583.000	BPPM
		8	Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	52.31%	N/A	N/A	73.00%	1.106.791.000	76.00%	1.079.686.000	80.00%	1.162.276.000	85.00 %	1.242.453.000	85.00 %	4,591,206,000	DPPPA&DAL DUK
		9	Progam Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase perempuan pengambilan keputusan di ranah publik	34,25 %	34,25 %	920.631.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	34,25 %	920.631.000	BPPM
		10	Progam Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase perempuan pengambilan keputusan di ranah publik	34,25 %	N/A	N/A	34.34%	1.370.680.000	34.38%	1.337.111.000	34.42%	1.439.393.000	34.45 %	1.538.687.000	34.45 %	5,685,871,000	DPPPA&DAL DUK
1	9		Pangan															
		1	Program Administrasi Perkantoran		100%	100%	820,818,050	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	820,818,050	BKPP
		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	100%	214,228,750	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	214,228,750	BKPP

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp		Targe t	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
		3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan		100%	100%	86,313,200	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	86,313,200	BKPP
		4	Program Peningkatan Ketersediaan dan akses pangan	cadangan pangan (ton)	527	537	1.368.175.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	537	1.368.175.000	BKPP
		5	Program Keanekaragama n Konsumsi dan Keamanan Pangan	Konsumsi umbi meningkat (kg/kapita/ tahun)	39	48	250.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	32	250.000.000	BKPP
				Konsumsi sayur meningkat (kg/kapita/ tahun)	227	228		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	234	BKPP			
		6	Program Peningkatan Ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan	Persentase peningkatan ketersediaan dan konsumsi energi	N/A	N/A	N/A	0.08	2,000,000,000	0.08	2,300,000,000	0.08	2,400,000,000	0.08	2,500,000,000	0.4	9,200,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		7	Program Pemberdayaan daerah rawan pangan	jumlah desa rawan pangan (desa)	16	N/A	N/A	6	900,000,000	4	1,100,000,000	2	1,200,000,000	0	1,500,000,000	0	4,700,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1	10		Pertanahan															

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
		1	Program Tertib Administrasi Pertanahan	Layanan administrasi pertanahan sesuai peraturan perundangan	100.00%	100.00 % 200,000,000	100.00%	600,000,000	100.00%	600,000,000	100.00%	600,000,000	100.00%	700,000,000	100.00%	2,700,000,000	Dinas PTR	
1	1	1	Lingkungan Hidup															
		1	Program Administrasi Perkantoran		100%	100% 1.148.130.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	1.148.130.000	BLH	
		2	Program Administrasi Perkantoran		100%	N/A N/A	100%	4.200.000.000	100%	4.300.000.000	100%	5.100.000.000	100%	6.027.161.300	100%	19,627,161,300	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		3	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		100%	100% 620.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	620.000.000	BLH	
		4	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		100%	N/A N/A	100%	3.856.039.000	100%	4.500.000.000	100%	5.700.000.000	100%	6.500.000.000	100%	20,556,039,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		100%	100% 205.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	205.000.000	BLH	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan			N/A		334.700.000		525.000.000		704.009.800		791.708.400		2,355,418,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		7	Program Pengkajian dan Penaatan Lingkungan Hidup	Tingkat ketaatan usaha/ kegiatan dengan ijin lingkungan dan/atau rekomendasi kelayakan lingkungan dikeluarkan oleh Pemda DIY (%)	37,5 %	41,25 %	1.979.332.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.979.332.000	BLH	
				Pelayanan dokumen lingkungan usaha/kegiatan dan Validasi KLHS untuk KRP Kab/Kota (%)	100	N/A		100		100		100		100		100		
		8	Program Pengkajian dan Penaatan Lingkungan Hidup	Tingkat ketaatan usaha/ kegiatan dengan ijin lingkungan dan/atau rekomendasi kelayakan lingkungan dikeluarkan	37,5	N/A	N/A	45,00	2,000,000,000	48,75	2,750,000,000	52,50	3,000,000,000	56,25	3,250,000,000	56,25	11,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	oleh Pemda DIY (%)		2.350.000.000		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.350.000.000	BLH	
				Pelayanan dokumen lingkungan usaha/kegiatan dan Validasi KLHS untuk KRP Kab/Kota (%)	100		N/A											100
		9		TSS = 34,29; BOD = 10,68; COD, Fosfat, DO, Koli Tinja, Total Koli) dan Kadar 2 parameter pencemar udara SO2 dan NO2	TSS = 34,09; BOD = 10,66; COD = 21,24; Fosfat = 0,15; DO = 5,06; Koli Tinja = 47403,06; Total Koli = 356770,24; SO2 =9,32 NO2 =12,00													

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
		10	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Jumlah sumber pencemar air sungai (point source) yang ditangani di 10 sungai (usaha/kegiatan)	162	N/A	N/A	192	2,700,000,000	207	3,000,000,000	222	4,000,000,000	237	5,000,000,000	237	14,700,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				Jumlah sumber pencemar air sungai (non point source) yang ditangani di 10 sungai (lokasi)	60	N/A		72		96		120		120		120		
				Jumlah sumber pencemar udara (point source) yang ditangani di 5 Kab/Kota (usaha/kegiatan)	55	N/A		65		70		75		80		80		
		11	Program pengembangan kapasitas lingkungan hidup	Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup (penghargaan)	3	3	1.870.668.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.870.668.000	BLH
		12	Program pengembangan kapasitas lingkungan hidup	Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup (penghargaan)	3	N/A	N/A	3	2,400,000,000	3	2,500,000,000	3	2,750,000,000	3	3,000,000,000	3	10,650,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp		Targe t	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
		13	Program peningkatan tutupan hutan dan vegetasi	Persentase tutupan lahan (%)	33,08	33,58	725.000.000	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	725.000.000	BLH
		14	Program pengelolaan tutupan vegetasi dan konservasi sumberdaya alam	Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi (Ha)	150	N/A	-	160	4.968.006.210	165	5.500.000.000	170	6.609.536.904	175	7.170.490.595	175	24,248,033,709	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				Persentase penurunan kerusakan hutan (%)	7.18	N/A		0.1		0.1		0.1		0.1		0.5		
		15	Pengelolaan Persampahan Regional	Pengelolaan sampah di TPA Piyungan (ton/hari)	432	N/A	N/A	600,00	9.000.000.000	660,00	10.000.000.000	720,00	11.000.000.000	780,00	12.000.000.000	780,00	42,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1	12		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil															
		1	Program Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP - el, Akta kelahiran Anak, Akta Kematian)	n/a	80%	920,000,000	82.67%	693.840.000	86.10%	627.900.000	87.17%	626.790.000	87.97 %	656.920.000	87.97 %	3,525,450,000	Biro Tata Pemerintahan
1	13		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa															

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
		1	Program Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakan	4 lembaga	4 lembaga	2.997.371.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4 lembaga	2.997.371.000	BPPM
		2	Program Keberdayaan Masyarakat	Desa/kelurahan model gerakan gotong royong	3 desa	8 (desa/kelurahan)	900.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	8 (desa/kelurahan)	900.000.000	BPPM
1	14		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana															
		1	Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga	1.05	1.17	250,210,000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1.17	250,210,000	BPPM
		2	Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga	1.05	n/a	n/a	1.17	194.876.000	1.17	190.103.000	1.17	204.645.000	1.17	218.762.000	1.17	808,386,000	DPPPA&DAL DUK
		3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rasio Kekerasan dalam Keluarga	0,0013 (120 kasus KDRT)	0.0013	251.486.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.0013	251.486.000	BPPM
		4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rasio Kekerasan dalam Keluarga	0,0013 (120 kasus KDRT)	n/a	n/a	0.0013	920.980.000	0.0013	898.425.000	0.0013	967.149.000	0.0013	1.033.866.000	0.0013	3,820,420,000	DPPPA&DAL DUK
1	15		Perhubungan															

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp		Targe t	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
		1	Program Administrasi Perkantoran			100%	5.183.204.625	100%	5.500.000.000	100%	5.600.000.000	100%	5.700.000.000	100%	5.800.000.000	100%	27.783.204.625	Dinas Perhubungan	
		2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur			100%	1.312.671.950	100%	1.412.671.950	100%	1.500.000.000	100%	1.550.000.000	100%	1.600.000.000	100%	7.375.343.900	Dinas Perhubungan	
		3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pelaporan Keuangan			100%	359.300.000	100%	400.000.000	100%	420.000.000	100%	440.000.000	100%	450.000.000	100%	2.069.300.000	Dinas Perhubungan	
		4	Program Pengembangan Keselamatan Transportasi	Penurunan rasio jumlah kecelakaan	1	0,95	3.221.444.075	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	39.746.444.075	Dinas Perhubungan		
					1	N/A	N/A	0,96	8.350.000.000	0,94	8.400.000.000	0,92	9.000.000.000	0,90	10.775.000.000	0,90	35,525,000,000	Dinas Perhubungan	
		5	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Peningkatan Penyediaan Layanan Angkutan	76.47%	76.76%	132.949.011.350	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	132.949.011.350	Dinas Perhubungan		

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp		Targe t	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
				Umum dalam Trayek															Dinas Perhubungan
				Peningkatan tertib perijinan angkutan tidak dalam trayek	60.00%		68.00%		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
				Penyiapan penyediaan sarana prasarana angkutan perkeretaapi an	20%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Perhubunga n
				Persentase penyediaan layanan angkutan umum dalam trayek	70,47%	N/A	N/A	72,24%	133.000.000.000	80,35%	120.000.000.000	81,24%	125.000.000.000	82,41 %	127.500.000.000	82,41 %	134.200.000.000	Dinas Perhubunga n	
				Peningkatan tertib perijinan angkutan tidak dalam trayek	60.00%	N/A	N/A	76.00%		84.00%	500.000.000	92.00%	500.000.000	100.00%	200.000.000	100.00%		Dinas Perhubunga n	

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp		Targe t	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
				Penyiapan penyediaan sarana prasarana angkutan perkeretaapi an	20%	N/A	N/A	40%		50%	1.000.000.000	60%	5.000.000.000	70%	20.000.000.000	70%		Dinas Perhubunga n	
		6	Program Pengembangan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Penerapan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas pada Kawasan Prioritas	39%	41%	1.124.500.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	41%	1.124.500.000	Dinas Perhubunga n	
				Peningkatan Pengendalian Sistem Simpang Bersinyal di Perkotaan Yogyakarta	62%	62.71%		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	62.71 %	Dinas Perhubungan			
				Penerapan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	39%	N/A	N/A	48.00%	5.250.000.000	53%	2.000.000.000	60.00%	16.400.000.000	67%	2.200.000.000	67%	8.100.000.000 14.600.000.000	Dinas Perhubunga n	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp		Targe t	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Pengendalian Sistem Simpang Bersinyal di Perkotaan Yogyakarta	50%	N/A	N/A	60,00%		67%	3.850.000.000	73,33%	3.000.000.000	80%	4.300.000.000	80%		Dinas Perhubunga n
		7	Program Pengembangan dan Pengelolaan Simpul Transportasi	Penumpang yang Terlayani Angkutan Umum	4.450 orang/h ari	4.500 orang/h ari	1.673.816.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.673.816.000		Dinas Perhubunga n
		8	Program Pengembangan dan Pengelolaan Simpul Transportasi dan Perparkiran	Penumpang yang terlayani pada simpul transportasi dan perparkiran	4.450 orang/h ari	N/A	N/A	4.550 orang/hari	2.300.000.00 0	4.600 orang/ha ri	2.000.000.000	4.650 orang/h ari	2.200.000.000	4.700 orang /hari	2.400.000.000	4.700 orang /hari	8.900.000.000	Dinas Perhubunga n
				Kendaraan yang Terlayani pada Tempat Khusus Parkir	N/A	N/A	N/A	69 SRP	500.000.000	791 SRP	1.000.000.000	830 SRP	1.100.000.000	830 SRP	1.200.000.000	830 SRP		Dinas Perhubunga n
1	1	6	Komunikasi dan Informatika															
		1	Program Administrasi Perkantoran		100%	100%	1,778,818,529	100%	1.385.343.870,46	100%	1.351.473.386,72	100%	1.454.894.785,40	100%	1.555.328.693,82	100%	7,525,859,265,39	Dinas Kominfo
		2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		100%	100%	646,764,050	100%	503.699.842,14	100%	491.384.808,18	100%	528.987.993,39	100%	565.504.951,31	100%	2,736,341,645,02	Dinas Kominfo

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		100%	100%	225,222,750	100%	175.403.477,70	100%	171.115.011,63	100%	184.209.574,46	100%	196.925.880,64	100%	952,876,694.43	Dinas Kominfo
		4	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Tertangani	5%	60%	2.949.921.671	65%	2.198.340.000	70%	1.949.629.500	75%	1.997.125.000	80%	1.940.900.000	80%	11,035,916,171	Dinas Kominfo
		5	Program Pengembangan Aplikasi Informatika dan kerumahtanggaan	Persentase Urusan yang Sudah Terintegrasi dalam Pengelolaan Data dan Informasi yang Berbasis TIK	4,17%	12,50%	1,286,000,000	25%	1.342.014.000	37,50%	1.579.796.400	50%	2.142.147.000	62,50%	2.738.162.000	62,50%	9,088,119,400	Dinas Kominfo
		6	Program Layanan Teknologi Informasi	Persentase Jaringan Infrastruktur dalam Lingkup Pemda DIY yang Terintegrasi dalam Layanan TIK	37%	63.10%	13,150,000,000	76.50%	7.261.248.000	80.50%	8.035.864.200	85%	8.077.602.500	90.50%	8.710.699.480	90.50%	45,235,414,180	Dinas Kominfo
1	17		Koperasi dan UKM															
		1	Program Administrasi Perkantoran		100%	100%	1.144.000.000	100%	1.600.000.000	100%	1.750.000.000	100%	1.800.000.000	100%	1.850.000.000	100%	8,144,000,000	Dinas Koperasi dan UKM

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp		Targe t	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	100%	2.150.000.000	100%	3.100.000.000	100%	1.000.000.000	100%	750.000.000	100%	775.000.000	100%	7,775,000,000	Dinas Koperasi dan UKM	
		3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan		100%	100%	100.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	300.000.000	100%	310.000.000	100%	1,210,000,000	Dinas Koperasi dan UKM	
		4	Pengembangan UKM	Nilai omzet UKM Tahun n (Rp Ribu)	72.000	79.380	1.055.000.000	83.349	1,100,000,000	87.516	2.000,000,000	91.892	2,100,000,000	96.487	2,100,000,000	96.487	8,355,000,000	Dinas Koperasi dan UKM	
		5	Program Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru	Jumlah Wirausaha Baru	427	NA	NA	749	1,100,000,000	899	1,750,000,000	1,079	1,800,000,000	1,295	1,900,000,000	1,295	6,550,000,000	Dinas Koperasi dan UKM	
		6	Program Pengembangan Perkoperasian	nilai omzet koperasi sektor riil tahun n(Rp Juta)	2,002,561	NA	NA	2,036,097	1,200,000,000	2,046,177	1,500,000,000	2,056,257	1,600,000,000	2,066,336	1,700,000,000	2,066,336	6,000,000,000	Dinas Koperasi dan UKM	
		7	Penguatan SDM dan Kelembagaan Koperasi	nilai omzet koperasi produksi tahun n (Rp Ribu)	2.002.561	2.026.018	550.000.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	550,000,000	Dinas Koperasi dan UKM		
		8	Peningkatan Akses Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan yang diperoleh koperasi dan UKM tahun n (Rp)	12.000.000.000	NA	NA	15.870.000.000	4,400,000,000	18.250.500.000	4,500,000,000	20.988.075.000	4,550,000,000	24.136.286.250	600.000.000	24.136.286.250	14,050,000,000	Dinas Koperasi dan UKM	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
		9	Peningkatan Akses Pembiayaan	Rasio Omzet Koperasi dan UKM terhadap Jumlah Pembiayaan	NA	18.82 %	200.000.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	18.82 %	200,000,000	Dinas Koperasi dan UKM
		10	Pengawasan Koperasi dan UKM	Persentase Jumlah Koperasi Sehat dan UKM yang Memiliki Ijin Formal	NA	22.16 %	250.000.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	22.16 %	250,000,000	Dinas Koperasi dan UKM
1	18		Penanaman Modal															
		1	Program Administrasi Perkantoran		100%	NA	NA	100%	2,600,000,000	100%	2,600,000,000	100%	2,600,000,000	100%	2,650,000,000	100%	10,450,000,000	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal
		2	Program Administrasi Perkantoran		100%	100%	733.127.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100%	733,127,000	BKPM
		3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	NA	NA	100%	1,000,000,000	100%	25,000,000,000	100%	15,000,000,000	100%	1,200,000,000	100%	42,200,000,000	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal
		4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	100%	117,000,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100%	117,000,000	BKPM
		5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan		100%	NA	NA	100%	400,000,000	100%	400,000,000	100%	450,000,000	100%	500,000,000	100%	1,750,000,000	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp		Targe t	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
		6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan		100%	100%	128,000,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100%	128,000,000	BKPM	
		7	Program Promosi Investasi	Nilai Rencana Investasi yang Tercatat dalam Ijin Prinsip (Rp Juta)	NA	NA	NA	863.630	1.200.000.000	1.036.356	1.500.000.000	1.243.628	1.550.000.000	1.492.353	1.600.000.000	1.790.824	5,850,000,000	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	
		8	Program Promosi Investasi	Nilai Rencana Investasi yang Tercatat dalam Ijin Prinsip (Rp Juta)	NA	719.692	750.000.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	719.692	750,000,000	BKPM	
		9	Program Peningkatan Iklim Investasi	nilai realisasi investasi PMA & PMDN (Rp Juta)	854,258	NA	NA	NA	1.000.000.000	820,644	1.200.000.000	869,275	1.331.000.000	918,963	1.423.000.000	918,963	4,954,000,000	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	
		10	Program Perencanaan dan Peningkatan Iklim Investasi	nilai realisasi investasi PMA & PMDN (Rp Juta)	854,258	758,857	877.843.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	758,857	877,843,000	BKPM	
		11	Program Pengawasan dan	Persentase permasalahan investasi	n.a	55	100,000,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	55	100,000,000	BKPM	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
			Pengendalian Investasi	yang diselesaikan														
		1 2	Pelayanan Perijinan	Presentase Waktu Penyelesaian Layanan Perizinan terhadap SOP	93%	NA	NA	95%	2,350,000,000	97%	2,000,000,000	99%	2,100,000,000	100%	2,200,000,000	100%	8,650,000,000	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal
		1 3	Program Kemudahan berusaha dan Pelayanan Pengaduan	Waktu Penyelesaian Izin Usaha	n/a	NA	NA	5	3,000,000,000	3	2,000,000,000	2	2,100,000,000	1	2,200,000,000	1	9,300,000,000	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal
1	1 9		URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
		1	Program Pembinaan Kepemudaan	persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi pada pendidikan kepemudaan	20%	22%	7,041,560,000	24%	5.483.967.000	26%	5.349.888.000	28%	5.759.288.000	30%	6.156.862.000	30%	29,791,565,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		2	Program Pembinaan Olahraga	Jumlah medali dalam kompetisi POPWIL	5 medali	5 medali	51,724,280,000	5 medali	40.282.870.000	6 medali	57.879.163.000	6 medali	35.915.677.000	7 medali	17.471.682.000	7 medali	203,273,672,000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				Jumlah medali dalam kompetisi POPNAS dan PEPARPENAS	11 medali	11 medali		12 medali		12 medali		13 medali		13 medali		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		
1	2 0		Urusan Statistik															

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		1	Program pengembangan statistik Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan data dan analisis dalam perencanaan pembangunan daerah	100.00	100.00	1,261,753,500	100.00	1,387,928,850	100.00	1,526,721,735	100.00	1,679,393,909	100.00	1,847,333,299	100.00	7,703,131,293	Bappeda
				Tingkat kepuasan pelanggan	67.13	68.00		69.00		70.00		71.00		72.00		72.00		
1	2	1	Persandian															
		1	Program Peningkatan Layanan Informasi Dan Persandian	Kecepatan Informasi sandi kepada pimpinan dan informasi persuratan di lingkungan Pemda DIY	95	100	625,000,000	100	460.200.000	100	439.530.000	100	460.875.000	100	477.760.000	100	2,463,365,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
1	2	2	Kebudayaan															
		1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	3.457.576.000	100%	3.951.114.000	100%	4.204.923.000	100%	4.938.223.000	100%	5.759.037.000	100%	22,310,873,000	Dinas Kebudayaan
		2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	245.710.000	100%	835.537.000	100%	889.210.000	100%	1.044.280.000	100%	1.217.857.000	100%	4,232,594,000	Dinas Kebudayaan
		3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian	100%	100%	134.890.000	100%	337.792.000	100%	359.491.000	100%	422.183.000	100%	492.357.000	100%	1,746,713,000	Dinas Kebudayaan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Capaian Kinerja Dan Keuangan	kinerja dan keuangan														
1	2	3	Urusan Perpustakaan															
		1	Program Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	5.486.642.600	100%	4.272.554.000	100%	4.167.917.000	100%	4.486.740.000	100%	4.796.249.067,46	100%	23,210,102,667.46	BPAD
		2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	40.318.096.600	100%	31.069.879.000	100%	30.308.967.000	100%	32.627.435.000	100%	34.878.175.407,27	100%	169,202,553,007.27	BPAD
		3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase peningkatan kualitas pegawai dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	103,831,000	100%	80.822.000	100%	78.843.000	100%	84.874.000	100%	90.728.553,25	100%	439,098,553.25	BPAD
		4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian	100%	100%	607.262.300	100%	472.869.000	100%	461.288.000	100%	496.574.121,02	100%	530.829.315,46	100%	2,568,822,736.47	BPAD

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
			Dan Pelaporan Keuangan	kinerja dan keuangan														
		5	Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan	jumlah perpustakaa n yang terstandar	Data tahun 2016 = 19 perpust akaan sekolah yang terakred itas	29 unit	733.496.000	39 unit	1.308.706.00 0	49 unit	1.276.655.000	59 unit	1.374.312.655,96	69 unit	1.469.116.925,9 6	69 unit	6,162,286,581 .93	BPAD
		6	Program Pengembangan Bahan Pustaka dan Informasi	Penambahan jumlah koleksi dan pengembang an informasi perpustakaa n	247.876 exp.	10.174 exp.	2.436.713.500	10.174 exp.	1.878.280.00 0	10.174 exp.	1.832.280.000	10.174 exp.	1.972.439.965,69	10.17 4 exp.	2.108.504.877,5 1	50.87 0 exp.	10,228,218,34 3.19	BPAD
		7	Program Layanan Perpustakaan	jumlah anggota baru Perpustakaa n	33.656 orang	6000 orang	4.749.470.500	6000 orang	3.696.789.00 0	6000 orang	3.606.254.000	6000 orang	3.882.112.000	6000 orang	4.149.911.927,9 3	30000 orang	20,084,537,42 7.93	BPAD
				Meningkatny a kualitas layanan JLA	3 perpust akaan	4 perpust		5 perpust		6 perpust		7 perpust		8 perp ust		8 perpu st		
1	2	4	Urusan Kearsipan															

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		1	Program Perlindungan dan Konservasi Arsip	Jumlah Arsip yang sudah diolah dan dilestarikan	53.968 berkas	4000 berkas	987.354.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4000 berka s	987,354,000	BPAD	
		2	Program Pelestarian dan Layanan Arsip	Jumlah Arsip yang sudah diolah dan dilestarikan	53.968 berkas	N/A	N/A	8000 berkas	838.909.000	8000 berkas	818.364.000	8000 berkas	880.964.926,92	8000 berka s	941.736.568,93	32000 berka s	3,479,974,495 .85	BPAD
		3	Program Pembinaan dan Pengembangan Sistem Kearsipan	Peningkatan jumlah SKPD yang melakukan pengelolaan arsip sesuai standar	Realisasi 2016 sebanyak 25 OPD/UP TD	50 OPD/UPTD	N/A	70 OPD/UPTD	891.102.000	90 OPD/UPTD	869.278.000	110 OPD/UP TD	935.773.695,49	130 OPD/ UPTD	1.000.326.213	130 OPD/ UPTD	3,696,479,908 .49	BPAD
2			Urusan Pilihan															
	1		Kelautan dan Perikanan															
		1	Program Administrasi Perkantoran		100%	100%	3.414.847.000	100%	4,500,000,000	100%	4,600,000,000	100%	4,650,000,000	100%	4,700,000,000	100%	21,864,847,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	100%	790,000,000	100%	4,500,000,000	100%	5,463,000,000	100%	5,900,000,000	100%	6,330,000,000	100%	22,983,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja		100%	100%	330.000.000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	550,000,000	100%	600,000,000	100%	2,480,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp		Targe t	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
				dan Pelaporan Keuangan															
		4	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	produksi perikanan budidaya (ton)	76,875.60	89,336	1.250.000.000	89,400	3,000,000,000	89,500	3,100,000,000	89,600	3,200,000,000	89,700	3,300,000,000	89,700	13,850,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		5	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	produksi perikanan tangkap (ton)	5,001.20	5,817	360.700.000	6,199	2,500,000,000	6,481	2,750,000,000	6,863	4,750,000,000	7,063	2,900,000,000	7,063	13,260,700,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		6	Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	produksi produk perikanan olahan (ton)	7,810	8,201	886.800.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8,201	886,800,000	Dinas Kelautan dan Perikanan		
		7	Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	23.1	N/A	N/A	24.55	1,900,000,000	25.21	2,100,000,000	25.48	2,200,000,000	26.05	2,300,000,000	26.05	8,700,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		8	Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya	Produksi benih ikan yang bersertifikat (juta ekor)	n/a	31.3	2.650.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31.3	2,650,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan		
		9	Pengembangan perbenihan perikanan budidaya	Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi (%)	78	N/A	N/A	84	3,500,000,000	86	3,500,000,000	88	3,600,000,000	90	3,700,000,000	90	14,300,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		10	Konservasi Ekosistem dan Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Persentase kawasan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan(%)	n/a	14	350,000,000	14	1,500,000,000	14	1,700,000,000	14	1,800,000,000	14	1,900,000,000	70	7,250,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Persentase penurunan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan(%)	n/a	10		10		10		10		10		50		Dinas Kelautan dan Perikanan
		11	Pengelolaan Pelabuhan	nilai produksi ikan yang masuk melalui pelabuhan / tempat pelelangan ikan (milyar rupiah)	n/a	32.84	150.000.000	33.31	500,000,000	34.78	600,000,000	35.25	700,000,000	36.73	1,000,000,000	36.73	2,950,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	2		Pariwisata															
		1	Program Administrasi Perkantoran		100%	100%	992.590.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.600.000.000	100%	1.700.000.000	100%	7,292,590,000	Dinas pariwisata
		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	100%	482.000.000	100%	650.000.000	100%	722.000.000	100%	778.000.000	100%	831.000.000	100%	3,463,000,000	Dinas pariwisata
		3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan		100%	100%	115,000,000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	300.000.000	100%	350.000.000	100%	1,265,000,000	Dinas pariwisata
		4	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara tahun n	4,549,574	5,405,594	2.850.000.000	5,926,228	3,000,000,000	6,542,327	3,500,000,000	7,289,849	3,500,000,000	8,377,099	3,500,000,000	8,377,099	16,350,000,000	Dinas pariwisata

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp		Targe t	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
		5	Pengembangan Industri Pariwisata	Jumlah Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi	60	75	820.000.000	100	800,000,000	150	1,000,000,000	200	1,000,000,000	250	1,000,000,000	250	4,620,000,000	Dinas pariwisata	
		6	Peningkatan SDM dan Kelembagaan Pariwisata	Peningkatan kapasitas kelembagaan pelaku pariwisata	9.67	13.69	400.000.000	17,00	2,500,000,000	19.61	2,500,000,000	21.36	2,500,000,000	23.04	2,300,000,000	23.04	10,200,000,000	Dinas pariwisata	
		7	Pengembangan Destinasi Pariwisata	LOS wisatawan mancanegara dan nusantara tahun n	1.98	2.06	18.000.000.000	2.14	15,000,000,000	2.22	15,000,000,000	2.30	15,000,000,000	2.45	14,000,000,000	2.45	77,000,000,000	Dinas pariwisata	
2	3		Pertanian																
		1	Program Administrasi Perkantoran		100%	100%	2,510,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	2,510,000,000	Dinas Pertanian	
		2	Program Administrasi Perkantoran		100%	N/A	N/A	100%	5,000,000,000	100%	5,000,000,000	100%	3,152,000,000	100%	3,374,000,000	100%	16,526,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	100%	1,017,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	1,017,000,000	Dinas Pertanian	
		4	Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur		100%	N/A	N/A	100%	5,890,000,000	100%	6,000,000,000	100%	6,194,000,000	100%	6,623,000,000	100%	24,707,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja		100%	100%	195,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	195,000,000	Dinas Pertanian	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			dan Pelaporan Keuangan															
			Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur					45.000.000		49.000.000		49.000.000		50.000.000		193,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan		100%	N/A	N/A		476.380.000		500,000,000		465,000,000		508,000,000	1,949,380,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		7	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	produksi tanaman pangan (ton)	2,204,717	2,209,769	50,853,760,800	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2,209,769	50,853,760,800	Dinas Pertanian
		8	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	produksi tanaman pangan (ton)	2,204,717	N/A	N/A	2.312.780	11,000,000,000	2,313,050	8,000,000,000	2,313,255	3,841,000,000	2,313,500	4,091,000,000	2,313,500	26,932,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		9	Peningkatan Produksi Hortikultura	produksi hortikultura (ton)	392,421	396,375	2.885.902.200	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	396,375	2,885,902,200	Dinas Pertanian
		10	Peningkatan Produksi Hortikultura	produksi hortikultura (ton)	392,421	N/A	N/A	397,965	3,000,000,000	399,550	3,200,000,000	401,150	3,655,000,000	402,750	2,837,000,000	402,750	12,692,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		11	Peningkatan Populasi Peternakan	populasi ternak (Animal Unit)	620,516	620,869	450,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	620,869	450,000,000	Dinas Pertanian
		12	Peningkatan Populasi Peternakan	populasi ternak (Animal Unit)	620,516	N/A	N/A	622,842	3,000,000,000	624,874	3,200,000,000	626,885	4,200,000,000	628,870	3,200,000,000	628,870	13,600,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp		Targe t	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
		13	Peningkatan Produksi Perkebunan	produksi perkebunan (ton)	68,602.97	68,740	2,605,490,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	68,740	2,605,490,000	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		14	Peningkatan Produksi Perkebunan	produksi perkebunan (ton)	68,602.97	N/A	N/A	68,877	2,000,000,000	69,015	2,300,000,000	69,153	3,132,000,000	69,290	2,281,000,000	69,290	9,713,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		15	Pengembangan SDM pertanian dan penyuluhan	Jumlah Peserta Pelatihan SDM Pertanian (orang)	300	300	450,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		450,000,000	Dinas Pertanian	
		16	Pengembangan SDM pertanian dan penyuluhan	Tingkat pengetahuan dan ketrampilan sdm pertanian (%)	N/A	N/A	N/A	73	1,100,000,000	74	1,100,000,000	75	1,100,000,000	76	1,100,000,000	76	4,400,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		17	Pengembangan perbenihan	Jumlah perbanyakan benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang bersertifikat	n/a	81,440	1.421.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	81,440	1,421,000,000	Dinas Pertanian	
		18	Pengembangan perbenihan pertanian	Persentase benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi(%)	N/A	N/A	N/A	85	2,500,000,000	87	2,700,000,000	89	1,198,000,000	91	1,296,000,000	91	7,694,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
		19	Pengawasan dan sertifikasi benih	Jumlah sertifikasi benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (hektar)	n/a	500	200,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	500	200,000,000	Dinas Pertanian	
		20	Pengawasan dan sertifikasi benih pertanian	Jumlah sertifikasi benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (hektar)	n/a	n/a	n/a	600	500,000,000	700	500,000,000	800	550,000,000	900	600,000,000	900	2,150,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		21	Perlindungan Tanaman Pertanian	Persentase Pertanaman aman dari serangan OPT dan DPI (%)	n/a	95	265,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	95	265,000,000	Dinas Pertanian	
		22	Perlindungan Tanaman Pertanian	Persentase Pertanaman aman dari serangan OPT dan DPI (%)	n/a	N/A	N/A	95	500,000,000	95	500,000,000	95	520,000,000	95	550,000,000	95	2,070,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		23	Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan	Produksi bibit ternak (ekor)	n/a	50	3,776,455,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50	3,776,455,000	Dinas Pertanian	
		24	Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan	Persentase bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi(%)	n/a	N/A	N/A	92	4,500,000,000	94	4,700,000,000	96	4,800,000,000	98	4,900,000,000	98	18,900,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	4		Kehutanan															
		1	Program Administrasi Perkantoran		100%	100%	2.116.174.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	2,116,174,000	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	100%	1,571,408,900	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	1,571,408,900	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan		100%	100%	210,350,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	210,350,000	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		4	Perencanaan dan Bina Usaha Kehutanan	persentase kawasan hutan tertata(%)	84.12	N/A	N/A	87.40	865.000.000	89.40	950.000.000	90.68	1.100.000.000	92.32	1.250.000.000	92.32	4,165,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				Persentase Peningkatan jumlah usaha kehutanan yang memiliki sertifikat(%)	2	N/A		2		2		2		2		8		
		5	Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	rasio pemanfaatan sumber daya hutan	86.57	86.60	280.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	86.60	280,000,000	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		6	Peningkatan Produksi Hasil Hutan	persentase peningkatan produksi hasil hutan (%)	n/a	0.1	5.453.670.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.1	5,453,670,000	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		7	Pengelolaan hutan produksi	rasio pemanfaatan	86.57	N/A	N/A	86.62	7.228.000.000	86.64	7,300,000,000	86.65	7,500,000,000	86.66	7,980,000,000	86.66	30,008,000,000	Dinas Lingkungan

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp		Targe t	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
				dan hutan lindung	sumber daya hutan														Hidup dan Kehutanan
		8		Konservasi Dan Perlindungan Hutan	Persentase Penurunan kerusakan hutan (%)	7.18	0.1	2,336,241,100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.1	2,336,241,100	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		9		Pengelolaan Hutan Konservasi	persentase hutan konservasi terkelola(%)	75.21	N/A	N/A -	75.86	742.872.000	76.62	850.000.000	76.97	950.000.000	77.09	1,100,000,000	77.09	3,642,872,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		10		Pengembangan Pembibitan Kehutanan	Produksi bibit tanaman bersertifikat yang ditanam (batang)	315,000	N/A	N/A -	325,000	568.673.000	330,000	750.000.000	340,000	950.000.000	350,000	1.100.000.000	1,665,000	3,368,673,000	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2	5			Energi dan Sumber Daya Mineral															
		1		Program Pengaturan Dan Pengembangan Energi, Air Tanah, Geologi dan Pertambangan	Penduduk Berakses Energi	94,33%	96,51%	30.080.370.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30.080.370.000	Dinas PUP ESDM DIY	
					Penyediaan air bersih di daerah sulit air	67,00 dusun	70,00 dusun		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.710.000.000	Dinas PUP ESDM DIY	
					Rerata penurunan muka air tanah	< 20%	< 20%		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.070.000.000	Dinas PUP ESDM DIY	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
				Peningkatan pengelolaan sumber daya mineral	1,00 izin	8,00 izin		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.395.000.000	Dinas PUP ESDM DIY
				Peningkatan jumlah rumah tangga berlistrik sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan	3.000,00 RT	5.000,00 RT		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		2	Program Penyelenggaraa n Energi dan Ketenagalistrika n	Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik	3.000,00 RT	N/A	N/A	7.848,00 RT	11.872.800.000	9.848,00 RT	11.000.000.000	11.848,00 RT	12.100.000.000	13.848,00 RT	13.310.000.000	13.848,00 RT	48.282.800.000	Dinas PUP ESDM DIY
				Bangunan/ge dung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energi	32,00 unit	N/A	N/A	62,00 unit		72,00 unit	550.000.000	82,00 unit	600.000.000	92,00 unit	650.000.000	92,00 unit	2.300.000.000	Dinas PUP ESDM DIY
				Penambahan izin ketenagalistri	0,00	N/A	N/A	30,00 izin		45,00 izin	1.510.080.000	60,00 izin	1.661.088.000	75,00 izin	1.827.196.800	75,00 izin	6.371.164.800	Dinas PUP ESDM DIY

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp		Targe t	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
					kan sesuai ketentuan														
		3	Program Pengelolaan Air Tanah dan Geologi	Cakupan penyediaan air bersih di daerah sulit air	67 dusun	N/A	N/A	73,00 dusun	15.000.000.000	76,00 dusun	5.699.100.000	79,00 dusun	6.269.010.000	82,00 dusun	6.895.911.000	82,00 dusun	33.864.021.000	Dinas PUP ESDM DIY	
				Rerata penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer	< 20%	N/A	N/A	< 20%		< 20%	3.714.700.000	< 20%	4.086.170.000	< 20%	4.494.787.000	< 20%	15.672.657.000	Dinas PUP ESDM DIY	
				Penambahan jumlah izin air tanah yang sesuai dengan ketentuan	0,00	N/A	N/A	30,00 izin		45,00 izin	1.512.500.000	60,00 izin	1.663.750.000	75,00 izin	1.830.125.000	75,00 izin	6.381.375.000	Dinas PUP ESDM DIY	
		4	Program Pengelolaan Pertambangan	Penambahan jumlah izin usaha pertambangan yang baik dan benar	0,00	N/A	N/A	19,00 izin	2.540.000.000	26,00 izin	1.694.000.000	33,00 izin	1.863.400.000	40,00 izin	2.049.740.000	40,00 izin	8.147.140.000	Dinas PUP ESDM DIY	
				Persentase Pengusahaan Kawasan	7,30%	N/A	N/A	7,50%		7,60%	1.100.000.000	7,70%	1.200.000.000	7,80 %	1.300.000.000	7,80%	4.600.000.000	Dinas PUP ESDM DIY	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp		Targe t	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
				Peruntukan Pertambanga n														
		5	Program Pengawasan Dan Pengendalian Energi, Geologi, Air Tanah Dan Pertambangan	Tertib ijin usaha pertambanga n	0,00	12,00 izin	3.898.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12,00 izin	1.400.000.000 1.250.000.000 1.248.000.000	Dinas PUP ESDM DIY
				Tertib ijin pengusahaan air tanah	0,00	15,00 izin		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15,00 izin		Dinas PUP ESDM DIY
				Tertib ijin ketenagalistri kan	0,00	15,00 izin		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15,00 izin		Dinas PUP ESDM DIY
2	6		Perdagangan															
		1	Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	nilai ekspor perdagangan luar negeri tahun n (Ribu US\$)	296,61	302,54	1.000.000.000	308,59	2,500,000,000	314,76	2,700,000,000	321,06	3,000,000,000	327,48	3,100,000,000	327,48	12,300,000,000	Dinas Perindustria n dan Perdagangan
		2	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah omzet usaha pelaku perdagangan yang dibina (Rp Milyar)	1,35	1,55	1.100.000.000	1,75	10,000,000,000	1,95	20,000,000,000	2,25	250,000,000,000	2,50	2,000,000,000	2,50	58,100,000,000	Dinas Perindustria n dan Perdagangan
		3	Perlindungan dan Pengamanan Konsumen	Persentase jumlah barang jasa yang tidak sesuai dengan standar	5,79	5,69	550.000.000	5,61	750.000.000	5,55	1.000.000.000	5,5	1.000.000.000	5,46	1.000.000.000	5,46	4,300,000,000	Dinas Perindustria n dan Perdagangan
2	7		Perindustrian															

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
		1	Program Administrasi Perkantoran		100%	100%	1.809.285.000	100%	2,500,000,000	100%	2,500,000,000	100%	2,500,000,000	100%	2,600,000,000	100%	11,909,285,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	100%	497,600,000	100%	1,150,000,000	100%	1,150,000,000	100%	1,000,000,000	100%	1,100,000,000	100%	4,897,600,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan		100%	100%	240,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	1,640,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		4	PeningkatanTeknologi Industri	jumlah produk Alat Teknologi Tepat Guna (ATG) yang dimanfaatkan	15	NA	NA	21	950,000,000	24	1,100,000,000	27	1,100,000,000	30	1,200,000,000	30	4,350,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		5	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	jumlah produk Alat Teknologi Tepat Guna (ATG) yang dimanfaatkan	15	18	900,000,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	18	900,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		6	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Nilai Produksi IKM (Rp juta)	12.463.258	NA	NA	12.979.156	3,000,000,000	13.238.739	3,500,000,000	13.503.514	3,500,000,000	13.773.585	3,500,000,000	13.773.585	13,500,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		7	Pembinaan Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Telematika	Nilai Produksi IKM (Rp juta)	NA	2.632.754	300.000.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2.632.754	300,000,000	Dinas Perindustria

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
																		n dan Perdagangan
		8	Pembinaan Industri Agro, Tekstil, Kimia dan Aneka	Nilai Produksi IKM (Rp juta)	NA	10.091.909	2.975.000.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10.091.909	2,975,000,000	Dinas Perindustria n dan Perdagangan
		9	Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah HAKI terdaftar dari IKM atau Sentra yang dibina	80	NA	NA	100	350.000.000	120	400.000.000	150	400.000.000	180	500.000.000	180	1,650,000,000	Dinas Perindustria n dan Perdagangan
2	8		Urusan Transmigrasi															
		1	Program Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	10208 orang	10540 orang	4.358.791.800	10665 orang	4.289.936.000	10790 orang	4.184.874.000	10915 orang	4.504.994.000	11040 orang	4.815.762.000	53950 orang	22,154,357,800	Disnakertrans
3			Urusan Keistimewaan															
	1		Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur															
		1	Program Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur	Terselesaikan nya pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	Sekretariat Daerah

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp		Targe t	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
					tepat pada waktunya														
3	0	2	Kelembagaan Pemerintah Daerah																
		1	Program Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	85,37%	86%	3,832,000,000	N/A	2,900,000,000	N/A	3,100,000,000	N/A	3,300,000,000	N/A	3,500,000,000	N/A	16,632,000,000		Sekretariat Daerah
		2	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan			N/A		86,5%		87%		87,5%		88%		88%			
		3	Program Peningkatan Budaya Pemerintahan	Tingkat Penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY	76,8%	77,2%	N/A	77,6%	800,000,000	78%	925,000,000	78,6%	1,060,000,000	79%	1,200,000,000	79%	3,985,000,000		Sekretariat Daerah
		4	Program Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Persentase capaian program urusan keistimewaa n urusan kelembagaan dan tata cara yang berkualitas	N/A	N/A	N/A	75%	1.000.000.000	80%	1.100.000.000	90%	1.200.000.000	95%	1.500.000.000	95%	4.800.000.000		Sekretariat Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		5	Program Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Persentase capaian program urusan keistimewaa n urusan kebudayaan yang berkualitas	N/A	N/A	N/A	75%	1.300.000.000	80%	1.500.000.000	90%	1.700.000.000	95%	2.000.000.000	95%	6.500.000.000	Sekretariat Daerah
		6	Program Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	Persentase capaian program urusan keistimewaa n urusan pertanahaan dan tata ruang yang berkualitas	N/A	N/A	N/A	75%	1.300.000.000	80%	1.500.000.000	90%	1.700.000.000	95%	2.000.000.000	95%	6.500.000.000	Sekretariat Daerah
		7	Program Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan	Persentase urusan keistimewaa n yang berkualitas	N/A	N/A		100%	2.800.000.000	100%	3.000.000.000	100%	3.250.000.000	100%	3.500.000.000	100%	15.721.412.000	Sekretariat Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
			Kegiatan Keistimewaan	Persentase pencapaian sasaran rencana jangka menengah daerah dengan realisasi tahunan urusan keistimewaa n	N/A	65%	3.171.412.000	67%		69%		72%		75%		75%		Bappeda
		7	Program Penyusunan Kebijakan Urusan Keistimewaan	Presentase Rumusan Bahan Kebijakan yang menjadi Kebijakan	50%	60%	2,603,588,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	60%	2,603,588,000		Sekretariat Daerah
		8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keistimewaan	Kebutuhan Sarpras Keistimewaa n terpenuhi	N/A	60%	1,878,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	60%	1,878,000,000		Sekretariat Daerah
		9	Program Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kelembagaan	Kebutuhan Sarpras Keistimewaa n Urusan Kelembagaan terpenuhi	N/A	N/A	N/A	100%	1,010,000,000	100%	1,056,000,000	100%	1,125,000,000	100%	1,270,000,000	100%	4,461,000,000	Sekretariat Daerah
		10	Program Peningkatan Pelayanan Paramparapraja	Indeks kepuasan layanan kepada Paramparapraja	N/A	70	1,700,000,000	72	1,900,000,000	74	2,100,000,000	76	2,300,000,000	78	2,500,000,000	78	10,500,000,000	Sekretariat Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
		1	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan	Persentase Efektivitas Kelembagaan Pelaksana Keistimewaa n	90%	92%	660.000.000	93%	800,000,000	94%	850,000,000	95%	900,000,000	96%	1,000,000,000	96%	4,210,000,000	Sekretariat Daerah
3	3		Kebudayaan															
		1	Program Sejarah, Bahasa, Sastra dan permuseuman	Jumlah sumber sejarah yang direvitalisasi	11 tema	11	27,715,000,000	11	33,258,000,000	12	39,909,600,000	13	47,891,520,000	15	57,469,824,000	15	206,243,944,000	Dinas Kebudayaan
				Jumlah karya bahasa dan sastra yang dilestarikan	3 karya	3		6		9		12		15				
				Rasio kunjungan museum dibanding kunjungan ke ODTW lain	0,44	0,50		0,55		0,60		0,65		0.70				
		2	Program Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten	Jumlah arsip kraton dan kadipaten yang dilindungi dan dikonservasi	Kraton : 11248 berkas kadipate n : 10557 berkas	2000	2,000,000,000	2000	2,400,000,000	2000	2,880,000,000	2000	3,456,000,000	2000	4,147,200,000	2000	14,883,200,000	Dinas Kebudayaan

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp		Targe t	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
		3	Program Penguatan Museum Sonobudoyo	Indeks Kepuasan Pengunjung Museum Sonobudoyo	N/A	0.500	8,300,000,000	0.600	9,960,000,000	0.700	11,952,000,000	0.800	14,342,400,000	0.900	17,210,880,000	0.900	61,765,280,000	Dinas Kebudayaan	
				Persentase Benda Koleksi Museum (BKM) yang diinventarisasi dan didokumentasi dibanding seluruh koleksi	35,71%	46,83%		57,94%		69,05%		80,16%		91,27%		91,27%			
		4	Program Pelestarian Cagar Budaya Dan Warisan Budaya	persentase cagar budaya dan Warisan Budaya yang dilestarikan	10,23%	11,22%	57,500,000,000	11,22%	44,747,842,000	13,20%	77,531,407,885	14,18%	124,921,102,765	15,17%	145,636,957,031	15,17%	450,337,309,681	Dinas Kebudayaan	
		5	Program Pengelolaan Taman Budaya	Persentase even budaya tingkat Provinsi, nasional, internasional yang diselenggarakan di Taman Budaya	2.79%	5.29%	80,000,000,000	5.79%	190,000,000,000	7.79%	228,000,000,000	10.29%	120,000,000,000	12.79%	144,000,000,000	12.79%	762,000,000,000	Dinas Kebudayaan	
				jumlah Taman Budaya di Kab/Kota	1	1		1	1	2	2	2							

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		6	Program Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	Jumlah program dan kegiatan yang terlaksana disbanding jumlah seluruh program dan kegiatan	99,08 %	99,08 %	5.400.000.000	99,08 %	6.480.000.000	99,08 %	7.776.000.000	99,08 %	9.331.200.000	100%	11.197.440.000	100%	40.184.640.000	Dinas Kebudayaan
				Jumlah kerjasama yang direalisasikan dalam tahun n	15	15		20		25		30		35		35		
		7	Program Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana	6	10	10.100.000.000	15	12.120.000.000	20	14.544.000.000	25	17.452.800.000	30	20.943.360.000	30	75.160.160.000	Dinas Kebudayaan
		8	Program Pengembangan Kearifan lokal dan potensi Budaya	persentase peningkatan potensi kearifan lokal dan budaya daerah yang berdaya saing	0.05	0.06	22,330,000,000	0.08	26,796,000,000	0.10	32,155,200,000	0.13	38,586,240,000	0.15	46,303,488,000	0.15%	166,170,928,000	Dinas Kebudayaan
		9	Program Pendidikan Berbasis Budaya	persentase sekolah yang menerapkan pendidikan berkarakter	40%	42%	23,300,000,000	43.39%	27,960,000,000	45.07%	33,552,000,000	46.74%	40,262,400,000	48.42 %	48,314,880,000	48.42 %	173,389,280,000	Dinas Kebudayaan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp		Targe t	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
		10	Program Pembinaan Dan Pengembangan Adat Dan Seni	persentase nilai adat , tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi	25.33%	26.21%	100,188,000,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	26.21 %	100,188,000,000	Dinas Kebudayaan
		11	Program Pelestarian Tradisi Dan Lembaga Budaya	Persentase lembaga adat dan pelestari budaya yang maju	1.75%	1.81%	69,800,000,000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1.81%	69,800,000,000	Dinas Kebudayaan
				Jumlah Kelompok Jagawarga terbina dan mampu menjalankan fungsinya	113	310		NA		NA		NA		NA		310		
				Jumlah desa mandiri budaya tahun n	N/A	N/A		NA		NA		NA		NA		NA		
		12	Program Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	persentase nilai adat , tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi	25.33%	NA	NA	27.35%	120,225,600,000	28.49%	144,270,720,000	29.67%	198,124,864,000	30.86 %	207,749,836,800	30.86 %	670,371,020,800	Dinas Kebudayaan
				Persentase lembaga adat dan pelestari budaya yang maju	1.75%	NA	NA	1.87%	83,760,000,000	1.93%	100,512,000,000	2.00%	140,614,400,000	2.06 %	144,737,280,000	2.06%	469,623,680,000	
				Jumlah Kelompok Jagawarga	113	NA	NA	330 klp.		350 klp.		390 klp.		400 klp.		400 klp.		

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp		Targe t	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
					terbina dan mampu menjalankan fungsinya														
					Jumlah desa mandiri budaya tahun n	N/A	NA	NA	5 desa		10 desa		15 desa		20 desa		20 desa		
3	4		Pertanahan																
		1	Program Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN	5348 bidang	7898 bidang	17,067,866,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas PTR
				Bidang Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN	N/A	N/A	N/A	9419 bidang	18,000,000,000	11419 bidang	19,000,000,000	12619 bidang	20,000,000,000	13877 bidang	21,000,000,000	13877 bidang	95,067,866,000		Dinas PTR
				Dokumen tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang dipelihara	N/A	N/A	N/A	23 dokumen	1,000,000,000	37 dokumen	1,000,000,000	52 dokumen	1,000,000,000	66 dokumen	1,000,000,000	66 dokumen	4,000,000,000		Dinas PTR
				penurunan ketidaksesuaian penggunaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	N/A	N/A	N/A	60 bidang	1,000,000,000	55 bidang	1,000,000,000	50 bidang	1,000,000,000	40 bidang	1,000,000,000	40 bidang	4,000,000,000		Dinas PTR

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp		Targe t	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
		2	Program Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Peningkatan pemanfaatan tanah desa	0.00%	5.10 %	4,405,270,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas PTR
				Bidang tanah desa yang didaftarkan di BPN	N/A	N/A	N/A	0 bidang	0	2000 bidang	5,000,000,000	5000 bidang	10,000,000,000	8000 bidan g	15,000,000,000	8000 bidan g	34,405,270,000	Dinas PTR	
				persentase desa yang sudah mempunyai perdes pemanfaatan tanah desa	N/A	N/A	N/A	5.10 %	500.000.000	10.20 %	1,500.000.000	15.31 %	2.500.000.000	20.41 %	3.500.000.000	20.41 %	8,000,000,000	Dinas PTR	
				Persentase pengajuan permohonan serat kekancingan yang ditindaklanju t	N/A	N/A	N/A	100 %	500,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	2,000,000,000	Dinas PTR	
		3	Program Perencanaan dan Pengendalian Urusan Pertanahan	persentase realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan pertanahan	100 %	100 %	1,367,252,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	1,367,252,000	Dinas PTR	
		4	Program Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Pertanahan	persentase pelayanan sarana prasarana keistimewaa n terhadap pelaksanaan	0 %	100 %	200.000.000	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	100 %	2.200.000.000	Dinas PTR	

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp		Targe t	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
				kegiatan keistimewaa n urusan pertanahan															
3	5		Tata Ruang																
		1	Program Perencanaan Tata Ruang satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	14.33%	17.78%	6,650,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17.78 %	6,650,000,000		Dinas PTR	
				persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	N/A	N/A	N/A	22.78 %	6.500.000.000	32.22 %	7,000,000,000	40 %	7,500,000,000	46.11 %	8,000,000,000	46.11 %	29,000,000,000		Dinas PTR
		2	Program Pemanfaatan Ruang satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	Persentase perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	21.11%	29.44%	548,031,612,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		Dinas PTR

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Persentase perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	N/A	N/A	N/A	15.83 %	574,757,958,000	17.5 %	584,877,564,515	18.61 %	834,969,224,235	21.67 %	1,031,805,970,969	21.67 %	3,574,442,329,719	Dinas PTR
		3	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang satuan ruang strategis	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	5.56%	7.78%	300,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas PTR
				Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	N/A	N/A	N/A	60 %	700,000,000	62.5 %	900,000,000	65 %	1,000,000,000	70 %	1,500,000,000	70 %	4,400,000,000	Dinas PTR
		4	Program Perencanaan dan Pengendalian Urusan Tata Ruang	Persentase Realisasi Pelaksanaan Program kegiatan Urusan Tata Ruang	100 %	100 %	700.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	700.000.000	Dinas PTR

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
		5	Program Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	persentase pelayanan sarana prasarana keistimewaa n terhadap pelaksanaan kegiatan keistimewaa n urusan tata ruang	0 %	100 %	800.000.000	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	100 %	2.800.000.000	Dinas PTR
4			Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan															
	1		Sekretariat Daerah															
		1	Program Administrasi Perkantoran			100%	1.078.973.000	100%	871.520.000	100%	844.080.000	100%	926.470.000	100%	985.087.000	100%	4,706,130,000	Sekretariat Daerah
		2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan			100%	41.000.000	100%	35.000.000	100%	40.285.000	100%	25.520.000	100%	32.675.000	100%	174,480,000	Sekretariat Daerah
		3	Program Administrasi Perkantoran			100%	724,335,000	100%	564.112.098	100%	550.320.035,27	100%	592.433.234,33	100%	633.329.927,55	100%	3,064,530,295.15	Biro Tapem
		4	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur			100%	416,241,500	100%	324.168.880,20	100%	316.243.225,80	100%	340.443.715,04	100%	363.945.134,30	100%	1,761,042,455.33	Biro Tapem
		5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem			100%	114,625,000	100%	89.269.950	100%	87.087.375,38	100%	93.751.730,19	100%	100.223.574,90	100%	484,957,630.47	Biro Tapem

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp		Targe t	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
			Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan																
		6	Program Pembinaan Otonomi Daerah dan Kerjasama	Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah dan kerjasama	100%	N/A	N/A	100%	927.480.000	100%	891.618.000	100%	977.055.000	100%	1.045.100.000	100%	3,841,253,000	Biro Tata Pemerintahan	
			Program Pengembangan Kerjasama dan Otonomi Daerah	Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah dan kerjasama	100%	100%	1.330.977.900	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,330,977,900		
		7	Program Pembinaan Penyelenggaraa n Pemerintahan Desa/Kelurahan, dan Kecamatan	Persentase desa tertinggal yang memiliki pengelolaan keuangan yang baik	N/A	N/A	N/A	33.33%	693.840.000	56.25%	678.132.000	79.17%	728.182.500	100%	782.332.000	100%	2,882,486,500	Biro Tata Pemerintahan	
		8	Program Pembinaan Pemerintahan Umum dan Penataan Wilayah	Persentase rumusan bahan kebijakan pemerintaha n umum dan penataan wilayah	N/A	N/A	N/A	100%	619.500.000	100%	784.875.000	100%	522.325.000	100%	582.270.000	100%	2,508,970,000	Biro Tata Pemerintahan	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Program Pemerintahan Umum dan Pembinaan Wilayah	Persentase rumusan bahan kebijakan pemerintahan umum dan penataan wilayah	100%	100%	567.514.600	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	567,514,600		
		9	Program Administrasi Perkantoran		100%	100%	564,480,000	100%	439.617.024	100%	428.868.760,32	100%	461.687.909,76	100%	493.559.026,33	100%	2,388,212,720.41	Biro Hukum
		10	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		100%	100%	405,934,000	100%	316.141.399,20	100%	308.412.009,91	100%	332.013.215,63	100%	354.932.663,09	100%	1,717,433,287.83	Biro Hukum
		11	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		100%	100%	57,054,000	100%	44.433.655,20	100%	43.347.289,99	100%	46.664.438,07	100%	49.885.764,87	100%	241,385,148.13	Biro Hukum
		12	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rancangan Produk Hukum yang Berkualitas	100%	100%	1.150.000.000	100%	943.898.520	100%	920.815.350	100%	984.429.000	100%	1.060.313.670	100%	5,059,456,540	Biro Hukum
		13	Program Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota	Persentase Kewenangan, Substansi Materi, dan Legal Drafting Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Telah Sesuai dengan Pedoman	100%	100%	650.000.000	100%	396.621.600	100%	384.274.800	100%	396.659.750	100%	418.040.000	100%	2,245,596,150	Biro Hukum

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp		Targe t	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
				Penyusunan Produk Hukum Daerah														
		14	Program Dokumentasi Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah yang Terpublikasikan	100%	100%	600.000.000	100%	474.607.800	100%	464.646.000	100%	482.382.500	100%	483.732.000	100%	2,505,368,300	Biro Hukum
		15	Program Bantuan dan layanan Hukum	Persentase bantuan dan Layanan hukum	100%	100%	2.072.532.000	100%	1.731.060.000	100%	1.563.471.000	100%	1.543.624.000	100%	1.515.693.600	100%	8,426,380,600	Biro Hukum
		16	Program Administrasi Perkantoran		100%	100%	704,436,000	100%	548.614.756,80	100%	535.201.590,92	100%	576.157.852,18	100%	615.931.027,51	100%	2,980,341,227.41	Biro Organisasi
		17	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		100%	100%	142,735,000	100%	111.162.018	100%	108.444.200,87	100%	116.742.885,13	100%	124.801.849,12	100%	603,885,953.12	Biro Organisasi
		18	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		100%	100%	125,095,000	100%	97.423.986	100%	95.042.052,11	100%	102.315.137,95	100%	109.378.129,55	100%	529,254,305.61	Biro Organisasi

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
		19	Program Peningkatan Penyelenggaraa n Reformasi Birokrasi	Persentase jumlah OPD yang telah melaksanaka n reformasi birokrasi dengan baik. Catatan : indikator baik adalah minimal melaksanaka n 5 area perubahan reformasi birokrasi	N/A	N/A	N/A	75%	693.840.000	76%	678.132.000	78%	725.110.000	80%	776.360.000	80%	2,873,442,000	Biro Organisasi
		20	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pengembangan Standarisasi	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik sesuai Kriteria Nasional	N/A	N/A	1.233.518.000	1	1.302.720.000	1	1.271.497.500	1	1.351.900.000	1	1.403.420.000	1	6,563,055,500	Biro Organisasi
		21	Program Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	5.279.929.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	5,279,929,000	Biro Umum dan Protokol
					N/A	N/A		100%	4.450.690.000	100%	4.188.780.000	100%	3.979.750.000	100%	5.985.450.000	100%	18,604,670,000	Biro Umum, Humas dan Protokol
		22	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	2.745.663.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	2,745,663,000	Biro Umum dan Protokol
					N/A	N/A		100%	2.256.000.000	100%	2.178.050.000	100%	2.145.620.000	100%	1.840.000.000	100%	8,419,670,000	Biro Umum, Humas dan Protokol
		23	Program Peningkatan	Persentase peningkatan	100%	100%	72.860.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	72,860,000	Biro Umum dan Protokol

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
			Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	pengembang an sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	N/A	N/A		100%	54.060.000	100%	53.700.000	100%	52.500.000	100%	53.200.000	100%	213,460,000	Biro Umum, Humas dan Protokol
		24	Program Pelayanan Kerumahtangga an	Skor dari Indeks Kepuasan Pelayanan Kerumahtang gaan terhadap Pimpinan dan Tamu	81	81	2.856.550.500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	81	2,856,550,500	Biro Umum dan Protokol	
					N/A	N/A		82	2.575.000.000	83	2.896.800.000	84	2.945.840.000	85	2.435.000.000	85	10,852,640,000	Biro Umum, Humas dan Protokol
		25	Program Peningkatan Layanan Informasi Dan Persandian	Kecepatan Informasi sandi kepada pimpinan dan informasi persuratan di lingkungan Pemda DIY	95	95	483.159.500	100	224.520.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	707,679,500	Biro Umum dan Protokol	
		26	Program Pelayanan Keprotokolan	Skor dari Indeks Kepuasan Pelayanan Protokol terhadap Pimpinan dan Tamu	N/A	81	2,575,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	81	2,575,000,000	Biro Umum dan Protokol	
					N/A	N/A	N/A	82	1.724.900.000	83	1.569.720.000	84	2.010.970.000	85	1.875.500.000	85	7,181,090,000	Biro Umum, Humas dan Protokol
		27	Program Pengelolaan Hubungan Masyarakat	peningkatan jumlah pengakses informasi pemda	265,402	270,710	2.242.988.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	270,710	2,242,988,000	Biro Umum dan Protokol	
					N/A	N/A		276,936	1.405.700.000	283,860	1.420.000.000	295,214	2.028.040.000	309,975	2.033.470.000	309,975	6,887,210,000	Biro Umum, Humas dan Protokol

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
		28	Program Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1.870.569.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	1,870,569,000	Kantor Perwakilan Daerah	
					N/A	N/A	N/A	100%	1.730.053.000	100%	1.605.000.000	100%	1.985.640.000	100%	1.948.975.000	100%	7,269,668,000	Badan Penghubung Daerah
		29	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	481.985.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	481,985,000	Kantor Perwakilan Daerah	
					N/A	N/A	N/A	100%	580.000.000	100%	419.350.000	100%	485.000.000	100%	635.210.000	100%	2,119,560,000	Badan Penghubung Daerah
		30	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	130.025.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	130,025,000	Kantor Perwakilan Daerah	
					N/A	N/A	N/A	100%	73.100.000	100%	62.300.000	100%	63.540.000	100%	67.500.000	100%	266,440,000	Badan Penghubung Daerah
		31	Program Peningkatan Fasilitas Layanan Kantor Perwakilan daerah	Keinginan untuk mendapatkan pelayanan kembali di Kaperda	N/A	84%	526.832.000	n/a	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	84%	526,832,000	Kantor Perwakilan Daerah	
		32	Program Peningkatan Kualitas Layanan Tamu Kantor Perwakilan Daerah	Peningkatan Kualitas Layanan Tamu Kantor Perwakilan Daerah	N/A	N/A	N/A	85%	580.000.000	86%	650.500.000	87%	630.500.000	88%	568.450.000	88%	2,429,450,000	Badan Penghubung Daerah
		33	Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah dan Seni Budaya Daerah	Presentase peningkatan kualitas pelaksanaan promosi potensi dan budaya daerah	N/A	70	900.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70	900,000,000	Kantor Perwakilan Daerah	
					N/A	78		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	78		Kantor Perwakilan Daerah	

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp		Targe t	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
		34	Program Peningkatan Kualitas Layanan Promosi Potensi dan Seni Budaya	peningkatan kualitas layanan promosi potensi dan seni budaya	N/A	N/A	N/A	85	810.100.000	86	886.500.000	87	702.830.000	88	838.450.000	88	3,237,880,000	Badan Penghubung Daerah	
					N/A	N/A	N/A	86	50.000.000	87	45.500.000	88	47.000.000	89	51.800.000	89	194,300,000		
		35	Program Administrasi Perkantoran		100%	100%	880.300.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	880.300.000	Kantor PPTSP		
		36	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		100%	100%	570.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	570.000.000	Kantor PPTSP		
		37	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		100%	100%	76.400.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	76.400.000	Kantor PPTSP		
		38	Pelayanan Perijinan	Presentase Waktu Penyelesaian Layanan Perizinan terhadap SOP	93%	94%	2,725,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	94%	2,725,000,000	Kantor PPTSP		

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp		Targe t	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
		39	Program Administrasi Perkantoran		100%	100%	248,669,000	100%	400,000,000	100%	400,000,000	100%	258,000,000	100%	278,000,000	100%	1.584.669.000	Biro Administrasi Perekonomi an dan SDA	
		40	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	100%	96,670,000	100%	200,000,000	100%	400,000,000	100%	433,000,000	100%	450,000,000	100%	1.579.670.000	Biro Administrasi Perekonomi an dan SDA	
		41	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan		100%	100%	37,500,000	100%	40,000,000	100%	41,000,000	100%	42,000,000	100%	43,000,000	100%	203.500.000	Biro Administrasi Perekonomi an dan SDA	
		42	Pengelolaan Kebijakan Stabilitas Perekonomian Daerah	Rumusan kebijakan stabilitas perekonomia n daerah yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan (%)	n.a	25	350,000,000	40	600,000,000	40	610,000,000	40	620,000,000	40	650,000,000	40	2.830.000.000	Biro Administrasi Perekonomi an dan SDA	

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp		Targe t	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
		43	Pengelolaan Kebijakan Rekayasa Pertumbuhan Perekonomian berkeadilan	Rumusan kebijakan rekayasa pertumbuhan perekonomian berkeadilan yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan (%)	n.a	25	1,350,000,000	30	1,500,000,000	30	1,500,000,000	30	2,106,000,000	30	1,182,000,000	30	7,638,000,000	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA	
		44	Pengelolaan Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Perekonomian	Rumusan kebijakan perlindungan sumberdaya perekonomian yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan (%)	n.a	25	200,000,000	30	300,000,000	30	310,000,000	30	320,000,000	30	330,000,000	30	1,460,000,000	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
		45	Program Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	222.849.500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	222.849.500	Biro Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat
		46	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	166,634,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	166,634,000	Biro Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat
		47	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pelaporan Keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	59.499.600	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	59.499.600	Biro Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat
		48	Program Pengelolaan Kebijakan Sumberdaya Manusia	Rumusan bahan kebijakan sumber daya manusia	1 dokumen	1 dok	539.010.500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dok	539.010.500	Biro Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat
		49	Program Pengelolaan Kebijakan Penguatan Kelembagaan Sumberdaya Manusia	Rumusan Bahan Kebijakan Penguatan kelembagaan Sumber Daya Manusia	1 dokumen	1 dok	98.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dok	98.000.000	Biro Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp		Targe t	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
		50	Program Pengelolaan Kebijakan Perlindungan Sumberdaya Daerah	Terlayannya Lembaga Keagamaan 5 agama	4 layanan	4 layanan	7,508,966,500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4 layana n	7,508,966,500	Biro Administrasi dan Kesejahteraa n Rakyat	
		51	Program Pengelolaan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Masyarakat	Rumusan Bahan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Masyarakat	1 dok.	1 dok	150,473,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dok	150,473,000	Biro Administrasi dan Kesejahteraa n Rakyat	
		52	Program Pengelolaan Kebijakan Rekayasa Sosial Masyarakat	Rumusan Bahan Kebijakan Rekayasa Sosial Masyarakat Yang Ditindaklanju ti	1 dokume n	1 dok	448.757.500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dok	448.757.500	Biro Administrasi dan Kesejahteraa n Rakyat	
		53	Program Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	N/A	N/A	N/A	100%	164.307.000	100%	160.283.000	100%	172.544.000	100%	184.446.000	100%	681.580.000	Biro Bina Mental Spiritual	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
		54	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	N/A	N/A	N/A	100%	332.876.000	100%	324.724.000	100%	349.563.000	100%	373.677.000	100%	1.380.840.000	Biro Bina Mental Spiritual
		55	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pelaporan Keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	N/A	N/A	N/A	100%	39.668.000	100%	38.697.000	100%	41.657.000	100%	44.530.000	100%	164.552.000	Biro Bina Mental Spiritual
		56	Program Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Pembinaan Sarana Keagamaan	Rumusan Bahan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	N/A	2 dok	9.740.428.000	2 dok	9.501.882.000	2 dok	10.228.723.000	2 dok	10.934.332.000	8 dok	40.405.365.000	Biro Bina Mental Spiritual
				Terlayannya lembaga keagamaan 5 agama	4 lembaga	4 lembaga		4 lembaga	5.965.947.000	4 lembaga	5.819.839.000	4 lembaga	6.265.025.000	4 lembaga	6.697.205.000	4 lembaga	24.748.016.000	Biro Bina Mental Spiritual
		57	Program Pengelolaan dan Penguatan Kebijakan	Rumusan Bahan Kebijakan Kesehatan Masyarakat	N/A	N/A	N/A	2 dok	312.248.000	2 dok	304.601.000	2 dok	327.901.000	2 dok	350.521.000	8 dok	1.295.271.000	Biro Bina Mental Spiritual

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
			Kesehatan Masyarakat	yang ditindaklanju ti														
		58	Program Pengelolaan dan Penguatan Kebijakan Sumber Daya Manusia	Rumusan Bahan Kebijakan Sumber Daya Manusia yang ditindaklanju ti	N/A	N/A	N/A	2 dok	194.712.000	2 dok	189.944.000	2 dok	204.473.000	2 dok	218.579.000	8 dok	807.708.000	Biro Bina Mental Spiritual
			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
		1	Program Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	N/A	N/A	N/A	100%	164.306.000	100%	160.282.000	100%	172.543.000	100%	184.446.000	100%	681.577.000	Biro Bina Pemberdaya an Masyarakat
		2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	N/A	N/A	N/A	100%	332.876.000	100%	324.723.000	100%	349.563.000	100%	373.677.000	100%	1.380.839.000	Biro Bina Pemberdaya an Masyarakat
		3	Program Peningkatan Pengembangan	Persentase peningkatan pengembang	N/A	N/A	N/A	100%	39.668.000	100%	38.696.000	100%	41.656.000	100%	44.530.000	100%	164.550.000	Biro Bina Pemberdaya

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
			Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pelaporan Keuangan	an sistem laporan capaian kinerja dan keuangan														an Masyarakat
		4	Program Pengelolaan Rekayasa Sosial Masyarakat	Desa/kelurahan model gerakan gotong royong	N/A	N/A	N/A	8 (desa/kelurahan) 700.760.000	8 (desa/kelurahan) 683.598.000	8 (desa/kelurahan) 735.889.000	8 (desa/kelurahan) 786.653.000	8 (desa/kelurahan) 2.906.900.000						Biro Bina Pembedayaan Masyarakat
		5	Program Perumusan Kebijakan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Masyarakat	Rumusan Bahan Pengelolaan kebijakan penguatan sumber daya masyarakat yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	N/A	4 dokumen 1.044.366.000	4 dokumen 1.018.790.000	4 dokumen 1.096.721.000	4 dokumen 1.172.377.000	16 dokumen 4.332.254.000						Biro Bina Pembedayaan Masyarakat
		6	Program Pengelolaan dan Penguatan Kelembagaan Sumber Daya Masyarakat	Jumlah pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan	N/A	N/A	N/A	4 kegiatan 1.419.353.000	4 kegiatan 1.384.593.000	4 kegiatan 1.490.506.000	4 kegiatan 1.593.326.000	4 kegiatan 5.887.778.000						Biro Bina Pembedayaan Masyarakat
		7	Program Administrasi Perkantoran		100%	100%	535,916,100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	535,916,100				Biro Adpem
					N/A		100%	577.252.000	100%	610.875.000	100%	773,138,675	100%	869,782,000	100%	2.831.047.675		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp		Targe t	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
																		Pengembang an Wilayah
		8	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		100%	100%	230,000,000	N/A		N/A		N/A		N/A		100%	230,000,000	Biro Adpem
						N/A		100%	247.220.000	100%	258.750.000	100%	327.480.470	100%	368,451,530	100%	1.201.902.000	Biro Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
		9	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		100%	100%	128,000,000	N/A		N/A		N/A		N/A		100%	128,000,000	Biro Adpem
						N/A		100%	132,000,000	100%	144,000,000	100%	182,250,000	100%	205,031,250	100%	663,281,250	Biro Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
		10	Program Pengelolaan kebijakan pembiayaan pembangunan non pemerintah	Persentase rumusan bahan kebijakan pembiayaan pembangunan non pemerintah yang ditindaklanjuti	na	50%	200.00.000	N/A		N/A		N/A		N/A		50%	200,000,000	Biro Adpem
						N/A		55%	600,000,000	60%	600,000,000	65%	864,000,000	70%	1.036.800.000	70%	3,100,800,000	Biro Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
		1	Program Pengelolaan Kebijakan Infrastruktur Daerah	ersentase rumusan bahan kebijakan infrastruktur daerah yang ditindaklanju ti	na	50%	205,907,000	N/A		N/A		N/A		N/A		50%	205,907,000	Biro Adpem
						N/A		65%	550,000,000	65%	550,000,000	80%	750,000,000	80%	800,000,000	80%	2,650,000,000	Biro Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
		1	Program Pengelolaan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	Persentase rumusan bahan kebijakan pembanguna n berkelanjutan n yang ditindaklanju ti	na	50%	200,000,000	N/A		N/A		N/A		N/A		50%	200,000,000	Biro Adpem
						N/A		65%	500,000,000	65%	500,000,000	80%	650,000,000	80%	700,000,000	80%	2,350,000,000	Biro Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
		1	Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Persentase rumusan bahan kebijakan penelitian dan pengembang an yang ditindaklanju ti	50%	50%	300,000,000	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	50%	300,000,000	Biro Adpem

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
		14	Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang terselesaikan	100	100	2.724.890.000	N/A		N/A		N/A		N/A		100%	2.724.890.000	Biro Adpem
						N/A		100%	2,600,000,000	100%	2.850,000,000	100%	3,100,000,000	100%	3,500,000,000	100%	12,050,000,000	Biro Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
		15	Program Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	180.951.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	180.951.000	Sekretariat Parampara Praja
		16	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	91.450.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	91.450.000	Sekretariat Parampara Praja
		17	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	33.187.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	33.187.000	Sekretariat Parampara Praja
		18	Program Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan	100%	100%	215,220,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	215,220,000	Asisten Keistimewaa n

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				administrasi perkantoran														
		19	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	51,100,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	51,100,000	Asisten Keistimewaa n	
		20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase peningkatan pengembang an sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	40,800,000	n/a	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	40,800,000	Asisten Keistimewaa n	
		21	Program Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	N/A	N/A	100%	986.693.000	100%	972.800.000	100%	1.077.460.000	100%	1.629.789.000	100%	4.666.742.000	Pani Radyo Kaistimewan
		22	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	N/A	N/A	100%	331.500.000	100%	506.250.000	100%	713.670.000	100%	875.450.000	100%	2.426.870.000	Pani Radyo Kaistimewan
		23	Program Peningkatan Pengembangan Sistem	Persentase peningkatan pengembang an sistem	100%	N/A	N/A	100%	35.000.000	100%	37.500.000	100%	54.000.000	100%	65.500.000	100%	192.000.000	Pani Radyo Kaistimewan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp		Targe t	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
			Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	laporan capaian kinerja dan keuangan														
5	2		Sekretariat DPRD															
		1	Program Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	4.005.684.000	100%	3.418.750.000	100%	3.530.975.000	100%	4.395.075.000	100%	3.604.560.000	100%	18.955.044.000	Sekretariat DPRD
		2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	2.652.250.000	100%	1.939.500.000	100%	2.614.860.000	100%	3.750.004.000	100%	1.324.300.000	100%	12.280.914.000	Sekretariat DPRD
		3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		N/A	N/A	N/A	100%	160.500.000	100%	185.000.000	100%	194.000.000	100%	283.250.000	100%	822.750.000	Sekretariat DPRD

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp		Targe t	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
		4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	280.240.000	100%	119.580.000	121.280.000	100%	137.500.000	100%	128.000.000	100%	786.600.000	Sekretariat DPRD		
		5	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Presentase Bahan Acara yang selesai dengan Fasilitasi Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan agenda Program Kerja DPRD DIY	95%	95%	29.823.453.500	95%	25.415.230.000	34.257.500.000	95%	40.034.000.000	95%	26.350.000.000	95%	155.880.183.500	Sekretariat DPRD		
		6	Program Pengembangan Regulasi Daerah	Persentase Produk Hukum Daerah dan DPRD yang diselesaikan Tepat Waktu	96%	96%	7.802.699.000	97%	8.765.100.000	10.553.280.000	98%	12.255.450.000	98%	12.854.000.000	98%	52.230.529.000	Sekretariat DPRD		
		7	Program Pelayanan Kerumahtangga n	Indeks Hasil Survey Kepuasan Layanan	N/A	96%	3.867.600.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	96%	3.867.600.000	Sekretariat DPRD		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
				Kerumahtanggaan														
		8	Program Peningkatan Kehumasan dan Keprotokolan	Persentase layanan aspirasi masyarakat, aksesibilitas informasi publik dan keprotokolern.	70%	75%	14.999.750.500	80%	13.126.000.000	85%	21.856.000.000	87%	20.579.000.000	90%	13.572.625.000	90%	84.133.375.500	Sekretariat DPRD
4	3		Inspektorat															
		1	Program Administrasi Perkantoran		100%	100%	1,508,131,000	100%	1.174.532.422	100%	1.145.816.100	100%	1.233.499.590	100%	1.318.650.2053	100%	6.380.629.319	Inspektorat
		2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		100%	100%	1,047,295,000	100%	815.633.346	100%	795.691.801	100%	856.582.056	100%	915.713.401	100%	4.430.915.605	Inspektorat
		3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		100%	100%	91,505,000	100%	71.264.094	100%	69.521.747	100%	74.841.893	100%	80.008.359	100%	387.141.094	Inspektorat

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp		Targe t	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
		4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		100%	100%	38.435.000	100%	71.264.094	100%	69.521.747	100%	74.841.893	100%	80.008.359	100%	334.071.094	Inspektorat	
		5	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pemerintahan	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintaha n	75%	N/A	N/A	82	4.140.046.992	85	3.708.376.772	88	3.665.528.755	90	3.597.993.181	90	15.111.945.701	Inspektorat	
				Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya	75%	N/A	N/A	82	5,847,524,000	85	5,905,999,000	88	5,965,059,000	90	6,024,770,900	90	29,532,979,900	Inspektorat	
				Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomia n	75	N/A	N/A	82	5,847,524,000	85	5,905,999,000	88	5,965,059,000	90	6,024,770,900	90	29,532,979,900	Inspektorat	
				Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	75	N/A	N/A	82	5,847,524,000	85	5,905,999,000	88	5,965,059,000	90	6,024,770,900	90	29,532,979,900	Inspektorat	
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan	Persentase Kinerja Perangkat Daerah	75%	80	5.506.522.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.506.522.000			

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp		Targe t	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pemerintah an															
				Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya	75%	80			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
				Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomia n	75	80			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
				Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	75	80			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
4	4		Perencanaan																
		1	Program Administrasi Perkantoran		100%	100%	2.118.913.500	100%	2.281.806.000	100%	2,527,193,778	100%	2,592,968,566	100%	2,749,552,446	100%	12.270.434.290	Bappeda	
		2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		100%	100%	931.092.350	100%	1.228.115.500	100%	912,546,000	100%	943,366,000	100%	974,187,000	100%	4.989.306.850	Bappeda	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp		Targe t	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
		3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		100%	100%	568.689.425	100%	500.000.000	100%	634,049,485	100%	670,282,157	100%	731,760,473	100%	3.104.781.540	Bappeda
		4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase perencanaan yang berkualitas	100.00	100.00	2.927.406.000	100.00	2.113.389.000	100.00	2,450,000,000	100.00	2,700,000,000	100.00	3,250,000,000	100.00	13.440.795.000	Bappeda
				Persentase perencanaan yang tepat waktu sesuai peraturan perundangan yang berlaku	100.00	100.00		100.00	100.00			100.00		100.00		100.00		
		5	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase ketercapaian program pembanguna n Bidang Sosial Budaya	89.35	89.74	1,643,452,500	89.87	1.375.000.000	91.14	1,550,000,000	92.41	1,850,000,000	93.67	2,200,000,000	93.67	8.618.452.500	Bappeda
		6	Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian	Persentase ketercapaian program pembanguna n Bidang Perekonomia n	81.30	83.72	825,964,000	84,78	750.760.400	86,96	950.000.000	89,13	1,109,858,000	91,30	1,270,843,000	91,30	4.907.425.400	Bappeda

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp		Targe t	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
		7	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Persentase ketercapaian program pembanguna n Bidang Pemerintaha n	88.72	90.14	938,105,000	90.50	710.015.500	91.00	1.135.107.050	91.55	1,248,617,755	92,96	1,373,479,531	92,96	5.405.324.836	Bappeda	
		8	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana	Persentase ketercapaian program pembanguna n Bidang Sarana Prasarana	76.42	77.14	1,405,493,725	80.00	856.030.235	82.86	1.250.000.000	85.71	1.500.000.000	88.57	1.750.000.000	88.57	6.761.523.960	Bappeda	
		9	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase capaian kegiatan SKPD	87.00	88.00	2.196.608.000	89.00	1.859.000.000	90.00	2.200.000.000	91.00	2,450,000,000	92.00	2,695,000,000	92.00	11.400.608.000	Bappeda	
				Persentase Evaluasi hasil dokumen perencanaan tepat waktu sesuai regulasi yang berlaku	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00			
5	5		Keuangan																

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp		Targe t	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
		1	Program Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	9.034.360.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	9.034.360.000	DPPKA	
					N/A	N/A	N/A	100%	9.828.400.000	100%	9.156.950.000	100%	10.674.740.000	100%	10.654.125.000	100%	40.314.215.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
		2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	18.864.975.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	18.864.975.000	DPPKA	
					N/A	N/A	N/A	100%	9.853.500.000	100%	8.125.450.000	100%	9.290.200.000	100%	9.785.500.000	100%	37.054.650.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
		3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	342,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	342,000,000	DPPKA	
					N/A	N/A	N/A	100%	150.670.000	100%	247.770.000	100%	248.250.000	100%	355.030.000	100%	1.001.720.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
		4	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Persentase kontribusi pendapatan pajak, retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, PAD lain	N/A	51.38	3,135,563,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	51.38	3,135,563,000	DPPKA	
					N/A	N/A	N/A	53.99	3.989.660.000	56.06	3.952.500.000	58.08	4.385.500.000	60.06	3.365.050.000	60.06	15.692.710.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
				yang sah terhadap pendapatan.														
		5	Program Penganggaran Belanja Daerah	1. Ketepatan dalam Penyusunan RAPBD dan RPAPBD	N/A	100	3,301,283,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	3.301.283.000	DPPKA	
				2. Kesesuaian program dan kegiatan antara KUA PPAS dan APBD.	N/A	100		N/A	N/A		N/A		N/A		100			
		6	Program Perencanaan Penganggaran Belanja Daerah	1. Ketepatan dalam Penyusunan RAPBD dan RPAPBD	N/A	100	N/A	100	2.864.520.000	100	3.787.050.000	100	3.240.600.000	100	3.985.050.000	100	13.877.220.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
				2. Kesesuaian program dan kegiatan antara KUA PPAS dan APBD.	N/A	100	N/A	100		100		100		100		100		
		7	Program Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penyampaian dan kelengkapan laporan	N/A	100	2,119,050,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	2,119,050,000	DPPKA	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t		Rp
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
				keuangan pemerintah daerah serta raperda pertanggungj awaban APBD	N/A	N/A	N/A	100	2.173.000.000	100	2.152.450.000	100	2.374.000.000	100	2.850.000.000	100	9.549.450.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
		8	Program Penatausahaan Keuangan Daerah	Keakuratan dalam penatausaha an keuangan Daerah	N/A	100	812,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	812,000,000	DPPKA	
				N/A	N/A	N/A	100	847.850.000	100	797.850.000	100	921.030.000	100	995.520.000	100	3.562.250.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
		9	Progam Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah	N/A	100	1,417,657,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	1,417,656,000	DPPKA	
				N/A	N/A	N/A	100	1.457.650.000	100	1.586.580.000	100	1.675.540.000	100	1.935.600.000	100	6.655.370.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
		10	Program Peningkatan Pendapatan KPPD Kota Yogyakarta	Kenaikan Pajak daerah KPPD Kota Yogyakarta	N/A	3.75	1,793,200,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.75	1,793,200,000	DPPKA	
		11	Program Peningkatan Pendapatan KPPD Kabupaten Bantul	Kenaikan Pajak daerah KPPD Kabupaten Bantul	N/A	1.29	2,104,038,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.29	2,104,038,000	DPPKA	

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp		Targe t	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
		1 2	Program Peningkatan Pendapatan KPPD Kabupaten Kulon Progo	Kenaikan Pajak daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	N/A	0.86	1,190,994,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.86	1,190,994,000	DPPKA		
		1 3	Program Peningkatan Pendapatan KPPD Kabupaten Gunungkidul	Kenaikan Pajak daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	N/A	3.80	1.173.918.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.80	1.173.918.000	DPPKA		
		1 4	Program Peningkatan Pendapatan KPPD Kabupaten Sleman	Kenaikan Pajak daerah KPPD Kabupaten Sleman	N/A	3.92	2,462,642,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.29	2,462,642,000	DPPKA		
		1 5	Program Peningkatan Pendapatan KPPD	Kenaikan Pajak daerah KPPD Kota Yogyakarta	N/A	N/A	N/A	27,504,784,539	1.578.565.000	33,469,493,520	1.578.895.000	33,886,438,542	1.985.500.000	37,158,446,429	1.968.500.000	37,158,446,429	7.111.460.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
				Kenaikan Pajak daerah KPPD Kab Bantul	N/A	N/A	N/A	29,870,871,974	1.975.000.000	34,709,528,513	1.966.637.000	35,033,162,653	1.785.650.000	38,506,977,121	2.150.625.000	38,506,977,121	7.877.912.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
				Kenaikan Pajak daerah KPPD Kab Kulon Progo	N/A	N/A	N/A	10,026,836,031	985.635.000	11,439,649,138	1.173.587.000	11,557,445,990	975.250.000	12,537,252,508	958.560.000	12,537,252,508	4.093.032.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Kenaikan Pajak daerah KPPD Kab Gunungkidul	N/A	N/A	N/A	9,226,439,263	958.975.000	10,625,298,782	962.750.000	11,028,178,432	985.250.000	12,381,553,649	975.840.000	12,381,553,649	3.882.815.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
				Kenaikan Pajak daerah KPPD Kab Sleman	N/A	N/A	N/A	59,175,201,213	1.958.000.000	69,327,969,944	1.857.850.000	69,836,655,988	1.858.600.000	78,538,848,031	2.159.500.000	78,538,848,031	7.833.950.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
		16	Program Pengelolaan dan Pemberdayaan Aset Daerah	Persentase pengelolaan asset yang dikelola sesuai dengan prosedur.	N/A	100	4,497,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	4,497,000,000	DPPKA
		17	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan prosedur	N/A	N/A	N/A	100	2.165.560.000	100	1.765.450.000	100	1.975.900.000	100	2.488.580.000	100	8.395.490.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
		18	Program Pendayagunaan Barang Daerah	Jumlah potensi BMD yang didayagunakan	N/A	N/A	N/A	57.14	700.690.000	71.43	567.540.000	85.71	802.570.000	100	801.058.000	100	2.871.858.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
4	6		Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan															

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp		Targe t	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
		1	Program Administrasi Perkantoran		100%	100%		2,275,534,040	100%	1.772.185.910,35	100%	1.728.857.466,45	100%	1.861.158.153,40	100%	1.989.637.126,51	100%	9.627.372.696,71	BKD
		2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		100%	100%		1,058,145,400	100%	824.083.637,52	100%	803.935.490,96	100%	865.456.593,34	100%	925.200.562,10	100%	4.476.821.683,92	BKD
		3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		100%	100%		217,500,750	100%	169.389.584,10	100%	165.248.152,63	100%	177.893.754,52	100%	190.174.068,83	100%	920.206.310,08	BKD
		4	Program Perencanaan, Pengadaan Pegawai dan Pengelolaan Data Kepegawaian	1)Persentase Pegawai sesuai Kebutuhan Pegawai (Formasi dan Bezzeting)	70.4	77		2.587.265.000	79.00	2.509.054.296,00	81.00	2.225.190.949,80	83	2.177.703.199,00	85	2.116.394.386,40	85	11.615.607.831,20	BKD
				2)Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan Data Kepegawaian Terintegrasi, Valid, dan Update	23.2	61.6			80.8		90.4		91.3		92.2	92.2			

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp		Targe t	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		5	Program Peningkatan Kualitas SDM dan Pengembangan Karier Pegawai	Persentase Pemenuhan Kompetensi Pegawai	77	79	5.622.266.210	80	3.778.050.132,00	82	3.350.618.189,10	83	3.279.112.720,50	85	3.186.795.958,80	85	19.216.843.210,40	BKD	
		6	Program Pembinaan Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai	Persentase SK Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu	87	87	1.957.652.100	89	2.187.884.964,00	91	1.451.652.684,30	92	2.073.480.312,00	93	1.502.620.294,80	93	9.173.290.355,10	BKD	
		7	Program Peningkatan Penatausahaan Kepegawaian	Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian	B (73,05)	B (75)	125.000.000	B (77)	92.040.000,00	B (79)	84.766.500,00	B (80)	86.030.000,00	A(81,26)	89.580.000,00	A(81,26)	477.416.500,00	BKD	
		8	Program Pengelolaan Pengukuran kompetensi pegawai	Persentase kompetensi individu yang terpetakan	53.16	48.48	2,246,937,000	23.09	1.516.854.600,00	45.57	2.170.421.116,50	49.76	1.924.535.958,50	49.76	1.998.882.655,62	49.76	9.857.631.830,62	BKD	
		9	Program Administrasi Perkantoran		100%	100%	2,020,702,250	100%	1.573.722.912,30	100%	1.535.246.721,07	100%	1.652.731.360,08	100%	1.766.822.269,94	100%	8.549.225.513,39	Badan Diklat	
		10	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		100%	100%	2,878,131,750	100%	2.241.489.006,90	100%	2.186.686.500,56	100%	2.354.022.519,11	100%	2.516.524.773,45	100%	12.176.854.550,02	Badan Diklat	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp		Targe t	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
		11	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		100%	100%	310,958,000	100%	242.174.090,40	100%	236.253.139,12	100%	254.332.392,72	100%	271.889.398,70	100%	1.315.607.020,94	Badan Diklat
		12	Program Pendidikan Penjenjangan	Presentase ASN Peserta Diklat Kepemimpin an yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	5	5	6,860,000,000	10	5.342.568.000	12.5	5.212.197.900	15	5.610.790.570	20	5.998.115.556,00	20	29.023.672.026	Badan Diklat
		13	Program Pendidikan Teknis Fungsional	Presentase ASN Peserta Diklat Teknis Fungsional yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	6.7	6.7	2,779,352,000	10	2.164.554.240	13.3	2.111.633.979	16.7	2.273.225.995	20	2.430.150.128,00	20	11.758.914.342	Badan Diklat
		14	Program Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama Kediklatan	Presentase Realisasi Keikutsertaa n Diklat dari Perjanjian Kerjasama	75	78	198,000,000	81	154.202.400	84	150.432.282	87	161.944.101	90	173.122.905,20	90	837.701.688,20	Badan Diklat

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun -1		Tahun - 2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp		Targe t	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6)	(17)
		15	Program Peningkatan Standarisasi dan Penjaminan Mutu	Nilai Hasil Survey Kepuasan Peserta Diklat	76	77	945,000,000	78	735.966.000	79	717.972.255	80	772.915.027,50	82	826.270.392,80	82	3.998.123.675,30	Badan Diklat	
4	7		Penelitian dan Pengembangan														-		
		1	Program Penelitian Dan Pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung pembanguna n daerah	N/A	N/A	-	60%	500,000,000	70%	963.811.460	90%	1.189.454.550	100%	1.350.475.375	100%	4.003.741.385	Bappeda	



## **BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Penetapan sasaran kinerja daerah disusun berdasarkan tujuan pembangunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi pembangunan. Penetapan sasaran kinerja daerah berdasarkan kerangka pendekatan strategis perencanaan dengan melakukan analisis faktor eksternal dan faktor internal. Sasaran kinerja daerah dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022 pada proses pengukurannya diterjemahkan kedalam indikator kinerja daerah sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja pembangunan dengan penjabaran kinerja jangka menengah kedalam kinerja tahunan.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi gubernur dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau komposisinya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2017-2022 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Lebih lanjut data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (early warning) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

**Tabel VIII-1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Istimewa Yogyakarta**

No	Indikator	Baseline	Target				
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78,38	80,29	80,72	81,08	81,40	81,68
2	Indeks Gini	0,4400	0,3917	0,3846	0,3776	0,3705	0,3635
3	Persentase Angka Kemiskinan	12,36%	11,23%	10,19%	9,11%	8,07%	7,00%
4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,80	69,91	70,02	70,12	70,22	70,32
5	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi	10,98 %	11.46%	11.68%	11.72%	11.99%	12.04%
6	Pertumbuhan Ekonomi	5,21%	5,24%	5,26%	5,29%	5,31%	5,34%
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	56,65	58,58	60,51	62,44	64,18	66,15
8	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	75%	76.5%	78%	79.5%	81%	82.5%
9	Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	11.11%	21,11%	30,42%	40,69%	49,03%	54,44%
10	Indeks Williamson	0.4662	0,4559	0,4552	0,4524	0,4506	0,4489
11	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	Nilai Akuntabilitas Pemerintah	A	A	A	A	A	A
13	Persentase capaian program urusan keistimewaan	N/A	65.22	73.91	82.61	86.96	91.30
14	Bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan	5.369	7.919	9.419	13.419	17.619	21.877

**Tabel VIII-2 Penetapan Indikator Kinerja Kunci Daerah Istimewa Yogyakarta**

No	Indikator	Baseline	Target				
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Urusan Pendidikan						
1	Rata-rata hasil ujian nasional SMA	57,39	57,45	58,03	58,22	58,30	58,41
2	Rata-rata hasil ujian nasional SMK	57,43	57,65	57,89	58,02	58,16	58,29
3	Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah	95,98%	96,91%	97,25%	98,39%	98,39%	98,63%
4	Capaian APK pendidikan Menengah	93,38%	95,03%	96,72%	98,41%	99,05%	99,74%
5	Capaian APK pendidikan khusus	78,64%	80,21%	81,78%	83,36%	84,93%	86,50%
	Urusan Kesehatan						
1	Persentase puskesmas melaksanakan program Jogja Sehat dengan pendekatan keluarga	42,97%	67,77%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator	Baseline	Target				
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	Persentase Pelayanan Kesehatan Yang Terakreditasi	57,63%	64,89%	67,18%	69,08%	70,99%	73,28%
3	Persentase Pemenuhan standar mutu pelayanan kesehatan jiwa	50%	55%	60%	65%	70%	75%
4	Persentase Pemenuhan Standar Mutu Pelayanan kesehatan Paru	68,3%	73,2%	74,8%	77,2%	78,9%	81,3%
<b>Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>							
1	Persentase Penduduk Berakses Sanitasi	88,91%	90,69%	91,58%	92,47%	93,36%	94,25%
2	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	85,27%	86,98%	88,71%	90,49%	92,30%	94,14%
3	Peningkatan luas fungsional Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi	82,5%	83,25%	84%	84,75%	85,5%	86,25%
4	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	87,38%	88,60%	64,66%	71,41%	79,42%	87,81%
5	Peningkatan kinerja penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan	22,78%	24,84 %	27,69 %	35,38 %	40,42 %	44,49 %
6	Peningkatan aksesibilitas Jalan	N/A	94,28%	95,76%	96,74%	98,22%	100%
7	Peningkatan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi	N/A	47,69%	60,41%	73,14%	85,86%	99,57%
<b>Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>							
1	Persentase Penduduk yang menempati tempat tinggal yang layak	94,15%	94,82%	95,49%	96,16%	96,83%	97,50%
<b>Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>							
1	Skor Indeks Ketahanan Nasional DIY di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya	2,98	2,98	2,97	2,99	3,3	3,01
2	Rerata Jumlah Desa/kelurahan yang Melakukan Upaya Menjaga Keamanan Lingkungan	315	320	330	340	350	360
3	Indeks Ketahanan Daerah	64,5	68	71	74	77	80

No	Indikator	Baseline	Target				
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	<b>Urusan Sosial</b>						
1	Persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial	N/A	42,38%	40,97%	42,17%	43,08%	44,28%
2	Persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesos serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	N/A	51,56%	51,57%	51,58%	51,59%	51,6%
	<b>Urusan Tenaga Kerja</b>						
1	Jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan	357	524	1050	1575	2100	2625
2	Jumlah kesempatan kerja	1,906,045	1,980,354	2,020,452	2,061,962	2,104,824	2,149,001
3	Jumlah kasus yang diselesaikan diluar pengadilan hubungan industrial	3	10	20	30	40	50
	<b>Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>						
1	Prevalensi Kekerasan terhadap perempuan dan anak	0,52	0,48	0,47	0,46	0,46	0,45
	<b>Urusan Pangan</b>						
1	skor Pola Pangan Harapan (PPH)	88,5	89,92	90,22	90,52	90,82	91,12
2	Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan	40,52%	N/A	40,29%	39,74%	39,19%	38,65%
	<b>Urusan Pertanahan</b>						
1	persentase penyelenggaraan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator	Baseline	Target				
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	administrasi pertanahan sesuai regulasi						
2	persentase fasilitasi tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa	19,27%	29,99%	46,51%	59,45%	73,16%	88,67%
<b>Urusan Lingkungan Hidup</b>							
1	persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang lingkungan hidup	85,64%	88,56 %	91,47 %	94,39 %	97,02 %	100 %
<b>Urusan Administrasi Kependudukan dan catatan Sipil</b>							
1	Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK	1	4	7	10	13	15
<b>Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>							
1	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang mampu mendorong pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan	4	4	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>							
1	Umur menikah pertama perempuan	24.30	24.40	24.40	24.40	24.40	24.40
2	Persentase legalitas keluarga (perkawinan dan kelahiran)	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%
<b>Urusan Perhubungan</b>							
1	Kinerja Penyediaan Layanan Angkutan Umum dan tingkat pelayanan jalan	43.67%	44.29%	44.92%	45.54%	46.17%	49.79%
<b>Urusan Komunikasi dan Informatika</b>							
1	Peringkat Keterbukaan Informasi Bagi Badan Publik level Provinsi	9	8	7	6	5	4

No	Indikator	Baseline	Target				
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
1	omzet koperasi (Rp Juta)	3.679.342	3.697.739	3.716.227	3.734.809	3.753.483	3.772.250
2	omzet UKM (Rp Milyar)	N/A	10.483	10.692	10.906	11.124	11.347
3	Kontribusi jumlah WUB terhadap jumlah UKM	0,2%	0,2%	0,3%	0,3%	0,4%	0,4%
	Urusan Penanaman Modal						
1	nilai PMTB dalam PDRB DIY (Rp Juta)	33.428.978,-	36.855.448,-	38.698.221,-	40.633.132,-	42.664.788,-	44.798.028,-
2	Nilai indeks Kepuasan Masyarakat	81	82	83	84	85	85
	Urusan Kepemudaan dan Olahraga						
1	Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan	5%	8,7%	10%	10,9%	11,5%	11,8%
2	Prestasi cabang olah raga	Peringkat 9 POPNAS	Peringkat 9 POPNAS	Peringkat 2 POPWIL	Peringkat 9 POPNAS	Peringkat 2 POPWIL	Peringkat 8 POPNAS
	Urusan Kebudayaan						
1	Jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan	518	568	618	668	718	768
2	Meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum	4,51 %	5,12 %	5,71 %	6,27 %	6,89 %	7,40 %
3	Peningkatan penyelenggaraan even budaya tingkat Provinsi, nasional, internasional di Taman Budaya	2,79 %	5,29 %	5,79 %	7,79 %	10,29 %	12,79 %
4	Peningkatan Kinerja pengembangan Seni Budaya DIY	3,97 %	4,13 %	4,28 %	4,44 %	4,60 %	4,75 %
5	jumlah desa budaya yang naik status menjadi desa mandiri budaya	N/A	N/A	5	10	15	20
	Urusan Perpustakaan						
1	Prosentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan	22%	23%	24%	25%	26%	27%
	Urusan Kearsipan						

No	Indikator	Baseline	Target				
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Peningkatan arsip yang dimanfaatkan	5205	5750	6300	6850	7300	7500
	<b>Urusan Pariwisata</b>						
1	Spending money wisatawan (Rp)	6.328.117,-	7.397.452,-	7.672.683,-	8.123.974,-	8.498.797,-	8.830.595,-
2	Nilai sektor akomodasi dan makan minum dalam PDRB DIY (Rp Juta)	8.274.501,-	9.297.230,-	9.855.064,-	10.446.367,-	11.073.149,-	11.737.538,-
	<b>Urusan Pertanian</b>						
1	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB DIY (Rp Juta)	6.903.079,-	7.041.831,-	7.112.249,-	7.183.372	7.255.205,-	7.327.757,-
	<b>Urusan Kehutanan</b>						
1	Nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY (Rp Juta)	720.236,-	734.713,-	742.060,-	749.480,-	756.975,-	764.545,-
	<b>Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral</b>						
1	Presentase Rumah Tangga berakses listrik	88.66%	93.02%	95.60%	98.14%	99.70%	100.00%
2	Kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan sesuai ketentuan	N/A	27	49	71	93	115
	<b>Urusan Perdagangan</b>						
1	Nilai sektor perdagangan dalam PDRB DIY (Rp Juta)	7.367.624,-	8.122.805,-	8.528.946,-	8.955.393,-	9.403.163,-	9.873.321,-
	<b>Urusan Perindustrian</b>						
1	nilai industri pengolahan dalam PDRB DIY (Rp Juta)	11.234.804	12.151.563	12.637.626	13.143.131	13.668.856	14.215.611
	<b>Urusan Kelautan dan Perikanan</b>						
1	Nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY (Rp Juta)	312.662,-	318.947	322.136	325.357	328.611	331.897
2	Peningkatan status kawasan konservasi	0%	20%	30%	60%	80%	100%

No	Indikator	Baseline	Target				
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Perencanaan Pembangunan						
1	persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah	83,00%	83,50%	84,00%	84,50%	85,00%	85,50%
	Keuangan						
1	Transparansi dan akutanbilitas pengelolaan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Optimalisasi aset di Pengelola Barang Milik Daerah	5.998.050.300	5.950.608.853	6.234.617.858	6.453.519.026	6.704.805.116	6.967.568.518
	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan						
1	Persentase kualitas manajemen SDM Aparatur	76,50%	78,00%	79,50%	81,50%	83,00%	85,00%
2	Akreditasi Badan Diklat	81	91	91	92	92	93
	Penelitian dan Pengembangan						
1	Persentase rumusan bahan kebijakan penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	N/A	50%	55%	60%	65%	70%
	Pengawasan						
1	Persentase penyelesaian TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan)	78%	80%	82%	85%	88%	90%
	Sekretariat Dewan						
1	1) Skor Indek Kepuasan Masyarakat terhadap informasi DPRD (Bobot 50%) 2) Skor Kepuasan layanan Pimpinan dan Anggota DPRD (Bobot 50%)	70%	75%	80%	85%	87%	90%
2	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	95,5%	95,50%	96,00%	96,00%	96,50%	96,50%
	Sekretariat Daerah						
1	persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1	N/A	80%	85%	90%	95%	100%

No	Indikator	Baseline	Target				
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	Persentase bahan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang menjadi rumusan kebijakan	N/A	70%	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Persentase bahan kebijakan pengelolaan pembangunan masyarakat yang menjadi rumusan kebijakan	N/A	70%	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Nilai rerata pimpinan dan tamu terhadap layanan keprotokoleran, kerumahtanggaan, dan persandian serta persuratan	92%	86%	86%	87%	88%	88%
5	Jumlah instansi penyelenggara pelayanan publik pada zona hijau	1	4	10	16	23	31
6	Persentase jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	Persentase Kualitas produk hukum, layanan hukum dan layanan informasi produk hukum	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
8	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	78%	79%	79,7%	80,5%	81,5%	83%
9	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama yang direspon dengan kebijakan	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
10	Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi di bidang infrastruktur daerah dan pembiayaan pembangunan non	N/A	50%	65%	65%	80%	80%

No	Indikator	Baseline	Target				
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	pemerintah yang ditindaklanjuti						
11	Persentase rumusan bahan Kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual	N/A	N/A	75%	84%	92%	100%
12	rumusan bahan Kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan pemberdayaan masyarakat	N/A	N/A	4	4	4	4
13	Lembaga kemasyarakatan yang mampu mendorong pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan	N/A	N/A	4	4	4	4
14	Skor Indeks kepuasan masyarakat terhadap informasi pemerintah daerah	N/A	80	82	84	86	88
15	Peningkatan kepuasan jumlah stakeholder yang mendapatkan layanan kaperda	60	84	N/A	N/A	N/A	N/A
16	Peningkatan kualitas layanan kaperda	N/A	N/A	87	88	89	90
17	rerata persentase capaian kinerja fisik dan keuangan program-program urusan keistimewaan	97,7	97,8	97,9	98	98,1	98,2
18	Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai prosedur	100	-	-	-	-	100

## **BAB IX    PENUTUP**

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 ini pada dasarnya menjabarkan suatu perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan ke mana daerah Daerah Istimewa Yogyakarta akan diarahkan perkembangannya, dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang (2017-2022); bagaimana mencapainya; dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai sesuai visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Periode RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta ini disesuaikan dengan masa jabatan kepala daerah, yakni 2017-2022. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2022 ini disusun dengan mempertimbangkan hasil kajian dan konsepsi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005- 2025, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Selain itu juga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program pembangunan yang termuat dalam RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017, serta mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 ini menjadi landasan dan rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 ini akan dijabarkan ke dalam rencana pembangunan tahunan daerah, yakni Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta, yang merupakan dokumen perencanaan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode satu tahun.

Selanjutnya, Gubernur DIY dan DPRD DIY nantinya akan menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang rancangan Perda RPJMD kepada seluruh masyarakat dan stakeholder terkait sesuai dengan amanat ketentuan pasal 253 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

### **IX.1    Pedoman Transisi**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2018 hingga 2022. Perencanaan pembangunan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD 2005-2025 Daerah Istimewa Yogyakarta dan mengacu pada RKP Tahun 2023. Hal ini

didasarkan pada tahun 2023 merupakan masa transisi antara perodesasi RPJMD 2017-2022 dengan RPJMD periode 2022-2027, dimana dalam tahun 2023 masih dalam proses penyusunan.

Selama kurun waktu lima tahun ke depan, diasumsikan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dirumuskan dalam RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 ini telah dilaksanakan dengan konsisten oleh lembaga perangkat daerah, yang didukung peran aktif seluruh stakeholders dan partisipasi masyarakat. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi fondasi bagi kesinambungan pelaksanaan program-program pembangunan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta periode berikutnya.

Secara garis besar, pembangunan yang berlangsung lima tahun ke depan bukan saja diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan publik, terutama di bidang pendidikan, dan kesehatan, perekonomian rakyat yang semakin berdaya, makin berkurangnya jumlah penduduk dan keluarga miskin, dan berkurangnya jumlah pengangguran, tetapi sekaligus diharapkan kesenjangan atau disparitas antara wilayah yang tertinggal dan wilayah yang sudah maju dapat berkurang secara signifikan, dan berbagai fasilitas layanan publik yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta juga diharapkan dapat berjalan dengan baik, karena didukung kinerja aparat pemerintahan yang bersih, kreatif, inovatif, disiplin, dan akuntabel.

Program transisi tahun 2023 sudah barang tentu akan dirumuskan dengan tetap berusaha menjamin keberlanjutan dari apa yang telah dilaksanakan dan dicapai pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk periode selanjutnya, program pembangunan yang dikembangkan dapat lebih banyak berorientasi pada upaya memfasilitasi dan memberi berbagai kemudahan ekonomi (*economic facilities*) yang benar-benar nyata, dan peluang-peluang sosial (*social opportunities*) yang adil kepada masyarakat. Kemudahan ekonomi adalah kesempatan dan makin terbukanya akses masyarakat terhadap berbagai sumber-sumber produksi dan pasar. Sedangkan peluang-peluang sosial adalah upaya meningkatkan kesempatan masyarakat melakukan mobilitas sosial-ekonomi secara vertikal didukung kualitas pendidikan dan kesehatan yang baik, serta makin meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai sendi kehidupan.

## **IX.2 Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif, dan penuh tanggung jawab, dengan kaidah-kaidah pelaksanaan, sebagai berikut:

1. Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2017-2022 ini dengan sebaik-baiknya.
2. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2018 hingga 2022.
3. Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja masing-masing, yang berpedoman pada RPJMD

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja (Renja Perangkat Daerah).

4. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Renstra-PD Kabupaten/Kota, harus memperhatikan RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022.
5. Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja dan RPJMD Kabupaten/Kota.
6. Konsepsi prioritas dalam dokumen RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 ini baik mengenai aspek program maupun wilayah, hanya mempunyai implikasi terhadap konsentrasi intervensi terhadap program dan wilayah prioritas, baik dalam kerangka anggaran maupun kegiatan, dan tidak berimplikasi terhadap peniadaan program maupun wilayah non-prioritas.
7. Konsepsi deskripsi program prioritas dan program penunjang beserta kegiatan pokoknya tidak berimplikasi pada besaran pengalokasian belanja, tetapi lebih pada logika alur berpikir mengenai skala prioritas pentingnya sebuah program beserta kegiatan pokoknya dalam mewujudkan sasaran pembangunan yang diagendakan.
8. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Daerah Istimewa Yogyakarta berkewajiban melakukan fasilitasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Untuk menjaga sinergitas, harmonisasi dan sinkronisasi dengan RPJMD kabupaten/kota, maka Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta berkewajiban melaksanakan fasilitasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap Kabupaten/Kota.

**GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**HAMENGKU BUWONO X**